RENCANA KERJA 2025
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Jl Simarpinggan km.07 email : angkolaselatankab@gmail.com Instagram : kantor_camat_angsel



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KECAMATAN ANGKOLA SELATAN

JL. Padangsidimpuan - Simarpinggan Km.07

SIMARPINGGAN

KEPUTUSAN CAMAT ANGKOLA SELATAN

NOMOR : 028 / 73 /2025

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA TIM PENYUSUN RENJA

KECAMATAN ANGKOLA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT ANGKOLA SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatana Tahun Anggaran 2025 perlu kiranya diangkat Tim Penyusunan Renja Tahun 2025 ;

b. Bahwa Tim Penyusunan Renja sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Camat Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 002/PR/2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun Tahun 2019 tentang Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Penyusunan Renja pada Kantor Camat Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025.sebagaimana Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusunan Renja dimaksud mempunyai Tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan bahan-bahan/materi serta keperluan lain dalam proses Pelaksana penyusunan Renja pada Kantor Camat Angkola Selatan
2. Melaporkan hasil Renja kepada Camat Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Angkola Selatan Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simarpinggan

pada tanggal : 22 Januari 2025

CAMAT ANGKOLA SELATAN



DODY KURNIAWAN, S.AP, MM

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19810816 200212 1003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT ANGKOLA SELATAN

NOMOR : 028 / 73 /2025

TANGGAL : 22 Januari 2025

TENTANG :

SUSUNAN PANITIA TIM PENYUSUNAN RENJA

KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	INSTANSI	KET
1.	SYAHWIN HARAHAP S.Pd, MM NIP. 19840207 200904 1 004	KETUA	KANTOR CAMAT ANGKOLA SELATAN	
2.	OLOAN PULUNGAN, SH NIP. 19701005 198909 1 001	SEKRETARIS	KANTOR CAMAT ANGKOLA SELATAN	
3.	AMIDA, SH NIP. 19720415 199303 2 003	ANGGOTA	KANTOR CAMAT ANGKOLA SELATAN	
4.	SAIFUL AHYAR BATUBARA S.Pd NIP. 19800409 200904 1 003	ANGGOTA	KANTOR CAMAT ANGKOLA SELATAN	
5.	FITRIYAH AFIYATUL RAHMA HRP, SE NIP. 197903292007012002	ANGGOTA	KANTOR CAMAT ANGKOLA SELATAN	
6.	SABAN YUHARJA SIREGAR S.Sos NIP. 19810614 200312 1 005	ANGGOTA	KANTOR CAMAT ANGKOLA SELATAN	

Ditetapkan di : Simarpinggan

Pada Tanggal: 22 Januari 2025

CAMAT ANGKOLA SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN

DODY KURNIAWAN, S.AP, MM

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19810816 200212 1003

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Angkola Selatan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Angkola Selatan disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Angkola Selatan Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2024, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Angkola Selatan

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Angkola Selatan terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lem
3. Undang-Undang Nomor 33baran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penentapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor ..... Tahun ……. tentang Rencana Strategis ……. Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor ……);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 1178);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Angkola Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Angkola Selatan ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kineija penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun beijalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kineija tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kineija pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kineija pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Bab V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ANGKOLA SELATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angkola Selatan Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi anggaran Belanja untuk Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 6.345.413.339,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.246.504.683, dan Belanja Modal sebesar Rp. 98.908.656,- Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 6.469.608.568,- atau sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut: · Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 6.416.112.048,- atau 100 % Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 53.496.520,- atau 54 %.

Tabel 2.1.1

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kecamatan Angkola Selatan									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									
	7	01				KECAMATAN									
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	7	01	00			***PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKATAN HUKUM ADAT***	***Persentase Desa berstatus berkembang (%)***	**100**	**83,50**	**83,50**	**83,50**	**83,50**	**6020**	**6020**	**100**
	7	01	00	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Dibidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan Masyarakat/LPM (Lembaga)	8	8	8	8	100	8		100
	7	01	00	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejateraan Keluarga	Pelaksanaan Pembinaan PKK Desa dan Kelurahan (bulan)	12	12	12	12	100	12	12	100
	7	01	01			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.01		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Terpenuhinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil musrembang desa/kelurahan Jumlah dokumen perencanan dan penganggaran kecamatan	3	3	3	3	100	3	3	100
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100
	7	01	01	2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan) dan TPP (orang/Bulan)	35	35	35	35	100	35	35	100
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	keikutsertaan dalam Pelaksanaan Safari Ramadhan keikutsertaan dalam peringatan HUt Tapanuli Selatan terlaksananya Festifal Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten terlaksananya kegiatan Peringatan isra Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan	8	8	8	8	100	8	8	100

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Terlaksananya Peringatan HUT RI di Kecamatan terlaksananya Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriyah di Kecamatan (Kali)									
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahhaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi dan Keuangan Kantor (Orang)	3	3	3	3	100	3	3	100
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran (dokumen)	2	2	2	2	100	2	2	100
	7	01	01	2.05		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Terpenuhinya Baju Dinas ASN pakaian adat (tahun)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*1*	*100*
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (pcs)	35	35	35	35	100	35	35	100
	7	01	01	2.05	09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	0	0	0	0	0	2	2	100
	7	01	01	2.06		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)*	*12*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*12*	*100*
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik Kantor (paket)	1	1	1	1	100	1	1	100
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	1	1	1	1	100	8	8	100
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (paket)	12	12	12	12	100	1	1	100

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Untuk Pelaksanaan TugasTugas (bulan) terpenuhinya kebutuhan makanan rapat (kotak) terpenuhinya snack rapat (kotak)	2	2	2	2	100	2	2	100
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (paket)	3	3	3	3	100	5	5	100
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbayarnya Surat Kabar (terbitan)	2	2	2	2	100	2	2	100
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (oh) Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (laporan)	69	69	69	69	100	54	54	100
	7	*01*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Terbayarnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*	*12*	*12*	*12*	*12*	*100*	*2*	*2*	*100*
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik dan Jasa Komunikasi (Bulan)	3	3	3	3	100	3	3	100
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya dan Terjanganya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	12	12	12	12	100	3	3	100
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pembayaran Gaji THL Kantor dan Iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan (Orang)	8	6	6	6	100	8	8	100
	7	*01*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*terjaganya barang milik daerah(bulan)*	*12*	*12*	*12*	*12*	*100*	*5*	*5*	*100*
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kenderaaan Dinas	Terbayarnya Pajak Kenderaan Dinas Roda 4 terbayarnya (unit) pemeliharaan dan Operasional Kenderaan Dinas roda 4 (bulan)	3	3	3	3	100	3	3	100

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Operasional Atau Lapangan									
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (unit)	1	1	1	1	100	1	1	100
	7	01	02			***PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN***		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	*01*	*02*	*2.02*		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan*	*berpungsinya Perpustakaan di Kecamatan (tahun)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*1*	*100*
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (laporan)	12	12	12	12	100	12	12	100
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Terselesaikannya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi (dokumen)**	1	1	1	1	100	1	1	100
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Dokumen Hasil Monitoring dan Evauasi Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100
	7	01	03			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	*01*	*03*	*2.01*		*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*terlaksananya kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Event Olahraga yang dilaksanakan di Kecamatan selama 1 Tahun (event) Jumlah Kegiatan Gotong Royong Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Kecamatan (Kali) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi,didorong, dipantau oleh Pihak Kecamatan (kali)								
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	-				6020	6020	100
	7	*01*	*03*	*2.02*		*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (tahun)*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	7	01	03	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan**	**100**	**56**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							baik(%)								
	7	01	05	2	01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik(%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	-	-	-	-	-	200	200	100
	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)		-	-	-	-	1200	1200	100

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	06			***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	***Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu (%)***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tertibnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Desa dan Kelurahan(tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Asset Desa	Tersedianya Dokumen Tentang Data PAD Yang Mutakhir (Dokumen)	1	1	1	1	1	12	12	100
	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	36	36	36	36	36	12	12	100
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	1	100
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lmbaga Kemasyarkatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	1	100
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (dokumen)	-	-	-	-	-	1	1	100
						Kelurahan Napa									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01				KECAMATAN									
	7	01	03			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan		100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	4	4	4	4	100	4	4	100
						Kelurahan Simarpinggan									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									
	7	01				KECAMATAN									
	7	01	03			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan		100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan		100	100	100	100	100	100	100	100

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan		100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		100	100	100	100	100	100	100	100
						Kelurahan Tapian Nauli									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									
	7	01				KECAMATAN									
	7	01	03			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan		100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
						Kelurahan Pardomuan									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									
	7	01				KECAMATAN									
	7	01	03			***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kelurahan								
	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan		100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Angkola Selatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati:

Kecamatan Angkola Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Kecamatan Angkola Selatan mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan

Tabel 2.1.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2024

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan Pemerintahan dan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Angkola Selatan memiliki lingkup pelayanan wilayah. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Angkola Selatan memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Angkola Selatan tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness) :

a. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai.
b. Adanya Peraturan Daerah No. 113 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.
d. Kondisi gedung perkantoran Kecamatan.

Kelemahan (Weakness) :

a. Sumber Daya dan Kompetensi Aparatur Kecamatan yang kurang
b. Koordinasi dengan OPD belum Optimal
c. Profesionalisme SDM Aparatur belum optimal
d. Jarak Antar Desa yang jauh dan Jaringan Internet di beberapa Desa masih belum memadai

Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity)

a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja Kecamatan
b. Tersedianya pejabat struktural tentang perencanaan pada setiap OPD
c. Lembaga penyelenggara diklat teknis dan fungsional perencanaan cukup memadai
d. Koordinasi Forkopincam yang Sinergi

Tantangan (Threat)

a. Tuntutan masyarakat tentang pembangunan dan Pemberdayaan semakin besar dan kritis
b. Penempatan pegawai Kecamatan kurang mempertimbangkan kemampuan dan keahlian

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Angkola Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Angkola Selatan, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dan mempertimbangkan asas kepatutan, serta ada beberapa target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Angkola Selatan**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**3.552.124.148**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Angkola Selatan**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**3.579.476.815**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Angola Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	19.530.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Angkola Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	20.059.691	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.151.858.648	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.151.858.648	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	32.787.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	36.066.360	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	165.938.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	182.531.800	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Angkola Selatan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	177.251.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Angkola Selatan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	184.083.878	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	4.757.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	4.876.438	

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Angkola Selatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**83**	**16.700.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Angkola Selatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**83**	**30.900.000**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Angkola Selatan	Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	13	16.700.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Angkola Selatan	Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	13	30.900.000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Kegiatan Olah Raga Yang Berkembang di Masyaraka	-	0	Terlaksananya Kegiatan Olah Raga Yang Berkembang di Masyaraka	Kec. Angkola Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Angkola Selatan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	**84.503.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Angkola Selatan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	**87.100.600**	
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Angkola Selatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	**2**	34.503.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Angkola Selatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	**2**	34.503.000	
1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Angkola Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4	50.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Angkola Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100	52.597.600	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Angkola Selatan**	**Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan**	**8**	**561.552.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Angkola Selatan**	**Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan**	**8**	**561.552.500**	

1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	8	450.679.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	8	450.679.400	
2	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	2	110.873.800	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	2	110.873.800	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Angkola Selatan**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**108.538.500**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Angkola Selatan**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**108.538.500**	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	108.538.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	108.538.500	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Angkola Selatan**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan**	**100**	**1.579.185.800**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Angkola Selatan**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan**	**100**	**1.964.982.000**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Napa	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	434.701.600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	434.701.600	

2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Simarpinggan	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	397.881.200	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	397.881.200	
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tapian Nauli	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	419.260.800	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	419.260.800	
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pardomuan	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	713.138.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Angkola Selatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	713.138.400	
					6.288.400.148					**6.332.550.415**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri dalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Kecamatan Angkola Selatan tahun 2024 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel T 2.1.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Angkola Selatanq

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan Angkola Selatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan.

Pelaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya visi dan misi Bupati Tapanuli Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah satu kesatuan tata cara penyelengaaran Pemerintahan di Kecamatan yang meliputi Desa dan Kelurahan dan peningkatan pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transmisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

7. Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2025

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Nilai Tukar Nelayan
5. Ratio Gini
6. Indeks pembangunan manusia
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pada Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dengan Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah khususnya pada Indikator Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B ke Atas SAKIP.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan indikator kineija sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kineija. Atas dasar

pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dengan indikator:
    1. Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan
    1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

Tabel. 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi		Target	
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	75	75	75	75

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

i. Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Ke-4 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indicator kinerja sasaran pada Kecamatan Angkola Selatan masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke 4 Kabupaten Tapanuli Selatan
b. Pencapaian Target Indikator Kinerja Program yakni

ii. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 8 (delapan) program 14 (empat belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1
Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
		Administrasi kepegawaian peraangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan atributnya
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasaarkan tugas dan fungsi
		Administrasi Umum perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi Listrik/peneraangan bangunan kantor
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			Penyediaan peralatan rumah tangga
			Penyediaan Bahan Logistik kantor
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN**	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan
		Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
VII	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
VIII	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target	Rupiah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Kecamatan Angkola Selatan				4.625.764.908,00		4.711.286.627
7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.625.764.908,00		4.711.286.627
7	01				KECAMATAN				4.625.764.908,00		4.711.286.627
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.625.764.908,00		4.711.286.627
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				**14.530.900,00**		**14.708.720,00**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5.230.600,00	5	5.408.420,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	9.300.300,00	1	9.300.300,-
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				**3.181.678.648,00**		**3.182.692.528,00**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	3.151.858.648,00	35 Orang/bulan	3.151.858.648
						Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	Orang/bulan	3	29.820.000,00	3 orang/bulan	30.833.880,00
7	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***						**29.680.000,00**
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang/bulan	-	-	35 orang/bulan	16.400.000,00
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Oang/kali	-	-	2 Orang	13.280.000,00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**709.336.060,00**		**730.960.379,00**

7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	3.133.500,00	1 Paket	3.240.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	211.475.700,00	8 Paket	218.665.800,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	11.250.000,00	1 Paket	11.632.500,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	113.000.000,00	2 Paket	116.842.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	29.520.000,00	5 Paket	30.570.600,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	6.000.000,00	2 dokumen	6.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	54	39.458.000,00	54 Laporan	40.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan yang disediakan	laporan	3	10.762.200,00	3 Laporan	11.137.900,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	20.974.956,00	2 Laporan	21.688.104,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	198.696.704,00	8 Laporan	205.452.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan laiinya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	-	-
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	65.065.000,00	5 Unit	65.065.475,00

7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	645.000,00	1 unit	666.000,00
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**16.700.000,00**		**44.900.000,00**
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	-	-	-	-
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13	16.700.000,00	13 Laporan	30.900.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya kegiatan olehraga yang berkembang di masyarakat	-	-	-	2 laporan	14.000.000,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**52.597.600,00**		**54.385.000,00**
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-	-	-	-	-
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	laporan	6020	52.597.600,00	6020 Keluarga	54.385.000,00
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**561.553.200,00**		**561.553.200,00**
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pelaksanaan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	Laporan	200	110.873.800,00	200	110.873.800,00
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan	1.200	450.679.400,00	1200 Orang	450.679.400,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**89.368.500,00**		**92.406.800,00**

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	18.000.000,00	12 Dokumen	18.612.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12	19.472.200,00	12 Dokumen	20.134.200,00
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	7.786.300,00	1 Dokumen	8.051.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	23.406.800,00	1 Dokumen	24.202.600,00
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	20.703.200,00	1 Dokumen	21.407.000,00
					Kelurahan Napa				**434.701.200,00**		**446.761.300,00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN				**434.701.200,00**		**446.761.300,00**
7	01				KECAMATAN				**434.701.200,00**		**446.761.300,00**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**434.701.200,00**		**446.761.300,00**
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	6	5.400.000,00	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.583.600,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	80.000.000,00	2 Unit	80.000.000,00

7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	6	305.712.000,00	6 Pokmas / Ormas	316.106.500,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	1	43.589.200,00	1 Laporan	45.071.200,00
					Kelurahan Simarpinggan				**397.881.100,00**		**447.418.000,00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN				**397.881.100,00**		**447.418.000,00**
7	01				KECAMATAN				**397.881.100,00**		**447.418.000,00**
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**397.881.100,00**		**447.418.000,00**
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	6	5.400.000,00	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.583.600,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	3	90.000.000,00	3 Unit	90.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ormas	6	258.989.800,00	6 Pokmas / Ormas	306.864.400,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	1	43.491.300,00	1 Laporan	44.970.000,00
					Kelurahan Tapian Nauli				**419.610.500,00**		**448.394.500,00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN				**419.610.500,00**		**448.394.500,00**
7	01				KECAMATAN				**419.610.500,00**		**448.394.500,00**
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**419.610.500,00**		**448.394.500,00**
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	6	5.400.000,00	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.583.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	unit	4	102.408.000,00	4 Unit	120.408.000,00

						Terbangun					
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ormas	6	268.394.900,00	6 Pokmas / Ormas	277.520.000,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	1	43.407.600,00	1 Laporan	44.883.500,00
					Kelurahan Pardomuan				**713.138.400,00**		**737.305.000,00**
7					UNSUR KEWILAYAHAN				**713.138.400,00**		**737.305.000,00**
7	01				KECAMATAN				**713.138.400,00**		**737.305.000,00**
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**713.138.400,00**		**737.305.000,00**
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	6	5.400.000,00	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.583.600,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	4	120.000.000,00	4 Unit	124.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ormas	6	543.996.000,00	6 pokmas/ormas	562.491.800,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	43.742.400,00	1 Laporan	45.229.600,00
					TOTAL				**6.591.096.108,00**		**6.791.165.427,00**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Kecamatan Angkola Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Simarpinggan, 22 Januari 2025

CAMAT ANGKOLA SELATAN



Dody Kurniawan SAP,MM

NIP. 19810806 200212 1 003

RENJA
(RENCANA KERJA)

KECAMATAN ANGKOLA TIMUR TAHUN 2025

PEMRINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
Jln. Lintas Sipirok Km. 14 – Pargarutan
Kode Pos : 22733, Telepon. ( ) Faks. ( )
E-mail : kec.angkolatimur@gmail.com Website : www.angkola timur.tapselkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT ANGKOLA TIMUR

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 050 / 38 / 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

CAMAT ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan pasal 273 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu setiap SKPD menyusun dan menetapkan Rencana Kerja sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah satu tahunan yang telah ditetapkan Kepala Daerah dalam suatu Peraturan Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana huruf a Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Tahun 2025

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1092);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 Nomor 186);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor % Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daeerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tanun 2023 Nomor 328);
24 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Beritan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
25 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Urusan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Tahun 2016 Nomor 659);
26. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun 2016 Nomor 668);

27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kantor Camat Angkola Timur kabupaten tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan Angkola Timur adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
7. Camat Angkola Timur adalah Pimpinan di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. Kantor Camat Angkola Timur mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan pelaksanaan tahap ke IV dari RPJP Daerah terhitung sejal tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen Perencanaan Strategis untuk 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum menganai upaya-upaya yang akan dilaksnakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Kantor Camat Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta mempeoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manuasia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebaai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
22. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
23. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi baik tentang sumber daya yang xdiperlukanmaupan keluaran dan dampak yang tercamtum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yan hendak dicapai dan tidak kaku.
24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

25. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan , proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA KERJA KANTOR CAMAT ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dalam satu tahun berjalan 2025.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1) Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah agar program, kegiatan dan indikator kinerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 lebih realistis sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah yang terjadi serta kemampuan keuangan daerah yang ada melalui efesiensi ataupun penajaman berbagai program kegiatan, pergeseran antar unit organisasi, antar unit kegiatan dan antar unit belanja sehingga optimalisasi pencapaian target kinerja dan sasaran program kegiatanyang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat tercapai sebagaimana diharapkan.
2) Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 untuk dapat dijadikan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN
BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

BAB V

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pasal 5

1) Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan ini merupakan dokumen perencanaan 1 tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan target capaian kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
2) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman bagi Kantor Camat Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

1) Camat Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur meliputi

pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

2) Kantor Camat Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan wajib membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur yang berisi uraian tentang capaian dari masing-masing indikator kinerja program;
3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan paling lambat empat belas hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kantor Camat Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 7

Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan menelaah dan memverifikasi kesesuaian antara Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Surat Keputusan ini belaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Pargarutan
Pada tanggal : 10 Juli 2024

CAMAT ANGKOLA TIMUR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



COS RIADY SIREGAR, S.H., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19781009 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat ALLah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angkola Timur tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Angkola Timur berpedoman pada Renstra Kecamatan Angkola Timur Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2023, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Angkola Timur

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan dan secara bijaksana akan berupaya dalam melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, saran, masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angkola Timur.

Pargarutan, 10 Juli 2024

CAMAT ANGKOLA TIMUR



COS RIADY SIREGAR, S.H., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19781009 200212 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ANGKOLA TIMUR TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angkola Timur Tahun lalu 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah 33
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 38

BAB V PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kecamatan Angkola timur Kabupaten Tapanuli Selatan	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkola Timur kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2023	23
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan	27
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Selatan	31
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
Tabel 3.3	Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	35
Tabel	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Angkola Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Angkola Timur Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2023, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Angkola Timur

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Angkola Timur terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);

19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1053);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Angkola Timur ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Angkola Timur Tahun 2025 ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kineija penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kineija tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kineija pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Bab V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ANGKOLA TIMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angkola Timur Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi anggaran Belanja untuk Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 5.298.179.901 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 5.267.193.801 dan Belanja Modal sebesar Rp. 30.986.100,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 5.009.799.997,- atau sebesar 94,56% dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 4.978.813.897,- atau 99,38% Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 30.986.100,- atau 100%.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.13	URUSAN PEMERINATAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa berstatus Berkembang (%)	*12-*	*12*	*12*	*12*	100	-	-	
			Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdaya an Masyarakat/LPM (Lembaga)	8	8	8	8	100	-	-	

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)**	8	8	8	8	100	-	-	-
	1.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dab Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (dokumen)	3	3	3	3	100	-	-	-
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)***	***100***	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	**100**	**100%**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Terpenuhinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)***	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*3*	*3*	*3*	3	100	*2*	*2*	100
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	*1*	*1*	*1*	1	100	*1*	*1*	100
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	***100***	***100***	**100%**

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	33	30	30	30	100	30	30	100
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	8	8	8	8	100	-	-	100
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	2	2	2	2	100	2	2	100
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	2	2	2	2	100	-	-	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2	3	3	3	100	3	3	150
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	100	2	2	100
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	2	1	50	2	2	100
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	100	1	1	100
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	100	2	2	100
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	3	3	100	3	3	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	**9**	10	11	12
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	13	13	13	13	100	13	13	100
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	*150*	*170*	*175*	170	97	*150*	*150*	100
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	***100***	***100***	**100%**
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	*250*	*250*	*250*	250	100	*250*	*250*	100
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	*12*	*12*	*12*	12	100	*12*	*12*	100
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	*12*	*12*	*12*	12	100	*12*	*12*	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	***100***	***100***	**100%**
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	*2*	*2*	*2*	2	100	*2*	*2*	100
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	*1*	*1*	*1*	1	100	-	-	100
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan (%)**	***80***	***80***	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (%)**	***100***	***100***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	12	100	12	12	100
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	***100***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	13	13	100	-	-	100
	7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (%)**	-	-	-	-	-	**100**	**100**	**100**
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	--	--	-	-	-	150	150	100
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik(%)**	-	-	-	-	-	**100**	**100**	**100**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-	-	-	**100**	**100**	**100**

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	-	--	-	-	--	500	500	100
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	-	--	-	-	-	1500	1500	100
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13	13	13	13	100	13	13	100
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	1	100
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lmbaga Kemasyarkatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	--	--	-	-	-	1	1	100
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	1	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan Pasar Pargarutan									
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan***	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	-	-	-	-	-	3	3	100
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	2	2	100	2	2	100
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	3	3	3	3	100	3	3	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (laporan)	12	12	12	12	100	12	12	100
		Kelurahan Batangtura Sirumambe									
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)**	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan***	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	-	-	-	-	-	3	3	100
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3	3	3	100	4	4	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	3	3	3	3	100	3	3	100
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (laporan)	12	12	12	12	100	12	12	100

Pada tabel diatas dapat dilihat target dan capaian kinerja tahun 2023 dan target kinerja tahun 2024 terdapat ada beberapa kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 yang tidak dipakai pada tahun 2024 dikarenakan adanya penyesuaian Prgram, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kantor Camat Angkola Timur pada tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Angkola Timur merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati:

Kecamatan Angkola Timur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Kecamatan Angkola Timur mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2023

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)			80	80	80	80	80	80	80,28	80,33	81	82	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan Pemerintahan dan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Batang Angkola memiliki lingkup pelayanan wilayah. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Batang Angkola memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Angkola Timur tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness) :

a. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai.
b. Adanya Peraturan Daerah No. 113 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.
d. Kondisi gedung perkantoran Kecamatan yang memadai

Kelemahan (Weakness) :

a. Sumber Daya dan Kompetensi Aparatur Kecamatan yang kurang
b. Struktur organisasi belum optimal
c. Koordinasi dengan OPD belum Optimal
d. Profesionalisme SDM Aparatur belum optimal

e. Jarak antara beberapa Desa yang jauh dan Jaringan Internet di beberapa Desa masih belum memadai

Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity)

a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja Kecamatan
b. Tersedianya pejabat struktural setiap Seksi dan Subbag di Kecamatan
c. Lembaga penyelenggara diklat teknis dan fungsional perencanaan cukup memadai
d. Koordinasi Forkopincam yang Sinergi

Tantangan (Threat)

a. Tuntutan masyarakat tentang pembangunan semakin besar dan kritis
b. Penempatan pegawai Kecamatan kurang mempertimbangkan kemampuan dan keahlian

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Angkola Timur dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Angkola Timur, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, terdapat masih mengadopsi program dan

kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dan mempertimbangkan asas kepatutan, serta ada beberapa target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Angkola Timur**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**3.567.683.078**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Angkola Timur**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**3.631.864.278**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Angkola Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	19.474.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Angkola Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	19.474.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.872.710.118	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.872.710.118	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	20.307.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	53.691.200	Penambahan Kegiatan dan koefisien
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	266.274.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	266.274.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Angkola Timur	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	343.649.760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Angkola Timur	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	343.649.760	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	45.266.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	76.063.800	Penambahan Kegiatan
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Angkola Timur**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**80**	**49.605.600**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Angkola Timur**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	80	**49.605.600**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Angkola Timur	Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	20.137.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Angkola Timur	Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	20.137.800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Kegiatan Olah Raga Yang Berkembang di Masyarakat	1	29.467.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Kegiatan Olah Raga Yang Berkembang di Masyarakat	1	29.467.600	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Angkola Timur**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	**54.647.600**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Angkola Timur**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	**54.647.600**	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Angkola Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	3	54.647.600	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Angkola Timur	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3	54.647.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Angkola Timur**	**Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan**	**100**	**329.881.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Angkola Timur**	**Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan**	**100**	**329.881.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	8	329.881.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Angkola Timur	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	8	329.881.000	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Angkola Timur**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**157.556.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Angkola Timur**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**104.867.500**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Angkola Timur	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13	157.556.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Angkola Timur	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13	104.867.500	Pengurangan Anggaran Belanja
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Angkola Timur**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan**	**100**	**538.089.200**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Angkola Timur**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan**	**100**	**538.089.200**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pasar Pargarutan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	529,089,200	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pasar Pargarutan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	529,089,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Batangtura Sirumambe	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	552.268.800	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Batangtura Sirumambe	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	552.268.800	
					5,249.731.278					**5,261.223.978**	

Dari tabel diatas dapat dilihat dimana pada Anggaran Rancangan Awal RKPD terdapat penambahan dan pengurangan Anggaran Kegiatan pada Hasil Analisa Kebutuhan, dimana penambahan anggaran Kegiatan tersebut sangat dibutuhkan di tahun anggaran 2025 pada kantor Camat Angkola Timur, sedangkan untuk pengurangan anggaran Kegiatan pada tahun 2025 diperkirakan tidak menjadi kebutuhan pada kantor Camat Angkola Timur.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Kecamatan Angkola Timur tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Angkola Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan Angkola Timur adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan.

Pelaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya visi dan misi Bupati Tapanuli Selatan dalam hal penurunan angka stunting dikecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah satu kesatuan tata cara penyelengaaran Pemerintahan di Kecamatan yang meliputi Desa dan Kelurahan dan peningkatan pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 6 (enam) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transmisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Ratio Gini
5. Indeks pembangunan manusia
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
7. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pada Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dengan Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kineija. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Angkola Timur Kabupaten

Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan

Tabel. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi		Target	
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	80,28	80,33	81	82

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Ke-4 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni Menigkatkan Kinerja pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, dan beribawa, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indicator kinerja sasaran pada Kecamatan Angkola Timur masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke 4 Kabupaten Tapanuli Selatan

3.3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 5 (lima) program 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga Puluh satu) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.2

Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
KANTOR CAMAT ANGKOLA TIMUR			
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	KELURAHAN PASAR PARGARUTAN		
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan
	KELURAHAN BATANG TURA SIRUMAMBE		

1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	**01**			**KECAMATAN**					**5.839.803.726**		**5.985.798.819**
7	**01**	**2.13.2.19.50.0000**		**Kecamatan Angkola Timur**					**4.640.409.926**		**4.756.420.174**
7	**01**	**2.13.2.19.50.0000**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan***	**%**	**100**	**100**	**3.989.550.706**	**100**	**4.089.289.473**
			201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**21.422.170**	**100**	**21.957.724**
			0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	12.908.720	2	13.231.438
			0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	8.513.450	1	8.726.280

			URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026	
							TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
		202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**3.159.981.130**	**100**	**3.238.980.658**
		0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	30	3.154.687.380	30	3.233.554.564
		0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	5.293.750	2	5.426.094
		205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**59.060.320**	**100**	**60.536.828**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	29.276.720	1	30.008.638
		0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	3	29.783.600	3	30.528.190
		206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**290.702.170**	**100**	**297.969.724**

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	5.076.500	2	5.203.413
			0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	67.454.310	2	69.140.668
			0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	6.942.100	1	7.115.653
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	70.821.080	2	72.591.607
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	63.188.180	3	64.767.885
			0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	13	13	8.800.000	13	9.020.000
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	150	68.420.000	150	70.130.500
			208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**374.714.736**	**100**	**384.082.604**

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1.980.000	1	2.029.500
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	24.809.805	12	25.430.050
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	347.924.931	12	356.623.054
			209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**83.670.180**	**100**	**85.761.935**
			0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	49.793.480	2	51.038.317
			0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	33.876.700	1	34.723.618
7	**01**	**2.13.2.19.50.0000**	**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**%**	**81**	**82**	**54.566.160**	**83**	**55.930.314**

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			202	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**%**	**100**	**100**	**22.151.580**	**100**	**22.705.370**
			0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	22.151.580	12	22.705.370
			204	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Kegiatan Olah Raga Yang Berkembang di Masyarakat**	**Event**	**1**	**1**	**32.414.580**	**1**	**33.224.945**
			0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	32.414.580	1	33.224.945
7	**01**	**2.13.2.19.50.0000**	**03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan**	**%**	**100**	**100**	**60.112.360**	**4**	**61.615.169**
			206	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan**	**%**	**100**	**100**	**60.112.360**	**100**	**61.615.169**

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						
			0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	150	150	60.112.360	150	61.615.169
7	**01**	**2.13.2.19.50.0000**	**05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik (%)**	**%**	**100**	**100**	**362.869.100**	**100**	**371.940.828**
			201	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan**	**Kegiatan**	**8**	**8**	**362.869.100**	**8**	**371.940.828**
			0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Orang	500	500	74.041.550	500	75.892.589

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
			0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	1500	1500	288.827.550	1500	296.048.239
7	**01**	**2.13.2.19.50.0000**	**06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**173.311.600**	**100**	**177.664.390**
			201	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Desa**	**13**	**13**	**173.311.600**	**13**	**177.644.390**

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	13	21.030.460	13	21.556.222
			0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	34.461.460	1	35.322.997
			0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	83.550.720	1	85.639.488
			0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	1	16.090.910	1	16.493.183
			0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	18.178.050	1	18.632.501
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	01			**KECAMATAN**							
7	**01**	**2.13.2.19.50.0014**		**Kelurahan Pasar Pargarutan**					**591.898.120**		**606.695.573**

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	**01**	**2.13.2.19.50.0014**	**03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan**	**%**	**100**	**100**	**591.898.120**	**100**	**606.695.573**
			202	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan**	**%**	**100**	**100**	**591.898.120**	**100**	**606.683.072**
			0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga K emasyarakatan	3	3	12.705.880	3	13.023.527
			0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	2	138.600.000	2	142.065.000
			0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	3	392.582.300	3	402.396.858
			0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	12	48.009.940	12	49.210.189
7				**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	01			**KECAMATAN**							
7	**01**	**2.13.2.19.50.0015**		**Kelurahan Batang Tura Sirumambe**					**607.495.680**		**622.683.072**

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	**01**	**2.13.2.19.50.0015**	**03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)**	**%**	**100**	**100**	**607.495.680**	**100**	**622.683.072**
			202	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan**	**%**	**100**	**100**	**607.495.680**	**100**	**622.683.072**
			0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga K emasyarakatan	3	3	12.680.800	3	12.997.820
			0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	4	206.796.700	4	211.966.618
			0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	3	339.986.460	3	348.486.122
			0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	12	48.031.720	12	49.232.513
Total									**5.839.803.726**		**5.985.798.819**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Kecamatan Angkola Timur Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Pargarutan, 10 Juli 2024

CAMAT ANGKOLA TIMUR

COS RIADY SIREGAR, S.H., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19781009 200212 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
Jalan Padangsidimpuan - Panyabungan Km 18
PINTUPADANG
Website : batangangkola.tapselkab.go.id **KODE POS 22773**

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 100.3.3/520/VII/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

CAMAT BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 63);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keraja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312);
28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 103 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1078);
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Derah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang punya batas-batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
12. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra- PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalahDokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

23. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
24. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
28. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN
Pasal 2

(1) Rencana Kerja Kecamatan Batang Angkola disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat.
(2) Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah :
    a. menjadi pedoman resmi bagi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan
    menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
    b. menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

Rencana Kerja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB IV

RENCANA KERJA KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Kecamatan Batang Angkola ini merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan Dinas yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 - 2026 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan target capaian kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi Pedoman bagi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyusun Anggaran Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Kerja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

(1) Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 meliputi pemantauan,

(2) Supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan wajib membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang berisi uraian tentang capaian dari masing masing indikator kinerja program.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan paling lambat empat belas hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(5) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapnuli Selatan.

Pasal 7

Kepala Bappeda menelaah dan memverifikasi kesesuaian antara Rencana Kerja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pintu Padang
Pada tanggal 15 Juli 2024

a.n. BUPATI TAPANULI SELATAN
CAMAT BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARA,

NURSIA, S.Ag
PEMBINA TK.I (IV.b)
NIP. 197202252002122003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Bapak Bupati Tapanuli Selatan c.q Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

RENJA

2025

KANTOR CAMAT BATANG ANGKOLA

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DAFTAR ISI

Hal.

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN ……..**	**1**
	1.1 Latar Belakang ……..	1
	1.2 Landasan Hukum ……..	1
	1.3 Maksud dan Tujuan ……..	4
	1.4 Sistematika Penulisan ……..	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU ……**	**7**
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ……...	8
	2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah…….	23
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ……..	25
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD…….	26
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……**	**33**
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD …….....	33
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……	34
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ……..**	40
BAB V	**PENUTUP ……**	41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Batang Angkola untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Batang Angkola disusun dengan berpedoman pada Renstra Batang Angkola Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2023, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batang Angkola.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Batang Angkola terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);

17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1057);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 1178);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kantor Camat Batang Angkola ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Batang Angkola ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun beijalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan

kineija tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kineija pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kineija pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Bab V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BATANG ANGKOLA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Batang Angkola Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi anggaran Belanja untuk Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 6.873.118.344,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.739.509.272,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 133.609.072,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 6.459.123.211,- atau sebesar 93,97% dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 6,333,225,811,- atau 98,05% Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 125,897,400,- atau 94,22%.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)	*100*	*82,03*	*100*	*82,03*	82,03	100	1001	100
			Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)	*17*	*17*	*17*	*17*	82,03	17	171	100
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	*51*	*170*	*185*	*170*	82,03	185	185	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Desa berstatus Berkembang (%)**	***100***	***76,56***	***100***	***76,56***	**76,56**	**100**	**100**	**100**
			Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdaya an Masyarakat/LPM (Lembaga)	**8**	**8**	**8**	**8**	76,26	8	8	100
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)**	8	8	8	8	76,26	8	8	100
	1.13.05.2.01.09	Fasilitasi Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	1	1	1	1	76,26	1	1	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (dokumen)								
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)***	***100***	***92***	***100***	***92***	**92**	**100**	**100**	**100%**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Terpenuhinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)***	***100***	***99,33***	***100***	**99,33**	**99,33**	**100**	**100**	**100%**
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*3*	*3*	*3*	3	99,33	*3*	*3*	100
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	*1*	*1*	*1*	1	71	*1*	*1*	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)								
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	***100***	***93***	***100***	**93**	**93**	***100***	***100***	**100%**
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	*45*	*33*	*45*	33	100	*32*	*32*	100
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	*8*	*8*	*8*	8	92,21	*8*	*8*	100
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	*1*	*1*	*1*	1	96	*1*	*1*	100
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	*1*	*1*	*1*	1	77	*1*	*1*	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)								
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	***100***	***95***	***100***	**95**	**95**	***100***	***100***	**100%**
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	*2*	*2*	*2*	2	97,3	*2*	*2*	100
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	*2*	*2*	*2*	2	90	*2*	*2*	100
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	***100***	***88***	***100***	**88**	**88**	***100***	***100***	**100%**
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	*1*	*1*	*1*	1	99,10	*1*	*1*	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	*1*	*1*	*1*	1	100	*2*	*2*	100
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	*1*	*1*	*1*	1	92	*1*	*1*	100
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	*2*	*2*	*2*	2	77	*2*	*2*	100
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	*2*	*2*	*2*	2	82	*2*	*2*	100
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	*5*	*3*	*3*	3	55	*5*	*5*	100
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	*180*	*203*	*208*	203	92	*208*	*208*	100
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	***100***	***90***	***100***	**90**	**90**	***100***	***100***	**100%**

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	*980*	*210*	*220*	210	86	*220*	*220*	100
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	*12*	*12*	*12*	12	100	*12*	*12*	100
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	*12*	*12*	*12*	12	91,1	*12*	*12*	100
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***100***	***97***	***100***	**97**	**97**	***100***	***100***	**100%**
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	*7*	*6*	*6*	6	94	*2*	*2*	100
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2*	*2*	*2*	2	100	*2*	*2*	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (%)**	**75**	***75***	**75**	**79,83**	**106,86**	**75**	**79,83**	**79,83**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangTidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang Ada di Kecamatan (%)**	**75**	***1***	***1***	**1**	**100**	**75,83**	**75,83**	**75,83**
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	12	12	12	12	100	12	12	75,83
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**75**	***98***	***100***	**98**	**98**	***2***	***2***	**75,83**

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Monitoring Kegiatan dan Pembangunan (Laporan)	1	12	12	12	100	2	2	100
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)**	**100**	**46,10**	**100**	**46,10**	**46,10**	**100**	**100**	**100**
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)**	**100**	**12,5**	**100**	**12,5**	**12,5**			
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	17	3	17	3	12,5			
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)**	**100**	**85**	**100**	**85**	**85**			
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)	4	6	6	6	85			

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	-				200	200	100
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik(%)**	**100**	**56**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik(%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian		-				300	300	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)								
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)		-				800	800	100
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	17	0	1	0	0	1	1	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)						17	17	100
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)						1	1	100
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lmbaga Kemasyarkatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	-	-				1	1	100
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif						1	1	100
		Kelurahan Sigalangan									
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan*	100	100	100	100	100	100	100	100
		Kelurahan Pintu Padang I									
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)**	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan*	100	100	100	100	100	100	100	100
		Kelurahan Pintu Padang II									

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)**	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan*	100	100	100	100	100	100	100	100
		Kelurahan Bangun Purba									
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)**	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan*	100	100	100	100	100	100	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Batang Angkola merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati:

Kecamatan Batang Angkola dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Kecamatan Batang Angkola mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2023

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan Pemerintahan dan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Batang Angkola memiliki lingkup pelayanan wilayah. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Batang Angkola memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Batang Angkola tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness) :

a. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai.
b. Adanya Peraturan Daerah No. 113 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.
d. Kondisi gedung perkantoran Kecamatan yang memadai

Kelemahan (Weakness) :

a. Sumber Daya dan Kompetensi Aparatur Kecamatan yang kurang
b. Struktur organisasi belum optimal
c. Koordinasi dengan OPD belum Optimal
d. Profesionalisme SDM Aparatur belum optimal

e. Jarak antara beberapa Desa yang jauh dan Jaringan Internet di beberapa Desa masih belum memadai

Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity)

a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja Kecamatan
b. Tersedianya pejabat struktural setiap Seksi dan Subbag di Kecamatan
c. Lembaga penyelenggara diklat teknis dan fungsional perencanaan cukup memadai
d. Koordinasi Forkopincam yang Sinergi

Tantangan (Threat)

a. Tuntutan masyarakat tentang pembangunan semakin besar dan kritis
b. Penempatan pegawai Kecamatan kurang mempertimbangkan kemampuan dan keahlian

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Batang Angkola dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Batang Angkola, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, terdapat masih mengadopsi program dan

kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dan mempertimbangkan asas kepatutan, serta ada beberapa target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Batang Angkola**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**4.292.391.528**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Batang Angkola**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**4.246.259.157**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Batang Angkola	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	22.538.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Batang Angkola	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	22.138.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.735.323.108	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.785.173.747	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	36.900.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	34.943.410	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	198.176.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	157.302.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batang Angkola	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	206.454.320	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batang Angkola	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	190.256.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	93.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	68.244.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Batang Angkola**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**75**	**77.291.200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Batang Angkola**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**75**	**72.380.000**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Batang Angkola	Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	75,83	25.706.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Batang Angkola	Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	75,83	41.360.000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Kegiatan Olah Raga Yang Berkembang di Masyaraka	2	51.585.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Kegiatan Olah Raga Yang Berkembang di Masyaraka	2	31.020.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Batang Angkola**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	**55.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Batang Angkola**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	**51.700.000**	
1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Batang Angkola	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4	55.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Batang Angkola	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4	**51.700.000**	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Batang Angkola**	**Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan**	**100**	**403.440.600**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Batang Angkola**	**Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan**	**100**	**527.340.000**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	8	403.440.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Batang Angkola	Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	8	**527.340.000**	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Batang Angkola**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**55.950.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Batang Angkola**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**86.856.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Batang Angkola	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17	55.950.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Batang Angkola	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17	86.856.000	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Batang Angkola**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan**	**100**	**1.603.344.950**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Batang Angkola**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan**	**100**	**1.611.880.146**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sigalangan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	411.894.800	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sigalangan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	417.425.800	
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pintu Padang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	410.297.200	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pintu Padang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	417.425.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pintu Padang II	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	378.496.900	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pintu Padang II	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	388.784.000	
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Bangun Purba	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	402.656.050	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Bangun Purba	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100	388.244.546	
					6.487.418.278					**6.614.053.303**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Kecamatan Batang Angkola tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batang Angkola

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan Batang Angkola adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Pelaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya visi dan misi Bupati Tapanuli Selatan dalam hal penurunan angka stunting pada kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah satu kesatuan tata cara penyelengaaran Pemerintahan di Kecamatan yang meliputi Desa dan Kelurahan dan peningkatan pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transmisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Nilai Tukar Nelayan
5. Ratio Gini
6. Indeks pembangunan manusia
7. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus pada untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pada Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dengan Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan indikator kineija sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kineija. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dengan indikator:
    1. Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan
    1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

Tabel. 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi		Target	
				2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	75	75	75	75

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Ke-4 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni "Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan" berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran pada Kecamatan Batang Angkola masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke 2 Kabupaten Tapanuli Selatan

3.3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (lima) program 12 (dua belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1

Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
VI	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2025 (samakan dengan tabel analisa)		2026	
					TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		KECAMATAN BATANG ANGKOLA				**4.984.535.157,00**		**5.482.988.673,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.292.391.528,00**		**4.721.630.681,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**4.292.391.528,00**		**4.721.630.681,00**
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**4.292.391.528,00**	**-**	**4.721.630.681,00**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**27.978.000,00**	**-**	**35.435.461,00**
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dokumen	1	17.638.000,00	1	20.061.461,00
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	1	10.340.000,00	1	11.374.000,00
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				3.785.173.747,00		4.163.691.122,00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/bulan	22	3.780.773.747,00	22	4.158.851.122,00
	7.01.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Laporan	1	4.400.000,00	1	4.840.000,00
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				34.943.410,00		38.437.751,00
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Orang	4	16.113.856,00	4	18.071.011,00
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Paket	22	18.829.554,00	22	20.712.509,00
	7.01.01.2.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				157.302.000,00		173.032.200,00
	7.01.01.2.02.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket	1	2.068.000,00	1	2.274.800,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan*	Paket	2	25.850.000,00	2	28.435.000,00
	7.01.01.2.02.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Paket	1	5.170.000,00	1	5.687.000
	7.01.01.2.02.06.0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Paket	2	30.120.000,00	2	33.132.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2025 (samakan dengan tabel analisa)		2026	
					TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	7.01.01.2.02.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Paket	3	25.850.000,00	3	28.435.000
	7.01.01.2.02.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Dokumen	5	6.204.000,00	5	6.824.400
	7.01.01.2.02.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	208	62.040.000,00	208	68.244.000
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				190.256.000,00		209.281.600,00
	7.01.01.2.008.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Laporan	220	4.136.000,00	220	4.549.600,00
	7.01.01.2.008.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan	3	20.680.000,00	3	22.748.000,00
	7.01.01.2.008.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	12	165.440.000,00	12	181.984.000,00
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				89.020.000,00		97.922.000,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	2	58.000.000,00	2	63.800.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*	Unit	2	31.020.000,00	2	34.122.000,00
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		-	-	**693.752.100,00**	-	**763.127.310,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**693.752.100,00**		**763.127.310,00**
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**72.380.000,00**	**-**	**79.618.000,00**
	7.01.01.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	41.360.000,00	-	45.496.000,00
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Laporan	12	41.360.000,00	12	45.496.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2025		2026	
					TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**31.020.000,00**		**34.122.000,00**
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Laporan	12	31.020.000,00	12	34.122.000,00
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**71.760.100,00**		**78.936.110,00**
	7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**51.700.000,00**		**56.870.000,00**
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	Keluarga	200	51.700.000,00	20	56.870.000,00
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**527.340.000,00**		**580.074.000,00**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**527.340.000,00**		**580.074.000,00**
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	Orang	350	124.080.000,00	950	136.488.000,00
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	Orang	1300	403.260.000,00	4200	443.586.000,00
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-	**86.856.000,00**	-	**95.541.600,00**
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**86.856.000,00**	**-**	**95.541.600,00**
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Dokumen	1	6.204.000,00	1	6.824.400,00
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	Dokumen	17	21.714.000,00	17	23.885.400,00
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Dokumen	1	15.510.000,00	1	17.061.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2025		2026	
					TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	Orang	1	14.476.000,00	1	15.923.600,00
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	Dokumen	1	28.952.000,00	1	31.847.200,00
		KELURAHAN SIGALANGAN				**417.425.800,00**		**459.168.380,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**417.425.800,00**		**459.168.380,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**417.425.800,00**		**459.168.380,00**
6.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**417.425.800,00**		**459.168.380,00**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**417.425.800,00**		**459.168.380,00**
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Lembaga Kemasyarakatan	6	4.859.800,00	6	5..345.780,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Unit	2	62.040.000,00	2	68.244.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Pokmas/Ormas	6	299.860.000,00	6	329.846.000,00
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	Laporan	1	50.666.000,00	1	55.732.600
		KELURAHAN PINTU PADANG I				**417.425.800,00**		**459.168.380,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**417.425.800,00**		**459.168.380,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**417.425.800,00**		**459.168.380,00**
7.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**417.425.800,00**		**459.168.380,00**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**417.425.800,00**		**459.168.380,00**
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Lembaga Kemasyarakatan	6	4.859.800,00	6	5..345.780,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Unit	2	62.040.000,00	2	68.244.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Pokmas/Ormas	6	299.860.000,00	6	329.846.000,00
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	Laporan	1	50.666.000,00	1	55.732.600

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2025		2026	
					TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		KELURAHAN PINTU PADANG II				**388.784.000,00**		**427.662.400,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**388.784.000,00**		**427.662.400,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**388.784.000,00**		**427.662.400,00**
8.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**388.784.000,00**		**427.662.400,00**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**388.784.000,00**		**427.662.400,00**
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Lembaga Kemasyarakatan	6	5.170.000,00	6	5.687.000,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Unit	2	183.018.000,00	2	201.319.800,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Pokmas/Ormas	6	144.760.000,00	6	159.236.000,00
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	Laporan	1	55.836.000,00	1	61.419.600,00
		KELURAHAN BANGUN PURBA				**388.244.546,00**		**427.069.001,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**388.244.546,00**		**427.069.001,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**388.244.546,00**		**427.069.001,00**
9.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**388.244.546,00**		**427.069.001,00**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**388.244.546,00**		**427.069.001,00**
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Lembaga Kemasyarakatan	6	6.721.500,00	6	7.393.650,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Unit	2	15.808.000,00	2	17.388.800,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Pokmas/Ormas	6	309.879.046,00	6	340.866.951,00
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	Laporan	1	55.836.000,00	1	61.419.600,00
						6.614.053.303,00		**7.275.458.633,00**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Kantor Camat Batang Angkola Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Rencana Kerja ini adalah pelaksanakaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Camat Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Batang Angkola, 3 Juni 2024
CAMAT BATANG ANGKOLA

NURSIA, S.Ag
NIP.19720225 200202 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANGTORU
Jl. Merdeka No.21, Kel. Wek I Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 22738
website : www.batangtoru.tapselkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATANGTORU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 821.29/010/KPTS/2025

PENETAPAN RENCANA KERJA KANTOR CAMAT BATANGTORU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

CAMAT BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penjabaran Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan untuk Jangka 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) dan pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerag Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312) disebutkan Rencana Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, maka dipandang perlu membentuk Keputusan Camat Batangtoru tentang Rencana Kerja Kecamatan Batangtoru Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negaea Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo4 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tenatang Perubahan atas Undang- Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5103) ;
8. Undang- Undang Nomor 5 Tauhn 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegwai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2007 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Untuk Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2017 Nomor 290, Tambagan Lemabaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan 2017-2037;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312);
25. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Urusan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
26. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 668);

27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 1182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Penetapan Rencana Kerja Kantor Camat Batangtoru Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Derah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang punya batas-batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Kecamatan Batangtoru adalah Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
12. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui

urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra- PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
24. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
28. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN
Pasal 2

1. Rencana Kerja Kecamatan Batangtoru disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat.
2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah :
    a. Menjadi pedoman resmi bagi Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
    b. Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB III

SISTEMETIKA PENYUSUNAN
Pasal 3

Rencana Kerja Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

BAB IV

RENCANA KERJA KECAMATAN BATANGTORU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Pasal 4

1. Rencana Kerja Kecamatan Batangtoru ini merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan Kecamatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 - 2026 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program dan kegiatan Kecamatan, disertai dengan target capaian kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi Pedoman bagi Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyusun Anggaran Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Kerja Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sebagai mana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

(1) Camat Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 meliputi pemantauan,
(2) Supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3) Kecamatan Batangtoru Kabupaten Selatan wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Batangtoru yang berisi uraian tentang capaian dari masing-masing indikator kinerja program.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan paling lambat empat belas hari setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.
(5) Laporan kinerja menjadi masukan dan baha pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

Pasal 7

Kepala Bappeda menelaah dan memverifikasi kesesuaian antara Rencana Kerja Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batangtoru
Pada tanggal 07 Juli 2024
CAMAT BATANGTORU



MARA TINGGI, SAP, MM
PEMBINA TK I
NIP. 19800427 200212 1 003

RENJA 2025

KANTOR CAMAT BATANG TORU

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Batangtoru untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Batangtoru disusun dengan berpedoman pada Renstra Batangtoru Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2023, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batangtoru.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Batangtoru terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1057);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kantor Camat Batangtoru ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Batangtoru ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun beijalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kineija tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kineija pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kineija pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Bab V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KANTOR CAMAT BATANGTORU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Batangtoru Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024, alokasi anggaran Belanja untuk Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp 4.967.245.014,-, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.942.745.014,-, dan Belanja Modal sebesar Rp. 24.500.000,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Batangtoru Rp. 4.967.245.014,-, Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 4.967.245.014,- atau sebesar 91.75% dengan rincian sebagai berikut: · Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 4.942.745.014,- atau 91.71% Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 24.500.000-,atau 100%.

Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat capaian kinerja kegiatan dan program Kecamatan Batangtoru tahun 2024 dan taget kinerja tahun 2025.

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
	2.13	**URUSAN PEMERINATAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Desa berstatus Berkembang (%)**	***100***	***89***	***89***	***89***	**89**	**100**	**100**	**100**
			Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdaya an Masyarakat/LPM (Lembaga)	***100***	***8***	***8***	***8***	**8**	**100**		
	2.1.13.05.2.01.09	Fasilitasi Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (dokumen)	100	4						
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (dokumen)						1	1	100
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)***	***100***	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	**100**	**100%**

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Terpenuhinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)***	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*3*	*3*	*3*	3	100	*3*	*3*	3
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	*1*	*1*	*1*	1	100	*1*	*1*	100
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)***	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	***100***	***100***	**100%**
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	*70*	*56*	*12*	12	100	*12*	*12*	100
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	*8*	*8*						
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	*1*	*1*	*1*	1	100	*1*	*1*	100
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)***	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	***100***	***100***	**100%**
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	*1*	*1*						
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	*2*	*3*	*4*	*4*	100	*2*	*2*	100
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)***	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	***100***	***100***	**100%**

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	*1*	1	100	*1*	*1*	100
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	*1*	1	*1*	1	100	*1*	*1*	100
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (bulan)	*6*	6	*6*	6	100	*6*	*6*	100
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	*3*	*3*	*3*	3	100	*3*	*3*	100
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	*5*	*5*	*5*	5	100	*5*	*5*	100
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	*221*	*221*	*221*	*221*	100	*250*	*250*	100
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	***100***	***100***	**100%**
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	*100*	*12*	*12*	12	100	*12*	*12*	100
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***100***	***100***	***100***	**100**	**100**	***100***	***100***	**100%**
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	*100*	*2*	*2*	2	100	*2*	*2*	100
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara (unit)	*100*	*10*						

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (%)***	**75**	***75***	**75**	**80,96**	**94**	**75**	**75**	**75**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	***Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (%)***	**75**	***75***	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	100	0	0	0	0	12	12	75
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	***Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	**75**	***75-***	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	5	1	1	1	100	1	1	100
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	100	19	19	19	100	19	19	100
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (%)	**100**	**100-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (keluarga)	-	-				100	100	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik (%)***	**100**	**56**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik(%)***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	-	-				950	950	100
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	-	-				4200	4200	100
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu (%)***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	***Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	19	19	19	19	100	19	19	100
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lmbaga Kemasyarkatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	-	-	1	1	100	1	1	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (dokumen)			1	1	100	1	1	100
		Kelurahan Wek I									
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (lembaga/kemasyarakatan)	5	5	5	5	100	5	5	100
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	2	2	100	2	2	100
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	5	5	100
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	4	4	4	100	4	4	100
		Kelurahan Wek II									
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)***	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (lembaga/kemasyarakatan)	5	5	5	5	100	5	5	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	2	2	100	2	2	100
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	5	5	100
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	4	4	4	100	4	4	100
		Kelurahan Wek Perkebunan Batangtoru									
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)***	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (lembaga/kemasyarakatan)	5	5	5	5	100	5	5	100
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	2	2	100	2	2	100
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	5	5	100
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	4	4	4	100	4	4	100
		Kelurahan Aek Pining									
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7.01	**KECAMATAN**									
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)***	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (lembaga/kemasyarakatan)	5	5	5	5	100	5	5	100
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	2	2	100	2	2	100
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	5	5	100
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	4	4	4	100	4	4	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kantor Camat Batangtoru merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati:

Kantor Camat Batangtoru dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Kantor Camat Batangtoru mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi		Target	
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	80,96	80,99	81	85

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tantangan yang dihadapi oleh Kantor Camat Batangtoru tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness) :

a. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai.
b. Adanya Peraturan Daerah No. 113 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.
d. Kecamatan Batangtoru mempunyai slogan “PANAS BERSAHABAT” yang memiliki arti/kepanjangan “***Peduli Aman Nyaman Antusias dan Sinergitas”***.
e. Kondisi gedung perkantoran Kecamatan.

Kelemahan (Weakness) :

a. Sumber Daya dan Kompetensi Aparatur Kecamatan yang kurang
b. Struktur organisasi belum optimal
c. Profesionalisme SDM Aparatur belum optimal

Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity)

a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja Kecamatan
b. Komitmen bersama seluruh aparatur KEcamatan untuk Meningkatkan pelayanan
c. Terbentuknya inovasi di setiap seksi dan bagian
d. Terdapatnya sarana teknologi di setiap seksi dan bagian

Tantangan (Threat)

a. Tuntutan masyarakat tentang pembangunan semakin besar dan kritis

b. Penempatan pegawai Kecamatan kurang mempertimbangkan kemampuan dan keahlian

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kantor Camat Batangtoru dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kantor Camat Batangtoru.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Batangtoru**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**3.162.693.091**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Batangtoru**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**3.148.685.683**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Batangtoru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	7.576.901	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Batangtoru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	27.206.200	Penguranganga n anggaran
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batangtoru	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batangtoru	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.585.007.523	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Batangtoru	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	26.136.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Batangtoru	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	26.136.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Batangtoru	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	195.546.964	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Batangtoru	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	184.743.200	Penguranganga n anggaran
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batangtoru	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	266.994.104	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batangtoru	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	267.592.760	Kenaikan Anggaran BPJS THL dan Honor THL
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batangtoru	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	58.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Batangtoru	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	58.000.000	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kec. Batangtoru**	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa**	**100%**	**15.713.401**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kec. Batangtoru**	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa**	**100%**	**15.992.700**	
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Batangtoru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	15.713.401	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Batangtoru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	15.992.700	Penambahan Anggaran
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Batangtoru**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100%**	**31.982.800,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Batangtoru**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100%**	**32.982.700**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Batangtoru	Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	19.387.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Batangtoru	Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	19.780.500	Penambahan Anggaran
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Batangtoru	Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	12.595.800	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Batangtoru	Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	13.202.200	Penambahan Anggaran

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Batangtoru**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**71.760.100**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Batangtoru**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**110.005.900,00**	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Batangtoru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	44.756.300,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Batangtoru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	44.756.300	
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Batangtoru	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	300 keluarga	71.760.100	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Batangtoru	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	300 keluarga	65.249.600	Pengurangan anggaran dikarenakan adanya kegiatan yang berkurang
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Batangtoru**	**Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan**	**8 kegiatan**	**317.818.300**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Batangtoru**	**Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan**	**8 kegiatan**	**317.855.800**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Batangtoru	Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	8 kegiatan	317.818.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Batangtoru	Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	8 kegiatan	317.855.800	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Batangtoru**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**63.228.900**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Batangtoru**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**62.376.100**	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Batangtoru	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	63.228.900	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Batangtoru	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	62.376.100	Efisiensi anggaran
	Kelurahan Wek I					**Kelurahan Wek I**					
7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Batangtoru Kelurahan Wek I**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**578.519.950**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Batangtoru Kelurahan Wek I**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**578.519.950**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Batangtoru Kelurahan Wek I	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100%	578.519.950	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Batangtoru Kelurahan Wek I	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100%	578.519.950	
	Kelurahan Wek II					**Kelurahan Wek II**					
8	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Batangtoru Kelurahan Wek II**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**544.519.950**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Batangtoru Kelurahan Wek II**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**544.519.950**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Batangtoru Kelurahan Wek II	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100%	544.519.950	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Batangtoru Kelurahan Wek II	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100%	544.519.950	
	Kelurahan Perkebunan Batangtoru					**Kelurahan Perkebunan Batangtoru**					
9	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Batangtoru Kelurahan Perk Batangtoru**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**571.813.640**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Batangtoru Kelurahan Perk Batangtoru**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**571.819.950**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Batangtoru Kelurahan Perk Batangtoru	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100%	571.813.640	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Batangtoru Kelurahan Perk Batangtoru	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100%	571.819.950	
	Kelurahan Aek Pining					**Kelurahan Aek Pining**					

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	10	11	12
10	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Batangtoru Kelurahan Aek Pining**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**617.279.150**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Batangtoru Kelurahan Aek Pining**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**617.279.150**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Batangtoru Kelurahan Perk Batangtoru	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100%	617.279.150	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Batangtoru Kelurahan Perk Batangtoru	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan di Kelurahan	100%	617.279.150	
					5.975.329.282					**6.000.037.883**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri dalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Kecamatan Batangtoru tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel 2.3.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batangtoru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan Batangtoru adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Pelaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya visi dan misi Bupati Tapanuli Selatan dalam hal penurunan angka stunting pada kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah satu kesatuan tata cara penyelengaaran Pemerintahan di Kecamatan yang meliputi Desa dan Kelurahan dan peningkatan pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 6 (enam) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transmisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Nilai Tukar Nelayan
5. Ratio Gini
6. Indeks pembangunan manusia
7. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus pada untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pada Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dengan Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan indikator kineija sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kineija. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dengan indikator:
    1. Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan
    1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

Tabel. 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi		Target	
				2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	79,37	80,96	80	80

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Ke-4 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni "Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan" berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran pada Kecamatan Batangtoru masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke 4 Kabupaten Tapanuli Selatan

3.3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 7 (tujuh) program 14 (empat belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1

Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
VII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	2025			2026		
			Satuan	Target	2025	Satuan	Target	2026
Kecamatan Batangtoru								
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.992.700**			**16.207.002**
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**15.992.700**			**16.207.002**
2.13.5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				**15.992.700**			**16.207.002**
2.13.5.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.992.700			16.207.002
2.13.5.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa*	*Dokumen*	1	15.992.700	*Dokumen*	1	16.207.002
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.671.906.183**			**3.721.109.726**
7.01	**KECAMATAN**				**3.671.906.183**			**3.721.109.726**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.148.685.683**			**3.190.878.071**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.206.200			27.570.763
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	7	23.360.500	*Dokumen*	7	23.673.531
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Laporan	1	3.845.700	Laporan	1	3.897.232
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.585.007.523			2.619.646.624
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/bulan	17	2.581.126.223	Orang/bulan	17	2.615.713.314
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Laporan	1	3.881.300	Laporan	1	3.933.309
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.136.000			26.136.000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Orang	4	26.136.000	Orang	4	26.486.222

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	2025			2026		
			Satuan	Target	2025	Satuan	Target	2026
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				184.743.200			187.218.759
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket	1	5.293.100	Paket	1	5.364.028
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Paket	1	8.099.500	Paket	1	8.208.033
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Paket	2	82.630.100	Paket	2	83.737.343
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Paket	9	18.832.500	Paket	9	19.084.856
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Dokumen	5	6.000.000	Dokumen	5	6.080.400
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	174	63.888.000	Laporan	174	64.744.099
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				267.592.760			271.178.503
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan	3	51.483.384	Laporan	3	52.173.261
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	12	216.109.376	Laporan	12	219.005.242
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.000.000			58.777.200
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	2	58.000.000	Unit	2	58.777.200
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**32.982.700**			**33.424.668**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				19.780.500			20.045.559
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Laporan	12	19.780.500	Laporan	12	20.045.559
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.202.200			13.379.109
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Laporan	12	13.202.200	Laporan	12	13.379.109
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**110.005.900**			**111.479.979**

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	2025			2026		
			Satuan	Target	2025	Satuan	Target	2026
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				44.756.300			45.356.034
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Laporan	12	44.756.300	Laporan	12	45.356.034
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				65.249.600			66.123.945
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	Keluarga	300	65.249.600	Keluarga	300	66.123.945
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**317.855.800**			**322.115.068**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				317.855.800			322.115.068
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	Orang	950	111.805.800	Orang	950	113.303.998
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	Orang	4200	206.050.000	Orang	4200	208.811.070
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**62.376.100**			**63.211.940**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				62.376.100			63.211.940
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Dokumen	12	12.466.000	Dokumen	12	12.633.044
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	Dokumen	8	14.566.300	Dokumen	8	14.761.488
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	Dokumen	8	7.498.000	Dokumen	8	7.598.473

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	2025			2026		
			Satuan	Target	2025	Satuan	Target	2026
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*	Dokumen	2	27.845.800	Dokumen	2	28.218.934
Kelurahan Wek I								
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**578.519.950**			**578.519.950**
7.01	**KECAMATAN**				**578.519.950**			**578.519.950**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**578.519.950**			**578.519.950**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**578.519.950**			**578.519.950**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Lembaga Kemasyarakatan	5	162.406.650	Lembaga Kemasyarakatan	5	164.582.899
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Unit	2	200.000.000	Unit	2	202.680.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Pokmas/ Ormas	5	159.759.200	Pokmas/ Ormas	5	161.899.973
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	4	56.354.100	Laporan	4	57.109.245
Kelurahan Wek II								
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**544.519.950**			**551.816.517**
7.01	**KECAMATAN**				**544.519.950**			**551.816.517**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**544.519.950**			**551.816.517**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				544.519.950			551.816.517
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Lembaga Kemasyarakatan	5	150.006.650	Lembaga Kemasyarakatan	5	152.016.739
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Unit	2	200.000.000	Unit	2	202.680.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Pokmas/ Ormas	5	138.159.200	Pokmas/ Ormas	5	140.010.533
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	Laporan	4	56.354.100	Laporan	4	57.109.245
Kelurahan Perkebunan Batang Toru								
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**571.819.950**			**579.482.337**
7.01	**KECAMATAN**				**571.819.950**			**579.482.337**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**571.819.950**			**579.482.337**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				571.819.950			579.482.337

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME	2025			2026		
			Satuan	Target	2025	Satuan	Target	2026
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Lembaga Kemasyarakatan	5	164.059.450	Lembaga Kemasyarakatan	5	166.257.847
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Unit	2	200.000.000	Unit	2	202.680.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Pokmas/ Ormas	5	151.400.000	Pokmas/ Ormas	5	153.428.760
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	Laporan	4	56.360.500	Laporan	4	57.115.731
Kelurahan Aek Pining								
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**617.279.150**			**625.550.691**
7.01	**KECAMATAN**				**617.279.150**			**625.550.691**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**617.279.150**			**625.550.691**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				617.279.150			625.550.691
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Lembaga Kemasyarakatan	5	165.006.650	Lembaga Kemasyarakatan	5	167.217.739
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Unit	2	200.000.000	Unit	2	202.680.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Pokmas/ Ormas	5	195.918.400	Pokmas/ Ormas	5	198.543.707
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	Laporan	4	56.354.100	Laporan	4	57.109.245
Jumlah					**6.000.037.883**			**6.072.686.223**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Kantor Camat Batangtoru Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Rencana Kerja ini adalah pelaksanakaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Camat Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Batangtoru, 12 Juli 2024

CAMAT BATANGTORU

Mara Tinggi, SAP, MM

NIP.19800427 200212 1 003

RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2026





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Taufiq Hidayah dan Karunia- Nya, sehingga penyusunan Perubahan rencana Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 ini dapat dilaksanakan.

Perubahan rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini merupakan acuan Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan rencana KerjaPemerintah Daerah, bahwa tata cara penyusunan Perubahan rencana KerjaPerangkat Daerah (Renja –PD) diatur pada pasal 125 sampai dengan pasal 143 dengan tahapan yaitu persiapan penyusunan Renja PD, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD dan Penetapan Renja- PD.

Perubahan rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, perubahan peraturan perundang- undangan, permasalahan, isu strategis yang tumbuh berkembang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Harapan kami semoga Penyusunan Perubahan rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 ini bisa digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang efektif, partisipatif, efesien dan akuntabel, sehingga perencanaan yang hasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sipirok, 2026
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ZULKARNAIN SIREGAR, S.P, M.Agr
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP. 19690925 199401 1 003

DAFTAR IS

DAFTAR ISI.....i
KATA PENGANTAR.....ii

BAB I. PENAHULUAN.....1
1.1. Latar Belakang.....1
1.2. Landasan Hukum.....1
1.3. Maksud dan Tujuan.....4
1.4. Sistematika Penulisan.....4
BAB II.....7
HASIL EVALUASI.....7
RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....7
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU.....7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Lalu..... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....11
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....14
BAB III.....15

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....15
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....15
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....18
BAB IV.....23
PERUBAHAN RENCANA KERJADAN PENDANAAN.....23
BAB V.....24
PENUTUP.....24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan rencana Kerja Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat P. Renja adalah dokumen perencanaan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026-2029, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2024, dan Perubahan rencana KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses Penyusunan Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan rencana KerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Nomor 35):

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2026;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
    Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):
26. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 – 2045 (Lembar Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan nomor 332 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 52);
27. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 331 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1075);

28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penentapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021);
31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 Nomor 1178);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kineija penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 ini disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun beijalan (tahun n-1 = Tahun 2026), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kineija tahunan

Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kineija pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kineija pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Perubahan rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Perubahan rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Bab V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2026), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026, alokasi anggaran Belanja untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp **6.339.950.669** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. **6.530.450.669** dan Belanja Modal sebesar Rp **9.500.000**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka bab ini menyajikan gambaran umum tentang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Selatan yang masuk dalam kewenangan Bupati Tapanuli Selatan dan gambaran umum permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

1) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang

mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3) menyusun, menetapkan dan menginformaskan peta rawan bencana;
4) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Fungsi
1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiridari :
1) Subbagian Program
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
3) Subbagian Keuangan
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :

1) Kasubbid Pencegahan
2) Kasubbid Kesiapsiagaan

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
1) Kasubbid Kedaruratan
2) Kasubbid Logistik

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
1) Kasubbid Rehabilitasi
2) Kasubbid Rekonstruksi

c. Fungsi
1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiridari :
1) Subbagian Program
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
3) Subbagian Keuangan
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
1) Kasubbidang Pencegahan
2) Kasubbidang Kesiapsiagaan
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
1) Kasubbidang Kedarurata
2) Kasubbidang Logistik

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :

1) Kasubbidang Rehabilitasi
2) Kasubbidang Rekonstruksi

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja OPD	Target Renstra OPD					Ket.
		2026	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Resiko Bencana (%)	70	68	66	65	62	

a. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki lingkup pelayanan wilayah. Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 adalah :

1. Adanya aturan baru yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari OPD kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
3. Keterbatasan pegawai sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal.
4. Konsisten perencanaan program/kegiatan dan penganggaran yang sering berubah, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD.

b. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dan mempertimbangkan asas kepatutan, serta ada beberapa target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TabelT-C.31

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2026 (Rp)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**100,00**	**4.253.477.379**
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapsel	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00	**41.589.000**

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tapsel	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00	**2.690.090.067**
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tapsel	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100,00	**131.320.000**
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tapsel Tapsel	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00	**656.670.128**
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tapsel	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00	**486.505.684**
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tapsel	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100,00	**247.302.500**
II	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**100,00**	**809.916.555**
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan (%)	100,00	**58.536.900**
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tapsel	Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan (%)	100,00	**397.267.400**
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tapsel	Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan (%)	100,00	**456.647.550**
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Tapsel	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (%)	100,00	**125.852.800**
	JUMLAH				**5.063.393.934**

Sumber : BPBD 2026

c. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,

maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel T-C.32.Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4		5	6
	NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti berikut ini, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata

kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan kemiskinan, 5) Ketahanan pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim investasi dan usaha, 8) Energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD Tahun 2026 – 2029 sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan ke dalam RKPD sebagai Rencana Jangka Pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanakan oleh masing-masing OPD untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misinya dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah, dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran program Kerja pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program OPD secara umum.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2026 masih dengan tujuan sasaran semula yaitu :

Misi Ketiga : Melanjutkan Pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat .

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah menyediakan dan

menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan,penganggaran,pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan,sekaitan dengan hal tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tapanuli Selatan merincikan **Program/Kegiatan Penanggulangan Bencana** untuk tahun Anggaran 2026 yakni ;

1. **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2. **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahandan Kesiapsiagaan
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

3. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

~ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   - ~ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
   - ~ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   - ~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - ~ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - ~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - ~ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - ~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   - ~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   - ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   - ~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - ~ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berkaitan dengan implementasi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak

(stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan Berdasarkan Rancangan Renja (Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan tersebut dan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan , Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2026 melaksanakan 2 (dua) program 11 (sebelas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan
dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu	Sumber Dana
1	2	3		5
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**4.253.477.379**	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**41.589.000**	**DAU**
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapsel	39.956.200	DAU
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapsel	1.632.800	DAU
2.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**2.690.090.067**	**DAU**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapsel	2.680.194.067	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapsel	2.820.000	DAU
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapsel	7.076.000	DAU

3.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**131.320.000**	**DAU**
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		106.320.000	DAU
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapsel	**25.000.000**	DAU
4.	Program : Penunjang Urusan emerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		**656.670.128**	**DAU**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapsel	7.154.000	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapsel	64.410.628	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapsel	16.899.000	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapsel	128.969.700	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapsel	80.945.900	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Tapsel	22.100.000	DAU
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapsel	336.190.900	DAU
5.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**486.505.684**	**DAU**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapsel	17.060.000	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapsel	69.099.620	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapsel	400.346.064	DAU
6.	Program : Penunjang Urusan emerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**247.302.500**	**DAU**
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa emeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tapsel	28.302.500	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa emeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapsel	219.000.000	DAU
7.	Program : Program Penanggulangan Bencana		**809.916.555**	
	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**58.536.900**	**DAU**
	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Tapsel	**58.536.900**	DAU
8.	Program : Program Penanggulangan			

	Bencana			
	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**168.879.305**	**DAU**
	Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Tapsel	56.517.250	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Tapsel	57.826.555	DAU
	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	54.535.500	DAU
9.	Program : Program Penanggulangan Bencana			
	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**456.647.550**	**DAU**
	Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	201.108.500	DAU
	Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	227.214.050	DAU
	Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	28.325.000	DAU
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**125.852.800**	DAU
	Sub Kegiatan : Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	125.852.800	DAU

Sumber : RKA SIPD Kemendagri 2026

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJADAN PENDANAAN

Perubahan rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026.

Perubahan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Program Dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	Kondisi Awal 2026		Perubahan 2026	2026	
							TARGET	RUPIAH	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	01			**BPBD**							
		1.05.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100.00	6.243.945.926	5.319.596.749	100.00	4.253.477.379
		1.05.03	02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100.00	895.846.520	1.020.353.920	100.00	809.916.555
Total								6.243.945.926	6.339.950.669		5.063.393.934

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026- 2029.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi Perubahan rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Perubahan rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Perubahan rencana Kerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026.

Sipirok, 2026

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ZULKARNAIN, S.P, M.Agr

PEMBINA Tk.I (IV/b)

NIP. 19690925 199401 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK
KODE POS 22742 TELP (0634)4345040 FAKS (0634)4345038

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800.08/1179/DKPS/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 nomor 1260);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Rencana Kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312);
20. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
22 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 Nomor 51);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 Nomor 332, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
25. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 nomor 1043).
26. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 Nomor 1260);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal, 15 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUDKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SITEGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19700822 200604 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Asisten Setdakab Tapanuli Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

DUKCAPIL PRIMA

INDONESIA MAJU

Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, Akuntabel

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, Akuntabel

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan program kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 telah disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana lampiran undang-undang 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016 yang telah disetujui bersama antara Bupati Tapanuli Selatan dan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini dibuat, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sipirok, 15 Juli 2024
Yang diperintahkan,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP.19700822 200604 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	35
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	40
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
	3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	45
	4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025	45
BAB V	PENUTUP	47

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
c. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006–2025;
33. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
34. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026;

36. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;
37. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
38. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
39. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan tugas pokok serta mengukur seberapa baik pencapaian target-target yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1) Terencananya setiap pelaksanaan kegiatan untuk satu tahun ke depan;
2) Menyesuaikan kegiatan dengan plafon/pagu dana agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien;
3) Mengetahui indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai;
4) Mengetahui rencana jadwal pelaksanaan kegiatan;
5) Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat terlaksana secara terarah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan Pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah disahkan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran serta menjelaskan keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bab ini memuat tentang rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, seta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode 2021-2026 dengan muatan visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah untuk :

1. Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala Daerah terpilih;
2. Mengidentifikasi faktor faktor penghambat dan pendorong pelayanan skpd yang mempengaruhi program visi misi kepala daerah terpilih.

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada RPJMD 2021-2026 adalah :

“**TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG SEHAT CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI**“

Penjelasan makna atas pernyataan Visi di atas adalah**:**

1. **TAPANULI SELATAN YANG MAJU** mengandung arti yakni Tapanuli Selatan harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik pada semua aspek kehidupan.
2. **SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL** mengandung arti yakni bahwa kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan harus ditopang dan berbasis sumber daya manusia pembangun yang artinya sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan atau membina

sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan komprehensif dalam berpikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, rela berkorban, hidup torelan, berprilaku terpuji dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai bidang dan sector pembangunan.

Kata "SEHAT – CERDAS – SEJAHTERA" sengaja dikutip sebagai penekanan bahwa sumber daya manusia yang unggul tersebut dapat diartikan sebagai manusia yang sehat, cerdas, sejahtera yang kreatif dan inovatif serta selalu aktif mencari hal-hal baru demi kemajuan masyarakat dan daerah Tapanuli Selatan.

3. **SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI,** mengandung arti bahwa sumber daya alam yang ada harus mendatangkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera.

   Sumber daya alam yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita harus lestari dalam arti memenuhi prinsip berkelanjutan yang ditandai dalam pemanfaatan sumber daya alam yang produktif tetap memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pembangunan yang akan datang tidak hanya untuk kepentingan sesaat tetapi juga kelestarian alam dan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ);
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan lingkungan;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat;
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;

5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi di atas adalah :

Misi 1 : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul, dan Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).** Misi ini bermakna bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri sebagai pondasi utama pembangunan, maka rencana pembangunan ke depan difokuskan pada upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, derajat kesehatan, serta pengembangan adat, budaya dan kearifan lokal dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.

Misi 2: **Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, dan berwawasan lingkungan.** Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan-produktifitas pertanian dan perikanan, pengembangan industri pengolahan dan ekonomi kreatif yang menggunakan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan, perdagangan barang dan jasa, serta investasi daerah.

Misi 3: **Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.** Misi ini bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah, maka rencana pembangunan difokuskan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah dan atasan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Misi 4: **Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.** Misi ini bermakna

bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

Misi 5: Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Dari kelima misi diatas, yang dapat mempengaruhi faktor penghambat dan pendorong visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah kabupaten Tapanuli Selatan adalah misi yang ke empat yaitu :

"Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa"

Sehingga permasalahan Organisasi Perangkat Daerah serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Visi : "Tapanuli Selatan yang maju berbasis sumber daya manusia pembangun yang sehat cerdas, sejahtera serta sumber daya alam yang produktif dan lestari"			
Misi : "Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa"			
Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	**Permasalahan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Tap. Selatan)**	**Faktor**	
		Penghambat	**Pendorong**
Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Masih sangat kurangnya Kesadaran masyarakat dalam memahami arti penting dokumen kependudukan yang merupakan bukti otentik	Pelaksanaan kegiatan 1. Penyediaan Sumber Daya Manusia berlatar pendidikan Teknologi Informasi dan 2. melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap ASN tersedia
	Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Tingkat Kesadaran terhadap arti penting dan kepemilikan dokumen kependudukan	Belum maksimal pelayanan kependudukan dan tingkat penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil	Pelaksanaan kegiatan 1. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan 2. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
	Masih kurangnya penyajian data dan informasi kependudukan yang dapat	Belum maksimal analisis data kependudukan dan penerapan aplikasi	Pelaksanaan kegiatan 1. Pengolahan dalam penyusunan laporan

Visi : "Tapanuli Selatan yang maju berbasis sumber daya manusia pembangun yang sehat cerdas, sejahtera serta sumber daya alam yang produktif dan lestari"			
Misi : "Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa"			
Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	**Permasalahan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Tap. Selatan)**	**Faktor**	
		Penghambat	**Pendorong**
	diakses oleh lembaga dan masyarakat	pengolahan data kependudukan	informasi kependudukan 2. Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
	Kurang memadainya sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi dalam pelayanan kependudukan	Jarak wilayah Desa Terpencil dan kurangnya perangkat pendukung	Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Database Kependudukan
	Kurangnya koordinasi antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Masih ditemukan Miskomunikasi antara petugas dalam mengartikan regulasi di bidang dukcapil	Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Untuk mencapai tujuan visi dan misi diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang baik dan terus membuat perbaikan–perbaikan dan penyempurnaan pelayanan sehingga mencerminkan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menyongsong masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental masa depan, dengan demikian Visi harus menjadi milik bersama dan dijalankan oleh seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.

Visi yang tepat bagi masa depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan akan mampu menjadi akselator kegiatan, termasuk perancangan rencana strategik secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tujuan Penetapan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
2. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik;
3. Memiliki orientasi terhadap masa depan;
4. Menumbuhkan komitmen aparatur dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka **Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan** adalah :

"Tertib Administrasi Kependudukan dengan Tersedianya Database Kependudukan yang Akurat dan Terpercaya"

Misi pada hakekatnya merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta sasaran yang ingin dicapai. **Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan** adalah :

"Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terbaik dan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Arti Penting Dokumen Kependudukan bagi Penduduk dan Perencanaan Pembangunan"

Dimana visi misi tersebut masih terus berjalan pada tahun-tahun mendatang. Adapun makna misi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1) Membangun dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat untuk menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah di bidang kependudukan;
2) Membangun dan menciptakan database kependudukan sebagai sumber data kependudukan yang menjadi kerangka dasar perencanaan pembangunan.

Pengukuran Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah didasarkan pada sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi sd. 2024
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%	100
2.	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%	96,88
3.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	100%	96,88
4.	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayanan (%)	100%	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi sd. 2024
5.	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (%)	100%	90,18

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 terdiri dari 5 jenis program sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
B. Program Pendaftaran Penduduk
C. Program Pencatatan Sipil
D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pelayanan PendaftaranPenduduk
8. Penataan Pendaftaran Penduduk
9. Pelayanan Pencatatan Sipil
10. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
11. Penyusunan Profil Kependudukan

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2021 (%)	Realiasi Renja Perangkat Daerah 2021 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
2.12.2.12.0.00.0.00.06.000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah**									
2.12.2.12.0.00.0.00.06.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00	98,13	100,00	94,53	94,53	100,00	100	100
2.12.2.12.0.00.0.00.06.00.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100,00	99,00	100,00	99,94	99,94	100,00	94,60	94,60
2.12.2.12.0.00.0.00.06.00.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	100,00	99,58	100,00	99,98	99,98	100,00	94,60	94,60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2021 (%)	Realiasi Renja Perangkat Daerah 2021 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.2.12.0.00.0.00.06.00.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayanan (%)	100,00	82,88	100,00	99,20	99,20	100,00	100	100
2.12.2.12.0.00.0.00.06.00.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Hasil Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan (%)	100,00	94,60	100,00	97,07	97,07	100,00	83,63	83,63

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk dengan struktur baru berdasarkan Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
   a. Seksi Jabatan Fungsional Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. koordinasi perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKRETARIS DINAS

Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
b. koordinasi penyusunan perencanaan;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
i. koordinasi penyusunan Laporan Kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan

pelayanan pendaftaran penduduk. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
g. pengendalian pelaksanaan pendaftaran penduduk;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan pelayanan pencatatan sipil. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
g. pengendalian pelaksanaan pencatatan sipil;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pencatatan sipil; dan

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

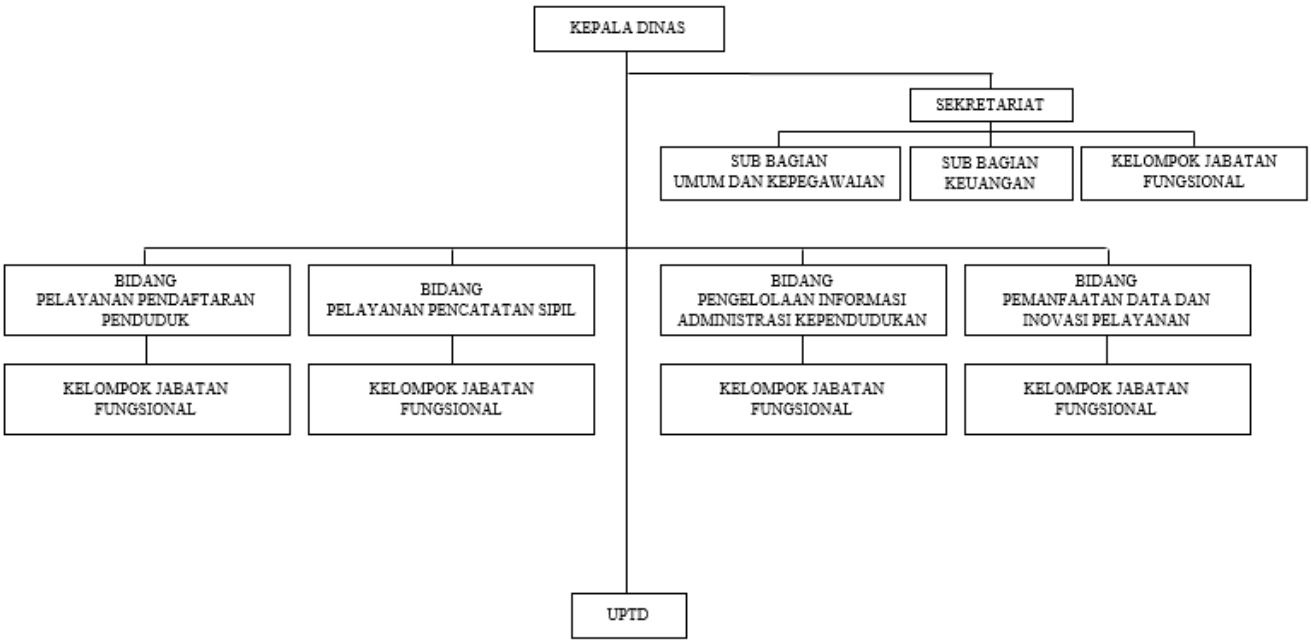
a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
e. pengendalian dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang informasi administrasi kependudukan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

F. BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
e. pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;
f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data; dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
i. pelaksanaan administrasi di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

LAMPIRAN I
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH



Berdasarkan struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan turut mendukung kesuksesan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan dengan pencapaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik per Satuan Penduduk dengan target pencapaian tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar 93,48%;
2. Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun dengan target pencapaian Tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar 92,23%;
3. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga dengan target pencapaian Tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar 100,00%.
4. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan dengan target pencapaian Tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar 44,31%.

Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik per tanggal 31 Desember 2022 di Kabupaten Tapanuli Selatan, seperti disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Tahun 2024

NO	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK		%
			WAJIB KTP	SUDAH REKAM	
1	120301	ANGKOLA BARAT	18.940	17.886	94,44
2	120302	BATANG TORU	24.636	23.291	94,54
3	120303	ANGKOLA TIMUR	15.678	14.811	94,47
4	120304	SIPIROK	25.462	24.110	94,69
5	120305	SAIPAR DOLOK HOLE	10.389	9.688	93,25
6	120306	ANGKOLA SELATAN	21.797	19.902	91,31
7	120307	BATANG ANGKOLA	15.914	14.980	94,13
8	120314	ARSE	6.552	6.278	95,82
9	120320	MARANCAR	7.665	7.216	94,14
10	120321	SAYUR MATINGGI	18.711	17.426	93,13
11	120322	AEK BILAH	5.145	4.730	91,93
12	120329	MUARA BATANG TORU	10.865	10.008	92,11
13	120330	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	11.421	10.561	92,47
14	120331	ANGKOLA SANGKUNUR	14.823	13.415	90,50
15	120332	ANGKOLA MUARA TAIS	9.965	9.444	94,77
	1203	**TAPANULI SELATAN**	**217.963**	**203.746**	**93,48**

Sumber : Data Kementerian Dalam Negeri RI Semester II Tahun 2022.

Kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Tapanuli Selatan per 31 Desember 2022 berdasarkan Data Semester II Tahun 2022 sebesar 93,48% tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dengan pencapaian tertinggi terdapat di Kecamatan Arse yakni sebesar 95,82% dan terendah di Kecamatan Angkola Sangkunur yaitu sebesar 90,50%.

Selanjutnya, cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun

NO	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-18			%
			MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	JUMLAH	
1	120301	ANGKOLA BARAT	7.551	392	7.943	95,06
2	120302	BATANG TORU	11.192	704	11.896	94,08
3	120303	ANGKOLA TIMUR	7.459	368	7.827	95,30
4	120304	SIPIROK	10.144	632	10.776	94,14
5	120305	SAIPAR DOLOK HOLE	4.335	445	4.780	90,69
6	120306	ANGKOLA SELATAN	11.141	1.462	12.603	88,40
7	120307	BATANG ANGKOLA	6.376	337	6.713	94,98
8	120314	ARSE	2.478	136	2.614	94,80
9	120320	MARANCAR	3.242	140	3.382	95,86
10	120321	SAYUR MATINGGI	8.545	540	9.085	94,06
11	120322	AEK BILAH	2.518	189	2.707	93,02
12	120329	MUARA BATANG TORU	6.329	400	6.729	94,06
13	120330	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	4.888	324	5.212	93,78
14	120331	ANGKOLA SANGKUNUR	7.129	1.952	9.081	78,50
15	120332	ANGKOLA MUARA TAIS	4.422	216	4.638	95,34
	1203	**TAPANULI SELATAN**	**97.749**	**8.237**	**105.986**	**92,23**

Sumber : Data Kementerian Dalam Negeri RI Semester II Tahun 2022.

Kecamatan Marancar memiliki cakupan kepemilikan kutipan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun tertinggi diantara kecamatan yang lain yaitu sebesar 95,86% dan Kecamatan Angkola Sangkunur memiliki cakupan kepemilikan terendah yaitu sebesar 78,50% sehingga kedepan lebih ditingkatkan layanan dukcapil terkait kepemilikan kutipan akta kelahiran.

Sementara, cakupan kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan per tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

NO	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KELUARGA
1	120301	ANGKOLA BARAT	7.102
2	120302	BATANG TORU	9.804
3	120303	ANGKOLA TIMUR	6.080
4	120304	SIPIROK	9.821
5	120305	SAIPAR DOLOK HOLE	4.145
6	120306	ANGKOLA SELATAN	8.289
7	120307	BATANG ANGKOLA	6.413
8	120314	ARSE	2.664
9	120320	MARANCAR	3.009
10	120321	SAYUR MATINGGI	7.399
11	120322	AEK BILAH	1.909
12	120329	MUARA BATANG TORU	4.425
13	120330	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	4.721
14	120331	ANGKOLA SANGKUNUR	5.634
15	120332	ANGKOLA MUARA TAIS	4.123
	1203	**TAPANULI SELATAN**	**85.538**

Sumber : Data Kementerian Dalam Negeri RI Semester I Tahun 2022.

Dalam rangka mendukung Program Kementerian Sosial Republik Indonesia antara lain PKH, BLT, BST yang terhimpun dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan melalui arahan Bupati Tapanuli Selatan wajib menfasilitasi setiap keluarga memiliki Kartu Keluarga dan didistribusikan kepada penduduk secara berjenjang melalui Camat seterusnya Lurah dan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tingkat kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan

NO	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN			%
			MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	JUMLAH	
1	120301	ANGKOLA BARAT	5.062	5.689	10.751	47,08
2	120302	BATANG TORU	8.308	7.071	15.379	54,02
3	120303	ANGKOLA TIMUR	4.324	5.333	9.657	44,78
4	120304	SIPIROK	6.837	8.106	14.943	45,75
5	120305	SAIPAR DOLOK HOLE	1.925	4.353	6.278	30,66
6	120306	ANGKOLA SELATAN	6.101	7.175	13.276	45,96
7	120307	BATANG ANGKOLA	3.914	5.221	9.135	42,85
8	120314	ARSE	1.891	2.040	3.931	48,10
9	120320	MARANCAR	2.171	2.387	4.558	47,63
10	120321	SAYUR MATINGGI	3.987	6.772	10.759	37,06
11	120322	AEK BILAH	774	2.502	3.276	23,63
12	120329	MUARA BATANG TORU	3.161	4.049	7.210	43,84
13	120330	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	2.664	3.801	6.465	41,21
14	120331	ANGKOLA SANGKUNUR	3.527	5.637	9.164	38,49
15	120332	ANGKOLA MUARA TAIS	3.289	2.687	5.976	55,04
	1203	**TAPANULI SELATAN**	**57.935**	**72.823**	**130.758**	**44,31**

Sumber : Data Kementerian Dalam Negeri RI Semester II Tahun 2022.

Masih rendahnya kepemilikan buku nikah merupakan permasalahan nasional yang mengindikasikan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta perkawinan, dimana di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2022 baru mencapai 44,31% dan tertinggi ada di Kecamatan Angkola Muara Tais sebesar 55,04% dan terendah di Kecamatan Aek Bilah sebesar 23,63%.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan layanan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim dengan mencatatkan pada Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan menerima laporan kepemilikan Buku Nikah bagi yang muslim melalui pelayanan reguler dengan persyaratan melampirkan fotocopi Buku Nikah.

Kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi dengan KUA Kecamatan se Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan cakupan kepemilikan buku nikah.

Data Kependudukan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL PENDUDUK
1	120301	ANGKOLA BARAT	13.117	13.104	26.221
2	120302	BATANG TORU	18.141	17.815	35.956
3	120303	ANGKOLA TIMUR	11.691	11.549	23.240
4	120304	SIPIROK	17.821	17.782	35.603
5	120305	SAIPAR DOLOK HOLE	7.461	7.315	14.776
6	120306	ANGKOLA SELATAN	16.882	16.209	33.091
7	120307	BATANG ANGKOLA	10.909	11.117	22.026
8	120314	ARSE	4.456	4.553	9.009
9	120320	MARANCAR	5.483	5.415	10.898
10	120321	SAYUR MATINGGI	13.431	13.625	27.056
11	120322	AEK BILAH	3.879	3.743	7.622
12	120329	MUARA BATANG TORU	8.907	8.457	17.364
13	120330	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	7.926	8.260	16.186
14	120331	ANGKOLA SANGKUNUR	11.916	11.307	23.223
15	120332	ANGKOLA MUARA TAIS	7.109	7.188	14.297
	1203	**TAPANULI SELATAN**	**159.129**	**157.439**	**316.568**

Sumber : Data Kementerian Dalam Negeri RI Semester II Tahun 2022.

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di Tapanuli Selatan dengan total penduduk sebanyak 316.568 jiwa.

Sumber daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri atas :

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi serta peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jumlah dan komposisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Daerah Kab. Tapanuli Selatan

PENDIDIKAN		GOLONGAN		ESELON		KET
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	
S2	2	IV	4	II	1	
S1	17	III	15	III	5	
SLTA	2	II	2	IV	10	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, 2022.

Terdapat 20 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan komposisi yang tidak lengkap dan kurang ideal. Jumlah jabatan struktural sebanyak 21 sementara yang menduduki jabatan struktural hanya 16 ASN. Daftar nama-nama ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan per Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.10
Daftar Nama-Nama ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	NAMA LENGKAP	STATUS PEGAWAI	JABATAN
1.	ABADI SIREGAR, ST, MT	PNS	Kepala Dinas
2.	AMBIA, SIP	PNS	Sekretaris
3.	FARIDA CHAIRUNNISA HARAHAP, SE	PNS	Kabid Pelayanan Dafduk
4.	MARJUKI RAMBE, S.Sos	PNS	Kasi Identitas Penduduk
5.	SERY REZEKY S.Sos	PNS	Kasi Pendataan Penduduk
6.	DASNIAR ELIDAWATI SIREFAR, S.Sos	PNS	Kasi Pindah Datang Penduduk
7.	ZULPAN EFENDI HASIBUAN, SH	PNS	Kabid Pelayanan Capil
8.	MUHAMMAD RIDOAN DAULAY, S.Sos	PNS	Kasi Kelahiran
9.	ENDANG HARIANJA, SE	PNS	Kasi Kematian dan Warga Negara
10.	HALMIDAYANTI DONGORAN S.Sos	PNS	Kasi Perkawinan dan Perceraian
11.	LANMORA DELI DHANNA HARAHAP, SH	PNS	Kabid PIAK
12.	FITRI JULIANTY SIREGAR, S. Psi	PNS	Kasi Bina SDM
13.	DUDI KOMARUDI, S.Sos	PNS	Kasi SIAK
14.	ANISAH PASARIBU, SE	PNS	Kabid Pemanfaatan Data
15.	LATIFAH SIREGAR, S. Sos	PNS	Kasi Inovasi Pelayanan
16.	SEFRIANI ANITA, SE	PNS	Staf
17.	DEWI SURYANI BATUBARA, S.Ag	PNS	Staf
18.	WINDA SARI HARAHAP	PNS	Staf
19.	CIPTO WALUYO	PNS	Staf

NO	NAMA LENGKAP	STATUS PEGAWAI	JABATAN
20.	MADJEN SARWEDI	PNS	Staf
21.	SOLAHUDDIN	THL	Tenaga Entry Data
22.	MUHAMMAD ANSORI LUBIS	THL	Tenaga Entry Data
23.	PUTRI ARSE ANGRAINI TANJUNG	THL	Tenaga Entry Data
24.	MMOHDAN ARIF HASIBUAN	THL	Tenaga Entry Data
25.	NURMINTA ITO PULUNGAN	THL	Tenaga Entry Data
26.	NOVITA MILVA K. BATUBARA	THL	Tenaga Entry Data
27.	WINDA PERMATA SARI HARAHAP	THL	Tenaga Entry Data
28.	MUHAMMAD RIZAL SATYA NEGARA	THL	Tenaga Entry Data
29.	PURNAMA SARI POHAN	THL	Tenaga Entry Data
30.	TATANG FAHRI HUTASUHUT	THL	Petugas Kebersihan
31.	NOVIE HARIATY PUTRI RAMBE	THL	Tenaga Administrasi
32.	ILFAH NOVRIANTI NASUTION	THL	Tenaga Administrasi
33.	ANNISYA MAYA SARI SIREGAR	THL	Tenaga Administrasi
34.	NOVITA GULO	THL	Tenaga Administrasi
35.	EKO PRASETIO	THL	Tenaga Administrasi
36.	INONG NURJANNAH	THL	Tenaga Administrasi
37.	HASMAR HASIBUAN	THL	Tenaga Administrasi
38.	ADITIA PRADANA LUBIS	THL	Tenaga Administrasi
39.	WANDIRO RIZKI HARAHAP	THL	Penjaga Kantor
40.	SYAFRIL EFENDI	THL	Tenaga Administrasi
41.	ILYAS ARIFIN HARAHAP	THL	Tenaga Administrasi
42.	GUSRO MARYAM SIAGIAN	THL	Tenaga Administrasi
43.	TIARA MENTARI GULO	THL	Tenaga Administrasi
44.	HARDIANSYAH HARAHAP	THL	Tenaga Administrasi
45.	YETTI YUSRIDA HARAHAP	THL	Tenaga Administrasi
46.	ANNISA SIREGAR	THL	Tenaga Administrasi
47.	IKA WAHIDAH	THL	Tenaga Administrasi
48.	SUKRIANI HARAHAP	THL	Tenaga Administrasi
49.	RAHMAD SYAFII HASIBUAN	THL	Tenaga Administrasi
50.	FEBRI ALDI HAMZAH HARAHAP	THL	Tenaga Administrasi
51.	ELLI SARI SIREGAR	THL	Tenaga Administrasi
52.	DIAN PERTIWI SIREGAR	THL	Tenaga Administrasi
53.	RAHMI PAKPAHAN	THL	Tenaga Administrasi
54.	RANI NURZANNAH	THL	Tenaga Administrasi
55.	FIKRI HARIS HERMANTO	THL	Tenaga Administrasi

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, 2022.

2) Fasilitas Pendukung

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan fasilitas pendukung sebagai sarana dan prasarana, sehingga tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dapat berjalan dengan baik. seperti tercantum pada tabel 2.11 dibawah ini.

Tabel 2.11
Fasilitas Pendukung (Sarana dan Prasarana)
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
1	Air Conditioner (AC)	9	Unit	4	5
2	Alat Penghancur Kertas	4	Buah	3	1
3	Bangku Tunggu	5	Buah	5	-
4	Brangkas	1	Buah	1	-
5	Camera Video	7	Unit	2	5
6	Dispenser	2	Unit	1	1
7	External	10	Unit	9	1
8	Faxcimile	2	Unit	1	1
9	Filling	20	Unit	11	9
10	Handyacam	1	Unit	1	-
11	Kursi Besi	1	Unit	1	-
12	Kursi BIasa	27	Unit	20	7
14	Kursi kerja pejabat lain- lain	6	Unit	6	-
15	Kursi Putar	21	Unit	21	-
16	Kursi Rapat	55	Unit	55	-
17	Kursi Tamu	6	Unit	6	-
18	Laptop	8	Unit	5	3
19	Lemari Arsip	3	Unit	3	-
20	Lemari Besi	4	Unit	4	-
21	Lemari Kayu	7	Unit	7	-
22	Mainframe	5	Unit	5	1
23	Meja Biro	16	Unit	16	1
24	Meja Kerja pegawai staf	2	Unit	2	0
25	Meja Komputer	2	Unit	2	-
26	Meja Bundar	1	Unit	-	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	RUSAK
27	Meja Kerja	22	Unit	20	2
28	Meja Rapat	2	Unit	2	-
29	Meja Receptionist	1	Unit	1	-
30	Mesin Fotocopy	1	Unit	1	-
31	Mesin Ketik	1	Unit	-	1
32	Mini Bus	4	Unit	4	-
33	Netware Interface	2	Unit	2	2
34	Note Book	10	Unit	10	10
35	PC Unit	17	Unit	17	17
36	Peralatan Jaringan	3	Unit	3	3
37	Personal Komputer Lain	13	Unit	13	-
38	Pesawat Telepon	3	Unit	2	1
39	Printer	47	Unit	29	18
40	Proyekt Attachment	1	Unit	1	-
41	Rak Besi	2	Unit	2	-
42	Sofa	3	Unit	3	-
43	Stabilisator	15	Unit	15	-
44	TV	2	Unit	2	-

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	-	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	100	100	100	94,53	100	100	100	-
2	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	-	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100	100	100	100	99,94	94,60	100	100	-
3	Cakupan penerbitan kartu keluarga, cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (ktp) cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	-	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	100	100	100	100	99,98	94,60	100	100	-
4	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayanan (%)	-	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayanan (%)	100	100	100	100	99,20	100	100	100	-
5	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (%)	-	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (%)	100	100	100	100	97,07	83,63	100	100	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat disimpulkan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. **Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik** bagi setiap penduduk di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

   Sejalan dengan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, setiap Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menuntaskan seluruh perekaman KTP Elektronik bagi setiap penduduk yang berusia ± 17 tahun atau sudah kawin di wilayah masing-masing.

2. **Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun**

   Setiap anak Usia 0-18 Tahun melalui penetapan RPJMN 2014-2019 wajib memiliki Kutipan Akta Kelahiran melalui pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di masing-masing Kabupaten/Kota tanpa dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

   Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan percepatan pelayanan Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun dengan cakupan kepemilikan di atas 90 % dalam rangka dukungan Dinas Dukcapil dalam penyiapan Kabupaten Layak Anak (KLA) secara Nasional.

3. **Kepemilikan Kartu Keluarga**

   Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Pelaksanaan pemutakhiran Kartu Keluarga wajib dilaksanakan untuk mewujudkan database kependudukan yang akurat dan mutakhir. Ketersediaan Data Keluarga dan kepemilikan Kartu Keluarga merupakan salah satu indikator penting dalam penyajian data kependudukan skala Nasional.

4. Pemanfaatan Data Kependudukan

Penguatan Pengelolaan database kependudukan nasional (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk pembangunan demokrasi (Pemilu/Pilkada) pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 58 ayat 4.

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pelayanan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna di Kabupaten/Kota, meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pemerintah Pusat secara nasional telah mengadakan kesepakatan pemanfaatan Data Kependudukan sesuai amanat regulasi yang berlaku di Indonesia.

5. Pemberian Kartu Identitas pada Anak

Kartu Indentitas Anak merupakan wujud kepedulian Pemerintah Pusat terhadap setiap anak Indonesia dan lanjutan dari Program KTP Elektronik yang mendorong setiap penduduk memiliki satu identitas (single indentity).

6. Peningkatan Kesadaran Penduduk terhadap Arti Penting dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi antara lain pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

7. Dukcapil Go Digital yang memantapkan tata kelola pelaksanaan kependudukan dan pencatatan sipil yang membahagiakan masyarakat **melalui penggunaan teknologi digital** dengan prinsip layanan Mudah Cepat dan Gratis.

8. **Sukses Pemilukada,** dukungan Dinas Dukcapil demi keberlangsungan pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Tapanuli Selatan melalui kepemilikan Kepemilikan KTP Elektronik.
9. **Satu Data Kependudukan** yang merupakan Program dan kegiatan dari Badan Pusat Statistik yang memerlukan dukungan penuh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kesuksesan kegiatannya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada prinsipnya rencana kerja yang dibuat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di tuangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.13
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN (%)	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN (%)	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00	3.148.557.533	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00	4.624.688.840	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Tapanuli Selatan	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100,00	542.586.313	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Tapanuli Selatan	Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	100,00	436.656.000	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	100,00	157.993.639	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan (%)	100,00	147.918.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Tapanuli Selatan	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayanan (%)	100,00	356.548.557	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Tapanuli Selatan	Penggunaan Data Konsolidasi Bersi (DKB) untuk Layanan	100,00	50.826.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (%)	100,00	125.988.335	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	100,00	43.866.000	

Penjelasan dari Tabel 2.13 diatas adalah sebagai berikut :

a. Penambahan anggaran pada Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak ada;
b. Pengurangan dan Pergeseran Anggaran sebagai bentuk rasionalisasi anggaran dampak COVID-19 pada kegiatan belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan belanja modal.

Program pembangunan daerah yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 jenis program sebagai berikut :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Pendaftaran Penduduk
c) Program Pencatatan Sipil
d) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
e) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, sejumlah permasalahan sebagai masukan usulan kegiatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :

1) Peningkatan layanan keliling dukcapil (dukcapil mobile) terjadwal ke desa/kelurahan terpencil yang membantu kemudahan masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan.
2) Waktu penyiapan dokumen kependudukan dari pendaftaran sampai dokumen diterima penduduk lebih cepat, bisa 1 (satu) jam atau paling lama 1 (satu) hari sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
3) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, diperlukan Struktur Pengelola Program SIAK memiliki tingkat pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Aplikasi Komputer seperti sistem analis, programmer dan administrator

database kependudukan. Pengalokasian sumber daya manusia, terutama ASN dengan klasifikasi tersebut diatas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mendesak untuk segera direalisasikan Badan Kepegawaian Daerah dan pengiriman ASN tersedia mengikuti **pelatihan atau bimbingan teknis** terkait disiplin ilmu yang dibutuhkan.

4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dan kepemilikan dokumen kependudukan;

   Tingginya antusias penduduk memiliki dokumen kependudukan pada saat dokumen tersebut diperlukan, mengindikasikan bahwa masih kurangnya kesadaran penduduk melaporkan peristiwa kependudukan sesegera mungkin. Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah diharapkan lebih intensif melaksanakan **Sosialisasi Kebijakan Kependudukan** dan **Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan** dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan secara lebih cepat dan lengkap.

5) Masih kurangnya penyajian data dan informasi kependudukan yang dapat diakses oleh lembaga dan masyarakat;

   Penyajian Data Kependudukan merupakan amanat pasal 7 huruf g Undang-Undang 24 Tahun 2013 yang menyatakan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Sebagai instansi teknis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah wajib menyajikan data kependudukan skala Kabupaten/Kota dengan lebih meningkatkan kegiatan **Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan** dan **Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat**.

6) Kurang memadainya sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi dalam pelayanan kependudukan

   Jangkauan wilayah dari desa pelosok ke Ibukota Kecamatan atau Kabupaten memerlukan sarana mobilisasi petugas lebih dekat ke penduduk seperti penyedian layanan Mobil Keliling atau Petugas KTPel Mobile menggunakan kendaraan roda 2 (dua). Disamping itu diperlukan penambahan sarana pendukung perangkat computer di bidang teknologi

informasi melalui kegiatan **Pengembangan Database Kependudukan** secara berkesinambungan terkait pemeliharaan perangkat.

7) Kurangnya koordinasi antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Harmonisasi petugas di bidang kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya Camat dan Kepala Desa/Lurah terkait pelayanan dalam menyikapi regulasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil perlu lebih ditingkatkan secara berkesinambungan melalui kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan** dengan fasilitator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.14
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	-
2	Program Pendaftaran Penduduk	Kab. Tapanuli Selatan	Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	-
3	Program Pencatatan Sipil	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100	-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tapanuli Selatan	Penggunaan Data Konsolidasi Bersi (DKB) untuk Layanan	100	-
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	100	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPANULI SELATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional sebagai berikut :

1. Perubahan Tata cara, prosedur dan persyaratan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan;
2. Program Pemerintah dalam rangka mewujudkan single identity (satu identitas) dalam arti satu penduduk memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai upaya terobosan menciptakan database kependudukan secara Nasional yang tersimpan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Instansi Pelaksana Teknis di Tingkat Pusat dalam Penataan Administrasi Kependudukan;
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019;
4. Penetapan target maksimal penerbitan kutipan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam RPJMN 2014-2019 diharapkan setiap bayi yang lahir langsung diserahkan kutipan akta kelahiran sebagai hak dasar dan jati diri sebagai warga negara Indonesia;
5. Penerapan Program SIAK terkonsolidasi dari Kabupaten/Kota ke Database Kementerian Dalam Negeri RI sebagai upaya mewujudkan Data Kependudukan yang valid, akurat dan terpercaya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

a. pelayanan publik;
b. perencanaan pembangunan;
c. alokasi anggaran;
d. pembangunan demokrasi; dan
e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Adapun tujuan Renja Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil** yang mendorong kesadaran penduduk tentang arti penting dan kepemilikan dokumen kependudukan. Negara menjamin hak setiap warga negara memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai identitas resmi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.
2. **Peningkatan kualitas Database Kependudukan** sebagai bahan penyajian Data Kependudukan yang akurat dan terpercaya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Data Kependudukan merupakan rujukan data secara Nasional yang digunakan dalam berbagai sektor pembangunan, antara lain perekonomian, politik dan pelayanan publik.

Sebelum sampai pada sasaran yang ingin dicapai dalam Renja SKPD ini, terlebih dahulu dijabarkan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. Pembangunan dan pemeliharaan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam upaya mendukung kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Peningkatan sumber daya manusia berkualitas di bidang teknologi informasi sebagai wujud peningkatan kualitas petugas dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Sebagai bentuk penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditetapkan diatas, maka disusun sasaran Renja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu layanan administrasi kependudukan yang semakin mudah dan cepat sebagai upaya Peningkatan Pelayanan Publik bidang Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan antara lain KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Meningkatnya akses pengguna data kependudukan dari Lembaga Pemerintah antara lain Dinas/Instansi terkait di tingkat Kabupaten dan Lembaga Swasta antara lain Bank atau Perusahaan Swasta yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dan berdasarkan kebijakan umum Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, beberapa Program yang dituangkan dalam Renja SKPD Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)
2	Program Pendaftaran Penduduk	Kab. Tapanuli Selatan	Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan
3	Program Pencatatan Sipil	Kab. Tapanuli Selatan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tapanuli Selatan	Penggunaan Data Konsolidasi Bersi (DKB) untuk Layanan
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kab. Tapanuli Selatan	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**Kab. Tapanuli Selatan**		**5.303.954.840**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**100**	**4.624.688.840**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Tapanuli Selatan	3 Dokumen	133.017.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyedianan Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapanuli Selatan	1 Laporan	2.518.075.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beratribut Kelengkapan dan Jumlah Pengawai Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tapanuli Selatan	55 orang	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dan Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Tahun)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Tahun	645.273.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik yang Disediakan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tapanuli Selatan	1 Tahun	1.177.901.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinanya dan jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Dipelihara Direhabilitas	Kab. Tapanuli Selatan	1 Tahun	120.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**100**	**436.656.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan	Kab. Tapanuli Selatan	1 Tahun	421.456.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Presentasi Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Kab. Tapanuli Selatan	3 Laporan	15.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan**	Kab. Tapanuli Selatan	100	147.918.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	03	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Kab. Tapanuli Selatan	100	147.918.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Penggunaan Data Konsolidasi Bersi (DKB) untuk Layanan**	Kab. Tapanuli Selatan	1 Tahun	50.826.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Rasio Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan**	Kab. Tapanuli Selatan	100	50.826.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan**	Kab. Tapanuli Selatan	**1 Tahun**	43.866.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Optimalisasi Data Administasi Kependudukan Oleh OPD	Kab. Tapanuli Selatan	1 Laporan	43.866.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025

Rumusan Rencana Program sebagaimana Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (terlampir).

Program dan kegiatan pada tahun 2025 dilaksanakan mengacu kepada Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kab. Tapanuli Selatan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian 2026
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%
2.	Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%
3.	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100%
4.	Penggunaan Data Konsolidasi Bersi (DKB) untuk Layanan	100%
5	Persentase Hasil Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	100%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai instansi pelaksana teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil wajib berkomitmen tinggi menuntaskan target kinerja yang telah dibebankan atau melebihi target kinerja sebagai sebuah prestasi kerja. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 8 dinyatakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

1) mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2) memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

3) mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4) mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5) menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berkewajiban membantu tugas-tugas Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Tapanuli Selatan sebagai mana amanat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, yakni Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

1) koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2) pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3) pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4) pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5) pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
6) penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7) penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
8) koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan ini berfungsi sebagai dokumen Perencanaan terhadap penyusunan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Program-program kegiatan yang termuat dalam Renja ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik, transparan dan terkendali.

Mudah-mudahan tujuan dan sasaran yang diinginkan akan tercapai dengan baik tanpa mengesampingkan faktor-faktor pendukung lainnya dan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Sipirok, 15 Juli 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP.19700822 200604 1 001

RENCANA KERJA
TAHUN 2025



DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 oleh Dinas Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan yang ada baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kegiatan tahun 2025 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambaahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
20. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangja Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeraah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah kabupaten tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Sealatan Tahun 2016 Nomor 279);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

a. Menjabarkan Renstra Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026 kedalam Rencana Program Prioritas Kegiatan tahunan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Menciptakan sinergitas pembangunan Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 bertujuan untuk :

a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli selatan Tahun 2025.

b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

c. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja (Renja) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, serta masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2024 Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya yang bersumber dari APBD Rp. 9.309.075.215.00,- dari total anggaran tersebut yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan, alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

Capaian kinerja tahun 2024 akan ditampilkan pada Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diurai terdiri dari kode rekening, Urusan/Bidang Urussan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan (Output), Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2023), Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2023, Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024, Target Capaian Program dan Kegiatan 2024 dan Perkiraan

realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan. Target Renja dan Realisasi Renja 2024.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indicator dibandingkan dengan realisasinya. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara :

(1) Apabila semakin tinggi realisasi indicator menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendahnya realisasi indicator menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

(2) Apabila semakin tinggi realisasi indicator menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi indicator menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategori Capaian

NO	TENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
	90 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
	76 % ≤ 90 %	Tinggi
	66 % ≤ 75 %	Sedang
	51 % ≤ 65 %	Rendah
	≤ 50 %	Sangat Rendah

Tabel 3.1 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	$\frac{REALISASI}{TARGET} \times 100\% = CAPAIAN$
1	Meningkatkan Penanganan kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS (%)	$\frac{0,2}{0,2} \times 100 = 100\ \%$

Dari data table diatas dapat dijelaskan :

1. Sasaran Strategis ***"Meningkatkan Penanganan kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)"*** dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Target yang ditetapkan :
   a. "Persentase Penurunan PMKS " dengan target kinerja 0,2 terealisasi 0,2 dengan Capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

1. Analisis penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2024	2024	2024
1.	Meningkatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	100	97,97	97,97

Persentase Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Belum optimalnya pengeloaan data yang akurat dan masih terdapat data ganda dalam penerimaan bantuan social PMKS	Terus dilakukan berifikasi dan validasi data untuk mendapatkan data yang akurat dan efisien

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2024	2024	2024
2.	Meningkatkan Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100	100	100

Persentase pemberdayaan social bagi penyandang masalah kesejahteraan social ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Belum Optimalnya Pengembangan Pelatihan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS	Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada PMKS setiap tahunnya, pengoptimalan potensi dan sumber daya lokal sebagai SDM yang mampu menerapkan atau menghasilkan usaha mandiri dari pelatihan yang telah dilaksanakan.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2024	2024	2024
3.	Meningkatkan Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng diluar panti	100	86,69	86,69

Rehabilitasi sosial adalah layanan sosial yang bertujuan untuk membantu orang yang memiliki disabilitas atau kapasitas kerja terbatas dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Program ini bertujuan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Kurangnya partisipasi masyarakat	dilakukan pertemuan rutin antara OPD dengan penerima bantuan untuk membahas pelaksanaan program

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2024	2024	2024
4.	Meningkatkan Penanganan Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhikebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100	93,04	93,04

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi: Penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, Kegiatan pencegahan bencana, Tanggap darurat, Rehabilitasi. Dinas sosial berperan dalam penanganan bencana dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada korban bencana. Beberapa contoh penanganan bencana yang dilakukan Dinas Sosial adalah : Menyerahkan bantuan pangan dan sandang kepada keluarga korban bencana, Memberikan pelayanan sosial dan kesehatan, seperti pengadaan air bersih dan sanitasi, pendistribusian barang bantuan, dan dukungan psikologis. Program Penanganan Bencana ini juga termasuk Sistem Pelayanan Minimal pada Bidang Sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Kurang memadainya fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki Dinas Sosial	Berusaha memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin dengan memanfaatan sumber daya yang ada, disamping itu pula mempersiapkan untuk penambahan jumlah penera baru pada tahun-tahun yang akan datang dengan merencanakan anggaran untuk Program Penanganan Bencana

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2023	2023	2023
6.	Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	100	97,83	97,83

Program ini bertujuan untuk pengelolaan dan pemeliharaan khusus pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Terbatasnya anggaran	Masalah anggaran yang terbatas dapat diatasi dengan mengusulkan peningkatan anggaran DPA untuk pemeliharaan dan perbaikan TMP
2	Penyebaran informasi	Untuk mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, dapat dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat luas melalui kegiatan Ziarah Wisata

Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan capaian dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Perangkat Daerah Dinas Sosial Daerah :

Sasaran

5.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 :

1.	Persentase Penurunan PMKS	0,2%

No	kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan(Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV								
1	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13		14 = 7+13		15= (14/6)X 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																				
I	1.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**			78.515.560.200		9.309.075.215		478.797.985		3.452.399.331		1.888.969.784		1.759.056.955		8.763.892.255		24.869.067.928		31,67%	Dinas Sosial Daerah
I.1	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan	100	49.195.560.200	100	4.739.717.537	10,10	478.797.985	30,27	1.434.907.688	18,43	873.644.854	8,73	413.946.110	67,54	4.325.821.427	143,18	12.793.491.828	143,18	26,01%	Dinas Sosial Daerah

		/Kota	Pembangunan dan Kemasyarakatan																%		
I.1.1	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Eksemplar)	100	507.000.000	100	29.931.300	4	-	0	11.842.200	0	16.995.000	3,00	-	7	28.837.200	104	69.591.400	103,72%	13,73%	
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	42	165.000.000	7	29.931.300	3		1	11.842.200	0	16.995.000	3,00	-	7	28.837.200	21	69.591.400	50,00%	42,18%	
I.1.2	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Terpenuhinya administrasi kantor dan pembayaran gaji ASN (Orang)	100	14.902.360.200	100	2.753.252.897	25	352.356.044	25	955.468.247	25	542.945.866	25	565.553.865	25	2.416.324.022	122	7.232.133.954	121,72%	48,53%	
I.1.2.1	1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	138	14.551.360.200	23	2.753.252.897	23	352.356.044	23	955.468.247	23	542.945.866	23	565.553.865	23	2.416.324.022	120	7.192.383.354	86,75%	49,43%	

I.1.2.2	1.06.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	12	57.000.000	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	39.750.600	8,33%	69,74%	
I.1.3	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	100	1.196.500.000	100	78.566.600	0	-	0	60.430.000	0	17.518.800	3	-	3	77.948.800	100	174.255.800	99,72%	14,56%	
I.1.3.1	1.06.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	20	318.500.000	5	78.566.600	0		0	60.430.000	0	17.518.800	0	-	3	77.948.800	8	144.255.800	45,29%	45,29%	
I.1.3.2	1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	53	321.500.000	6													30.000.000	15,09%	9,33%	
I.1.4	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	100	4.642.000.000	100	774.710.300	3	171.357.800	3	177.855.748	3	415.464.403	3	-	12	764.677.951	109	1.699,614,601	108,72%	36,61%	

I.1.4.1	1.06.01.2.06.01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	6	75.000.000	1	9.231.000	1	4.220.800	0	-	0	-		4.668.000	1	8.888.800	3	21.252.200	50,00%	28,34%		
I.1.4.2	1.06.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket pertalan rumah tanggal yang disediakan (paket)	6	207.000.000	1	10.889.100	1	3.805.700	0	-	0	-	1	5.563.500	1	9.369.200	3	21.452.000	50,00%	10,36%		
I.1.4.3	1.06.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	6	750.000.000	1	73.720.200	1	18.327.900	0	24.215.750	0	4.600.000	0	22.781.500	1	69.925.150	3	285.724.450	50,00%	38,10%		
I.1.4.4	1.06.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	6	375.000.000	1	81.689.000	1	20.290.000	0	7.290.600	0	20.186.000	0	31.360.000	1	79.126.600	3	177.847.450	50,00%	47,43%		
I.1.4.5	1.06.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perUU yang disediakan (dokumen)	90	255.000.000	15	25.625.000	0	-	4	6.360.000	7	12.720.000	2	6.545.000	15	25.625.000	30	51.250.000	33,33%	20,10%		
I.1.4.6	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan rakor dan konsul SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rakor dan konsul SKPD	400	1.780.000.000	150	568.606.000	19	43.372.800	21	94.538.000	28	105.085.998	82	328.746.403	150	571.743.201	230	1.142.088.501	57,50%	64,16%		
I.1.5	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan Pembangu	100	13.032.000.000	100	235.866.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	48	1.280.542.040	48,36%	9,83%		

		Daerah	nan dan Kemasyarakatan																			
1.1.5..1	1.06.01.2.07.01	Pengadaan Kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan	Jumlah unit Kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan	6	3.510.000.000	0	-												1	500.000.000	16,67%	14,25%	
1.1.5.1	1.06.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	30	670.000.000	25	235.866.400												12	780.542.040	40,00%	116,50%	
1.1.6	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	100	3.975.700.000	100	657.375.940	43,9	14.394.964	14,63	227.360.333	0	128.068.736	3	231.637.016	62	601.461.049	158	1.591.181.496	158,25%	40,02%	
1.1.6.1	1.06.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	72	15.700.000	12	1.980.000	12	1.980.000							12	1.980.000	24	31.961.500	33,33%	200,39%	
1.1.6.2	1.06.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	435.000.000	12	50.645.840	3	7.170.964	3	10.626.533	3	8.100.856	3	8.786.706	12	34.685.059	24	73.336.536	33,33%	16,86%	
1.1.6.3	1.06.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan	Jumlah laporan Penyediaan jasa	24	45.000.000	5	5.000.000					3	5.000.000			5	5.000.000	15	9.999.000	62,5	22,22%	

		perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor																0%			
I.1.6.4	1.06.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	3.480.000.000	12	595.250.100	3	5.744.000	3	216.733.800	3	114.967.880	3	222.350.310	12	559.795.990	84	1.475.881.460	116,67%	42,41%	
I.1.7	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	100	10.940.000.000	100	215.014.100	25	22.029.777	25	47.402.558	25	60.038.254	25	82.913.616	100	212.384.205	197	521.984.337	196,72%	4,77%	
I.1.7.1	1.06.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kenderaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan, pajak dan perizinan	24	2.250.000.000	6	215.014.100	4	22.029.777	4	47.402.558	4	60.038.254	4	82.913.616	24	212.384.205	28	521.984.337	116,67%	23,20%	
I.2	**1.06.02**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase Pemberdayaan Sosial**	**100**	**6.105.000.000**	**100**	**999.583.800**			**18,13**	**425.360.000**	**48,04**	**432.159.400**	**13,91**	**139.050.000**	**80,08**	**996.569.400**	**150,58**	**4.648.734.322**	**150,58%**	**76,15%**	**Dinas Sosial Daerah**
I.2.1	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemberdayaan Sosial	100	1.755.000.000	100	220.000.000	0	-	0	-	10	215.800.000	0	4.050.000	10	219.850.000	81	2.374.822.800	80,50%	135,32%	

I.2.1.1	1.06.02.2.01.01	Fasilitasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kab/kota	80	1.560.000.000	10	220.000.000			0	-	80	215.800.000	0	4.050.000	80	219.850.000	100	522.864.800	125,00%	33,52%	
I.2.2	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten (Orang)	100	4.350.000.000	100	779.533.800	0	-	55	425.360.000	28	216.359.400	17	135.000.000	100	776.719.400	170	2.273.911.522	170,14%	52,27%	
I.2.2.1	1.06.02.2.03.01	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kab/kota	Jumlah orang yang mendapat Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kewenangan kab/kota	360	444.000.000	60	56.418.800			27	25.360.000	33	28.289.400	0	-	60	53.649.400	90	795.726.222	25,00%	179,22%	
I.2.2.2	1.06.02.2.03.02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kewenangan kab/kota	Jumlah orang yang mendapat Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kewenangan kab/kota	90	81.000.000	15	8.115.000					15	8.070.000			15	8.070.000	30	18.185.000	33,33%	22,45%	

I.2.2.3	1.06.02.2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembangaan masyarakat kab/kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembangaan masyarakat kab/kota	4	3.480.000.000	4	700.000.000			2	400.000.000	1	180.000.000	1	120.000.000	4	700.000.000	8	1.425.000.300	200,00%	40,95%	
I.2.2.4	1.06.02.2.03.05	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Julah sertifikat yang dari haisl peningkatan SDM dan LK3 kewenangan kab/kota	1	150.000.000	1	15.000.000							1	15.000.000	1	15.000.000	2	35.000.000	200,00%	23,33%	
I.3	**1.06.04**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Program Rehabilitasi Sosial**	**100**	**6.086.000.000**	**100**	**536.533.150**	**0**	**-**	**24,96**	**107.901.460**	**24,21**	**129.916.500**	**42,37**	**227.355.400**	**91,54**	**465.173.360**	**167,40**	**1.000.881.910**	**167,40%**	**16,45%**	**Dinas Sosial Daerah**
I.3.1	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar	100	3.335.000.000	100	536.533.150	0	-	20,11	107.901.460	24,21	129.916.500	42,37	227.355.400	86,70	465.173.360	157,05	1.000.881.910	157,05%	30,01%	

			panti sosial																			
I.3.1.1	1.06.04.2.01.01	Peyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan sesuai standar gizi	2000	450.000.000	150	125,707,700			97,00	80.872.960	43.00	35.850.000	0,00	6.100.000	150,00	122.822.960	500,00	375.841.360	25,00%	83,52%	
I.3.1.2	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kab/kota	2000	345.000.000	150	40.165.900			11,00	2.909.000	139,00	36.595.000			150,00	39.504.000	2150,00	384.504.000	107,50%	111,45%	
I.3.1.3	1.06.04.2.01.03	Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu	405	448.000.000	63	66.864.850			3,00	3.035.500	60,00	58.292.000			63,00	61.327.500	195,00	255.492.650	4814,81%	57,03%	
I.3.1.4	1.06.04.2.01.04	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlahorang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	300	255.000.000	0	-											14,00	6.840.000	4,51%	2,68%	

I.3.1.5	1.06.04.2.01.05	Pemberian bimbingan fisik,mental ,spritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik,mental ,spritual, dan sosial	300	404.000.000	36	209.612.000			1,00	350.000	2,00	12.600.000	33,00	171.460.400	36,00	184.410.400	86,00	214.210.400	28,67%	53,02%		
I.3.1.6	1.06.04.2.01.06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng diluar panti	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng diluar panti	300	195.000.000													50,00	12.000.000	16,67%	6,15%		
I.3.1.7	1.06.04.2.01.07	Fasilitasi penerbitan NIK, akta lahir, surat nikah, dan kartu identitas anak	Jumlah orang yang terpenuhi penerbitan NIK, akta lahir, surat nikah, dan kartu identitas anak	900	225.000.000	100	21.972.200					8,00	1.760.400	30,00	6.350.000	38,00	8.110.400	44,00	9.485.400	4,89%	4,22%		
I.3.1.8	1.06.04.2.01.08	Pemberian akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberian akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	600	285.000.000	90	34.518.000			39,00	14.945.000	33,00	12.665.000	18,00	5.350.000	90,00	32.960.000	190,00	52.870.000	31,67%	18,55%		
I.3.1.9	1.06.04.2.01.09	Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	600	75.000.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%		

I.3.1.10	1.06.04.2.01.10	Pemberian layanan kedarurata n	Jumlah orang yang mendapatk an layanan kedarurata n	180	173.000.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	15,00	10.875.000	8,08%	6.29%	
I.3.1.11	1.06.04.2.01.11	Pemberian pelayanan penelusura n keluarga	Jumlah orang yang mendapatk an pelayanan penelusura n keluarga	120	315.000.000	40	37.692.500	2	-	6,00	5.789.000	9,00	8.749.100	2,00	1.500.100	19,00	16.038.200	59,00	21.663.200	49,17%	687,72%	
I.3.1.12	1.06.04.2.01.12	Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatk an layanan Pemberian layanan rujukan	120	165.000.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	2.100.000	2,00%	1,27%	
I.4	**1.06.05**	**Program Perlindung an dan Jaminan Sosial**	**Persentase Program Perlindung an dan Jaminan Sosial**	**100**	**12.309.000.000**	**100**	**2.728.949.788**	**0,00**	**-**	**51,38**	**1.402.136.508**	**15,67**	**427.708.100**	**29,27**	**798.764.210**	**96,32**	**2.688.752.228**	**175,29**	**5.818.011.528**	**175,29%**	**47,27%**	**Dinas Sosial Daerah**
I.4.1	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100	504.000.000	100	36.781.600	0	-	0	-	0	-	41	15.143.410	41	15.143.410	131	105.180.410	130,66%	20,87%	
I.4.1.1	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan anak-anak terlantar	Jumlah anak anak terlantar yang dijangkau	180	45.000.000	30	3.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	50	2.925.000	27,78%	6,50%	
I.4.1.2	1.06.05.2.01.02	Rujukan anak anak terlantar	Jumah anak anak terlantar yang dirujuk	180	396.000.000	30	30.331.600	0	-	0	-	0	-	15	15.143.410	15	15.143.410	65	78.655.410	36,11%	19,86%	

I.4.1.3	1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar	Jumlah anak anak terlantar yang dipantau dan dipelihara	180	63.000.000	30	3.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12	23.600.000	6,67%	37,46%	
I.4.2	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100	11.805.000.000	199	2.692.118.188	0	-	104	1.402.136.508	35	472.708.100	58	783.620.800	197	2.658.465.408	286	5.697.687.708	286,00%	48,27%	
I.4.2.1	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kab/kota	2327 85	4.350.000.000	32542	912.009.000			1591 8	296.243.508	1058	296.468.500	6046	310.941.000	32542	903.653.008	9762 6	2.243.651.408	41,94%	51,58%	
I.4.2.2	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	1800	3.450.000.000	1850	1.780.109.188			1609	1.105.893.000	183	176.239.600	58	472.679.800	1850	1.754.812.400	3350	3.454.036.300	186,11%	100,12%	
I.5	**1.06.06**	**Program Penanganan Bencana**	**Cakupan Penanganan Bencana di Bidang Sosial**	**100**	**3.765.000.000**	**100**	**212.172.200**	**0**	**-**	**9,630 8545**	**20,434,000**	**4,51**	**9.562.000**	**78,90**	**167.411.100**	**93,04**	**197.407.100**	**45 1,40**	**517.779.600**	**451,40%**	**13,75%**	**Dinas Sosial Daerah**

I.5.	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	3.765.000.000	100	212.172.200	0	-	9,630,856,45	20.434.000	4,51	9.562.000	78,90	167.411.100	93,04	390.402.200	451,40	710.774.700	451,40%	18,88%	Dinas Sosial Daerah
I.5.1	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	100	2.815.000.000	100	133.966.600	0	-	11,959,697,4	16.022.000	7	9.562.000	77	103.619.400	96	129.203.400	182	279.428.400	182,03%	9,93%	
I.5.1.1	1.06.06.2.01.01	Penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dalam masa tanggap darurat bencana	600	465.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	68.175.000	16,67%	14,66%	
I.5.1.2	1.06.06.2.01.02	Penyediaan sandang	Jumlah orang yang mendapatkan sandang dalam masa tanggap darurat bencana	1200	340.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	50.000.000	20,83%	14,71%	
I.5.1.3	1.06.06.2.01.03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penanmpungan pengungsi	12	165.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	14.700.000	16,33%	8,91%	

I.5.1.4	1.06.06.2.01.04	Penanganan khusus kelompok rentan	Jumlah penanganan khusus kelompok rentan	1200	1.650.000.000	225	133.966.600	0	-	24	16.022.000	16	9.562.000	215	103.619.400	255	129.203.400	265	146.553.400	22,08%	8,88%	
I.5.2	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100	950.000.000	100	78.205.600	0	-	5,641539774	4.412.000	82	63.791.700	82	63.791.700	169	131.995.400	258	302.142.900	258,37%	31,80%	
I.5.2	1.06.06.2.02	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan tagana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan tagana	240	695.000.000	40	78.205.600	0	-	5,641539774	4.412.000	82	63.791.700	82	63.791.700	169	131.995.400	258	302.142.900	258,37%	31,80%	
I.6	**1.06.07**	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**100**	**1.055.000.000**	**100**	**92.168.740**	**0**	**-**	**66,90**	**61.659.675**	**17,34**	**15.978.930**	**13,59**	**12.530.135**	**97,83**	**90.168.740**	**194,62**	**163.648.980**	**194,62%**	**15,51%**	**Dinas Sosial Daerah**
I.6.1	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten (Taman Makam Pahlawan)	100	1.055.000.000	100	92.168.740	0	-	66,90	61.659.675	17,34	15.978.930	13,59	12.530.135	97,83	90.168.740	98	163.648.980	98%	15,51%	
I.6.1.1	1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi sarana dan prasarana TMP Nasional kab/kota	Jumlah dokumen hasi sarana dan prasarana TMP	1	450.000.000	1	50.000.000	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-	1	50.000.000	2	90.000.000	200%	20,00%	

			Nasional kab/kota																	
I.6.1.2	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota yang terpelihara	31	31 395.000.000	12.000.000	0	-	0	-	23	9.000.000	8	3.000.000	31	12.000.000	62	24.000.000	200%	6,08%	
I.6.1.3	1.06.07.2.01.03	Pengamanan TMP Nasional kab/kota	Jumlah Laporan Pengamanan TMP Nasional kab/kota	12	12 210.000.000	30.168.740	0	-	6	11.659.675	3	6.978.930	3	9.530.135	12	28.168.740	23	55.648.980	192%	26,50%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				100,00			1,68		33,55		21,37		31,13		87,73		213,75		213,75%	32,52%	
Predikat Kinerja							SR		SR		SR		SR		T		ST		ST	SR	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat daerah (OPD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Selatan melalui Sekretaris Daerah.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Sosial Daerah Kabupetan Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan program pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan masih dihadapi hambatan-hambatan yang memerlukan penanganan dan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan juga akan menjadi penghalang bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Daerah yaitu belum mencukupinya jumlah pegawai dan masih terbatasnya keahlian teknis administrasi pegawai yang ada. Dampak dari terbatasnya jumlah pegawai dan terbatasnya keahlian menyebabkan belum optimalnya mutu administrasi. Untuk mendukung kondisi yang diinginkan maka perlu peningkatan kemampuan teknis, sarana prasarana kerja dipenuhi sesuai standard dan kuantitas pegawai juga perlu ditambah jumlahnya. Dari permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian dan keterkaitan dengan urusan serta kewenangan Dinas Sosial Daerah maka isu strategis saat ini yang cukup menonjol dalam pembangunan kesejahteraan sosial terutama untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk Tahun 2025 Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengusulkan beberapa Program Kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan Program Kegiatan diperlukan dana dari APBD melalui Renja Tahun 2025. Tapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia dari usulan yang ada dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan antara Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, disamping berpedoman pada Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 - 2026, juga mengakomodasi usulan dari para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat. Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke OPD sesuai tupoksi. Dari situ kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup OPD untuk ditindaklanjuti dalam draft renja OPD pada tahun yang akan datang. Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program atau kegiatan usulan dari masrayarakat, mulai dari ketersediaan anggaran, sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pembinaan dan bantuan peralatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah:

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undangundang. Pertama, UU cipta lapangan kerja. Kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kab. Kampar 48

5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Tujuan yang ditetapkan adalah untuk memberi batasan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari Misi yang telah digariskan. Tujuan ini merupakan suatu target yang ingin dicapai Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

a. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat

Tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
c. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
d. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana.
e. Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran jangka pendek yang ingin dicapai adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia OPD Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Mewujudkan standar hidup layak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan kualitas hidup layak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani.

3.3 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

No.	PROGRAM	No.	KEGIATAN	No.	SUB KEGIATAN
1.	Program Pemberdayaan Sosial	1.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.	Fasilitasi pemberdayaan sosial KAT
		2.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kab/kota
2	Program Rehabilitasi Sosial	3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.	Peyediaan Permakanan
				4.	Penyediaan Sandang
				5.	Penyediaan alat bantu
				6.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
					Pemberian bimbingan fisik,mental,spritual, dan sosial
				7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng diluar panti
				8.	Fasilitasi penerbitan NIK, akta lahir, surat nikah, dan kartu identitas anak
				9.	Pemberian akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar
				10.	Pemberian layanan data dan pengaduan
				11.	Pemberian layanan kedaruratan
				12.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
				13.	Pemberian layanan rujukan
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	14.	Penjangkauan anak-anak terlantar

				15.	Rujukan anak anak terlantar
				16.	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar
		5	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	17.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				18.	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
4	**Program Penanganan Bencana**	6	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	19.	Penyediaan permakanan
				20.	Penyediaan sandang
				21.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi
				22.	Penanganan khusus kelompok rentan
		7	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	23.	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan tagana
5	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	8	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.	Rehabilitasi sarana dan prasarana TMP Nasional kab/kota
				25.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
				26	Pengamanan TMP Nasional kab/kota
6	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
		10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

				31	Penyediaan peralatan rumah tangga
				32	penyediaan bahan logistik kantor
				33	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				34	Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan
				35	Penyelenggaraan rakor dan konsul SKPD
		13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36	Pengadaan Kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan
				37	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
		14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38	Penyediaan jasa surat menyurat
				39	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				40	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
				41	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
		15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT PD

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada dasarnya kegiatan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai "pengarah" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat dilihat dalam table 4.1 di bawah ini :

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : Dinas Sosial Daerah

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Sosial Daerah														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	08	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
1	08	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)									
1	08	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 216.875.000				Rp. 216.875.000	Rp. 926.000.000
1	08	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									
1	08	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 66.103.600				Rp. 66.103.600	Rp. 51.250.000
1	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 95.000.000				Rp. 95.000.000	Rp. 410.000.000
1	08	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 620.000.000				Rp. 620.000.000	Rp. 410.000.000
1	08	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengukuran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 307.900.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	08	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1	08	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
1	08	04	2.01	0001	Penyelalan Permakanan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 124.659.950				Rp. 124.659.950	Rp. 441.250.000
1	08	04	2.01	0002	Penyelalan Sandang	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.000.000				Rp. 49.000.000	Rp. 240.125.000
1	08	04	2.01	0003	Penyelalan Alat Bantu	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 72.000.000
1	08	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 191.000.000
1	08	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
1	08	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar									
1	08	05	2.01	0001	Pengangkatan Anak-Anak Terlantar	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.800.000				Rp. 47.800.000	Rp. 150.750.000
1	08	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
1	08	05	2.02	0003	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 667.525.000				Rp. 667.525.000	Rp. 1.220.000.000
1	08	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 463.578.491				Rp. 463.578.491	Rp. 2.520.000.000
1	08	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
1	08	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									
1	08	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanggap Siaga Bencana	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 71.017.000				Rp. 71.017.000	Rp. 162.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun R					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	08	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									
1	08	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
1	08	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Bag. Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.000.000				Rp. 24.000.000	Rp. 121.255.000
1	08	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Bag. Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 98.125.000
1	08	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Bag. Hasil (DBH)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.862.454				Rp. 31.862.454	Rp. 70.125.000
1	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.987.000				Rp. 36.987.000	Rp. 72.125.000
1	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	08	01	2.02	0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.629.723.000				Rp. 2.629.723.000	Rp. 2.629.000.000
1	08	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	08	01	2.05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.972.100				Rp. 14.972.100	Rp. 15.125.000
1	08	01	2.05	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.468.250				Rp. 22.468.250	Rp. 23.000.000
1	08	01	2.05	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.063.000				Rp. 150.063.000	Rp. 152.063.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun n+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
1	08	01	2.08	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 115.100.400				Rp. 115.100.400
1	08	01	2.08	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000
1	08	01	2.08	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 568.941.000				Rp. 568.941.000
1	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000
1	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.617.199				Rp. 50.617.199
1	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 724.254.456				Rp. 749.575.456
1	08	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 211.782.200				Rp. 211.782.200
Jumlah									Rp. 7.910.570.199				Rp. 7.934.910.199

Kab. Tapanuli Selatan
Kepala Dinas Sosial Daerah

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
NIP. 19670826198803 1021

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Periode 2021-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Sosial Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

Semoga dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Sipirok, 01 Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PARLINDUNGAN HARAHAP, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196705061998031001

RENCANA KERJA 2025
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penyempurnaan yang dilakukan mencakup Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rumusan dan sasaran outcome program yang merupakan hasil dari pelakasanaan tugas dan fungsi unit kerja, penyempurnaan rumusan dan sasaran output serta perbaikan narasi, beberapa indikator kinerja juga disempurnakan.

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor Perhubungan yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut konsep pembangunan sektor Perhubungan perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan sektor Perhubungan.

Rencana Kerja Dinas Perhubunan Daerah ini disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Rencana Kerja yang disempurnakan ini dapat diwujudkan dan semua sasaran dan indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2025 ini dapat tercapai.

Sipirok, 8 Juli 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TILHAM SUHARDI, SH., MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196601171987031003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
Bab II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Lalu 8
2.2 Analisa Kinerja Perangkat Daerah 12
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 30
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 31
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 36
Bab V PENUTUP 42

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2023, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Daerah terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020

Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penentapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 1178);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan

daerah. Tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kineija penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun

n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun beijalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kineija tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kineija pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Bab V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi anggaran Belanja untuk Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 8.612.749.961,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 7.141.853.561,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.470.896.400,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 8.264.971.634,- atau sebesar 95,75% dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 6.798.048.234,- atau 95,20% Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.466.923.400,- atau 99,73%.

Tabel T.C. 2.9

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2					URUSAN WAJIB									
	2	15				DINAS PERHUBUNGAN DAERAH									
	2.	15	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	10	10	100	10	10	100
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	15	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase angka kecelakaan lalu lintas menurun	18	10,24	12	11	91,67	14	14	100
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0,4	0.13	0,25	0,34	136	0,3	0,3	100

	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18	10,24	12	11	91,67	14	14	100
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupate/ Kota	18	10,24	12	11	91,67	14	14	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum
2. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Dinas Perhubungan Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Daerah

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2023

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			30	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,13	0,34	0,3	0,35	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata keberhasilan sedang. Tapanuli Selatan mampu mencapai target Ketersediaan sarana dan prasarana jalan dengan realisasi capaian 0,13%.

Adapun faktor penghambat realisasi tidak mencapai target pada tahun 2022 antara lain :

1. Adanya keterbatasan anggaran pada awal tahun 2022;
2. Wilayah Jalan Kabupaten yang tergolong luas;
3. Masih kurangnya pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang telah terpasang dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi dan memelihara sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya.

Sedangkan untuk tahun 2023, Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan hampir melampaui target yang ditetapkan dengan rata-rata keberhasilan sangat tinggi. Tapanuli Selatan mampu mencapai target persentase ketersediaan sarana dan prasarana jalan dengan realisasi capaian 0,34%.

Adapun faktor pendukung realisasi mencapai target pada tahun 2023 antara lain :

1. Membuat usulan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam pengajuan anggaran berikutnya;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang telah ada sehingga dapat dipelihara dan tidak rusak;
3. Menjalin sinergitas dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian, Pemerintah Pusat, Propinsi dan juga Perusahaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk ikut serta membantu penyediaan sarana dan prasarana perhubungan;
4. Rutinitas survey kebutuhan prasarana dan sarana jalan;

5. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait mengenai prasarana dan sarana jalan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebagai unsur penunjang tugas – tugas Bupati di bidang Perhubungan maka Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan priode 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan isu strategis perencanaan pembangunan Rencana strategi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan dan perluasan kualitas dan Kapasitas kemampuan SDM aparatur teknis Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan hal ini penting mengingat program yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan bertambah dan sangat dibutuhkannya beberapa Teknisi yang berkualitas dan mampu bekerja dengan baik;
b. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral;
c. Ketersediaan Norma/ Kebijakan Bidang Perhubungan untuk mendukung tugas- tugas yang masih sangat terbatas;
d. Ketersediaan dana dalam mendukung program/ kegiatan yang direncanakan masih terbatas.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness) :

a. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai.

b. Adanya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 300), yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 110 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah.

c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.

d. Kondisi gedung perkantoran OPD.

Kelemahan (Weakness) :

a. Sumber Daya dan Kompetensi Aparatur yang belum memadai

b. Struktur organisasi belum optimal

c. Koordinasi dengan OPD lainnya belum Optimal

d. Profesionalisme SDM Aparatur belum optimal

Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity)

a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. Tersedianya pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

c. Lembaga penyelenggara diklat teknis dan fungsional untuk peningkatan kapasitas aparatur Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan belum memadai.

Tantangan (Threat)

a. Tuntutan masyarakat tentang pembangunan semakin besar dan kritis;

b. Penempatan pegawai pada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kurang mempertimbangkan kemampuan dan keahlian.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dan mempertimbangkan asas kepatutan, serta ada beberapa target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Selatan

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	**Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan**				**7.640.728.334**					**6.899.447.536**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**5.839.001.434**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**5.914.954.696**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**86.638.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**86.638.500**	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	10 Jenis	86.638.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	10	86.638.500	

2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**2.772.614.474**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**2.974.330.800**	
15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.721.399.474	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	1	2.914.869.537	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Keikutsertaan dalam Pameran pada Hari Ulang Tahun Kabupaten	1 Kali	51.215.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Keikutsertaan dalam Pameran pada Hari Ulang Tahun Kabupaten		59.461.263	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas**	**100**	**187.888.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas**	**100**	**56.500.000**	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70 Stel	119.588.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN Dinas Perhubungan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	68.300.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		56.500.000	

2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**338.674.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**445.717.100**	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	2.852.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1Tahun	2.852.600	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	45.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto		Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	135.003.000	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	8.482.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	8.482.400	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya Alat Tulis Kantor untuk Pelaksanaan Tugas Tugas Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	52.405.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya Alat Tulis Kantor untuk Pelaksanaan Tugas Tugas Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	52.405.600	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	1 Tahun	10.437.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	1 Tahun	10.437.500	

2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Terpenuhinya Langganan surat Kabar	1 Tahun	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Terpenuhinya Langganan surat Kabar	1 Tahun	12.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	206.996.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	224.536.000	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)**	**100**	**136.938.600**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)**	**100**	**7.938.600**	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	120.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	0	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	16.938.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	7.938.600	

2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**1.556.807.760**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**1.629.389.696**	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik dan Jasa Komunikasi	1 Tahun	72.592.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik dan Jasa Komunikasi	1 Tahun	75.017.000	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	11.503.800	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	11.503.800	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianyan gaji tenaga harian lepas (THL) Tersedianyan honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Tersedianyan honorarium pengadaan barang/jasa Tersedianyan honorarium pengemudi bus pemda/patwal	1 Tahun	1.472.711.960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianyan gaji tenaga harian lepas (THL) Tersedianyan honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Tersedianyan honorarium pengadaan barang/jasa Tersedianyan honorarium pengemudi bus pemda/patwal	1 Tahun	1.542.868.896	

2.15.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)**	**100**	**759.440.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)**	**100**	**714.440.000**	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Tersedianya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4/Bus Tersedianya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	15 Unit	714.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Tersedianya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4/Bus Tersedianya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	15 Unit	714.440.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	0	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN**		**Persentase angka kecelakaan lalu lintas menurun (%)**	**12**	**1.801.726.900**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN**		**Persentase angka kecelakaan lalu lintas menurun (%)**	**12**	**984.492.840**	

	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					**ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana jalan (%)**	**0,25**	**928.599.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**		**Tersusunnya perencanaan, target dan kebutuhan anggaran**	**0,25**	**333.502.000**	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Pembangunan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Tahun	150.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Pembangunan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Tahun	0	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Marka Jalan/Zebra Cross/Zoss yang Dipasang Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang Dipasang Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Dipasang	1000 buah 10 buah 50 buah	728.599.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Marka Jalan/Zebra Cross/Zoss yang Dipasang Jumlah Pagar Pengaman Jalan yang Dipasang Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Dipasang	1000 buah 10 buah 50 buah	333.502.000	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Terpenuhinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1 Tahun	25.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Terpenuhinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1 Tahun	0	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Terpenuhinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Tahun	25.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Terpenuhinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Tahun	0	

2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Persentase angka kecelakaan lalu lintas menurun (%)**	12	**594.097.400**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Persentase angka kecelakaan lalu lintas menurun (%)**	12	**220.942.540**	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	326.497.400	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	27.041.400	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpenuhinya Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Tahun	150.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpenuhinya Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Tahun	100.000.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Tahun	101.700.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Tahun	75.751.140	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah/razia	1 Tahun	15.900.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah/razia	1 Tahun	18.150.000	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase angka kecelakaan lalu lintas menurun (%)**	12	**279.030.500**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase angka kecelakaan lalu lintas menurun (%)**	12	**430.048.300**	

2.15.02.2.06, 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah Pos Pam Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Pengamanan dan Pengaturan Parkir di Pekan-Pekan dan Dalam Keadaan Darurat	1 Tahun	220.785.600	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15	Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah Pos Pam Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Pengamanan dan Pengaturan Parkir di Pekan-Pekan dan Dalam Keadaan Darurat	1 Tahun	380.169.800	
2.15.02.2.06, 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Tahun	58.244.900	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Tahun	49.878.500	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD
.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dengan melaksanakan strategi dan arah kebijakan yaitu mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan dan ramai lalu lintas. Untuk mencapai sasaran yang sudah disusun, maka Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat arah kebijakan yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana daerah rawan kecelakaan dan ramai lalu lintas.

Sehingga, pelaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan bidang Perhubungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 yaitu : "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transmisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Nilai Tukar Nelayan
5. Ratio Gini
6. Indeks pembangunan manusia
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pada Penyederhanaan Birokrasi, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas dengan Sasaran: Meningkatnya Sarana dan Prasarana jalan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yaitu: Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan berlalu lintas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan.

Tabel. 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi		Target	
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan berlalu lintas	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan	Persentase angka kecelakaan lalu lintas menurun (%)	10,24	11	14	16
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana jalan (%)	0,13	0,34	0,3	0,35

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Ke-3 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni Melanjutkan pembangunan insfrastruktur dengan memamfaatkan sumber daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran pada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke 3 Kabupaten Tapanuli Selatan;

3.3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1
Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	2		3	4
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.229.994.096**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**86.764.000**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.764.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**2.981.798.400**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.914.869.537
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.928.863
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		**203.822.000**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	147.322.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.500.000
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Kab. Tapsel**	**415.780.000**

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.858.100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.500.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.518.800
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.457.300
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.437.800
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.008.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**98.000.000**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1.629.389.696**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.017.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.503.800
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.542.868.896
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**814.440.000**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.620.000

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	674.820.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			**1.820.092.900**
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		**920.146.000**
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	520.146.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100.000.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		**615.852.000**
			Penyediaan SaranadanPrasaranaPengujian BerkalaKendaraan Bermotor	326.497.400
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.204.600
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18.150.000
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		**284.094.900**

			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	66.594.900
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	217.500.000
Jumlah				***8.050.086.996***

3.3.3. Penjelasan Rumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD

Tidak terdapat perbedaan renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan rancangan awal renja sehingga tidak ada penambahan ataupun perubahan pada sub kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2020)	2025		2026	
									Target	Rupiah	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	15				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					**8.050.086.996**		**8.050.086.996**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**%**	**100**	**100**	**6.229.994.096**	**100**	**6.229.994.096**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**%**	**100**		**86.764.000**		**86.764.000**
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					86.764.000		86.764.000
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**%**	**100**	**100**	**2.981.798.400**		**2.981.798.400**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.914.869.537		2.914.869.537

2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)				66.928.863		66.928.863
2	**15**	**01**	**2.05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**%**	**100**	**100**	**203.822.000**	**100**	**203.822.000**
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					147.322.000		147.322.000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					56.500.000		56.500.000
2	**15**	**01**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**%**	**100**	**100**	**415.780.000**	**100**	**415.780.000**
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.858.100		2.858.100
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					84.500.000		84.500.000
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					8.518.800		8.518.800
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					52.457.300		52.457.300
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.437.800		10.437.800
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan					12.000.000		12.000.000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					245.008.000		245.008.000
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**%**	**100**	**100**	**98.000.000**	**100**	**98.000.000**

2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					90.000.000		90.000.000
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.000.000		8.000.000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**%**	**100**	**100**	**1.629.389.696**	**100**	**1.629.389.696**
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					75.017.000		75.017.000
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					11.503.800		11.503.800
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.542.868.896		1.542.868.896
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**%**	**100**	**100**	**814.440.000**	**100**	**814.440.000**
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					39.620.000		39.620.000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					674.820.000		674.820.000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000		100.000.000

2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana jalan**	**%**	**20**	**0,3**	**1.820.092.900**	**0,35**	**1.820.092.900**
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana jalan**	**%**	**20**	**0.3**	**920.146.000**	**0,35**	**920.146.000**
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					200.000.000		200.000.000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					520.146.000		520.146.000
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					100.000.000		100.000.000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					100.000.000		100.000.000
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase angka kecelakaan lalu lintas menurun**	**%**	**10**	**14**	**615.852.000**	**14**	**615.852.000**
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas				326.497.400		326.497.400
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas				150.000.000		150.000.000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas				121.204.600		121.204.600
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas				18.150.000		18.150.000

2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase angka kecelakaan lalu lintas menurun**	**%**	**10**	**14**	**284.094.900**	**14**	**284.094.900**
2	15	02	2.06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					66.594.900		66.594.900
2	15	02	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					217.500.000		217.500.000
TOTAL										**8.050.086.996**		**8.050.086.996**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-lima dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Sipirok, 10 Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ILHAM SUHARDI, SH., MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196601171987031003

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan RENSTRA untuk 5 (lima) Tahun ke depan. Mengamati pelaksanaan program dan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 disamping mengoptimalkan program yang telah berjalan juga dirumuskan untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan penjelasan dan manfaat bagi institusi baik Pemerintah maupun mitra kerja.

Atas dukungan dari semua pihak akhirnya Renja ini telah selesai disusun meskipun masih banyak kekurangan dan terima kasih kepada semua yang ikut membantu dan menyumbangkan ide, saran dan pikiran bagi kesempurnaan penyusunan Renja ini. Diharapkan juga bahwa apa yang telah direncanakan ini dapat diwujudkan dan membawa hasil serta mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Sipirok, 13 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DARWIN DALIMUNTHE, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196512191991031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .. 21
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah 37
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 38
3.3 Program dan Kegiatan 39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . 44
BAB V PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra 7
Tabel 2. 3 Review Terhadap Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025..... 23

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025..... 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Lebih lanjut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai arti yang

penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2025 Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun2004 Tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun Tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
11. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
12. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Urusan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen Perencanaan Jangka Pendek yang mendukung terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 yang berkualitas.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025s.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di susun dengan sisitematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelarasan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Setiap Dokumen Perencanaan Harus di Evaluasi dalam Pelaksanaanya.

Evaluasi Terhadapa Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD di Nilai Berdasarkan Realisasi Target Kinerja Keluaran dari Kegiatan yang dilaksanakan, Serta Capaian dari Target Program dan Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Melaksanakan 2 (dua) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Berdasarkan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tersebut Terdapat Program/ Kegiatan yang Memenuhi Traget Kinerja, Program/ kegiatan yang telah Memenuhi Target kinerja dan Progarm/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

Adapun Tabel Evalusi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja P (SKPD) Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Catatan
						Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah											
4.02	Sekretariat DPRD											
4.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**											
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
4.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	4 Dokumen	100%	

4.02.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketersediaannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.02.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketersediaannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.02.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.02.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	4 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
4.02.01.2.02.01		Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
4.02.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Bulan)	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
4.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Dokum	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

		Tahun SKPD	Tahun SKPD (Dokumen)									
4.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kaeuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kaeuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Dokumen)	1 Tahun	2 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
4.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stell)	1 Tahun	83 ASN	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
4.02.01.2.05.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan DPRD						12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Sosialisasi Pembahasan Raperda Insiatif DPRD						12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Diklat / Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD						12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
4.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	100%	

4.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bulan)	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)	1 Tahun	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kotak)	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan											

	Daerah											
4.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lembar)	12 Bulan	5499 Buah	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
4.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
4.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
4.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Komputer dan Genset						1 Tahun	1 Tahun	100%	

4.02.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
4.02.01.2.09.11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Taman						1 Tahun	1 Tahun	100%	
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											
4.02.01.2.14.01		Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya makan dan minum Ruangan Pimpinan DPRD						12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											
4.02.01.2.15.01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan DPRD						1 Tahun	1 Tahun	100%	
4.02.01.2.15.02		Penyediaan Pakaiaan Dinas dan Atribut DPRD	Terpenuhinya Pakiaan Dinas dan Atribut DPRD		35 Anggota DPRD				1 Tahun	1 Tahun	100%	
4.02.01.2.15.03		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			1 Tahun	1 Tahun	100%	35 Orang	35 Orang	100%	
4.02.01.2.16	Layanan											

	Administrasi DPRD											
4.02.01.2.16.01		Peyelenggaraan Adminstrasi Keanggotaan DPRD	Tersedianya Rapat-Rapat Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.16.03		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.01.2.16.04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.02	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**											
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											
4.02.02.2.01.01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	Terlaksananya Rapat Propemda						1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
4.02.02.2.01.02		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terpenuhinya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Bulan	2 Buah	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.02.2.01.03		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan									
4.02.02.2.01.04		Fasilitasi Penyusunan	Terpenuhinya						2	2 Dokumen	100%	

		Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah akademik	Penyusunan naskah akademik						Dokumen			
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran											
4.02.02.2.02.01		Pembahasan KUA dan PPAS	Terpenuhinya Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
4.02.02.2.02.02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terpenuhinya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
4.02.02.2.02.03		Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD(Dokumen)	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
4.02.02.2.02.04		Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
4.02.02.2.02.06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										100%	
4.02.02.2.03.08		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	12 Bulan	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
4.02.02.2.04	Peningkatan											

	Kapasitas DPRD											
4.02.02.2.04.01		Orientasi DPRD	Terpenuhinya Orientasi DPRD									
4.02.02.2.04.02		Pendalaman Tugas DPRD	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		750 Aspiras				12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.02.2.04.04		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Bulan)	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
4.02.02.2.04.05		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terpenuhinya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (Bulan)	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
4.02.02.2.04.07		Penyusunan Program Kerja DPRD	Terpenuhinya Penyusunan Program Kerja DPRD (Bulan)						1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
4.02.02.2.04.03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terpenuhinya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD						12 Bulan	12 Bulan	100%	4.02.02.2.04.03
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										100%	
4.02.02.2.05.01		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terleksananya Koordinasi denga Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama						12 bulan	12 Bulan	100%	
4.02.02.2.05.03		Pelaksaan Reses	Terlaksananya Pelaksaan Reses (Bulan)	3 Kali		3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	100%	
4.02.02.2.05.04		Sosialisasi	Sosialisasi									

		Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah									
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD											
4.02.02.2.08.01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terpenuhinya Kebutuhan Study Kerja dan Pertukaran Informasi	1 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.02.02.2.08.02		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terpenuhinya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPRD						1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
4.02.02.2.08.03		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Badan Musyawarah						12 Bulan	12 Bulan	100%	

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimipinan dan Anggota DPRD ;
2. Meningkatkan pelayanan fasilitas aspirasi masyarakat kepada Dewan;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas Bagian dan lintas sub secara terpadu, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan senantiasa memperhatikan structural dan Pejabat fungsional yang berlaku di dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

A. Sekretaris DPRD

Mempunyai tugas memimpin Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sekretaris Dewan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesekretariatan DPRD
6. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang kesekretariatan DPRD
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan ,Program dan Keuangan

Mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan Tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan bidang Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan. Adapun rincian tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan ketatausahaan
2. Mengelola kepegawaian
3. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga
4. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan
5. Menyusun perencanaan anggaran
6. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran
7. Menyelenggarakan penetausahaan keuangan
8. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD

Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan membawahi beberapa sub bagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian

   Mempunyai Tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan urusan menyusun bahan perencanaan, Mengkoordinasikan, memverifikasi, mengevaluasi, dan Pelaporan bidang Administrasi dan Kepegawaian, dengan rincian sebagai berikut:

   a. Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas sekretariat DPRD dan Pimpinan
   b. Melaksanakan kearsipan
   c. Menyusun administrasi kepegawaian
   d. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
   e. Meyiapkan bahan administrasi kepegawaian
   f. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli
   g. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai dan
   h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

C. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

Membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan Tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan memverifikasi bidang Hukum dan Persidangan, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan
2. Memfasilitasi peyusunan naskah akademik
3. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusun peraturan perundang-undangan
4. Mengumpulkan bahan peyiapan draf peraturan daerah inisiatif

5. Memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pembahasan peraturan daerah
6. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan peraturan daerah
7. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah
8. Menyelenggarakan persidangan
9. Menyusun risalah
10. Menyelenggarakan hubungan masyarakat
11. Menyelenggarakan publikasi
12. Menyelenggarakan keprotokolan
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

D. Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan

Membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan Tugas, memfasilitasi dan memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi bidang Penganggaran dan Pengawasan, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pembahasan KUA PPAS
2. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pembahasan APBD/APBDP
3. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pembahasan LKPJ
4. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pembahasan perda pertanggungjawaban keuangan
5. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat
6. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan

7. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi rapat-rapat internal DPRD
8. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi Pelaksanaan penegakan kode etik DPRD
9. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran
10. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan
11. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pokok pikiran DPRD
12. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi Kerjasama
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelengaraan tugas pokok dan fungsi sampai dengan tahun 2025, Sekretariat DPRD dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan di anggap sebagai hal yang kurang penting.
2. Dinamika Politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan atau pengambilan keputusan.

Tahun 2025, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Mendorong Komunikasi yang efektif dan berkesilambungan antara lembaga legislatif dan eksekutif guna dapat menjalankan tupoksi masing – masing sesuai peraturan perundang undangan.

Pokok dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :

1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD tehadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan;
2. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir athun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada;
3. Jumlah penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan dan ketersediaan dana cash budget dalam SIMDA;
4. Banyaknya aspirasi yang masuk ke lembaga DPRD yang harus di pertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan.
5. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2025 sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/ kegiatan , volume, maupun dana yang di butuhkan.

Review Rancangan Awal RKPD tahun 2025 ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Review Terhadap Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Tabel 2.3 Review Terhadap Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH**									
4.00.02	**SEKRETARIAT DPRD**								**57,151,023,948**	
4.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**818.295.500**	
4.02.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**818.295.500**	
4.02.02.02.01.0023	Penyusunan Konten	100%	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Meningkatnya Rekomendasi yang akan dibahas DPRD Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masayrakat dan Tokoh Agama	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	238.255.500	Dana Alokasi Umum
4.02.02.02.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya manusia Komunikasi Publik		Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Terlaksananya Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masayrakat dan Tokoh Agama	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Bulan	12 Bulan	580.040.000	Dana Alokasi Umum

4.02.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**								**42,317,286,218**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**414,159,544**	
4.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	4 Dokumen	4 Dokumen	28,321,400	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		Jumlah Dokumen RKA APBD yang diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	12,370,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		Jumlah Dokumen RKA APBD yang diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	12,370,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	12,370,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	12,370,000	Dana Alokasi Umum

4.02.01. 2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		4 Laporan	4 Laporan	511,546,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,093,105,610**	
4.02.01. 2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji ASN	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Tahun	1 Tahun	4,607,454,910	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Dokumen	2 Dokumen	459,155,200	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Laporan	1 Laporan	14,021,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		4 Laporan	4 Laporan	12,474,500	Dana Alokasi Umum

4.02.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**								**489,964,000**	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerlengkapanya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerlengkapanya	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Paket	2 Paket	233,064,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.05.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	256,900,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.	**Adminstrasi umum Perangkat Daerah**								**9,695,945,544**	
4.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Bulan Pembayaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Paket	1 Paket	180,110,00	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Bulan Pembayaran Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		15 Paket	15 Paket	7,317,088,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Bulan Pembayaran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan Peralatan	Kabupaten Tapanuli Selatan,		1 Paket	1 Paket	99,596,000	Dana Alokasi Umum

				Rumah Tangga	Kecamatan Sipirok					
4.02.01. 2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bulan Pembayaran Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Paket	1 Paket	196,536,744	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Paket	2 Paket	242,030,000	Dana Alokasi Umum
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								125,000,000	
4.02.01. 2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu, Rapat Dengar Pendapat, Peripurna Istemewa dan Acara	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Laporan	12 Laporan	268,650,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.06.09.	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Laporan	12 Laporan	1,266,934,000	Dana Alokasi Umum

				Luar Daerah						
4.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,381,338,601**	
4.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Tenaga Harian Lepas	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Laporan	12 Laporan	2,097,657,210	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,663,086,000**	
4.02.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kenderaan Dinas /Operasionalnya Yang Di Pelihara Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharan, Pajak Kenderaan dinas	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		16 Unit	16 Unit	579,827,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin	Tersedianya Pemeliharan Komputer dan Genset	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		15 Unit	15 Unit	258,259,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		4 unit	4 unit	800,000,000	Dana Alokasi Umum

4.02.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Taman	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		3 unit	3 unit	25,000,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.14.	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**105,750,000**	
4.02.01.2.14.01.	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Hasil Kegitan Keprotokolan	Tersedianya makan dan minum ruang pimpinan DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 laporan	12 laporan	105,750,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.15.	**Layanan Keuangan dan Kesejahtraan DPRD**								**22,159,069,893**	
4.02.01.2.15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Pakian Dinas dan Atribut DPRD	Terpenuhinya Pakian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		6 Paket	6 Paket	713,364,500	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti medical Check Up	Terpenuhunya Jumlah Orang yang Mengikuti medical Check Up	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		35 Orang	35 Orang	900,105,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01.2.16.	**Layanan Adminstrasi DPRD**								**10,213,382,700**	
4.02.01.2.16.01.	Penyelenggaraan Adminstrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Adminsitrasi Keanggotaan DPRD	Tersedianya Rapat-Rapat Pelenggaraan Admistrasi Keanggotaan DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	199,867,200	Dana Alokasi Umum

4.02.01. 2.16.03.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Laporan	12 Laporan	9,017,090,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.16.04.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas Pimpinan DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Paket	1 Paket	996,425,600	Dana Alokasi Umum
4.02.02.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**14,833,737,730**	
4.02.02. 2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								**641,683,025**	
4.02.02. 2.01.01.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	175 Buah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Rapat Pembahasan propemda	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	62,223,200	Dana Alokasi Umum
4.02.02. 2.01.02.	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan	Terlaksananya Rapat-rapat Pembahasan Non APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		4 Dokumen	4 Dokumen	327,350,300	Dana Alokasi Umum
4.02.02. 2.01.04.	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/Keterangan dan/atau naskah akademik		Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun	Terpenuhinya Penyusunan naskah akademik	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	Dana Alokasi Umum

4.02.02.2.02.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**748,661,600**	
4.02.02.2.02.01.	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Diteteapkan	Terlaksananya Rapat Pembahasan KUA dan PPAS APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	76,313,900	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.02.02.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Yang Diteteapkan	Terlaksananya Rapat Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	76,207,500	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.02.03.	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen APBD yang diteteapkan	Terlaksananya Pembahasan APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	227,034,600	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.02.04.	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen APBD Perubahan Yang Diteteapkan	Terlaksananya Rapat Pembahasan Perubahan APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	178,103,300	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.02.06.	Pembahasan PertanggungJawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	191,002,300	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.03.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**90,686,600**	
4.02.02.2.03.08.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daaerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	90,686,600	Dana Alokasi Umum

4.02.02.2.04.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**2,167,837,500**	
4.02.02.2.04.02.	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		35 Orang	35 Orang	1,726,466,000	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.04.04.	Penyediaan Kelompok pakar dan Tim Ahli		Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		3 Orang	3 Orang	134,534,400	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.04.05.	Penyediaan Tenaga ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli bagi Fraksi	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		8 Orang	8 Orang	270,380,600	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.04.07.	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	Terlaksananya Rapat Penyusunan Program Kerja DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	36,456,500	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.05.01.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Laporaan Kunjungan Kerja Pimipinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dengan pejabat pemda dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Bulan	12 Bulan	307,500,000	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.05.03.	Pelaksanaan Reses		Jumlah Laporan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Dokumen	2 Dokumen	3,789,644,400	Dana Alokasi Umum

4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi rancangan Peraturan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi rancangan Peraturan Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		35 Orang	35 Orang	13,000,000	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.08.	**Fasilitasi Tugas DPRD**								**12,422,188,400**	
4.02.02.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terpenuhinya Kebutuhan Study kerja dan pertukaran informasi	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Dokumen	12 Dokumen	12,333,829,000	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.08.03	Fasiltasi Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasiltasi Pelkasanaan Tugas badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasiltasi Pelkasanaan Tugas badan Musyawarah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		4 Dokumen	4 Dokumen	52,359,400	Dana Alokasi Umum
								TOTAL	**57,151,023,948**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsipprinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kota/Kabupaten. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait.

Selanjutnya dan semua usulan program/kegatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangun dan Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretanat DPRD, Ranstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda, Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan

pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

Telaahan terhadap kebijakan daerah merupakan penelahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026, arah kebijakan dan prioritas perkembangan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tapanuli Selatan baik pada tingkat aparatur maupun anggota mayarakat.

Beberapa kebijakan yang menjadi prioritas adalah :

1. Pelayanan Umum, meliputi perencanaan pembangunan pemerintahan umum, kepegawaian, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika
2. Ketertiban dan Ketentraman
3. Ekonomi, meliputi perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi
4. Lingkungan Hidup
5. Perumahan dan fasilitas umum meliputi pekerjaan umum dan perumahan rakyat
6. Kesehatan
7. Pariwisata dan budaya
8. Pendidikan
9. Perlindungan sosial, meliputi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan social.

Sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan seperti diuraikan diatas, visi, misi, dan program

Bupati dan wakil Bupati Tapanuli Selatan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu “Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Pembangunan yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera, Serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”

Hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu, Pelayanan Umum, meliputi perencanaan pembangunan pemerintahan umum, kepegawaian, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa datang, sehingga tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

b. Sasaran

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan menantang. Sasaran juga dapat diartikan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra Sekretariat DPRD, maka tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan perjalanan dinas serta tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi, fraksi dan kepanitian dengan sasaran meningkatnya kelancaran pelaksanaan persidangan, rapat, dan penyelenggaraan kegiatan DPRD
2. Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia dan kualitas peralatan kerja agar dapat berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada DPRD dengan sasaran meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkup Sekretariat DPRD
3. Menciptakan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntabel, dengan sasaran meningkatnya perencanaan kerja pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan
4. Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan hubungan harmonis dengan masyarakat, serta terdokumentasinya kegiatan DPRD dengan baik, dengan sasaran terciptanya keserasian dan keselarasan produk hukum.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan, maka Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Melaksanakan 2 program, 15 kegiatan dan 58 sub

kegiatan dangan total anggaran sebesar Rp 57.151.023.948. – dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
      - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. P emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   - Fasilitasi Keprotokolan

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
   - Penyelenggaranan Administrasi Keuangan DPRD
   - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
   - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

i. Layanan Administrasi DPRD
   - Penyelenggaraan Adminstrasi Keanggotaan DPRD
   - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
   - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
    a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
        - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
        - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
        - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
        - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
        - Penyusunan Tata Tertib DPRD
    b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
        - Pembahasan KUA dan PPAS
        - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
        - Pembahasan APBD
        - Pembahasan APBD Perubahan
        - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
    c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
        - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
    d. Peningkatan Kapasitas DPRD
        - Orientasi DPRD
        - Pendalaman Tugas DPRD
        - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli \
        - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
        - Penyusunan Program Kerja DPRD
        - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
    e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
        - Kunjungan Kerja Dalam Daerah
        - Pelaksanaan Reses
        - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

f. Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini Merupakan Penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai Berikut :

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabuparten Tapanuli Selatan Tahun 2025										
Kode	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					
		Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (RP)**	**Sumber Dana**
						Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH**									
4.00.02	**SEKRETARIAT DPRD**								**57,151,023,948**	
4.02.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**								**42,317,286,218**	
4.02.01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**414,159,544**	
4.02.01. 2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	4 Dokumen	4 Dokumen	19,247,544	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		Jumlah Dokumen RKA APBD yang diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	16,250,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		Jumlah Dokumen RKA APBD yang diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	18,750,000	Dana Alokasi Umum

4.02.01. 2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	16.250.000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	18,750,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		4 Laporan	4 Laporan	324,912,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,132,247,038**	
4.02.01. 2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji ASN	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Tahun	1 Tahun	2,919,266,538	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Dokumen	2 Dokumen	194,045,600	Dana Alokasi Umum

4.02.01. 2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Laporan	1 Laporan	9,319,900	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		4 Laporan	4 Laporan	9,615,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.05.	**Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah**								**810,300,000**	
4.02.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerlengkapanya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerlengkapanya	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Paket	2 Paket	139,255,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.05.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	210,930,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Sosialisasi Pembahasan Raperda Insiatif DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		50 Orang	50 Orang	8,445,000	Dana Alokasi Umum

4.02.01. 2.05.11.	Bimibingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan		Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		25 Orang	25 Orang	451,670,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.06.	**Adminstrasi umum Perangkat Daerah**								**3,013,429,700**	
4.02.01. 2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Bulan Pembayaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Paket	1 Paket	156,966,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.06.03.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Bulan Pembayaran Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		15 Paket	15 Paket	1,267,350,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Bulan Pembayaran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Paket	1 Paket	69,077,800	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bulan Pembayaran Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Paket	1 Paket	165,689,900	Dana Alokasi Umum

4.02.01. 2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Paket	2 Paket	117,815,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu, Rapat Dengar Pendapat, Peripurna Istemewa dan Acara	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Laporan	12 Laporan	248,825,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.06.09.	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Laporan	12 Laporan	987,706,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,858,709,351**	
4.02.01. 2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penerima Surat Masuk dan Pembuat Surat Keluar	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Layanan Komunikasi,Sumber	Terpenuhinya Jasa Listrik, Air dan Internet	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	315,681,391	Dana Alokasi Umum

			Daya Air dan Listrik		Sipirok					
4.02.01. 2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Tenaga Harian Lepas	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Laporan	12 Laporan	4,503,027,960	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**971,571,500**	
4.02.01. 2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kenderaan Dinas /Operasionalnya Yang Di Pelihara Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharan, Pajak Kenderaan dinas	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		16 Unit	16 Unit	579,827,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin	Tersedianya Pemeliharan Komputer dan Genset	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		15 Unit	15 Unit	96,744,500	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		4 unit	4 unit	270,000,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Taman	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		3 unit	3 unit	25,000,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.14.	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**30,526,880**	
4.02.01.	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Hasil Kegitan	Tersedianya	Kabupaten		12 laporan	12 laporan	30,526,880	Dana

2.14.01.			Keprotokolan	makan dan minum ruang pimpinan DPRD	Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok					Alokasi Umum
4.02.01. 2.15.	**Layanan Keuangan dan Kesejahtraan DPRD**								**22,151,718,805**	
4.02.01. 2.15.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Administrasi Keuangan DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		35 Orang	35 Orang	21,050,373,305	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Pakian Dinas dan Atribut DPRD	Terpenuhinya Pakian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		6 Paket	6 Paket	751,408,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.15.000 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti medical Check Up	Terpenuhunya Jumlah Orang yang Mengikuti medical Check Up	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		35 Orang	35 Orang	350,000,000	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.16.	**Layanan Adminstrasi DPRD**								**6,934,560,900**	
4.02.01. 2.16.01.	Penyelenggaraan Adminstrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Adminsitrasi Keanggotaan DPRD	Tersedianya Rapat-Rapat Pelenggaraan Admistrasi Keanggotaan DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	210,315,400	Dana Alokasi Umum
4.02.01. 2.16.03.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	5,729,437,000	Dana Alokasi Umum

				daerah	Sipirok					
4.02.01.2.16.04.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas Pimpinan DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Paket	1 Paket	994,808,500	Dana Alokasi Umum
4.02.02.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**14,833,737,730**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								**641,683,025**	
4.02.02.2.01.01.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	175 Buah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Rapat Pembahasan propemda	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	63,181,126	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.01.02.	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan	Terlaksananya Rapat-rapat Pembahasan Non APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		4 Dokumen	4 Dokumen	312,948,199	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perudang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		3 Dokumen	3 Dokumen	107,500,000	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.01.04.	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/Keterangan dan/atau naskah akademik		Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun	Terpenuhinya Penyusunan naskah akademik	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan		2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	Dana Alokasi Umum

					Sipirok					
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang Disusun	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	58,053,700	Dana Alokasi Umum
4.02.02. 2.02.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**654,423,605**	
4.02.02. 2.02.01.	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Diteteapkan	Terlaksananya Rapat Pembahasan KUA dan PPAS APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	64,950,651	Dana Alokasi Umum
4.02.02. 2.02.02.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Yang Diteteapkan	Terlaksananya Rapat Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	66,534,954	Dana Alokasi Umum
4.02.02. 2.02.03.	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen APBD yang diteteapkan	Terlaksananya Pembahasan APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	205,725,300	Dana Alokasi Umum
4.02.02. 2.02.04.	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen APBD Perubahan Yang Diteteapkan	Terlaksananya Rapat Pembahasan Perubahan APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	172,267,300	Dana Alokasi Umum
4.02.02. 2.02.06.	Pembahasan PertanggungJawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	144,945,400	Dana Alokasi Umum

4.02.02.2.03.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**85,070,300**	
4.02.02.2.03.08.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daaerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	85,070,300	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.04.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**2,093,823,800**	
4.02.02.2.02.0001	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	648,720,000	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.04.02.	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		35 Orang	35 Orang	888,330,000	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terpenuhinya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Dokumen	2 Dokumen	147,544,800	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.04.04.	Penyediaan Kelompok pakar dan Tim Ahli		Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		3 Orang	3 Orang	124,848,600	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.04.05.	Penyediaan Tenaga ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli bagi Fraksi	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan		8 Orang	8 Orang	253,548,400	Dana Alokasi Umum

					Sipirok					
4.02.02.2.04.07.	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD	Terlaksananya Rapat Penyusunan Program Kerja DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Dokumen	1 Dokumen	30,832,000	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Dokumen	2 Dokumen	147,544,800	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.05.	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**2,683,151,400**	
4.02.02.2.05.01.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Laporaan Kunjungan Kerja Pimipinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dengan pejabat pemda dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Bulan	12 Bulan	285,000,000	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.05.03.	Pelaksanaan Reses		Jumlah Laporan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		2 Dokumen	2 Dokumen	2,385,151,400	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi rancangan Peraturan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi rancangan Peraturan Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		35 Orang	35 Orang	13,000,000	Dana Alokasi Umum

4.02.02.2.08.	**Fasilitasi Tugas DPRD**								**8,675,585,600**	
4.02.02.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terpenuhinya Kebutuhan Study kerja dan pertukaran informasi	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		12 Dokumen	12 Dokumen	8,607.660,000	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.08.02.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan kinerja DPRD	Terpenuhinya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPRD	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		1 Laporan	1 Laporan	17,809,700	Dana Alokasi Umum
4.02.02.2.08.03	Fasiltasi Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasiltasi Pelkasanaan Tugas badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasiltasi Pelkasanaan Tugas badan Musyawarah	Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok		4 Dokumen	4 Dokumen	50,115,900	Dana Alokasi Umum
								TOTAL	**57,151,023,948**	

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai wadah dalam memberikan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan pelaksananan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang handal, professional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*)

Dirumuskannya Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 menempatkan Rencana kerja Sekretariat DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran Tahunan daerah sehingga Rencana Kerja Sekretariat DPRD berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan, sasaran Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Akhirnya, semoga Rencana kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun anggaran 2025 dapat bermanfaat khususnya dalam penyusunan RAPBD dan APBD yang tepat waktu.

Sipirok, 13 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DARWIN DALIMUNTHE, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196512191991031002

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Hidayah-Nya Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh *globalisasi* saat ini maka dibutuhkan kemampuan organisasi untuk menentukan arah dari perjalanan aktivitas organisasi. Untuk itu harus dapat ditentukan *Visi* Organisasi sebagai suatu arah jangka panjang organisasi dengan rencana Strategik sebagai suatu penjabaran cara mewujudkan *Visi*-nya. Sebagaimana Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan ini mengacu kepada hasil evaluasi Renja Tahun 2023.

Semoga Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi mitra kerja serta segenap yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU. 7
1.1. Evaluasai Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Darah..... 20
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal OPD..... 22
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 25
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 29
3.3. Program dan Kegiatan..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. 32

BAB V PENUTUP..... 33

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ayat (30) disebutkan bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian Renja OPD

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana.

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang

untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan Keluarga Berencana yang berkesinambungan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun oleh masyarakat termasuk swasta. Pembangunan Keluarga Berencana lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas masyarakat yang akan berkontibusi positif terhadap peningkatan Indexs Pembangunan Manusia (IPM) dan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan/Sustainable Develoment Golds (SDGs) Tahun 2017. Mewujudkan hal tersebut bukanlah mudah karena Keluarga Berencana juga memiliki masalah utama yang dihadapi yakni Tingginya Angka Kelahiran, Rendahnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, tingginya harga alat kontrasepsi serta terbatasnya sumber pembiayaan Keluarga Berencana, juga belum optimalnya alokasi pembiayaan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangkan panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

16. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambarhan Lembaran Daerah Provini Sumatera Utara Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
23. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabuapten Tapanuli Selatan;
24. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.
25. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor …..Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.
26. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 800/……./Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini dijadikan serbagai Tolak Ukur untuk memberikan arahan dan sekaligus melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misi lima tahun kedepan serta menuntun seluruh penyelenggaraan kegiatan dalam setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini merupakan acuan dan pedoman dari seluruh jajaran penyelenggara Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Keluarga) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran sehingga dapat memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan pelayanan organisasi perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah :

- 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah :

Bab V : Penutup

Lampiran – lampiran/Pendukung

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024, serta progres pencapian kinerja dalam renstra periode 2021-2026 sehingga dapat diidentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan penyediaan anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan dan rencana kinerja Tahun 2023 sehingga kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan masih melanjutkan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan melakukan penyempurnaan atas program dan kegiatan Tahun 2023 meskipun pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan.

Berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, Visi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu ***Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Mandiri, Pembangun, Berkualitas dan Sejahtera".***

Sedangkan Misi yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan Alat Kontrasepsi (Alkon) kepada Pasangan Usia Subur yang produktif dan potensial
2. Melakukan perencanaan keluarga secara cermat
3. Melakukan peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi
4. Melakukan Pembinaan Keluarga (Bina Keluarga)
5. Melaksanakan pembinaan keterampilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.
6. Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai fungsi dan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan 4 (empat) urusan, 3 program dan 9 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB.

c. Program Pembedayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS):

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN RI Nomor 163 Tahun 2016 dengan uraian tugas pokok dan fungsi.

❖ **Tugas**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan.

❖ **Fungsi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
b) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
c) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
d) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
e) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
f) Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.
g) Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
h) Pelaksanaan pelayanan KB.
i) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
j) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
k) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

2.2.1. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Pegawai	L	P	JUMLAH
1	PNS	13	24	37
2	CPNS	-	-	-
3	Honor Daerah	-	1	1
4	Honor Provinsi (PLKB)	-	-	-
5	Out scorching	10	39	49
Jumlah		**23**	**64**	**87**

Sumber Daya Asset/Modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Tempat Kerja	16 Unit	1 Kantor Dalduk dan KB, 15 Balai KB dan 1 Gudang Alkon
2	Kenderaan Roda 4	7 Unit	Mobil Kepala Dinas, Mobil Sekretaris Dinas, Mobil Akseptor, Mobil Pelyanan KB, Mobil Mopen dan Mobil Box
3	Kenderaan Roda 2	42 Unit	-
4	Meja	57 Buah	-
5	Kursi	100 Buah	-
6	Laptop	14 Unit	-
7	Personal Computer (PC)	24 Unit	-
8	Proyektor	7 Unit	-
9	Telephon Mobil (Smartphon)	14 Unit	Mengonlinekan Data

Daftar Nama KKBPK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL YG DIKUASAI
1	Elli Rosita Hasibuan, SH	K.KKBPK	Angkola Barat	14
2	Erlina Harahap	K.KKBPK	Angkola Timur	15
3	Dra. Deliana	KKPBK		
4	Ermina Wati	KKPBK		
5	Aswin Batubara	K.KKBPK	Angkola Selatan	17
6	Masbulan Daulay	KKPBK		
7	Saiful Alamsyah Hrp	K.KKBPK	Sipirok	40
8	Nurlela Sari, SP	KKPBK		
9	Raudah Simbolon	KKPBK		
10	Nisma Harahap	K.KKBPK	Batangtoru	23
11	Syahroma Husni, S.Sos	KKPBK		

12	Harliny Harahap,SKM	KKPBK		
13	Nurbayani	K.KKBPK	Marancar	12
14	Khalijah, S.Sos	K.KKBPK		
15	Rudi Priambono, S.Sos	K.KKBPK	Batang Angkola	36
16	Elvina Sari Siregar	KKPBK		
17	Rahmi Miatul Ummi	KKPBK		
18	Nurjamila Pulungan	K.KKBPK	Arse	10
19	Lina Rahmadani, Am.keb	K.KKBPK	Sayur Matinggi	19
20	Lenni Marlina	KKPBK		
21	Nurhaida	K.KKBPK	Angk. Sangkunur	10
22	Anugrah Dian Syaputra	K.KKBPK	Muara B. Toru	9
23	Rotua Natalia	K.KKBPK	Tantom Angkola	17
24	Leli Junida Siregar	K.KKBPK	SD Hole	26

2.2.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas daan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Pejabat Struktural Eselon II A) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dibantu oleh :

- Sekretaris Dinas
- Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- Kepala Bidang Keluarga Berencana
- Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegewaian
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Kelompok Pejabat Fungsional

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 15 Ayat (4) bahwa Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan

Fungsional penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana menjadi pegawai negeri sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengalihkkan Personil (Pengawas Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ke Pemerintah Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara sesuai Berita Acara Serah Terima Personil dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Nomor 800/4705/2017 dan Nomor 042/KP.02.02/B2/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang bertempat di Ruang Frankurt, London dan Sanfransisco Hotel Adi Mulia Medan.

Selanjutnya tentang belanja pegawai PPLKB dan PLKB yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, serta hak-hak kepegawaian masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai tanggal tiga puluh satu Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (31-12-2017) dan mulai tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (1-01-2018), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Secara umum Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode 2011 – 2015 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan penyelenggaraan dilaksanakan secara konkuren yakni menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara terinci pembagian kewenangan tersebut tertuang dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa terdapat 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu :

1. Pengendalian Penduduk :
    a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk.
    b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2. Keluarga Berencana (KB) :

a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan

3. Keluarga Sejahtera :
   a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
   b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Standarisasi Pelayanan dan Sertifikasi.

1.1. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Salah satu indikator keberhasilan program Bangga Kencana adalah penurunan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk, yang dalam hal ini dicerminkan dalam rata-rata jumlah laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari tabel dibawah diketahui bahwa rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung turun dari 0,39 pada tahun 2019 menjadi 1,07 pada tahun 2023.

Tabel : 2
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Kedaaan Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	311.492	312.924	315.021	316.568	319.986
		310.274	311.492	312.924	315.021	316.568
		0,39	0,45	0,67	0,49	1,07

Sumber : Dinas PP dan KB Kab.Tapsel

Jumlah penduduk Tapanuli Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 316.568 jiwa pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mencapai 319.986 Jiwa. Peningkatan ini tentu saja

berasal dari pertumbuhan penduduk alami melalui kelahiran dan pertumbuhan penduduk melalui migrasi. Data rata-rata jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 3
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Batang Angkola	22.026	22.322	1,32
2	Sayur Matinggi	27.056	27.302	0,90
3	Angkola Timur	23.240	23.450	0,89
4	Angkola Selatan	33.091	33.434	1,02
5	Angkola Barat	26.221	26.298	0,29
6	Batang Toru	35.956	36.586	1,72
7	Marancar	10.898	11.461	4,91
8	Sipirok	35.603	35.987	1,07
9	Arse	9.009	9.033	0,26
10	Saipar Dolok Hole	14.776	14.928	1,01
11	Aek Bilah	7.622	7.518	1,38
12	Muara Batang Toru	17.364	17.885	2,74
13	Tano Tombangan Angkola	16.186	16.244	0,35
14	Angkola Sangkunur	23.223	23.004	0,77
15	Angkola Muaratais	14.297	7.291	1,63
Jumlah		316.568	319.986	1,07

Sumber : Dinas PP dan KB Kab.Tapsel

Dari Tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di Tapanuli Selatan sebesar 1,07 persen pada tahun 2023 dengan pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Marancar dengan capaian pertumbuhan penduduk sebesar 4,91 persen.

1.2. Peserta KB Aktif (MKJP)

Sedangkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2022 dan 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

Tabel 2
Jumlah MKJP Per Kecamatan Tahun 2022 s/d 2023

No.	Kecamatan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4
1	Batang Angkola	637	603
2	Sayur Matinggi	553	497
3	Angkola Timur	316	366
4	Angkola Selatan	683	824
5	Angkola Barat	627	591

6	Batang Toru	576	527
7	Marancar	514	451
8	Sipirok	1.179	910
9	Arse	250	253
10	Saipar Dolok Hole	443	511
11	Aek Bilah	102	104
12	Muara Batang Toru	522	487
13	Tano Tombangan Angkola	561	588
14	Angkola Sangkunur	552	592
15	Angkola Muara Tais	448	518
Jumlah		10.689	7.822

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

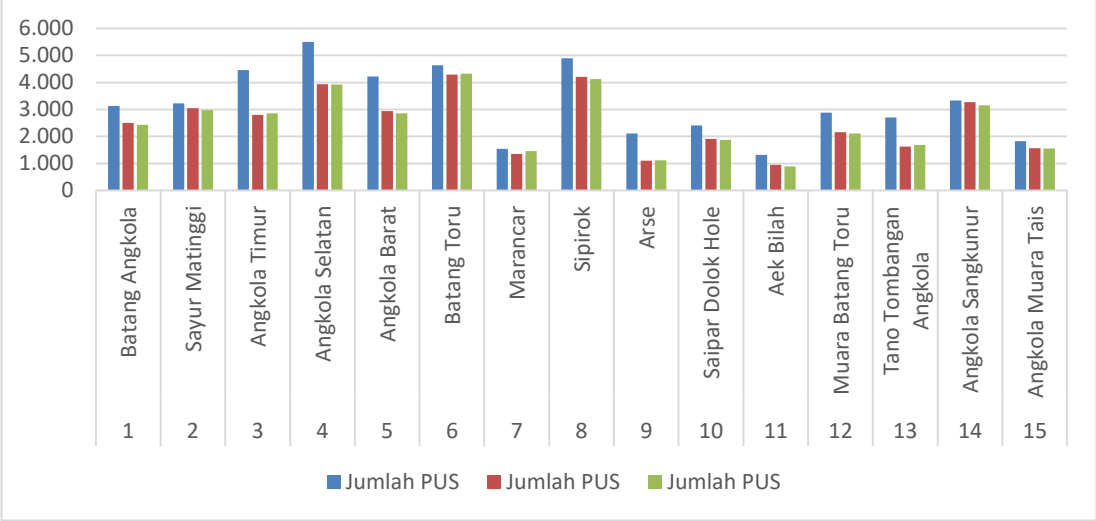
Adapun Pasangan Usia Subur (PUS) menurut kecamatan Tahun 2021, 2022 dan 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

No.	Kecamatan	Jumlah PUS		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Batang Angkola	3.131	2.504	2.431
2	Sayur Matinggi	3.224	3.049	2.978
3	Angkola Timur	4.462	2.795	2.858
4	Angkola Selatan	5.497	3.931	3.924
5	Angkola Barat	4.220	2.944	2.858
6	Batang Toru	4.636	4.296	4.327
7	Marancar	1.543	1.352	1.464
8	Sipirok	4.899	4.205	4.130
9	Arse	2.111	1.107	1.119
10	Saipar Dolok Hole	2.411	1.907	1.876
11	Aek Bilah	1.320	946	895
12	Muara Batang Toru	2.881	2.159	2.109
13	Tano Tombangan Angkola	2.707	1.628	1.685
14	Angkola Sangkunur	3.326	3.270	3.158
15	Angkola Muara Tais	1.823	1.572	1.554
Jumlah		45.649	48.191	37.366

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Grafik jumlah PUS Tahun 2021 s/d 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tapanuli Selatan :

Adapun jumlah Anak Umur 5 s/d 9 Tahun laki-laki dan perempuan menurut kecamatan pada Tahun 2023 :



Tabel 5
Jumlah Anak Umur 5 s/d 9 Tahun laki-laki dan perempuan menurut kecamatan pada Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah umur 5 s/d 9 Tahun		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Angkola Barat	1.199	1.146	2.345
2	Batang Toru	1.073	1.041	2.114
3	Angkola Timur	1.199	1.083	2.282
4	Sipirok	1.319	1.162	2.481
5	Saipar Dolok Hole	1.073	977	2.050
6	Angkola Selatan	1.222	1.046	2.268
7	Batang Angkola	718	678	1.396
8	Arse	1.004	1.109	2.113
9	Muara Batang Toru	1.085	1.149	2.234
10	Marancar	1.102	1.000	2.102
11	Sayur Matinggi	1.110	1.036	2.146
12	Aek Bilah	1.068	911	1.979
13	Angkola Sangkunur	1.283	1.198	2.481
14	Tantom Angkola	1.011	1.010	2.021
15	Angkola Muara Tais	439	474	913
Jumlah		15.893	15.018	30.911

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Selanjutnya Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2022 s/d 2023 Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Rasio Akseptor Per Kecamatan Tahun 2022 s/d 2023

No.	Kecamatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Akseptor KB	Jlh Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB	Jumlah Akseptor KB	Jlh Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
1	Batang Angkola	1.311	2.504	52,36	1.157	2.431	47,59
2	Sayur Matinggi	1.204	3.049	39,49	1.327	2.978	44,56
3	Angkola Timur	1.046	2.795	37,42	1.211	2.858	42,37
4	Angkola Selatan	1.775	3.931	45,15	2.554	3.924	65,08
5	Angkola Barat	1.882	2.944	63,93	1.909	2.585	66,79
6	Batang Toru	2.459	4.296	57,24	1.882	4.327	43,49
7	Marancar	955	1.352	70,64	1.113	1.464	76,02
8	Sipirok	1.891	4.205	44,97	2.069	4.130	50,09
9	Arse	637	1.107	57,54	681	1.119	60,85
10	Saipar Dolok Hole	1.118	1.907	58,63	1.588	1.876	84,64
11	Aek Bilah	605	946	63,95	780	895	87,15
12	Muara Batang Toru	1.367	2.159	63,32	1.199	2.109	56,85
13	Tano Tombangan Angkola	1.100	1.628	67,57	1.284	1.685	76,20
14	Angkola Sangkunur	1.371	3.270	41,93	1.553	3.158	49,17
15	Angkola Muara Tais	902	1.572	57,38	1.151	1.554	74,06
Jumlah		36.651	19.623	37.665	21.458	37.366	57,42

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 Akseptor KB berjumlah 34.827 mnurun menjadi 21.458 pada tahun 2023, demikian juga halnya dengan Rasio Akseptor KB menurun dari 76,29 pada tahun 2019 menjadi 57,42 pada tahun 2023. Sedangkan Rasio Akseptor KB menurut kecamatan pada tahun 2023, menunjukkan bahwa Kecamatan Marancar memiliki Rasio Akseptor KB terbesar yakni 76,02 dan Kecamatan Angkola Timur memiliki Rasio Akseptor KB terkecil yakni 42,37. Perkembangan Rasio Akseptor KB Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 7
Rasio Akseptor KB Tahun Tahun 2019 - 2023

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Akseptor KB	34.827	36.232	36.651	19.623	21.458
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	45.649	46.920	48.191	37.665	37.366
3	Rasio Akseptor KB	76,29	77,22	76,05	52,65	57,42

Sumber : Badan KB, PP dan PA Kab.Tapsel

Dari tabel tersebut menujukkan bahwa rata-rata rasio akseptor KB di Kabupaten Tapanuli Selatan 76,29 pada tahun 2019 menjadi 77,22 pada tahun 2020, kemudian menjadi 76,05 pada tahun 2021 dan menjadi 52,65 pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 Rasio akseptor KB menjadi 57,42.

Sedangkan Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Jumlah Angka Kelahiran Total (TFR)
Per WUS (15 – 49 Tahun) TAHUN 2023

No	**Kelompok Umur**	**ASFR / Jumlah Umur**
1.	15 – 19	35
2.	20 – 24	124
3.	25 – 29	135
4.	30 – 34	105
5.	35 – 39	67
6.	40 – 44	26
7.	45 – 49	14
JUMLAH		**506**

Dengan Rumus :

$$TFR = \frac{Jumlah\ Umur}{1000} x\ 5$$

$$TFR = \frac{506}{1000} x\ 5 = 2{,}53$$

Selanjutnya kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) telah dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebanyak 5 sekolah yaitu PIK-R Ridho di SMP Negeri 3 Sipirok, PIK-R Martondi di SMP Negeri 4 Sipirok, PIK-R Rizki di SMP Negeri 5 Sipirok, PIK-R Saroha di SMP Negeri 6 Sipirok dan PIK-R Anggrek Putih di SMK Negeri 1 Angkola

Timur dan berupa sosialisasi kepada kelompok yaitu kelompok BKR Mawar desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar, BKR Sahata desa Pardomuan Kecamatan Muara Batang Toru, BKR Mangga desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan, BKR Mawar desa Paran Padang Kecamatan Sipirok dan BKR Bunga Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru.

Kemudian juga melaksanakan sosialisasi kepada kelompok BKB Adelwes desa Paranpadang Kecamatan Sipirok, BKB Melati desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar, BKB Pardamean Kecamatan Muara Batang Toru, BKB Bunga Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru dan BKB Anggrek desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi.

Selanjutnya melaksanakan juga sosialisasi sekaligus praktek kepada kelompok UPPKS Saroha desa Pardomuan Kecamatan Muara Batang Toru, UPPKS Martunas desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar, UPPKS Mawar desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat, UPPKS Mangga desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru dan UPPKS Mawar desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur.

Adapun Daftar Kelompok Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut Kecamatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Kelompok Ketahanan Keluarga Per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	JUMLAH POKTAN				
		BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKS
1	Batang Angkola	21	21	2	2	5
2	Sayur Matinggi	11	4	4	1	4
3	Angkola Timur	8	11	11	3	4
4	Angkola Selatan	10	7	1	3	4
5	Angkola Barat	5	5	4	1	4
6	Batang Toru	5	3	2	1	3
7	Marancar	5	5	5	3	4
8	Sipirok	5	1	1	1	5
9	Arse	3	1	1	1	4
10	Saipar Dolok Hole	2	2	1	1	1
11	Aek Bilah	3	1	1	1	1
12	Muara Batang Toru	6	4	5	1	3
13	Tano Tombangan Angkola	9	7	3	1	3
14	Angkola Sangkunur	5	7	5	1	3
15	Angkola Muaratais	13	13	1	12	4
Jumlah		111	92	47	33	52

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

TABEL 10
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1.	Meningkatkan pelayanan Alat Kontrasepsi (Alkon) kepada Pasangan Usia Subur yang produktif dan potensial	1. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,25	1,06
2	Melakukan perencanaan keluarga secara cermat	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,54	2,53
3	Melakukan peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi	Persentase Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri (%)	31,59	14,10
4	Melakukan Pembinaan Keluarga (Bina Keluarga)	Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP	35,75	22,37
5	Melaksanakan pembinaan keterampilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,22	12,61
6	Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Keluarga Sejahtera yang MEndapat Bantuan (Kelompok)	5,00	5,00

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan fungsi kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :

1. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan.
2. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi.
3. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi.
4. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang cenderung menurun.
5. Kualitas pelayanan KB belum sesuai standar.
6. Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB.

7. Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap program KKBPK.
8. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga.
9. Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK.
10. Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan.
11. Peran tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal
12. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi.
13. Masih banyaknya perkawinan usia muda
14. Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
15. Tingginya prilaki seks pra nikah di sebahagian kalangan remaja
16. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.
17. Masih tingginya jumlah keluarga miskin.
18. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan koseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
19. Pelaksanaan program dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-Kb.
20. Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

Dari beberapa isu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dijabarkan diatas, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi, advokasi dan KIE program KKBPK.
2. Peningkatan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus (daerah tertinggal/perbatasan).
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan KKBPK, serta
4. Pengelolaan program KKBPK di Kecamatan.

Selain itu potensi yang juga dapat dikembangkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan melalui program/kegiatan Direktif Presiden adalah “Kampung KB”. Kampung KB merupakan salah satu potensi utama yang dapat memperkuat implementasi

Program KKBPK di lini lapangan serta dapat menjadi jembatan integrasi kegiatan antara BKKBN Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Penyelenggaraan pelayanan pada setiap bidang digambarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat
    1. Program Pelayanan Administrasi dengan capaian 100%
    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian 100 %
    3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan capaian 100%
    4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian 100%
    5. Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dengan capaian 100%
    6. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan dengan capaian 100%

2. Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan
    1. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri dengan capaian 14 Kecamatan.
    2. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat dengan capaian 100%

3. Bidang Keluarga Berencana
    1. Program Keluarga Berencana dengan capaian 100%
    2. Program Pelayanan Kontrasepsi dengan capaian 100%

4. Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
    1. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dengan capaian 70%
    2. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD dengan capaian 70%

2.4. Riview Rancangan Renja

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

Catatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota ada penambahan dan pengurangan kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu penambahan karena pemakaian ruangan di Lantai 2 Kantor PP dan KB.
   b. Pelaksanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Kantor PP dan KB karena sudah 5 tahun tidak cat.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) ada Penambahan sub kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Pelaksanaan HARGANAS
   b. Penyediaan Dana untuk Pembinaan Desa Binaan di setiap Kecamatan
   c. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
   d. Dukungan Opeasional Pelayanan KB Bergerak

3. Program Pemberdayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KS) ada Penambahan kegiatan yaitu :
   a. Kegiatan Kelompok BKB, BKR, BKR dan UPPKS dalam rangka percepatan penurunan stunting
   b. Kegiatan Kelompok PIK-R dalam rangka percepatan penurunan stunting

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021, terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat sesuai dari hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan yang telah diakomodir lewat e-planning Kabupaten Tapanuli Selatan yang berbasis online dan sudah dibahas pada Musrenbang Kabupaten. Program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan (usulan dari kecamatan data terlampir). Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

2. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan.
3. Pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi.
4. Usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
5. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, dan
6. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsi OPD.

Tabel 12
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Angkola Sangkunur	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Unit	Kursi Plastik

BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan penyelenggaraan dilaksanakan secara konkuren yakni menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara terinci pembagian kewenangan tersebut ditetapkan bahwa terdapat 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu :

3.1.1. Pengendalian Penduduk :

a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk.
b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota

3.1.2. Keluarga Berencana (KB) :

a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi danedukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan

3.1.3. Keluarga Sejahtera :

a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

4. Standarisasi Pelayanan dan Sertifikasi.

Menjelang berakhirnya era Milenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyelenggarakan konferensi bertajuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development). SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan Agenda Pembangunan Global Tahun 2030 yang telah menjadi komitmen dari semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Berbeda dengan MDGs, tujuan dari SDGs jauh lebih ambisius dan komprehensif. SDGs menyatukan prinsip kesejahteraan untuk umat manusia melalui prinsip no one left behind dengan didukung oleh semua pemangku kepentingan pembangunan. SDGs memadukan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan yang diperkuat oleh tata kelola yang baik. Belajar dari pengalaman MDGs, keberhasilan pencapaian SDGs di tahun 2030 memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Bagian dari perencanaan ini sesuai dengan Perpres No. 59 Tahun 2017 dilakukan melalui serangkaian dokumen perencanaan: Peta Jalan SDGs sampai dengan tahun 2030, Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk periode 2017-2019 dan periode selanjutnya. Semua dokumen perencanaan ini harus dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian SDGs termasuk aspek perencanaannya, diperlukan suatu analisis kesenjangan antara kondisi Baseline dengan target dari indikator-indikator SDGs di tingkat Nasional sampai dengan Daerah.

Adapun target dari indikator-indikator SDGs adalah sebagai berikut :

Dalam kebijakan nasional perencanaan program pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing, oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan terus menyesuaikan dan merespon setiap program dan kegiatan yang berspektif gender. Adapun program dan kegiatan yang berspektif gender adalah sebagai berikut :

Disisi lain yang tidak kalah pentingya bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, program-program tersebut secara nyata telah berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan nasional dalam lima tahun terakhir. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keberhasilan program-program sektoral yang dilaksanakan secara integratif dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, beranjak dari program tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan terus merencanakan program dan kegiatan yang dapat mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu melaksanakan pelatihan masak-memasak, merangkai bunga dan jahit menjahit terhadap ibu-ibu rumah tangga pedesaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan menuju keluarga yang sejahtera.

Adapun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Adapun Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Sasaran

Sedangkan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mencapai visi dan misi adalah terkendalikannya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam rangka pencapaian Indikator yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 yaitu Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, maka direncanakan dapat terciptanya kondisi keluarga yang berkualitas, berkeadilan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak ideal (dua) dalam keharmonisan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam rangka terwujudnya pembangunan keluarga kecil yang berkualitas, berkeadilan dan keseteraan gender serta berdaya saing.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
    1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
        1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
        1.3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
        1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
    2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
        2.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
        2.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
    3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
        3.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Program Pengendalian Penduduk :
   1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
      1.1. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi dan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Nonformal dan Informal.
      1.2. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana.
      1.3. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota
      1.4. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
      1.5. Pengeolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):
   1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
      1.1. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
      1.2. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
      1.3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok).
   2. Kegiatan Pendayaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
      2.1. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota
    3.1. Penyusuanan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
    3.2. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.

d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) :
    1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
        1.1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Oragtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
    2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
        2.1. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

BAB. V
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan Laporan Kegiatan pemerintahan dan Pembangunan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pencapaian Program dan Kegiatan Tugas – Tugas Pemerintahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sudah terlaksana sebesar 93,03 % dari DPA OPD.

Dengan selesainya Penyusunan Program Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat merupakan Pertanggung Jawaban dalam melaksanakan Tugas, Tanggung Jawab serta kewenangan yang diberikan kepada OPD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok, 26 April 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19740205 199602 1 003

TABEL 4

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2024

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan				Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian (%)	
													2023	Tri II 2024	JUMLAH		
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12=(10+11)	13 = (12/4)	13
1					**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**												
1	14				**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**												
1	14	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**											
1	14	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100**										
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (%)	500	100	100	100	100	100	300	50	350	70.00	
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya Peringatan HUT RI dan HUT Tapsel (Kali)	10	2	2	2	2	2	6	0	6	60.00	
				06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Renja/P.Renja, LAKIP, RTP, Renstra dan Laporan Keuangan (Dokumen)	30	6	6	6	6	5	17	3	20	66.67	
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun (Laporan)	10	6	2	2	2	2	6	1	7	70.00	
2	14	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**												
				02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (stel)	350	70	70	70	100	70	210	50	260	74.29	
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25	5	5	5	100	5	15	4	19	76.00	
2	14	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**												

1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12=(10+11)	13 = (12/4)	13
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	100	20	20	20	100	20	60	8	68	68.00	
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	60	12	12	12	100	12	36	9	45	75.00	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Makan Minum (bulan)	60	12	12	12	100	12	36	6	42	70.00	
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan (Terbitan)	80	16	16	16	100	16	48	6	54	67.50	
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah (OH)	1,000	200	200	200	100	200	600	150	750	75.00	
2	14	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jumlah Benda-Benda Pos (Lembar)	1,250	250	250	250	100	250	750	100	850	68.00	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	60	12	12	12	100	12	36	8	44	73.33	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Jasa Administrasi Perkantoran PPK, Pemeriksa Barang, Panitia Pejabat Pengadaan, Gaji THL, Dll (%) dan Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	500	100	100	100	100	100	300	40	340	68.00	
2	14	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional (Unit)	35	7	7	7	100	7	21	3	24	68.57	
2	14	02			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**												
2	14	02	2.02		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**												
				02	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Terlkasananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Orang)	125	25	25	25	100	25	75	25	100	80.00	

1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12=(10+11)	13 = (12/4)	13
				02	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Orang)	2,500	200	200	200	100	1,100	1,500	400	1,900	76.00	
2	14	02	2.03		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**												
				05	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Tersedianya Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Laporan)	12	3	3	3	100	1	7	1	8	66.67	
				06	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terkelolanya dan tersedianya laporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB(Laporan)	12	3	4	4	100	1	8	1	9	75.00	
2	14	03			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**												
2	14	03	2.02		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**												
				02	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Orang)	125	25	25	25	100	25	75	15	90	72.00	
				03	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Orang)	125	25	25	25	100	25	75	15	90	72.00	
				04	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Kali)	125	25	25	25	100	25	75	1	76	60.80	
				05	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal (Orang)	125	25	25	25	100	25	75	10	85	68.00	
2	14	03	2.04		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota**												
				05	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terkendalikan dan Terdistribusikannya Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Orang)	400	80	80	80	100	80	240	30	270	67.50	

1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12=(10+11)	13 = (12/4)	13
				11	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	500	100	100	100	100	100	300	30	330	66.00	
				05	Penyusuanan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)	400	80	80	80	100	80	240	30	270	67.50	
				11	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	500	100	100	100	100	100	300	30	330	66.00	
				05	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Orang)	400	80	80	80	100	80	240	40	280	70.00	
				11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Operasional Pelayanan KB Bergerak (Orang)	500	100	100	100	100	100	300	70	370	74.00	
2	14	03	2.05		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**												
				05	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya dan Terkelolanya Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Orang)	248	17	17	17	100	17	51	10	61	24.60	
2	14	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**												
2	14	04	2.02		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**												
				02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Set)	25	5	5	5	100	2	12	2	14	56.00	

1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11	12=(10+11)	13 = (12/4)	13
				02	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	25	5	5	5	100	2	12	2	14	56.00	
2	14	04	2.03		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**												
				05	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)k (Orang)	25	5	5	5	100	2	12	2	14	56.00	

TABEL 5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RKPD									HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
KODE					PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**				**14,683,711,781**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**				**14,402,802,685**	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**				**6,291,677,431**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**				**5,788,261,835**	
01	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tercakupnya pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**3,971,635,581**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tercakupnya pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**3,950,476,485**	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (%)	100 %	3,875,451,781	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (%)	100 %	3,859,492,685	
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Peringatan HUT Tapsel (Kali)	2 Kali	53,200,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Peringatan HUT Tapsel (Kali)	2 Kali	48,000,000	
				06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Renja/P.Renja, LAKIP, RTP, Renstra dan Laporan Keuangan (Dokumen)	6 Dok	29,058,600	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Renja/P.Renja, LAKIP, RTP, Renstra dan Laporan Keuangan (Dokumen)	6 Dok	29,058,600	
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun (Laporan)	2 Lap	13,925,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun (Laporan)	2 Lap	13,925,200	
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dinas Dalduk dan KB			**132,836,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dinas Dalduk dan KB			**16,500,000**	
				02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (stel)	134 Stel	105,336,000	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (stel)	134 Stel	0	
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5 Orang	27,500,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5 Orang	16,500,000	
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dinas Dalduk dan KB	Dinas Dalduk dan KB		**513,198,850**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dinas Dalduk dan KB			**288,053,100**	
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	15 Unit	57,750,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	15 Unit	14,522,500	
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	12 Bln	2,068,300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	12 Bln	2,068,300	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya ATK dan Makan Minum (bulan)	12 Bln	105,238,550	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya ATK dan Makan Minum (bulan)	12 Bln	92,450,300	
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Terbitan)	10 Terbitan	8,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Terbitan)	10 Terbitan	8,000,000	
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Dalduk dan KB	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah (OH)	180 OH	340,142,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Dalduk dan KB	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah (OH)	180 OH	171,012,000	
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dinas Dalduk dan KB			**1,531,542,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dinas Dalduk dan KB			**1,453,197,550**	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jumlah Benda-Benda Pos (Lembar)	75 Lbr	2,040,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jumlah Benda-Benda Pos (Lembar)	75 Lbr	2,040,000	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12 Bln	32,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12 Bln	31,507,950	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Honorarium Jasa Administrasi Perkantoran PPK, Pemeriksa Barang, Panitia Pejabat Pengadaan, Gaji THL, Dll (%) dan Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	100 % 12 Bln	1,497,002,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Honorarium Jasa Administrasi Perkantoran PPK, Pemeriksa Barang, Panitia Pejabat Pengadaan, Gaji THL, Dll (%) dan Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	100 % 12 Bln	1,419,649,600	
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**142,465,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**80,034,700**	
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional (Unit)	7 Unit	93,034,700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional (Unit)	7 Unit	80,034,700	
				09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	1 Unit	49,430,300	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	1 Unit	0	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Dinas Dalduk dan KB			**455,214,850**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Dinas Dalduk dan KB**			**458,354,350**	
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		**Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal**		**109,518,500**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		**Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal**		**109,518,500**	
				09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	1 Satuan Pendidikan %	29,518,500	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	1 Satuan Pendidikan %	29,518,500	
				10	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan %	80,000,000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan %	80,000,000	
2	**14**	**02**	**00**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Dalduk dan KB	**Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan di Kabupeten Tapanuli Selatan**		**345,696,350**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Dalduk dan KB	**Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan di Kabupeten Tapanuli Selatan**		**348,835,850**	
				10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Hasil Pemutahiran Data Keluarga yang dimanfaatkan	1 Dokumen	29,496,350	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Hasil Pemutahiran Data Keluarga yang dimanfaatkan	1 Dokumen	63,835,850	
				13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	316,200,000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	285,000,000	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Dinas Dalduk dan KB			**6,157,955,000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Dinas Dalduk dan KB			**6,026,990,500**	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**2,309,290,000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**2,149,360,000**	
				10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	4 Laporan	789,450,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	4 Laporan	629,700,000	
				11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok) (Laporan)	2 Laporan	335,040,000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok) (Laporan)	2 Laporan	495,040,000	
				12	Promosi dan KIE Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Daerah	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Daerah	3 Dokumen	250,000,000	Promosi dan KIE Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Daerah	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Daerah	3 Dokumen	131,820,000	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	3 Dokumen	934,800,000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	3 Dokumen	892,800,000	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**0**	**Pendayaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**0**	
				02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Opeasional Penyuluh KB serta Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya Penyuluhan KB (Orang)		0	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Opeasional Penyuluh KB serta Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya Penyuluhan KB (Orang)		0	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota**				**2,930,665,000**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota**				**3,291,380,500**	
				01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	18,900,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	13,029,000	
				03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3000 Orang	1,122,607,000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3000 Orang	1,227,768,000	
				05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana	1 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana	1 Dokumen	26,973,500	
				06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	79 Unit	1,655,300,000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	79 Unit	1,907,552,000	
				08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	35,700,000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	47,900,000	
				11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	3 Laporan	68,158,000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	3 Laporan	68,158,000	
2	**14**	**03**	2	04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**		**Terlaksananya Pengembangn Kampung KB**		**918,000,000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**		**Terlaksananya Pengembangn Kampung KB**		**586,250,000**	
				08	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	15 Kampung	918,000,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	15 Kampung	586,250,000	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Dinas Dalduk dan KB			**1,778,864,500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Dinas Dalduk dan KB			**2,129,196,000**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Tersedianya BKB Kit Stunting**		**1,745,168,500**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Tersedianya BKB Kit Stunting**		**2,095,500,000**	
				08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga) (Kelompok)	1 Laporan	33,268,500	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga) (Kelompok)	1 Laporan	0	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				08	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20 Unit	36,000,000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20 Unit	300,000,000	
				08	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	855 Orang	1,675,900,000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	855 Orang	1,795,500,000	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksnaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Terlaksananya Sosialisasi Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupeten Tapanuli Selatan**		**33,696,000**	**Pelaksnaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Terlaksananya Sosialisasi Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupeten Tapanuli Selatan**		**33,696,000**	
				02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BBKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BBKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	33,696,000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BBKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Dalduk dan KB	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BBKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	33,696,000	
JUMLAH									**14,683,711,781**			**JUMLAH**		**14,402,802,685**	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TAPANULI SELATAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**14**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**5,680,237,117**				**5,756,352,294**
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,768,280,417**				**3,818,775,375**
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (%)	Kab. Tapsel	100	3,672,096,617	APBD		100	3,721,302,712
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya Peringatan HUT Tapsel (Kali)	Kab. Tapsel	2	53,200,000	APBD		2	53,912,880
				06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Renja/P.Renja, LAKIP, RTP, Renstra dan Laporan Keuangan (Dokumen)	Kab. Tapsel	6	29,058,600	APBD		6	29,447,985
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun (Laporan)	Kab. Tapsel	2	13,925,200	APBD		2	14,111,798
2	**14**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**130,336,000**				**132,082,502**
				02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (stel)	Kab. Tapsel	240	105,336,000	APBD		240	106,747,502
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kab. Tapsel	5	25,000,000	APBD		5	25,335,000
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**424,619,500**				**430,309,401**
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	Kab. Tapsel	15	57,750,000	APBD		15	58,523,850
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	Kab. Tapsel	12	4,109,900	APBD		12	4,164,973
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan Makan Minum (bulan)	Kab. Tapsel	12	104,757,600	APBD		12	106,161,352
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Terbitan)	Kab. Tapsel	10	8,000,000	APBD		10	8,107,200
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah (OH)	Kab. Tapsel	280	250,002,000	APBD		280	253,352,027
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**				**1,214,450,200**				**1,230,723,833**
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jumlah Benda-Benda Pos (Lembar)	Kab. Tapsel	75	2,000,000	APBD		75	2,026,800
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	Kab. Tapsel	12	32,773,960	APBD		12	33,213,131
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Jasa Administrasi Perkantoran PPK, Pemeriksa Barang, Panitia Pejabat Pengadaan, Gaji THL, Dll (%) dan Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	Kab. Tapsel	100 12	1,179,676,240	APBD		100 12	1,195,483,902
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**				**142,551,000**				**144,461,183**
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional (Unit)	Kab. Tapsel	30	93,034,700	APBD		30	94,281,365

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	Kab. Tapsel	1	49,516,300	APBD		1	50,179,818
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA**				**8,964,155,000**				**9,084,274,677**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**2,029,840,000**				**2,057,039,856**
				03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tersedia dan Terdistribuinya Sarana KIE Program KKBPK (Unit)	Kab. Tapsel	87	1,909,800,000	APBD		87	1,935,391,320
				05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Terlaksananya Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) (Kali)	Kab. Tapsel	2	100,000,000	APBD		2	101,340,000
				08	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok) (Kecamatan)	Kab. Tapsel	15	20,040,000	APBD		15	20,308,536
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**6,836,157,000**				**6,927,761,504**
				02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Tapsel	25	6,836,157,000	APBD		25	6,927,761,504
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota**				**98,158,000**				**99,473,317**
				05	Penyusuanan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Site Efek (Orang)	Kab. Tapsel	4500	30,000,000	APBD		4500	30,402,000
				11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Operasional Pelayanan KB Bergerak (Orang)	Kab. Tapsel	4500	68,158,000	APBD		4500	69,071,317
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**66,964,500**				**67,861,824**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**33,268,500**				**33,714,298**
				08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga) (Kelompok)	Kab. Tapsel	5	33,268,500	APBD		5	33,714,298
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**33,696,000**				**34,147,526**
				02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BBKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BBKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Kelompok)	Kab. Tapsel	5	33,696,000	APBD		5	34,147,526
					J U M L A H				**14,711,356,617**				**14,840,626,971**

TABEL 4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN				
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	-	-	1.61	1.58	0.31	0.28	0.25	0.39	0.45	0.67	0.49	1.06
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,6	-	2.28	2.57	2.56	2.55	2.54	2.28	2.57	2.56	2.55	2.54
3	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR	30.95	-	29.95	30.70	30.76	31.08	31.59	29.95	30.70	30.76	11.48	14.10
4	Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP	20,00	-	23.50	24.30	33.58	34.30	34.75	23.50	32.94	26.16	19.23	22.37
5	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,40	-	11.55	11.52	11.50	11.36	11.22	9.30	11.65	13.15	30.67	12.61
6	Jumlah Keluarga Sejahtera yang Mendapat Bantuan (Kelompok)	20,00	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

ISSU UTAMA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TAPANULI SELATAN

No	Prioritas	Issu Utama	SKPD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	Usul Awal (Rp)	Tahap Pembahasan/ Setuju (Rp.)	Catatan Penting
				2	3	5	6	7	8
1	**Peningkatan Kualitas dan Aksebilitas Pelayanan Kesehatan**	**Pencegahan/ Penanganan Stunting**	**PP KB**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**195,577,800**	**650,000,000**	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**133,000,000**	**250,000,000**	
				Penyelwnggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah (OH)	280	133,000,000	250,000,000	
2	**Peningkatan Kualitas dan Aksebilitas Pelayanan Kesehatan**	**Pencegahan/ Penanganan Stunting**	**PP KB**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**62,577,800**	**400,000,000**	
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			**32,284,000**	**200,000,000**	
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengeloaan Keuangan Keluarga) (Kelompok)	15	32,284,000	200,000,000	
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			**30,293,800**	**200,000,000**	
				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BBKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BBKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Kelompok)	15	30,293,800	200,000,000	
				J U M L A H			**195,577,800**	**650,000,000**	

RENCANA KERJA



BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TA. 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan. Rencana Kerja ini merupakan dokumen dalam jangka waktu satu tahun mendatang, yaitu tahun 2024.

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Satuan Peragkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja periode satu tahun ke depan.

Kerangka sistematika Renja ini disusun mencakup pendahuluan, hasil evaluasi renja perangkat daerah Tahun 2023, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah serta penutup.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya. Semoga rencana kerja ini nantinya dapat dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sipirok, 23 Desember 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

HAMDY S. PULUNGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720401 199203 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I. PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang..... 5

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 13

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 13

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……..... 19

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……..... 22

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah…….. 24

2.5. Penelaahan Usulan Progaram dan Kegiatan Masyarakat……..... 32

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 34

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 34

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 35

3.3.Program dan Kegiatan 39

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH… 44

BAB V. PENUTUP ……..... 58

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel TC 2.9 Capaian Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023…….14

Tabel TC.30 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……..……..23

Tabel T.C.31 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025…….25

Tabel T.C.32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 ……33

Tabel T.C.33 Rencana Kerja Dan Pendanaan ……48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun . Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah terdiri atas enam tahapan, yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan periode Tahun 2021 - 2026, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan /pedoman penyusunan Rencana Kerja bagi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan susunan organisasi badan terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    2. Subbagian Perencanaan
    3. Subbagian Keuangan
c. Bidang Bidang Bina Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
    1. Subbidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan
    2. Subbidang Pembinaan Karakter Kebangsaan
d. Bidang Politik Dalam Negeri yang terdiri :
    1. Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
    2. Subbidang Fasilitasi Partai Politik
e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
    1. Subbidang Penanganan Konflik
    2. Subbidang Kewaspadaan Dini
f. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
    1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
    2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana kerja tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6057);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20),
27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.
30. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja perangkat daerah.

B. Tujuan

A. Sebagai Dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
B. Mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
C. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.
D. Sebagai kerangka acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan dan mengembangkan langkah langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan.
E. Sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Badan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Dokumen Rencana kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 dilakukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam Proses Penyusunan Rencana kerja ini juga melibatkan seluruh Bidang dan sub bagian dan sub bidang serta melibatkan Stakeholders Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap RKPD/ Renstra OPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
3.4 Penelaahan Kebutuhan Mendesak OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan Tugas pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2023 melaksanakan 5 program dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

D. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Tabel 2.9 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Selatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Umum									
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH									
8	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30 Dokumen	16	6	6	100,00	6	28	93,3
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	9	3	3	100,00	3	15	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,00	6,00	2,00	2,00	100,00	2,00	10,00	100,00

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145,00	105,00	34,00	34,00	100,00	0,00	139	95,86
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53,00	31,00	10,00	10,00	100,00	0,00	41,00	77,35
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	3460,00	2.076	692,00	692,00	100,00	692,00	3460,00	100,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit yang disediakan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	300,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50,00	30,00	10,00	10,00	100,00	10,00	50,00	100,00
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Cakupan Pembinaan LSM ormas dan FKDM**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500,00	900,00	300,00	300,00	100,00	300,00	1500,00	100,00
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase pemanfaatan hak pilih (Pemilukada Kab/Kota)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.325,00	1.395,00	465,00	465,00	100,00	465,00	2.325,00	100,00
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2480,00	1.488,00	496,00	496,00	100,00	496,00	2480,00	100,00
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00

				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Penyelesaian Konflik (%)**								
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2600,00	1.560,00	520,00	520,00	100,00	520,00	2600,00	100,00
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan sejumlah pelayanan baik pelayanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan.

a. Pelayanan Internal
   1) Penyusunan program Badan;
   2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
   3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan.
   4) Penyusunan laporan Badan;
   5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
   6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
   7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
   8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
   9) Pengelolaan kearsipan;
   10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
   11) Pengelolaan data kepegawaian Badan; dan
   12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal
   1) Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
   2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
   3) Fasilitasi terhadap kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
   4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
   5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
   6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
   7) Fasilitasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
   8) Fasilitasi Upaya Pengembangan nilai-nilai kebangsaan,kewaspadaan nasional,pengembangan upaya penanganan konflik,pembauran bangsa,serta bela negara;
   9) Fasilitasi Organisasi Politik

Kinerja pelayanan SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan Tahun 2025 yang didasarkan pada indikator Kinerja keberhasilan (IKK) sebagai Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan sebagai Tabel 2.2 :

Tabel. T.C 3.0
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	
				(thn n-4)	(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Persentase Potensi Konflik Sosial dan Konflik SARA yang tertangani**		**Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	85,00	87,00	88,00	89.00	100,00	0,00	90,00	91,00	
2	**Persentase Pemanfaatan Hak Pilih pada Pemilu**		**Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	78,00	0,00	0,00	79,17	0,00	80,98	0,00	0,00	

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari :

a. Persentase Potensi Konflik Sosial dan Konflik SARA yang tertangani untuk mencapai target tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

    1. Memberdayakan Forum-forum yang dibentuk serta mensosialisasikan terhadap Tokoh Agama, masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat diwilayah Kabupaten Tapanuli Selatan betapa pentingnya mendeteksi potensi konflik yang terjadi ditengah-tengah masyakat.

    2. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama dengan stackholder ditingkat kabupaten/kecamatan/kelurahan atau desa dalam mewujudkan stabilitas keamanan diwilayah masing-masing.

    3. Peningkatan SDM terkait Deteksi Dini terdapat Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik yang timbul di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Persentase Pemanfaatan Hak Pilih pada Pemilu dalam rangka mencapai target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2024 melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung Indikator tersebut :

    1. Melaksanakan sosialisasi pemilu pada 15 Kecamatan dengan jumlah 750 orang, adapun narasumber dari pihak KPU kabupaten Tapanuli Selatan dan Kepala Kesbangpol dengan tujuan agar masyarakat lebih peduli akan pentingnya menentukan pilihan.

    2. Melaksanakan kegiatan dapur umum di 15 Kecamatan agar terlaksananya Pemilihan umum lancar dan tidak ada hambatan dalam rangka perhitungan suara.

    3. Adapun untuk Pemilukada yang akan dilaksanakan pada bulan november Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan rencananya akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat.

ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Dalam menghadapi Tahun 2025, perlu diperhatikan isu – isu dalam menjaga kesatuan bangsa dan kehidupan bernegara demi terciptanya ketentraman dimasyarakat. Isu penting tersebut yakni salah satunya dalam mencapai prioritas presiden yang tertuang dalam 9 agenda prioritas (nawacita). Dalam agenda prioritas nawacita tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 4 prioritas yang harus dipenuhi yakni :

a. Prioritas 1, menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh WN.
b. Prioritas 2, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpecaya.
c. Prioritas 8, melakukan revolusi karakter bangsa.
d. Prioritas 9, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial.

Dalam menghadapi isu tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan :

1. Dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan bernegara serta dapat mendukung rasa cinta tanah air. Masyarakat yang sadar akan wawasan kebangsaan akan peduli terhadap Negara sehingga dapat turut andil dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah.
2. Dalam melaksanakan Tahun 2025 yakni masyarakat harus dibekali tentang arti dan makna dari kegiatan politik sehingga berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan perlu dilakukan tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Kegiatan pencegahan dapat dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat maupun partai politik.
3. Dalam pemantauan dan penanganan penyakit masyarakat dan konflik dilakukan dengan cermat. Berbagai konflik dan penyakit masyarakat dan konflik dapat menjadi bahan permainan politik seperti mengambil keuntungan dari isu tersebut. Konflik – konflik tanah ulayat dan batas daerah yang dapat memicu konflik sosial masih rawan terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA (RENJA) PD

Dalam pemecahan masalah isu – isu strategis tersebut, rencana kerja dan kegiatan di Kesbangpol pada Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) Sub. kegiatan.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub. Kegiatan

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub. Kegiatan

III. Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub. Kegiatan

IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub. Kegiatan

V. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi penanganan Konflik, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub. Kegiatan.

Tabel T-C.31.
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		
	Perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		**Perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		
	Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	14.400.000	Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	14.400.000	
	Kordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	14.400.000	Kordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	14.400.000	
	Kordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	14.400.000	Kordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	14.400.000	
	Kordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perubahan yang disusun	1 Dokumen	14.400.000	Kordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perubahan yang disusun	1 Dokumen	14.400.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	27.297.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	27.297.100	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan	31.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Laporan	31.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.423.227.684	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	1.423.227.684	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tapsel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	76.329.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	76.329.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Tapsel	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran OPD yang disusun	2 Laporan	20.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tapsel	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran OPD yang disusun	2 Laporan	20.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan	Tapsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	43.489.725	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan	Tapsel	Jumlah Stell Pakaian Dinas yang diadakan	1 Paket	43.489.725	
	Bimbingan Teknis Implpementasi Peraturan Perundang Undangan	Tapsel	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Bimtek	11 Orang	55.000.000	Bimbingan Teknis Implpementasi Peraturan Perundang Undangan	Tapsel	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Bimtek	11 Orang	55.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	145.000.000	Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	145.000.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandan	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandan	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Surat Kabar dan Majalah)	12 Bulan	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Surat Kabar dan Majalah)	12 Bulan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	692 Laporan	404.019.775	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	692 Laporan	404.019.775	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	17.863.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	17.863.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tapsel	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7 Unit	117.364.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tapsel	Jumlah Unit yang diadakan	7 Unit	117.364.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapsel	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapsel	Jummlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	1 Laporan	4.612.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapsel	Jummlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	1 Laporan	4.612.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan rekening Listrik Air dan Internet Perangkat Daerah	1 Laporan	61.357.057	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan rekening Listrik Air dan Internet Perangkat Daerah	1 Laporan	61.357.057	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	572.140.752	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	572.140.752	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tapsel**	**Cakupan Pelayanan Admministrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin berkala Kenderaan Dinas/Operasional Perangkat Daerah, Jumlah Unit Pajak dan Asuransi Kenderaan Dinas Operasional Perangkat Daerah yang dibayarkan	14 Unit	34.763.351	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin berkala Kenderaan Dinas/Operasional Perangkat Daerah, Jumlah Unit Pajak dan Asuransi Kenderaan Dinas Operasional Perangkat Daerah yang dibayarkan	14 Unit	34.763.351	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapsel	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin berkala kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	38.348.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapsel	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin berkala kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	38.348.100	
	Pemeliharaan Mebel	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Meubelair Kantor	6 Unit	4.315.882	Pemeliharaan Mebel	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Meubelair Kantor	6 Unit	4.315.882	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60 Unit	48.745.790	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60 Unit	48.745.790	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Taman Perkantoran	1 Unit	111.474.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tapsel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Taman Perkantoran	1 Unit	111.474.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Tapsel**	**Cakupan Pembinaan LSM ormas dan FKDM (%)**	**100**		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Tapsel**	**Cakupan Pembinaan LSM ormas dan FKDM (%)**	100		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				**1.469.333.696**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tapsel**				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tapsel	Jumlah masyarakat yang ikut kegiatan peningkatan aknan nilai-nilai luhur budaya bangsa (orang)/ Jumlah ormas,LSM dan FKDM yang ikut kegiatan peningkatan rasa solidaritas (orang)	300 Orang	318.361.696	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tapsel	Jumlah masyarakat yang ikut kegiatan peningkatan aknan nilai-nilai luhur budaya bangsa (orang)/ Jumlah ormas,LSM dan FKDM yang ikut kegiatan peningkatan rasa solidaritas (orang)	300 Orang	318.361.696	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tapsel	Jumlah data dan dokumen hasil monitoring (dokumen)	1 Dokumen	23.183.600	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Tapsel	Jumlah data dan dokumen hasil monitoring (dokumen)	1 Dokumen	23.183.600	

						Sejarah Kebangsaan					
	Pembentukan Paskibraka	Tapsel	Jumlah Paskibra	78 Orang	877.788.400	Pembentukan Paskibraka	Tapsel	Jumlah Paskibra	78 Orang	877.788.400	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Tapsel	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	78 Orang	250.000.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Tapsel	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	78 Orang	250.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Tapsel**	**Persentase pemanfaatan hak pilih (Pemilukada Kab/Kota) (%)**	**0,00**		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Tapsel**	**Persentase pemanfaatan hak pilih (Pemilukada Kab/Kota) (%)**	**0,00**		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Tapsel**		**0,00**	**1.522.273.534**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Tapsel**	**Persentase pemanfaatan hak pilih (Pemilukada Kab/Kota) (%)**	**0,00**	**1.522.273.534**	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tapsel	Jumlah Dokumen Administrasi Parpol (dokumen)/ Jumlah Masyarakat dan Pemilih pemula yang ikut pendidikan politik(Orang)/ Jumlah Kader Partai yang ikut diskusi politik (Orang)	0,00		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tapsel	Jumlah Dokumen Administrasi Parpol (dokumen)/ Jumlah Masyarakat dan Pemilih pemula yang ikut pendidikan politik(Orang)/ Jumlah Kader Partai yang ikut diskusi politik (Orang)	0,00		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tapsel	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	400 Orang	1.522.273.534	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Tapsel	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	400 Orang	1.522.273.534	

			Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun/ Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun/ Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tapsel	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tapsel	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Tapsel**	**Persentase Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat (%)**	**94,00%**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Tapsel**	**Persentase Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat (%)**	**94,00%**		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Tapsel**			**807.553.938**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Tapsel**			**807.553.938**	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tapsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	496 Orang	769.013.518	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tapsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	496 Orang	769.013.518	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Tapsel	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	1 Laporan	18.181.385	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Tapsel	Jumlah data dan dokumen hasil monitoring	1 Dokumen	18.181.385	

	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		(dokumen			
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Tapsel**	**Persentase Penyelesaian Konflik (%)**	**90,00%**		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Tapsel**	**Persentase Penyelesaian Konflik (%)**	**90,00%**		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Tapsel**		**90,00%**	**526.682.385**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Tapsel**	**Persentase Penyelesaian Konflik (%)**	**90,00%**	**526.682.385**	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tapsel	Jumlah bulan terpenuhinya operasional kegiatan Tim Terpadu penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri (Bulan)/ Jumlah Bulan terpenuhinya Biaya Operasional Kominda / FKDD (Bulan)/Terlakasnanya Pelatihan Intelijen Dasar bagi Aparatur Kelurahan dan Desa (Orang)	496 Orang	493.879.527	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tapsel	Jumlah bulan terpenuhinya operasional kegiatan Tim Terpadu penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri (Bulan)/ Jumlah Bulan terpenuhinya Biaya Operasional Kominda / FKDD (Bulan)/Terlakasnanya Pelatihan Intelijen Dasar bagi Aparatur Kelurahan dan Desa (Orang)	496 Orang	493.879.527	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tapsel	Jumlah data dan dokumen hasil monitoring (dokumen)	1 Laporan	32.802.858	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tapsel	Jumlah data dan dokumen hasil monitoring (dokumen)	1 Laporan	32.802.858	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menyusun dokumen Rencana kerja PD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasaldari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD.

Sebagai salah satu PD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten dan pelaksanaan forum OPD. Dalam kesempatan ini untuk tahun 2025, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari hasil sosialisasi kegiatan dan pemantuan kelapangan diperoleh informasi dan masalah-masalah di tokoh masyarakat, LSM dan para tokoh pemuda bahwa mereka mengharapkan agar kegiatan sosialisasi tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat lebih ditingkatkan.

Tabel T-C.32.
Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mengacu juga pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs sebagai landasan hukum pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Selanjutnya Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) PPN/Kepala Bappenas sebagai peraturan teknis pelaksanaan TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogianya harus selalu berorientasi pada kesadaran masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, Maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan program/kegiatan sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Salah satu misi pembangunan Nasional yang terkait dengan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Terwujudnya persatuan dan kesatuan yang Demokratis, aman dan tertib menuju masyarakat yang kondusif.

Serta memetakan wawasan kebangsaan Masyarakat, mendorong peningkatan peran Organisasi Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM, Memanfaatkan Kekuatan dan ketertiban Masyarakat Tapanuli selatan, sebagaimana tercatum dalam Visi Misi Badan Kesbangol Tapanuli Selatan.

Lingkungan Internal :

a. Dukungan SDM / Pegawai

Sumber Daya Manusia di Badan Kesbangpol Kabupaten Tapanuli Selatan sampai pada saat ini berjumlah 34 orang. Dengan Keadaan pegawai yang terbatas Badan Kesbangpol masih membutuhkan personil karena masih ada formasi yang belum diisi. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol secara optimal maka diperlukan penambahan SDM baik kualitas maupun kuantitas

b. Peralatan / Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum memenuhi kebutuhan. Jumlah kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda dua maupun kendaraan dinas roda empat belum memenuhi kebutuhan, jika dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang ada.

3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan dan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

1. Menumbuhkembangkan Kesadaran Masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI.
2. Melaksanakan SDGS /Pembangunan Berkelanjutan Dalam pilar pembangunan dan tata kelola.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Kabupaten Tapanuli selatan sebagai OPD yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Program Kerja SDGs sebagai mana diamanatkan Perpres 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan Pilar pembangunan dan tata kelola dalam mencapai Indikator SDGs Indeks Lembaga Demokrasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan telah merancang program dan kegiatan yang di bebankan pengangarannya ke APBD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ada 3 (tiga) indeks yang ada dalam indikator SDGs Indeks Lembaga Demokrasi, yaitu:

1. Indeks Lembaga Demokrasi
2. Indeks Kebebasan Sipil dan
3. Indeks Hak-hak Politik

Sasaran :

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spisifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dan dari tujuan, sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI;

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kehidupan Berdemokrasi	Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI	Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945	Pembinaan keragaman budaya dan kerukunan hidup antar umat beragama
			kolaborasi antar sektor untuk mendorong daya kreasi dan inovasi generasi muda	Pendidikan, pembinaan dan pengembangan wawasan cinta tanah air
			Memperkuat pemahaman cinta tanah	Pendidikan dan pembinaan

			air	nilai-nilai pancasila
				Meningkatkan dukungan Kominda

Untuk Mencapai indeks Demokrasi yang dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melaksanakan Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan berupa *Koordinasi Forum-forum diskusi Politik, Pelatihan Politik bagi Tokoh Masyarakat/ Pemilih Pemula.* Program/Kegiatan dan Pengganggarannya dapat dilihat pada Tabel TPB/SDGs.

Tabel. 3.2.2

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

MATRIKS TPB/SDGs BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Program/ Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (RP Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026				
INDIKATOR SDGs:16.7.2 INDEKS LEMBAGA DEMOGRASI											
16.7.2 (a)INDEKS LEMBAGA DEMOKRASI											
16.7.2 (b)INDEKS KEBEBASAN SIPIL											
16.7.2 INDEKS HAK-HAK POLITIK											
Program 1 : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik	**%**		**0,00**	**0,00**	**82,65**	**0,00**	**0,00**	**7.516.144.376**	**APBD**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**
Kegiatan 1:Koordinasi Forum-forum diskusi Politik	Orang		64	64	64	64	64	7.516.144.376	APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kegiatan 2:Pelatihan Politik bagi Tokoh Masyarakat/Pemilih Pemula	Orang		400	400	400	400	400		APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kegiatan 3: Jumlah Dokumen Administrasi Parpol (dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1		APBD	Kabupaten Tapanuli Selatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 serta Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Yang dituangkan dalam serangkaian Program dan Kegiatan guna mendukung Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2025 terdiri atas 5 program dan 10 kegiatan sebagaimana berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Indikator Kinerja	:	Cakupan pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
Kelompok Sasaran	:	Pegawai Kantor
Kebutuhan dana	:	Pagu dana terlampir
Sumber dana	:	APBD Kabupaten (DAU)

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   2.Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan:
   1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
   2.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah,dengan Sub Kegiatan :
   1.Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   2.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan.
   3.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
   4.Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   1.Penyediaan jasa surat menyurat.
   2.Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
   3.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau kenderaan Dinas Jabatan.

2.Pemeliharaan Mebel.

3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya.

4.Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Indikator Kinerja	:	Cakupan Pembinaan LSM ormas dan FKDM (%)
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Kebutuhan dana	:	Pagu dana terlampir
Sumber dana	:	APBD Kabupaten (DAU)

Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub Kegiatan :

A. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan , bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

B. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik

Indikator Kinerja	:	Persentase pemanfaatan hak pilih (Pemilukad Kabupaten/Kota)
Kelompok Sasaran	:	Kader Partai, Masyarakat dan Partai Politik
Kebutuhan dana	:	Pagu dana terlampir
Sumber dana	:	Dana Alokasi Umum(DAU)

Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang pendidikan Politik,etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi ,fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai Politik, dengan Sub Kegiatan :

A. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah.

B. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

C. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

IV. Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Indikator Kinerja	:	Persentase Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat (%)
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Kebutuhan dana	:	Pagu dana terlampir
Sumber dana	:	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya :

A. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
B. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

V. Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Konflik (%)
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Kebutuhan dana	:	Pagu dana terlampir
Sumber dana	:	Dana Alokasi Umum (DAU)

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub. Kegiatan :

A. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah.
B. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke -4) **"*Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa*"**. Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mencakup 5 Program dengan 10 Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kesbangpol Tahun 2025

No.	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Kordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5. Kordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan

				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,

				Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,

				Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Tabel T-C.33

Rencana kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

No.	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								**7.524.675.421**		**8.067.659.912**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA								**7.524.675.421**		**8.067.659.912**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										
A.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kesbangpol	100%	1 Dokumen	100%	14.400.000	-	14.472.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kesbangpol	100%	1 Dokumen	100%	14.400.000		14.472.000
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang Disusun (Dukumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	100%	2 Dokumen	100%	14.400.000		14.472.000

	Perangkat Daerah										
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kesbangpol	100%	1 Dokumen	100%	14.400.000		14.472.000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kesbangpol	100%	1 Dokumen	100%	14.400.000		14.472.000
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	100%	3 Laporan	100%	31.000.000		31.155.000
B.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	100%	12 Bulan/Orang	100%	1.423.227.684		1.444.576.099
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera	Kesbangpol	100%	2 Laporan	100%	20.500.000		20.602.000

	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kemasyarakatan (%)	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD							
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesbangpol	100%	1 Dokumen	100%	98.489.725		316.213.350
C.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kesbangpol	100%	1 Paket	100%	43.489.725		260.938.350
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesbangpol	100%	11 Orang	100%	55.000.000		55.275.000
D.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	100%	1 Paket	100%	145.000.000		145.725.000
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kesbangpol	100%	12 Bulan	100%	25.000.000		25.125.000
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	100%	1 Dokumen	100%	50,000,000		50,250,000

4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	100%	692 Laporan	100%	404.019.775		406.039.874
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	100%	12 Bulan	100%	6.993.600		7.026.568
E.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbangpol	100%	1 Laporan	100%	4.612.500		4.635.562
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	100%	1 Laporan	100%	61.357.057		61.663.842
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	100%	1 Laporan	100%	470.632.604		472.985.767
F.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kesbangpol	100%	14 Unit	100%	34.763.351		34.937.168
2.	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Pelayanan Administrasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan	Kesbangpol	100%	6 Unit	100%	4.315.882		4.337.461

		Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		Mebel							
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbangpol	100%	60 Unit	100%	48.745.790		48.989.518
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	100%	1 Unit	100%	111.474.000		112.031.370
II	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**										
A.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Cakupan Pembinaan LSM ormas dan FKDM (%)**				**100%**			**1.469.333.696**		**1.571.805.233**
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tapsel	100%	300 Orang	100%	318.361.696		322.679.466
2.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan	Kab. Tapsel	100%	1 Dokumen	100%	23.183.600		36.540.420

	Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
3.	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Kab. Tapsel	100%	78 Orang	100%	877.788.400		961.335.347
4.	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		Kab. Tapsel	100%	78 Orang	100%	250.000.000		251.250.000
III.	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**										
A.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta**	**Persentase Pemanfaatan Hak Pilih pada Pemilu**				**0,00 %**			**1.522.273.534**		**1.683.902.256**

	Pemantauan Situasi Politik										
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tapsel	0,00 %	400 Orang	100%	1.522.273.534		1.529.884.901
2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Persentase pemanfaatan hak pilih (Pemilukada Kab/Kota) (%)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							

	Situasi Politik di Daerah										
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tapsel	100%	16 Laporan	100%	0,00		154.017.355
IV.	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**										
A.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat (%)**				**94,00 %**			**807.553.938**		**811.591.708**
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan		Fasilitasi Kegiatan Tim Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba/P4GN	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	Kab. Tapsel	94,00 %	496 Orang	100%	769.013.518		772.858.586

	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Sosial dan Budaya							
2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tapsel	94,00 %	1 Laporan	100%	38.540.420		38.733.122
V.	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**										
A.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Potensi Konflik Sosial dan Konflik SARA yang tertangani**				**90,00 %**			**526.682.385**		**529.315.796**
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan	Kab. Tapsel		496 Orang	100%	493.879.527		496.348.924

	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tapsel		1 Laporan	100%	32.802.858		32.966.872

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana kerja 2025 ini adalah salah satu komitmen yang harus dilaksanakan oleh semua penyelenggara pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media bagi semua pemangku kepentingan (stake holder) dan merupakan bahan pertimbangan bagi pejabat penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga tercipta kebersamaan dan kesatuan pandang untuk terlaksananya pembangunan khususnya di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang sistematik dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran ini merupakan hasil kerja dari semua jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

Pada akhirnya Dokumen Rancanagan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang memuat program dan kegiatan Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik untuk terwujudnya persatuan dan esatuan yang demokratis, aman dan menuju masyarakat yang kondusif.

Sipirok, 23 Desember 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

HAMDY S. PULUNGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19720401 199203 1 003

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanauwata'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang kemudian diperjelas kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kota Palembang. Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintahan Tapanuli Selatan maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini merupakan tahun keempat dari RPJMD Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, mempertimbangkan prioritas pembangunan Tapanuli Selatan, memperhitungkan kemajuan pembangunan (hasil capaian kinerja) Dinas Ketahanan Pangan tahun sebelumnya, memperhatikan hasil analisis isu strategis, serta mengacu pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan serta RKPD

Tahun 2025 yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi OPD atau Dinas Lain serta masyarakat.

Pada akhirnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini diharapkan dapat berguna secara optimal sehingga rencana hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan optimal pula dan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat Tapanuli Selatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok, 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



EFRIDA YANTI PAKPAHAN, S.TP., M.M.
NIP. 197603192009042001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tahun Lalu 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23
2.4 Review Terharadap Rancangan Awal RKPD 25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PPERANGKAT DAERAH 35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 37
3.3 Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan 38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45
BAB V PENUTUP 48

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2023, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Proses Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penentapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1030);
21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 1178);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kineija penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun beijalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kineija tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kineija pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kineija pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Bab V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi anggaran Belanja untuk Dinas Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 5.466,418,561,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 5.144,116.361,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 322.302,200,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 4.819,766,640,- atau sebesar 88,17 %.

Tabel T.C. 2.9

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2	09	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	100	100	100	100	100	100	-	100
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (dokumen)	6	6	6	6	6	6	-	6
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	4	4	4	4	4	4	-	4
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	-	100

	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Bagi ASN (%)	100	100	100	100	100	100	-	100
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	-	100
	2	09	01	2.08		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	-	100
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	-	100
	2	09	03			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPH Konsumsi (Skor)	84	81,3	81,5	84,6	103,8	82	-	100
							Skor PPH Ketersediaan (Skor)	95,15	94,93	95	85,95	90,5	95,05	-	100
	2	09	04			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan (%)**							-	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terselenggaranya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) (dokumen)	1	1	1		100	1	-	-

	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan daerah (desa)	4	6	4		150	4	-	-
	2	09	05			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Pengujian Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)								
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terujinya komoditi pangan segar asal tumbuhan (komoditi)	6	8	60	75	125	70	-	100

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan hanya memiliki 2 (dua) IKU, yaitu :

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPh) Konsumsi	81,5	84,6	103.8
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPh) Ketersediaan	95	85,94	90,5

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk telah menjadi salah satu tujuan utama Pembangunan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Situasi konsumsi Masyarakat dinyatakan dalam Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan semakin baik kualitas konsumsi pangan Masyarakat maka Skor PPH semakin mendekati ideal (100). Skor PPH juga menjadi salah satu indikator pembangunan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 pada program prioritas peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.

Selain itu Perhitungan PPH menjadi parameter strategis untuk menilai capaian Pembangunan pangan di sisi hilir sesuai dengan pemenuhan gizi dan di sisi hulu sebagai perencanaan pangan yaitu aspek penyediaan dan aspek produksi pangan.

Data konsumsi pangan tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui perhitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam laporan/table ini, AKG yang digunakan merupakan asupan rata-rata sehari yang

dikonsumsi oleh populasi dan bukan merupakan kecukupan gizi perorangan/individu. Di Indonesia, AKG dirumuskan dalam forum Widyakarya Nasioanl Pangan dan Gizi (WNPG) yang telah diselenggarakan sejak tahun 1978. Analisis konsumsi pangan level kabupaten berdasarkan data Susenas 2023 menggunakan Angka Kecukupan Energi anjuran sebesar 2100 kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram (berdasrkan AKG hasil WNPG Tahun 2018; Permenkes 28/2019).

Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (kilogram/kap/tahun), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari), dan konsumsi protein penduduk (gram protein/kap/hari). Dimana salah satu indicator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH), PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup : (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Berdasarkan table skor PPH di atas dapat dilihat bahwa Skor PPH Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 84,6, dapat diketahui besaran konsumsi energi sebesar 3.324 kkal/kapita/hari atau 158, 3 % terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kapita/hari.

Adapun rincian skor PPH antara lain padi-padian mencapai persentase sebesar 25,0 persen dari target Angka Kecukupan Gizi (AKG) ideal di 50 persen, lalu umbi-umbian 0,8 persen dari AKG ideal 6 persen, dan pangan hewani 16,5 persen dari AKG ideal 12 persen. Selanjutnya minyak dan lemak 5,0 persen dari AKG ideal 10 persen, buah/biji berminyak 1,0persen dari AKG ideal 3 persen, kacang-kacangan 5,4 persen dari AKG ideal 5 persen, gula 0,9 persen dari AKG ideal 5 persen, sayur dan buah 30 persen dari AKG ideal 6 persen, dan lain-lain seperti minuman dan bumbu 0 persen dari AKG ideal 3 persen.

Berdasarkan capaian skor PPH dan persentase angka tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang. Namun

demikian tentunya ada jenis konsumsi yang perlu kita tingkatkan dan diturunkan angka persentasenya. Dengan capaian skor PPH 2023 tersebut, diyakini dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk menangani berbagai permasalahan pangan, seperti pengentasan daerah rawan pangan dan gizi serta penurunan angka stunting di Indonesia.

Skor pola pangan harapan ketersediaanyang maksimal adalah 100 yang terdiri dari kelompok pangan meliputi Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah. Melalui pengolahan data produksi kelompok pangan tersebut yang datanya di peroleh dari dinas terkait yaitu dinas pertanian, dinas perikanan dan dari buku tapanuli selatan dalam angka tahun 2022 untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan, Adapun rincian hasil skor PPH Ketersedian adalah sebagi berikut:

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1.	Padi-padian	2.486	103,6	0,5	51,79	25,00	25,0
2.	Umbi-umbian	63	2,6	0,5	1,32	1,32	2,5
3.	Pangan Hewani	19.650	818,7	2,0	1.637,47	24,00	24,0
4.	Minyak dan Lemak	1.237	51,5	0,5	25,77	5,00	5,0
5.	Buah/biji berminyak	3	0,1	0,5	0,06	0,06	1,0
6.	Kacang-kacangan	7	0,3	2,0	0,56	0,56	10,0
7.	Gula	-	-	0,5	-	-	2,5
8.	Sayuran dan buah	1.466	61,1	5,0	305,38	30,00	30,0
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	24.911	1.038,0		2.022,35	**85,94**	100,0

Dari hasil pengolah neraca bahan makanan untuk masing masing nilai kelompok pangan dari skor pph adalah sebagai berikut:

1. Padi- padian memeperoleh nilai maksimal yaitu 25, hasil maksimal ini dikarenakan Kabupaten Tapanuli selatan untuk tahun 2023 surplus beras
2. umbi-umbian memperoleh nilai 1,32 dari nilai maksimal 2,5, hal ini disebabkan di kabupaten tapanuli selatan masih rendah memproduksi umbi-umbian di karenakan minat petani yang kurang dalam Bertani umbi-umbian hal ini idsebabkan juga masyarakat tapanuli selatan masih mendominasi mengkonsumsi beras dibandingkan umbi-umbian
3. Pangan Hewani memperoleh nilai maksimal 24, hasil maksimal ini dikarenakan banyak di Tapanuli selatan yang berternak ayam dan juga

ruminansia kecil dan besar sehingga kebutuhan pangan hewani masyarakat dapat dipenuhi oleh kabupaten tapanuli selatan

4. minyak dan lemak memperoleh nilai maksimal 5, hasil maksimal ini dikarenakan untuk kabupaten tapanuli selatan banyak memiliki perkebunan sawit dan tanman lain penghasil minya dan lemak
5. buah/biji berminyak memperoleh nilai 0,6 dari nilai maksimal 1, hasil ini disebabkan tidak banyak masyarakat atau petani yang berminat menanam tanaman yang berminyak dikarenakan tanaman tahunan yang lama menghasilkan
6. Kacang kacangan memperoleh nilai 0,56 dari nilai maksimal 10, hal ini sebabkan sedikit nya petani di tapanuli selatan yang berminta menanam kacang kacangan dikarenaan harga jua tidak menarik bagi petani dan masyarakat tapanuli selatan tidak banyak yang mengkonsumsi kacang kcangan.
7. gula memperoleh nila 0 dari 2,5, hasil ini dikarenakan di tapanuli selatan tidak ada perkebunan penghasil gula dan perusahaan yang memproduksi gula, jadi pasokan gula di tapanauli selatan murni berasal dari luar kabupaten tapanuli selatan.
8. sayuran dan buah memiliki nilai maksimal 30, nilai maksimal ini dikarenakan masyarakat banyak yang memanfaatkan lahan perkarangan untuk menanm sayur sayuran untuk kebutuhan rumah sendir dan banyak petani yang berkebun sayur sayuran dan buah karena cepat berproduksi.

Skor PPH ketersediaan menggambarkan beragamnya ketersediaan kelompok pangan di suatu Kabupaten. Semakin tinggi nilai PPH Ketersediaan semain beragamnya kelompok pangan yang tersedia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan skor PPH Ketersediaan terutama di kelomok pangan yang nilainya belum maksimal antara laian umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama dinas pertanian untuk lebih meningkatkan produksinya dengan memeberikan sosialisasi dan bantuan bibit agar petani tinggi mintanya bertanaam kelompok pangan tersebut. Dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri pun melakukan sosialsasi dan demo masak kepada masyarakat agar dapat mengolah umbi umbian menjadi bahan pangan yang di

konsumsi selain beras dengan menyebarkan slogan kenyang itu tidak harus nasi disetiap kegiatan dan pertemuan dengan masyarakat.

Dari Neraca Bahan Makan juga diperoleh Ketersediaan Energi Tahun 2023 adalah sebesar 2.486 kalori/kapita/hari lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu 2.455 kalori/kapita/hari dan juga lebih tinggi dari rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 sebesar 2.400 Kalori/kapita/hari.

Sementara untuk ketersediaan protein (nabati dan hewani) sebesar 56,93 gram/kapita/hari lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 56,38 gram/kapita/hari namun masih lebih rendah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 sebesar 2.400 Kalori/kapita/hari dan 63 gram protein/kapita/hari. Rendahnya Ketersediaan protein dibandinga rekomendai WNPG dikarenakan ketersediaan protein kabupaten tapanuli selatan masih didominasi dari protein hewani, untuk protein nabati lebih sedikit karena produksi kacang kacangan di tapanuli selatan masih dalam jumlah yang sedikit karena minta petani yang masih kurang menanam kacang-kacangan.

Selain IKU diatas ada IKU yang harus dicapai pada Program/Kegiatan yang harus dicapai yaitu :

1. Persentase Cadangan Pangan

Capaian Persentase Cadangan Pangan dalam realisasinya terdiri dari dua kegiatan yaitu, pengadaan cadangan beras pemerintah melalui bulog dan pengadaan gabah untuk cadangan pangan masyarakat yang di simpan di 4 kelompok tani lumbung pangan masyarakat.

Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di BULOG

Capaian pengadaan CBP melalui bulog untuk tahun 2023 adalah 0% atau sangat rendah hal ini disebabkan pada awal tahun anggaran 2023 sudah dilakukan komunikasi dengan bulog untuk pengadaan beras bulog untuk CBP sebanyak 4 ton, namun pihak bulog belum bisa melakukan mou, dikarenakan belum keluarnya harga beras CBP tahun 2023 yg baru. Pada saat harga baru keluar ternyata ada kenaikan harga sebesar Rp. 2, dimana harga tahun 2022 sebesar Rp. 10.859/kg naik menjadi Rp. 11.002/Kg, sementara anggaran yang ada di DPA Dinas Ketahanan Pangan Daerah KAb. TApanuli Selatan sebesar

Rp. 11.000/kg. Hal ini menyebabkan kami harus melakukan PABD untuk menyesuaikan harga menjadi Rp. 11.002/Kg, agar dapat merealisasikan pengadaan beras untukk CPPD dengan BULOG.

Namun saat anggaran PAPBD telah di sahkan di bulan Oktober 2023 dan kami telah melakukan proses permohonan pengadaan beras CPPD denagn BULOG dan MOU sedang dikerjakan oleh BULOG keluar Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 381/HK.02.05/K/11/2023 tentang Penetapan Harga PEmbelian Beras untuk Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023 sebesar Rp. 11.498/Kg dan Surat dari Perum BULOG Kantor Pusat Nomor F-6365/DP101/LR.02/07122023 tanggal 07 Desember 2023 perihal Harga Penjualan CBP kepada K/L/D/I yang sebelumnya Rp. 11.002/kg menjadi Rp. 11.498/Kg dan keputusan ini berlaku surut mulai September 2023.

Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan realisasi pengadaan CBP dikarenakan anggaran PAPBD yang kami susun sebesar 11.002/kg kurang dari harga terbaru sebesar Rp. 11.498/Kg. Dikarena situasi ini Capaian kinerja untuk Persentase Cadangan Pemerintah untuk tahun 2023 adalah 0 atau SANGAT Rendah.

Namun itu tidak mengartikan tidak adanya sama sekali CBP Kab. Tapanuli Selatan dikarenakan mulai tahun 2021 kami telah menyediaan CBP sebanyak 3 Ton dan tahun 2022 menyediakan CBP sebanyak 6 Ton yang semuanya di simpan di Gudang BULOG dengan Beritas Acara Pentipan Beras di Gudang BULOG. Dan pada desember 2021 telah di salurkan CBP sebanyak 1 Ton untuk desa yang mngalami banjir badang di Kecamatan Angkola Sangkunur, sehingga Kondisi ketersediaan CBP Kabupaten Tapanuli Selatan posisi Tahun 2023 adalah sebanyak 8 Ton.

Pengadaan Gabah untuk Cadangan Pangan Masyarakat

Pada tahun 2023 penyaluran gabah untuk cadangan pangan masyarakat sebanyak 20 ton di berikan kepada 4 Kelompok Tani Lumbung Pangan antara lian Kelompok Tani Satahi di Desa Pargumbangan, Kec. Angkola Muaratais, Kelompok Tani Torsimitcak Desa Aek Gunung, Kec. Batang Angkola, Kelompok Tani Hijau Daun di Kec. Arse dan Kelompok Tani…. di Kecamatan Tantom Angkola masing masing kelompok diberikan 5 ton gabah, dengan persyaratan dapat di olah oleh Kelompok untuk menjadi beras untuk menambah pendapat

anggota kelompok namun siap sedia mencadangkan dalam bentuk beras untuk mengantsipisasi terjadinya bencana alam, keadaan darurat dan lain lain.. Penyaluran gabah ke kelompok tani Lumbung Pangan untuk tahun 2023 lebih besar di bandingkan tahun sebelumnya yang hanya 10 ton, ini dalam upaya menyediakan cadangan pangan masyarakat dalam mengantsiipasi terjadinya bencana alam, bencana soisal, keadaan darurat,dan kenaikan harga, beras di atas 100%.

2. Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan

Capaian kinerja untuk penangan desa rawan pangan tahun 2023 sebesar`107,8 % dari target RPJMD sebesar 18.18 %. Perlu diketahui penetapaan target RPJMD untuk penanganan desa rawan pangan adalah berdasarkan dari jumlah desa rawan pangan pada tahun penyusunan rpjmd yaitu sebanyak 50 desa berdasarkan Buku FSVA tahun 2021 yang perdana disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kab. Tapanuli Selatan. Dimana di tagetkan setiap tahunnya selama 5 tahun dilakukan penangan desa rawan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kab. Tapanuli Selatan sebanyak 9 desa /tahun dengan rumus persentase penangan desa rawan pangan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penanagan Desa Rawan Pangan} = \frac{\text{Jumlah Desa Rawan pangan yang ditangani Dinas Ketahanan Pangan}}{\text{Jumlah Desa Rawan Pangan}}$$

Namun dalam penyusunan desa rawan pangan tahun 2022 jumlah desa rawan pangan sebanyak 20 desa dan tahun 2023 sebanyak 21 desa dengan desa rawan pangan yang berubah ubah setiap tahunnya /tidak tetap setiap tahun tergantung dari data sekunder yang diberikan oleh dinas pertanian, dinas Kesehatan, dinas PU dan PR, BPS, Dinas Sosial.

Hal ini menyebabkan pengaruh terhadap nilai persentase penanganan desa rawan pangan dikarenakan jumlah desa rawan pangan berubah ubah setiap tahunnya setelah dilakukan pengolah data.

Sehingga pencapaian kinerja pertahun tidak bisa dibandingkan dengan target rpjmd yang setiap tahunnya adalah 18,18%. Sehingga kedepannya perlu ada perbaikan terkait penangan desa rawan pangan dari persentase penanganan desa rawan pangan menjadi jumlah desa rawan pangan yang di tangani oleh dinas ketahanan pangan.

Karena dalam penangan desa rawan pangan ini merupakan pekerjaan lintas sectoral antara lain:

1. Dinas pertanian dalam menangani desa yang mengalami rawan pangan dikarenakan rendahnya Luas baku lahan sawah dibandingkan dengan luas wilayah desa tersebut;
2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam menangani rendahnya Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di desa tersebut;
3. Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dalam menangani Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan dengan jumlah penduduk desa tersebut dengan memberikan bantuan baik berasa, bibit sayuran, ternak kecil dan ikan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat di desa tersebut;
4. Dinas PU dan PR dalam menangani akses Peghubung yang memadai di desa
5. Dinas Perkim , Dinas PU dan PR dalam menangani Jumlah rumah tangga Desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di desa tersebut
6. Dinas Kesehatan dalam meningkatkan Jumlah tenaga Kesehatan untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang lebih baik kepada masyakat desa rawan pangan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

f. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan

g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai Tujuan tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu " Terwujudnya Perekonomian Tapanuli Selatan" dengan sasaran "Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi Petani untuk meningkatkan Produktifitas Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat" dan untuk mewujudkan tersebut Dinas Ketahanan Pangan melakukan Strategi yaitu " Meningkatnya Ketahanan Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan dengan memperhatikan pola distribusi dan keterjangkauan bahan pangan Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pemasaran produk sektor sektor perekonomian daerah". Dengan menggunakan arah kebijakan :

1. Memfasilitasi dan Mendorong semua lapisan masyarakat tani penggunaan teknologi tepat guna.
2. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Produktif".

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2023

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Skor PPH Konsumsi (skor)			79,00	81,00	81,50	82,00	83,00	84,00	81,3	84,6	82	83	
3	Skor PPH Ketersediaan (skor)			72,80	72,82	95,00	95,05	95,10	95,15	94,93	85,94	95,05	95,10	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi factor internal dan factor eksternal. Kondisi sumber daya manusi, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembagunan dan perubahan lingkungan strategis di Tapanuli Selatan. Sumber daya yang ada dan tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan Dinas yang ditetapkan.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness) :

a. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai.
b. Adanya Peraturan Daerah No. 121 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.

Kelemahan (Weakness) :

a. Sumber Daya dan Kompetensi Aparatur di Dinas masih kurang
b. Struktur organisasi belum optimal
c. Koordinasi dengan OPD belum Optimal
d. Profesionalisme SDM Aparatur belum optimal

Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity)

a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja di Dinas
b. Tersedianya pejabat struktural tentang perencanaan pada setiap OPD
c. Lembaga penyelenggara diklat teknis dan fungsional perencanaan cukup memadai

Tantangan (Threat)

a. Belum tersedianya cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
b. Belum Tersedianya Peta Rawan Pangan dan masih ada desa rawan pangan
c. Belum adanya regulasi kedaulatan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
d. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai Skor Pola Pangan Harapan yang Ideal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dan mempertimbangkan asas kepatutan, serta ada beberapa target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	**3,686,671,476**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	**3,512,227,752**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	54,365,238	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	54,366,238	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	2,516,273,903	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	2,316,029,678	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	65,200,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	69,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan,	100	307,964,050	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan,	100	347,679,850	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)					Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)			
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	631,224,675	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	520,117,286	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan	100	111,622,710	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan	100	105,034,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kemasyarakatan (%)					Kemasyarakatan (%)			
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVESIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		Skor PPH Konsumsi	83	1,064,922,500	**PROGRAM PENINGKATAN DIVESIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		Skor PPH Konsumsi	83	1,734,446,400	
			Skor PPH Ketersediaan	95,10				Skor PPH Ketersediaan	95,10		
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	18,18	329,169,000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	18,18	334,374,301	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Pengajuan Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	60	54,065,825	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Pengajuan Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan		54,065,825	
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				54,065,825	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				54,065,825	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2	09	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (dokumen)	6	6	6	6	6	6	6	6
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	4	4	4	4	4	4	4	4
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Bagi ASN (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	09	01	2.08		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	09	03			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPH Konsumsi (Skor)	84	81,3	81,5	84,6	103,8	82	82	100
							Skor PPH Ketersediaan (Skor)	95,15	94,93	95	85,95	90,5	95,05	95,05	100
	2	09	04			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan (%)**								

	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terselenggaranya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) (dokumen)	1	1	1		100	1	1	-
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan daerah (desa)	4	6	4		150	4	4	-
	2	09	05			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Pengujian Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)								
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terujinya komoditi pangan segar asal tumbuhan (komoditi)	6	8	60	75	125	70	70	100

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pembangunan Jangka Menengah Tahap – IV (keempat) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025, yakni : Tapanuli Selatan Yang Maju, Adil Berlandaskan Agama dan Adat Budaya.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;

5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transmisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Nilai Tukar Nelayan
5. Ratio Gini
6. Indeks pembangunan manusia
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus pada untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pada Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dengan Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah khususnya pada Indikator Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B ke Atas SAKIP.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan.
2. Tertanganinya Desa Rawan Pangan

Tabel. 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi		Target	
				2022	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor)	81,3	84,6	81,5	82
			Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Skor)	94,93	85,94	95	95,05
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Cadangan Pangan (%)	6,76	0	40	60
		Tertanganinya Desa Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan Yang Tertangani (Desa)	6	10	6	6

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Dinas Ketahanan Pangan Daearah Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Ke-2 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni Meningkatkan Perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indicator kinerja sasaran pada meningkatnya ketersediaan pangan dan

Tertanganinya Desa Rawan Pangan masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke 2 Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 4 (empat) program 12 (dua belas) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1

Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

			dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
			Pemantauan Stok Pangan
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat

			Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

3.3.3. Penjelasan Rumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD.

Dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Daerah tidak sesuai denga napa yang tertuang pada RKPD Tahun 2024 hal ini dikarenakan pendanaan tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

1. Pencapaian IKU Dinas Ketahanan Pangan
2. Mengurangi Desa Rawan Pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Terkendalinya Harga Dipasaran dengan Kegiatan Gerakan Pasar Murah
4. Pembinaan Desa Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH TAPANULI SELATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
2	**09**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**5.635.114,278**		**7.275.255,656**
2	**09**	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100.00	100.00	3.512.227,752	100.00	4.446,846,596
2	**09**	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	skor	82	83	1.734.446.400	84	2.318.616.793
					Skor PPH Ketersediaan	skor	95,05	95,10		95,15	
2	**09**	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan	%	18,18	18,18	334.374.301	18,18	434.695.767

				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	2025		2026	
								TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengujian Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	%		70	54.065.825,00	70	75.094.500
Total									**5.635.114.278**		**7.275.255.656**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Sipirok, 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

EFRIDA YANTI PAKPAHAN. STP.MM
NIP. 197603192009042001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I

Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan - Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II		III		IV									
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2				Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			4,922,550,378		4,850,411,723		4,364,933,787		709,104,455							100	709,104,455	100	16.25	1	5,559,516,178	1	113	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
2	09			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			3,764,825,518		4,850,411,723		4,364,933,787		709,104,455							100	709,104,455		16.25		5,559,516,178		147.67	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100.00	3,046,075,789	100.00	3,546,091,823	100.00	4,364,933,787	18.12	476,706,901							18.12	476,706,901	18.12	10.92	118.12	4,022,798,724		132	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (%)	100.00	54,366,238	100.00	38,407,900	100.00	50,573,150	1	0	1.00						13.00	-	13		113.00	38,407,900	113.00	71	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (dokumen)	6	48,122,500	6	38,407,900	0	54,366,238	1	0	4						14	709,104,455.00	0	8.28	20	747,512,355	333.33	112.94	
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	4		4		0		0		2						0		0		4		100.00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100.00	1,886,854,325	100.00	1,843,057,204	100.00	1,883,731,388	33.33	332,805,291							133.33	332,805,291	133.33	100.00	233.33	2,175,862,495	233.33	115	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	16	1,770,865,025	14	1,729,472,904	14	1,883,731,388	3	332,805,291	6						31	332,805,291	221.43	14.00	45	2,062,278,195	321.43	116	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Kegiatan Promosi Pembangunan Daerah (event)	3	115,985,500	3	113,584,300	3	132,138,300	1	0	1						4	-	133.33	119.74	3	113,584,300	100.00	98	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II		III		IV									
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Pendidikan danPelatihan Pegawai Berdasrkan Tugas dan Fungsinya**	**7**	**36,000,000**	**75**	**75,911,900**	**35**	**36,000,000**	**0**	**0**							**33**	**-**	**94.2857**	**1155000000**	**108**	**75,911,900**	**308.57**	**211**	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		7	23,800,000	75	75,911,900	7	36,000,000	0	0	33						33	-	94.2857	1155000000	108	75,911,900	308.57	**319**	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100.00**	**386,175,855**	**100.00**	**486,192,836**	**100.00**	**347,659,350**	**8.27**	**23,316,200**							**14.27**	**23,316,200**	**14.27**	**14.41**	**114.27**	**509,509,036**	**114.27**	**132**	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (bulan)	12	7,680,100	12	3,240,900	12	7,722,400	0	0	6						27	-	225	174.0078614	12	3,240,900	100.00	**42**	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	12	96,203,655	19	47,945,000	12	37,502,400	0	0	-						0	-	0	2320.798355	19	47,945,000	633.33	**50**	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan alat-alat rumah tangga dan kebersihan kantor (bulan)	12	12,459,000	12	18,733,300	12	20,868,300	3	0	6						30	-	250.00	191.97	12	18,733,300	100.00	**150**	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum rapat yang diadakan selama 1 Tahun (kotak)	455		685		445		0		29						514		115.506		1,199		263.52		
					Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas (bulan)	12	42,086,900	12	48,873,500	12	41,413,700	3	0	6						24	709,104,455	200.00	712.67	12	757,977,955	100.00	112.94	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (bulan)	12	14,166,200	12	9,985,000	12	27,482,550	3	0	6						21	-	175.00	493.22	12	9,985,000	100.00	**70**	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran biaya langganan media cetak (media)	12	16,800,000	19	16,800,000	23	16,800,000	0		6						6	-	26.087	152.5	19	16,800,000	158.33	**100**	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah (OH)	90		115		275		0		46						512		186.182		627		696.67		
					Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah (OH)	320	196,780,000	694	340,615,136	100	195,870,000	83	23,316,200	178						641	23,316,200	641.00	3,491.35	1,335	363,931,336	417	70.48	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II		III		IV										
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100.00**	**608,843,809**	**100.00**	**514,578,503**	**100.00**	**620,117,286**	**27.35**	**83,931,892**							**27.35**	83,931,892	**27.35**	-	**127.35**	**598,510,395**	**127.35**	**98**	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun (surat)	0	0	1,120	-	440		0		4						4		0.90909	162.6238593	1,124		0	0	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Air dan Jasa Komunikasi (bulan)	12	29,883,380	12	26,708,919	12	44,429,862	3	7,571,472.00	6						30	7,571,472	250.00	258.75	12	34,280,391	100.00	**115**	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran, Keuangan dan THL Kantor (orang)	21	578,960,420	21	487,869,584	21	575,687,424	21	76,360,420	5						16	76,360,420	76.19	-	21	564,230,004	100.00	**97**	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100.00**	**92,279,300**	**100.00**	**99,543,480**	**100.00**	**105,034,700**	**23.08**	**36,653,518**							**86.08**	**36,653,518**	**86.08**	**3,565.57**	**186.08**	**136,196,998**	**186.08**	**148**	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak dan Perpanjangan STNK Kenderaan Dinas Roda 2 (unit)	7		7		7		1		1						16		228.57		3		42.86		
					Pembayaran Pajak dan Perpanjangan STNK Kenderaan Dinas Roda 4 (unit)	4	92,279,300	3	99,543,480	4	105,034,700	0	38,653,518.00	2						10	38,653,518	250	3,654.67	7	3,024,548,860	175.00	70.48	
					Pemenuhan Service dan BBM Kenderaan Dinas/Operasional Roda 4 (unit)	2		3		2		2		1						2		100.00		3		150.00		
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Service Personal Komputer/Laptop dan Printer					3	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Skor PPH Keterrsediaan**	**95.00**				**72.80**	**817,446,400**		**95,412,554**								**95,412,554**							
					Skor PPH Konsumsi	**81,5**				**79**																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Tersedianya Data Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (%)**	**100.00**	**36,243,657**	**100.00**	**316,823,700**	**100.00**	**457,504,200**	**18.02**	**19,222,554**							**22.02**	**19,222,554**	**22.02**	**344.17**	**122.02**	**336,046,254**	**122.02**	**927**	
		Pemantauan Stok Pangan	Tersedianya Laporan Informasi Harga Pangan (dokumen)	1	36,243,657	1	121,061,900	1	64,603,700	0		1						3	-	300	161.18	1	121,061,900	100	70.48	
			Tersedianya Laporan Neraca Bahan Makanan (dokumen)	1		1		1		0								1		100		1		100		
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal (orang)	0	-	750	140,865,600	200	183,154,700	0	900,000.00	1						2	900,000.00	1	13239.32564	752	141,765,600	0	0	
		Sabilitasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Tetpantaunyan Laporan Harga Pangan Ditingkat Produsen Dan Konsumen di Kabupaten (Laporan)	0	-	1	54,896,200	1	133,768,800	0	10,000,000.00	1						1	10,000,000	100	301.8322108	2	64,896,200	0	0	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Wilayah Kabupaten /Kota	Terdianya Informasi Harga Pangan Ditingkat Porodusen Dan Konsumen Di Aplikasi Siharpa	1	-	1	-	1	75,977,000	0	8,322,554							0	8,322,554	0	0	1	-	0	0	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) (Ton)**	**3**	**36,243,657**	**3**	**121,989,100**	**3**	**131,086,200**	**0**	**71,940,000.00**							**0**	71,940,000	**0**	**172.4281455**	**3**	**193,929,100**	**100.00**	**535**	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat (ton)		36,243,657		121,989,100	5	131,086,200	0	71,940,000	1						0	71,940,000	0	737.9189969	0	193,929,100		70.48	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II		III		IV									
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (ton)	3		3		3.2		0								1		31.25		4		133		
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Terlaksananya Pencapaian Terget Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**100.00**	**36,243,658**	**100.00**	**643,040,900**	**100.00**	**228,856,000**	**0**	**4,250,000.00**							**0**	**4,250,000**	**0**	**1,298.95**	**100.00**	**647,290,900**	**100.00**	**1,786**	
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya dokumen konsumsi pangan per kapita per tahun (dokumen)	0	0	1	34,960,900	1	61,323,700	0	0	1						1		100	361.18	2	34,960,900	0	0	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah desa yang dibantu dan dibina untuk pemanfaatan lahan pekarangan (desa)	1	36,243,658	24	608,080,000	5	167,532,300	0	4,250,000.00	1						9	4,250,000	180	1,682.27	33	612,330,000	3,300.00	**1,689**	
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan**	**18.18**	**1,039,972,400**		**181,923,600**	**18.18**	**314,374,300**												**427.38**		**181,923,600**		**86.74**	
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Terselenggaranya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) (dokumen)**	**1**	**676,177,976**	**1**	**52,467,200**	**1**	**63,134,900**	**0**	**136,985,000.00**							**1**	**136,985,000.00**	**100**	**0**	**2**	**189,452,200**	**200**	**28**	
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Dokumen FSVA (dokumen)	1	676,177,976	1	52,467,200	1	63,134,900	0	0	1						1		100	0	2	52,467,200	200	**8**	
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan daerah (desa)**	**6**	**363,794,424**	**4**	**129,456,400**	**2**	**251,239,400**	**0**	**136,985,000.00**							**0**	**136,985,000**	**0**	**346.35**	**4**	**266,441,400**	**83.33**	**73**	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I		II		III		IV										
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani (desa)	6	363,794,424	4	129,456,400	6	251,239,400	0	136,985,000	1						1	136,985,000	16.6667	410.99	5	266,441,400	83.33	**73**	
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Pengujian Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)**	**80**	**55,223,513**		**43,087,100**	**60**	**54,065,825**	**0**	**0**							**0**		**0**	**133.8019762**	**0**	**43,087,100**	**0**	**78**	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Terujinya komoditi pangan segar asal tumbuhan (komoditi)**	**6**	**55,223,513**	**6**	**43,087,100**	**9**	**54,065,825**	**0**	**0**	**1**						**12**		**133.333**	**133.8019762**	**18**	**43,087,100**	**300**	**78**	
				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terujinya komoditi pangan segar asal tumbuhan (komoditi)	6	55,223,513	6	43,087,100		54,065,825	0	0							0	0	0	0	6	43,087,100	100	78.02	
				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersertifikasinya komoditi pangan segar asal tumbuhan (komoditi)	1	55,223,513	0	0	9	0	0		1						10				10				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						**123.93**	**10,551.68**					
Predikat kinerja																						**SR**	**SR**					

Disusun

Sipirok, April 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

EFRIDA YANTI PAKPAHAN, STP, MM

NIP.197603192009042001

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Tapanuli Selatan

Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.09.5.02.0.00.03.0000 Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 2.09.5.02.0.00.03.0000 Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Ketahanan Pangan Daerah								5.635.114.278,00					7.275.255.656,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.635.114.278,00					7.275.255.656,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								5.635.114.278,00					7.275.255.656,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.512.227.752,00					4.446.848.596,00
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								54.366.238,00					64.493.688,00
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Laporan	-	54.366.238,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Laporan Ca	10 Laporan	64.493.688,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.316.029.678,00					3.076.954.046,00
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	16 Orang/bulan	-	2.183.891.378,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Orang yang	16 Orang/bulan	2.926.414.446,00
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	132.138.300,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Dokumen H	3 Dokumen	150.539.600,00
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								69.000.000,00					87.970.000,00
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	33.000.000,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Paket Paka	1 Paket	44.220.000,00
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Orang	-	36.000.000,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Pegawai Be	7 Orang	43.750.000,00
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								347.679.850,00					384.932.250,00
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	7.722.400,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Paket Kom	1 Paket	9.572.125,00
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	37.502.400,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Paket Pera	1 Paket	22.500.000,00
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	20.888.800,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Paket Pera	1 Paket	18.110.375,00
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	41.413.700,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Paket Baha	1 Paket	41.413.700,00
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	27.482.550,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Paket Bara	1 Paket	27.482.550,00
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	23 Dokumen	-	16.800.000,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Dokumen I	23 Dokumen	21.000.000,00
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	420 Laporan	-	195.870.000,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Laporan Pe	420 Laporan	244.853.500,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								620.117.286,00					727.463.912,00
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	44.429.862,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Laporan Pe	2 Laporan	44.429.862,00
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	17 Laporan	-	575.687.424,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Laporan Pe	17 Laporan	683.034.050,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								105.034.700,00					105.034.700,00
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	13 Unit	-	105.034.700,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Kendaraan	13 Unit	105.034.700,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								1.734.446.400,00					2.318.616.793,00
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								874.504.200,00					1.171.835.628,00
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
						-	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	283.154.700,00	Dana Transfer Umum-Da		Pangan Berbasis Su	1 Laporan	379.427.298,00
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota													
						-	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 laporan	-	250.768.800,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah kegiatan St	15 laporan	336.030.192,00
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan													
						-	Informasi Stok Pangan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	164.603.700,00	Dana Transfer Umum-Da		Informasi Stok Pan	2 Dokumen	220.568.958,00
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota													

						-	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	175.977.000,00						235.809.180,00
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								331.086.200,00						443.655.508,00
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
						-	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10,6 Ton	-	331.086.200,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Cadangan	10,6 Ton		443.655.508,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								528.856.000,00						703.125.657,00
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
						-	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	61.323.700,00	Dana Transfer Umum-Da		Target Konsumsi P	1 Dokumen		76.632.375,00
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
						-	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	467.532.300,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Pemberday	1 Laporan		626.493.282,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								334.374.301,00						434.695.767,00
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								83.134.901,00						111.400.767,00
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
						-	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	83.134.901,00	Dana Transfer Umum-Da		Peta dan Analisis K	1 Dokumen		111.400.767,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								251.239.400,00						323.295.000,00
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						-	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	251.239.400,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah Pengadaan	1 Dokumen		323.295.000,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								54.065.825,00						75.094.500,00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								54.065.825,00						75.094.500,00
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
						-	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	9 Dokumen	-	54.065.825,00	Dana Transfer Umum-Da		Jumlah dokumen p	9 Dokumen		75.094.500,00
												TOTAL	**5.635.114.278,00**						**7.275.255.656,00**

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

2025 RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Jl. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK 22742
kominfo.tapselkab.go.id
kominfotapsel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Berjalan. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Renja ini akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Ucapan terimakasih kepada pihak pihak terkait yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah (Diskominfo) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini dibuat, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sipirok, 9 september 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

MUHAMMAD ARIEF,ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730613 2002312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU **6**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Lalu 14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18
2.3.1 Kekuatan dan Kelemahan 18
2.3.1.1 Kekuatan (Strengthness) 18
2.3.1.2 Kelemahan (Weakness) 18
2.3.2 Peluang dan Tantangan 19
2.3.2.1 Peluang (Opportunity) 19
2.3.2.2 Tantangan (Threat) 19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20
2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegoatan Masyarakat. 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **31**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 31
3.2.1 Tujuan 32
3.2.2 Sasaran 32
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 33
3.2.1 Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan 33
3.2.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **38**

BAB V PENUTUP **46**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2024, dan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun 2006 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 328, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penentapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);

21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1041);
22. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 1261);
23. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 1202);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah :

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan

Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun beijalan (tahun n-1 = Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kineija tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi anggaran Belanja untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 8.131.219.554,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 5.506.622.554,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.624.597.000,- Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, realisasi Belanja adalah sebesar Rp.7.337.537.892,- atau sebesar 90,24 % dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 4.877.520.862,- atau 88,58% Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 2.460.017.030,- atau 93.73 %.

Tabel T.C. 2.9

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Sampai Dengan 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**500,00**	**90,75**	**100,00**	**86,87**	**86,87**	**100,00**	**277,63**	**55,53**
2	**16**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**500,00**	**89,55**	**100,00**	**94,11**	**94,11**	**100,00**	**283,66**	**56,73**
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30,00	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	18,00	60,00
2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00

2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	60,00
2	**16**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**100,00**	**12,00**	**36,00**	**60,00**
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	85,00	17,00	17,00	17,00	100,00	17,00	51,00	60,00
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	15,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	60,00
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00

2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
2	**16**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**300,00**	**60,00**
2	16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Keserasian dan Keseragaman ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan	225,00	45,00	45,00	45,00	100,00	0,00	90,00	40,00
2	16	1	2.05	9	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya	35,00	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	21,00	60,00
2	**16**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**500,00**	**98,35**	**100,00**	**84,13**	**84,13**	**100,00**	**282,49**	**56,50**
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	1,00	1,00	12,00	1200,00	1,00	14,00	280,00
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00

2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	**16**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Tahun)**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**1,00**	**3,00**	**60,00**
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	**16**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Tahun)**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**1,00**	**3,00**	**60,00**
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	60,00
2	**16**	**2**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi Publik yang terpublikasikan dengan baik**	**354,02**	**95,71**	**90,00**	**85,52**	**95,02**	**90,00**	**271,23**	**76,61**
						Pertumbuhan PDRB sektor Informasi dan Komunikasi	**2,90**	**0,58**	**0,58**	**0,58**	**100,00**	**0,58**	**1,74**	**60,00**
2	**16**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**354,02**	**54,45**	**75,00**	**71,26**	**95,02**	**75,00**	**200,72**	**56,70**
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Terpenuhinya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (%)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00

2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	PPID, Lapor dan Pelayanan Publik (%)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terbentuknya Pengurus dan Anggota KIM Kecamatan se Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan)	225,00	45,00	45,00	45,00	100,00	45,00	135,00	60,00
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas (%)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	**16**	**3**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Peningkatan sistem aplikasi informatika**	**468,89**	**82,22**	**86,67**	**79,32**	**91,52**	**87.00**	**248,21**	**52,94**
						Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**446,40**	**89,08**	**89,18**	**89,18**	**100,00**	**89,58**	**267,84**	**60,00**
						Tersedianya Acuan Penyusunan SPBE	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100,00**	**300,00**	**60,00**
2	**16**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersosialisasikannya Layanan Elektronik dan Terpenuhinya Kebutuhan Pengkajian Pengembangan Sistem Informasi**	**468,89**	**80,03**	**90,00**	**89,24**	**99,15**	**90,00**	**259,26**	**55,29**
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	**16**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah**	**468,89**	**98,14**	**100,00**	**91,39**	**91,39**	**100,00**	**289,53**	**61,75**
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi (Bulan)	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	60,00

2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Laporan Kondisi Jaringan Komunikasi dan Informasi (Kecamatan)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Selatan (Nilai)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data Informasi dan Statistik Daerah yang Tersusun dengan baik (%)**	**495,00**	**84,79**	**90,00**	**75,90**	**84,33**	**90,00**	**250,69**	**50,64**
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perangkat Pembangunan Daerah (%)	**495,00**	**84,79**	**90,00**	**75,90**	**84,33**	**90,00**	**250,69**	**50,64**
2	**20**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Statistik Derah**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100**	**1,00**	**3,00**	**60,00**
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen Statistik Daerah (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100	1,00	3,00	60,00
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (%)**	**500,00**	**43,54**	**70,00**	**60,65**	**86,64**	**80,00**	**184,18**	**36,84**
2	**21**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Dokumen Persandian Daerah (Dokumen)**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100**	**1,00**	**3,00**	**60,00**

2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangakat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	5,00	1,00	1,00	1,00	100	1,00	3,00	60,00

Berdasarkan Tabel diatas evaluasi pelaksanaan kinerja pada renja dan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 menunjukkan bahwa Tingkat realisasi program kegiatan rata-rata mencapai target. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan target yang ditetapkan 90,00 % dan realisasi 90% mencapai tingkat realisasi 76,61%. Program Aplikasi Informatika target yang ditetapkan 87 % dan realisasi 97% mencapai tingkat realisasi 52,94%. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral target yang ditetapkan 90.00% dan realisasi 90% mencapai tingkat realisasi 50,64%. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi target 80,00% dan realisasi 80% mencapai tingkat realisasi 36,64%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai Tujuan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik dengan Sasaran Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik dengan Indikator Utama yaitu :

1. Indeks SPBE Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
2. Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.

Tabel T-C.30

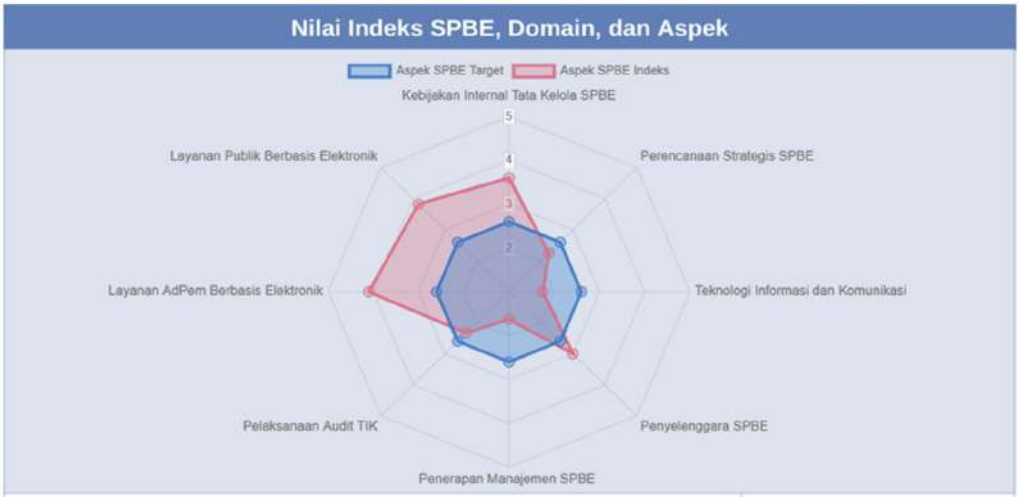
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2024

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK		Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	Indeks SPBE Kabupaten Tapanuli Selatan	Indeks		2,90	2,93	2,95	2,97	3,00	2,87	2,69	3.14	2,97	3,00	
2	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	%		68,90	70,00	75,00	80,00	85,00	57,81	59.47	65,72	57,81	85,00	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan untuk Tahun 2024 terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama dinas komunikasi dan informatika daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ; *1. Indeks SPBE Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mencapai target dengan target 2,95 terealisasi 3,14 dan di kategorikan dengan predikat "Baik". Dan pada indikator kinerja utama yang ke 2. Cakupan layanan komunikasi dan informasi publik belum mencapai target dengan target 75.00% terealisasi 62,72% .*

Dalam hal ini pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Indikator Kinerja Utama ***" Indeks SPBE Kabupaten Tapanuli Selatan"*** belum mencapai target yang telah di tetapkan. Ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi, menejemen SPBE, Audit TIK dan beberapa layanan publik berbasis elektronik.

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. TAPANULI SELATAN	3,14 (Baik)



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**3,14**
Domain Kebijakan SPBE	3,60
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*3,60*
Domain Tata Kelola SPBE	2,20
Perencanaan Strategis SPBE	*2,25*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*1,75*
Penyelenggara SPBE	*3,00*
Domain Manajemen SPBE	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	*1,63*
Audit TIK	*2,33*
Domain Layanan SPBE	3,99
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,10*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*3,83*

Laporan hasil evaluasi SPBE Tahun 2024 Pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat di manfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada instansi pusat dan pemerintah daerah dimasa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya pemerintah digital dalam rangka transformasi digital pemerintah.

Dalam hal ini berdasarkan hasil evaluasi SPBE kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan berbagai kekuatan dan kelemahan dari berbagai aspek :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
   - Kekuatan

     Pada aspek Kebijakan Internal SPBE di Kabupaten Tapanuli Selatan ada beberapa kekuatan, antara lain adalah pada: Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Aplikasi Pusat Data, dan Kebijakan Internal Audit TIK. Dimana dari kesemua ini Kebijakan Internal Audit TIK memiliki kematangan 5.

   - Kelemahan

     Pada aspek Kebijakan Internal SPBE di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ditemukan adanya kelemahan.

2. Perencanaan Strategis SPBE
   - Kekuatan

     Pada aspek perencanaan strategis di Kabupaten Tapanuli Selatan belum ditemukan adanya kekuatan

   - Kelemahan

     Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE di Kabupaten Tapanuli Selatan ditemukan adanya kelemahan, yaitu: Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
   - Kekuatan

     Pada Aspek Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Tapanuli Selatan belum ditemukan adanya kekuatan.

   - Kelemahan

     Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Tapanuli Selatan ditemukan dua kelemahan yaitu pada: Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE dan Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4. Penyelenggara SPBE
    - Kekuatan

      Pada aspek penyelenggara SPBE belum ditemukan adanya kekuatan di Kabupaten Tapanuli Selatan
    - Kelemahan

      Di sisi lain juga belum ditemukan adanya kelemahan pada aspek penyelenggara SPBE di Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Penerapan Manajemen SPBE
    - Kekuatan

      Pada aspek penerapan manajemen SPBE belum ditemukan adanya kekuatan di Kabupaten Tapanuli Selatan
    - Kelemahan

      Pada aspek penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Tapanuli Selatan, ditemukan beberapa kelemahan antara lain adalah: Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan.
6. Pelaksanaan Audit TIK
    - Kekuatan

      Pada aspek pelaksaanaan audit TIK di Kabupaten Tapanuli Selatan belum ditemukan adanya kekuatan.
    - Kelemahan

      Pada aspek pelaksaanaan audit TIK di Kabupaten Tapanuli Selatan belum ditemukan adanya kelemahan.
7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - Kekuatan

      Hampir semua indikator pada aspek pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik menjadi kekuatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikator tersebut antara lain adalah: Tingkat kematangan layanan perencanaan dan tingkat kematanganan layanan kinerja pegawai mendapatkan tingkat kematangan 5, sedangan sisanya: Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran, Tingkat Kematangan Layanan Keuangan, Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian, Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis, Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dan Tingkat Kematangan

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi mendapatkan tingkat kematangan 4.

- Kelemahan

  Pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik tidak ditemukan adanya kelemahan.

8. Layanan Publik Berbasis Elektronik
   - Kekuatan

     "Hampir semua indikator pada aspek layanan publik berbasis elektronik menjadi kekuatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikator tersebut antara lain adalah: Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1, Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2, Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3"

   - Kelemahan

     Pada aspek layanan publik berbasis elektronik tidak ditemukan adanya kelemahan.

Semua langkah ini harus diarahkan pada tujuan akhir untuk meningkatkan nilai SPBE dan mengoptimalkan pelayanan administrasi dan publik di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan kerjasama dan komitmen, perubahan positif dapat dicapai.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat dan potensi pemanfaatan secara luas telah membuka potensi dalam hal pengaksesan sistim informasi secara cepat dan akurat. Kemajuan teknologi ini telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam bentuk aplikasi sistim informasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi internal proses pemerintahan, memberikan informasi dan pelayanan kepada warganya dan urusan bisnis.

Kehadiran sistem informasi diperuntukkan dalam pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah sehingga pengembangan sistem informasi dilakukan guna mendapatkan layanan yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi.

Dalam hal ini pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli selatan dengan Indikator Kinerja Utama ***"Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik"*** dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

a. Cakupan Koneksi Internet
b. Menerapkan Sistem Aplikasi yang Terintegrasi
c. Pelaksanaan PPID

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh mediainformasi dan komunikasi publik;
2. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
3. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD;
4. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;
5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;
6. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
7. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

2.3.1 Kekuatan Dan Kelemahan

2.3.1.1 Kekuatan (Strengthness) :

a. Adanya Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
b. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya;
c. Kondisi gedung perkantoran.

2.3.1.2 Kelemahan (Weakness) :

a. Masih rendahnya kompetensi aparatur sipil negeri yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan;
b. Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan internal Pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
c. Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan;
e. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;
f. Belum terintegrasinya *database* dan layanan *e-Government* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
g. Fungsi proteksi dibidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efesien;
h. Masih kurangnya SDM dibidang Persandian dan Keamanan Informasi.

2.3.2 Peluang dan Tantangan

2.3.2.1 Peluang (Opportunity)

a. Penerapan E- Government untuk mendukung Pemerintah yang yang bersih dan tata kelola Pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya;
b. Mendorong keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik;
c. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi Publik.

2.3.2.2 Tantangan (Threat)

a. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;
b. Upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
c. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
d. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur

atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel TC-31.
Review Terhadap Perubahan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**4,103,899,996**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**4,103,899,996**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**4,044,981,496**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**4,044,981,496**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100**	**%**	**3,785,933,950**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100**	**%**	**3,785,933,950**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**83,648,300**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**83,648,300**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	26,303,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	26,303,400.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	11,004,300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	11,004,300.00	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	10,583,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	10,583,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	10,793,800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	10,793,800.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	12,677,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	12,677,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	12,286,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	12,286,800.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Tersedianya Kebutuhan Biaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**2,351,502,544**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Tersedianya Kebutuhan Biaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**2,351,502,544**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	orang /bulan	2,249,086,944	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	orang /bulan	2,249,086,944	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	Dokumen	68,070,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	Dokumen	68,070,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	8,697,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	8,697,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	25,648,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	25,648,200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**77,993,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**77,993,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	orang	77,993,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	orang	77,993,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**370,873,800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**370,873,800**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20,394,100.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20,394,100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	#REF!	1	Paket	0.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	30,004,200.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	30,004,200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	111,865,300.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	111,865,300	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	87,540,200.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	87,540,200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	Dokumen	28,800,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	Dokumen	28,800,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	92,270,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	92,270,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1**	**Tahun**	**829,496,306**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1**	**Tahun**	**829,496,306**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	6,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	6,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapanuli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	Laporan	239,875,236.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapanuli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	Laporan	239,875,236	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
		Selatan	Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Selatan	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	583,621,070.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	583,621,070	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**1**	**Tahun**	**72,420,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**1**	**Tahun**	**72,420,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	72,420,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	72,420,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasrana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	0.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasrana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	-	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Persentase Informasi Publik yang terpublikasikan dengan baik**	**90.00**	**%**	**72,762,200**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Persentase Informasi Publik yang terpublikasikan dengan baik**	**90.00**	**%**	**72,762,200**	
			Pertumbuhan PDRB sektor Informasi dan Komunikasi	**0.58**	**%**				**Pertumbuhan PDRB sektor Informasi dan Komunikasi**	**0.58**	**%**		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**71,10 %**	**%**	**72,762,200**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**71,10 %**	**%**	**72,762,200**	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Komunitas Informasi yang Efektif Mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Komunitas	1,307,400.00	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Komunitas Informasi yang Efektif Mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Komunitas	1,307,400	
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1	Permohonan	19,681,500.00	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1	Permohonan	19,681,500	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	Rekomendasi	13,160,600.00	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	Rekomendasi	13,160,600	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1	Media	38,612,700.00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1	Media	38,612,700	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	4	Orang	0.00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	4	Orang	-	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Persentase Peningkatan sistem aplikasi informatika**	**91,11**	**%**	**186,285,346**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Persentase Peningkatan sistem aplikasi informatika**	**91,11**	**%**	**186,285,346**	
			Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan	**89,78**	**%**				**Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan**	**89,78**	**%**		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
			Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						**Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**				
			Tersedianya Acuan Penyusunan SPBE	**100**	**%**				**Tersedianya Acuan Penyusunan SPBE**	**100**	**%**		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Tersosialisasikannya Layanan Elektronik dan Terpenuhinya Kebutuhan Pengkajian Pengembangan Sistem Informasi**	**100**	**%**	**12,566,500**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Tersosialisasikannya Layanan Elektronik dan Terpenuhinya Kebutuhan Pengkajian Pengembangan Sistem Informasi**	**100**	**%**	**12,566,500**	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Serta Domain Pemerintah Desa	1	Dokumen	12,566,500	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Serta Domain Pemerintah Desa	1	Dokumen	12,566,500	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**173,718,846**	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**173,718,846**	
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1	Aplikasi	107,877,146.00	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1	Aplikasi	107,877,146	
	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Tapanuli	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajeman SPBE	1	Dokumen	16,475,600.00	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Tapanuli	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajeman SPBE	1	Dokumen	16,475,600	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
		Selatan						Selatan					
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatakan Sosialisasi Program Internet Cerdas	1	Unit	49,366,100.00	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatakan Sosialisasi Program Internet Cerdas	1	Unit	49,366,100	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Kab / Kota	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung Dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1	Perangkat Daerah	-			Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung Dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1	Perangkat Daerah	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**Kab. Tapanuli Selatan**				**44,837,700**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**Kab. Tapanuli Selatan**				**44,837,700**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik**	**100**	**%**	**44,837,700**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik**	**100**	**%**		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten	**Kab. Tapanuli Selatan**	Dokumen Statistik Daerah	**100**	**%**	**44,837,700**			**Dokumen Statistik Daerah**	**100**	**%**		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Seuai Dengan Prinsip Satu data Indonesia	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi dengan Meta data	**1**	Dokumen	**44,837,700**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Seuai Dengan Prinsip Satu data Indonesia**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi dengan Meta data**	**1**	Dokumen	**44,837,700**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**Kab. Tapanuli Selatan**	-		**0.00**	**14,080,800**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**Kab. Tapanuli Selatan**	-		**0.00**	**14,080,800**	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik**	**100**	**%**	**14,080,800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik**	**100**	**%**	**14,080,800**	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Dokumen Persandian Daerah**	**1**	**Dokumen**	**14,080,800**	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya Dokumen Persandian Daerah**	**1**	**Dokumen**	**14,080,800**	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Berbasis Elektorik dan Non Elektronik	1	Laporan	14,080,800.00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Berbasis Elektorik dan Non Elektronik	1	Laporan	14,080,800	
JUMLAH						**4,103,899,996**						**4,103,899,996**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Agenda Pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tema *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"* terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan;
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Bidang Komunikasi dan Informatika mendapat tanggung jawab mendukung pencapaian target pada Pembangunan Nasional Nomor 5 dan 7 khususnya mendukung Program Prioritas Nasional Infrastruktur Perkotaan, Transformasi Digital, serta Konsolidasi Demokrasi.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu : "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 3 (tiga) arah kebijakan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk=produk yang ramah lingkungan.

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand).

3.1.1 Tujuan

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan " Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik "

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendekdari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan " Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik".

Tabel. 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	SATUAN	TARGET 2025
Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik		Indeks SPBE Kabupaten Tapanuli Selatan	Indeks	2,97
		Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	%	80,00
	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks SPBE Kabupaten Tapanuli Selatan	Indeks	2,97
		Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	%	80,00

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.2.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Ke-4 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni "*Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa*", berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke 4 Kabupaten Tapanuli Selatan;
b. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;
c. upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan

Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

d. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD;
e. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;
f. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;
g. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

3.2.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1

Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**3.785.933.950**	**Dana Alokasi Umum**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**83.648.300**	**Dana Alokasi Umum**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapanuli Selatan	26.303.400	Dana Alokasi Umum
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	11.004.300	Dana Alokasi Umum
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	10.583.000	Dana Alokasi Umum

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	10.793.800	Dana Alokasi Umum
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	12.677.000	Dana Alokasi Umum
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	12.286.800	Dana Alokasi Umum
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**2.351.502.544**	**Dana Alokasi Umum**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapanuli Selatan	2.249.086.944	Dana Alokasi Umum
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapanuli Selatan	68.070.000	Dana Alokasi Umum
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	8.697.400	Dana Alokasi Umum
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	25.648.200	Dana Alokasi Umum
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**77.993.000**	**Dana Alokasi Umum**
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapanuli Selatan	0	Dana Alokasi Umum
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapanuli Selatan	77.993.000	
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**370.873.800**	**Dana Alokasi Umum**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	20.394.100	Dana Alokasi Umum
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	0	Dana Alokasi Umum
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapanuli Selatan	30.004.200	Dana Alokasi Umum

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	111.865.300	Dana Alokasi Umum
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapanuli Selatan	87.540.200	Dana Alokasi Umum
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tapanuli Selatan	28.800.000	Dana Alokasi Umum
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	92.270.000	Dana Alokasi Umum
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**829.496.306**	**Dana Alokasi Umum**
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapanuli Selatan	6.000.000	Dana Alokasi Umum
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapanuli Selatan	239.875.236	Dana Alokasi Umum
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapanuli Selatan	583.621.070	
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**72.420.000**	**Dana Alokasi Umum**
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tapanuli Selatan	72.420.000	Dana Alokasi Umum
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**72.762.200**	**Dana Alokasi Umum**
2.1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**72.762.200**	**Dana Alokasi Umum**
2.1.1	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	1.307.400	Dana Alokasi Umum
2.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Tapanuli Selatan	19.681.500	Dana Alokasi Umum
2.1.3	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Tapanuli Selatan	13.160.600	Dana Alokasi Umum

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
2.1.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Tapanuli Selatan	38.612.700	Dana Alokasi Umum
3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**186.285.346**	**DANA BAGI HASIL (DBH)**
3.1	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**12.566.500**	**DANA BAGI HASIL (DBH)**
3.1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Tapanuli Selatan	12.566.500	DANA BAGI HASIL (DBH)
3.2	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**173.718.846**	**DANA BAGI HASIL (DBH)**
3.2.1	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Tapanuli Selatan	107.877.146	DANA BAGI HASIL (DBH)
3.2.2	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Tapanuli Selatan	16.475.600	DANA BAGI HASIL (DBH)
3.2.3	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Tapanuli Selatan	49.366.100	DANA BAGI HASIL (DBH)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**44.837.700**	**Dana Alokasi Umum**
4.1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**44.837.700**	**Dana Alokasi Umum**
4.1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Tapanuli Selatan	44.837.700	Dana Alokasi Umum
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**14.080.800**	**Dana Alokasi Umum**

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
5.1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Tapanuli Selatan**	**14.080.800**	**Dana Alokasi Umum**
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Tapanuli Selatan	14.080.800	Dana Alokasi Umum
JUMLAH			**4.103.899.996**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 128 Tahun 2021. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELARAN
TAHUN 2025 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH				**5.362.614.170,00**	**4.642.431.799,00**	**4.103.899.996,00**	**-1.258.714.174,00**			**5.443.053.275,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.362.614.170,00**	**4.642.431.799,00**	**4.103.899.996,00**	**-1.258.714.174,00**			**5.443.053.275,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**5.195.568.870,00**	**4.533.050.199,00**	**4.044.981.496,00**	**-1.150.587.374,00**			**5.273.502.296,00**	
1,	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100 %**	**100 %**	**4.655.653.624,00**	**4.141.874.253,00**	**3.785.933.950,00**	**69.834.800,00**			**4.725.488.424,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %	100 %	113.214.100,00	97.540.000,00	83.648.300,00	-29.565.800,00			114.912.310,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	33.084.100,00	30.000.000,00	26.303.400,00	-6.780.700,00	DANA ALOKASI		33.580.361,00	DINAS KOMUNIKASI DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Perangkat Daerah							UMUM (DAU)			INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.681.300,00	12.510.000,00	11.004.300,00	-3.677.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14.901.519,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.972.400,00	12.530.000,00	10.583.000,00	-5.389.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16.211.986,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.393.200,00	12.500.000,00	10.793.800,00	-4.599.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.624.098,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16.879.400,00	15.000.000,00	12.677.000,00	-4.202.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17.132.591,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	17.203.700,00	15.000.000,00	12.286.800,00	-4.916.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17.461.755,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Biaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12 Bulan	12 Bulan	1.994.611.670,00	2.415.269.347,00	2.351.502.544,00	356.890.874,00			2.024.530.844,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.796.645.270,00	2.290.245.347,00	2.249.086.944,00	452.441.674,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		1.823.594.949,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	143.585.000,00	84.974.000,00	68.070.000,00	-75.515.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		145.738.775,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.456.100,00	10.000.000,00	8.697.400,00	-2.758.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11.627.941,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	42.925.300,00	30.050.000,00	25.648.200,00	-17.277.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		43.569.179,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ASN*	100 %	100 %	245.984.000,00	149.970.000,00	77.993.000,00	-167.991.000,00			249.673.760,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
													ATIKA DAERAH
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket	75.790.000,00	0,00	0,00	-75.790.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		76.926.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	170.194.000,00	149.970.000,00	77.993.000,00	-92.201.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		172.746.910,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	100 %	678.606.150,00	478.488.600,00	370.873.800,00	-307.732.350,00			688.785.241,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	1 Paket	20.394.100,00	20.394.100,00	20.394.100,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.700.011,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Kantor yang Disediakan										ATIKA DAERAH
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	110.000.000,00	0,00	-130.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		131.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.186.450,00	30.004.200,00	30.004.200,00	-6.182.250,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36.729.246,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.775.200,00	49.674.000,00	111.865.300,00	93.090.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		19.056.828,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	135.714.400,00	99.959.300,00	87.540.200,00	-48.174.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		137.750.116,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			yang Disediakan										ATIKA DAERAH
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	15 Dokumen	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		29.232.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	308.736.000,00	139.657.000,00	92.270.000,00	-216.466.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		313.367.040,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 Tahun	1 Tahun	1.523.847.704,00	937.186.306,00	829.496.306,00	-694.351.398,00			1.546.705.419,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	7.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7.917.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
													ATIKA DAERAH
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	239.875.000,00	239.875.236,00	239.875.236,00	236,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		243.473.125,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.276.172.704,00	691.311.070,00	583.621.070,00	-692.551.634,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.295.315.294,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-	1 Tahun	99.390.000,00	63.420.000,00	72.420.000,00	-26.970.000,00			100.880.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	5 Unit	5 Unit	84.390.000,00	48.420.000,00	72.420.000,00	-11.970.000,00	DANA ALOKASI		85.655.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							UMUM (DAU)			INFORMATIKA DAERAH
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.225.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
2,	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Pertumbuhan PDRB sektor Informasi dan Komunikasi Persentase informasi publik yang terpublikasi dengan baik**	**90 0,59 % %**	**0,59 90 % %**	**200.138.100,00**	**123.014.600,00**	**72.762.200,00**	**3.001.970,00**			**203.140.070,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah*	71,10 %	71,10 %	200.138.100,00	123.014.600,00	72.762.200,00	-127.375.900,00			203.140.070,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas	12.757.400,00	12.757.400,00	1.307.400,00	-11.450.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12.948.761,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik											
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	1 Permohonan	62.288.300,00	32.261.300,00	19.681.500,00	-42.606.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		63.222.624,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik											
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	44.121.500,00	19.746.500,00	13.160.600,00	-30.960.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		44.783.222,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1 Media	80.970.900,00	58.249.400,00	38.612.700,00	-42.358.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		82.185.463,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik											
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
3,	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Tersedianya Acuan Penyusunan SPBE Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program prioritas**	**91,11 100 89,78 % % %**	**100 89,78 91,11 % % %**	**339.777.146,00**	**268.161.346,00**	**186.285.346,00**	**5.096.656,00**			**344.873.802,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan sistem aplikasi informatika										
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tersosialisasikannya Layanan Elektronik dan Terpenuhinya Kebutuhan Pengkajian Pengembangan Sistem Informasi*	100 %	100 %	41.086.200,00	21.020.200,00	12.566.500,00	-28.519.700,00			41.702.493,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa											
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	41.086.200,00	21.020.200,00	12.566.500,00	-28.519.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		41.702.493,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Pengelolaan E-Government*	100 %	100 %	298.690.946,00	247.141.146,00	173.718.846,00	-124.972.100,00			303.171.309,00	DINAS KOMUNIKASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			di Lingkup Pemerintah Daerah										DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional											
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	1 Aplikasi	185.370.346,00	123.008.146,00	107.877.146,00	-77.493.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		188.150.901,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE											
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	73.213.100,00	29.792.200,00	16.475.600,00	-56.737.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		74.311.296,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas											
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	1 unit	1 unit	40.107.500,00	94.340.800,00	49.366.100,00	9.258.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		40.709.112,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**104.398.400,00**	**84.376.000,00**	**44.837.700,00**	**-59.560.700,00**			**105.964.376,00**	
1,	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik**	**100 persen**	**100 persen**	**104.398.400,00**	**84.376.000,00**	**44.837.700,00**	**1.565.976,00**			**105.964.376,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Statistik Derah*	1 Dokumen	1 Dokumen	104.398.400,00	84.376.000,00	44.837.700,00	-59.560.700,00			105.964.376,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia											
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah	1 Dokumen	1 Dokumen	104.398.400,00	84.376.000,00	44.837.700,00	-59.560.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		105.964.376,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21
			dilengkapi metadata										ATIKA DAERAH
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**62.646.900,00**	**25.005.600,00**	**14.080.800,00**	**-48.566.100,00**			**63.586.603,00**	
1,	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik**	**100 persen**	**100 persen**	**62.646.900,00**	**25.005.600,00**	**14.080.800,00**	**939.703,00**			**63.586.603,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Dokumen Persandian Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	62.646.900,00	25.005.600,00	14.080.800,00	-48.566.100,00			63.586.603,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	62.646.900,00	25.005.600,00	14.080.800,00	-48.566.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		63.586.603,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja Perubahan, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja Perubahan selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Rencana Kerja Perubahan ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Sipirok, 09 September 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

MUHAMMAD ARIEF,ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730613 2002312 1 006

RENCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Komplek Pemerintahan Tapanuli Selatan
Jl. Prof. Lafran Pane, Sipirok

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja OPD adalah rancangan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan.

Sipirok, 10 Juli 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

H. ONGKUMUDA ATAS, SE. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701212 199703 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 18

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 19

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah 31

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32

3.3. Program dan Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 36

BAB V PENUTUP 76

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 untuk mengatasi masalah pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Undang–Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama tujuan nasional.

Berdasarkan hal – hal tersebut, Daerah memiliki kewenangan membuat Kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka untuk mewujudkan prinsip – prinsip otonomi daerah tersebut dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategi – Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)” dan pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4)”.

Pada Tahun 2015, dengan terbitnya Undang–Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/ Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabuaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Berpedoman pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat/ menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan mempedomani RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 – 2029 menyusun Renstra dan Renja Tahun 2025. Dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025– 2026 telah dirumuskan dan ditetapkan bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025– 2029 adalah :

“TAPANULI SELATAN YANG MAJU DAN BERKARAKTER UNGGUL, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan dalam 5 (lima) misi. Terkait dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah pada misi ke – 5 yaitu “Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan.”.

Kemudian dari misi tersebut, untuk mewujudkan misi ke - 5 dirumuskanlah dalam tujuan yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Untuk mewujudkan Tujuan, dirumuskanlah sasaran. Dari 2 sasaran, terkait dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran ke – 1 yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka untuk memberhasilkan sasaran ini, dirumuskan dalam 2 strategi, tetapi terkait tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan adalah strategi pertama yaitu Strategi Mengendalikan pencemaran air, udara dan kerusakan lahan dan Strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam upaya memberhasilkan strategi misi ke – 5 tersebut, dirumuskan dalam 6 (enam) arah kebijakan dimana terkait dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup memiliki arah kebijakan pertama yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Keberlanjutan, Kedua yaitu Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan Memperluas pembangunan taman kota dan taman lingkungan di berbagai kawasan untuk menciptakan ruang hijau yang nyaman dan sehat dan Mengintegrasikan RTH dalam rencana tata ruang kota untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan ekosistem hijau dll, yang

ketiga Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota serta Taman Kota, yang keempat Optimalisasi Pemampaatan Ruang Hijau, yang kelima Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan RTH dan yang keenam Pembuatan, Penegakan regulasi pengelolaan persampahan masyarakat dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tersebut pada uraian di atas, dan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Renja Perangkat Daerah memuat Program dan Kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju, yang juga merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lainnya yang antara lain RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen terkait lainnya.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan dan pengolahan data serta analisa terhadap pelayanan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dan tetap mengacu pada dokumen terkait lainnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dibuat atau disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang program dan kegiatannya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka melaksanakan visi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu **“ MENJADIKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPANULI SELATAN BERPERAN AKTIP DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”**

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan kerja untuk dilaksanakan pada tahun anggaran dan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini yaitu :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipliin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017);
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 626);
31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 97 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 672).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 51);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, strategi, program serta sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang dipergunakan dengan membandingkan indikator – indikator sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tahun lalu diukur berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun lalu disajikan berdasarkan sistematika pernyataan Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam evaluasi pelaksanaan Renja memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), yang diemplementasikan dalam 8 (delapan) program.

Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.783.456.731,- dan terealisasi sebesar Rp 7.031.992.604,- atau 90,35 %. Hal disusun dengan menetapkan 8 program dengan 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang akan dicapai. Realisasi pada akhir Tahun 2024 menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik.

Uraian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024.

No	Sasaran	kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Kabupaten sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan(P.APBD Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		13		14 = 7+13		15= (14/6)X 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**2**	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**19.019.483.045**	**100**	**3.990.754.725**	**100**	**4.740.816.303**	**100,00**	**###########**	**100,00**	**4.491.370.738**	**100,00%**	**23,61%**	
		2	**11**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)**	**100**	**650.750.000**	**100**	**120.000.000**	**100**	**74.871.000**	**100,00**	**62.496.200**	**100,00**	**62.496.200**	**100,00%**	**9,60%**	
		2	11	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun (dokumen)	**30**	**486.750.000**	6	90.000.000	6	60.125.200	6,00	48.712.600	6,00	48.712.600	20,00%	10,01%	
		2	11	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (jenis laporan)	**20**	**164.000.000**	4	30.000.000	4	14.745.800	4,00	13.783.600	4,00	13.783.600	20,00%	8,40%	
		2	**11**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN selama setahun (%)**	**100**	**###########**	**100**	**2.053.403.270**	**100**	**2.327.302.525**	**100,00**	**###########**	**100,00**	**2.253.889.380**	**100,00%**	**20,59%**	
		2	11	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN (bulan)	**70**	**###########**	14	2.053.403.270	14	2.327.302.525	14,00	2.253.889.380	14,00	2.253.889.380	20,00%	20,59%	
		2	**11**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian selama setahun (%)**	**100**	**285.000.000**	**100**	**39.000.000**	**100**	**24.000.000**	**100,00**	**21.000.000**	**100,00**	**21.000.000**	**100,00%**	**7,37%**	
		2	11	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai yang diadakan (stell)	**150**	**90.000.000**	60	24.000.000	60	-	60,00	-	60,00	**-**	40,00%	0,00%	
		2	11	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	**39**	**195.000.000**	3	15.000.000	6	24.000.000	4,00	21.000.000	4,00	**21.000.000**	10,26%	10,77%	

		2	**1 1**	**0 1**	**2,0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya selama setahun (%)**	**100**	**1.965.000.000**	**100**	**351.608.400**	**100**	**309.943.000**	**0,00**	**279.865.008**	**0,00**	**279.865.008**	**0,00%**	**14,24 %**	
		2	1 1	0 1	2,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (bulan)	60	40.000.000	12	5.895.600	12	9.998.000	12,00	9.717.500	12,00	**9.717.500**	20,00%	24,29 %	
		2	1 1	0 1	2,0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Kebutuhan peralatan rumah tangga kantor dan kebersihan kantor (bulan)	60	40.000.000	12	6.000.600	12	9.995.300	12,00	9.631.000	12,00	**9.631.000**	20,00%	24,08 %	
		2	1 1	0 1	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (bulan)	60	260.000.000	12	30.000.200	12	59.999.900	12,00	51.282.500	12,00	**51.282.500**	20,00%	19,72 %	
								Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat (kotak)	2650	-	408		408		408,00	-	408,00	**-**	15,40%	0,00%	
		2	1 1	0 1	2,0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	60	150.000.000	12	25.000.000	12	29.863.800	12,00	24.297.200	12,00	**24.297.200**	20,00%	16,20 %	
		2	1 1	0 1	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran biaya langganan surat kabar	20	75.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20,00	11.940.000	20,00	**11.940.000**	100,00%	15,92 %	
		2	1 1	0 1	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah (OH)	1810	1.400.000.000	400	269.712.000	400	185.086.000	300,00	172.996.808	300,00	**172.996.808**	16,57%	12,36 %	
								Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah (OH)	670	-	165		165		228,00	-	228,00	**-**	34,03%	0,00%	
		2	**1 1**	**0 1**	**2,0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor selama setahun (%)**	**100**	**213.000.000**	**100**	**34.706.800**	**100**	**91.305.000**	**0,00**	**90.900.000**	**0,00**	**90.900.000**	**0,00%**	**42,68 %**	
		2	1 1	0 1	2,0 7	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor (bulan)	60	213.000.000	12	34.706.800	12	91.305.000	9,00	90.900.000	9,00	**90.900.000**	15,00%	42,68 %	
		2	**1 1**	**0 1**	**2,0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**3.539.912.661**	**100**	**1.171.096.255**	**100**	**1.589.644.778**	**0,00**	**###########**	**0,00**	**1.473.107.232**	**0,00%**	**41,61 %**	

		2	1 1	0 1	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/paket terkirim selama setahun (surat)	**100**	**1.500.000**	20	288.000	20	259.250	0,00	-	0,00	**-**	0,00%	0,00%	
		2	1 1	0 1	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (bulan)	**60**	**1.328.412.661**	12	258.380.935	12	272.705.848	12,00	205.054.852	12,00	**205.054.852**	20,00%	15,44 %	
		2	1 1	0 1	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran, Keuangan dan THL yang memperoleh Gaji/Honorarium (orang)	**105**	**2.210.000.000**	38	912.427.320	40	1.316.679.680	40,00	1.268.052.380	40,00	**1.268.052.380**	38,10%	57,38 %	
		2	**1 1**	**0 1**	**2,0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)**	**100**	**1.420.000.000**	**100**	**220.940.000**	**100**	**323.750.000**	**0,00**	**310.112.918**	**0,00**	**310.112.918**	**0,00%**	**21,84 %**	
		2	1 1	0 1	2,0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan dinas	75	1.307.000.000	15	205.420.000	15	261.420.000	15,00	247.782.918	15,00	**247.782.918**	20,00%	18,96 %	
								Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	45	-	8		8		8,00	-	8,00	**-**	17,78%	0,00%	
		2	1 1	0 1	2,0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan kantor	12	38.000.000	12	5.520.000	12	12.330.000	12,00	12.330.000	12,00	**12.330.000**	100,00%	32,45 %	
		2	1 1	0 1	2,0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	12	75.000.000	12	10.000.000	12	50.000.000	12,00	50.000.000	12,00	**50.000.000**	100,00%	66,67 %	
		2	**1 1**	**0 2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen)**	**5**	**238.211.944**	**1**	**199.999.900**	**1**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**#######**	**0,00%**	
		2	**1 1**	**0 1**	**2,0 1**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penyusunan dokumen RPPLH (%)**	**100**	**238.211.944**	**100**	**199.999.900**	**100**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	
		2	1 1	0 1	2,0 1	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen KLHS (dokumen)	**302**	**238.211.944**	1	199.999.900	0	-	0,00	-	0,00	**-**	0,00%	0,00%	
		2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**72,7**	**4.502.249.083**	**71,52**	**335.278.600**	**71,52**	**473.019.200**	**108,05**	**392.085.723**	**108,05**	**392.085.723**	**148,73%**	**8,71%**	

								Luas Lahan Kritis/DAS di Luar Kawasan Hutan yang direhabilitasi	**25**	**-**	**5**		**5**		**120,00**	**-**	**120,00**	**-**	**480,00%**	**0,00%**	
		2	**11**	**03**	**2,01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pencegahan pencemaran air, udara, tanah dan laut selama setahun (%)**	**100**	**3.292.249.083**	**100**	**172.091.600**	**100**	**192.080.800**	**100,00**	**136.793.573**	**100,00**	**136.793.573**	**100,00%**	**4,16%**	
		2	11	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan pemantauan dan pencegahan pencemaran (kecamatan)	**15**	**2.332.249.083**	15	109.588.800	15	103.851.600	15,00	91.858.273	15,00	**91.858.273**	100,00%	3,94%	
		2	11	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersusunnya dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang disusun (dokumen)	**1**	**960.000.000**	1	62.502.800	1	88.229.200	1,00	44.935.300	**1,00**	**44.935.300**	100,00%	4,68%	
		2	**11**	**03**	**2,03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penghijauan lingkungan sebagai upaya rehabilitasi atas kerusakan lingkungan (%)**	**100**	**1.210.000.000**	**100**	**163.187.000**	**100**	**280.938.400**	**100,00**	**255.292.150**	**100,00**	**255.292.150**	**100,00%**	**21,10%**	
		2	11	03	2,03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen data Daerah Aliran Sungai dan Lahan Kritis (dokumen)	5	1.210.000.000	1	163.187.000	1	280.938.400	1,00	255.292.150	1,00	255.292.150	20,00%	21,10%	
								Jumlah lokasi penghijauan lingkungan sebagai upaya rehabilitasi atas kerusakan lingkungan (lokasi)	10	-	1		1		0,00	-	0,00	**-**	0,00%	0,00%	
		2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luas RTH yang terpelihara (Ha)**	**21**	**3.954.559.819**	**21**	**1.632.705.100**	**21**	**1.690.106.350**	**161%**	**###########**	**1,61**	**1.602.036.369**	**7,65%**	**40,51%**	
		2	**11**	**04**	**2,01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan kebun raya, RTH dan Sarana Prasarana KeanekaragamanHayati selama setahun (%)**	**100**	**3.954.559.819**	**100**	**1.632.705.100**	**100**	**1.690.106.350**	**100,00**	**###########**	**100,00**	**1.602.036.369**	**100,00%**	**40,51%**	

		2	1 1	0 4	2,0 1	03	Pengelolaan Kebun Raya	Pembangunan dan pemeliharaan Kebun Raya (lokasi)	**1**	**3.264.559.819**	1	1.132.986.600	1	1.357.367.750	100,0 0	1.273.227.569	100,0 0	**1.273.227.569**	10000,00 %	39,00 %	
		2	1 1	0 4	2,0 1	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (lokasi)	**3**	**690.000.000**	3	499.718.500	3	332.738.600	100,0 0	328.808.800	100,0 0	**328.808.800**	3333,33%	47,65 %	
								Penataan kawasan Hutan Kota (lokasi)			1		1							
		2	**1 1**	**0 5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Jumlah Industri dan usaha kecil yang dilakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 (usaha/puskesmas/klinik)**	**20 usaha, 5 puskesmas , 1 klinik**	**228.956.523**	**12 usaha, 5 puskesmas , 1 klinik**	**781.253.500**	**12 usaha, 5 puskesmas , 1 klinik**	**26.305.800**	**108,05**	**25.268.400**	**108,05**	**25.268.400**	**0,00%**	**11,04 %**	
		2	**1 1**	**0 5**	**2,0 1**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Terpenuhinya izin pengelolaan limbah B3 pada usaha dan/atau kegiatan (%)**	**100**	**228.956.523**	**100**	**781.253.500**	**100**	**26.305.800**	**100,00**	**25.268.400**	**100,00**	**25.268.400**	**100,00%**	**11,04 %**	
		2	1 1	0 5	2,0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 (usaha)	**23**	**228.956.523**	16	781.253.500	16	26.305.800	16,00	25.268.400	16,00	25.268.400	69,57%	11,04 %	
								Pembangunan IPAL Puskesmas Pintu Padang (paket)			1		1							
		2	**1 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH (usaha)**	**192**	**438.502.211**	**120**	**36.407.000**	**120**	**39.919.550**	**12,50**	**38.792.350**	**12,50**	**38.792.350**	**6,51%**	**8,85%**	
								Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	**100**	**-**	**100**		**100**		**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00%**	**0,00%**	
		2	**1 1**	**0 6**	**2,0 1**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pada usaha dan/atau kegiatan di 15 kecamatan (%)**	**100**	**438.502.211**	**100**	**36.407.000**	**100**	**39.919.550**	**66,66**	**38.792.350**	**66,66**	**38.792.350**	**66,66%**	**8,85%**	

		2	1 1	0 6	2,0 1	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan (kecamatan)	**15**	**438.502.211**	15	36.407.000	15	39.919.550	15,00	38.792.350	15,00	38.792.350	100,00%	8,85%	
		2	**1 1**	**0 8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (sekolah/desa)**	**40 sekolah; 5 desa**	**993.014.985**	**29 sekolah; 3 desa**	**124.106.000**	**29 sekolah; 3 desa**	**174.706.150**	**108,82**	**114.307.100**	**108,82**	**114.307.100**	**272,05%**	**11,51 %**	
		2	**1 1**	**0 8**	**2,0 1**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pembinaan sekolah adiwiyata dan pemberian bantuan pada 15 desa binaan (%)**	**100**	**993.014.985**	**100**	**124.106.000**	**100**	**174.706.150**	**108,00**	**114.307.100**	**108,00**	**114.307.100**	**108,00%**	**11,51 %**	
		2	1 1	0 8	2,0 1	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah calon sekolah adiwiyata yang dibina	**40**	**993.014.985**	15	124.106.000	15	174.706.150	15,00	114.307.100	15,00	114.307.100	37,50%	11,51 %	
								Jumlah desa binaan yang menerima bantuan bibit dan bantuan lainnya	**5**	**-**	15		15		**8,00**	**-**	**8,00**	**-**	**160,00%**		
2	**Meningkatnya pengelolaan sampah**	**2**	**1 1**	**1 1**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase PenguranganSampah Persentase sampah tertangani**	**69**	**3.308.363.617**	**72**	**535.153.850**	**71**	**335.650.628**	**95,29**	**313.638.873**	**95,29**	**313.638.873**	**138,10%**	**9,48%**	
		2	**1 1**	**1 1**	**2,0 1**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pengurangan Sampah Meningkatnya persentase sampah tertangani**	**69**	**3.308.363.617**	**72**	**535.153.850**	**72**	**335.650.628**	**95,29**	**313.638.873**	**95,29**	**313.638.873**	**138,10%**	**9,48%**	
								Persentase Pengurangan Sampah	**31**	**-**	26		26		**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	
		2	1 1	1 1	2,0 1	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	48	320.000.000	4	281.736.950	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%	
		2	1 1	1 1	2,0 1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk	1	56.495.450	2	253.416.900	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%	

								Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada											
		2	11	11	2,01	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	40	752.100.800	1	752.100.800	1	335.650.628	0,00	313.638.873	0,00	313.638.873	0,00%	41,70 %	
		2	11	11	2,01	21	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	752.100.800	0	-	0		0,00	-	0,00	-	0,00%	0,00%	
3	**Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya**	3	28	04			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya**	**80**	**282.725.659**	**80**	**-**	**80**	**302.932.750**	**95,29**	**54.493.050**	**95,29**	**54.493.050**	**119,11%**	**19,27 %**	
		3	28	04	2.01		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan Taman Hutan Raya**	**80**	**282.725.659**	**80**	**-**	**80**	**302.932.750**	**95,29**	**54.493.050**	**95,29**	**54.493.050**	**119,11%**	**19,27 %**	

		3	2 8	0 4	2.0 1	001 0	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1	282.725.659	1	-	1	302.932.750	4,00	54.493.050	4,00	54.493.050	400,00%	19,27 %	
TOTAL																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															**81,07**					
Predikat Kinerja																				

Secara umum, dengan kerja sama yang baik dan dedikasi ASN yang baik, capaian realisasi kinerja pelaksanaan Progam dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 100%, tercapai target kinerjanya. Perencanaan dan penganggaran Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 secara umum sudah optimal, namun tetap diperlukan analisa yang lebih baik agar perencanaan dan penganggaran menghasilkan pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah yang lebih baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Tahun 2024
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampah tertangani (%)	17.66	18.06	19.35	20.87	22.44	24.08	71,00
2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk(Per 1000 Penduduk)	0.81	0.81	1.59	1.58	2.35	2.33	0.81
3	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Pengendalian Pencemaran Status Mutu Air (%)	85,70	92.85	93.78	94.5	95.3	95.92	100
5	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%)	2.88	5.3	7.73	12.58	15	15	- *
6	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	24.79	22.96	21.14	19.32	17.5	15.68	- *
7	Pemantauan Kerusakan Lahan (%)	100	100	100	100	100	100	- *
8	Alih Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan (Ha)	0	0	500	300	700	250	0

* Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada tabel 2.1 dan 2.2 sebelumnya dapat dilihat bahwa pada beberapa indikator kinerja Perangkat Daerah belum memiliki capaian yang maksimal. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik. Capaian yang tidak memenuhi target ini disebabkan oleh :

1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan karena masih minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan serta belum adanya manajemen pengelolaan persampahan yang baik di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Urusan Kehutanan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Pengelolaan Tahura dan Hutan Kota saja, sehingga capaian terhadap kerusakan kawasan hutan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Capaian yang tidak optimal ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah mengingat urusan pemerintah Bidang Lingkungn Hidup merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar.

Adapun beberapa rekomendasi strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meningkatkan capaian kinerja pelayanannya yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan persampahan dengan menambah sarana dan prasarana persampahan, yaitu dengan membangun 1 (satu) unit Bank Sampah, penyediaan operasional persampahan dan pengoptimalan fungsi sarana persampahan yang sudah ada sebelumnya.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mulai dari skala rumah tangga sampai dengan industri besar dalam hal kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan persampahan yang baik dan penanganan limbah yang sesuai baku mutu yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan koordinasi ke Pemerintah Atasan terkait program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan capaian Perangkat Daerah Bidang Kehutanan, misalnya Kegiatan Reboisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Atasan diusulkan agar dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Peningkatan kapasitas aparatur mencakup pendidikan PPNS, PPLH, auditor lingkungan dan Dasar – dasar serta Penilai AMDAL.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Setiap SKPD melakukan review terhadap rancangan awal rencana kerjanya untuk menjamin keselarasan antara Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan. Prosesnya adalah dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja DLH dengan hasil analisis kebutuhan. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan antara kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Dari hasil evaluasi rencana kegiatan dan hasil analisis kebutuhan anggaran dalam rancangan awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 15.265.876.680,00 sedangkan setelah melakukan penajaman hasil analisa kebutuhan pada penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja diperoleh anggaran Rp. 15.265.876.680,00 Maka, Dinas Lingkungan Hidup membuat Review perbandingan antara Rancangan Awal Rencana Kerja dan hasil analisa kebutuhan Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024 sebagaimana diringkas pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Review Terhadap Rencangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Daerah

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.269.385.680,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.269.385.680,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.014.650,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.014.650,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	89.999.750,00	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	89.999.750,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.014.900,00	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.014.900,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.345.611.332,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.345.611.332,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.345.611.332,00	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.345.611.332,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			82.002.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			82.002.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			

		-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	34.002.000,00		-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	34.002.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
		-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	48.000.000,00		-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	48.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				430.510.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				430.510.200,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.411.600,00		-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.411.600,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
		-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	10.195.200,00		-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	10.195.200,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	59.613.600,00		-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	59.613.600,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	33.789.800,00		-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	33.789.800,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				

		-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20.000.000,00		-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245 Laporan	296.500.000,00		-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245 Laporan	296.500.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				169.688.400,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				169.688.400,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	169.688.400,00		-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	169.688.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.739.714.258,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.739.714.258,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	259.250,00		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	259.250,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	358.500.000,00		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	358.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.380.955.008,00		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.380.955.008,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				381.844.840,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				381.844.840,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	335.339.240,00		-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	335.339.240,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	11.505.600,00		-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	11.505.600,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	35.000.000,00		-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	35.000.000,00
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				199.905.900,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				199.905.900,00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				199.905.900,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				199.905.900,00
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota					Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				
		-	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	199.905.900,00		-	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	199.905.900,00

3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				838.068.450,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				838.068.450,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				555.015.650,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				555.015.650,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
		-	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	364.896.850,00		-	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	364.896.850,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	190.118.800,00		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	190.118.800,00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				283.052.800,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				283.052.800,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi					Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				
		-	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	283.052.800,00		-	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	283.052.800,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				3.674.503.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				3.674.503.200,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				3.674.503.200,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				3.674.503.200,00
	Pengelolaan Kebun Raya					Pengelolaan Kebun Raya				

		-	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Ha	2.351.366.900,00		-	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Ha	2.351.366.900,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
		-	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	13,5 Ha	1.323.136.300,00		-	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	13,5 Ha	1.323.136.300,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				54.316.200,00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				54.316.200,00
	Penyimpanan sementara Limbah B3				54.316.200,00	Penyimpanan sementara Limbah B3				54.316.200,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
		-	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	54.316.200,00		-	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	54.316.200,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				145.016.300,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				145.016.300,00
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				145.016.300,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				145.016.300,00
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				

		-	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	145.016.300,00		-	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	145.016.300,00
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				410.838.800,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				410.838.800,00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				410.838.800,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				410.838.800,00
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				
		-	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	410.838.800,00		-	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	410.838.800,00
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				4.445.919.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				4.445.919.400,00
	Pengelolaan Sampah				4.445.919.400,00	Pengelolaan Sampah				4.445.919.400,00
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				
		-	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	40 Ton	4.370.919.400,00		-	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	40 Ton	4.370.919.400,00
	Pengawasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Pengawasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
			Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	1 Tahun	75.000.000,00			Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	1 Tahun	75.000.000,00

9	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				302.922.750,00	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				302.922.750,00
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota				302.922.750,00	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota				302.922.750,00
	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota					Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota				
		-	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	302.922.750,00		-	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	302.922.750,00
					15.340.876.680,00					**15.340.876.680,00**

2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan rancangan awal Renja SKPD memperhatikan dan mempertimbangkan usulan yang disampaikan pada penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan oleh para pemangku kepentingan terdiri atas unsur SKPD Kecamatan, unsur Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), unsur Rukun Tetangga dan Rukun Warga, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Usulan Musrenbang kemudian diteruskan ke Forum SKPD tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Kab. Tapanuli Selatan dengan mengundang para pemangku kepentingan terkait dengan urusan lingkungan hidup untuk menghimpun dan merumuskan usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan disusun pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025. Dari semua usulan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan kemudian masuk proses identifikasi, verifikasi, seleksi, dan disetujui atau tidak disetujui sebagai usulan yang akan masuk program dan kegiatan dalam Renja 2025. Tidak semuanya dapat dipenuhi oleh Dinas Lingkungan Hidup karena alasan keterbatasan anggaran, usulan yang disampaikan bukan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah, serta ketidaksesuaian usulan dengan prioritas pembangunan Tahun 2025 sebagaimana tertulis pada RPJMD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah, dan RKPD. Diantara usulan yang tidak dianggarkan pada Renja tahun 2025 yaitu usulan dari Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan berupa pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah diantaranya kendaraan pengangkutan sampah (bentor, gerobak, dan truk) dan tempat pembuangan sampah sementara (bak sampah, double bin, triple bin dan yang sejenis lainya), alasannya adalah karena keterbatasan anggaran dan prioritas penyelesaian masalah sampah yang akan difokuskan pada upaya meningkatkan efektifitas pengurangan dan pembatasan sampah di sumber, mengoptimalkan pengolahan sampah organik dan anorganik di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan bank sampah.

Kemudian ada juga usulan usulan masyarakat yang disampaikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Forum SKPD yang diterima dan akan direalisasikan pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebagaimana terekap pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
(Musrenbang dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Tahun 2025)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Usulan	Usulan Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Tapanuli Selatan	Banyaknya sampah organik dan anorganik yang tak termanfaatkan yang berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar	Rp. 30.000.000,-
	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Tapanuli Selatan	Belum adanya gerobak sampah	Rp. 15.000.000,-
			Alat Akomodasi belum ada	Rp. 5.000.000,-
			Masyarakat membutuhkan gerobak sampah sebanyak 3 unit	Rp. 15.000.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan melalui 8 misi, urusan Lingkungan Hidup terdapat pada misi ke – 6 yaitu Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan *lingkungan hidup* dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 ada 7, urusan Lingkungan Hidup tercantum pada arah kebijakan ke – empat yaitu **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim**. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam bidang lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu “ Tapanuli Selatan Yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun Yang Unggul, Sehat Cerdas, Sejahtera Serta Sumber Daya Alam Yang Produktif Dan Lestari “ yang dicantumkan pada misi ketiga yaitu “Melanjutkan

pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat, dengan sasaran Terwujudnya Pengendalian Lingkungan Hidup serta Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana yang akan dicapai melalui Pembangunan Berencana; Meningkatkan Pengendalian dan Sumber Daya Alam dan Meningkatkan Cakupan dan Kualitas serta Penerapan Regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan, melalui prinsip "Good Environmental Governance" disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana yang ditandai dengan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dengan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, berkurangnya jumlah kerusakan lingkungan, terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah Tapsel serta meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan terkait Bidang Lingkungan Hidup yaitu pada Prioritas keempat adalah Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan arah kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah "*Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Sehat Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari".* Peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi kepala daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu misi ketiga yang berbunyi "Melanjutkan Pembangunan infrastruktur Daerah dengan memanfaatkan Sumber Daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan umum masyarakat" yang bermakna bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pertanian, kesehatan, industri, perdagangan,perhubungan dan pemukiman masyarakat.

Pelaksanaan Misi ketiga ini memiliki tujuan “Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur daerah”, dengan sasaran Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat serta Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	
			2025	2026
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	78.27	78.42

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 merupakan program kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dirumuskan dalam program dan kegiatan pada tabel 3.2 berikut.

Dengan pengertian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan rencana 8 program, 15 kegiatan dan 29 sub kegiatan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
   1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

2.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota

2.1.1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

3.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

3.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

3.2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.2.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

4.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

4.1.1. Pengelolaan Kebun Raya

4.1.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

   5.1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

   5.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

   6.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   6.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

   7.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   7.1.1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

8. Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

   8.1. Pengelolaan Sampah

   8.1.1. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

   8.1.2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja PerubahanTahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 ini ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan diharapkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah, perangkat daerah dengan kabupaten/kota maupun dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Lingkungan Hidup Daerah							7.153.325.566,00	6.884.650.172,00	7.276.195.040,00							9.470.256.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.988.316.816,00	6.864.650.072,00	7.262.693.940,00							9.320.256.000,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							6.988.316.816,00	6.864.650.072,00	7.262.693.940,00							9.320.256.000,00	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan				-	100 %	4.926.346.366,00	4.717.255.472,00	4.568.027.312,00							4.980.442.780,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			-	6 Dokumen	120.014.650,00	56.862.400,00	56.862.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		120.014.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

	2	1 1	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Do ku me n	6 Dokumen	89.999.750,00	44.862.600,00	35.339.700,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			89.999.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Lapora n	4 Laporan	30.014.900,00	11.999.800,00	11.733.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			30.015.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			-	14 Orang/Bulan	2.525.770.160,00	3.265.194.252,00	3.265.194.252,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.345.611.332,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.525.770.160,00	3.265.194.252,00	3.353.901.492,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM			2.345.611.332,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			-	8 Orang/Bulan	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		38.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

	2	1 1	0 1	2. 05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	24.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			38.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya selama setahun	-			-	100 %	313.886.800,00	195.795.300,00	195.795.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		456.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.411.600,00	9.996.400,00	9.996.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	10.195.200,00	9.997.300,00	9.997.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

																	penyeludupan.					
	2	1 1	0 1	2. 06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	59.613.600,00	45.244.800,00	27.277.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.003.400,00	25.029.800,00	22.554.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				245 Laporan	245 Laporan	183.663.000,00	85.527.000,00	42.704.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			331.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			-	6 Unit	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 07	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	-			-	1 Laporan	1.560.829.916,00	927.792.520,00	927.792.520,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.695.286.598,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	259.250,00	259.250,00	259.250,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			259.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	230.026.986,00	182.500.000,00	182.500.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			318.935.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.330.543.680,00	745.033.270,00	586.153.270,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			1.376.092.208,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian selama setahun	-			-	100 %	381.844.840,00	259.611.000,00	259.611.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		323.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	335.339.240,00	227.420.000,00	227.420.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			261.420.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	11.505.600,00	7.191.000,00	7.191.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			12.330.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	2	1 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Tapanuli Selatan				-	2 Dokumen	0,00	160.261.800,00	206.555.500,00							199.999.750,00	
	2	1 1	0 2	2. 01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Tapanuli Selatan	-			-	2 Dokumen	0,00	160.261.800,00	160.261.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecam		199.999.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

						Kabupaten/Kota											toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		atan, Semua Kel/Desa			
	2	1 1	0 2	2. 01	00 06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	160.261.800,00	206.555.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM			199.999.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 2	2. 02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 2	2. 02	00 05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
3	2	1 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				-	72,27 Point	387.392.150,00	319.309.000,00	254.793.900,00							943.193.150,00	

						DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																
	2	1 1	0 3	2. 01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-			-	1 Dokumen	186.629.350,00	168.195.000,00	168.195.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	Kabupaten Tapanuli Selatan		555.005.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 3	2. 01	00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	80.629.350,00	117.671.300,00	107.060.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM			364.896.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 3	2. 01	00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																	

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	106.000.000,00	50.523.700,00	39.654.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM			190.108.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-			-	1 Kegiatan	200.762.800,00	151.114.000,00	151.114.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		388.188.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.762.800,00	151.114.000,00	108.079.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM			388.188.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

																		mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
4	2	1 1	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas RTH yang terpelihara				-	21 Ha	964.083.100,00	913.225.700,00	1.114.032.700,00							1.610.534.720,00	
	2	1 1	0 4	2. 01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-			-	13,5 Ha	964.083.100,00	913.225.700,00	913.225.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.610.534.720,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 4	2. 01	00 03	Pengelolaan Kebun Raya																	
							Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Ha	8 Ha	647.781.800,00	564.192.200,00	754.865.256,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM			1.253.500.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

																		agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	1 1	0 4	2. 01	00 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				13, 5 Ha	13,5 Ha	316.301. 300,00	349.033. 500,00	359.167. 444,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Tanah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerat aan Ekonomi dan Penguat an UMKM			357.034.10 0,00	DINAS LINGKU NGAN HIDUP DAERAH
5	2	1 1	0 5			PROGRAM PENGENDALI AN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Industri dan usaha kecil yang dilakukan pembinaan pengelolaan limbah B3				-	21 Usaha/Pu skesmas	54.316.2 00,00	30.918.2 00,00	16.969.9 00,00							54.314.150 ,00	

	2	1 1	0 5	2. 01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-			-	1 Dokumen	54.316.200,00	30.918.200,00	30.918.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		54.314.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 5	2. 01	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
							Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	54.316.200,00	30.918.200,00	16.969.900,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM			54.314.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
6	2	1 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh				-	100 180 persen usaha	50.356.500,00	34.215.300,00	21.282.400,00							145.147.100,00	

						PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH																
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-			-	1 Dokumen	50.356.500,00	34.215.300,00	34.215.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		145.147.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.356.500,00	34.215.300,00	21.282.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM			145.147.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

																		industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
7	2	1 1	0 8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				-	37;4 Sekolah; desa	172.903.100,00	108.724.100,00	74.956.900,00							405.301.300,00	
	2	1 1	0 8	2. 01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-			-	1 Dokumen	172.903.100,00	108.724.100,00	108.724.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		405.301.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	1 1	0 8	2. 01	00 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																	

							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	172.903.100,00	108.724.100,00	74.956.900,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM			405.301.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
8	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengawasan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Persentase PenguranganSampah Persentase sampah tertangani				-	1 28 71 Dokumen % %	432.919.400,00	580.740.500,00	1.006.075.328,00							981.323.050,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-			-	40 Ton	432.919.400,00	580.740.500,00	580.740.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		981.323.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																

							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				40 Ton	40 Ton	432.919.400,00	580.740.500,00	1.006.075.328,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Tanah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM			981.323.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						165.008.750,00	20.000.100,00	13.501.100,00								150.000.000,00	
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						165.008.750,00	20.000.100,00	13.501.100,00								150.000.000,00	
9	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya				-	75 %	165.008.750,00	20.000.100,00	13.501.100,00								150.000.000,00	
	3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	-			-	1 Dokumen	165.008.750,00	20.000.100,00	20.000.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	3	28	04	2.01	0016	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA				1 Dokumen	1 Dokumen	165.008.750,00	0,00	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

							berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota								Kel/Desa		ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	UMKM				
							Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	20.000.100,00	13.501.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Ekosistem investasi daerah dan daya saing ekonomi berbasis Potensi Unggul			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
	JUMLAH													**7.153.325.566,00**	**6.884.650.172,00**	**7.276.195.040,00**							**9.470.256.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi serta skala prioritas program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja ini, tergantung kepada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin segenap jajaran Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan lembaga/instansi terkait bersama-sama secara terpadu dalam melaksanakan Renja tersebut serta didukung pendanaan yang memadai agar mampu memberikan hasil pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mudah-mudahan tujuan dan sasaran yang diinginkan akan tercapai dengan baik tanpa mengesampingkan faktor-faktor pendukung lainnya dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sipirok, 10 Juli 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

H. ONGKU MUDA ATAS, SE. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701212 199703 1 006

RENCANA KERJA

TAHUN 2025



Danau Siais



Benteng Huraba



Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan

DINAS PARIWISATA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 dapat tersusun.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas - tugas di Lingkungan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di tahun 2024 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja.

Demikian semoga Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sipirok, 18 Desember 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABDUL SAFTAR, S. Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1972082319 9303100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu 8

2.2 Analisis Kerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 39

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Bagian 41

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 46

BAB V. PENUTUP 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja).

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD 2025;
2. Rumusan program dan kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan memperimbangkan pagu anggaran yang ada;
3. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan sebagian besar merupakan pergeseran anggaran yang berasal dari kegiatan yang belum terealisasi maka akan dialihkan/digeser ke kegiatan yang kurang pagu anggarannya sehingga dapat berjalan sampai akhir tahun;
4. Progran dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 70 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1045);
21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2025, dimaksudkan untuk:

a. Menyiapkan program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran terhadap Renstra Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029.

b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD Perubahan dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

a. Renja Perubahan menjadi acuan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang sinergi dengan RKPD Perubahan.

b. Renja Perubahan sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengacu pada Renstra dan RKPD Perubahan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2025 Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA POKOK DAN RENJA PERUBAHAN DINAS PARIWISATA DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Daerah Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kabupaten Pariwisata Daerah Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi anggaran Belanja untuk Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 9.735.012.626,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 251.127.100,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 8.503.824.320,- atau sebesar 85,15% dengan rincian sebagai berikut:

• Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 8.254.994.320,- atau 82,66 % Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 248.830.000,-atau 2,49 %.

Tabel T.C. 2.9

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100%
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	100	100	100	100	100	100%

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminisyrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100%
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100%
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100%

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100%
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100%

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.3.26.2.19.0.00.02.00.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	195.000	522.683	175.000	422.688	241,53	180.000	973.648	499,31%
			Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan yang Datang ke Kabupaten/ Kota	-0.37	24,24	-1,76	13,46	-764,77	-0,65	0	0
	3.26.3.26.2.19.0.00.02.00.03	Pengelolaan Destinasi Kabupaten / Kota	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan (Objek)	7	20	3	0	0	3	0	0

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.3.26.2.19.0.00.02.00.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata melalui Media Cetak dan Elektronik (Event)	5	6	3	3	100	4	2	67
			Tingkat Hunian Akomodasi (%)	43,82	20,68	40,58	15,52	38,24	41,66	0	0
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Pariwisata dan ekonomi KREATIF	Kontribusi sector Pariwisata terhadap PAD jumlah objek wisata yang dikembangkan (objek)	4,46	4,74	4,12	4,26	103,39	4,29	0	0

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah kemitraan yang dijalin dalam pengembangan kepariwisataan (Jumlah)	19	20	18	4	22,22	18	0	0
			Peningkatan PDRB dari Sub Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	9,26	1,29	8,75	1,39	15,88	8,92	0	0
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor (Orang)	5	0	5	5	100	5	1	20

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	4	0,90	3	0,92	30,66	3,5	0	0
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial (%)	37	10,03	30	10,20	34	32,5	0	0

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	JUMLAH ATLIT BERPRESTASI (ORANG) TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL	60	56	57	57	100	58	0	0
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	JUMLAH KEGIATAN KEPRAMUKAAN	10	10	10	10	100	10		100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati:

Dinas Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum
2. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pariwisata Bagi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah Dari Sektor Kepariwisataan;
4. Meningkatkan Sumber Daya Kepemudaan Melalui Pembinaan yang Intensif;
5. Meningkatkan Potensi Olahraga melalui Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga serta Sarana dan Prasarana Olahraga;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Dinas Pariwisata Daerah mempunyai Tujuan :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pembangunan yang Unggul dan Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ);
   a) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun;
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Selatan yang Berbasis Pertaniaan dan Ekonomi Kerakyatan melalui Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Produktif dan Berwawasan Lingkungan;
   a) Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2022 HALAMAN 76 RENSTRA DAN LPPD

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kunjungan Wisata (Jumlah)			45.732	150.000	175.000	180.000	185.000	195.000	160.038	522.683	175.000	180.000	
2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota (Objek)			0	-1,55	-1,76	-0,65	-0,37	-0,37	1,97	24,24	-1,76	-0,65	
3	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan (Objek)			3	3	3	3	3	7	4	20	3	3	
4	Jumlah Promosi Pariwisata melalui Media Cetak dan			0	3	3	4	4	5	2	6	3	4	

	Elektronik (Event)												
5	Tingkat Hunian Akomodasi (%)			0	36,50	40,58	41,66	42,74	43,82	34,34	20,68	40,58	41,66	
6	Jumlah Kemitraan yang dijalin dalam pengembangan kepariwisataan (Jumlah)			3	4	18	18	19	19	18	20	18	18	
7	Peningkatan PDRB dari Sub Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)			8,41	8,58	8,75	8,92	9,09	9,26	1,39	1,29	8,75	8,82	
8	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (%)			0	4,05	4,12	4,29	4,46	4,46	3,71	4,74	4,12	4,29	
9	Jumlah pemuda pelopor (Orang)			5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	
10	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)			0	2,5	3	3,5	4	4	1,62	0,90	3	3,5	
11	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi			0	27	30	32,5	35	37	22,1	10,03	30	32,5	

	Kepemudaan dan Organisasi Sosial (%)													
12	Jumlah Atlit Berprestasi (Orang) tingkat provinsi dan nasional			56	56	57	58	59	60	53	56	57	58	
13	Jumlah Kegiatan Kepramukaan (Kegiatan)			0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
14	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)			0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja di Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Penentuan isu-isu menjadi bagian penting bagi penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi Isu-isu penting Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Pengelolaan objek-objek wisata belum dilakukan secara profesional dan Kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah masih perlu ditingkatkan.
2. Persebaran kunjungan wisatawan belum merata karena kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal dan aksesibilitas beberapa daya tarik wisata kurang mendukung.
3. Masih minimnya minat masyarakat untuk berolahraga.
4. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk mengembangkan Apresiasi Seni Hiburan.
5. Peran pemuda belum begitu diberikan porsi yang lebih banyak dalam pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness) :

a) Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang tenang dan didukung keramahtamahan masyarakat merupakan modal bagi Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membangun industri pariwisata;
b) Meningkatnya teknologi transportasi, termasuk penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata;
c) Kemajuan teknologi informasi memungkinkan wisatawan memperoleh akses informasi destinasi wisata di Kabupaten Tapanuli Selatan;
d) Keterbukaan dan dengan semakin matangnya proses demokrasi memberikan ruang yang lebih luas kepada seniman untuk lebih

berkreasi dan berkarya;

Kelemahan (Weakness) :

a) Masih adanya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya, sehingga di beberapa objek wisata banyak sampah yang membuat kebersihan dan keindahannya tidak enak dipandang mata;
b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum di objek wisata maupun fasilitas umum olahraga yang ada di masyarakat;

Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity)

a. Adanya dukungan dari Pimpinan dalam peningkatan kinerja dalam Pemasaran Objek Wisata
b. Peningkatan PDRB dan PAD
c. Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya;

Tantangan (Threat)

a. Tuntutan masyarakat tentang pembangunan semakin besar dan kritis
b. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Pariwisata daerah dalam hal tata Kelola Barang dan Jasa;
c. Masih kurangnya fasilitas di beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pariwisata Daerah dan tingkat

kinerja yang dicapai oleh Dinas Pariwisata Daerah, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dan mempertimbangkan asas kepatutan, serta ada beberapa target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	**3,591,501,803**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	**3,591,501,803**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	20.551.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	20.551.500	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2,289,345,104	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	2,302,154,829	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	81,028,800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas	100	81,028,800	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	271,900,326	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	271,900,326	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	804,486,673	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	804,486,673	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	124,229,400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	124,229,400	
7	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		Kunjungan Wisata Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang di Kabupaten/Kota	100	297,226,500	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		Kunjungan Wisata Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang di Kabupaten/Kota	100	1,538,310,200	
8	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata		Tersedianya Dokumen Perencanaan		423,000,000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata		Tersedianya Dokumen Perencanaan		423,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota		Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
9	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata	95	**297,226,500**	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata	95	715,310,200	
10	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		Jumlah Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak dan Elektronik Tingkat Hunian Akomodasi		**340,598,600**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		Jumlah Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak dan Elektronik Tingkat Hunian Akomodasi		**664,418,400**	
11	Pemasaran		Jumlah Pemasaran	100	**340,598,600**	Pemasaran		Jumlah Pemasaran	100	**664,418,400**	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Pariwisata			Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Pariwisata			
12	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		Kontribusi Sekor Pariwisata terhabat PHD Jumlah Objek Wisata Yang di Kembangkan (Objek) Jumlah Kemitraan yang di	100	183,453,100	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		Kontribusi Sekor Pariwisata terhabat PHD Jumlah Objek Wisata Yang di Kembangkan (Objek) Jumlah Kemitraan yang di	100	183,453,100	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jalin Dalam Pengembagan Kepariwisataan (Jumlah) Peningkatan PDRB Dari Subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)					Jalin Dalam Pengembagan Kepariwisataan (Jumlah) Peningkatan PDRB Dari Subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)			
13	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Meningkatnya Kapasitas Kelompok Sadar Pariwisata	100	183,453,100	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Meningkatnya Kapasitas Sadar Pariwisata	100	183,453,100	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tingkat Dasar					Tingkat Dasar					
14	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	75.25	**695,658,800**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	75.25	**835,595,600**	
15	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan		Tingkat Patisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi	12	136,063,400	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan		Tingkat Patisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi	12	160,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemuda dan Kepemudaan Terahadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Mandiri			Pemuda dan Kepemudaan Terahadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Mandiri			
16	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	12	559,595,600	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	12	675,595,600	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		Jumlah Atlit Berprestasi (Orang) Tingkat Provinsi dan Nasional		**1,481,180,800**	**PROGRAM KA PASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		Jumlah Atlit Berprestasi (Orang) Tingkat Provinsi dan Nasional		**2,036,730,300**	
18	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi		**202,733,400**	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi		**465,000,400**	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Prestasi Olahraga		**100,498,300**	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Prestasi Olahraga		**145,000,300**	
20	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina		**22,864,500**	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina		**121,645,000**	
21	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		**904,867,500**	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		**1,054,867,500**	
22	Pembinaan dan		Jumlah Pembinaan		**250,217,100**	Pembinaan dan		Jumlah Pembinaan		**250,217,100**	

No	Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD					Hasil Analisa Kebutuhan PENETAPAN SIPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Olahraga Rekreasi		dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Pengembangan Olahraga Rekreasi		dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
23	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Jumlah Kegiatan Kepramukaan**		**777,129,800**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Jumlah Kegiatan Kepramukaan**		**777,129,800**	
24	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan		**777,129,800**	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan		**777,129,800**	

Pada Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan diatas, terdapat beberapa perubahan penetapan SIPD diantaranya:

1. Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terjadi penambahan kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan penambahan pagu indikatif dikarenakan terdapat penambahan kegiatan tersebut. Sehingga mengakibatkan penambahan pagu dari Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD terhadap Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
2. Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata terjadi perubahan pagu indikatif dikarenakan terdapat penambahan beberapa item belanja. Sehingga mengakibatkan penambahan pagu dari Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD.
3. Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan pada Program Pemasaran Pariwisata di kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terjadi perubahan pagu indikatif dikarenakan terdapat penambahan beberapa item belanja. Sehingga mengakibatkan penambahan pagu dari Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD.
4. Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan di kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota terjadi perubahan pagu indikatif dikarenakan terdapat penambahan beberapa item belanja. Sehingga mengakibatkan penambahan pagu dari Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD.
5. Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan di kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terjadi perubahan pagu indikatif dikarenakan terdapat penambahan beberapa item belanja. Sehingga mengakibatkan penambahan pagu dari Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD.
6. Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan di kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota terjadi perubahan pagu indikatif dikarenakan terdapat penambahan beberapa item belanja. Sehingga mengakibatkan penambahan pagu dari Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD.

7. Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan di kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terjadi perubahan pagu indikatif dikarenakan terdapat penambahan beberapa item belanja. Sehingga mengakibatkan penambahan pagu dari Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD.
8. Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan di kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi terjadi perubahan pagu indikatif dikarenakan terdapat penambahan beberapa item belanja. Sehingga mengakibatkan penambahan pagu dari Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD.
9. Berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan di kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga terjadi perubahan pagu indikatif dikarenakan terdapat penambahan beberapa item belanja. Sehingga mengakibatkan penambahan pagu dari Rancangan Awal RKPD RANWAL SIPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Dinas Pariwisata Daerah tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Selatan

Dinas Pariwisata Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Desa Sibongbong Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi	1 Paket	

		Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Selatan			
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rehap Lapangan Sepak Bola Aek Badak Jae, Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi	1 Paket	
3	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Desa Sijungkang, Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi	1 Paket	
4	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Desa Pargarutan Tonga, Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi	1 Paket	
5	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prov. Sumatera Utara, Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi	1 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Perangkat Daerah yang menggambarkan Spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan, melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

Pelaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan bidang perencanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 yaitu : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transmisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Nilai Tukar Nelayan
5. Ratio Gini
6. Indeks pembangunan manusia
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus pada pengembangan objek wisata yang ada di seluruh kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pemasaran pariwisata melalui media cetak dan elektronik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai Visi dan Misi yang telah di tetapkan. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan factor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional. Sejalan dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi, maka di rumuskan tujuan:

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah dari Sektor Pariwisata ;.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepemudaan;
3. Meningkatkan Prestasi Olahraga

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan Sasaran Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Mengembangkan Kepariwisataan Daerah:
b. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan
c. Meningkatnya Prestasi Olahraga

Tabel. 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi		Target	
				2022	2023	2024	2025
1	Mengembangkan Kepariwisataan daerah	Meningkatkan Perekonomian Daerah dari Sektor Pariwisata	Peningkatan PDRB dari Sub Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	1,39	8,92	9,09
2	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	10,03	10,20	10,38	10,40
3	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Prestasi olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	56	57	58	59

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Kesatu Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Membangun yang Unggul dan Mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Takwa (IMTAQ) berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indicator kinerja sasaran pada Dinas Pariwisata Daerah masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke 2 Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Meningkatkan Perekonomian Tapanuli Selatan yang Berbasis Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan melalui Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal yang Produktif dan Berwawasan Lingkungan.

3.3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2024 melaksanakan 7 (Tujuh) program 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1

Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
			Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
			Peguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektron ik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
7	ROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Dari rekapitulasi diatas, terjadi beberapa penambahan kegiata dan sub kegiatan pada beberapa program diantaranya:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota terjadi perubahan nama sub kegiatan karena disesuaikan dengan peraturan yang terbaru yaitu Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan

Pemuda Kader Kabupaten/Kota terjadi penambahan sub kegiatan. Penambahan sub kegiatan tersebut terjadi karena sub kegiatan yang ingin dilaksanakan berbeda dengan sub sub kegiatan yang ada, dan tidak bisa disatukan dengan sub kegiatan yang sudah ada.

3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terjadi penambahan kegiatan dikarenakan adanya penambahan sub kegiatan. Kemudian sub kegiatan yang ditambahkan tidak ada yang sesuai didalam kegiatan yang ada, sehingga harus menambah sub kegiatan yang baru.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar terjadi perubahan nama sub kegiatan karena disesuaikan dengan peraturan yang terbaru yaitu Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Dinas pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN TAPAULI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA DAERAH						9,233,139,203,00							7.446.818.424,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.953.969.400,00							2.980.819.876,00	
	-	-						2.953.969.400,00							2.980.819.876,00	
1,	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	835.595.600,00						-	699.137.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	160.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	136.743.600,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				30 Orang	75.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		60.873.300,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				30 Orang	85.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		75.870.300,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	675.595.600,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	562.393.600,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				550 Orang	675.595.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		562.393.600,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	2.036.730.300,00						-	1.500.667.227,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	465.000.400,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	203.747.067,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				197 Unit	465.000.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		203.747.067,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	145.000.300,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	101.000.791,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				57 Orang	145.000.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		101.000.791,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	121.645.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	22.978.800,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				150 Orang	121.645.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		22.978.800,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	**1,054,867,500,00**			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	921.472.386,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				3 Dokumen	300.837.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		302.341.486,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	754.030.200,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		619.130.900,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	250.217.100,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	251.468.183,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				2 Laporan	200.216.700,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		201.217.783,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	50.000.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		50.250.400,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
3,	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	777.129.800,00						-	781.015.449,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	777.129.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur	-	-	781.015.449,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Pariwisata				
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	777.129.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		781.015.449,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.412.780.003,00							4.465.998.548,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-						4.412.780.003,00							4.465.998.548,00	
1,	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	1,138.310.200,00						-	298.712.600,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	-	-	-	-	-	423.000.000,00			-		-	-	423.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
							1 Lokasi	423.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		423.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	715.310.200,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	298.712.600,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	600,310,200,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		279.814.400,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota				1 Laporan	115,000,000 ,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		18.898.200 ,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
2,	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	670.418.400 ,00						-	348.493.145,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	664.418.400 ,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	348.493.145,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	97,790,000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Aek Bilah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		31.178.215,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	261,634,800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		212.870.300,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	304,993,600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		104.444.630,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
3,	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	183.453.100,00						-	184.370.365,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	183.453.100,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	184.370.365,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				40 Orang	183.453.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		184.370.365,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-	-			-	3.591.501.803,00						-	3.634.422.438,00	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	804.486.673,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	824.598.839,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.655.889,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		51.922.286,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	4.500.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		4.612.500,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	748.646.784,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		767.362.953,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	271.900.326,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	277.323.954,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.755.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		3.774.378,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	81.028.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	82.395.624,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	32.944.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		33.109.524,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.289.345.104,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	2.302.154.829,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		8.040.000,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.472.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		8.514.661,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	68.150.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		69.853.750,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.204.722.804,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		2.215.746.418,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.511.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	20.614.057,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	20.511.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		20.614.057,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	124.229.400,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	127.335.135,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	124.229.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		127.335.135,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	271.900.326,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	277.323.954,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	19.965.226,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		20.065.052,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.951.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		21.056.157,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	81.028.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	82.395.624,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	48.084.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		49.286.100,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	271.900.326,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	277.323.954,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.793.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		9.843.100,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.962.700,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		27.636.767,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.284.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		14.355.800,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	176.188.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		180.592.700,00	DINAS PARIWISATA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	804.486.673,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	824.598.839,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	684.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pengembangan destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-		701.100,00	DINAS PARIWISATA DAERAH
	JUMLAH							9,233,139,203,00							7.446.818.424,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Sipirok, 18 Desember 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ABDUL SAFTAR, S. Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197208231993031002

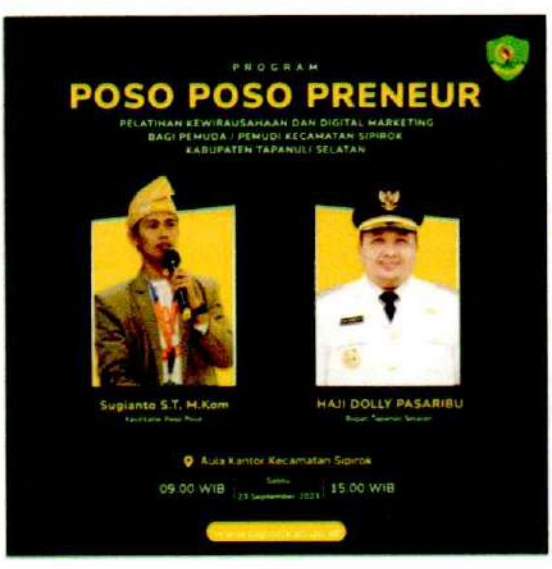
RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2025



















DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance diperlukan Rencana Kerja dimana Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Kinerja dan Penerapan Akuntabilitas. Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah satu tahapan Perencanaan yang akan menentukan arah dan dapat memberikan pengaruh terhadap aksi nyata Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sistematis, memiliki indikator kinerja, berorintasi hasil capaian Program Tujuan dan Sasaran selam 1 (satu) tahun kedepan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Rencana Kerja ini telah diupayakan disusun secara maksimal, namun demikian masih dirasakan kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dalam Penyempurnaan Rencana Kerja. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Rencana Kerja ini, semoga ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Sipirok, 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOVITA SARI WAHYUNI, S.AP, M.Si
NIP. 198411112003122004

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 26

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 28

2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 30

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah 30

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah 31

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 36

4.1 Program dan Kegiatan 36

BAB IV. PENUTUP 51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan yang ada baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kegiatan tahun 2025 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan

keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambaahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
20. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangja Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeraah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah kabupaten tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Sealatan Tahun 2016 Nomor 279);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 123 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

a. Menjabarkan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026 kedalam Rencana Program Prioritas Kegiatan tahunan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah.

b. Menciptakan sinergitas pembangunan Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 bertujuan untuk :

a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli selatan Tahun 2025.

b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

c. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja (Renja) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi.

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, serta masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2024 Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2024 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya yang bersumber dari APBD Rp. 5,439,322,721.00,- dari total anggaran tersebut yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan, alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis, secara ringkas komposisi penggunaan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai : Rp. 2.023.889.721,- Realisasi : Rp. 1.820.197.058,-
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.316.423.700,- Realisasi : Rp. 3.204.098.705,-
3. Belanja Modal : Rp. 0,00,- Realisasi : Rp. 0,00,-

Capaian kinerja tahun 2024 akan ditampilkan pada Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diurai terdiri dari kode rekening, Urusan/Bidang Urussan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan (Output), Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2024), Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2024, Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024, Target Capaian Program dan Kegiatan 2024 dan Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan. Target Renja dan Realisasi Renja 2024.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indicator dibandingkan dengan realisasinya. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara :

(1) Apabila semakin tinggi realisasi indicator menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendahnya realisasi indicator menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

(2) Apabila semakin tinggi realisasi indicator menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi indicator menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Target} - \frac{(\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategori Capaian

NO	TENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
	90 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
	76 % ≤ 90 %	Tinggi
	66 % ≤ 75 %	Sedang
	51 % ≤ 65 %	Rendah
	≤ 50 %	Sangat Rendah

Tabel 3.1 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	$\frac{REALISASI}{TARGET} \; x\,100\% = CAPAIAN$
1	Meningkatkan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Persentase pasar rakyat yang memiliki SPSM (%)	$\frac{3{,}30}{90{,}00} \; x\,100 \;=\; 3{,}67\,\%$
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri (pelaku usaha)	$\frac{85{,}00}{90{,}00} \; x\,100 \;=\; 94{,}44\,\%$
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	$\frac{107{,}94}{90{,}00} \; x\,100 \;=\; 119{,}93\,\%$
		Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang (%)	$\frac{100{,}71}{99{,}57} \; x\,100 \;=\; 101{,}1\%$
		Peningkatan jumlah UMKM Binaan (%)	$\frac{59{,}94}{90{,}00} \; x\,100 \;=\; 66{,}60\,\%$

Dari data table diatas dapat dijelaskan :

1. Sasaran Strategis ***"Meningkatkan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM"*** dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Target yang ditetapkan :
   a. "Persentase pasar rakyat yang memiliki SPSM" dengan target kinerja 90,00 terealisasi 3,30 dengan Capaian sebesar 3,67% dengan kategori Sangat Rendah.
   b. "Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri" dengan target kinerja yang ditetapkan 90,00 realisasi dengan 85,00 capaian 94,44% dengan kategori Sangat Tinggi.
   c. "Meningkatnya Koperasi yang berkualitas" dengan target kinerja 90,00 dengan realisasi 107,94dengan capaian 119,93% dengan kategori Sangat Tinggi.
   d. "Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang"dengan target kinerja 99,57 realisasi 100,71 dengan capaian 101,1% dengan kategori sangat tinggi.
   e. "Peningkatan jumlah UMKM Binaan"dengan target kinerja 90,00 realisasi 59,94 dengan capaian 66,60% dengan kategori tinggi.

1. Analisis penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

N	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2024	2024	2024
1.	Meningkatkan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Persentase pasar yang memiliki SPSM (%)	90.00	3.30	3.67

Persentase Pasar yang memiliki SPSM yaitu jumlah perdagang yang memiliki surat perjanjian sewa menyewa (SPSM) antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daerah dengan pedagang yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permaslahan tersebut diantaranya adalah :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah (daur ulang), dan terbatasnya fasilitas standarisasi pasar sehat.	Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah serta menumbuhkan kesadaran pedagang pentingnya menjaga kebersihan, pemilahan sampah serta gerakan 3R
2	Masih banyak pedagang yang tidak membayar retribusi tepat waktu	Mensosialisasikan No Cash, Go digital sebagai wadah pembayaran retribusi secara online
3	Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum.	Upaya yang dilakukan untuk melakukan penataan pedagang kaki lima ialah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dagang bagi kaki lima dan melakukan pendataan dan sosialisasi tentang ketertiban untuk tidak berjulan dilokasi yang bukan diperuntukan untuk berjualan. Serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penertiban bagi pedagang kaki lima yang berjualan diarea terlarang.
4	Dalam pencapaian target kinerja yang belum tercapai pada tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kab. Tapanuli Selatan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ditentukan.	Upaya yang dilakukan adalah mengupayakan percepatan perbaikan pengelolaan baik dari Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar dan Pengelolaan Pasar. Untuk mempercepat pencapaian target yang sudah ditetapkan pada IKU (indicator Kinerja Utama) yang tertuang di dalam Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2024	2024	2024
2.	Meningkatkan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri (pelaku usaha)	90.00	85.00	94.44

Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri yaitu Pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri adalah pertambahan Pelaku Usaha yang masuk Aplikasi Poken Tapsel, yang menerima Bantuan, yang mendapat Pelatihan, UMKM Naik Kelas dan yang mendapat Bantuan Permodalan/KUR dan Pelaku Usaha keseluruhan adalah sebanyak 106 Pelaku Usaha yang sudah didata sampai dengan Tahun 2024.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Kecil Menengah disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah	Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada UKM, pengoptimalan potensi dan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri sehingga tidak tergantung pada bahan baku impor.
2	Penerapan standarisasi produk, Pengetahuan dan pemahaman pelaku indusrti kecil terhadap pentingnya HKI merk dagang dan sistem mutu produk masih kurang.	pendampingan dan memfasilitasi dalam peningkatan daya saing mutu produk IKM melalui fasilitasi desain produk dan desain kemasan, pengurusan standarisasi produk dan fasilitasi HKI merk dagang.
3	Terbatasnya anggaran sehingga pembinaan UKM terbatas	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2024	2024	2024
3.	Meningkatkan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	90.00	107.94	119.93

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas yaitu Koperasi yang Aktif Produktif adalah Koperasi yang aktif dan memiliki RAT setiap akhir tahunnya dan dilaporkan secara berkala dan seluruh Koperasi yang ada dalam data base Dinas Perdagangan adalah sebanyak 328

Koperasi, dimana didalamnya termasuk Koperasi Aktif Produktif, Aktif Tidak Produktif, Koperasi Pasif dan Koperasi Tidak Aktif.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Keterbatasan ASN yang ahli di Bidang Koperasi	Mengadakan Kompetensi bidang koperasi
2	Kualitas Kelembagaan Koperasi masih lemah	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Daya Saing, Kemandirian Koperasi dan Kompetensi SDM Koperasi
3	Kurangnya kesadaran Pengurus dan Anggota Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Melakukan sosialisasi untuk Pengurus dan Anggota Koperasi untuk kesadaran RAT.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2024	2024	2024
4.	Meningkatkan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang (%)	99.57	100.71	101.1

Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang yaitu Data UTTP yang ditera/tera ulang Tahun ini adalah Data UTTP yang telah ditinjau ke Lapangan dan dilaporkan PADnya ke Kas Daerah dan Alat UTTP yang ditera/tera Ulang sebanyak 1.400 UTTP di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan serta sesuai MoU dengan Wilayah Madina,Wilayah Palas dan Wilayah Kota Padangsidimpuan.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak/kepentingan kosumen dalam hal ini ialah tentang kepatuhan pelaku usaha tertib ukur pada alat ukur takar timbang dan perlengakapan yang digunakan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tapanuli Selatan. Upaya untuk mewujudkan indikator ini terkait dengan tujuannya meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan peningkatan perlindungan

Terhadap konsumen, Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM melakukan upaya untuk mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kepedulian dalam ketertiban serta kepatuhan untuk selalu menjaga kepercayaan konsumen terhadap kepastian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Meskipun tidak capai target Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM antara lain :

a. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Upaya untuk menigkatkan pelindungan komsumen dan tertib ukur dilakukan melalui peningkatan operasionalisasi pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh UPTD Kemtetrologian Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. Pengawasan kemetrologian merupakan salah satu upaya mewujudkan iklim usaha yang baik dan kondusif melalui terciptanya lingkungan usaha yang tertib ukur sehingga dapat memberikan kepercayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa alat UTTP yang digunakan pelaku usaha di wilayah Kabuapten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki cap tanda tera sah yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP yang dalakukan oleh UPT Kemetrologian belum maksimal karena keterbatasan petugas yang berhak untuk melakukan tera dan tera ulang dalam hal ini, sedangkan area pelayanan begitu luas mencakup 15 kecamatan.	Berusaha memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin dengan memanfaatan sumber daya yang ada, disamping itu pula mempersiapkan untuk penambahan jumlah penera baru pada tahun-tahun yang akan datang dengan memberikan biaya diklat kemetrologian bagi calon penera baru.
2	Pelaskanaan tera/tera ulang hanya dilaksanakan pada perusahaan dan pelaksanaan tera/tera ulang dikantor	Optimalisasi pensosialisasian tentang pemahaman kemetrologian kepada pelaku usaha untuk melindungi kunsumen dalam hal takaran timbangan dan adanya dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah Daerah

N	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2024	2024	2024
5.	Meningkatkan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Peningkatan jumlah UMKM Binaan (%)	90.00	59.94	66.60

Peningkatan jumlah UMKM Binaan yaitu pertambahan dari Pelaku usaha yang dibina, dimonev dan difasilitasi dari Desa Binaan sesuai laporan OPD dan Keseluruhan untuk UMKM Binaan adalah sebanyak Pelaku Usaha yang ada pada seluruh Kelompok di Desa Binaan sesuai dengan SK Bupati Tapanuli Selatan pada Tahun berjalan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UKM adalah sebagai berikut ini :

a. Peningkatan Kerjasama dengan Bank Sumut dalam hal pemasaran Produk Unggulan UMKM Kab. Tapanuli Selatan dengan menggunakan aplikasi pemasaran e-comerce Poken Tapsel;
b. Meningkatkan Kerjasama dengan Dekranasda Kab. Tapanuli Selatan dalam pemarasan produk UMKM melalui Program Inkubasi Desain dan Menjahit bersama Bapak Wignyo Rahadi dan Tim yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia KPw Sibolga di SMK Negeri 1 Sipirok.
c. Melakukan lelang produk-produk UMKM binaan Dekranasda.
d. Mengembangkan motif-motif baru tenunan yang mampu bersaing secara nasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Kecil Menengah disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah.	Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada UKM, pengoptimalan potensi dan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri sehingga tidak tergantung pada bahan baku impor.
2	Penerapan standarisasi produk, Pengetahuan dan pemahaman pelaku indusrti kecil terhadap pentingnya HKI merk dagang dan sistem mutu produk masih kurang.	pendampingan dan memfasilitasi dalam peningkatan daya saing mutu produk IKM melalui fasilitasi desain produk dan desain kemasan, pengurusan standarisasi produk dan fasilitasi HKI merk dagang.
3	Terbatasnya anggaran sehingga pembinaan UKM terbatas	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2024 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan capaian dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah serta Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah serta Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023

saran RKPD yang akan dicapai dalam
Renja PD:
Meningkatkan sektor
perdagangan,Koperasi dan UMKM

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d.Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi- 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10 +11		13=12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	90	156,184,663	85	59,285,100	85	36,762,200	9.00	6,530,000	9.00	17,242,200	11.00	3,938,000	16.83	39,975,000	45.83	67,685,200	54%	184.12%	131	126,970,300	145%	81%	Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daeah	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	90	156,184,663	85	59,285,100	85	36,762,200	9.00	6,530,000	9.00	17,242,200	11.00	3,938,000	16.83	39,975,000	45.83	67,685,200	54%	184.12%	131	126,970,300	145%	81%		

	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan,sehatan, Kemandirian,Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (koperasi)	288	156,184,663		100	59,285,100	20	36,762,200	1	6,530,000	9	17,242,200	5	3,938,000	5	39,975,000	20	67,685,200	100%	184.12%	120	126,970,300	42%	81%		
	2.17.15	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)**	**90**	**256,581,918**				**85**	**56,270,600**	**9.00**	**-**	**9.000**	**-**	**11.000**		**16.833**	**55,161,700**	**45.83**	**55,161,700**	54%	98.03%	46	55,161,700	51%	21%		
	2.17.15.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)**	**90**	256,581,918				**85**	**56,270,600**	**9.00**	**-**	**9.000**	**-**	**11.000**		**16.833**	**55,161,700**	**45.83**	**55,161,700**	54%	98.03%	46	55,161,700	51%	21%		
	2.17.15.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (orang)	288	256,581,918				11	56,270,600		-	-	-	-	-	20	55,161,700	20	55,161,700	182%	98.03%	20	55,161,700	7%	21%		
	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Peningkatan jumlah UMKM Binaan (%)**	**90**	**186,159,431**		**0**	**2,721,374,124**	**80**	**181,412,900**	**18.75**	**33,281,000**	**8.000**	**47,420,941**	**13.001**	**34,436,800**	**26.775**	**545,703,950**	**66.551**	**660,842,691**	**83%**	**364.28%**	**67**	**3,382,216,815**	74%	1817%		
	2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Peningkatan jumlah UMKM Binaan (%)**	**90**	**186,159,431**		**0**	**2,721,374,124**	**80**	**181,412,900**	**18.75**	**33,281,000**	**8.000**	**47,420,941**	**13.001**	**34,436,800**	**26.775**	**545,703,950**	**66.551**	**660,842,691**	**83%**	364.28%	**67**	**3,382,216,815**	74%	1817%		

	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (dokumen)	50	93,079,715		50	157,095,924	3	136,566,100	-	11,500,000	-	34,403,791		34,436,800	7	536,603,950	7	616,944,541	233%	451.76%	50	774,040,465	100%	832%				
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (unit usaha)	7800	93,079,716			2,564,278,200	22	44,846,800	6	21,781,000	6	13,017,150		-	13	9,100,000	25	43,898,150	114%	97.88%	25	2,608,176,350	0%	2802%				
	2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Peningkatan jumlah UMKM Binaan (%)**	**90**	**1,146,645,788**		**0**	**919,779,880**	**80**	**897,059,711**	**18.75**	**36,871,964**	**8.000**	**129,488,484**	**13.01**	**149,854,388**	**26.75**	**1,303,839,232**	**66.51**	**1,620,054,068**	**83%**	**180.60%**	**67**	**2,539,833,948**	74%	222%				
	2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Peningkatan jumlah UMKM Binaan (%)**	**90**	**1,146,645,788**		**0**	**919,779,880**	**80**	**897,059,711**	**18.75**	**36,871,964**	**8.000**	**129,488,484**	**13.01**	**149,854,388**	**26.75**	**1,303,839,232**	**66.51**	**1,620,054,068**	**83%**	**180.60%**	**67**	**2,539,833,948**	74%	222%				
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,SDM, serta Desain danTeknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (unit usaha)	7500	1,146,645,788		3	919,779,880	788	897,059,711	50	36,871,964	200	129,488,484	238	149,854,388	300	1,303,839,232	788	1,620,054,068	100%	180.60%	791	2,539,833,948	11%	222%				
	3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**15,427,226,257**		**100**	**5,789,788,915**	**100**	**4,471,430,965**	**25**	**720,462,963**	**25**	**1,001,808,555**	**25**	**1,060,365,693**	**25**	**2,204,124,339**	**100**	**4,986,761,550**	**100%**	**111.52%**	**100**	**10,776,550,465**	100%	70%				
	3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan (dokumen)**	**100**	**268,082,350**		**100**	**140,906,600**	**100**	**94,372,900**	**25**	**45,305,000**	**25**	**6,600,000**	**25**	**17,184,600**	**25**	**21,220,000**	**100**	**90,309,600**	**100%**	**95.69%**	**100**	**231,216,200**	100%	86%				

	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	6	134,041,175		6	67,612,600	6	67,223,400	0	30,565,000	3	-	3	13,034,600		21,220,000	6	64,819,600	100%	96.42%	6	132,432,200	100%	99%		
	3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	4	134,041,175		10	73,294,000	4	27,149,500	2	14,740,000	0	6,600,000	-	4,150,000		-	2	25,490,000	50%	93.89%	4	98,784,000	100%	74%		
	3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)**	**100**	**10,912,534,465**		**100**	**3,857,713,898**	**100**	**2,151,741,255**	**25**	**212,589,252**	**25**	**611,960,844**	**25**	**363,230,376**	**25**	**413,629,057**	**100**	**1,601,409,529**	**100%**	**74.42%**	**100**	**5,459,123,427**	**100%**	**50%**		
	3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	21	10,912,534,465		20	3,857,713,898	21	2,151,741,255	21	212,589,252	21	611,960,844	21	363,230,376	21	413,629,057	21	1,601,409,529	100%	74.42%	21	5,459,123,427	100%	50%		
	3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinyan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)**	**100**	**67,368,561**		**100**	**66,288,100**	**100**	**89,000,000**	**25**	**-**	**25**	**39,300,000**	**25**	**-**	**25**	**79,864,000**	**100**	**119,164,000**	**100%**	**133.89%**	**100**	**185,452,100**	**100%**	**275%**		
	3 30 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	40	67,368,561		43	66,288,100	40	60,750,000	-	-	2	29,300,000	-	-	2	61,664,000	4	90,964,000	10%	149.73%	47	157,252,100	118%	233%		
	3.30.01.2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	25				18,500,000	5	28,250,000		-	2	10,000,000	-	-	5	18,200,000	7	28,200,000	0%	99.82%	7	28,200,000	5%	42%		
	3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat**	**Pemenuhan administras**	**100**	**1,295,409,**		**10**	**703,1**	**100**	**498,827,0**	**25**	**12**	**25**	**123**	**25**	**132,**	**2**	**352**	**1**	**731,8**	**10**	**146.71%**	**1**	**1,434,**	**10**	**11**		

		Daerah	**i umum perkantoran Dinas (%)**		**225**		**0**	**45,287**		**00**		**4,300,178**		**,280,144**		**126,342**	**5**	**,112,303**	**00**	**18,967**	**0%**		**00**	**964,254**	**0%**	**1%**		
	3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12			12	15,441,500	12	5,794,600	3	-	3	-	3	-	3	5,776,600	12	5,776,600	100%	99.69%	12	21,218,100	100%	2%		
	3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12			0	1,459,000	12	12,837,000	3	-	3	-	3	-	3	79,600,000	12	79,600,000	100%	620.08%	12	81,059,000	100%	6%		
	3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	12			12	19,125,700	12	16,429,000	3	8,542,200	3	-	3	-	3	11,450,000	12	19,992,200	100%	121.69%	12	39,117,900	100%	3%		
	3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12			12	49,417,800	12	30,776,800	3	14,622,800	3	7,524,000	3	-	3	12,345,500	12	34,492,300	100%	112.07%	12	83,910,100	100%	6%		
	3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12			12	71,625,800	12	36,398,400	3	6,820,000	3	7,280,000	3	-	3	21,717,600	12	35,817,600	100%	98.40%	12	107,443,400	100%	8%		
	3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	22				36,270,000	22	20,000,000	20	-	20	4,455,000	20	4,455,000	20	8,910,000	20	17,820,000	91%	89.10%	20	54,090,000	91%	4%		
	3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1200			324	509,805,487	256	376,591,200	10	94,315	155	104,021,1	70	127,671,342	238	212,312,6	473	538,320,267	185%	142.95%	797	1,048,125,754	66%	81%		

			Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)									,178		44				03										
			perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	1200			63		66		12		71		180		318		595	-	902%	0.00%	658	-	55%	0%		
	3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan barang milik daerah (%)**	**100**	**219,259,895**		**100**	**99,805,300**	**100**	**664,000,000**	**25**	**196,200,000**	**25**	**-**	**25**	**361,840,000**	**25**	**968,612,000**	**100**	**1,526,652,000**	**100%**	**229.92%**	**100**	**1,626,457,300**	**100%**	**742%**		
	3 30 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kenderaan Dinas (unit)														1	464,900,000	1	464,900,000								
	3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan CCTV (unit)	1			1	6,000,000	1	-	-	-		-					-	-	0%		1	6,000,000	100%	3%		
	3 30 01 2.07 07	Pengadaan Aset TetapLainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)	3			3	93,805,300	3	664,000,000	-	196,200,000	1	-	1	361,840,000		503,712,000	2	1,061,752,000	67%	159.90%	3	1,155,557,300	100%	527%		
	3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)**	**100**	**1,872,942,734**		**100**	**856,225,378**	**100**	**824,225,710**	**25**	**107,671,633**	**25**	**185,402,567**	**25**	**150,937,475**	**25**	**321,311,884**	**100**	**765,323,559**	**100%**	**92.85%**	**100**	**1,621,548,937**	**100%**	**87%**		
	3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12			12	93,860,528	12	57,357,080	3	12,895,603	3	11,857,522	3	11,509,430	3	11,528,714	12	47,791,269	100%	83.32%	12	141,651,797	100%	8%		
	3 30 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	12			12	33,558,400	12	160,609,950	3	-	3	4,750,000	3	-	3	55,725,000	12	60,475,000	100%	37.65%	12	94,033,400	100%	5%		

			dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)																								
	3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)					728,806,450	14	606,258,680	14	94,776,030	14	168,795,045	14	139,428,045	15	254,058,170	15	657,057,290	107%	108.38%	22	1,385,863,740	22%	74%		
	3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan jasa pemeliharaan barang milik daerah (%)**	**100**	**791,629,027**		**100**	**65,704,352**	**100**	**149,264,100**	**25**	**34,396,900**	**25**	**35,265,000**	**25**	**35,046,900**	**25**	**47,375,095**	**100**	**152,083,895**	**100%**	**101.89%**	**100**	**217,788,247**	**100%**	**28%**		
	3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1			1	65,704,352	1	149,264,100	2	34,396,900	2	35,265,000	2	35,046,900	3	47,375,095	3	152,083,895	300%	101.89%	2	217,788,247	200%	28%		
	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pasar rakyat yang memiliki SPSM (%)**	**100**	**540,466,676**			**1,809,812,717**	**80**	**608,964,280**	**0.00**	**4,671,370**	**6.24**	**170,960,055**	**14.44**	**219,655,055**	**43.74**	**2,216,574,110**	**64.42**	**2,611,860,590**	**81%**	428.90%	**64**	**4,421,673,307**	64%	818%		
	3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase pasar rakyat yang memiliki SPSM (%)**	**100**	**272,781,150**			**1,343,411,825**	**80**	**100,000,000**	**0.00**	**-**	**6.24**	**-**	**14.44**	**99,800,000**	**43.74**	**1,222,154,400**	**64.42**	**1,321,954,400**	**81%**	1321.95%	**64**	**2,665,366,225**	64%	977%		
	3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (unit)	23	272,781,150		23	1,343,411,825	23	100,000,000	0.00	-	0	-	1	99,800,000	8	1,222,154,400	9	1,321,954,400	39%	1321.95%	17	2,665,366,225	74%	977%		
	3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di**	**Persentase pasar rakyat yang memiliki SPSM (%)**	**100**	**267,685,526**			**466,400,892**	**80**	**508,964,280**	**0.00**	**4,671,370**	**6.24**	**170,960,055**	**14.44**	**119,855,055**	**43.74**	**994,419,710**	**64.42**	**1,289,906,190**	**81%**	**253.44%**	**64**	**1,756,307,082**	64%	656%		

		Wilayah Kerjanya																									
	3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (dokumen)	23	267,685,526		23	466,400,892	23	508,964,280	21	4,671,370	21	170,960,055	21	119,855,055	21	994,419,710	21	1,289,906,190	91%	253.44%	23	1,756,307,082	100%	656%		
	3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri (pelaku usaha)**	**100**	**261,132,256**			**135,324,600**	**80**	**129,778,400**	**0.00**	**19,803,000**	**6.24**	**48,220,000**	**14.44**	**9,540,000**	**43.74**	**223,980,800**	**64.42**	**301,543,800**	**81%**	**232.35%**	**64**	**436,868,400**	64%	167%		
	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kot**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri (pelaku usaha)**	**100**	**209,258,480**			**104,378,800**	**80**	**107,031,600**	**0.00**	**19,069,000**	**6.24**	**42,070,000**	**14.44**	**2,700,000**	**43.74**	**216,530,800**	**64.42**	**280,369,800**	**81%**	**261.95%**	**64**	**384,748,600**	64%	184%		
	3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/K	23	209,258,480			104,378,800	3	107,031,600	3.00	19,069,000	3	42,070,000	3	2,700,000	3	216,530,800	3	280,369,800	100%	261.95%	3	384,748,600	13%	184%		

			ota (laporan)																								
	3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri (pelaku usaha)**	**100**	**51,873,776**			**30,945,800**	**80**	**22,746,800**	**0.00**	**734,000**	**6.24**	**6,150,000**	**14.44**	**6,840,000**	**43.74**	**7,450,000**	**64.42**	**21,174,000**	**81%**	**93.09%**	**64**	**52,119,800**	**64%**	**100%**		
	3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyalurandan Penggunaan Pupukdan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (laporan)	23	51,873,776			30,945,800	3	22,746,800	3	734,000	3	6,150,000	3	6,840,000	3	7,450,000	3	21,174,000	100%	93.09%	3	52,119,800	13%	100%		
	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang (%)**	**99.67**	**936,956,588**			**440,535,780**	**99.13**	**479,000,000**	**16.50**	**44,033,727**	**17.13**	**79,555,320**	**16.94**	**54,454,220**	**89.72**	**317,620,582**	**140.29**	**495,663,849**	**142%**	**103.48%**	**140**	**936,199,629**	**141%**	**100%**		
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang (%)**	**99.67**	**936,956,588**			**440,535,780**	**99.13**	**479,000,000**	**16.5**	**44,033,727**	**17.13**	**79,555,320**	**16.94**	**54,454,220**	**89.72**	**317,620,582**	**140.29**	**495,663,849**	**142%**	**103.48%**	**140**	**936,199,629**	**141%**	**100%**		
	3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapa	1400	936,956,588			440,535,780	1,400	479,000,000	231	44,033,727	417	79,555,320	60	54,454,220	1,256	317,620,582	1,964	495,663,849	140%	103.48%	1,964	936,199,629	140%	100%		

			n Ditera Ulang (unit)																								
	3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri (pelaku usaha)**	**100**	**1,658,344,000**			**1,321,232,463**	**85**	**779,895,200**	**20.00**	**71,945,113**	**26.000**	**154,569,530**	**15.00**	**230,368,290**	**17.000**	**799,767,342**	**78.000**	**1,256,650,275**	**92%**	**161.13%**	**78**	**2,577,882,738**	**78%**	**155%**		
	3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri (pelaku usaha)**	**100**	**1,658,344,000**			**1,321,232,463**	**85**	**779,895,200**	**20.00**	**71,945,113**	**26.000**	**154,569,530**	**15.00**	**230,368,290**	**17.000**	**799,767,342**	**78.000**	**1,256,650,275**	**92%**	**161.13%**	**78**	**2,577,882,738**	**78%**	**155%**		
	3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	2				1,257,463,863	5	652,762,000	-	71,945,113	2	123,219,530	1	197,435,290	2	595,845,342	5	988,445,275	100%	151.43%	5	2,245,909,138	250%	135%		
			Operasional Dekranasda (tahun)	12					12		3		3		3		3		12	-	100%	0.00%	12	-	100%	100%		
	4 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri diTingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan	1			1	58,343,600	1	91,133,200	-	-	1	31,350,000	1	8,933,000		165,922,000	1	206,205,000	100%	226.27%	1	264,548,600	100%	16%		

			dan Jasa Akomodasi (UMKM)																									
	5 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (dokumen)	1			1	5,425,000	1	36,000,000	-	-	0	-	1	24,000,000		38,000,000	1	62,000,000	100%	172.22%	1	67,425,000	100%	4%		
Rata-rata capaian kinerja (%)					**20,313,115,659**			**13,197,133,579**		**7,640,574,256**	-	**937,599,137**		**1,649,265,085**		**1,762,612,446**		**7,651,585,355**	**-**	**12,056,223,723**		56.92		**25,253,357,302**				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat daerah (OPD)

Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ada beberapa indicator yang tidak tercapai pada tahun 2024 dengan target capaian yang ditetapkan. Peningkatan sektor perdagangan diupayakan pula melalui peningkatan pemasaran produk daerah meliputi dengan membawa produk daerah ke Event – event Pameran dalam dan luar daerah serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil menengah. Peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menengah diupayakan pula melalui meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi serta melaksanakan pembinaan koperasi tidak aktif menjadi aktif. Agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, diupayakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat memacu optimalisasi pendapatan daerah antara lain melalui :

a. Peningkatan kinerja dan aparat pelaksana pendapatan.

b. Pemanfaatan aset-aset yang dimiliki secara efektif dan efisien.

c. Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait maupun pihak ketiga.

Pendapatan pasar hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun nilainya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah pedagang, los, kios di pasar relatif sama. Peningkatan penerimaan retribusi dari tahun ke tahun berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan dapat memperkuat posisi keuangan daerah. Selain di bidang pendapatan, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah melalui Bidang Pasar mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan pengembangan pasar, pengelolaan data pedagang pasar serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar. Pemeliharaan dan pengembangan pasar diupayakan melalui peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan pasar, yang setiap tahunnya selalu mengalami penyempurnaan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pasar selalu diinventarisir dan ditindaklanjuti dengan melengkapi fasilitas yang dianggap belum memadai. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menunjang perwujudan pasar yang representatif, sehingga keberadaan pasar tradisional tetap lestari dan tidak akan tergeser oleh toko-toko modern disamping melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah. Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Pasar (kaki lima dan asongan) merupakan agenda tetap tahunan dan sampai dengan saat ini segala permasalahan yang terkait dengan pembinaan dan penataan pedagang dapat diselesaikan dengan baik meskipun ada

beberapa hambatan yang terjadi. Permasalahan yang menyangkut kepentingan publik dalam jumlah besar memang sering dialami pada saat penempatan maupun penataan pedagang, hal tersebut masih dapat diatasi melalui upaya pendekatan secara persuasif kepada pedagang.

Untuk meningkatkan daya saing produk – produk unggulan kabupaten Tapanuli Selatan, juga dikembangkan forum – forum komunikasi dan forum diskusi antar lembaga yang berorientasi terhadap pengembangan ekonomi.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan yang di hadapi, yaitu :

1. Keterbatasan ASN yang ahli di Bidang Koperasi
3. Keterbatasan sarana dan prasarana kemetrologian
4. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan Label Halal
5. Persaingan pasar global yang makin ketat sehingga perlu peningkatan promosi baik dalam maupun luar negeri
6. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM
7. Keterbatasan anggaran berdampak pada kurang optimalnya fasilitasi dan penataan PKL

Dengan adanya permasalahan yang ada di Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kebupaten Tapanuli Selatan, maka bisa berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah yang sudah ditentukan. Karena dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut diperlukan kerja keras dan juga biaya yang sangat banyak, sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim. Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi sebagai tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan.

Beberapa usaha untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi diantaranya :

1. Terus berusaha meningkatkan pemasaran produk unggulan
2. Menambah tenaga Penera di UPT Kemetrologian
3. Meningkatkan kualitas pelaku Usaha UMKM
4. Peningkatan jumlah pasar dalam kondisi baik
5. Penataan PKL dengan baik

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Peran dan posisi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Kabupaten TapanuliSelatan

mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha kecil Menengah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perdagangan dan UMKM masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, pengelolaan usaha, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan tantangan khususnya dalam upaya memenangkan kompetisi menghadapi percaturan ekonomi global pada umumnya. Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya UMKM dan perdagangan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Beberapa usaha yang punya potensi untuk ditingkatkan dalam pangsa pasar nasional dan internasional mempunyai daya saing tinggi, sifat kekhasan daerah, kualitas produk dan kualitas yang baik diantaranya : Tenun dan manik – manik Khas Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan mengusulkan beberapa Program Kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan

Program Kegiatan diperlukan dana dari APBD melalui Renja Tahun 2025. Tapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia dari usulan yang ada dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan antara Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, disamping berpedoman pada Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 - 2026, juga mengakomodasi usulan dari para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat. Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke OPD sesuai tupoksi. Dari situ kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup OPD untuk ditindaklanjuti dalam draft renja OPD pada tahun yang akan datang. Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program atau kegiatan usulan dari masrayarakat, mulai dari ketersediaan anggaran, sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pembinaan dan bantuan peralatan.

2.5 Tabel Usulan Masyarakat

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
	Pengembangan Usaha Mikro				
	Pelatihan Pengembangan UMKM	Desa Situmbaga, Kab. Tapanuli Selatan	20 UMKM	75,000,000	
	Pelatihan Pengembangan UMKM	Pasir Matogu, Kab. Tapanuli Selatan	20 UMKM	50,000,000	
	Pelatihan Pengembangan UMKM	Perkebunan Marpinggan	20 UMKM	45,000,000	
	Pelatihan Pengembangan UMKM	Desa Sialogo, Kab. Tapanuli Selatan	20 UMKM	45,000,000	
	Pelatihan Pengembangan UMKM	Desa Panobasan Lombang , Kab. Tapanuli Selatan	20 UMKM	75,000,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah:

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU cipta lapangan kerja. Kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai

tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 2 (dua) yaitu "**Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, dan berwawasan lingkungan"**. Misi ini diarahkan untuk Meningkatkan pertumbuhan pendapatan masyarakat dan Meningkatnya jumlah penduduk diatas garis kemiskinan dan menurunnya tingkkat pengangguran terbuka serta pemerintahan yang baik dan pelayanan umum.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

1. Terwujudnya perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang Produktif dan berwawasan lingkungan.
2. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran untuk mencapai indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Relasisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Meningkatkan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Meningkatkan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Persentase Pasar Rakyat yang memiliki SPSM (%)	10,55	64,42	3.30	90,00
			Persentase Pelaku Usaha Yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri (%)	55,96	78,00	85.00	90,00
			Meningkatnya koprasi yang berkualitas (%)	67,01	45,83	107.94	90,00
			Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang (%)	105,79	140,29	100.71	99,67
			Peningkatan jumlah UMKM Binaan (%)	53,85	66,51	59.94	90,00

Dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 telah menetapkan Rencana Program dan Kegiatan sebanyak 9 (sembilan) program dengan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu waktu 1 (satu) tahun dan telah disetujui dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan , adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

3.3 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

No.	PROGRAM	No.	KEGIATAN	No.	SUB KEGIATAN
1.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	1.	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	2.	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	2.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasis
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	3.	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	3.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				4.	Pemulihan Usaha Mikro
				5.	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	4.	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	6.	Pengembangan Usaha Mikro
5.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	7.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		6.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	9.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No.	PROGRAM	No.	KEGIATAN	No.	SUB KEGIATAN
		7.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	10.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		8.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				16.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		9.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	19.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		10.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				21.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No.	PROGRAM	No.	KEGIATAN	No.	SUB KEGIATAN
		11.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	12.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	24.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		13.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	25.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
7.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	14.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	26.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
		15.	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	27.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
8.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	16.	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	28.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
9.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	17.	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	29.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				30.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT PD

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada dasarnya kegiatan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat dilihat dalam table 4.1 di bawah ini :

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		CATATAN
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH			**5,662,546,198.00**				**5,899,500,000.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**543.919.000,00**				**631,500,000.00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**543.919.000,00**				**631,500,000.00**	
1.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Meningkatnya koprasi yang berkualitas (%)**	**90,00**	**36.275.000,00**			**-**	**35,000,000.00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	36.275.000,00		-	-	35,000,000.00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	36.275.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		35,000,000.00	
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Meningkatnya koprasi yang berkualitas (%)**	**90,00**	**141.621.500,00**			**-**	**55,000,000.00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**CATATAN**
				TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**SUMBER DANA**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	141.621.500,00		-	-	55,000,000.00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	10 Orang	141.621.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55,000,000.00	
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pelaku Usaha Yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam negeri (%)**	**90,00**	**235.499.400,00**			**-**	**291,500,000.00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	235.499.400,00		-	-	291,500,000.00	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**CATATAN**
				TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**SUMBER DANA**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	169.570.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		160,000,000.00	
	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro								
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	41.928.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		105,000,000.00	
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik								
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1 Unit Usaha	24.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		26,500,000.00	
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Pelaku Usaha Yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk dalam**	**90,00**	**130.523.100,00**			**-**	**250,000,000.00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**CATATAN**
				TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**SUMBER DANA**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			negeri (%)							
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	130.523.100,00		-	-	250,000,000.00	
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro								
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	130.523.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		250,000,000.00	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**4.804.886.010,00**				**5.268.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**4.804.886.010,00**				**5.268.000.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)***	**100,00**	**3.284.918.750,00**			**-**	**3.273.000.000,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	58.208.800,00		-	-	60,000,000.00	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**CATATAN**
				TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**SUMBER DANA**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	34.909.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		35.000.000,00	
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	23.299.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		25.000.000,00	
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.042.172.010,00		-	-	1,800,000,000.00	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.042.172.010,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		1,800,000,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		CATATAN
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	54.600.000,00		-	-	43,000,000.00	
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	24.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		23.000.000,00	
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		20.000.000,00	
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	351.554.000,00		-	-	374.000.000,00	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.072.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-		6,000,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		CATATAN
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						UMUM				
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11,000,000.00	
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.117.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		21.000.000,00	
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.881.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		32.000.000,00	
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		CATATAN
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.358.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		22,000,000.00	
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	20,000,000.00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		22, 000,000.00	
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480 Laporan	251.025.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		260,000,000.00	
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.753.356,00		-	-	110,000,000.00	
	3.30.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.753.356,00	DANA TRANSFER UMUM-	-		110,000,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**CATATAN**
				TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**SUMBER DANA**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						DANA ALOKASI UMUM				
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	699.710.584,00		-	-	801.000.000,00	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	67.771.904,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		70.000.000,00	
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		11,000,000.00	
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	617.338.680,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		720.000.000,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		CATATAN
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	74.920.000,00		-	-	85,000,000.00	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	74.920.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		85,000,000.00	
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pasar Rakyat yang memiliki SPSM (%)**	**90,00**	**700.447.580,00**			**-**	**970,000,000.00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	181.405.880,00		-	-	320,000,000.00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	181.405.880,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		320,000,000.00	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di	-	-	519.041.700,00		-	-	650,000,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**CATATAN**
				TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**SUMBER DANA**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wilayah Kerjanya								
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	519.041.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		650,000,000.00	
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Pasar Rakyat yang memiliki SPSM (%)**	**90,00**	**120.775.000,00**			**-**	**165,000,000.00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	98.800.500,00		-	-	110,000,000.00	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	1 Laporan	98.800.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		110,000,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**CATATAN**
				TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**SUMBER DANA**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kabupaten/Kota							
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	21.974.500,00		-	-	55,000,000.00	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	21.974.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55,000,000.00	
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang (%)**	**99,67**	**315.273.780,00**			**-**	**320,000,000.00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	315.273.780,00		-	-	320,000,000.00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**			**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**CATATAN**
				TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**SUMBER DANA**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3200 Unit	315.273.780,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		320,000,000.00	
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Peningkatan jumlah UMKM Binaan (%)**	**90,00**	**383.470.900,00**			**-**	**540,000,000.00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	383.470.900,00		-	-	540,000,000.00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	52 UMKM	291.703.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		420,000,000.00	
	3.30.07.2.01.0006									
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui	3 UMKM	91.767.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-		120,000,000.00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN TAHUN 2025										
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		CATATAN
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			UMUM				
				J U M L A H	**5.348.805.010,00**				**5,899,500,000.00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 ini merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan bidang perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi serta skala prioritas Program/Kegiatan yang akan dilakukan.

Rencana Kerja ini tergantung kepada sikap mental , tekad, semangat, ketaatan dan disiplin segenap jajaran Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Lembaga/Instansi terkait bersama-sama secara terpadu dalam Pelaksanaan Pembuatan Rencana Kerja tersebut serta didukung pendanaan yang memadai agar mampu memberikan hasil pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mudah-mudahan tujuan dan sasaran yang di inginkan akan tercapai dengan baik tanpa mengesampingkan faktor-faktor pendukung lainnya dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sipirok, 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOVIA SARI WAHYUNI, S.AP, M.Si
NIP. 198411112003122007

RENJA PERUBAHAN 2025





DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN JL. LAFRAN PANE-SIPIROK
KODE POS 22742Telepon (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035
E-mail ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 821.29/073/DPMPTSP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meninjaklanjuti pasal 16 ayat (2) nomor 86 Tahun 2017 tentang Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksana forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 115);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278);

12. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016 Nomor 279);

13. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);

14. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017 Nomor 291, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 21);

15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);

16. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 754);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Penyiapan data-data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah;

b. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai tahapan dan tata cara;

c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

KETIGA : Sekretariat Tim Penyusunan berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok

Pada tanggal 20 SEPTEMBER 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,



DANI ISKANDAR HARAHAP, SE
PEMBINA
NIP. 19791020 200212 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 821.29/073/DPMPTSP/2025
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2025
TENTANG : SK TIM PENYUNUNAN RENJA 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

I.	Penanggungjawab	: Dani Iskandar Harahap, S.E
II.	Ketua Tim	: Padot, S.Sos
III.	Sekretaris Tim	: Rosmadewi Siregar, S.Sos
IV.	Kelompok kerja	:
	Pokja I (Evaluasi Renja)	1. Faisal Candra Harahap 2. Asiah Hasnah Harahap 3. Muhammad Akhir
	Pokja II (Penetapan Program Kegiatan dan Pendana An Renja)	1. Zulkarnain Harahap 2. Muhammad Darbi, S.Sos 3. Fatimah Sari Siregar, S.Sos
V.	Staff Administrasi	1. Baktiar Harahap 2. Ummi Kalsum Lubis

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

DANI ISKANDAR HARAHAP, SE
PEMBINA
NIP. 19791020 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I **1**

PEBDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II **6**

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 15

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 17

BAB III **27**

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **27**

3.1 Telaah Terhadap Nasional 27

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD 28

3.3 Program dan Kegiatan 29

BAB IV **33**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **33**

BAB V **61**

PENUTUP **61**

DAFTAR TABEL

TABEL T-C. 29 7
TABEL T-C. 30 14
TABEL T-C. 31 18
TABEL 3.2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 29
TABEL 3.3.1 REKAPITULASI PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 30
TABEL RANCANGAN DAN KEGIATAN DPMPTSP 2025 DAN PERKIRAAN MAJU 2026 34

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Terlampir disampaikan kepada Bapak Bupati Tapanuli Selatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat dipergunakan dalam penyusunan Renja Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja ini telah diupayakan disusun secara maksimal, namun demikian masih dirasakan kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaan Renja. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian Rencana Kerja ini, semoga ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

SIPIROK, 20 SEPTEMBER 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

DANY ISKANDAR HARAHAP, SE
PEMBINA
NIP. 19791020 200212 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan maupun pergeseran kegiatan maupun anggaran DPMPTSP untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029, hasil evaluasi hasil Renja Tahun 2024, dan Rencana Kerja APBDPerangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses Penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6944);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2045 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Lokasi Kawasan Perkotaan Batang Toru

Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 308);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-20245 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 332, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 52).
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penentapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1041);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. Sebagai pedoman penyusunan RKA DPMPTSP Tahun 2025;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Perubahan Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-1 = Tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n = Tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024, alokasi anggaran Belanja untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 5.318.853.074,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 5.318.853.074,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 7.000.000,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, realisasi Belanja sampe per bulan Agutus adalah sebesar Rp. 2.183.476.298,- dari anggaran Rp. 4.662.548.673 atau sebesar 49.68%.

Tabel T.C. 2.9

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan sampai tahun N-3 Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100,00**		**100,00**			**100,00**		**100,00**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)**	**100,00**	**100.00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**30,00**	**30,00**
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	35,00	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	2,00	60,00
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**50,00**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	3,00	30,00

2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	0,00	0,00
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**30,00**	**30,00**
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	0,00	0,00
2	18	01	2.05	09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40,00	6,00	7,00	7,00	100,00	8,00	7,00	87,50
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya biaya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**30,00**	**30,00**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	50,00
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	60,00
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	40,00

2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	50,00
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (terbitan)	50,00	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	50,00
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	50,00
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60,00**	**60,00**
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1000,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	50,00
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60,00	12,00	12, 00	12,00	100,00	12,00	3,00	31.20
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	83,00	16,00	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	50,00
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60,00**	**60,00**
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	2,00	40,00
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Buku Direktori Perusahaan (%)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3,00**	**30,00**

2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yng menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Buku Direktori Perusahaan (%)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60,00**	**60,00**
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Kegiatan Usaha)	5,00	1,00	2,00	2,00	100,00	5,00	3,00	60,00
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal (%)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60,00**	**60,00**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal (%)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60,00**	**60,00**
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	15,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3.00	0,00	0,00

2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60,00**	**60,00**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya laporan kinerja (%)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**60,00**	**60,00**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	75,00	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00	5,00	33,00
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	3,00	1,00	3,00	3,00	100,00	3,00	0,00	0,00
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investasi PMA/PMDN (Milyar)**	**3079,52**	**2103,35**	**2313,69**	**7087,34**	**306,33**	**2545,06**	**0,00**	**0,00**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

2	18	05	2.01	04	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha yang merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	18	05	2.01	05	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (pelaku usaha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	18	05	2.01	06	Pengawasan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil danInformasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perizinan Dan Penanaman Modal;
3. Pelaksanaan dan Pemberian teknis dibidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perizinan dan Penanaman Modal;
5. Penyelenggaraan administrasi dan pengawasan proses pemberian rekomendasi serta pelayanan bidang Perizinan dan Penanaman Modal;
6. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
7. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai Tujuan Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Bidang Penanaman Modal dengan Sasaran Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang perizinan dan meningkatnya pertumbuhan investasi dengan Indikator Utama yaitu :

1. Persentase Peningkatan Investasi (%)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFENISI OPERASIONAL	TARGET 2025	FORMULASI
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	Nilai Pertumbuhan Investasi Daerah Merujuk Pada Cara Mengukur/Mengidentifikasi Peningkatan Investasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam periode tertentu.	5,00	**Nilai realisasi tahun N – Nilai Realisasi Investasi N-1 x 100%** **Nilai Realisasi Investasi tahun N-1**

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2024	2025	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15
1	Persentase peningkatan Investasi	%		5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	-3.50	0,00	0,00	0,00	

Berdasarkan dari tabel diatas pengukuran kinerja dari indikator kinerja yaitu persentase peningkatan investasi dengan target 5,00 bila dilihat dari keadaan capaian tahun 2024 sebesar -3,50 di karenakan masih rendahnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan kegiatan penanaman modal dan tidak adanya investasi baru pada tahun 2024 sehingga nilai investasi yang diperoleh dari nilai tersebut merupakan nilai produksi daripada laporan investor melalui LKPM Online yang telah menanamkan modalnya di kabupaten tapanuli selatan.

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Regulasi dan Kebijakan Investasi
    - Ketidakpastian regulasi yang sering berubah, baik di tingkat pusat maupun didaerah
    - Harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional seperti UU Cipta Kerja
    - Inplementasi *Online Single Submission* (OSS) yang belum Optimal
2. Pelayanan Perizinan yang Efektif dan Transparan
    - Proses perizinan yang masih dianggap lambat dan berbelit.
    - Kurangnya integrasi layanan berbasis digital di beberapa daerah.
    - Tingkat kepuasan investor dan masyarakat terhadap pelayanan yang bervariasi.
3. Daya Saing Iklim Investasi Daerah
    - Persaingan antar daerah dalam menarik para investor.
    - Ketersediaan Infrastruktur, lahan dan tenaga kerja yang berkompeten.
    - Promosi investasi yang belum maksimal, terutama untuk potensi unggulan daerah.
4. Sinergi Antar Lembaga dan Sektor Terkait.
    - Koordinasi yang belum optimal antara DPMPTSP dengan OPD lain
    - Sinkronasi program pusat dan daerah dalam meningkatkan investasi.
    - Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan investasi.
5. Tata Kelola dan SDM yang Profesional.
    - Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam pelayanan perizinan dan investasi.
    - Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur di DPMPTSP

- Tuntutan peningkatan layanan berbasis digital dan adaptasi teknologi.

6. Keberlanjutan dan Investasi Berwawasan lingkungan
   - Keseimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan
   - Pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari proyek investasi.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalammenjalankan berbagai program dan kegiatan.

2.3.1 Kekuatan Dan Kelemahan

2.3.1.1 Kekuatan (Strengthness) :

a. Adanya Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
b. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya;
c. Kondisi gedung perkantoran yang mendukung.

2.3.1.2 Kelemahan (Weakness) :

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
   Kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang perizinan dan Investasi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.
b. Infrastruktur Teknologi Informasi
   Keterbatasan Infrastruktur IT yang dapat menghambat implementasi system perizinan online yang efisien.
c. Sosialisasi dan Edukasi
   Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur perizinan dan investasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha yang dapat menyebabkan ketidakfahaman dan kesalahan dalam pengajuan izin.

2.3.2 Peluang dan Tantangan

2.3.2.1 Peluang (Opportunity)

a. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan Standard Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Tuntutan masyarakat bagi terselenggaranya pelayanan prima.
d. Potensi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat diminati Investor Dalam dan Luar Negeri

2.3.2.2 Tantangan (Threat)

a. Memastikan pelayanan perizinan dan non-perizinan berjalan efektif dan efisien.
b. Memastikan nilai Investasi Daerah Kabupaten tapanuli selatan meningkat dengan cara mengadopsi teknologi digital dalam proses perizinan dan kualitas sumber daya manusianya.
c. Mengubah Persepsi negatif masyarakat dalam hal Proses perizinan yang masih dianggap lambat dan berbelit dengan melaksanakan kegiatan soailaisasi dan edukasi tentang perizinan dan investasi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel TC-31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**5.358.772.410**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**4.662.548.673**	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**38.871.365**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Tersedianya Laporan Kinerja**	**100%**	**30.000.365**	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	7 Dokumen	38.871.365	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	7 Dokumen	30.000.365	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Terpenuhinya biaya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas SN**	**1 Tahun**	**2.677.489.210**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Terpenuhinya biaya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas SN**	**1 Tahun**	**3.467.079.878**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.581.877.510	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.401.487.478	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Terlaksanya HUT RI dan HUT Tapsel	2 Kali	89.037.100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Terlaksanya HUT RI dan HUT Tapsel	2 Kali	60.088.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dokumen	6.574.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dokumen	5.504.400	
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**101.120.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**51.392.000**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dina beserta Atribut Kelekapannya	100 Stel	34.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dina beserta Atribut Kelekapannya	0	0	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah ASN DPMPTSP yang mengikuti Pendidikan dan Pelantikan	10 Orang	67.120.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah ASN DPMPTSP yang mengikuti Pendidikan dan Pelantikan	10 Orang	51.392.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**486.586.800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**431.195.300**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	8.141.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	11.247.400	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	17.500.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	10.500.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya Biaya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	21.141.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya Biaya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	30.963.500	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	111.016.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	108.628.200	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	38.307.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	55.358.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah langganan surat kabar	10 Terbitan	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah langganan surat kabar	10 Terbitan	15.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar dan dalam kota	1 Tahun	275.480.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar dan dalam kota	1 Tahun	199.498.000	
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**864.744.135**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**511.491.130**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah materai yang dibutuhkan	1 Tahun	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah materai yang dibutuhkan	1 Tahun	2.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya pembayaran tagihan internet dan listrik	12 Bulan	91.557.255	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya pembayaran tagihan internet dan listrik	12 Bulan	79.000.790	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Tersedianya biaya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	770.786.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya biaya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	430.490.340	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kabupaten Tapanuli Selatan					Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan				
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**166.230.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Cakupan Pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan**	**100%**	**171.390.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	5 Unit	166.230.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	171.390.000	
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin	0,00	0,00	Pemeliharaan peralatan dan mesin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Pemeliharaan peralatan dan mesin	0,00	0,00	
3	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	0,00	0,00	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Tersedianya biaya Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	0,00	0.00	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	**Terpenuhinya biaya pengembangan iklim penanaman modal**	**100%**	**173.047.500**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Terpenuhinya biaya pengembangan iklim penanaman modal**	**100%**	**20.111.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kabupaten Tapanuli Selatan									
A	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Terpenuhinya Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	173.047.500	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Terpenuhinya Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**100%**	**20.111.000**	
1	Fasilitaskemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah buku direktori perusahaan	1 Dokumen	42.108.500	Fasilitaskemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah buku direktori perusahaan	1 Dokumen	20.111.000	
1	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	130.939.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,00	0,00	
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**411.078.000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**206.768.900**	
A	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah**	**Tersedianya biaya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi**	**100%**	**411.078.000**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Tersedianya biaya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi**	**100%**	**206.768.900**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah dokumen materi promosi	1 Dokumen	113.442.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah dokumen materi promosi	1 Dokumen	99.577.000	
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah Kegiatan pameran promosi yang diikuti	2 Even	297.636.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah Kegiatan pameran promosi yang diikuti	3 Even	107.191.900	
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**278.833.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**159.109.000**	
A	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Tersedianya biaya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**278.833.000**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**	**Tersedianya biaya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**159.109.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Operasional dan Pengendalian pelayanan perizinan	15 Kecamatan	181.112.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Operasional dan Pengendalian pelayanan perizinan	15 Kecamatan	75.717.000	
2	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasi resiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	300 pelaku usaha	97.721.000	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasi resiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	300 pelaku usaha	83.392.000	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Terpenuhinya Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal**	**100%**	**160.772.400**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Terpenuhinya Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal**	**100%**	**62.427.400**	
A	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Tersedianya biaya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**160.772.400**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	**Tersedianya biaya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**62.427.400**	
1	penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha yang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha yang	1 Kegiatan usaha	106.772.400	penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha yang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha yang merealisasikan	1 Kegiatan usaha	43.104.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	merealisasikan kegiatan usahanya		merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)			merealisasikan kegiatan usahanya		kegiatan usahanya (kegiatan usaha)			
2	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (pelaku usaha)	1 pelaku usaha	24.323.400	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (pelaku usaha)	1 pelaku usaha	9.753.400	
3	Pengawasan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil danInformasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	1 Kegiatan usaha	29.560.000	Pengawasan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil danInformasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	1 Kegiatan usaha	9.570.000	
					5.358.772.410					**5.110.964.973**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masingmasing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)
   b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
   c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal
   d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
   e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
   f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
   g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020 – 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal
c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar
e. Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya tujuan dan sasaran pada Bidang Perizinan dan Penanaman Modal yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

a. Mewujudkan pelayanan prima di bidang Perizinan dan Non perizinan.
b. Mewujudkan realisasi investasi penanaman modal yang berkualitas.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendekdari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya saing investasi daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel. 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	
			2025	2026
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	5.00	5.50

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.2.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Ke-2 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni "Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal dan produktif dan berwawasan lingkungan", berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke- 2 Kabupaten Tapanuli Selatan;
b. Minimnya SDM dalam hal pelayanan baik kualitas maupun kualitas ASN;
c. Fasilitas pendukung belum memadai (jaringan internet tidak stabil);
d. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;
e. Kurangnya koordinasi Dinas terkait dalam hal pemberian rekomendasi;
f. Adanya persepsi masyrakat dalam hal pengurusan izin yang sulit dan bertele-tele.

3.2.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1

Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
01.2.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
01.2.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
No	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
1	**2**	**3**	**4**
01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		
02.2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	

02.2.01.0001			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
02.2.01.0003			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		
No	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
1	**2**	**3**	**4**
03.2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
03.2.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
03.2.01.0003			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		
04.2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
04.2.01.0006			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
04.2.01.0007			Penyediaan dan pengelola layanan konsultasi perizianan berusaha berbasis resiko
05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		
05.2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	

05.2.01.0004			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
05.2.01.0005			Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
05.2.01.0006			Pengawasan Penanaman Modal

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2019. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TAPANULI SELATAN

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH							**5.358.772.410,00**	**5.110.964.973,00**	**4.946.206.124,00**	**-412.566.286,00**							**5.345.447.341,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.358.772.410,00**	**5.110.964.973,00**	**4.946.206.124,00**	**-412.566.286,00**							**5.345.447.341,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5.358.772.410,00**	**5.110.964.973,00**	**4.946.206.124,00**	**-412.566.286,00**							**5.345.447.341,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan ,Pembangunan dan Kemasyarakat**				**100%**	**100%**	**4.335.041.510,00**	**4.662.548.673,00**	**4.662.575.224,00**	**61.464.730,00**							**4.396.506.240,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Biaya Laporan Kinerja SKPD*				100.%	100%	38.871.365,00	30.000.365,00	28.733.199,00	-10.138.166,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	DPMPTSP		38.896.515,00	dpmptsp
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	38.871.365,00	30.000.365,00	28.733.199,00	-10.138.166,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			38.896.515,00	dpmptsp
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Biaya Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Biaya Administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.677.489.210,00	3.467.079.878,00	3.619.206.595,00	941.717.385,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	DPMPTSP		2.677.778.053,00	dpmptsp
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.581.877.510,00	3.401.487.478,00	3.567.558.295,00	985.680.785,00	Tapsel	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah /Bumd Dana Alokasi Umum (Dau) Dau Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			2.580.173.760,00	dpmptsp
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dok	2 Dok	89.037.100,00	60.088.000,00	46.588.000,00	-42.449.100,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			91.035.010,00	dpmpts

															koperasi.					
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lap	1 Lap	6.574.600,00	5.504.400,00	5.060.300,00	-1.514.300,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			6.569.283,00	dpmpts
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Biaya Administrasi Kepegawaian Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				100%	100%	101.120.000,00	51.392.000,00	25.696.000,00	-75.424.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	DPMPTSP		98.423.670,00	dpmpts

															di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			38.190.000,00	dpmptsp
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	67.120.000,00	51.392.000,00	25.696.000,00	-41.424.000,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromarit	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			60.233.670,00	dpmptsp

															im industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Biaya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100%	100%	486.586.800,00	431.195.300,00	306.058.300,00	-180.528.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromarit im industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	DPM PTSP		488.870.090,00	dpmptsp
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.141.500,00	11.247.400,00	11.247.400,00	3.105.900,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			8.184.519,00	dpmptsp

															serta mengembangkan agromarit im industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-7.000.000,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromarit im industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			7.035.000,00	dpmptsp
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.141.400,00	30.963.500,00	30.963.500,00	9.822.100,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			21.037.565,00	dpmptsp

															serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	111.016.600,00	108.628.200,00	86.693.600,00	-24.323.000,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			111.283.248,00	dpmptsp
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.307.300,00	55.358.200,00	46.121.800,00	7.814.500,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			41.859.858,00	dpmptsp
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dok	15 Dok	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirau	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis			15.075.000,00	dpmptsp

															sahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Sumber Daya Alam (SDA)				
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Lap	2 Lap	275.480.000,00	199.498.000,00	105.532.000,00	-169.948.000,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			284.394.900,00	dpmptsp

	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Biaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	864.744.135,00	511.491.130,00	511.491.130,00	-353.253.005,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	DPMPTSP		896.528.742,00	dpmptsp
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Lap	200 Lap	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-400.000,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			2.010.000,00	dpmptsp

															produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lap	12 Lap	91.557.255,00	79.000.790,00	79.000.790,00	-12.556.465,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			119.877.928,00	dpmptsp
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				27 Lap	27 Lap	770.786.880,00	430.490.340,00	430.490.340,00	-340.296.540,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			774.640.814,00	dpmptsp
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersediaanya biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	166.230.000,00	171.390.000,00	171.390.000,00	5.160.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	DPMPTSP		196.009.170,00	dpmptsp

															melalui peran aktif koperasi.					
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	166.230.000,00	171.390.000,00	171.390.000,00	5.160.000,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			190.849.500,00	dpmptsp
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Tapsel	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)			5.159.670,00	dpmptsp

															melalui peran aktif koperasi.				
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**jumlah buku direktori perusahaan**				**1 Buku**	**1 Buku**	**173.047.500,00**	**20.111.000,00**	**0,00**	**98.817.563,00**							**271.865.063,00**	dpmptsp
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	*Tersedianya Biaya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota*				100 %	100 %	173.047.500,00	20.111.000,00	0,00	-173.047.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat	DPMPTSP		271.865.063,00	dpmptsp
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		

			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dok	1 Dok	130.939.000,00	0,00	0,00	-130.939.000,00	Tapsel	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat			229.546.020,00	dpmptsp
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dok	1 Dok	42.108.500,00	20.111.000,00	0,00	-42.108.500,00	Tapsel	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat			42.319.043,00	dpmptsp
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investasi di Kabupate**				**5%**	**5%**	**411.078.000,00**	**206.768.900,00**	**162.447.900,00**	**-168.788.479,00**							**242.289.521,00**	dpmptsp

			n/Kota Jumlah Promosi investasi melalui media cetak dan elektronik																
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	*Tersedianya Biaya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota*				100 %	100 %	411.078.000,00	206.768.900,00	162.447.900,00	-248.630.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat	DPMPTSP		242.289.521,00	dpmptsp
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dok	1 Dok	297.636.000,00	99.577.000,00	116.542.000,00	-181.094.000,00	Tapsel	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat			132.356.591,00	dpmptsp

															koperasi.					
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	EALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	RAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dok	1 Dok	113.442.000,00	107.191.900,00	45.905.900,00	-67.536.100,00	Tapsel	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat			109.932.930,00	dpmptsp
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perizinan yang yang dikeluarkan DPMPTSP Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten /Kota**				**100%**	**100%**	**278.833.000,00**	**159.109.000,00**	**74.600.000,00**	**-2.699.200,00**							**276.133.800,00**	dpmptsp

	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Tersedianya Biaya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*				100 %	100%	278.833.000,00	159.109.000,00	74.600.000,00	-204.233.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat	DPMPTSP		276.133.800,00	dpmptsp
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	181.112.000,00	75.717.000,00	40.698.000,00	-140.414.000,00	Tapsel	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat			180.670.860,00	dpmptsp
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	

			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	97.721.000,00	83.392.000,00	33.902.000,00	-63.819.000,00	Tapsel	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat			95.462.940,00	dpmptsp
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota Jumlah PMA/PMDN Nilai Investasi PMA/PMDN**				**2.799,56 10 13 (Rp Milyar) Persen Perusahaan**	**10 13 2.799,56 Persen Perusahaa n (Rp Milyar)**	**160.772.400,00**	**62.427.400,00**	**46.583.000,00**	**-2.119.683,00**							**158.652.717,00**	dpmptsp
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	*Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 % 100.00 Persen	100 %	160.772.400,00	62.427.400,00	46.583.000,00	-114.189.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat	DPMPTSP		158.652.717,00	dpmptsp

															koperasi.					
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				1 Kegiatan Usaha.	1 Kegiatan Usaha..	106.889.000,00	43.104.000,00	37.583.000,00	-69.306.000,00	Tapsel	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat			104.536.080,00	dpmptsp
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	24.323.400,00	9.753.400,00	0,00	-24.323.400,00	Tapsel	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat			24.408.837,00	dpmptsp

															mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	29.560.000,00	9.570.000,00	9.000.000,00	-20.560.000,00	Tapsel	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat			29.707.800,00	dpmptsp
	JUMLAH								**5.358.772.410,00**	**5.110.964.973,00**	**4.946.206.124,00**	**-54.531.286.778,00**							**5.345.447.341,00**	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Sipirok, 20 SEPTEMBER 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

DANY ISKANDAR HARAHAP, SE
PEMBINA
NIP. 19791020 200212 1 004

RENJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DINAS PERIKANAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok
Kode Pos 22742, Telepon. ( ) Faks. ( ) 24050
E-mail : dinasperikanantapsel@gmail.com Website : perikanan.tapselkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini dapat selesai dikerjakan. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan cerminan dari rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2026.

Dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 dapat dilihat Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Akhirnya, semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2026, sehingga pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan dapat terwujud. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sampai selesainya penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini.

Sipirok, 03 September 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

SAIFUL A. P. NASUTION, S.Pi,. MM.
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19850724 200904 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan..... 7
1.4 Sistematika Penulisan..... 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH..... 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 17
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD..... 21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....29
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional..... 29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 31
3.3 Program dan Kegiatan..... 33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 37

BAB V PENUTUP.....52

DAFTAR TABEL

Tabel **Hal**

1. Anggaran dan Realisasi Menurut Jenis Belanja pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 11
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja pada Tahun 2024 Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 12
3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 16
4. Capaian Indikator Kunci Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah 17
5. Perumusan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 19
6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 22
7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Selatan 27
8. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 32
9. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Daerah Tahun 2026 34
10. Rumusan Rencanan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan renja merupakan salah satu dokumen penting dalam Laporan Kinerja (LK) yang perlu disusun dan sebagai jembatan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Laporan Kinerja (LK).

Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2026, melalui tahapan-tahapan: (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan.

Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 serta berdasar pada RPJMD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029 dan RPJPD

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045. Selain itu, dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2045 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, karena:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), dan perencanaan program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun selanjutnya.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan perangkat paerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra.

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang kelautan dan perikanan. Kemudian untuk melaksanakan tugas Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan;
c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, tahapan penyusunan renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Proses penyusunan renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penyusunan Dokumen RKPD dan renja perangkat daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan renja perangkat daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebagai amanat tersebut, maka Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai perangkat daerah pada tahun 2026 ini menyusun rancangan awal rencana kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk menyusun rancangan awal rencana kerja tahun 2026 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 332, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 52);

28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 1260).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya dokumen renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2026. Sedangkan tujuan disusunnya dokumen rancangan awal renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain:

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029 pada periode tahun 2026.
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematikan penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang revius tehadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025, mengacu pada APBD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap rancangan awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat pehatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan target program atau kegiatan. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/terpenuhi/terlampaui;
2. Implikasi terhadap target capaian program renstra perangkat daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Evaluasi renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2024 menilai pelaksanaan renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut rencana kerja (RENJA) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun anggaran 2024 dilakukan pada 4 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Anggaran sebesar Rp. **5.932.642.627** digunakan untuk memenuhi pelaksanaan 3 (tiga) program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun penjabaran anggaran yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1 dan evaluasi hasil pelaksanaan renja dapat dilihat pada Tabel 2.

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja tahun 2024 maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Program Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	**Program**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Realisasis/d Tw IV(Rp.)**
1	Meningkatkan Kuantitas, Kualitas produksi sektor perikanan	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas produksi sektor perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.009.185.300	1.000.328.900
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	253.805.200	260.037.100
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.669.652.127	4.087.585.945
Jumlah				**5.932.642.627**	**5.347.951.945**

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi pada Tabel 2 di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan harus memperhatikan indikator output sub kegiatan yang telah tertuang di dalam dokumen renja perangkat daerah, sehingga terjadi keselaranan dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaporan.
b. Secara keseluruhan, sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah terealisasi sesuai target kinerja yang telah direncanakan.

Sebagaimana telah dijabarkan pada Tabel di atas, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026 yang perlu diambil sehingga program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

a. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal tetap harus dijaga, mengingat seringnya terjadi mutasi/pergeseran jabatan.
b. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
c. Menyusun peta kebutuhan data berdasarkan bidang urusan.
d. Menyusun aliran kas dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
e. Optimalisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan.
f. Optimalisasi pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka menjada kesinambungan dan peningkatan usaha perikanan.
g. Peningkatan sosialisasi Gemarikan dan menjaring kemitraan untuk mendukung pendanaan dan implementasi Gemarikan secara luas.
h. Koordinasi secara intensif dengan praktisi dan akademisi dalam rangka menjaring teknologi baru untuk dapat diterapkan kepada pelaku usaha perikanan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintaha, terutama pelayanan bidang teknis perikanan. Kinerja pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan agar menuju pelayanan yang prima dan cepat. Hal inilah yang menjadi target utama dalam segi pelayanan kedinasan. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja perangkat daerah dilakukan terhadap penilaian capaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah Tahun 2024.

Tabel 3. Capaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah Tahun 2024.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
					2024	Tw IV	
1	Meningkatkan Kuantitas, Kualitas produksi sektor perikanan	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas produksi sektor perikanan	Produksi Perikanan	Ton	7.938,06	7.931,10	99,91

Pada tahun 2024, Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan program/kegiatan yang memprioritaskan pada peningkatan produksi perikanan dan nilai tambah produk perikanan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi ikan dengan memperhatikan sifat biologis ikan yang mudah membusuk apabila tidak segera dilakukan penanganan. Adapun penjabaran dari kinerja pelayanan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4 . Capaian Indikator Kunci Kinerja Pelayana n Dinas Perikanan Daerah

NO		INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	Satuan	Capaian Kinerja TW IV Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2	3	4	5	6
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	25	Dinas Perikanan Daerah				
3	25	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100	100	100
3	25	Produksi Perikanan Laut	Ton	206,09	208,81	101,32
3	25	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	68,35	69,23	101,29
3	25	Produksi Budidaya Perikanan Darat	Ton	7731,97	7.722,30	99,87
3	25	Cakupan Pembinaan Kelompok Budidaya Perikanan Darat	%	68,35	64,29	94,05
3	25	Komsumsi Ikan perkapita	(kg/Kapita/Tahun)	50,83	48,04	94,51
Rata-rata Capaian						98,21

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati, Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan kelautan dan perikanan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, terdapat permasalahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini dikarenakan oleh terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan terbitnya undang-undang tersebut, maka akan mengurangi wewenang Kabupaten/Kota dalam mengelola laut 0-4 mill

   dari garis Pantai. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan sumber daya laut dan lainnya. Akibatnya banyak

nelayan dan pembudidaya ikan yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

2. Terbatasnya akses pemodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun produk olahan hasil perikanan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kepercayaan pihak bank terhadap pelaku usaha perikanan dalam mengajukan pinjaman terkait pengembangan usaha.
3. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendukung pengembangan perikanan tangkap. Selain itu, banyak nelayan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang masih menggunakan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem laut, serta menyatunya jalur pelayaran dengan wilayah penangkapan di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya. Ada banyak hal yang menjadi faktor belum berkembangnya pengelolaan perikanan budidaya, salah satunya adalah harga pakan yang masih berfluktuasi. Sampai saat ini Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih berupaya dalam menindaklanjuti hal tersebut dengan pengadaan pakan ikan secara mandiri. Namun hasil yang didapatkan belum memenuhi standar yang ditetapkan.
5. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hal ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Tabel 5. Perumusan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dians Periaknan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tufoksi Perangkat Daerah	Pemasalahan	Tantang dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
Melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Periaknan dan Kelautan yang menjadi kewenangan daerah	Belum Optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	• Terbatasnya sarana dan prasarana budidaya • Fluktuasi harga pakan	• Produksi periaknan budidaya tidak memenuhi target yang ditetapkan • Tidak memenuhi kebutuhan ikan di Kabuapten TapanulI Selatan • Rendahnya pendapatan yang diperoleh pembudidaya ikan	Optimasilsasi pengelolaan periaknan budidaya dengan cara: a) Fasilitasi bantuan pendanaan dan kemitraan bagi pelaku usaha budidaya b) Pengelolaan kesehatan lingkungan ikan c) Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan
	Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran ikan	• Pemasaran hasil perikanan belum sistematis Produk yang dihasilkan belum menjadi produk unggulan • Angka konsumsi ikan masih rendah	• Terhambatnya pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan • Menurunnya minat masyarakat terhadap produk pengolahan hasil perikanan	• Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan cara sebagai berikut : a. Peningkatan volume nilai produksi perikanan Inovasi pengoalhan dan penerapan standarisasi produk

				Memperbaiki jaringan pemasaran untuk produk hasil perikanan • Penguatan minat konsumsi ikan dikalangan masyarakat terutama pada anak sekolah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026

Review terhadap rancangan awal RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 dapat dijabarkan pada Tabel di bawah ini.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 dilakukan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan tahun 2026.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dijabarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Lantosan Rogas Kec. Angkola Timur	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Desa Sihopur Kecamatan Angkola Selatan	Pengadaan Bibit Ikan Mas	15.000 ekor	
		Desa Siamporik Lombang Kec.Angkola Selatan	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Desa Batang Parsuluman Kec.Saipar Dolok Hole	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Desa Muara Purba Nauli	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Desa Sitaratoit Kec.Angkola barat	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Desa Padang Lancat Kec.Batang Toru	Pengadaan bibit ikan jurung	20.000 ekor	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Desa Batu Godang Kec.Angkola Sangkunur	Pengadaan bibit ikan jurung	10.000 ekor	
		Kel.Tapian Nauli Kec.Angkola Selatan	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Desa Tolang Julu Kec.Sayur Matinggi	Pengadaan Bibit Ikan Nila	10.000 ekor	
		Desa Sipogu Kecamatan Arse	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Desa Malombu Kec.Angkola Sangkunur	Pengadaan Bibit Ikan Nila	10.000 ekor	
		Desa Sigolang Kec.Aek Bilah	Pengadaan Bibit Ikan Nila	10.000 ekor	
		Desa Muara Hutaraja Kec.Muara Batang Toru	Pengadaan Bibit Ikan Nila	10.000 ekor	
		Desa Gorahut Kec.Aek Bilah	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Desa Siamporik Dolok	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Desa Natambang Roncitan Kec.Arse	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Kampung Hanopan Kec.Arse	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	
		Desa Aek Kahombu Kec.Tano Tombangan Angkola	Pengadaan Bibit Ikan Nila	10.000 ekor	
		Desa gunung baringin Kec.Angkola Selatan	Pengadaan Bibit Ikan Mas	10.000 ekor	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah "**Meningkatkan Tangkapan Ikan Berkelanjutan, Mengembangkan Ekonomi Lokal, dan Menciptakan Lapangan Kerja**" yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2025, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Untuk menjalankan visinya, misi yang mendukung visi KKP adalah (1) meningkatkan investasi kelautan dan perikanan; (2) meningkatkan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program; (3) meningkatkan nilai kinerja logistik hasil perikanan; (4) meningkatkan volume produk olahan kelautan dan perikanan, (5) meningkatkan konsumsi ikan, dan (6) meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan. Beberapa prioritas utama KKP untuk tahun 2025-2029, antara lain (1) meningkatkan tangkapan ikan berkelanjutan melalui sistem berbasis kuota; (2) mengembangkan ekonomi lokal; (3) menciptakan lapangan kerja; (4) meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pemrosesan, terutama di daerah tertinggal.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025- 2029 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh dalam tahun 2025-2029, terdiri atas:

1. Ekonomi Biru. Kebijakan ini sejalan dnegan 8 (delapan) misi asta cita yang akan dilaksanakan pada pemerintahan mendatang, khususnya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045;
2. Peningkatan tangkapan ikan berkelanjutan. Kebijakan ini dilakukan melalui sistem berbasis kuota.
3. Pengembangan ekonomi lokal dan lapangan kerja. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pemrosesan, terutama di daerah tertinggal.

4. Pengawasan internal. Kebijakan ini akan begeser dari paradigma lama yang mengedepankan aspek ketaatan dan kepatuhan, menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan fungsi sebagai pengawal program strategis.
5. Audit 5.0. Kebijakan ini akan memanfaatkan big data analytics untuk mempertajam pengawasan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap, yaitu dengan cara sebagai berikut:
   a. Penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
   b. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap
   c. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
   d. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil
   e. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi nelayan kecil
2. Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya, yaitu dengan cara sebagai berikut:
   a. Fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan
   b. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
   c. Pembinaan, pendampingan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan
   d. Penyediaan data dan informasi perikanan budidaya
   e. Pengembangan kapasitas bagi pembudidaya ikan
3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yaitu dengan cara sebagai berikut:
   a. Peningkatan volume dan nilai produksi perikanan
   b. Inovasi olahan dan penerapan standarisasi produk
   c. Memperbaiki jaringan pemasaran untuk produk olahan hasil perikanan
   d. Penguatan minat konsumsi ikan di kalangan Masyarakat terutama pada anak sekolah
4. Peningkatan jumlah SDM yang berkompeten sesuai dengan jumlah beban kerja.

5. Peningkatan sarana dan prasrana kantor yang memadai
6. Pertumbuhan dan peningkatan budaya bahari pada masyakarat usia muda

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 adalah ***"Fokus pembangunan yang dilakukan yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur melalui Pembangunan konektivitas difokuskan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus)"*** .Tema RKPD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 adalah ***Penguatan ekonomi melalui peningkatan kualitas infrastruktur Kabupaten Tapanuli selatan menuju Tapsel yang lebih maju***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah
2. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan swasembada pangan;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat;
4. Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM;
5. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)
6. Penguatan Ekosistem investasi daerah dan daya saing ekonomi berbasis Potensi Unggul;
7. Penguatan Dan Pemenuhan Akses Pendidikan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan;
8. Penguatan dan Peningkatan Kualitas dan Aksessibilitas Pelayanan Kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
9. Penguatan Reformasi Birokrasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

10. Pembangunan Permukiman Layak dan Berkelanjutan;
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Wilayah Yang berwawasan Lingkungan serta kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana;
12. Pengembangan Kepariwisataan Daerah;
13. Pelestarian seni budaya,kearifan lokal, peningkatan kepariwisataan, Peningkatan prestasi Kepemudaan dan Olahraga;

Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026, isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta tujuan dan sasaran renstra Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2026
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(07)*
Peningkatan Pendapatan	Meningkatkan Kuantitas, Kualitas produksi sektor perikanan		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	3	20
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan (%)	0,56	12
		Meningkatnya produksi dan produktivitas	Produksi Perikanan Laut (Ton)	208,81	217,09
			Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)	0,61	2,49
			Produksi Budidaya Perikanan Darat (%)	7.722,3	10.022
			Cakupan Pembinaan Kelompok Budidaya Perikanan Darat (%)	64,29	72,51
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	69,23	72,51
		Meningkatnya Nilai Tambah	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	48,04	54,98

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Aktivitas instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi perangkat daerah dengan dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Rencana kegiatan diimplementasikan secara maksimal untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.

Program dan kegiatan merupakan strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, terkoordinasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Sejalan dengan visi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu: "***Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045"***, maka penyusunan renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan WaliDaerah Kabupaten Tapanuli Selatan ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui ada 5 (lima) program 11 kegiatan 22 subkegiatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Program dan Kegiatan Dians Perikanan Daerah Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiakator	Target
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan**	**100 %**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Pemenuhan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216 laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiakator	Target
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Produksi Perikanan Tangkap**	**2.019,64 ton**
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbantu/terbina kelompok nelayan	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 orang
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan darat**	**7938,06 ton**
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Terbantu/terbinanya kelompok pembudidaya ikan**	**kelompok**
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 kelompok
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Terbina/terbantunya kelompok perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan**	**5 kelompok**
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 unit
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 unit
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	10 dokumen

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indiakator	Target	
4	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Komsumsi Ikan perkapita**	**52,86**	**kg/Kapita/ Tahun**
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**kelompok pengolah pemasar hasil perikanan yang dibantu/dibina bahan baku pengolahan ikan**	**100**	**%**
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3	dokumen
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan**	**100**	**%**
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,05	ton
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4	pelaku usaha

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2026. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kegiatan yang menjadi prioritas kepala daerah terpilih sesuai dengan bidang urusan Perikanan
3. Kegiatan yang belum terakomodir pada Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 disebabkan oleh keterbatasan anggara.

Kaidah-kaidah pelaksanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen pihak terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian gambaran tentang Renja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026, dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2026 yang akan datang. Diharapkan penyusunan Renja ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang- bidang lingkup Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) dan merupakan bahan pertimbangan bagi pejabat penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan perikanan, sehingga tercipta kebersamaan dan kesatuan pandang untuk terlaksananya pembangunan khususnya di bidang perikanan dan kelautan yang sistematik dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran ini merupakan hasil kerja dari semua jajaran Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang didukung oleh seluruh masyarakat khususnya yang bergerak di sektor perikanan.

Sipirok, 03 September 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

SAIFUL A. P. NASUTION, S.Pi,. MM.
PEMBINA TK..I (IV/b)
NIP. 19850724 200904 1 003



RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perindustrian disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2024, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian

Proses Penyusunan Renja Dinas Perindustrian terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun 2021 Nomor 1029);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 112 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1078);
21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 1178);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perindustrian ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Dinas Perindustrian ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kineija penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun beijalan (tahun n-1 = Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kineija tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kineija pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kineija pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Bab V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah

Renja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024, alokasi anggaran Belanja untuk Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp 5.118.139.250 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.027.029.496 dan Belanja Modal sebesar Rp.5.043.139.250,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024, realisasi Belanja adalah sebesar Rp 3.986.324.367- atau sebesar 89,98 % dengan rincian sebagai berikut: · Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 4.027.029.496,- atau 90,79% Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 408.300.000 atau 9,20 %.

Tabel T.C. 2.9

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Program dan Kegiata 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	*Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)*	*100*	*100*	*100*	100
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)*	*100*	*100*	*100*	100
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)*	*100*	*100*	*100*	100
			Persentase Aparatur yang berkompeten (%)	*85*	*85*	*85*	*85*

Dipindai dengan CamScanner

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Program dan Kegiata 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)*	*100*	*100*	*100*	100
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)*	*100*	*100*	*100*	100
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)*	*100*	*100*	*100*	100
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)*	*100*	*100*	*100*	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	95,75	94.5	94.5	96,49

Dipindai dengan CamScanner

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Program dan Kegiata 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Tersusunnya perencanaan, target dan kebutuhan anggaran (%)*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Musrenbang RKPD (Kegiatan)*	1	1	*1*	*1*
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya data informasi Pembangunan daerah yang bersumber dari Sistem Informasi Pembanguanan Daerah (SIPD) (%)*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja dan target kinerja (%)*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Ditetapkan Dengan PERDA	*1*	*1*	1	*1*
			Dokumen Perencanaan:RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA	*1*	*1*	1	*1*
			Dokumen Perencanaan RKPD Yang Ditetapkan Dengan Perkada	*1*	*1*	1	*1*

Dipindai dengan CamScanner

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Program dan Kegiata 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	95,75	94.5	94.5	96,49
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Tersedianya dokumen dan implementasi penanggulangan masalah-masalah daerah (%)*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sesuai kebutuhan (%)*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5.01.5-1.0-0.0-0.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam sesuai kebutuhan(%)*	*100*	*100*	*100*	*100*
	5.05.5-1.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	*Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholders (%)*	75.25	0	75.25	0

Dipindai dengan CamScanner

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Program dan Kegiata 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.05.5-1.0-0.0-0.01.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Tersedianya Operasianal Koordinasi Kelitbangan Bidang Ekonomi (Bulan)*	*12*	*12*	*12*	*12*
	5.05.5-1.0-0.0-0.01.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Operasional Koordinasi Kelitbangan bidang SDA, Tekonologi dan Inovasi (Bulan)*	*12*	*12*	*12*	*12*

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan pemerintah daerah terutama perangkat daerah dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan arah kebijakan dalam Rencana Strategi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan pilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama kurun waktu 2021-2026.

Berdasarkan Misi 2 yaitu **"Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan"**, maka arah kebijakan yang dapat dijalankan menurut strategi dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

1. Sasaran "meningkatnya pertumbuhan industri rumah tangga", dengan strategi "meningkatkan kemampuan pengembangan industri rumah tangga dan perluasan akses permodalan bagi pelaku industri rumah tangga", maka arah kebijakannya antara lain:
   - Pendampingan dan pembinaan yang kontiniu serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, dan
   - Menjalin kerjasama program dengan pemerintahan atasan, pihak ketiga, dan stakeholder lainnya.
2. Sasaran "meningkatnya pertumbuhan industri kecil", dengan strategi "melaksanakan identifikasi dan pendataan industri kecil,

meningkatkan kemampuan pengembangan industri kecil, dan perluasan akses permodalan bagi pelaku industri kecil", maka arah kebijakannya antara lain:

- Menerapkan regulasi bidang perindustrian,
- Pendampingan dan pembinaan yang kontiniu serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, dan
- Menjalin kerjasama program dengan pemerintahan atasan, pihak ketiga, dan stakeholder lainnya.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yaitu:

1. Pembangunan SUMBER DAYA MANUSIA,
2. Pembangunan Infrastruktur,
3. Penyederhanaan Regulasi,
4. Penyederhanaan Birokrasi, dan
5. Transformasi Ekonomi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 yaitu : "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transmisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Nilai Tukar Nelayan
5. Ratio Gini
6. Indeks pembangunan manusia
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu: **"Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing"**. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang.

Sejalan dengan tujuan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu **"Terwujudnya Perekonomian Tapanuli Selatan"**, maka fokus tujuan Dinas Perindustrian Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perekonomian Kabupaten Tapanuli Selatan di Bidang Perindustrian; dengan indikator pertumbuhan PDRB sektor

Perindustrian dan Pengolahan (%).

Tujuan yang diemban oleh Dinas Perindustrian Daerah tersebut memerlukan sasaran dengan indikator yang diukur dengan tingkat capaian keberhasilan di depan.

SASARAN

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut di atas adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri rumah tangga; dengan indikator persentase pertumbuhan industri rumah tangga (%), dan
2. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil; dengan indikator jumlah industri kecil (IK).

Pada Tahun 2021-2026, di dalam Renstra Dinas Perindustrian Daerah mendapat tugas untuk menjalankan Program Utama:

1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dengan indikator: Rasio ketersediaan daya listrik (%), Pertumbuhan PDRB sektor pengadaan listrik dan gas (%), Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di Kabupaten/Kota (%);
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan indikator: cakupan pelayanan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan (%);
3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator: Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Pengolahan (%), Jumlah

Industri Kecil (IK), Pertumbuhan Industri (%);

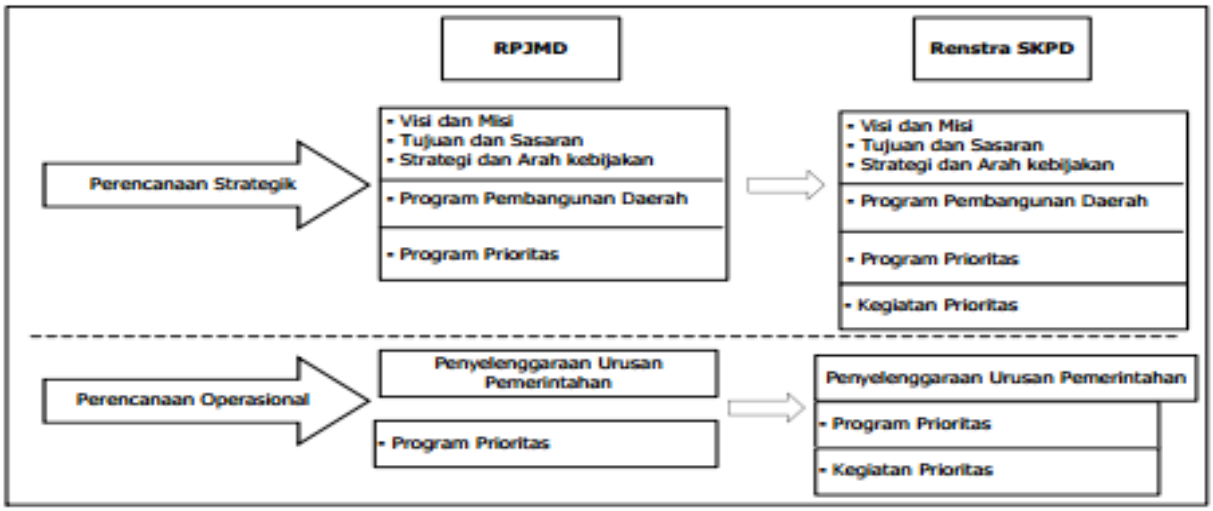
4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan indikator: Jumlah Industri Kab/Kota yang masih aktif (Unit), Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%), Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%), Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota (%), Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini; dan
5. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu, direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program, dan kegiatan. Syarat utama dalam perencanaan Dinas Perindustrian Daerah adalah penyesuaian RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan dan dapat dilihat Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra OPD

Dalam mendukung strategi implementasi, maka untuk menjalankan Renstra Dinas Perindustrian Daerah ditetapkan rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

1.	**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**
1.1.	Penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota
1.1.1.	Penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.1.2.	Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.1.3.	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
2.1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2.1.1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2.1.2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.2.	Administrasi keuangan perangkat daerah
2.2.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2.3.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah
2.3.1.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
2.3.2.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
2.4.	Administrasi umum perangkat daerah
2.4.1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

	kantor
2.4.2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.4.3.	Penyediaan peralatan rumah tangga
2.4.4.	Penyediaan bahan logistik kantor
2.4.5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.4.6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.4.7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, termasuk membantu pengawasan pembayaran pajak daerah yang terkait ESDM
2.5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
2.5.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
2.5.2.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.5.3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2.6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2.6.1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kenderaan dinas operasional/lapangan
3.	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**
3.1.	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota
3.1.1.	Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota
3.1.2.	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
3.1.3.	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
3.1.4.	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri
4.	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**
5.	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**
5.1.	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kab/Kota
5.1.1.	Diseminasi dan publikasi data informasi industri Kab/Kota
5.1.2.	Koordinasi, sinkronisasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH						**4.438.461.103,00**							**4.874.735.091,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.438.461.103,00**							**4.874.735.091,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**109.152.500,00**							**250.000.000,00**	
1.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGIBARU TERBARUKAN**	***Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Rasio ketersediaan daya listrik***	**-**			**1 % 91 %**	**109.152.500,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pemetaan/pendataan sumber panas bumi*	-			1 Tahun	109.152.500,00			-	Optimalisasi Kualitas P embangunan Infrastruk tur yang be rkelanjutan Peningkata n Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	-	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIA NDAERAH
	3.29.05.2.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	109.152.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas P embangunan Infrastruk tur yang be rkelanjutan Peningkata n Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIA NDAERAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**4.329.308.603,00**							**4.624.735.091,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan pelayanan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan***	**-**			**100 %**	**2.829.399.203,00**						**-**	**2.861.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	-			100 %	121.147.100,00			-	Optimalisasi Kualitas P embangunan Infrastruk tur yang be rkelanjutan Peningkata n Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian	-	160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	81.255.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas P embangunan Infrastruk tur yang be rkelanjutan Peningkata n Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	39.891.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*	-			1 Tahun	1.926.464.103,00			-	Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian	-	1.800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.926.464.103,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		1.800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	58.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian	-	60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10.500.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		9.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	48.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		51.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya administrasi umum perangkat daerah*	-			1 Tahun	318.364.697,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian	-	396.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.741.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian	2.800.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	52.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian	110.000.000,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.447.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.180.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan				1 Paket	13.919.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	20.093.997,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	206.982.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Tahun	275.233.200,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian	-	309.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		31.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.760.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	230.473.200,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan*	-			undefined undefined	129.690.103,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian	-	135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	129.690.103,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Dinas Perindustrian		135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah Industri Kecil Pertumbuhan Industri Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Pengolahan***	**-**			**98 IK 5,1 % 6,09 %**	**1.499.909.400,00**						**-**	**1.763.435.091,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Terlaksananya HUT Tapsel*	-			1 Kali	1.499.909.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	1.763.435.091,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	55.443.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Kabupaten Tapanuli Selatan		405.669.120,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				6 Dokumen	790.779.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Kabupaten Tapanuli Selatan		357.765.971,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	559.355.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Kabupaten Tapanuli Selatan		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	94.331.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n Peningkatan Kesempatan Kerja, K esejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Kabupaten Tapanuli Selatan		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
	J U M L A H							**4.438.461.103,00**							**4.874.735.091,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian Daearah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024.

Sipirok, 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ZULFAHMI, S.Pd, SH, MA, MH
NIP. 197010101980011001

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan taufik dan hidayah serta kesehatan untuk menyelesaikan tugas - tugas yang diemban.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 merupakan hasil rumusan dan komitmen seluruh komponen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga dapat diimplementasikan kedalam program dan kegiatan yang disusun secara prioritas dan senantiasa dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh pegawai.

Rencana Kerja 2025 ini merupakan wujud komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian Rencana Kerja 2025 ini dibuat, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sipirok, Agustus 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Dra. SAHRIR SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650409 1986 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penyusunan 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH TAHUN LALU **7**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH **30**
3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional 30
3.2. Kebijakan Provinsi 35
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH **37**

BAB V PENUTUP **41**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	Realisasi Capaian Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Triwulan II Tahun 2023	7
Tabel	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8
Tabel	Capaian Indikator Kinerja Utama s/d Triwulan II Tahun 2023	9
Tabel	Jumlah Perpustakaan, Koleksi, Pengelola dan Jumlah Perpustakaan Tahun 2023	10
Tabel	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan	11
Tabel	Jumlah Anggota Perpustakaan Tahun 2023	11
Tabel	Pagu Anggaran APBD Urusan Kearsipan	12
Tabel	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	13
Tabel	Daftar OPD Yang Mengelola Arsip Sesuai Kaidah	13
Tabel	Daftar Arsip Terlindungi Di Lembaga Kearsipan Tahun 2023 s/d Triwulan II	14
Tabel	T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah S/D Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Kabupaten Tapanuli Selatan	16
Tabel	T-C-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	19
Tabel	Data Jabatan Berdasarkan Eselon Dan Non Eselon Tahun 2023	21
Tabel	Data Personil Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Tahun 2023 Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	21
Tabel	T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	23
Tabel	Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023	36
Tabel	T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan	38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan pada pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kualitas penyusunan Rencana Kerja sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja dimulai dari tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja dengan mengumpulkan/pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan, adalah sebagai berikut:

Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD 2025;

Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan Rencana Kerja (Rencana Kerja) prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

Penyusunan Rencana Kerja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkanmerupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD, Program dan kegiatan yang

direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Kerja dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rencana Kerja merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUAPPAS, dan RAPBD.

RKPD menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja dan penyusunan, Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

Setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan maka Rencana Kerja menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang menjadi Rancangan APBD. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan maka, Perangkat Daerah mulai menyusun DPA.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sera-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286;
17. Peraturan Pmerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perubahan 2023 Perubahan Pemerintah Tahun 2020; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 2025 Perubahan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
24. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2023;
28. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.
32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dimaksud untuk menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sekaligus menjadi tolak ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 bertujuan untuk merumuskan Perencanaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang terarah dan terukur serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan demikian diharapkan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga mewujudkan anggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka terwujudnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tapanuli Selatan yang disesuaikan dengan fungsi dan tugas pokoknya maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan 4 (empat) program dan 32 (Tiga Puluh Dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

TABEL. REALISASI CAPAIAN PROGRAM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.023.440.958	1.722.619.336	1.300.821.622	56,98
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.214.352.175	414.980.479	799.371.696	34,17
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	112.232.000	43.066.300	69.165.700	38,37
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	46.157.000	1.500.000	44.657.000	3,25
JUMLAH BELANJA		**4.396.182.133**	**2.182.166.115**	**2.214.016.018**	**49,64**

1. URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA DAN PERPUSTAKAAN

Anggaran yang dialokasikan Urusan Perpustakaan pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 1.214.352.175 yang terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dengan Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 414.980.479 (34,17%) dan Realisasi Kinerja RPJMD 60,43% (R) seperti tabel di bawah ini:

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.214.352.175	414.980.479	799.371.696	34,17
II.1	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	757.980.375	351.700.756	406.279.619	46,40
	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	271.092.800	45.932.071	225.160.729	16,94
	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KAB	275.480.000	200.046.260	75.433.740	72,62
	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	75.500.000	66.001.800	9.498.200	87,42
	PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.536.000	-	52.536.000	-
	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	43.384.375	39.720.625	3.663.750	91,56
	PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.987.200	-	39.987.200	-
II.2	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	456.371.800	63.279.723	393.092.077	13,87
	SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	278.121.100	60.479.723	217.641.377	21,75
	PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	51.008.300	-	51.008.300	-
	PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	127.242.400	2.800.000	124.442.400	2,20

Sedangkan Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Urusan Perpustakaan sebesar 77,04%. Realisasi 1 Indikator Kinerja Utama belum mencapai target 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA s/d TRIWULAN II TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %
1	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	78,44	60,43	77,04
RATA – RATA CAPAIAN					77,04

Analisa pencapaian kinerja untuk Indikator pengukuran sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 terealisasi sebesar 60,43. Yang artinya Capaian Kinerja belum mencapai target kinerja sebesar 77,04% yang masuk dalam kategori **T**.

Nilai IPLM didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM)

UPLM 1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan
UPLM 2 = Ketercukupan Koleksi
UPLM 3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
UPLM 4 = Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan
UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP
UPLM 6 = Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan
UPLM 7 = Anggota Perpustakaan

$$\textbf{Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat} = \sum \frac{\textbf{IPLM}}{\textbf{AM}} \times 100$$

Berikut adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023:

1. Aspek Masyarakat (AM) adalah Jumlah Penduduk di Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2023 yaitu 315.021
2. Jumlah Perpustakaan, Koleksi, Pengelola dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2023:

NO	JENIS PERPUSTAKAAN KIND OF LIBRARY	JUMLAH PERPUSTAKAAN (UPLM 1)	JUMLAH KOLEKSI (UPLM 2)	TENAGA PERPUSTAKAAN (UPLM 3)	JUMLAH PENGUNJUNG (UPLM 4)
1	Perpustakaan Umum Kabupaten	1	27.376	33	2.011
2	Perpustakaan Umum Kecamatan	15	13.798	14	1.710
3	Perpustakaan MobilKeliling	16	20.333	32	1.117
4	Perpustakaan Desa /Kelurahan	242	80.672	242	24.684
5	Perpustakaan Khusus	9	4.340	9	484
6	Perpustakaan Rumah Ibadah	9	2.800	9	486
7	Masyarakat / Rumah Baca	15	4.581	15	1.350
Jumlah		**307**	**153.900**	**355**	**31.842**

UPLM 1 = Pemerataan layanan Perpustakaan
= 307
UPLM 2 = Ketercukupan Koleksi

= 153.900

UPLM 3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

= 355

UPLM 4 = Tingkat Kunjungan masyarakat ke perpustakaan

= 31.842

Perpustakaan ber-SNP = 0

UPLM 5 = 0,0000

3. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan:

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi di Kelurahan Sangkunur	153 Orang
2	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi di Batang Angkola	54 Orang
3	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi di Batangtoru	49 Orang
4	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi di Sipirok	45 Orang
5	Perpustakaan Keliling 14 Kecamatan	816 Orang
6	Kegiatan PTPBIS di Desa Sihopur Kec. Angkola Selatan.	5 Orang
7	Kegiatan PTPBIS di Desa Pargarutan Tonga Kec. Angkola Timur	6 Orang
8	Kegiatan Kegiatan PTPBIS di Desa Aek Haminjon Kec. ARSE.	8 Orang
9	Kegiatan Kegiatan PTPBIS di Desa Janji Mauli Kec. Angkola Muara Tais.	5 Orang
10	Kegiatan Kegiatan PTPBIS di Desa Natambang Roncitan Kec. ARSE.	15 Orang
TOTAL		1.156 Orang

UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan

UPLM 6 = 1.156

Jumlah Anggota Perpustakaan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	ANGGOTA
1	Batang Angkola	1.843
2	Sayur Matinggi	1.452
3	Tantom Angkola	794
4	Angkola Muara Tais	1.386
5	Angkola Timur	1.165
6	Angkola Selatan	2.940
7	Angkola Barat	1.874
8	Angkola Sangkunur	1.560
9	Batang Toru	1.567
10	Marancar	2.987
11	Muara Batang Toru	996
12	Sipirok	5.620
13	Arse	891
14	Saipar Dolok Hole	903
15	Aek Bilah	472
Jumlah		**26.450**

UPLM 7 = Anggota Perpustakaan

UPLM 7 = 26.450

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

$$= \sum \frac{\text{UPLM}}{\text{AM}} \times 100$$

$$= \frac{(306 + 153.090 + 354 + 9009 + 0{,}0 + 1.156 + 26.450)}{315.021} \times 100$$

$$= \frac{190.365 \times 100}{315.021}$$

$$= \mathbf{60{,}43}$$

2. *URUSAN KEARSIPAN*

Anggaran yang dialokasikan Urusan Kearsipan pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 165.000.000 yang terdiri dari 2 Program 5 Kegiatan. Dengan Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 30.107.800 (18,24%) seperti tabel di bawah ini :

PAGU ANGGARAN APBD URUSAN KEARSIPAN

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	112.232.000	43.066.300	69.165.700	38,37
III.1	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.548.000	36.766.300	39.781.700	48,03
	PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS	76.548.000	36.766.300	39.781.700	48,03
III.2	PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.701.000	6.300.000	9.401.000	40,12
	AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	15.701.000	6.300.000	9.401.000	40,12
III.3	PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	19.983.000	-	19.983.000	-
	PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.983.000	-	19.983.000	-
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	46.157.000	1.500.000	44.657.000	3,25
IV.1	PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	32.263.700	1.500.000	30.763.700	4,65
	PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	32.263.700	1.500.000	30.763.700	4,65
IV.2	AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA	13.893.300	-	13.893.300	-
	PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP	13.893.300	-	13.893.300	-

Adapun Capaian untuk Indikator Kinerja Utama Bidang Kearsipan sebagai berikut:

TABEL VIII. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %

1	Meningkatkan pengelolaan arsip daerah	Indeks Tata Kelola Arsip (%)	80,5	62,44	77,56
RATA – RATA CAPAIAN					77,56

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Tata Kelola Arsip sampai dengan Triwulan II adalah 77,56%.

Formulasi Perhitungan Indeks Tata Kelola Arsip adalah 50% persentase pengelolaan arsip sesuai kaidah + 50% persentase capaian perlindungan dan penyelamatan arsip) X 100%.

Yang dimaksud dengan kaidah kearsipan yaitu seluruh ketentuan yang mengatur segala bentuk kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kearsipan sesuai prosedur dan sistem yang ada.

Dari jumlah sasaran sebanyak 45 OPD, baru 21 OPD yang telah memenuhi pengelolaan arsip sesuai kaidah sesuai dengan hasil Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Tahun 2021.

Dari formulasi diatas, Persentase untuk pengelolaan arsip sesuai kaidah adalah 21/45 x 100% = 46,67%.

50% Persentase untuk pengelolaan arsip sesuai kaidah adalah 50% x 46,67% = 23,34%

Berikut daftar OPD yang telah mengelola arsip sesuai kaidah:

TABEL DAFTAR OPD YANG MENGELOLA ARSIP SESUAI KAIDAH

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
3	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	Dinas Pendidikan Daerah
5	Dinas Pertanian Daerah
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah
7	Dinas Kesehatan Daerah
8	Dinas Ketenagakerjaan Daerah
9	Badan Kepegawaian Daerah
10	Dinas Perindustrian Daerah
11	Dinas Sosial Daerah
12	Inspektorat Daerah
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
15	Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
19	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Sumber Data : Bidang Kearsipan

Untuk arsip yang telah terlindungi dan terselamatkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai Lembaga Kearsipan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

TABEL DAFTAR ARSIP TERLINDUNGI
DI LEMBAGA KEARSIPAN TAHUN 2023 S/D TRIWULAN II

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ARSIP		TOTAL ARSIP
		IN AKTIF	STATIS	
1	Dinas Pendidikan Daerah	0	2	2
2	Dinas Kesehatan Daerah	0	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	5	5
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	4	4
5	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	0	27	27
6	Dinas Sosial Daerah	0	1	1
7	Dinas Ketenagakerjaan	0	4	4
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	16	16
9	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	0	5	5
10	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	0	10	10
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	0	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	0	1	1
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0		0
14	Dinas Perhubungan Daerah	0	4	4
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	0	1	1
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	6	6
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	84	121	205
18	Dinas Perikanan Daerah	0	8	8
19	Dinas Pariwisata Daerah	0	4	4
20	Dinas Pertanian Daerah	0	123	123
21	Dinas Perdagangan Daerah	0	22	22
22	Dinas Perindustrian Daerah	0	4	4
23	Inspektorat Daerah	0	21	21

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ARSIP		TOTAL ARSIP
		IN AKTIF	STATIS	
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	6	6
25	Badan Pengelola Keuangan Pendapat dan Aset Daerah	0	179	179
26	Badan Kepegawaian Daerah	0	7	7
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	27	27
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	0	2	2
29	Sekretariat Daerah Kabupaten	0	0	0
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	3	3
31	Kantor Camat Aek Bilah	0	1	1
32	Kantor Camat Angkola Barat	0	7	7
33	Kantor Camat Angkola Sangkunur	0	0	0
34	Kantor Camat Angkola Selatan	0	0	0
35	Kantor Camat Angkola Timur	0	17	17
36	Kantor Camat Arse	0	12	12
37	Kantor Camat Batang Angkola	0	7	7
38	Kantor Camat Batangtoru	0	1	1
39	Kantor Camat Marancar	3	18	21
40	Kantor Camat Muara Batangtoru	0	2	2
41	Kantor Camat Saipar Dolok Hole	0	0	0
42	Kantor Camat Sayurmatinggi	0	15	15
43	Kantor Camat Sipirok	0	0	0
44	Kantor Camat Tano Tombangan Angkola	0	2	2
45	Kantor Camat Angkola Muaratais	0	0	0
JUMLAH SELURUH ARSIP		**87**	**695**	**782**

Sumber Data : Bidang Kearsipan

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah arsip yang telah terlindungi dan terselamatkan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai Lembaga Kearsipan Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 masih sebanyak 782 dokumen dari target 1000 dokumen. Artinya Persentase capaian perlindungan dan penyelamatan arsip adalah 782/1000 x 100 % = 78,20%

50% Persentase capaian perlindungan dan penyelamatan arsip adalah 50% x 78,2% = 39,10%

Dari penjelasan tersebut, Capaian Indikator Kinerja Utama Pengelolaan Arsip secara baku adalah: (***23,34 % + 39,10%) x 100 = 62,44%***

Capaian ini masih termasuk dalam kategori Sedang **(R)** dan pada periode berikutnya pencapaian target kinerja akan ditingkatkan.

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH s/d TAHUN 2024 (tahun berjalan) KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)
2. Indeks Tatakelolas Arsip (%)
3.

No	Kode	Urusan /Bidang /Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+7+10	12=11/4
	2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**100**
I	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB /KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**3,00**
1	**2.23.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**6,00**
1.1	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	7	7	7	**100**	7	**21**	**0,60**
1.2	2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	3	3	3	**100**	3	**9**	**0,60**
2	**2.23.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**3,00**
2.1	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.400	280	280	270	**96**	280	**830**	**0,59**

No	Kode	Urusan /Bidang /Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+7+10	12=11/4
2.2	2.23.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	**100**	1	**3**	**0,60**
2.2	2.23.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	1	1	1	**100**	1	**3**	**0,60**
2.3	2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera SKPD	60	12	12	12	**100**	12	**36**	**0,60**
3	**2.23.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**20,00**
3.1	2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	1	1	1	**100**	1	**3**	**0,30**
	2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28	0	0	0	**0**	0	**-**	**0,00**
	2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (Orang)	17	3	3	3	**100**	3	**9**	**0,53**
4	**2.23.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**12**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**25,00**
4.1	2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	4	4	4	**100**	4	**12**	**1,00**
4.2	2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	4	4	4	**100**	4	**12**	**1,00**
4.3	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	4	4	4	**100**	4	**12**	**1,00**
	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	4	4	4	**100**	4	**12**	**1,00**

No	Kode	Urusan /Bidang /Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+7+10	12=11/4
	2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	**100**	12	**36**	**3,00**
	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	645	120	120	120	**100**	120	**360**	**0,56**
5	**2.23.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**6,00**
5.1	2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	5	5	5	**100**	5	**15**	**0,30**
6	**2.23.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**12**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**25,00**
6.1	2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	1	1	1	**100**	1	**3**	**0,60**
6.2	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	**100**	12	**36**	**3,00**
6.3	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	**100**	12	**36**	**3,00**
7	**2.23.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**12**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**25,00**
7.1	2.23.01.2.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	4	4	**100**	4	**12**	**3,00**
7.2	2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	2	**100**	2	**6**	**3,00**
	2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**103.087**	**82.982**	**82.982**	**82.982**	**100**	**82.982**	**248.946**	**2,41**
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun**	**103.087**	**82.982**	**82.982**	**82.982**	**100**	**82.982**	**248.946**	**2,41**

No	Kode	Urusan /Bidang /Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+7+10	12=11/4
8	**2.23.02.2.01**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**3,00**
8.1	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1	1	1	1	**100**	1	**3**	**3,00**
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina di Tingkat Daerah Kabupaten sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten sesuai kewenangannya (Perpustakaan)	15	3	3	3	**100**	3	**9**	**0,60**
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kab/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		5	5	5	**100**	5	**15**	**0,00**
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15	-	-	-	**0**	-	**-**	**0,00**
	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	2.500	500	500	500	**100**	500	**1.500**	**0,60**
8.2	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	85	20	20	20	**100**	20	**60**	**0,71**
9	**2.23.02.2.02**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai)**	**66**	**59,84**	**59,84**	**59,84**	**100**	**59,84**	**180**	**2,72**
9.1	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	150	30	30	30	**100**	30	**90**	**0,60**
9.2	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	60	12	12	12	**100**	12	**36**	**0,60**

No	Kode	Urusan /Bidang /Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+7+10	12=11/4
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	15	3	3	3	**100**	3	**9**	**0,60**
	2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**	**Indeks Tata Kelola Arsip Daerah (%)**	**83**	**81**	**81**	**81**	**100**	**81**	**243**	**2,93**
III	**2.24.02**	**Program Pengelolaan Arsip**	**Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional (%)**	**40**	**36**	**36**	**36**	**100**	**36**	**108**	**2,70**
11	**2.24.02.2.01**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Arsip Aktif dan Inaktif yang dibuatkan daftar arsip (Dokumen)**	**3.000**	**500**	**500**	**500**	**100**	**500**	**1.500**	**0,50**
11.1	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	3.000	500	500	500	**100**	500	**1.500**	**0,50**
12	**2.24.02.2.02**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Arsip Statis yang terpelihara dan terselamatkan (dokumen)**	**3.000**	**500**	**500**	**500**	**100**	**500**	**1.500**	**0,50**
12.1	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3.000	500	500	500	**100**	500	**1.500**	**0,50**
10	**2.24.02.2.03**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Srikandi di OPD (kali)**	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**1**	**3**	**0,60**
	2.24.02.2.03,02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten	5	1	1	1	**100**	1	**3**	**0,60**

No	Kode	Urusan /Bidang /Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+7+10	12=11/4
	2.24..03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENNYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan rtanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat. (Nilai)**	**480**	**305**	**305**	**305**	**100**	**305**	**915**	**1,91**
	2.24..03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang memiliki Jadwal Retensi Arsip dibawah 10 tahun (arsip)**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**100**	**1.000**	**3.000**	**2,00**
	2.24..03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi diBawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	1.500	500	500	500	**100**	500	**1.500**	**1,00**
	2.24..03.2.02	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan sesuai dengan NSPK (Arsip)**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**100**	**2.000**	**6.000**	**4,00**
10.2	2.24.02.2.03.02	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1.500	300	300	300	**100**	300	**900**	**0,60**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Dalam kerangka urusan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan, maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

TABLE T-C-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Ranstra Perangkat Daerah					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Ctt
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	Tahun 2024 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		78,84	78,84	79,04	79,24	79,44	79,64	84,02	85,01	86,44	85,01	
2	Indeks Tata Kelola Arsip (%)		80,5	80,5	81	81,5	82	82,5	73	74,5	75,2	74,5	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Dalam kerangka urusan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan Perangkat Daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut

2.4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/5700/OTDA Tanggal 3 September 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan penyederhanaan Struktur Organisasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Perpustakaan
4. Bidang Pengelolaan Arsip
   a. Seksi Arsip Dinamis
5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.5. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsi diantaranya 1 Eselon II, 1 Sekretaris , 2 Kepala Bidang yaitu Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan, 1 Kepala Sub Bagian dan 1 Kepala Seksi dan dukung oleh Jabatan Fungsional dan Pelaksana, berikut komposisinya.

Sebagai Perangkat Daerah dengan tipe “C” Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki formasi jabatan sebagi berikut :

DATA JABATAN BERDASARKAN ESELON DAN NON ESELON TAHUN 2023

No.	NAMA JABATAN	ESELON			ASN	
		II	III	IV	PELAKSANA	THL
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	-	-	-
3	Bidang Pengembangan Perpustakaan	-	1	-	2	3
4	Bidang Pengelolaan Arsip	-	1	-	-	1
5	Subbagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	3	7
6	Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	-	-	1	1	-
7	Perencana	-	-	1	-	-
8	Pustakawan	-	-	3	-	-
9	Arsiparis	-	-	3	-	-
Sub Total		**1**	**3**	**9**	**6**	**11**
Total		**30**				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dari 6 jabatan strukural, semua telah menduduki jabatan yang ada, untuk Jabatan Fungsional sebanyak 7 orang, Pelaksana sebanyak 6 orang dibantu oleh THL sebanyak 11 orang.

Berikut Adalah Data Personil Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.

DATA PERSONIL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH TAHUN 2023 BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No.	Nama Pendidikan	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		S – 2	S - 1	D – III	D – II	D – I	SMA / MA	SMP	SD	
1	S – 2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	S – 1	-	20	-	-	-	-	-	-	20
3	D – III	-	-	2	-	-	-	-	-	2
4	D – II	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	D – I	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	SMA / MA	-	-	-	-	-	7	-	-	7
7	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**1**	**20**	**2**	**-**	**-**	7	**-**	**-**	**30**

Dari tabel diatas Personil di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menyelesaikan Pendidikan Terakhir Strata 2 Sebanyak 1 Orang, Strata 1 Sebanyak 20 Orang Diploma 2 Orang dan Sekolah Menengah Atas 7 Orang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2025 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan, Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sehingga menghasilkan Program Prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan. Penyusunan RKPD memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah; dan Renja, Pendanaan dan Prakiraan Maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja serta dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Berikut ini adalah Tabel Review RKPD Tahun 2025

TABLE T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**3.213.346.809**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**3.213.346.809**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**				**2.859.503.759**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**				**2.859.503.759**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**28.754.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**28.754.500**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	25.324.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	25.324.300	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	**3.430.200**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	**3.430.200**	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.709.194.009**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.709.194.009**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	1.697.524.509	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapsel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	1.697.524.509	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.502.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.502.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se SKPD	12 Laporan	8.167.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan L Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se SKPD	12 Laporan	8.167.500	

3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**125.563.100**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**125.563.100**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	33.551.100	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	33.551.100	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	52.412.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	52.412.000	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	39.600.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	39.600.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**288.200.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**288.200.100**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.088.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.088.000	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	21.880.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	21.880.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.869.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.869.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22.855.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22.855.400	
5	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	Kab. Tapsel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	48.937.700	Penyediaan Bahan Bacaan dan nPeraturan Perundang-undangan	Kab. Tapsel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	48.937.700	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	138.570.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	138.570.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**133.775.200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**133.775.200**	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapsel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	**133.775.200**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapsel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	**133.775.200**	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**468.982.150**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**468.982.150**	

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.533.230	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.533.230	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**375.448.920**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**375.448.920**	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**105.034.700**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**105.034.700**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapsel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	80.034.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapsel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	80.034.700	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapsel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapsel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	25.000.000	
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**353.843.050**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**353.843.050**	
1	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota**				**228.053.650**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota**				**228.053.650**	
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pangurabaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	20.382.900	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pangurabaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	20.382.900	
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	55.592.700	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	55.592.700	

3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.296.700	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.296.700	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Julah Perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan	20.296.200	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Julah Perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan	20.296.200	
4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	29.323.100	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	29.323.100	
5	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	500 Eksemplar	50.568.750	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	500 Eksemplar	50.568.750	
6	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	31.593.300	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	31.593.300	
2	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**125.789.400**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**125.789.400**	
1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	30 Lokus	60.593.150	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	30 Lokus	60.593.150	
2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	35.137.250	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	35.137.250	
3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Tapsel Semua Kec	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di	3 Perpustakaan	30.059.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Tapsel Semua Kec	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di	3 Perpustakaan	30.059.000	

		dan Kel	Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				dan Kel	Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**135.352.800**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**135.352.800**	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				**59.279.100**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				**59.279.100**	
1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**				21.780.000	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**				21.780.000	
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 Berkas	**21.780.000**	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 Berkas	**21.780.000**	
2	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**				17.925.000	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**				17.925.000	
1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	**17.925.000**	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	**17.925.000**	
3	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**				19.574.100	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**				19.574.100	
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	1 Laporan	**19.574.100**	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	1 Laporan	**19.574.100**	
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**				**76.073.700**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**				**76.073.700**	
1	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**				45.672.900	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**				45.672.900	
1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	**45.672.900**	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Tapsel Semua Kec dan Kel	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	**45.672.900**	
2	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kab/Kota**				30.400.800	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kab/Kota**				30.400.800	
1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kilang Papan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	300 Arsip	30.400.800	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kilang Papan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	300 Arsip	30.400.800	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

1. URUSAN PERPUSTAKAAN

Sebagai pelaksana urusan Perpustakaan, Bidang Pengembangan Perpustakaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca. Untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. menyelenggarakan pembinaan pengelola perpustakaan kemudian dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Tapanuli Selatan pada setiap tahunnya diadakan lomba perpustakaan sehingga tenaga perpustakaan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka memasyarakatkan perpustakaan. Karena keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan masih menggunakan cara manual. Untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan pelayanan antara lain:

1. Layanan peminjamam dan pengembalian bahan pustaka
2. Layanan pengadaan kartu anggota pemustaka
3. Layanan pencarian bahan pustaka
4. Layanan perpustakaan keliling
5. Layanan referensi

Untuk mengendalikan unit perpustakaan desa/kelurahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan serta melaksanakan koordinasi dengan pengelola perpustakaan desa/kelurahan untuk lebihmeningkatkan pelayanan terhadap pemustaka di kawasan masing-masingsebagai upaya peningkatan minat baca masyarakat. ilmu pengetahuan dan perekonomian.

2. URUSAN KEARSIPAN

Bidang Pengelolaan Arsip melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan arsip dinamis, pengolahan arsip statis dan preservasi arsip daerah. Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan selalu menjadi tantangan aparatur dalam melaksanakan kegiatan pendataan, pengklasifikasian serta pengolahan data arsip yang berada pada setiap OPD maupun masyarakat yang dapat dijadikan khazanah arsip di Kabupaten Tapanuli Selatan. Rendahnya kesadaran Aparatur OPD dalam pengelolaan Arsip juga menjadi

hambatan dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan sehingga diharapkan dilakukan sosialisasi kearsipan dan bimbingan teknis kearsipan. Ketiadaan arsiparis dan kekurangan personil yang menangani kearsipan menjadi kendala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengelolaan arsip daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Penambahan personil arsiparis menjadi prioritas, sehingga visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Renja 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan Program/ Kegiatan para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selaku OPD baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten sebagai berikut :

TABEL T-C.32. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Pagu	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Koleksi	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Desa/Kelurahan	Desa Huta Holbung – Kecamatan Angkola Muara Tais	Rp. 849.000.000,-	Fasilitas Gedung Pelayanan Perpustakaan Kecamatan Sederhana	150/m2 * Rp. 5.660.000,	Gedung 1 Unit	APBD

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangakan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2025 adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Agenda Pembangunan

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perunagahn menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda program prioritas dalam pemerintahan kedepan, Sembilan agenda program prioritas itu disebut NAWACITA:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah "Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Prioritas pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur Untuk Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Perpustakaan tidak hanya berperan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tapi juga punya peran lebih praktis yakni sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Prioritas Nasional 4 yang menyatakan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dengan arah kebijakan pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial. Kebijakan ini menargetkan peningkatan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan,

1. **Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter,**
   a. ***Peningkatan budaya literasi,***
      a. pengembangan budaya kegemaran membaca;
      b. pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; dan
      c. peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
   b. ***Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra,***
      a. peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional;
      b. pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas; dan
      c. revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai khazanah budaya bangsa.
   c. ***Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta,***
      a. peningkatan budaya riset dan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini; dan
      b. pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi.

d. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi,

a. pengembangan mitra perpustakaan (library supporter);
b. pengembangan inovasi sosial yang didukung oleh pendanaan filantropi.

Pembangunan Nasional Bidang Kearsipan diselenggarakan dalam rangka memperkuat dan menjadi salah satu pilar pelaksanaan agenda kedua yakni membuat "Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya".

2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,

a. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga,

a. Pelindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah Dan Kearifan Lokal;
b. Peningkatan Aksesdan Kualitas Pelayanan Museum Dan Arsip; Dan
c. Pelestarian, Pengembangan Dan Pemanfaatan Manuskrip Dan Arsip Sebagai Sumber Nilai Budaya, Sejarah, Dan Memori Kolektif Bangsa.

b. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat,

a. pengembangan produk seni, budaya, dan film;
b. penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional;
c. pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
d. pengembangan budaya bahari dan literasi maritim, gerakan cinta laut, gerakan Indonesia bersih dan pengembangan sumber daya maritim.

c. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif,

a. pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup;
b. pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan
c. pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

d. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia,

a. pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa
b. penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri.

e. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan,

a. pengelolaan dana perwalian kebudayaan;
b. peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan;
c. peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan;
d. pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu; dan
e. pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan.

Untuk mengatasi tantangan pada tahun 2020-2025, ANRI akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. melakukan analisis dan evaluasi tugas dan fungsi unit kerja;
b. melakukan penyesuaian struktur organisasi sebagai implikasi diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke - 47 dalam Jabatan Fungsional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi;
c. pengembangan fungsi penyelamatan arsip statis lembaga pusat di daerah

1. PENGELOLAAN KEARSIPAN

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) undang-undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, pengelolaan arsip dinamis yang baik dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitasdan alat bukti sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar. prosedur dan kriteria. Sedangkan Pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Lebih Ianjut dipertegas oleh Pasal 41 butir (1) bahwa pencipta arsip sebagaimana Pasal 40 ayat (2) penciptaan arsip dilaksanakan dengan baik dan benar

untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan keputusan. Selain itu organisasi juga dapat memberikan pelindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi sekaligus menyimpan memori organisasi yang ada sebagai memori personal, memori organisasi dan memori kolektif.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menentukan arah kebijakan yang mengacu kepada arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, kebijakan tersebut merupakan prioritas dalam melaksanakan program kerja yaitu:

a. Meningkatkan pelayanan perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Selatan melalui penambahan titik layanan perpustakaan keliling, desa/kelurahan
b. Meningkatkan koleksi, prasarana dan sarana perpustakaan di Kabupaten Tapanuli Selatan melalui pengadaan, hibah dan kerjasama
c. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dan Tenaga Perpustakan melalui Pembinaan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis perpustakaan
d. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan di Kabupaten Tapanuli Selatan
e. Meningkatkan Khazanah. prasarana dan sarana Kearsipan di Kabupaten Tapanuli Selatan
f. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dan Pengelola Kearsipan Sosialisasi, Penyuluhan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Kearsipan
g. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana melalui penyediaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta operasional kantor.

3.2. Kebijakan Provinsi

Sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, adalah: TEMA PEMBANGUNAN: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro

3.3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten TapanuIi Selatan berpedoman dan Mengacu pada RPJMD, Visi dan Misi Kepala Daerah dan memerhatikan kebijakan yang disusun oleh instansi Pembina Provinsi yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Pembina Pusat yaitu Perpustakaan dan Arsip Nasional Republik Indonesia sehingga tercapai keselarasan dan sinergi antara Pusat, Provinsi dengan Program Kabupaten. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan yang didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk untuk melaksanakan fungsi pelaksanan urusan perpustakaan dan kearsipan sehingga program kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan arah kebijakan yaitu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan terus dilaksanakan penyempurnaan dan perbaikan terhadap system dan mekanisme pelayanan yang diberikan serta arah kebijakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui peningkatan kualitas aparatur daerah yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 dan pencapaian tujuan dan sasaran serta pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	86,44
2	Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	Indeks Tata Kelola Arsip Daerah (%)	75,2

3.4. PROGRAM KEGIATAN

1.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1.2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.1.3. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

1.1.4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 mencakup program dan kegiatan Dana APBD sebagai berikut :

1.2. URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN

1.2.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

1.3.1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

1.4.1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

1.4.2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

1. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
2. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH						**4.714.983.106,00**							**4.808.689.253,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.714.983.106,00**							**4.808.689.253,00**	
	-	-						**4.408.648.806,00**							**4.498.340.253,00**	
1,	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	-	-			-	**786.973.200,00**						-	**774.435.400,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	549.124.400,00			-		-	-	532.047.300,00	DPKD
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	57.850.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		57.900.000,00	DPKD
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				3 Perpustaka an	155.958.700,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		156.844.800,00	DPKD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustaka an	36.700.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		37.750.000,00	DPKD
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				3 Orang	13.800.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		14.902.000,00	DPKD
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				17 Dokumen	20.400.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		21.487.200,00	DPKD
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				870 Eksemplar	97.583.700,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		56.300.000,00	DPKD
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustaka an	166.832.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		186.863.300,00	DPKD
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	237.848.800,00			-		-	-	242.388.100,00	DPKD
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				3 Perpustaka an	33.226.600,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		34.400.000,00	DPKD
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang				12 Orang	51.350.200,00	Kab.	DAU	-		-		52.314.300,00	DPKD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota						Tapsel							
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				30 Lokus	153.272.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		155.673.800,00	DPKD
	-	**-**						**306.334.300,00**							**310.349.000,00**	
1,	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	-	**-**			**-**	**260.171.000,00**						**-**	**263.075.600,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	55.572.100,00			-		-	-	56.398.000,00	DPKD
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				600 Berkas	55.572.100,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		56.398.000,00	DPKD
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.441.200,00			-		-	-	30.532.400,00	DPKD
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				300 Arsip	29.441.200,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		30.532.400,00	DPKD
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	175.157.700,00			-		-	-	176.145.200,00	DPKD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				30 Pengguna	21.099.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		21.010.500,00	DPKD
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	154.058.700,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		155.134.700,00	DPKD
2,	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	-	**-**			**-**	**46.163.300,00**						**-**	**47.273.400,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-			-	46.163.300,00			-		-	-	47.273.400,00	DPKD
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				600 Arsip	46.163.300,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		47.273.400,00	DPKD
	-	**-**						**4.408.648.806,00**							**4.498.340.253,00**	
1,	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	**-**			**-**	**3.621.675.606,00**						**-**	**3.723.904.853,00**	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang	-	-			-	738.178.826,00			-		-	-	737.025.351,00	DPKD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Urusan Pemerintahan Daerah														
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.004.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		2.000.000,00	DPKD
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	83.268.796,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		82.204.583,00	DPKD
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	29.393.050,00			-		-	-	29.481.900,00	DPKD
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	25.724.250,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		25.810.000,00	DPKD
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104.664.800,00			-		-	-	103.922.700,00	DPKD
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	80.500.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		80.045.700,00	DPKD
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	24.164.800,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		23.877.000,00	DPKD
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	738.178.826,00			-		-	-	737.025.351,00	DPKD
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	652.906.030,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		652.820.768,00	DPKD
	-	Perencanaan,	-	-			-	29.393.050,00			-		-	-	29.481.900,00	DPKD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3.668.800,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		3.671.900,00	DPKD
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.252.013.962,00			-		-	-	2.251.743.762,00	DPKD
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/bulan	2.239.575.262,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		2.239.595.262,00	DPKD
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.111.900,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		4.123.200,00	DPKD
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	8.326.800,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		8.025.300,00	DPKD
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	82.056.600,00			-		-	-	80.681.200,00	DPKD
	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	33.226.600,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		31.400.000,00	DPKD
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	27.740.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		27.981.000,00	DPKD
	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	21.090.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		21.300.200,00	DPKD
	-	Administrasi	-	-			-	334.868.368,00			-		-	-	435.649.940,00	DPKD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Umum Perangkat Daerah														
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.111.500,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		10.210.000,00	DPKD
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	11.520.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		11.632.100,00	DPKD
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	24.164.800,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		23.893.800,00	DPKD
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	19.038.200,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		19.156.300,00	DPKD
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	56.533.868,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		56.547.700,00	DPKD
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	213.500.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		314.210.040,00	DPKD
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	80.500.000,00			-		-	-	85.400.000,00	DPKD
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	80.500.000,00	Kab. Tapsel	DAU	-		-		85.400.000,00	DPKD
	JUMLAH							**4.714.983.106,00**							**4.808.689.253,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Renja pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 - 2025, RPJM Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan serta Target dan Sasaran Pembangunan yang akan dilaksanakan.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sarta berkelanjutan.

Demikian Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun untuk dijadikan acuan pelaksanaan Program/Kegiatan di Tahun 2025.

Sipirok, Agustus 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Dra. SAHRIR SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650409 1986 1 002

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025











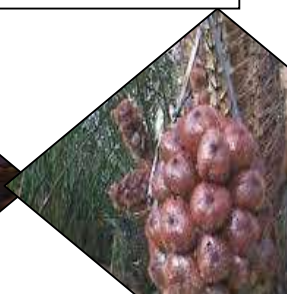




DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
JALAN PROF LAFRAN PANE - SIPIROK







BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2024, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses Penyusunan Renja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penentapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program

dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);

19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 114 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1028);
21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Bab V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n - 2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n - 1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi anggaran Belanja untuk Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 86.931.189.961,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 84.875.043.161,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.056.146.800,- Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, realisasi Belanja adalah sebesar Rp.81.117.087.509,- atau sebesar 93,31 % dengan rincian sebagai berikut : Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.79.093.745.429,- atau 93,19% Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 2.023.342.080,- atau 98,40%.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
	3					Urusan Pemerintahan Pilihan									
	3	27				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
1	3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kewajiban Pelaporan Capaian Kinerja serta Perencanaan dan Penganggaran Dinas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
	3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
	3	27	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
	3	27	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
	3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	60,00
	3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (%)	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang))	1.090,00	204,00	218,00	193,00	88,53	218,00	196,00	56,43
	3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
	3	27	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
	3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD(Laporan)	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
	3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian kantor (Bulan))	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	60,00
	3	27	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Tenun PNS yang Diadakan (Paket)	1.079,00	576,00	207,00	207,00	100,00	151,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Orang)	95,00	400,00	19,00	19,00	100,00	10,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perkantoran (Bulan)	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	100,00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
	3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	365,00	414,00	73,00	73,00	100,00	73,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.710,00	4.763,00	1.142,00	812,00	71,10	1.142,00	71,10	71,10
	3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas (Unit)	1,00	-	1,00	1,00	100,00	-	100,00	100,00
	3	27	1	2.07	7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas (Unit)	1,00	-	1,00	1,00	100,00	-	100,00	100,00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
	3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Perkantoran (Bulan)	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	250,00	425,00	50,00	-	-	50,00	0,00	0,00
	3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	340,00	274,00	68,00	68,00	100,00	73,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Perpanjangan STNK dan Pajak Kenderaan serta Pemeliharaan dan BB M Kendaraan Dinas (Tahun))	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	100,00
	3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	20,00	34,00	4,00	3,00	75,00	2,00	75,00	75,00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
	3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)								
	3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu (Ton)	1.244.872,50	1.648.769,25	248.880,76	254.990,13	102,45	248.927,63	102,45	102,45
							Jumlah produksi hasil hortikultura unggulan (Ton)								
	3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tersalurnya Informasi Pasar Komoditi Pertanian (Kecamatan)	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00	5,00	100,00	100,00
	3	27	2	2.01	2	Pendamping an Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendamping an Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	44,00	-	8,00	8,00	100,00	-	100,00	100,00
	3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembibitan Kopi Arabika (Batang)	64.500,00	-	12.900,00	12.900,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00
	3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	64.500,00	-	12.900,00	12.900,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
	3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00
	3	27	2	2.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia (Ton)	100,00	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00	100,00	100,00
	3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	500,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu (Ton)	1.244.872,50	1.648.769,25	248.880,76	254.990,13	102,45	248.927,63	102,45	102,45
							Jumlah produksi hasil hortikultura unggulan (Ton)								
							Jumlah produksi hasil perkebunan unggulan (Ton)								
	3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan terhadap Prasarana Pertanian (%	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,	75000	0	15.000,00	15.000,00	100,00	1.825,00	100,00	100,00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
						Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola (Dokumen)								
	3	27	3	2.01	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	10,00	54,00	2,00	2,00	100,00	2,00	100,00	100,00
	3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya (Laporan)	20,00	-	4,00	4,00	100,00	4,00	100,00	100,00
	3	27	3	2.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembang an Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembang an Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan (Dokumen)	5,00	5,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	100,00
	3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara (Unit)	95,00	5,00	17,00	17,00	100,00	10,00	100,00	100,00
	3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara (Unit)	39,00	33,00	7,00	7,00	100,00	15,00	100,00	100,00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
	3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitsi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara (Unit)	736,00	127,00	133,00	133,00	100,00	98,00	100,00	100,00
	3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	95,00	10,00	17,00	17,00	100,00	7,00	100,00	100,00
	3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan (%)	- 5,60	- 1,76	- 1,09	- 1,09	100,00	- 1,11	100,00	100,00
	3	27	4	02.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengobatan Hewan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	27	4	02.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	45,00	37,00	9,00	9,00	100,00	10,00	100,00	100,00
	3	27	4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Keterjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Masyarakat Veteriner /Kesmavet (Kegiatan)	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	100,00	100,00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
	3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produ k Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produ k Hewan (Laporan)	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00	100,00	100,00
	3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun (Kw/Ha)	513,51	535,14	513,26	541,50	105,50	513,36	105,50	105,50
	3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian terhadap OPT (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (Ha)	20,00	23,00	4,00	4,00	100,00	4,00	100,00	100,00
	3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang Aktif (Kelompok Tani)	1.427,00	1.427,00	1.419,00	1.429,00	100,70	1.421,00	100,70	100,70
	3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Kegiatan kegiatan Penyuluhan Pertanian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan penyuluh pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	15	15	15	15,00	100,00	15,00	100,00	100,00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11 =6+8+10	12=11/5
							(Unit)								
	3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	1427	1427	1419	1429	100	1421	100,70	100,70

Capaian kinerja Dinas Pertanian Daerah KabupatenTapanuli Selatan merupakan suatu hal yang komplit. Setiap bidang saling mendukung untuk capaian kinerja yang sudah dibuat. Adapun alat ukur yang dibuat untuk kinerja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Indikator Kinerja Utama, yaitu meningkatkan produktivitas pertanian dan populasi ternak. Beberapa komoditi yang diukur diantaranya adalah:

Tanaman Pangan: Padi, jagung, kedelai dan ubi kayu.

Hortikultura: Cabe, salak dan jeruk.

Perkebunan: Karet, kopi, kakao dan kelapa sawit

Peternakan: Sapi, kerbau, kambing, ayam buras dan itik

Penyuluhan: Kualitas kelompok tani.

Indikator kegiatan pada tahun 2023 sudah mencapai target. Tercapaianya indikator kinerja ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pengadaan bibit pertanian, bibit ternak, alat pertanian, pembangunan jalan usaha tani, embung, irigasi yang mendukung tercapainya produksi pertanian, serta penggunaan bibit bersertifikat yang mendorong produksi, Pemahaman petani mengenai GAP (Good Agricultural Practice) , serta Sekolah Lapang yang terus dilaksanakan kepada petani sehingga pemahaman petani meningkat untuk perawatan dan pengolahan hasil pertanian.

Dalam mencapai target tersebut, tentunya ada hal yang menjadi pendorong atau pendukung, penghambat. Adapun faktor pendukung dan penghambat tersebut diantaranya:

a. Pendukung

- Adanya pembangunan sarana dan prasarana pertanian
- Pengadaan bantuan bibit pertanian dan alat pertanian
- Kegiatan pendampingan petani

b. Pengahambat

- Akses yang belum terjangkau
- Harga pasar yang fluktuatif
- Curah hujan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian.

Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

a) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
b) Penyusunan programa penyuluhan pertanian;
c) Pengembangan prasarana pertanian;
d) Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijaun pakan ternak;
e) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
f) Pembinaan produksi di bidang pertanian;
g) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
h) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanain;
j) Pelaksanaan penyuluhan pertanian
k) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
l) Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
m) Pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan
n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2023

NO	Indikator			Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisa
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	Jumlah produksi tanaman pangan (Padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, ubi kayu) (Ton)	248.833,89	248.880,76	248.927,63	248.974,50	249.021,37	249.068,24	260.414,40	254.990,36	258.643,17		
3	Jumlah produksi hortikultura (Jeruk,salak, cabe) (Ton)	165.197,63	165.205,52	165.213,40	165.221,28	165.229,16	165.237,04	220.257,83	302.026,85	364.784,15		
4	Jumlah produksi perkebunan (Karet, kopi, kakao, kelapa sawit) (Ton)	175.781,41	175.817,31	175.853,22	175.889,13	175.925,03	175.960,94	206.458,47	188.663,66	196.232,18		
5	Jumlah populasi ternak (Ekor)	259.599	264.791	270.087	275.489	280.999	286.619	268.362	269.670	279.014		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang meliputi analisis Renstra Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Selatan, dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dimana pertanian merupakan sektor yang cenderung bertahan dan tidak mengalami penurunan produksi, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

a. Produktivitas Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan masih rendah
b. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
c. Bencana kekeringan dan kebanjiran yang disebabkan adanya anomali iklim
d. Kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi.
e. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan.
f. Masih banyaknya lahan yang belum dioptimalkan dan dikembangkan secara baik.

Tantangan dan peluang merupakan hal penting dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya dalam pembangunan pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun tantangan dan peluang tersebut adalah potensi pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan serta permasalahan yang dihadapi perangkat daerah.

Memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi, maka tantangan Pembangunan Pertanian antara lain meliputi :

1) Optimalisasi Pemanfaatan sumber daya pertanian,
2) Peningkatan produksi untuk menciptakan Ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku,
3) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi,
4) Pembangunan pertanian yang berkelanjutan,
5) Globalisasi perdagangan dan Investasi,
6) Sinkronisasi program pusat dan daerah sejalan Era Otonomi Daerah,
7) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Adapun potensi pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari keanekaragaman hayati dan ekosistem, lahan pertanian, tenaga kerja pertanian, teknologi, pasar dan pertumbuhan jumlah serta daya beli penduduk.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pertanian dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pertanian, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Awal Renja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dan mempertimbangkan asas kepatutan, serta ada beberapa target dan tolak ukur yang harus dibuah karena kurang sesuai. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)***	**100**	**22.036.728.358,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)***	**100**	**22.023.444.291**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Terpenuhinya Kewajiban Pelaporan Capaian Kinerja serta Perencanaan dan Penganggaran Dinas (%)***	**100**	**49.561.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Terpenuhinya Kewajiban Pelaporan Capaian Kinerja serta Perencanaan dan Penganggaran Dinas (%)***	**100**	**52.177.150**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	1	2.226.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	1	4.948.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	1	2.592.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	1	2.592.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	1	2.161.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	1	1.979.200
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	1	2.226.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	1	2.304.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	9	40.354.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	6	40.353.950

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (%)***	**100**	**18.167.971.358**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (%)***	**100**	**18.152.038.718**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	239	18.151.912.358	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	195	18.152.038.718
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*	1	3.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*	1	3.198.900
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	1	5.538.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	1	5.536.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	1	7.321.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	1	7.320.800
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian kantor (Bulan)***	**12**	**85.889.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian kantor (Bulan)***	**12**	**85.417.554**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	1	35.116.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*	1	34.800.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	240	50.773.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*	240	50.617.554
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Administrasi Umum Perkantoran (Bulan)***	**12**	**921.612.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Administrasi Umum Perkantoran (Bulan)***	**12**	**736.140.861**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	9.782.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	9.775.600

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	1	99.109.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	1	99.109.100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	236.497.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	43.518.900
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	1	43.520.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	1	43.519.261
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	100	67.439.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	100	75.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	250	465.265.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	250	465.218.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Perkantoran (Bulan)***	**12**	**2.594.701.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Perkantoran (Bulan)***	**12**	**2.750.773.608**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	1	1.349.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	1	1.332.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	1	131.909.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	1	139.279.711
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	1	614.133.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	1	614.128.257
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	1	1.847.310.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	1	1.996.033.640

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Perpanjangan STNK dan Pajak Kenderaan serta Pemeliharaan dan BB M Kendaraan Dinas (Tahun)**	**1**	**216.994.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Perpanjangan STNK dan Pajak Kenderaan serta Pemeliharaan dan BB M Kendaraan Dinas (Tahun)**	**1**	**230.840.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	2	216.994.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	2	84.840.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	4	146.000.000
2,	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu (Ton)***	**249.021,37**	**392.170.000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu (Ton)***	**249.021, 37**	**392.169.600**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	***Tersedianya Informasi Pasar Komoditi Pertanian (Kecamatan)***	**5**	**172.639.000**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	***Tersedianya Informasi Pasar Komoditi Pertanian (Kecamatan)***	**5**	**172.639.000**
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)*	1	172.639.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)*	1	172.39.000
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	1	59.600.400,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	***Pengembangan Pembibitan Kopi Arabika (Batang)***	**4300**	**109.766.000**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Pengembangan Pembibitan Kopi Arabika (Batang)***	**4300**	**109.765.600**
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)*	1	109.766.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)*	1	**109.765.600**
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (%)***	**100**	**109.765.000**	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (%)***	**100**	**109.765.000**
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)*	1	94.305.000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)*	1	94.305.000
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)*	1	15.460.000	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)*	1	15.460.000
3.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu (Ton)	**249.021,37**	**18.557.527.000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu (Ton)	**249.021,37**	**18.997.295.467**
	Pengembangan Prasarana Pertanian	***Terlaksananya Pengembangan terhadap Prasarana Pertanian (%)***	**100**	**1.165.217.000**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	***Terlaksananya Pengembangan terhadap Prasarana Pertanian (%)***	**100**	**1.604.985.467**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)*	1	268.584.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)*	1	268.584.050

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			1		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)*	1	530.449.800
					Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Prasarana Pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (unit)	1	73.553.200
					Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	75.233.200
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)*	1	488.566.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)*	1	488.565.000
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	*Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)*	1	301.067.000	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	*Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)*	1	0
	Penyusunan Action plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	*Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)*	1	107.000.000	Penyusunan Action plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	*Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)*	1	106.999.817
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)**	**100**	**17.392.310.000**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)**	**100**	**17.392.310.000**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	*Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*	4	696.101.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	*Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*	4	696.101.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*	70	13.438.510.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*	70	13.438.510.000
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*	7	618.695.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*	7	618.695.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)*	15	2639.004.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)*	15	2.639.004.000
4,	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan (%)	**-1,12**	**257.804.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan (%)	**-1,12**	**257.804.000**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengobatan Hewan (%)**	**100**	**230.363.000**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengobatan Hewan (%)**	**100**	**230.363.000**
	Pemberantasan Penyakt hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)*	12	230.363.000	Pemberantasan Penyakt hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)*	12	230.363.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Keterjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Masyarakat Veteriner/Kesmavet (Kegiatan)**	**2**	**27.441.000**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Keterjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Masyarakat Veteriner/Kesmavet (Kegiatan)**	**2**	**27.441.000**
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)*	12	27.441.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)*	12	27.441.000
5,	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun (Kw/Ha)***	**513,46**	**203.102.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun (Kw/Ha)***	**513,46**	**203.101.900**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengendalian terhadap OPT (%)**	**100**	**203.102.000**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian terhadap OPT (%)**	**100**	**203.101.900**
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)*	10	177.602.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)*	10	177.602.000
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Ha)*	1	10.500.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Ha)*	1	10.499.900

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	*Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Ha)*	3	15.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	*Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Ha)*	3	15.000.000
776,	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah Kelompok Tani yang Aktif (Kelompok Tani)	**1423**	**1.901.396.000**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah Kelompok Tani yang Aktif (Kelompok Tani)	**1423**	**1.901.394.900**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Terlaksananya Kegiatan kegiatan Penyuluhan Pertanian (%)**	**100**	**1.901.396.000**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Terlaksananya Kegiatan kegiatan Penyuluhan Pertanian (%)**	**100**	**1.901.394.900**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)*	6	891.149.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)*	6	891.147.900
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)*	1425	1.010.247.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)*	1425	1.010.247.000
	JUMLAH			**43.348.727.358**	**JUMLAH**			**43.775.210.158**

Rencana Kerja Program, Kegiatan, sub kegiatan pada prakiraan maju rencana tahun 2025 masih perlu di tinjau ulang. Sehingga pada Rencana Kerja Awal tahun 2025 mengalami perubahan kinerja dan keuangan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi).

Untuk Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 Paket	
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	8 Paket	
3	Pengawasan ProduksiBenih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	2 Paket	
4	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Paket	
5	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1 Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesian Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertania; dan
3. Penurunan prevalensi angka stunting
4. Penurunan angka kemiskinan
5. Pembangunan pertanian berbasis lingkungan dengan dibentuknya Foksbi

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Pertanian

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta

targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Tabel. 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025
1	2	3	4	8
1	Meningkatkan Produksi Pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian	Jumlah produksi Pertanian (Ton)	765.484,71
			Jumlah populasi ternak (Ekor)	280.999

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Ke-2 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran pada Dinsa Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke 2 Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (Enam) program 15 (Lima belas) Kegiatan dan 43 (Empat puluh satu) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2,	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
		Daerah Kabupaten/Kota	
3,	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Pengembangan Prasarana Pertanian***	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
			Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
4,	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota***	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
5,	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota***	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
6,	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Tingkat Kabupaten/kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAERAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Uraian	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		DINAS PERTANIAN DAERAH				**43.775.210.158,00**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**43.775.210.158,00**
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**43.775.210.158,00**
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**		**100%**	**22.023.444.291,00**
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kewajiban Pelaporan Capaian Kinerja serta Perencanaan dan Penganggaran Dinas		100%	52.177.150,00
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	4.948.000,00
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.592.000,00
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1.979.200,00
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2.304.000,00
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		6 Laporan	40.353.950,00

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perkantoran		100 %	18.168.095.118,00
	3..27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		195 Orang/bulan	18.152.038.718,00
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	3.198.900,00
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	5.536.700,00
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	7.320.800,00
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian kantor		12 Bulan	85.417.554,00
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	34.800.000,00
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		240 Orang	50.617.554,00
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perkantoran		12 Bulan	736.140.861,00
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.775.600,00
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	99.109.100,00
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	43.518.900,00
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	43.519.261,00
	.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100 Dokumen	75.000.000,00
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250 Laporan	465.218.000,00
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Perkantoran		12 Bulan	2.750.773.608,00

	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.332.000,00
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	139.279.711,00
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	614.128.257,00
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1.996.033.640,00
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Perpanjangan STNK dan Pajak Kenderaan serta Pemeliharaan dan BB M Kendaraan Dinas		1 Tahun	230.840.000,00
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	84.840.000,00
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		3 Unit	146.000.000,00
2	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu**		**249.021,37 Ton**	**392.169.600,00**
			Jumlah produksi hasil hortikultura unggulan		**165.229,16 Ton**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tersedianya Informasi Pasar Komoditi Pertanian		5 Kecamatan	172.639.000,00
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1 Laporan	172.639.000,00
				Pembinaan, Monev APBN, APBD I dan APBD II	1 Paket	172.639.000,00
	3.27.02.2.01.0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak		1 Ton	59.600.400,00
				Pengembangan Penangkar Kentang Kecamatan Sipirok, Arse, Marancar	500 Kg	59.600.400,00

	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Pembibitan Kopi Arabika		4500 Batang	109.765.600,00
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1 Dokumen	109.765.600,00
				Pengadaan Bibit Kopi Arabica di 15 Kecamatan	1 Paket	29.765.600
				Pengadaan Bibit Kopi Robusta di 15 Kecamatan	1 Paket	20.000.000
				Pengadaan Bibit Aren di 15 Kecamatan	1 Paket	20.000.000
				Pengadaan Bibit Tembakau di 15 Kecamatan	1 Paket	20.000.000
				Pengadaan Bibit Kakao di 15 Kecamatan	1 Paket	20.000.000
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak		100%	109.765.000,00
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		1 Laporan	94.305.000,00
				Pengadaan ternak sapi lokal (di Kec. Batang Toru, Kec. Angkola Sangkunur, Kec. Sipirok dan A. Timur)	2 Ekor	25.000.000
				Pengadaan ternak kambing (Kec. Batang Toru, Batang Angkola, Sayurmatinggi, Angkola Muaratais, Sipirok dan Arse)	4 Ekor	12.000.000
				Pengadaan ternak ayam petelur (Sipirok, Marancar dan Angkola Selatan)	100 Ekor	20.000.000
				Bantuan Peralatan kandang untuk ayam petelur	1 Paket	15.000.000

				Pengadaan bibit rumput /hijauan untuk sapi dan kambing	1 Paket	15.000.000
				Pengadaan konsentrat untuk ternak sapi dan kambing	1 Paket	7.305.000
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia		1 Laporan	15.460.000,00
3	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu**		**249.021,37 Ton**	**18.997.295.467,00**
			Jumlah produksi hasil hortikultura unggulan		**165.229,16 Ton**	
			Jumlah produksi hasil perkebunan unggulan		**175.925,03 Ton**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan terhadap Prasarana Pertanian		100%	1.604.985.467,00
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 Laporan	268.584.050,00
				Pengadaan Cultivator di Kec Batang Angkola, Angkola Muaratais, Sayurmatinggi, Arse, Sipirok,Angkola Timur, Tantom Angkola, Batangtoru, Marancar, SD.Hole, Aek Bilah, Angkola Selatan, Angkola Barat	10 Unit	100.000.000
				Pengadaan Alat penanam jagung di kec Batang Angkola, Angkola Muaratais, Sayurmatinggi, Arse, Sipirok,Angkola Timur, Tantom Angkola, Batangtoru, Marancar, SD.Hole, Aek Bilah, Angkola Selatan, Angkola Barat, Angkola Sangkunur, Muara Batangtoru	10 Unit	45.000.000
				Pengadaan Handsprayer di Kec Batang Angkola, Angkola Muaratais, Sayurmatinggi, Arse,	15 Unit	10.500.000

				Sipirok,Angkola Timur, Tantom Angkola, Batangtoru, Marancar, SD.Hole, Aek Bilah, Angkola Selatan, Angkola Barat, Angkola Sangkunur, Muara Batangtoru		
				Pengadaan Pupuk Kompos di kec. Batang Angkola, Angkola Muaratais, Sayurmatinggi, Arse, Sipirok,Angkola Timur, Tantom Angkola, Batangtoru, Marancar, SD.Hole, Aek Bilah, Angkola Selatan, Angkola Barat, Angkola Sangkunur, Muara Batangtoru	5.770 Kg	23.084.050
				Pengadaan Power threser di kec Batang Angkola, Angkola Muaratais	6 Unit	90.000.000
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan		1 Ha	530.449.800
				Kegiatan Perkebunan	1 Kegiatan	439.769.600
				Pengembangan Komoditi Hortikultura di 15 Kecamatan	1 Kegiatan	92.680.200
	3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Prasarana Pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan		1 Unit	73.553.200
				Pembangunan Gedung pengeringanpenyimpanan komoditi hortikultura di Kecamatan Sipirok,Arse, Marancar	1 Unit	73.553.200
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan		1 Unit	75.233.200
				Alat Pasca panen Hortikultura di Kecamatan Sipirok, Arse, Marancar	1 Paket	73.553.200

	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola		1 Dokumen	488.565.000
				Pengadaan Benih Padi Varietas Silottik di kecamatan Marancar	1 Kecamatan	10.625.000
				Pengadaan Obat Obatan Pengembangan Pertanaman Budidaya Benih Varietas Silottik di kecamatan Marancar	1 Ha	25.000.000
				Pengadaan Obat Obatan Pengembangan Pertanaman Budidaya Benih Varietas Siporang di kecamatan arse	1 Ha	21.000.000
				Pengadaan Obat Obatan Pengembangan Pertanaman Budidaya Benih Varietas Silatihan di kecamatan sipirok	1 Ha	21.140.000
				Pengadaan Benih Padi unggul nasional di 15 Kecamatan	15 Kecamatan	50.000.000
				Pengadaan benih jagung di 15 kecamatan	15 Kecamatan	50.000.000
				Pengadaan power thresher di kecamatan Batang angkola , sayur matinggi , sipirok, angkola timur, angkola barat, arse, angkola muaratais, batang toru, marancar,sd hole	10 Kecamatan	150.000.000
				Pengadaan mesin pemilipl jagung di kecamatan Tantom, SD Hole	2 Kecamatan	19.000.000
				Pengadaan alat penanam jagung di kecamatan Batang angkola , sayur matinggi , sipirok ,angkola timur,	10 Kecamatan	45.000.000

				Tantom angkola , arse, angkola muaratais, batang toru, marancar,sd hole		
				Pengadaan cangkul di 15 kecamatan	15 Kecamatan	36.800.000
				Pembinaan pengangkar benih padi di Kecamatan sipirok , arse, batang toru	3 Kecamatan	30.000.000
				Pengembangan dan inovasi padi lokal Silatihan , Siporang, Silottik) di Kecamatan sipirok , arse, marancar	3 Kecamatan	30.000.000
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		1 Dokumen	0
				Pengadaan Benih Kentang Kec.Arse,Sipirok,Batang Angkola, Angkola Muaratais,Tantom Angkola, Angkola Timur,Angkola Selatan,Angkola Barat, Marancar,SD.Hole dan Batang Toru	1 Paket	0
				Pengadaan Benih Tomat Kec.Arse,Sipirok,Batang Angkola, Angkola Muaratais,Tantom Angkola, Angkola Timur,Angkola Selatan,Angkola Barat, Marancar,SD.Hole dan Batang Toru	1 Paket	0
				Pengadaan Benih Cabe Merah Besar Kec.Arse,Sipirok, Batang Angkola, Angkola Muaratais,Tantom Angkola, Angkola Timur,Angkola Selatan,Angkola Barat, Marancar,SD.Hole dan Batang Toru	1 Paket	0
				Pengadaan Bibit Bawang Merah Kec.Arse,Sipirok,Batang	1 Paket	0

				Angkola, Angkola Muaratais,Tantom Angkola, Angkola Timur,Angkola Selatan,Angkola Barat, Marancar,SD.Hole dan Batang Toru		
				Pengadaan Bibit Durian Kec.Arse,Sipirok,Batang Angkola, Angkola Muaratais,Tantom Angkola, Angkola Timur,Angkola Selatan,Angkola Barat, Marancar,SD.Hole dan Batang Toru	1 Paket	0
				Pengadaan Pupuk Pelengkap Cair (PPC) dan ZPT Kec.Arse,Sipirok,Batang Angkola, Angkola Muaratais,Tantom Angkola, Angkola Timur,Angkola Selatan,Angkola Barat, Marancar,SD.Hole dan Batang Toru	1 Paket	0
				Pengadaan Pupuk Organik Kec.Arse,Sipirok,Batang Angkola, Angkola Muaratais,Tantom Angkola, Angkola Timur,Angkola Selatan,Angkola Barat, Marancar,SD.Hole dan Batang Toru	1 Paket	0
				Pengadaan Insektisida Kec.Arse,Sipirok,Batang Angkola, Angkola Muaratais,Tantom Angkola, Angkola Timur,Angkola Selatan,Angkola Barat, Marancar,SD.Hole dan Batang Toru	1 Paket	0
				Pengadaan Mulsa Kec.Arse,Sipirok,Batang Angkola, Angkola Muaratais,Tantom Angkola, Angkola Timur,Angkola Selatan,Angkola Barat,	1 Paket	0

				Marancar,SD.Hole dan Batang Toru		
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		1 Dokumen	106.999.817,00
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian		100%	17.392.310.000,00
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		16 Unit	696.101.000,00
				Pembangunan Embung Di Desa Sampean Kecamatan Sipirok	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan Embung Marsada	1 Unit	45.000.000
				Lanjutan Pembangunan Sialaman	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan Embung Pertanian Aek Binuang	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan Embung Pagaran 6	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan Embung Saba Rawu Desa Sampean	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan Embung Desa Sanggapati	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan/Rehabilitasi Embung Di Lingkungan Panggulangan Kel.Pasar Pargarutan	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan/Rehabilitasi Embung Tuan Toko	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan/Rehabilitasi Embung Aek Latong Desa Marsada	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan/Rehabilitasi Embung Sigiring-Giring Desa Sungai Sigiring-Giring	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan/Rehabilitasi Embung Huta Ginjang	1 Unit	45.000.000

				Pembangunan/Rehabilitasi Embung Di Lingkungan Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan	1 Unit	45.000.000
				Pembangunan Bronjong Saba Dikkil	1 Unit	45.000.000
				Rehab Bronjong Aek Lobu Uhom Sekitar Pemukiman Warga Dusun III Lobu Uhom	1 Unit	45.000.000
				Lanjutan Pembangunan Embung Pal XI	1 Unit	21.101.000
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		135 Unit	13.438.510.000,00
				Lanjutan Jalan Usaha Tani Masyarakat Lingkungan V desa Banjar toba Kec. Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Jalan sigiring2 Lombang Dusun Tanjung Medan Desa Pahae Aek Sagala Kec. Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha Tani Menuju Sampuran Batang Miha Dusun batang miha jae kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha Tani Di Desa Paran Julu Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Situmba Julu Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dari Aek Bungo Menuju Perkuburan Masyarakat desa Silaiya Kec.Sayurmatinggi	1 Unit	100.000.000

				Lanjutan pembangunan Jalan Usaha Tani Kampung Aek Haminjon Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan pembangunan Jalan Usaha Tani Kel Arse Nauli	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan pembangunan Nanggar jati Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Peningkatan Jalan Bunga Bondar Menuju Kel.Arse Nauli Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Saba Padang Lingkungan Arse Julu Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Peningkatan Jalan Usaha Tani Jonggol Julu Maondang Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Aek Siguti Lingkungan Lumban lobu Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Tulason Ke SMK Arse	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Desa Pinagar Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Dolok Arse Julu Mondang Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Desa Pinagar Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Dolok Arse Julu Mondang Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Sumuran Kec. Batang toru	1 Unit	100.000.000

				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Aek Latong - Bulu Mario Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Luat Lombang Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Pargarutan Julu Kec. Angkola Timur	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Pertanian Padang Mandailing Kec.SD Hole	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Pertanian Haunatas Kec.Marancar	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Pertanian Huta Lereng Desa Paran Dolok Mardomu Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Aek Sitorbis Dusun Situmba Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Pertanian Sialaman Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Setia Baru Desa Simataniari Kec.Angkola sangkunur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Pertanian Sijungkang Kec.Angkola Timur	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Pertanian Kel.Sipirok Godang Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Rura Hapundung Kec.Batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/rehab Jalan Pertanian Saba Dolok Kec.Angkola Timur	1 Unit	100.000.000

				Pembangunan/rehab Jalan Pertanian Saba Bolak Kec.Angkola Timur	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Saba Otal Kec.Angkola Timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Saba lobu Kampung Silinggom-Linggom Kec.Angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Peningkatan Jalan Pertanian Palsabolas Kec.Angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Saut Banua Simanosor Kec.SD Hole	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Di Kampung Binanga Kec.Angkola Timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Tapus Sabungan Desa Dolok Sordang Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/rehab Jalan Usaha Tani Sirumambe Tobat Goti Kec.Angkola Timur	1 Unit	100.000.000
				Rabat Beton Sampuran Sibodat Kec.Angkola selatan	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/rehab Jalan Pertanian Pardomuan Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Kel.Arse Kec.Arse	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Saba Bondar Pining Desa Muara Tais II Kec.Angkola Muaratais	1 Unit	100.000.000

				Pembangunan Jalan Usaha Tani Dari Simpang Jalan Hurase Menuju Sawah Boboran Kelurahan Pintu padang Kec.Batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Dari Saba Julu Ke Kebun Sorik Kec.Batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Aek Libung Kec.Sayurmatinggi	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Janji Manaon Kec.Batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Pertanian Desa Garoga Kec.Batang toru	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Saba Balas Desa Tahalak Ujung Gading Kec.Batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Kelurahan Bintuju Kec.Angkola Muaratais	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/rehab Jalan Usaha Tani Sihombuk Kel.Sigalangan Kec.Batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Sitampa Kec.Batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan/Rehab Rura hapundung Kel.Sigalangan Kec.Batang angkola	1 Unit	100.000.000

				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Desa Sibulele Kec.batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Simadoras Desa Bange Link.IV Kec.sayurmatinggi	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Janji Mauli Situmba Kec.tantom angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Saba Jambu Desa Pasar Lama kec.batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Desa Aek Libung kec.sayurmatinggi	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Desa Dolok Sordang Kec.sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Kampung Binanga kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Tapus Sabungan Desa Dolok Sordang Kec.Sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Sirumambe Tobat Goli kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Sawah Hunur Lingkungan Tiang Aras kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Saba Gariang Desa Biru kec.aek bilah	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Gariang Desa Sigolang kec.aek bilah	1 Unit	100.000.000

				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Desa Tapus Sipagabu kec.aek bilah	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Desa Tolang ke.aek bilah	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Jalan Usaha Tani Saba Sitio-tio Desa Lumban Ratus kec.tantom angkola	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Jalan Usaha Tani Desa Panindoan kec.tantom angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Saba Pangalidangan Desa Huta Pardomuan kec.tantom angkola	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Jalan Usaha Tani Desa Sisoma kec.tantom angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Kebun Sigajah Desa Hurase kec.batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Lingkungan 4 Siture Kel.Bangun Purba kec.batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Kel.Sigalangan kec.batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Sawah Seropan kec.batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Sorimanaon kec.batang angkola	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Desa Sipakko kec.angkola muaratais	1 Unit	100.000.000

				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Desa Muaratais III kec.angkola muaratais	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Pagaran RI kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Peningkatan Jalan Usaha Tani Aek Batang Alundi Desa Huta Ginjang kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Sanggapati kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Aek Sabaon kec.marancar	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Huta Ginjang kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Huta Ginjang Dusun Sibio-Bio Julu kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Pertanian Desa Sampean kec.sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Siparlaungan Desa Pardomuan kec.arse	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Menuju Sitorbis Desa Pargarutan Dolok kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Luat Lombang Marsada kec.sipirok	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Sigiring-Giring Lombang Kelurahan Sipirok Godang kec.sipirok	1 Unit	100.000.000

				Pembangunan Jalan Usaha Tani Situmbaga kec.angkola selatan	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Aek Latong Desa Marsada kec.sipirok	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Pertanian Sisundung Sibakkua kec.angkola barat	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Kel.Pasar Pargarutan kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Desa Harean kec.tantom angkola	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha tani Menuju Pengungsi Aceh Desa Muara Huta Raja kec.muara batang toru	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Jurusan Lopo Baru Menuju Lingkungan I Kel.Huta Raja kec.muara batang toru	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Menuju Aek Mardogo Desa Terapung Raya kec.muara batang toru	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Menuju KPN Desa Terapung Raya kec.muara batang toru	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok C Kelurahan Muara Manompas kec.muara batangtoru	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Mabang I Desa Muara Hutaraja kec.muara batang toru	1 Unit	100.000.000

				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tapus Godang kec. Aek bilah	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Kampung Sigolang kec.aek bilah	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sungai Sigiring-Giring kec.aek bilah	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Aek Haminjom kec.arse	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Aek Simotung kec.SD Hole	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Padangmandailing kec.SSD Hole	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Rabat Beton Sipange Julu kec.sayurmatinggi	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Rabat Beton Silaiya kec.sayurmatinggi	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Rabat Beton Silaiya Tanjung Leuk kec.sayurmatinggi	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Sabarodang Desa Siunjam kec.sayurmatinggi	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Rabat Beton Batu Godang Desa Bange kec.sayurmatinggi	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Rabat Beton Saba Julu Desa Sibong-bong kec.angkola selatan	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Saba Huta Desa Sibong-bong kec.angkola selatan	1 Unit	100.000.000

				Pembangunan Jalan Usaha Tani Sitaratoit Lubuk Raya kec.angkola selatan	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Simpang Potong Royong- Batas Tonga kecc.angkola barat	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Kampung Pangaribuan Desa Sisundung kec.angkola barat	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sisundung kec.angkola barat	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Kampung Muara Pardomuan Desa Sisundung kec.angkola barat	1 Unit	100.000.000
				Rehab Jalan Dusun I Sampai Dusun III lobu Uhom kec.angkola barat	1 Unit	100.000.000
				Rehab Jalan Dusun I Panobasan Lombang kec.angkola barat	1 Unit	100.000.000
				Rehab Jalan Dusun III Lobu Uhom kec.angkola barat	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Jalan Usaha Tani Saba Toyas sampai saba RI Terletak Di dusun II Desa Panobasan kec.angkola barat	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Simangidu Dusun III Lobu Uhon Panobasan Lombang kec.angkola barat	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Desa Sibadoar kecc.angkola sangkunur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Paraupan kec.angkola selatan	1 Unit	100.000.000

				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Janji Matogu kec.angkola selatan	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani Janji Laba Lasiak kec.angkola selatan	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Panompuan kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Huraba Dusun Pintu Langit Julu kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Kebun Rambah Kampung Huraba kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Lanjutan Jalan Usaha Tani Saba Bolak Kel.Batang Tura Sirumambe kec.angkola timur	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Binanga kec.marancar	1 Unit	38.510.000
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		4 Unit	618.695.000,00
				Pembangunan Pagar BPP Arse	1 Unit	150.000.000
				Pembangunan/Rehab BPP Angkola Barat	1 Unit	150.000.000
				Pembangunan Pagar BPP Muara BT.Toru	1 Unit	150.000.000
				Pemagaran BBI Sappean Angkola Timur	1 Unit	168.695.000
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		51 Unit	2.639.004.000,00
				Pembangunan Paret Irigasi Di Saba Tuppuk Desa Marsada Kec.sipirok	1 Unit	50.000.000

				Pembangunan Irigasi Persawahan Saba Jambu Dusun Batangmiha Jae Kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Atau Rehab Bendungan Irigasi Pertanian Di Kampung Nagasaribu Desa Batang Tura Julu Kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Rehab Tali Air Dengan Panjang ±350 Meter Yang Sumber Airnya Berasal Dari Aek Sagala kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Saluran Irigasi Yang Berada Di Dusun Tor Godang Desa Pal XI kec. Angkola timur	1 Unit	50.000.000
				Lanjutan pembangunan Jaringan Irigasi Aek Silo Komplek Dusun Aek Torop Kec.arse	1 Unit	50.000.000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nanggar Jati Huta Kec.arse	1 Unit	50.000.000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Aek Torop Huta Padang kec.arse	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Saluran Irigasi Di Aek Sisihat Lingkungan Jonggol Jae Kec.arse	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Jaringan Irigasi Di tahalak Sere Lingkungan Pagaran Pisang Saba Jae kec.arse	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Tahalak Ambang kec.sayurmatinggi	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Jaringan Irigasi Padang Lancat Kec.batang toru	1 Unit	50.000.000

				Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Batu Bujur Sisundung kec.angkola barat	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Saba Rodang Lumban Huayan kec.sayurmatinggi	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Sianggunan kec.batang toru	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Hutabaru Siagian kec.batang toru	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Pertanian Sialagundi kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi Pertanian Siranap kec.marancar	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Sialaman kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Lanjutan Pembangunan Irigasi Pertanian Saba Ogung kec.angkola timur	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan/Rehab Irigasi Pertanian Batang Miha kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Pertanian Saut Banua Simanosor kec.SD Hole	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi atau Paret Di Desa Sibong-bong kec.angkola selatan	1 Unit	50.000.000
				Rehab Jaringan Irigasi Saba Huta Lingkungan Pagaran Pisang Kel.Arse Nauli kec.Arse	1 Unit	50.000.000
				Rehab Jaringan Irigasi Siantar Tua Desa Natambang Roncitan Kec.Arse	1 Unit	50.000.000

				Rehab Jaringan Irigasi Saba Rimba Batu Horpak Jae Kec.arse	1 Unit	50.000.000
				Rehab Jaringan Saba Liang Kampung Batu Horpak Julu kec.arse	1 Unit	50.000.000
				Jaringan Irigasi Saba Atcicing Desa Sipogu kec.arse	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Jaringan Irigasi Sibio-Bio kec.angkola timur	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan/rehab Irigasi Saba Jae Kel.Hutasuhut kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan/rehab Irigasi Saba Donok Desa Tolang Kec.Aek bilah	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan/Rehab Irigasi Pertanian Di Desa Sori Madingin Kec. Batang angkola	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan/Rehab Irigasi Pertanian Desa Hurase kec.batang angkola	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Kilang Papan kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Persawahan Somamggal Parmonangan kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Persawahan Saba Tonga Desa Tolang Julu kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Persawahan Sijabe-Jabe Desa Tolang Julu kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Persawahan Nagar-Gar Desa Tolang Julu kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Saba Huta kec.sipirok	1 Unit	50.000.000

				Pembangunan Irigasi Saba Siraga kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Saba Julu kec.sipirok	1 Unit	50.000.000
				Lanjutan Irigasi Saba Dikkil Desa Sitaratoit kec.angkola barat	1 Unit	50.000.000
				Lanjutan Irigasi Saba Tahalak Desa Sitaratoit kec.angkola barat	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan/Rehab Irigasi Saba Julu Desa Sitaratoit kec.angkola barat	1 Unit	50.000.000
				Saluran Air Persawahan Kampung Koje Desa Sisundung kec.angkola barat	1 Unit	50.000.000
				Saluran Air Persawahan Kampung Koje Desa Sisundung kec.angkola barat	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan/Rehab Irigasi Pertanian Desa Huraba kec.angkola timur	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Pertanian Dusun Simandalu kec.angkola timur	1 Unit	50.000.000
				Lanjutan Irigasi Lobu Layan Sigordang kec.angkola barat	1 Unit	50.000.000
				Pembangunan Irigasi Sugi Tonga kec.marancar	1 Unit	100.000.000
				Pembangunan Irigasi Kampung Tapus kec.angkola timur	1 Unit	89.004.000
4	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan (%)**		**-**	**257.804.000,00**
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengobatan Hewan		100%	230.363.000,00

	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		15 Laporan	230.363.000,00
				Pengadaan obat-obatan ternak	1 Paket	230.363.000,00
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Keterjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Masyarakat Veteriner / Kesmavet		2 Kegiatan	27.441.000,00
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		5 laporan	27.441.000,00
				Pengadaan alat Hammer Mill (Kec. Sipirok, Angkola Timur, Batang Angkola dan A. Muaratais)	4 Unit	27.441.000,00
5	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun (Kw/Ha)**		**-**	**203.101.900,00**
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian terhadap OPT		100%	203.101.900,00
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		10 Ha	177.602.000,00
				Belanja Obat-obatan (Fungisida, Insektisida, Rodentisida, PPC)	1 Paket	100.000.000
				Pelaksanaan kegiatan Gropyokan Tikus di Kecamatan Sipirok,Arse, Batang Angkola, Angkola Muaratais, Sayurmatinggi	5 Kecamatan	77.602.000

	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		1 Ha	10.499.900,00
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		3 Ha	15.000.000,00
6	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah Kelompok Tani yang Aktif (Kelompok Tani)**		**1423**	**1.901.394.900,00**
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Kegiatan kegiatan Penyuluhan Pertanian		100%	1.901.394.900,00
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Unit	891.147.900,00
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Unit	8.010.247.000,00
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		1 Unit	100.000.000
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi		1 Unit	100.000.000
	J U M L A H					**43.775.210.158,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-lima dari Rencana Strategis Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Sipirok, 08 Juli 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

HENRY HAMDANI HASIBUAN, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP.196802191996031002

DOKUMEN RENCANA KERJA

TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK Kode Pos 22742



KATA PENGANTAR

Sebagai wujud aplikasi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyususn dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mana dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai sub kegiatan dengan tetap memperhatikan kondisi sumber daya yang dimiliki. Berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengalami pemutakhiran data berdasarkan pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. Walaupun demikian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tetap dijadikan acuan dalam memenuhi target pembangunan yang akan dicapai.

Rancangan Rencana Kerja menggambarkan tentang Program dan Kegiatan Tahunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanauli Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pedoman untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Demikian Dokumen Rencana Kerja ini dibuat, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dimasa mendatang.

Sipirok,

Yang diperintahkan,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

MHD. YUSUF, SP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196608301997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BABII EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.2.1 Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 14
2.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daearah 14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **32**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 33
3.3 Program dan Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **41**

BAB V PENUTUP **41**

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	8
Tabel 2.1.1	Jumlah PKK Aktif	12
Tabel 2.1.2	Jumlah Kelompok Binaan LPM	12
Tabel 2.1.3	Jumlah BUMDES Aktif Tahun 2023	13
Tabel 2..1.4	Jumlah Desa Binaan Tahun 2023	14
Tabel 2.1.5	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Terlatih Tahun 2023	14
Tabel 2.2.1	Daftar Nama Pegawai Dinas PMD Daerah	24
Tabel 2.2.2	Daftar Pegawai Dari Jenis Kelamin	25
Tabel 2.2.3	Daftar Inventaris Kantor	25
Tabel 2.2.4	Identifikasi Faktor Internal	27
Tabel 2.2.5	Identifikasi Faktor Eksternal	28
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2023	29
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli selatan	33
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan	36
Tabel T-C.33	Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	39
Tabel IV.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dan Perkiraan Naju 2026.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Struktur Organisasi 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 yang selanjutnya isingkat enja Dinas PMD adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun Renja Dinas PMD disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas PMD Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja tahun 2023, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024. Renja memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugasdan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Program Penyusunan Renja Dinas PMD terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rencana Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaga Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesian omor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomr 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
31. Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 309, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 36);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
40. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 687);
41. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah KabupatenTapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 969);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas PMD ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah Tujuan disusunnya Renja Dinas PMD ini adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
2. Memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan.
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daera, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tinedak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum memuat penjelasantentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Raenja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjtnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Restra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisas APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah terhadap capaian program nasiona/internasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dilakukan dengan sasaran kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan. Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024) mengacu pada pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renstra tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi Anggaran Belanja untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesarRp. 11.183.500.552,- yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 8.863.536.999,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.319.963.553,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, Realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 10.408.939.136,- atau sebesar 93,07 % dengan rincian sebagai berikut : Realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.389.090.145,- atau 94,64% dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.019.848.991,- atau 87,06 %.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**13**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2	**13**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**500**	**200**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**400**	**80%**
2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)	65	26	13	13	100%	13	52	80%
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Adminisatasi Keuangan dan Tugas ASN (Tahun)	5	2	1	1	100%	1	4	80%

2	13	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Tahun)	5	2	1	1	100%	1	4	80%
2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	60	24	12	12	100%	12	48	80%
2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	60	24	12	12	100%	12	48	80%
2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Tahun)	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2	**13**	**04**		**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Badan Usaha Milik Desa Aktif (Kelompok)**	**120**	**19**	**100**	**17**	**17%**	**110**	**17**	**14%**
					Persentase Desa Kategori Mandiri (Desa)	**5**	**1**	**0**	**2**	**200%**	**2**	**2**	**40%**
					Persentase Desa Kategori Maju (Desa)	**35**	**42**	**25**	**42**	**168%**	**30**	**42**	**120%**
					Persentase Desa Kategori Berkembang (Desa)	**133**	**169**	**143**	**167**	**117%**	**138**	**167**	**80%**
					Persentase Desa Kategori Tertinggal (Desa)	**40**	**0**	**37**	**0**	**100%**	**39**	**0**	**100%**
					Persentase Desa kategori Sangat Tertinggal (Desa)	**3**	**0**	**6**	**0**	**100%**	**4**	**0**	**100%**
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa (Desa)	1060	424	212	212	100%	212	848	80%

2	**13**	**05**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Jumlah Kelompok Binaan Lembaga (LPMD) Aktif (Kelompok)**	**1060**	**456**	**212**	**212**	**100%**	**212**	**880**	**83%**
					Jumlah PKK aktif (Kelompok)	**1140**	**456**	**228**	**228**	**100%**	**228**	**912**	**80%**
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam DaerahKabupaten/ Kota Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Adat (Kecamatan)	75	30	15	15	100%	15	60	80%

Kesimpulan akan daftar rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD s/d tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota telah mencapai 80 % adapun kejelasan kegiatan pada program ini, yaitu :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 80 % karena belum selesai menyelesaikan kegiatan sesuai target RENSTRA
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencapai 80 % karena kegiatan periode target RENSTRA seluruhnya dilaksanakan
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencapai 80 % karena kegiatan ini telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai target RENSTRA
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 80 %karena kegiatan ini telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai target RENSTRA
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 80 % karena kegiatan ini telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai target RENSTRA
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 60 % karena belum selesai menyelesaikan kegiatan sesuai target RENSTRA
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa telah mencapai 67. % adapun kejelasan kegiatan pada program ini, yaitu :
   a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa mencapai 80 % karena belum selesai menyelesaikan kegiatan sesuai target RENSTRA
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat telah mencapai 81. % adapaun kejelasan kegiatan pada program ini, yaitu :
   a. Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mencapai 80 % karena belum selesai menyelesaikan kegiatan sesuai target RENSTRA

Tingkat Pencapaian

Tabel 2.1.1
Jumlah PKK Aktif

No	Kecamatan	Jumlah PKK			
		Desa	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten
1	Angkola Barat	12	2	1	
2	Batangtoru	19	4	1	
3	Angkola Timur	13	2	1	
4	Sipirok	34	6	1	
5	Saipar Dolok Hole	12	2	1	
6	Angkola Selatan	13	4	1	
7	Batang Angkola	17	4	1	
8	Arse	8	2	1	1
9	Marancar	11	1	1	
10	Sayurmatinggi	18	1	1	
11	Aek Bilah	12	0	1	
12	Muara Batangtoru	6	3	1	
13	Tantom Angkola	16	1	1	
14	Angkola Sangkunur	8	2	1	
15	Angkola Muaratais	13	2	1	
Jumlah		212	36	15	1
Total Keseluruhan		264			

Tabel 2.1.2
Jumlah Kelompok Binaan LPM

No	Kecamatan	LPM	
		Desa	Kelurahan
1	Angkola Barat	12	2
2	Batangtoru	19	4
3	Angkola Timur	13	2
4	Sipirok	34	6
5	Saipar Dolok Hole	12	2
6	Angkola Selatan	13	4
7	Batang Angkola	17	4
8	Arse	8	2
9	Marancar	11	1
10	Sayurmatinggi	18	1
11	Aek Bilah	12	0
12	Muara Batangtoru	6	3
13	Tantom Angkola	16	1
14	Angkola Sangkunur	8	2
15	Angkola Muaratais	13	2
Jumlah		212	36
Total		248	

Tabel 2.1.3
Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Aktif Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Bumdes
1	Angkola Barat	-
2	Batangtoru	2
3	Angkola Timur	2
4	Sipirok	5
5	Saipar Dolok Hole	1
6	Angkola Selatan	-
7	Batang Angkola	1
8	Arse	-
9	Marancar	1
10	Sayurmatinggi	1
11	Aek Bilah	-
12	Muara Batangtoru	1
13	Tantom Angkola	-
14	Angkola Sangkunur	1
15	Angkola Muaratais	2
Jumlah		17

Tabel 2.1.4
Jumlah Desa Binaan Tahun 2023

No	Kecamatan	Nama Desa	Kategori
1	Angkola Barat	Sialogo	PAAR
2	Batangtoru	Napa	Tertib Administrasi
3	Angkola Timur	Sanggapati	LBS
4	Sipirok	Simaninggir	PHBS
5	Saipar Dolok Hole	Puskesmas Sipagimbar	IVA Test
6	Angkola Selatan	Gunung Baringin	PTP2WKSS
7	Batang Angkola	Aek Gunung	PKK KKBPK
8	Arse	Puskesmas Hanopan	IVA Test
		Pardomuan	UP2PKK
9	Marancar	Aek Sabaon	Hatinya PKK
10	Sayurmatinggi	Sipange Julu	UP2PKK
11	Aek Bilah	Sigolang	PKK KKBPK
12	Muara Batangtoru	Terapung Raya	Posyandu
13	Tantom Angkola	Aek Parupuk	Hatinya PKK
14	Angkola Sangkunur	Malombu	PAAR
15	Angkola Muaratais	Sorimanaon	LBS
Jumlah		16	

Tabel 2.1.5
Jumlah Pemerintahan Desa Yang Terlatih Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Angkola Barat	12
2	Batangtoru	19
3	Angkola Timur	13
4	Sipirok	34
5	Saipar Dolok Hole	12
6	Angkola Selatan	13
7	Batang Angkola	17
8	Arse	8
9	Marancar	11
10	Sayurmatinggi	18
11	Aek Bilah	12
12	Muara Batangtoru	6
13	Tantom Angkola	16
14	Angkola Sangkunur	8
15	Angkola Muaratais	13
Jumlah		212

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka peningkatan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain mengacu kepada perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sistem dan prosedur kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah melibatkan semua aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebagai badan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu bekerja sama dengan berbagai sektor/ lintas sektor serta mampu menunjukkan kinerja pelayanan dan meningkatkan pemberdayaan untuk mewujukkan masyarakat adil dan sejahtera.

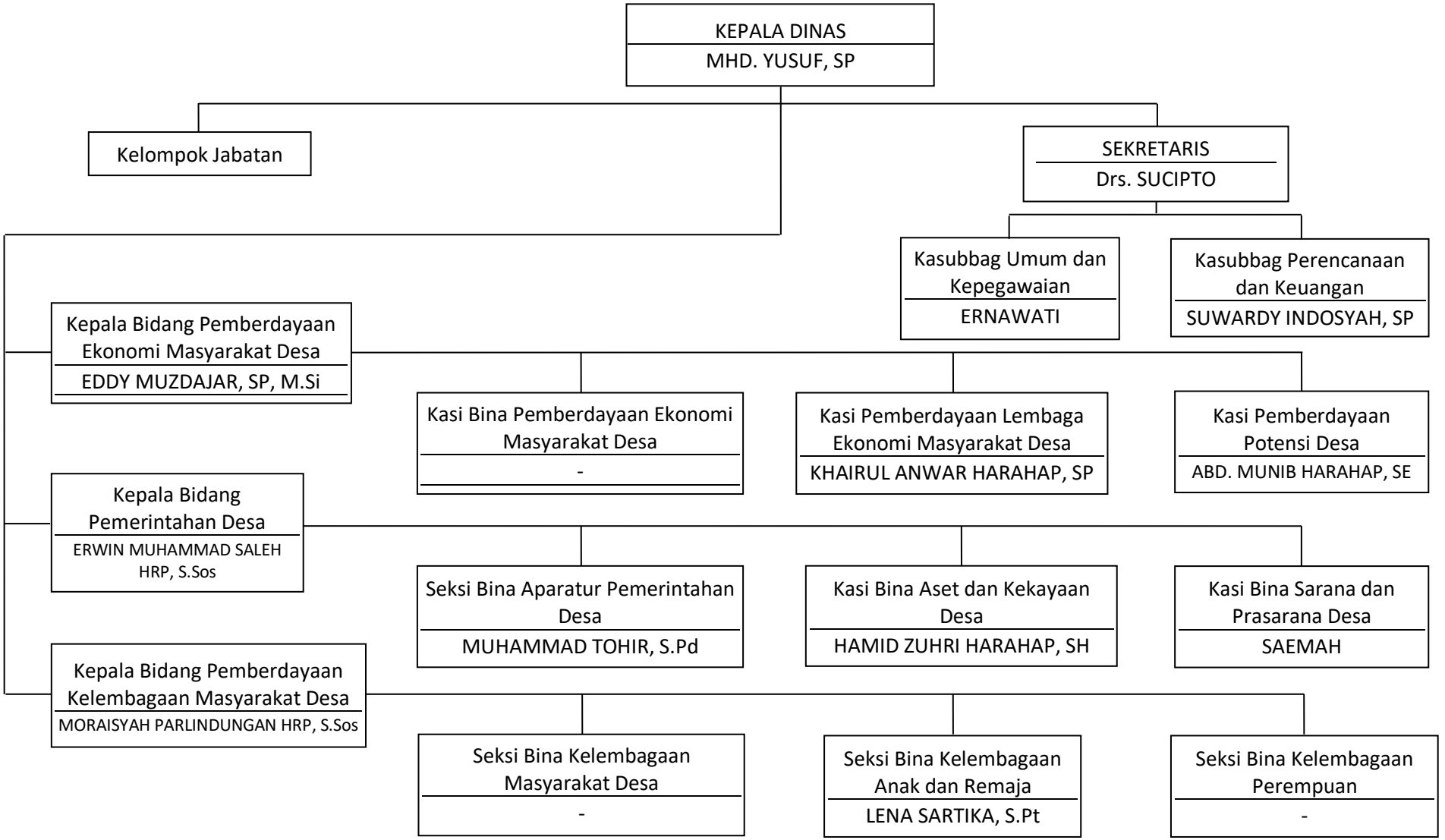
Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Rencana Strategis periode 2022-2026 dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja

sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan periode sebelumnya 2016-2021, agar dapat mengidentifikasikan potensi dan permasalahankhusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun demi pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah maka dibentuklah struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Gambar 2.2.1
Struktur OPD



Dengan adanya struktur organisasi Peragkat Daerah yang telah dibentuk, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tugas dan wewenang yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Tugas Pokok

   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas :

   a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
   b. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan Desa
   c. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa
   d. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan

2. Fungsi

   Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa
   d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, tersebut diatas :

1. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan, penilaian
   b. Penegakan disiplin pegawai dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   c. Merumuskan kebijakan dan pembinaan pada bagian Sekretariat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa
   d. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Ekonomi Masryakat Desa, Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat Desa
   e. Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi pada bagian Sekretariat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa
   f. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
   g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Tapanuli Selatan

2. Sekretariat Dinas mempunyai uraian fungsi sebagai berikut :
   a. Mengkoordinasikan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran dinas
   c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan tata laksana
   d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
   e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

   Untuk menyelenggarakan uraian tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berfungsi :
      1. Pelaksanaan urusan rumah tangga
      2. Penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
      3. Pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran
      4. Pengelolaan arsip dan peraturan
      5. Pembinaan dan pengelolaan urusan keamanan kantor
      6. Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa
      7. Penyusunan analisis kebutuhan dan formasi pegawai
      8. Pengelolaan manajemen naskah dan dokumen pegawai
      9. Pengelolaan peningkatan kapasitas dan penilaian kinerja pegawai
      10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berfungsi :
      1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategis Dinas, Rencana Kerja Tahunan Dinas serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
      2. Penyiapan dan penyesuaian Rencana Program dan Anggaran Kerja antar bidang
      3. Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
      4. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
      5. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan kinerja di lingkungan dinas
      6. Pembinaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan
      7. Pembinaan dan pengelolaan akuntansi dan verifikasi
      8. Pembinaan dan pengelolaan urusan penata usahaan keuangan dan barang milik daerah
      9. Pengelolaan urusan laporan keuangan dan barang milik daerah
      10. Pembinaan dan pelaksanaan anggaran serta penyiapan laporan pemerikasaan keuangan

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
   a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa dan pemberdayaan potensi desa
   b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa dan pemberdayaan potensi desa
   c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa dan pemberdayaan potensi desa
   d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa dan pemberdayaan potensi desa
   e. Pelaksanaan urusan administasi di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

   Untuk menyelenggarakan uraian tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dibantu oleh :
   a. Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa yang berfungsi :
      1. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan pada permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat desa, jaringan pemasaran desa, perdagangan desa dan kewirausahaan desa
      2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pada permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat desa, jaringan pemasaran desa, perdagangan desa dan kewirausahaan desa
      3. Pemberian bimbingan teknis, supervis dan pembinaan pada permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat desa, jaringan pemasaran desa, perdagangan desa dan kewirausahaan desa
      4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat desa, jaringan pemasaran desa, perdagangan desa dan kewirausahaan desa
      5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

   b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang berfungsi :
      1. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan pada lembaga ekonomi masyarakat desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengembangan usaha BUMDES, pasar desa, lumbung pangan desa, lembaga keuangan mikro, koperasi desa
      2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pada lembaga ekonomi masyarakat desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengembangan usaha BUMDES, pasar desa, lumbung pangan desa, lembaga keuangan mikro, koperasi desa

3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan pada lembaga ekonomi masyarakat desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengembangan usaha BUMDES, pasar desa, lumbung pangan desa, lembaga keuangan mikro, koperasi desa
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada lembaga ekonomi masyarakat desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengembangan usaha BUMDES, pasar desa, lumbung pangan desa, lembaga keuangan mikro, koperasi desa
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Pemberdayaan Potensi Desa yang berfungsi :
   1. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan pada potensi desa, pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, maritim, lingkungan hidup, pemetaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, inovasi dan promosi teknologi tepat guna
   2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pada potensi desa, pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, maritim, lingkungan hidup, pemetaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, inovasi dan promosi teknologi tepat guna
   3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan pada potensi desa, pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, maritim, lingkungan hidup, pemetaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, inovasi dan promosi teknologi tepat guna
   4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada potensi desa, pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, maritim, lingkungan hidup, pemetaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna, inovasi dan promosi teknologi tepat guna
   5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang aparatur pemerintahan desa, aset dan kekayaan desa, sarana dan prasarana desa
   b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang aparatur pemerintahan desa, aset dan kekayaan desa, sarana dan prasarana desa
   c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang aparatur pemerintahan desa, aset dan kekayaan desa, sarana dan prasarana desa
   d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa, aset dan kekayaan desa, sarana dan prasarana desa
   e. Pelaksanaan urusan administrasi di bidang pemerintahan desa
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

   Untuk menyelenggarakan uraian tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Bidang Pemerintahan Desa dibantu oleh :
   a. Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa yang berfungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan aparatur pemerintahan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hokum desa, evaluasi tingkat perkembangan desa, kapasitas aparatur desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa dan penataan wilayah desa dan penataan kewenangan desa
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan aparatur pemerintahan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hokum desa, evaluasi tingkat perkembangan desa, kapasitas aparatur desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa dan penataan wilayah desa dan penataan kewenangan desa
3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi aparatur pemerintahan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hokum desa, evaluasi tingkat perkembangan desa, kapasitas aparatur desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa dan penataan wilayah desa dan penataan kewenangan desa
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan aparatur pemerintahan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, produk hokum desa, evaluasi tingkat perkembangan desa, kapasitas aparatur desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa dan penataan wilayah desa dan penataan kewenangan desa
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya

b. Seksi Bina Aset dan Kekayaan Desa yang berfungsi :
   1. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan aset dan kekayaan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatn desa, fasilitasi transfer dana desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa
   2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan aset dan kekayaan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatn desa, fasilitasi transfer dana desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa
   3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan aset dan kekayaan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatn desa, fasilitasi transfer dana desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa
   4. Pelaksanaan dan pelaporan aset dan kekayaan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatn desa, fasilitasi transfer dana desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa
   5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c. Seksi Sarana dan Prasarana Desa yang berfungsi :
   1. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman desa, transfortasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa dan telekomunikasi desa
   2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman desa, transfortasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa dan telekomunikasi desa
   3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman desa, transfortasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa dan telekomunikasi desa

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman desa, transfortasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa dan telekomunikasi desa
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya

5. Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang kelembagaan masyarakat desa, kelembagaan perempuan, kelembagaan anak dan remaja
   b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang kelembagaan masyarakat desa, kelembagaan perempuan, kelembagaan anak dan remaja
   c. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan di bidang kelembagaan masyarakat desa, kelembagaan perempuan, kelembagaan anak dan remaja
   d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan pembinaan di bidang kelembagaan masyarakat desa, kelembagaan perempuan, kelembagaan anak dan remaja
   e. Pelaksanaan urusan administrasi di bidang kelembagaan masyarakat desa
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

   Untuk menyelenggarakan uraian tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dibantu oleh :
   a. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa yang berfungsi :
      1. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan dasar, kelompok gotong royong masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, musyawarah desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, perlindungan sosial adat dan budaya, pengembangan akses informasi masyarakat desa, kerja sama desa dan kemitraan desa
      2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan dasar, kelompok gotong royong masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, musyawarah desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, perlindungan sosial adat dan budaya, pengembangan akses informasi masyarakat desa, kerja sama desa dan kemitraan desa
      3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan dasar, kelompok gotong royong masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, musyawarah desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, perlindungan sosial adat dan budaya, pengembangan akses informasi masyarakat desa, kerja sama desa dan kemitraan desa
      4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan dasar, kelompok gotong royong masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, musyawarah desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, perlindungan sosial adat dan budaya, pengembangan akses informasi masyarakat desa, kerja sama desa dan kemitraan desa

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b. Seksi Bina Kelembagaan Perempuan yang berfungsi :
   1. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan kelembagaan perempuan, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), pengembangan ekonomi perempuan, pembinaan perempuan lanjut usia
   2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan kelembagaan perempuan, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), pengembangan ekonomi perempuan, pembinaan perempuan lanjut usia
   3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan kelembagaan perempuan, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), pengembangan ekonomi perempuan, pembinaan perempuan lanjut usia
   4. Pelaksananaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagaan perempuan, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), pengembangan ekonomi perempuan, pembinaan perempuan lanjut usia
   5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c. Seksi Bina Kelembagaan Anak dan Remaja yang berfungsi :
   1. Penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan anak dan remaja, pos pelayanan terpadu (Posyandu), pendidikan anak usia dini (PAUD), Naposo-Nauli Bulung dan karang taruna
   2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan anak dan remaja, pos pelayanan terpadu (Posyandu), pendidikan anak usia dini (PAUD), Naposo-Nauli Bulung dan karang taruna
   3. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan anak dan remaja, pos pelayanan terpadu (Posyandu), pendidikan anak usia dini (PAUD), Naposo-Nauli Bulung dan karang taruna
   4. Pelaksananaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembinaan anak dan remaja, pos pelayanan terpadu (Posyandu), pendidikan anak usia dini (PAUD), Naposo-Nauli Bulung dan karang taruna
   5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

6. Kelompok Jabatan Fungsional
   a. Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian masing-masing
   c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
   d. Jumlah Kelompok Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja

e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

7. Tata Kerja
   a. Dalam melaksanakan tugas setiap Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
   b. Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
   c. Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
   d. Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
   e. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.2.1
Daftar Nama Pegawai Dinas PMD Daerah

NO	NAMA	NIP	GOL	STATUS	JABATAN
1	Mhd. Yusuf, SP	196608301997031001	IV/b	PNS	Kepala Dinas
2	Drs. Sucipto	196709031997101001	IV/a	PNS	Sekretaris
3	Eddy Muzdajar, SP, M.Si	197210292006041005	III/d	PNS	Kabid
4	Erwin Muhammad Saleh Hrp, S.Sos	198307172009041001	III/d	PNS	Kabid
5	Moraisyah Parlaungan Hrp	198210062011011006	III/d	PNS	Kabid
6	Suwardy Indosyah, SP	197805302008011003	III/d	PNS	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7	Ernawati	197207221994022001	III/b	PNS	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8	Khairul Anwar Harahap, SP	197406062007011003	III/d	PNS	Pekerja Sosial Ahli Muda
9	Hamid Zuhri harahap, SH	198012302003121004	III/d	PNS	Penyuluh Sosial
10	Lena Sartika, S.Pt	198209172011012010	III/d	PNS	Analisis Kebijakan
11	Abdul Munib Harahap, SE	197408102010011001	III/b	PNS	Penyuluh Sosial Ahli Muda
12	Saemah	196908081995032003	III/b	PNS	Pekerja Sosial Ahli Muda
13	Muhammad Tohir, SPd	197908102010011001	III/b	PNS	Analisis Kebijakan
14	Hafni Leli	196803151987102001	III/b	PNS	Pengadministrasi Umum
15	Syarifah Batubara	198203252010012001	III/b	PNS	Penata Laporan keuangan
16	Linni Efrida Harahap	197706192003122003	III/b	PNS	Pengelola Surat
17	Elfi Handayani	198208082009042007	II/c	PNS	Pengadministrasi Keuangan
18	Evan Agusman	197909062008011002	II/c	PNS	Pengadministrasi Kepegawaian

19	Candra Halim Pasaribu, SE	-	-	THL	Tenaga Entry Data
20	Rini Andriani Pulungan, SE.I	-	-	THL	Tenaga Entry Data
21	Lisma Suryani Harahap	-	-	THL	Tenaga Entry Data
22	Efrida Wati Hasibuan, S.Pd	-	-	THL	Tenaga Entry Data
23	Ery Witarsyah Pasaribu, S.S.T	-	-	THL	Tenaga Entry Data
24	Puspa Dewi Harahap	-	-	THL	Tenaga Entry Data
25	Abdillah Taruna, S.Pd	-	-	THL	Tenaga Entry Data
26	Arif Rahmadhan Dalimunthe			THL	Tenaga Entry Data
27	Mhd. Salim Pachruddin, S.Pd			THL	Tenaga Entry Data
28	Rahmad Sholeh L. Tobing			THL	Tenaga Entry Data
29	Arman Syahyudi Siregar, A.Md			THL	Tenaga Entry Data
30	Julia Gustri Prima Harahap, SH			THL	Tenaga Entry Data
31	Riski Iman Siregar, M.Pd			THL	Tenaga Entry Data
32	Umran Asshiddiq N. Pane			THL	Tenaga Entry Data
33	Muhammad Habibi Pasaribu, S.Pd			THL	Tenaga Entry Data
34	Andry			THL	Tenaga keamanan
35	Maruliansani Rangkuti			THL	Penjaga Kantor
36	Muslim Buchori			THL	Penjaga Kantor
37	Amin Soleh Siregar			THL	Supir
38	Masruro			THL	Supir
39	Elliwati Harahap			THL	Tenaga Kebersihan

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Dari Jenis Kelamin

No	Status	Laki-Laki	Perempuan
1	PNS	11	7
2	THL	14	7
Jumlah		**25**	**14**

2.2.2 Infentaris Kantor

Tabel 2.2.3
Daftar Inventaris Kantor

NO	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mitsubishi Strada Triton	2 Unit	Baik
2	Toyota Innova Zenix	1 Unit	Baik
3	Toyota Rush	1 Unit	Baik
4	Daihatsu Terios	3 Unit	Baik
5	Daihatsu Xenia	1 Unit	Rusak
6	Honda CB 150 R	3 Unit	Baik
7	Kawasaki KLX	2 Unit	Baik
8	Yamaha X-Ride	1 Unit	Baik
9	Honda Verza CW	3 Unit	Baik
10	Honda Mega Pro	2 Unit	Baik
11	Honda GL. 160-D	2 Unit	Baik dan Rusak
12	Honda Supra X 125 cc	3 Unit	Baik
13	Honda Astrea	1 Unit	Baik
14	Honda Legenda	1 Unit	Baik
15	Komputer PC	17 Unit	Baik
16	Laptop	15 Unit	Baik dan Rusak
17	Note Book	8 Unit	Baik
18	Printer	19 Unit	Baik dan Rusak

19	Proyektor	2 Unit	Baik
20	Layar Proyektor	2 Unit	Baik
21	Sound System	4 Unit	Baik
22	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	Baik
23	Handycam	4 Unit	Baik
24	Sony Camera	1 Unit	Baik
25	Canon Camera	2 Unit	Baik
26	Brankas	1 Unit	Baik
27	Filing Kabinet	2 Unit	Baik
28	Dispenser Uchida	1 Unit	Baik
29	Lemari Arsip Dinamis	1 Unit	Baik
30	Lemari Arsip Kayu	7 Unit	Baik
31	Meja Kerja Kabid	3 Unit	Baik
32	Sofa Ruangan Kabid	3 Set	Baik
33	Meja Rapat	1 Set	Baik
34	Lemari Besi 2 Pintu	1 unit	Baik
35	AC Portable	1 Unit	Baik
36	Finger Print	2 Unit	Baik

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat.

- Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan periode tahun 2016-2021 memiliki tantangan untuk membantu Bupati Tapanuli Selatan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pembangunan perdesaan, untuk dapat terciptanya misi tersebut diatas maka peran serta pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri harus kami tingkatkan. Selain itu untuk pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah terhadap masyarakat kami akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan keuangan perdesaan. Selain memiliki potensi dan peluang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada periode tahun 2022-2026, baik pada aspek penataan dan penguatan otonomi desa maupun pemberdayaan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Tahun 2022-2026.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa

  Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Rendahnya pemahaman terhadap jati diri desa yang bersumber dari keaslian asal-usul dan adat-istiadat setempat untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa, implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan

sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum adanya aturan hukum yang memadai yang menjadi dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggarakan pemerintahan desa; masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa.

- Aspek Pemberdayaan Masyarakat

  Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang ada semua bisa dikatakan tidak aktif, masalah lainnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang serta perlindungan dan pengakuan budaya lokal (masyarakat hukum adat), penyandang masalah kesejahteraan sosial (Lansia, Penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil), Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan terhadap Tenaga Kerja Pedesaan. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.

- Identifikasi Faktor Internal

  Gambaran faktor internal di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.4
Identifikasi Faktor Internal

Faktor Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil masih perlu peningkatan
Dana	Sumber pendanaan kegiatan berasal dari dana APBN dan APBD yang tersedia setiap tahunnya	Dana yang ada telah ditentukan penggunaannya dan tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana yang teredia kurang memadai	Sarana dan prasarana beberapa bagian sudah rusak
Peraturan Perundang-undangan	Adanya Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi	Belum semua jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah memahami dan menerapkan aturan yang berlaku
Organisasi/ Kelembagaan	Struktur organisasi mampu mengakomodasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Pegawai Negeri Sipil yang ada dan menduduki jabatan struktural masih kurang memahami tugas pokok dan fungsi

➢ Identifikasi Faktor Eksternal

Gambaran faktor eksternal di luar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.5
Identifikasi Faktor Eksternal

Faktor Eksternal	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah penduduk sebagian besar berada di pedesaan	Kurang terberdayakannya masyarakat perdesaan karena pengetahuan dan keterampilan masih rendah
Lembaga Ekonomi Perdesaan	Potensi sumber daya alam sebagianbesar berada di perdesaan	Belum maksimalnya lembaga-lembaga ekonomi untuk mengelola potensi sumber daya alam di perdesaan
Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Adanya Program Nasional Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang setiap Tahun semakin bertambah besar	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD cukup memadai	Pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dan anggota BPD masih rendah
Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah penduduk perempuan yang tinggal di perdesaan cukup banyak	Pengetahuandan keterampilannya masih rendah

➢ Analisa Faktor Internal dan Eksternal

Identifikasi faktor internal dan eksternal yang diuraikan diatas, perlu dianalisa melalui Analisa SWOT untuk menyusun strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi melalui program dan kegiatan, sebagai berikut :

- Strategi S O
  Memanfaatkan sumber daya pemberdayaan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat perdesaan
- Strategi W O
  Meningkatkan sumber daya manusia (PNS dan masyarakat) melalui pendidikan dan pelatihan
- Strategi S T
  Memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk memberdayakan lembaga-lembaga perdesaan untuk pembangunan desa
- Strategi W T
  Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (PNS dan Aparatur Pemerintahan Desa) untuk memberdayakan lembaga-lembaga perdesaan untuk pembangunan desa

Tabel T-C.3.0
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Administrasi Pemerintahan Desa											
1	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Aktif			100	110	120	130	17	17	25	30	
2	Persentase Desa Kategori Mandiri			0,94	4,72	4,72	4,72	0,94	0,94	4,72	4,72	
3	Persentase Desa Kategori Maju			25,00	23,11	25,47	26,42	16,98	16,98	25,47	26,42	
4	Persentase Desa Kategori Berkembang			72,17	72,17	69,81	68,87	100,46	100,46	69,81	68,87	
5	Persentase Desa Kategori Tertinggal			1,89	0	0	0	0	0	0	0	
6	Persentase Desa Kategori Sangat Tertinggal			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat											
7	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga(LPMD) Aktif			212	212	212	212	212	212	212	212	
8	Jumlah PKK Aktif			228	228	228	228	228	228	228	228	

Kesimpulan atas pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa :
   a. Jumlah Badan Usaha Milik Desa Aktif realisasi capaian pada tahun 2023 mencapai 17 % hal tersebut diakibatkan kurangnya penyertaan modal dan adanya BUMDes yang telah bubar
   b. Jumlah Desa Mandiri realisasi capaian pada tahun 2023 mencapai lebih dari 100 % sebab tidak ada target namun kita mendapatkan 2 Desa kategori Mandiri yang merupakan pencapaian yang sangat baik serta adanya kebijakan Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang mana menunjang perkembangan status Desa
   c. Jumlah Desa Maju realisasi capaian pada tahun 2023 mencapai 168 % merupakan pencapaian yang sangat baik sebab telah mencapai lebih dari 100 % yang mana merupakan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Desa serta adanya peran dukungan dari OPD lain dalam pencapaian tersebut serta adanya kebijakan Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang mana menunjang perkembangan status Desa
   d. Jumlah Desa Berkembang realisasi capaian pada tahun 2023 mencapai 116 % merupakan pencapaian yang sangat baik sebab telah mencapai lebih dari 100 % yang mana merupakan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Desa serta adanya peran dukungan dari OPD lain dalam pencapaian tersebut
   e. Jumlah Desa Tertinggal realisasi capaian pada tahun 2023 mencapai lebih dari 100 % merupakan pencapaian yang sangat baik sebab jumlah Desa tertinggal sudah tidak ada lagi (nol) yang mana merupakan pencapaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana menjalin kerjasama dengan Desa serta adanya peran dukungan dari OPD lain dalam pencapaian tersebut serta adanya kebijakan Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang mana menunjang perkembangan status Desa
   f. Jumlah Desa Sangat Tertinggal realisasi capaian pada tahun 2023 mencapai lebih dari 100 % merupakan pencapaian yang sangat baik sebab jumlah Desa tertinggal sudah tidak ada lagi (nol) yang mana merupakan pencapaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana menjalin kerjasama dengan Desa serta adanya peran dukungan dari OPD lain dalam pencapaian tersebut serta adanya kebijakan Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang mana menunjang perkembangan status Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat :
   a. Jumlah kelompok Kelompok Lembaga yang dibina realisasi capaian pada tahun 2023 mencapai 100 % sebab ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya dan selalu dipantau dan dibina langsung oleh Ibu Bupati beserta dukungan dari OPD yang terkait
   b. Jumlah PKK aktif realisasi capaian pada tahun 2023 mencapai 100 % sebab ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya dan selalu dipantau dan dibina langsung oleh Ibu ketua PKK Kabupaten Tapanuli Selatan beserta dukungan dari OPD yang terkait

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan :

a. Dengan telah disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa diberikannya hak kekuasaan Desa, maka dengan itu sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk memajukan perekonomian Desa. Sebagai upaya peningkatan ekonomi kemasyarakatan Desa yang disebut dengan Dana Desa dapat memberikan pendorong bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan perekonomian desa yang mana dikelola langsung oleh Desa dan dapat dipergunakan Desa untuk mengembangkan dan memajukan Desa melalui musyawarah Desa.
b. Dengan diselenggarakannya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan keuangan Desa dan Manajemen Pemerintahan Desa diharapkan Aparatur Pemerintah Desa lebih berkompeten dalam Pengelolaan Dana Desa. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
c. Dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama dapat mendorong masyarakat untuk mandiri dalam hal pengelolaan keuangan serta usaha kerakyatan yang mana dapat mendorong perekonomian masyarakat desa.
d. Dalam upaya meningkatkan Peran Perempuan di Perdesaan maka diadakan Pelatihan dan Pembinaan/kursus Keterampilan dilokasi Percontohan PTP2WKSS maka Diharapkan meningkatnya kelompok Perempuan yang berperan dalam Pelaksanaan pembangunan.
e. Dengan Pemanfatan Potensi Sumber Daya Alam melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna diharapkan meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan meningkatnya Produksi dan kualitas Hasil Usaha.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas PMD, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atau penyusunan rancangan renja Dinas PMD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa untuk mangadopsi program dan kegiatan pada tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Lalu diperlukan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dengan mempertimbangkan azas kepatuhan. Selain itu, juga terdapat beberapa target dan tolak ukur yang memerlukan perubahan karena kurang sesuai terhadap kegiatan. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Sipirok	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	100	**5.962.200.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Sipirok	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	100	**5.962.200.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sipirok	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)	12	150.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sipirok	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)	12	150.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sipirok	Terpenuhinya Adminisatasi Keuangan dan Tugas ASN (Tahun)	1	2.381.528.547	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sipirok	Terpenuhinya Adminisatasi Keuangan dan Tugas ASN (Tahun)	1	2.381.528.547	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sipirok	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Tahun)	1	236.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sipirok	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Tahun)	1	236.400.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sipirok	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12	1.555.308.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sipirok	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12	1.555.308.300	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sipirok	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	901.963.153	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sipirok	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	901.963.153	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sipirok	Tersedianya Pemeliharaan Barang	1	737.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sipirok	Tersedianya Pemeliharaan Barang	1	737.000.000	

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Milik Daerah (Tahun)			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Milik Daerah (Tahun)			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Sipirok	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Aktif (Kelompok) Persentase Desa Kategori Maju (Desa) Persentase Desa Kategori Berkembang (Desa) Persentase Desa Kategori Tertinggal (Desa) Persentase Desa Kategori Sangat Tertinggal (Desa)	90 21 147 36 7	**3.814.977.200**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Sipirok	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Aktif (Kelompok) Persentase Desa Kategori Maju (Desa) Persentase Desa Kategori Berkembang (Desa) Persentase Desa Kategori Tertinggal (Desa) Persentase Desa Kategori Sangat Tertinggal (Desa)	90 21 147 36 7	**3.814.977.200**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sipirok	Jumlah Desa yang Tertib Administrasi (Desa)	212	3.814.977.200	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Sipirok	Jumlah Desa yang Tertib Administrasi (Desa)	212	3.814.977.200	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Sipirok	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga (LPMD) Aktif (Kelompok) Jumlah PKK aktif (Kelompok)	212 228	**2.212.822.800**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Sipirok	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga (LPMD) Aktif (Kelompok) Jumlah PKK aktif (Kelompok)	212 228	**2.212.822.800**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Sipirok	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat danLembaga Adat (Kecamatan	15	2.212.822.800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Sipirok	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat danLembaga Adat (Kecamatan	15	2.212.822.800	

	Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
					11.990.000.000					**11.990.000.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (inspirasi) maupun usulan reses (Pokok-pokok Pikiran DPRD).

Terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah, untuk Tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari Masyarakat yang diusulkan kepada Dinas PMD Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tapanuli Selatan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
N I H I L					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah yaitu memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dimaksud dengan upaya-upaya peningkatan tata kelola kepemerintahan desa dan kelurahan, upaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, upaya peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan, upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat, upaya penyebaran dan pendayagunaan teknologi tepat guna, dan penguatan kemandirian dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional dimaksud berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
4. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Tugas-tugas Pembantuan

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan, usaha ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan, usaha ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna
3. Penyelenggaraan administrasi umum dan pelayanan umum di bidang pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan, usaha ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna
4. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Tujuan

   Tujuan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini sebagai komitmen/ pernyataan bersama antara pimpinan dan staf dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kebijakan "Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya", melalui upaya-upaya :

   a. Peningkatan tata kelola kepemerintahan desa dan kelurahan
   b. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan
   c. Peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
   d. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan
   e. Peningkatan penyebaran dan pendayagunaan teknologi tepat guna
   f. Penguatan kemandirian dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

2. Sasaran

   Sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini sesuai dengan sasaran target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

   a. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan desa dan kelurahan
   b. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan
   c. Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
   d. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan
   e. Meningkatnya penyebaran dan pendayagunaan teknologi tepat guna
   f. Menguatnya kemandirian dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan Program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi bahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam perencanaan pembangunan didasari atas pertimbangan : Pencapapaian sasaran Misi ke-4 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni "meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bai, bersih dan berwibawa.". Berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran misi ke-4 dimaksud, masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke-4 Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.3.2. Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2025 melaksanakan 3 (Tiga) Program 8 (Delapan) Kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu (Rp)	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Tapsel	**5.962.200.000**	DAU
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Tapsel	**150.000.000**	DAU
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapsel	119.000.000	DAU
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapsel	31.000.000	DAU
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Tapsel	**2.381.528.547**	DAU
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapsel	2.189.011.547	DAU
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapsel	165.000.000	DAU
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapsel	27.517.000	DAU
c	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Tapsel	**236.400.000**	DAU
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapsel	71.400.000	DAU
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Kab. Tapsel	165.000.000	DAU
d	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Tapsel	**1.555.308.300**	DAU
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapsel	2.387.000	DAU
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapsel	450.000.000	DAU
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapsel	13.921.300	DAU
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapsel	78.000.000	DAU
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapsel	31.000.000	DAU
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Tapsel	30.000.000	DAU
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapsel	950.000.000	DAU
e	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Tapsel	**901.963.153**	DAU
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapsel	85.000.000	DAU
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapsel	816.963.153	DAU
f	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Tapsel	**737.000.000**	DAU

17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapsel	217.000.000	DAU
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapsel	20.000.000	DAU
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapsel	500.000.000	DAU
II	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Tapsel	**3.814.977.200**	DAU
g	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Kab. Tapsel	3.814.977.200	DAU
20	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Tapsel	2.700.000.000	DAU
21	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Tapsel	696.800.000	DAU
22	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Tapsel	418.177.200	DAU
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Kab. Tapsel	**2.212.822.800**	DAU
h	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Tapsel	**2.212.822.800**	DAU
23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Tapsel	800.000.000	DAU
24	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapata Asli Desa	Kab. Tapsel	200.000.000	DAU
25	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Tapsel	432.822.800	DAU
26	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Tapsel	200.000.000	DAU
27	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraa Keluarga	Kab. Tapsel	580.000.000	DAU

3.3.3. Penjelasan Rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

Tidak terdapat perbedaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan rancangan Awal Renja yang disusun sebelumnya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Tapanuli Selatan

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Rencana Tahun Anggaran 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah Dana (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Jumlah Dana (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					**11.990.000.000**			**11.204.500.000**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**Kab. Tap-Sel**	**100**	**5.962.200.000**	**APBD**		**100**	**5.162.500.000**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)**	**Kab. Tap-Sel**	**12**	**150.000.000**	**APBD**		**12**	**152.000.000**
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangka Daerah (Dokumen)	Kab. Tap-Sel	8	119.000.000	APBD		8	120.000.000
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab. Tap-Sel	13	31.000.000	APBD		13	32.000.000

						Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)							
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Adminisatasi Keuangan dan Tugas ASN (Tahun)**	**Kab. Tap-Sel**	**1**	**2.381.528.547**	**APBD**		**1**	**2.494.617.000**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kab. Tap-Sel	322	2.189.011.547	APBD		322	2.301.000.000
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab. Tap-Sel	2	165.000.000	APBD		2	166.000.000
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kab. Tap-Sel	1	27.517.000	APBD		1	27.617.000
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Tahun)**	**Kab. Tap-Sel**	**1**	**236.400.000**	**APBD**		**1**	**224.000.000**
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab. Tap-Sel	3	71.400.000	APBD		3	58.000.000

2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Kab. Tap-Sel	33	165.000.000	APBD		16	166.000.000
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)**	**Kab. Tap-Sel**	**12**	**1.555.308.300**	**APBD**		**12**	**1.132.883.000**
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Tap-Sel	1	2.387.000	APBD		1	2.600.000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Tap-Sel	4	450.000.000	APBD		0	24.183.000
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Kab. Tap-Sel	1	13.921.300	APBD		1	14.100.000
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Tap-Sel	2	78.000.000	APBD		2	79.000.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab. Tap-Sel	2	31.000.000	APBD		2	31.000.000
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Kab. Tap-Sel	30	30.000.000	APBD		30	31.000.000

2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Tap-Sel	2.057	950.000.000	APBD		2.057	951.000.000
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)**	**Kab. Tap-Sel**	**12**	**901.963.153**	**APBD**		**12**	**908.000.000**
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab. Tap-Sel	12	85.000.000	APBD		12	91.000.000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Tap-Sel	13	816.963.153	APBD		13	817.000.000
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Tahun)**	**Kab. Tap-Sel**	**1**	**737.000.000**	**APBD**		**1**	**251.000.000**
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab. Tap-Sel	20	217.000.000	APBD		8	218.000.000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab. Tap-Sel	10	20.000.000	APBD		10	13.000.000
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Kab. Tap-Sel	1	500.000.000	APBD		1	20.000.000

2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Badan Usaha Milik Desa Aktif (Kelompok)**	**Kab. Tap-Sel**	**90**	**3.814.977.200**	**APBD**		**100**	**3.820.000.000**
						Persentase Desa Kategori Maju (Desa)		**21**				**25**	
						Persentase Desa Kategori Berkembang (Desa)		**147**				**143**	
						Persentase Desa Kategori Tertinggal (Desa)		**36**				**37**	
						Persentase Desa Kategori Sangat Tertinggal (Desa)		**7**				**100**	
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Tertib Administrasi (Desa)**	**Kab. Tap-Sel**	**212**	**3.814.977.200**	**APBD**		**212**	**3.820.000.000**
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	Kab. Tap-Sel	636	2.700.000.000	APBD		636	2.702.000.000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	Kab. Tap-Sel	212	696.800.000	APBD		212	698.000.000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	Kab. Tap-Sel	10	418.177.200	APBD		10	420.000.000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Jumlah Kelompok Binaan Lembaga (LPMD) Aktif (Kelompok)**	**Kab. Tap-Sel**	**212**	**2.212.822.800**	**APBD**		**212**	**2.222.000.000**
						Jumlah PKK aktif		**228**				**228**	

						(Kelompok)							
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat danLembaga Adat (Kecamatan)**	**Kab. Tap-Sel**	**15**	**2.212.822.800**	**APBD**		**15,00**	**2.222.000.000**
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Kab. Tap-Sel	45	800.000.000	APBD		45	802.000.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	Kab. Tap-Sel	4	200.000.000	APBD		4	202.000.000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi	Kab. Tap-Sel	5	432.822.800	APBD		5	434.000.000

						Tepat Guna (Laporan)							
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	Kab. Tap-Sel	15	200.000.000	APBD		15	202.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	Kab. Tap-Sel	2	580.000.000	APBD		2	582.000.000

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan Anggaran Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini disamping sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah juga merupakan komitmen yang harus dipedomani oleh seluruh pelaku pembangunan di daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini, Organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif serta dengan mempedomani dan memperhatikan sasaran dan target-target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sipirok, 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

MHD. YUSUF, SP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196608301997031001



Dinas PMD Daerah
Kab. Tapanuli Selatan
TA. 2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN







PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telp. ( ) Faks. ( )
E-mail : dinas.puprkabtapsel@yahoo.com Website : pupr.tapselkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 800.1.8.1 / 1920 / 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penjabaran Visi, Misi, serta program Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tapanuli elatan Tahun 2021 Nomor 312) disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasur Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Lokasi Kawasan Perkotaan Batang Toru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 308);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312).
25. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 1261).s
26. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Derah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang punya batas-batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
12. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
24. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai

BAB IV

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah ini merupakan dokumen perencanaan 1 tahunan Dinas yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan target capaian kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi Pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyusun Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2025 meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan wajib membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang berisi uraian tentang capaian dari masing-masing indikator kinerja program.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan paling lambat empat belas hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 7

Kepala Bappeda menelaah dan memverifikasi kesesuaian antara Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran tahunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
Pada tanggal 9 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

FACHRI ANANDA HARAHAP, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197603192002121002

Tembusan :
1. Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok
   c/q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2. Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL **3**

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.3.1. Maksud 9

1.3.2. Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II 11

2.1. Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Daerah 29

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 33

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 33

3.3. Program dan Kegiatan Perubahan Renja 35

BAB IV PENUTUP 128

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

27. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
28. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat.
(2) Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah :
    a. menjadi pedoman resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
    b. menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umuxm Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Triwulan Ke- II Tahun 2025..... 14

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pupr Kabupaten Tapanuli Selatan 30

Tabel 3 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 34

Tabel 4 Rekapitulasi Program/Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perubahan Dinas Pupr Tahun 2025..... 35

Tabel5 Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 41

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuain dengan perkembangan keadaan tahun 2025, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Didalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan Tahun 2025 yang digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah dalam dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perubahan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sipirok, 8 September 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

FAISAL ANWAR HARAHAP, ST
Pembina Tk.I. (IV/b)
NIP. 197603192002121002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuain dengan perkembangan keadaan tahun 2025, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kondisi dilapangan yang menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat,
2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program Kabupaten,
3. Pergeseran pagu kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Perubahan Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Tahun 2025 mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai landasan hukum:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pemhangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 19).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Lokasi Kawasan Perkotaan Batang Toru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 308);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312).
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026.
24. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 1252);
25. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.
26. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 1261)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan / direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025;
3. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan II;
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum perubahan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun 2025 (tahun berjalan).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sampai Triwulan II.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan:

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II

2.1. Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 dan target capaian Renstra 2021-2026 dengan Indikator Kinerja Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kinerja Perangkat Daerah diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah dimuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran program dan kegiatan, maka dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 yang terdiri dari 2 urusan, 9 program, 17 kegiatan dan 45 sub kegiatan Adapun capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
    - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasannya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
    - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Penataan Bangunan Gedung
    - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberiaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
    - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Penyelenggaraan Jalan
    - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

   - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

   - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

Sesuai dengan hasil Evaluasi Renja Triwulan II Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 3,38% dan realisasi keuangan sebesar 18,30%, kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan. Untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur, realisasi belum signifikan. Hal ini disebabkan proses kegiatan masih dalam tahap pemilihan penyedia dan pengikatan surat perjanjian antara PPK dan Penyedia. Evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sampai denga triwulan II dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umuxm Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Triwulan Ke- II Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	URUSAN WAJIB																								
	1.01	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
	1.01.03.0.00.0.00.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																								
	1.01.03.0.00.0.00.03.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							206.688.602.241				2.077.717.768		-		-		3.514.659.137							
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%).	500,00	222.815.212.017	100,00	18.704.029.861	100,00	14.643.622.149	-	1.290.915.769		1.891.986.168		-		-	-	3.182.901.937	-	21,74	100,00	21.886.931.798	20,00	9,82	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.01.2.01	Perencanaan,Pengaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kewajiban dinas dalam menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan capaian kinerja selama 1 tahun (%)	500,00	106.899.943	100,00	18.218.100	100,00	66.485.000									-	-	-	-	100,00	18.218.100	0,20	17,04	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20,00	95.000.751	2,00	13.308.900	2,00	60.110.000,00									-	-	-	-	2,00	13.308.900	10,00	14,01	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10,00	11.899.192	2,00	4.909.200	2,00	5.375.000									-	-	-	-	2,00	4.909.200	20,00	41,26	
	1.01.03.0.00.0.00.0 3.00.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	500,00	**31.010.312.883**	**100,00**	**5.119.220.139**	**100,00**	**5.442.530.385**		**998.733.415**		**1.446.007.597**		**-**		**-**	**-**	**2.444.741.012**	**-**	**44,92**	**100,00**	**7.563.961.151**	20,00	**24,39**	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN (Orang/Bulan)	380,00	30.995.456.367	62,00	5.116.141.739	54,00	5.437.002.285		998.733.415		1.446.007.597					-	2.444.741.012	-	44,96	62,00	7.560.882.751	16,32	24,39	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan KeuanganAkhir Tahun SKPD (Laporan)	5,00	14.856.516	1,00	3.078.400	1,00	5.528.100									-	-	-	-	1,00	3.078.400	20,00	20,72	
	1.01.03.0.00.0.00.0 3.00.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						20.000.000																

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1,00	20.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.03.0.00.0.00.0 3.00.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan dan Administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 Tahun (%)**	**500,00**	**713.707.628**	**4,33**	**97.000.000**	**100,00**	**291.000.000**		**10.000.000**		**-**		**-**		**-**	**-**	**10.000.000**	**-**	**3,44**	**4,33**	**107.000.000**	**0,87**	**14,99**	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann (Paket)	1.030	374.744.396	-	-	2,00	195.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20,00	112.987.744	-	-	6,00	36.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20,00	225.975.488	13,00	97.000.000	10,00	60.000.000		10.000.000							-	10.000.000	-	16,67	13,00	107.000.000	65,00	47,35	
	1.01.03.0.00.0.00.0 3.00.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**500,00**	**3.310.338.138**	**77,64**	**2.093.036.470**	**100,00**	**1.294.961.400**		**11.084.000**		**53.066.882**		**-**		**-**	**-**	**64.150.882**	**-**	**4,95**	**77,64**	**2.157.187.352**	**15,53**	**65,17**	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	25.438.682	2,00	6.874.000	2,00	7.521.000									-	-	-	-	2,00	6.874.000	40,00	27,02	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60,00	403.160.889	5,00	962.950.000	4,00	327.793.400									-	-	-	-	5,00	962.950.000	8,33	238,85	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Kebersihan dan Rumah Tangga (Paket)	60,00	30.644.336	1,00	5.874.300	15,00	6.339.800									-	-	-	-	1,00	5.874.300	1,67	19,17	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Bulan)	5,00	1.003.673.912	12,00	219.383.900	44,00	219.878.300									-	-	-	-	12,00	219.383.900	240,00	21,86	
			Makan Minum Rapat (Kotak)	-		-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Bulan)	5,00	86.362.198	12,00	12.753.400	7,00	21.276.900									-	-	-	-	12,00	12.753.400	240,00	14,77	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	300,00	184.889.070	60,00	36.000.000	60,00	36.000.000									-	-	-	-	60,00	36.000.000	20,00	19,47	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.235, 610,00	1.576.169.051	871,00 73,00	484.475.435 364.725.435	421,00	676.152.000		11.084.000,00		53.066.882					-	64.150.882	-	9,49	871,00	548.626.317	20,57	34,81	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pelaksanaan Tugas Penunjang Urusan Perangkat DaeraH (%)**	**500,00**	**52.547.818.950**	**100,00**	**11.236.610.712**	**100,00**	**6.993.732.364**		**263.570.111**		**335.020.937**		**-**		**-**	**-**	**598.591.048**	**-**	**8,56**	**100,00**	**11.835.201.760**	**20,00**	**22,52**	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5,00	38.967.132.436	1,00	8.606.184.903	4,00	3.258.264.620		24.907.336		42.243.914					-	67.151.250	-	0,78	1,00	8.673.336.153	20,00	22,26	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	72,00	13.580.686.514	12,00	2.630.425.809	107,00	3.735.467.744		238.662.775		292.777.023					-	531.439.798	-	20,20	12,00	3.161.865.607	16,67	23,28	
			Honararium Jasa Kantor (Orang),	-		-	-											-	-	-		-	-	-	-	
			Partisipasi dalam Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah (Kali)	-		-	-											-	-	-		-	-	-	-	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**erpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Untuk Menjalankan Tugas dan Fungsinya (%)**	**500,00**	**1.082.183.373**	**38,89**	**139.944.440**	**100,00**	**534.913.000**		**7.528.243**		**57.890.752**		**-**		**-**	**-**	**65.418.995**	**-**		**38,89**	**205.363.435**	**7,78**	**18,98**	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10,00	277.111.855	2,00	25.612.605	2,00	82.840.000				4.610.903					-	4.610.903	-	-	2,00	30.223.508	20,00	10,91	
			Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	10,00		-	-											-	-	-		-				
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60,00	156.516.881	21,00	64.331.835	45,00	240.500.000		7.528.243		3.279.849					-	10.808.092	-	-	21,00	75.139.927	35,00	48,01	
			Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	60,00		-	-											-	-	-		-				
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	35,00	674.750.514	2,00	50.000.000	7,00	150.000.000				50.000.000					-	50.000.000	-		2,00				
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	-	2,00	40.000.000									-	-	-	-	-				

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		73.804.124	-	-	30,00	21.573.000									-	-	-		-	-	-	-	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)**	**69,09**	**105.934.403.196**	**67,68**	**24.587.898.265**	**68,41**	**38.990.024.000**		**146.025.600**		**162.423.600**		**-**		**-**	**-**	**308.449.200**	**-**	**0,79**	**67,68**	**24.896.347.465**	**97,96**	**23,50**	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Insfrastrutur Pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota**	**18,94**	**-**	**17,23**	**3.552.289.500,00**	**18,56**	**6.982.072.000,00**									**-**	**-**	**-**	**-**	**17,23**	**3.552.289.500**	**90,97**		
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (Km)			428,00	3.552.289.500	67,40	6.982.072.000									-	-	-	-	428,00	3.552.289.500			
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)**	**69,09**	**105.934.403.196**	**67,68**	**21.035.608.765**	**68,41**	**30.383.345.000**		**146.025.600**		**162.423.600**		**-**		**-**	**-**	**308.449.200**	**-**	**1,02**	**67,68**	**21.344.057.965**	**97,96**	**20,15**	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.02.2.02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Dokumen)	184,00	273.642.361	112,00	211.700.037	151,00	253.265.500				17.700.000					-	17.700.000	-	6,99	112,00	229.400.037	60,87	83,83	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)	30.464,38	100.906.562.771	8,73	19.800.293.542	16,10	28.969.238.000									-	-	-	-	8,73	19.800.293.542	0,03	19,62	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	130,00	4.011.698.324	200,03	955.263.686	27,14	864.000.000		146.025.600		144.723.600					-	290.749.200	-	33,65	200,03	1.246.012.886	153,87	31,06	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.02.2.02.34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	6,00	64.526.872	-	-	1,00	43.576.000									-	-	-	-	-	-			
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.02.2.02.32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)	5,00	677.972.868	126,00	68.351.500	151,00	253.265.500									-	-	-	-	126,00	68.351.500	2.520	10,08	
	1.01.03.0.00.0.00.0 3.00.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk berakses Air Minum (%)**	**100,00**	**69.895.393.955**	**86,69**	**11.799.490.995**	**94,95**	**9.650.612.400**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68,40**	**11.799.490.995**	**99,00**	**43,30**	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk berakses Air Minum (%)**	**100,00**	**69.895.393.955**	**86,69**	**11.799.490.995**	**94,95**	**9.650.612.400**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68,40**	**11.799.490.995**	**99,00**	**43,30**	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.03.2.01.25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (Dokumen)	5,00	560.503.905	28,00	19.540.100	28,00	141.316.000									-	-	-	-	28,00	19.540.100	560	3,49	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.03.2.01.30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Supervi Pembangunan/ Peningkat SPAM	5,00	558.338.448	28,00	22.500.000	29,00	94.078.400									-	-	-	-	28,00	22.500.000	560	4,03	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter / Detik)	3.754,00	34.388.275.801	140,00	11.757.450.895	250,00	9.415.218.000									-	-	-	-	140,00	11.757.450.895	3,73	34,19	
			Panjang pipa Sitem distribusi air minum dipasang (Km)	3.754,00	34.388.275.801	-												-		-		-		-	-	
			Pemeliharaan Pipa Distribusi Air Minum (Tahun)	5,00		-												-		-		-		-	-	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)**						**3.850.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**									

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (m)					285,00	3.850.000.000																	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Keandalan Bangunan Gedung Pemerintah (%)**	**100,00**	**176.525.220.500**	**94,58**	**41.446.810.419**	**100,00**	**28.673.108.200**		-		-		-		-	-	-	-	-	**94,58**	**41.446.810.419**	**94,58**	**23,48**	
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Keandalan Bangunan Gedung Pemerintah (%)**	**100,00**	**176.525.220.500**	**94,58**	**41.446.810.419**	**100,00**	**28.673.108.200**		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.08,2,01,0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						1,00	100.000.000									-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.08,2,01,0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	47,00	176.525.220.500	13,00	41.446.810.419	65,00	28.573.108.200									-	-	-	-	13,00	41.446.810.419	27,66	23,48	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kabupaten/Kota (Dokumen)																							
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Lingkungan yang tertata (%)**	**24,68**	**36.553.441.322**	**31,43**	**5.434.504.334**	**24,56**	**7.130.628.700**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,43**	**5.434.504.334**	**127,35**	**14,87**	
		1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota**	**24,68**	**36.553.441.322**	**31,43**	**5.434.504.334**	**24,56**	**7.130.628.700**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.09,2,01,10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota (Dokumen)	151,00	277.911.464	35,00	8.072.550	57,00	16.995.400									-	-	-	-	35,00	8.072.550	23,18	2,90	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.09,2,01,07	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pengawasan Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kab/kota (Kawasan)	151,00	277.911.464	35,00	127.157.109	57,00	388.633.300									-	-	-	-	35,00	127.157.109	23,18	45,75	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.09,2,01,08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan cagar budaya, Kawasan parisata Kawasan Sitem perkotaan Nasional dan strategis lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)	2.430,00	35.997.618.393	35,00	5.299.274.675	57,00	6.725.000.000									-	-	-	-	35,00	5.299.274.675	1,44	14,72	
	1.01.03.0.00.0.00.0 3.00.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik (%)**	**60,18**	**665.141.222.926**	**59,67**	**96.096.025.586**	**59,11**	**103.140.499.692**									-	-	-	-	**59,67**	**96.096.025.586**	**99,15**	**14,45**	
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	**73,17**		**71,85**		**72,31**										-		-		**71,85**	-	**98,20**	-	
			Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik (%)	**79,92**		**77,95**		**78,00**			-		-		-		-	-		-		**77,95**		**97,54**	-	
	1.01.03.0.00.0.00.0 3.00.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**									-		-		-		-			-	-			-	-	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.10.2.01.29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	5,00	840.138.322	205,00	759.414.464	1.029,00	612.771.800									-	-	-	-	205,00	759.414.464	4.100 ,00	90,39	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.10.2.01.28	Pengelola Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan (Dokumen)	10,00	1.040.050.610	2,00	99.665.791	2,00	200.000.000									-	-	-	-	2,00	99.665.791	20,00	9,58	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan dibangun (Km)	27,00	3.640.177.136	-	-	6,00	1.098.667.500									-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Km)	277,28	567.981.304.525	42,43	87.250.300.472	49,00	82.019.429.892									-	-	-	-	42,43	87.250.300.472	15,30	15,36	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.10.2.01.44	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan direhab (Km)	76,47	32.447.987.703	1,04	793.816.000	1,28	4.020.660.000									-	-	-	-	1,04	793.816.000	1,36	2,45	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Km)	573,00	15.510.274.674	65,90	2.579.633.009	121,50	2.200.000.000									-	-	-	-	65,90	2.579.633.009	11,50	16,63	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (Jembatan)	31,00	19.760.961.597	14,60	3.430.045.900	37,00	8.545.000.000									-	-	-	-	14,60	3.430.045.900	47,10	17,36	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.10.2.01.39	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (Jembatan)	33,00	16.535.504.641	20,00	984.950.000	7,00	3.551.560.000									-	-	-	-	20,00	984.950.000	60,61	5,96	
	1.01.03.0.00.0.00. 03.00.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Jembatan (Unit)	300,00	6.240.303.662	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.0.00.0.00.03.00.10.2.01.30	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	1.298,00	1.144.520.054	205,00	198.199.950	49,00	892.410.500									-	-	-	-	205,00	198.199.950	15,79	17,32	
	1.03.1.03.0.00.0.00.03.00.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**						**50.000.000**	-		-		-		-										
	1.03.1.03.0.00.0.00.03.00.11.2.01.16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)					9,00	50.000.000																	
	1.03.1.03.0.00.0.00.03.00.16	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Pemanfaatan dan Kesesuaian Tata Ruang (%)**	**95,00**	**384.877.200**	**75,00**	**112.511.208**	**100,00**	**2.079.464.100**	-			**23.308.000**	-		-		-	**23.308.000**	-	**1,12**	**75,00**	**135.819.208**	**78,95**	**35,29**	
	1.03.1.03.0.00.0.00.03.00.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Koordinasi Dan Rapat Rencana Tata Ruang (Tahun)**	**500,00**		100,00	-	100,00										-	-	-		**100,00**	-	**20,00**		
	1.03.1.03.0.00.0.00.03.00.12.2.03.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Sub Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capain Kinerja Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renaja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11			12= 8+9+10+11		13=12/7x 100%		14=6+12		15=14/ 5x100 %	16
				K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	5,00	192.438.600	17,00	56.255.604	2,00	1.994.062.000				17.482.000					-	17.482.000	-	0,88	17,00	73.737.604	340,00	38,32	
	1.03.1.03.0.00.0.00.0.03.00.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah																-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	150,00	192.438.600	17,00	56.255.604	30,00	85.402.100				5.826.000					-	5.826.000	-	6,82	17,00	62.081.604	11,33	32,26	
	Rata-rata capaian kinerja (%)							**77,48**										-			**3,38**				**18,30**	
	Predikat kinerja																				-					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Daerah

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023, maupun terhadap Indikator Kinerja Khusus (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 masih terdapat kekurangan sarana prasarana pendukung kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk itu perlu adanya tambahan ataupun perbaikan guna mendukung dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 TW II (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
1	Persentase tingkat kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi mantap (%)	-	-	70,60	71,45	72,31	73,17	70,91	71,85	71,85	72,31	73,17	
2	Persentase tingkat kondisi Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	-	-	76,02	77,06	78,00	79,92	77,82	77,95	77,95	78,00	79,92	
3	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)	-	-	97,18	97,18	97,58	97,58	-	-	-	97,58	97,58	
4	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	-	-	67,06	67,73	68,41	69,09	68,40	67,68	67,68	68,41	69,09	

No	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 TW II (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
5	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	100	-	87,35	94,33	94,95	100,00	85,00	86,69	86,69	94,95	100,00	
6	Persentase Keandalan Bangunan (%)	-	-	-	-	100,00	100,00	95,02	94,58	94,58	100,00	100,00	
7	Persentase Lingkungan yang Tertata (%)	-	-	24,31	24,43	24,56	24,68	31,21	31,43	31,43	24,56	24,68	
8	Tersedianya dokumen RDTRW (Dokumen)	-	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

2.2.1. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

1. Capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sampai dengan TW II adalah sebesar capaian kinerja fisik sebesar 3,38% dan keuangan 18,30% dimana pekerjaan fisik masih belum Optimal dikarena proses pemilihan penyedia yang terlambat.
2. Terjadinya efisiensi anggaran yang mengakibatkan banyaknya kegiatan yang dikurangi alokasi anggarannya.
3. Untuk Kegiatan Konstruksi fisik jalan, irigasi dan cipta karya masih banyak dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam penggunaannya , Sehingga pelaksanaan dilapangan terjadi keterlambatan
4. Pada kegiatan rutin yang mendukung kinerja urusan pemerintahan maupun kegiatan program Lainnya tidak ada dilakukan perubahan, namun hanya dilakukan pergeseran nilai anggaran untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan dalam pelaksanaan tugasnya tetap mengacu kepada kebijakan nasional yang ada pada Kementerian dan Lembaga terkait. Bila dikaitkan dengan misi Kementerian PUPR dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR mengemban tugas pada misi pertama, yaitu mempercepat infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor ekonomis strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi dan misi kedua yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektifitas guna meningkatkan produktifitass, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan pada konektifitas daratan dan maritim.

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 mendukung beberapa program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024 yaitu untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar dalam hal ini pelayanan air minum sehingga percepatan penurunan stunting dapat dicapai. Selain itu, pengentasan kemiskinan dan mendukung ketahanan pangan juga menjadi fokus Dinas PUPR.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengacu kepada Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 - 2026 yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Infrastruktur, Adapun sasarannya:

1) Meningkatnya konektivitas dan kualitas jaringan jalan Kabupaten
2) Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air
3) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar akses air minum yang layak dan aman

- Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

  Adapun sasarannya :

  1) Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Tabel 3 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1 :							
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	69,91	70,91	71,85	72,31	73,17
	Persentase jembatan dengan kondisi baik	%	76,95	77,82	77,95	78,00	79,92
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	79,05	80,55	86,69	94,95	100,00
	Persentase Luasan Daerah Irigasi yang Teraliri Air Irigasi	%	62,13	68,40	67,68	68,41	69,09
Sasaran :							
1 Meningkatnya konektivitas dan kualitas jaringan jalan Kabupaten	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	69,91	70,91	71,85	72,31	73,17
	Persentase jembatan dengan kondisi baik	%	76,95	77,82		78,00	79,92
2 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	Persentase Luasan Daerah Irigasi yang Teraliri Air Irigasi	%	79,05	68,40	67,68	68,41	69,09
3 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar akses air minum yang layak dan aman	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	79,05	80,55	86,69	94,95	100,00
Tujuan 2 :							
Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase pemanfaatan dan kesesuaian tata ruang	%	100,00	100,00	100	100,00	100,00
Sasaran :							
1 Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan dan kesesuaian tata ruang	%	100,00	100,00	100	100,00	100,00

3.3. Program dan Kegiatan Perubahan Renja

Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dialokasikan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 206.688.602.241. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 rencana Pagu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi sebesar Rp. 171.841.025.752.

Dalam perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini memuat pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi. Untuk rinciannya dapat dilihat pada lampiran renja ini.

Adapun rekapitulasi Perubahan program / kegiatan dan sub kegiatan Dinas PUPR Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4 Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Dinas PUPR Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Sumber Dana
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH		**206.688.602.241**	**171.841.025.752**	**DAU**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		**206.688.602.241**	**171.841.025.752**	**DAU**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		**206.688.602.241**	**171.841.025.752**	**DAU**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	**14.643.622.149**	**10.976.362.582**	**DAU**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Teenuhinya kewajiban dinas dalam menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan capaian kinerja selama 1 tahun	**66.485.000**	**54.401.600**	**DAU**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.110.000	50.998.100	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.375.000	3.403.500,00	DAU
	Administrasi Keuangan Daerah	Teenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.442.530.385**	**7.287.374.752**	**DAU**

No	Program / Kegiatan	Indikator	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Sumber Dana
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN	5.437.002.285	7.283.340.952	DAU
	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.528.100	4.033.800	DAU
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**20.000.000**	**20.000.000**	**DAU**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	20.000.000	DAU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%).	291.000.000	72.000.000	DAU
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	195.000.000	0	DAU
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**36.000.000**	**48.000.000,00**	**DAU**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	60.000.000	24.000.000	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan kantor	**1.294.961.400**	**594.860.000**	**DAU**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.521.000	7.521.000	DAU
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	327.793.400	100.000.000	DAU
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Kebersihan dan Rumah Tangga	6.339.800	5.947.800	DAU
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	219.878.300	163.282.800	DAU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21.276.900	17.358.400	DAU
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36.000.000	36.000.000	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	676.152.000	264.750.000	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teenuhinya Pelaksanaan Tugas Penunjang Urusan Perangkat Daera	**6.993.732.364**	**2.421.442.430**	**DAU**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.258.264.620	175.600.000	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.735.467.744	2.245.842.430	DAU

No	Program / Kegiatan	Indikator	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Sumber Dana
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	**534.913.000**	**526.283.800**	**DAU**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82.840.000	82.840.000	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	240.500.000	240.500.000	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	150.000.000	150.000.000	DAU
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40.000.000	40.000.000	DAU
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21.573.000	12.943.800	DAU
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	**38.990.024.000**	**18.105.794.495**	DAU
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Insfrastrutur Pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	6.982.072.000	4.939.349.000	DAU
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	6.982.072.000	4.939.349.000	DAU
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	30.488.595.000	13.166.445.495	DAU
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	253.265.500	145.441.400	DAU
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	28.969.238.000	12.134.105.595	DAU
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	864.000.000	819.000.000	DAU
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	43.576.000	20.383.000	DAU

No	Program / Kegiatan	Indikator	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Sumber Dana
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	358.515.500	47.515.500	DAU
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Penududuk Berakses Air Minum**	**9.650.612.400**	**6.282.785.200**	**DAU**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	9.650.612.400	6.282.785.200	DAU
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	141.316.000	84.156.800	DAU
	Pembangunan SPAM Jaringan Peipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Peipaan yang dibangu	9.415.218.000	6.149.550.000	DAU
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	94.078.400	49.078.400,00	DAU
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)**	**3.850.000.000**	**200.000.000**	**DAU**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m			DAU
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3.850.000.000	200.000.000	DAU
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase keandalan bangunan gedung pemerintah**	**28.673.108.200**	**7.944.686.200**	**DAU**
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Teenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Menjalankan Tugasnya	28.673.108.200	7.944.686.200	DAU
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	100.000.000	100.000.000	DAU
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	28.573.108.200	7.844.686.200	DAU

No	Program / Kegiatan	Indikator	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Sumber Dana
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase Lingkungan yang Tertata**	**7.130.628.700**	**5.272.361.100**	**DAU**
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lingkungan Tertata	7.130.628.700	5.272.361.100	DAU
	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	388.633.300	280.201.300	DAU
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	6.725.000.000	4.955.000.000	DAU
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.725.000.000	37.159.800	DAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik** **Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik**	**103.140.499.692**	**122.050.951.075**	**DAU**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Melancarkan arus barang dan jasa sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan	103.140.499.692	122.050.951.075	DAU
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	200.000.000	200.000.000	DAU
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	612.771.800	617.987.800	DAU
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.098.667.500	198.806.500	DAU
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	892.410.500	104.222.456.275	DAU
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhab	4.020.660.000	0	DAU
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2.200.000.000	2.080.000.000	DAU
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang	8.545.000.000	9.191.040.000	**DAU**
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3.551.560.000	4.964.000.000	DAU
			82.019.429.892,00	576.660.500	DAU

No	Program / Kegiatan	Indikator	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Sumber Dana
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya			
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**50.000.000**	**50.000.000**	**DAU**
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50.000.000	50.000.000	**DAU**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase pemanfaatan dan kesesuaian tata ruang**	**2.079.464.100**	**958.085.100**	**DAU**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Teenuhinya Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Tata Ruang			**DAU**
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1994062000	900.666.000	**DAU**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Teenuhinya Koordinasi dan Rapat Rencana Pemanfaatan Tata Ruang	85402100	57.419.100	**DAU**
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	85402100	57.419.100	**DAU**

Tabel 5 Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH				**206.688.602.241**			**171.841.025.752**	(34.847.576.489)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**206.688.602.241**			**171.841.025.752**	(34.847.576.489)
1	3				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**206.688.602.241**			**171.841.025.752**	(34.847.576.489)
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan**	**100%**		**14.643.622.149**	**100%**		**10.976.362.582**	**(3.667.259.567)**
1	3	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Teenuhinya Kewajiban Dinas Dalam Menyusun dan Menyampaikan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Capaian Kinerja	100%		**66.485.000**	100%		**54.401.600**	(12.083.400)
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		60.110.000	2 Dokumen		50.998.100	(9.111.900)
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		6.375.000	2 Laporan		3.403.500	(2.971.500)
1	3	1	2.02		**Administrasi Keuangan Daerah**	Teenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		**5.442.530.385**	100%		**7.287.374.752**	1.844.844.367
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN	54	Orang/bulan	5.437.002.285	54	Orang/bulan	7.283.340.952	1.846.338.667
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		5.528.100	1 Laporan		4.033.800	(1.494.300)
1	3	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Teenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		**20.000.000**	100%		**20.000.000**	-
1	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		20.000.000	1 Laporan		20.000.000	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%).	100%		**291.000.000**	100%		**72.000.000**	(219.000.000)
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		195.000.000	2 Paket		0	(195.000.000)
1	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		36.000.000	6 Orang		48.000.000	12.000.000
1	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		60.000.000	7 Orang		24.000.000	(36.000.000)
1	3	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dancKemasyarakatan (%).	100%		**1.294.961.400**	100%		**594.860.000**	(700.101.400)
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		7.521.000	2 Paket		7.521.000	-
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		327.793.400	4 Paket		100.000.000	(227.793.400)
1	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		6.339.800	15 Paket		5.947.800	(392.000)
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket		219.878.300	43 Paket		163.282.800,00	(56.595.500)
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		21.276.900	7 Paket		17.358.400,00	(3.918.500)
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		36.000.000	60 Dokumen		36.000.000	-
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421 Laporan		676.152.000	358 Laporan		264.750.000,00	(411.402.000)
1	3	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Teenuhinya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah	100%		**6.993.732.364**	100%		**2.421.442.430**	(4.572.289.934)
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3.258.264.620	3 Laporan		175.600.000	(3.082.664.620)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	107 Laporan		3.735.467.744	13 Laporan		2.245.842.430	(1.489.625.314)
1	3	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Teenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya	100%		**534.913.000**	100%		**526.283.800**	(8.629.200)
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		82.840.000	2 Unit		82.840.000	-
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		240.500.000	45 Unit		240.500.000	-
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7 Unit		150.000.000	5 Unit		150.000.000	-
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		40.000.000	2 Unit		40.000.000	-
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit		21.573.000	18 Unit		12.943.800	(8.629.200)
1	**3**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**	**68,41%**		**38.990.024.000**	**68,41%**		**18.105.794.495**	**(20.884.229.505)**
1	3	2	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Insfrastrutur Pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota**	**18,56%**		**6.982.072.000**	**18,56%**		**4.939.349.000**	(2.042.723.000)
1	3	2	2.01	10	**Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing**	**Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun**	**67,4**		**6.982.072.000**	**1,58**	**Km**	**4.939.349.000**	(2.042.723.000)
					[#] Musrenbang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Normalisasi Sungai Aek Sihombuk Desa Sipange Julu Kec. Sayur Matinggi		1		150.000.000			0	(150.000.000)
	Normalisasi Sungai Desa Aek Natas Kec. Angkola Selatan		1		150.000.000			0	(150.000.000)
	Normalisasi Sungai Desa Harean Kec. Tano Tombangan Angkola		1		150.000.000			0	(150.000.000)
	Normalisasi Sungai Desa Purba Tua Kec. Tano Tombangan Angkola		1		150.000.000			0	(150.000.000)
	Normalisasi Sungai Lingkungan I Kelurahan Rianiate Kec. Angkola Sangkunur		1		150.000.000			0	(150.000.000)
	Normalisasi Sendimen Sungai Aek Mangambur Kel. Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru		1		500.000.000			0	(500.000.000)
	Normalisasi Sungai Aek Sidadi Kec. Batang Angkola				0	1	Paket	375.000.000	375.000.000
	Perbaikan Sistem Saluran Air Sitampa Kec. Batang Angkola				0	1	Paket	202.313.000	202.313.000
	Pembangunan Bronjong DI Aek Silo Kec. Arse		12		103.392.000			0	(103.392.000)
	Pembangunan Tembok Penahan Irigasi Desa Silaiya Kec. Sayurmatinggi		23		198.168.000			0	(198.168.000)
	Pembangunan Bronjong aek tombahaya lobu uho dusun III Panobasan Lombang Kec. Angkola Barat		12		102.000.000			0	(102.000.000)
	Pembangunan Bronjong Desa Aek Ngadol Sitinjak Kec. Batang Toru		23 m		102.000.000	23	m	198.168.000	96.168.000
	Pembangunan Bronjong Desa Aek Uncim Kec. Tano Tombangan Angkola		12		102.000.000			0	(102.000.000)
	Pembangunan Bronjong Desa Perkebunan Sigala-gala Kec. Batang Toru		12		102.000.000			0	(102.000.000)
	Pembangunan Bronjong Desa Sisipa Kec. Batang Toru		12		102.000.000			0	(102.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Bronjong Desa Sitinjak Link. III Surau Wanita Kec. Angkola Barat		12		102.000.000			0	(102.000.000)
	Pembangunan Bronjong Desa Situmba Kec. Tano Tombangan Angkola		12		102.000.000			0	(102.000.000)
	Pembangunan Bronjong D.I Saba Tahalak Desa Sitaratoit Kec. Angkola Barat		12		102.000.000			0	(102.000.000)
	Pembangunan Bronjong Dusun Huta Baru Kec. Batang Toru		12		103.392.000			0	(103.392.000)
	Pembangunan Bronjong Kampung Batuhula Julu Kec. Batang Toru		12		102.000.000			0	(102.000.000)
	Pembangunan Bronjong Kelurahan Panabari Hutatonga Kec. Tano Tombangan Angkola		12		102.000.000			0	(102.000.000)
	Pembangunan Bronjong Pengaman SD 101502 Muara Tais Kec. Angkola Muara Tais		12		103.392.000			0	(103.392.000)
	Pembangunan Bronjong Pengaman SD Sidadi Kec. Angkola Muara Tais		12		103.392.000			0	(103.392.000)
	Pembangunan Bronjong Pengaman Sungai Silaiya - Tanjung Leuk Kec. Sayurmatinggi		12		103.392.000			0	(103.392.000)
	[#] Musrenbang								-
	Pembangunan Bronjong Aek Purik Desa Siamporik Dolok Kec. Angkola Selatan		10		86.160.000			0	(86.160.000)
	Pembangunan Bronjong Desa Dolok Godang Lorong Siopat-opat Kec. Angkola Selatan		10		86.160.000			0	(86.160.000)
	Pembangunan Bronjong Desa Perkebungan Kampung Perkebunan Kec. Angkola Sangkunur		12		103.392.000			0	(103.392.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Bronjong Desa Sipenggeng Menuju SD Negeri Sipenggeng Kec. Batang Toru		10		86.160.000	23		198.168.000	112.008.000
	Pembangunan Bronjong Dusun I Belakang Kantor Kepala Desa Hapesong Lama Kec. Batang Toru		12		103.392.000			0	(103.392.000)
	Pembangunan Bronjong Dusun Sihaborgoan Desa Lumban Huayan Kec. Sayurmatinggi		12		103.392.000			0	(103.392.000)
	Pembangunan Bronjong Kampung Perumnas Desa Sumuran Kec. Batang Toru		10		86.160.000			0	(86.160.000)
	Pembangunan Bronjong Lingkungan I Kelurahan Rianiate Kec. Angkola Sangkunur		10		86.160.000			0	(86.160.000)
	Pembangunan Bronjong Pengaman Sungai Kampung Cemara Desa Bandar Tarutung Kec. Angkola Sangkun		10		86.160.000			0	(86.160.000)
	Pembangunan Bronjong Pengaman Sungai Kampung Dolok Sinomba Kec. Arse		10		86.160.000			0	(86.160.000)
	Pembangunan Bronjong Sekolah Madrasah Lingkungan II Kec. Sipirok		12		103.392.000			0	(103.392.000)
	Pembangunan Dek Penahan Tanah Desa Sipogu Kec. Arse		50		65.000.000			0	(65.000.000)
	Lanjutan Pemangunan Bronjong Aek Talakma Kec. Sayur Matinggi		12		103.392.000			0	(103.392.000)
	Lanjutan Pembangunan Pengaman tebing Sungai Dusun III Lapotorop Desa Sumuran Kec. Batang Toru		12		103.392.000			0	(103.392.000)
	Pembangunan Bronjong di Desa Hapesong Baru Kec. Batang Toru		12		103.392.000			0	(103.392.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Bronjong Pengaman Jembatan Gantung Desa Pinagar Batu Hoak Jae Kec. Arse		23		198.168.000			0	(198.168.000)
					Pembangunan Bronjong Pengaman Sungai Dusun Partodungan Desa Hapesong Baru Kec. Batang Toru		12		103.392.000			0	(103.392.000)
					Pembangunan Bronjong Pengaman Sungai Garonggang Jae Aek Batang Salai Kec. Angkola Selatan		23		198.168.000			0	(198.168.000)
					Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing Sungai Aek Marbo Pardomuan Garonggang Jae Kec. Angkola Selatan		23		198.168.000			0	(198.168.000)
					Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing Sungai di Lk. 2 Kelurahan Batu Rosak Kec. Angkola Sangkunur		12		103.392.000			0	(103.392.000)
					Pembangunan Bronjong Pengamn Tebing Sungai Aek Sirara Kelurahan Aek Pining Kec. Batang Toru		12		103.392.000			0	(103.392.000)
					Pembangunan Bronjong SD N 100113 Lobu Uhom Kec. Angkola Barat		12		102.000.000			0	(102.000.000)
					Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing Sungai Aek Mangambur Kel. Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru		36		306.000.000			0	(306.000.000)
					Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing Sungai Aek Siondop Kec. Angkola Selatan		58		499.728.000			0	(499.728.000)
					Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing Sungai Mosa Kampung Palang Desa Gunung Baringin Kec. Ang Selatan		92		792.672.000			0	(792.672.000)
					Pembangunan Bronjong Aek Batang Salai Kec. Angkola Selatan				0	94	m	799.000.000	799.000.000
					Pembangunan Bronjong dan Saluran Aek Somarihan Desa Pardomuan Kec. Arse				0	23	m	195.500.000	195.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Bronjong Penahan Tebing Sungai Pargarutan Julu Kec. Angkola Timur				0	24	m	204.000.000	204.000.000
					Pembangunan Bronjong Pengaman Sungai Kel. Aek Simotung (Simangambat/Simanosor Gareja) Kec. Saipar Dolok Hole				0	24	m	204.000.000	204.000.000
					Rehabilitasi Bronjong Dan Sayap Bendung Desa Sibulele Kec. Batang Angkola				0	53	m	450.500.000	450.500.000
					Pembangunan Bronjong dan Saluran Irigasi Taman Sari Kec. Batang Toru				0	117	m	1.504.500.000	1.504.500.000
					Pembangunan Bronjong Sungai Aek Kambulo Kec. Marancar				0	24	m	204.000.000	204.000.000
					Pembangunan Bronjong Sungai Aek Malakkut Kec. Marancar				0	24	m	204.000.000	204.000.000
					Pembangunan Dek Penahan Aek Sappuran Kec. Marancar				0	154	m	200.200.000	200.200.000
1	3	2	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	68,41%		**30.488.595.000**			**13.166.445.495**	(17.322.149.505)
1	3	2	2.02	14	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi**	**16,1**	**Km**	**28.969.238.000**	**4,77**	**Km**	**12.134.105.595**	(16.835.132.405)
					[#] DAK TA. 2025				**1.499.031.000**				
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Miha Situmba Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pasir Ampolu Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Saba Jae Kec. Saipar Dolok Hole		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Saba Rodang Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sabungan/Aek Kuayan Kec. Sayurmatinggi		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sibio-bio Julu Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Simataniari Kec. Angkola Sangkunur		58	m	100.746.000			0	(100.746.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tanjung Rompa Kec. Marancar		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	[#] Musrenbang								
	Rehab Bendung Dusun Poldung Lombang Desa Sampean Kec. Sipirok		55	m	95.535.000			0	(95.535.000)
	Rehab Bendung Dusun Sidadi Jae Kec. Batang Angkola		55	m	95.535.000			0	(95.535.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Pargarutan Tonga Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Sibong-bong Napa Kec. Angkola Selatan		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hanopan Kec. Arse		86	m	149.382.000			0	(149.382.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pargarutan Julu Kec. Angkola Timur		60	m	104.220.000			0	(104.220.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Kampung Jalan Keliling Desa Wek IV Kec. Batang Toru		55	m	95.535.000			0	(95.535.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Rodang/Saba Lombang Desa Siamporik Dolok Kec. Angkola Selatan		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehab Saluran Irigasi Kampung Hutapadang Kec. Arse		55	m	95.535.000			0	(95.535.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[#] Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi				**654.849.000**				
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Aek bilah		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Angkola Barat		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Angkola Muara Tais		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Angkola Sangkunur		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Angkola Timur		29	m	50.373.000	43	m	74.691.000	24.318.000
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Arse		29	m	50.373.000	43	m	74.691.000	24.318.000
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Batang Angkola		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Batang Toru		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Marancar		29	m	50.373.000	43	m	74.691.000	24.318.000
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Saipar Dolok Hole		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Sayurmatinggi		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Sipirok		29	m	50.373.000	43	m	74.691.000	24.318.000
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Tano Tombangan Angkola		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Angkola Selatan				0	43	m	74.691.000	74.691.000
	[#] Pengembangan Infrastruktur Daerah				**498.519.000**				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Rodang Sigiring-giring Lombang Kec. Sipirok		287	m	498.519.000			0	(498.519.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Pargarutan Dolok Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tolang Julu Kec. Sayurmatinggi		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Ipar Kantin Desa Pargaritan Dolok Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Jae Desa Marancar Godang Kec. Marancar		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Rimba Sijungkang (Akibat Longsor) Kec. Angkola Timur		287	m	498.519.000			0	(498.519.000)
	Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Saba Julu Kel. Sitinjak Kec. Angkola Barat		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Aek Horsik Desa Situmba Julu Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Saba Huta Jonggol Jae Kec. Arse		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Saba Ogung Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Lanjutan Rehabilitasi Irigasi Mandurana Desa Situmba Julu Kec. Sipirok		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pargarutan Tonga Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Pembangunan Bendung Aek Saba Julu Desa Sipogu Kec. Arse		10	m	175.000.000			0	(175.000.000)
	Pembangunan Bendung Irigasi Aek Sipogu Kec. Arse		10	m	175.000.000			0	(175.000.000)
	Pembangunan Bendung Irigasi Desa Bange Kec. Sayurmatinggi		10	m	175.000.000			0	(175.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Jaringan Irigasi Saba Lobu Desa Haunatas Kec. Marancar		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
					Pembangunan Saluran Irigasi Aek Singali Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Pembangunan Saluran Irigasi bondar lapan - dusun botung - Kec. Aek Bilah		287	m	498.519.000			0	(498.519.000)
					Pembangunan Saluran Irigasi Saba Huta Padang Kec. Arse		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Pembangunan Saluran Irigasi Saba Jae Bunga Bondar Kec. Sipirok		100	m	173.700.000			0	(173.700.000)
					Pembangunan Saluran Irigasi Saba Oma Jonggol Jae Kec. Arse		100	m	173.700.000			0	(173.700.000)
					Pembangunan Saluran Irigasi Saba Rimba Tonga Kelurahan Bunga Bondar Kec. Sipirok		100	m	173.700.000			0	(173.700.000)
					Pembangunan Saluran Irigasi Saba Sidakkal Dusun Hasahatan Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Pembangunan Saluran Irigasi Saba Tonga Desa Situmba Julu Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Pembangunan Saluran Irigasi Simpang Liang Kelurahan Bunga Bondar Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Pembangunan Saluran Irigasi Tor Godang Desa Pal XI Kec. Angkola Timur		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
					Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kec. Angkola Selatan		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
					Rehabilitasi Jarigan Irigasi D.I. Tabusira Kel. Batang Tura Sirumambe Kec. Angkola Timur		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aek Sihelung Kec. Angkola Timur		27	m	46.899.000	57	m	99.000.925	52.101.925

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aek Sugi Kec. Marancar	Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Sugi Julu Kec. Marancar	115	m	199.755.000	115	m	199.755.000	-
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Huraba Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Marisi Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Parsabolas Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Badak Kec. Sayurmatinggi		80	m	138.960.000			0	(138.960.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Botung Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Horsik Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Nabara Kec. Marancar	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aek Sisoma Desa Aek Nabara Kec. Marancar	115	m	199.755.000	115		199.755.000	-
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Natas Kec. Angkola Selatan		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aek Ngadol Kec. Batang Toru		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Parupuk Kec. Tano Tombangan Angkola		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Aek Sabaon Kec. Marancar	Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Aek Sabaon Kec. Marancar	115	m	199.755.000	115	m	199.755.000	-
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Siala Lancat Kec. Arse		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Silo Kec. Arse		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Arse Kec. Arse		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Banua Rakyat Kec. Saipar Dolok Hole		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Kumal Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batu Hoak Kec. Arse		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batu Hula Kec. Batang Toru		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bintuju Kec. Batang Angkola		58	m	100.746.000			0	(100.746.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bondar Salapan Kec. Marancar		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gapuk Julu Kec. Marancar		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gonting Pege Kec. Aek Bilah		345	m	599.265.000			0	(599.265.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gunung Tua Kec. Angkola Timur		100	m	173.700.000			0	(173.700.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Harambania Kec. Sipirok		100	m	173.700.000			0	(173.700.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Hubara Marancar Kec. Marancar		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Huta Baru Kec. Batang Toru		60	m	104.220.000			0	(104.220.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Huta Godang Kec. Batang Toru		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Huta Padang Kec. Arse		113	m	196.281.000			0	(196.281.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pagaran Sikkut Kec. Angkola Barat		58	m	100.746.000			0	(100.746.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Panobasan Kec. Angkola Barat		58	m	100.746.000			0	(100.746.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Paran Padang Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pardomuan Kec. Angkola Selatan		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Poken Arba Kec. Marancar		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Saba Goti/Saba Poldung Kec. Sipirok		125	m	217.125.000			0	(217.125.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Saba Panompuan Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Saba Rimba Kec. Marancar		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Saba Siangus Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siamporik Kec. Angkola Selatan		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sibong-bong Kec. Angkola Selatan		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sibulele Kec. Batang Angkola		58	m	100.746.000			0	(100.746.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidadi II Kec. Batang Angkola		58	m	100.746.000			0	(100.746.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidadi I Kec. Batang Angkola		57	m	99.009.000			0	(99.009.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidap-dap Kec. Saipar Dolok Hole		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sigordang Kec. Marancar		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sihopur Kec. Angkola Selatan		130	m	225.810.000			0	(225.810.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sihulambu Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siloung Kec. Batang Toru		60	m	104.220.000			0	(104.220.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simanosor Julu Kec. Saipar Dolok Hole		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Simatohir Kec. Angkola Sangkunur		58	m	100.746.000			0	(100.746.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Simatorkis Kec. Angkola Barat		58	m	100.746.000			0	(100.746.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sitabo-tabo Kec. Saipar Dolok Hole		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sitandiang Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sitanggiling Kec. Angkola Sangkunur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sitinjak Kec. Angkola Barat		58	m	100.746.000			0	(100.746.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Situmba Kec. Tano Tombangan Angkola		60	m	104.220.000			0	(104.220.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Suka Maju/ Sipette Kec. Batang Toru		70	m	121.590.000			0	(121.590.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tabusira Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tapus Dolok Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tapus Nabolak Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tolang Aek Bilah Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tolang Jae Kec. Sayurmatinggi		100	m	173.700.000			0	(173.700.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tolang Julu Kec. Sayurmatinggi		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Haun Atas Kec. Marancar		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Garonggang Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Janji Raja Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Simandalu Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lancat Jae Kec. Arse		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumban Lobu Kec. Arse		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rangga Soli Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Roncitan Kec. Arse		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba aek harung - dusun tapus nabolak - desa sihulambu Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Aek Sapuan Desa Tapus Nabolak Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Bolak Siala Gundi Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Bulu Pargarutan Jae Kec. Angkola TImur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Julu Baringin Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Julu Mandersa Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Padang Kec. Arse		100	m	173.700.000			0	(173.700.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Panggulangan Kel. Parau Sorat Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Rimba Gunung Tua Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Sigorbus Batang Tura Sirumambe Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Uncim Desa Marisi Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siamporik Lombang Kec. Angkola Selatan		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipenggeng Kec. Batang Toru		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Suka Rame Kec. Marancar		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahalak Godang Simangambat Kec, Saipar Dolok Hole		29	m	50.373.000			0	(50.373.000)
	Rehabilitasi Saluran Irigasi Saba aek pining dusun tapus dolok desa tapus sipagabu Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Saluran Irigasi Saba Julu - Saba Bolak Kel. Parau Sorat Kec. Sipirok		58	m	100.746.000			0	(100.746.000)
	Rehabilitasi Saluran irigasi Saba tarutung sihulambu Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehab Total Bendung dan saluran irigasi Desa Bagas Lombang Kec. Sipirok		10	m	175.000.000			0	(175.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[#] Rencana Strategis			m	**3.371.080.000**				(3.371.080.000)
	Pembangunan Bendung Saluran Irigasi D.I. Bulu Soma Kec. Sipirok		10	m	175.000.000			0	(175.000.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Mardugu/Gunung Manaon Kec. Arse		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aek Suanon Kec. Saipar Dolok Hole		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Biru Kec. Aek Bilah		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bulu Mario Kec. Sipirok		115	m	199.755.000	1152	m	2.001.024.000	1.801.269.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Garoga Kec. Batang Toru		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Hapesong Kec. Batang Toru		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Janji Manaon Kec. Batang Angkola		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lobu Jelok Kec. Angkola Barat		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lubuk Kerek Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000	115	m	199.755.000	-
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Paran Pisang Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pargarutan Julu Kec. Angkola Timur		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sigiring-giring Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sihuik-huik Kec. Angkola Selatan		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sumuran Kec. Sipirok		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tandosan Kec. Saipar Dolok Hole		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tobotan Kec. Angkola Barat		115	m	199.755.000			0	(199.755.000)
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Bolak Desa Huraba Kec. Marancar				0	86	m	149.382.000	149.382.000
					Rehab Bendung Aek Gambiri Desa Situmba Julu Kec. Sipirok				0	22,8	m	399.000.000	399.000.000
					Rehab Bendung dan Saluran Irigasi Saba Ipar Desa Pargarutan Julu Kec. Angkola Timur				0	74,3	m	1.300.250.000	1.300.250.000
					Rehab Bendung dan Saluran Irigasi Tapus Desa Pargarutan Dolok Kec. Angkola Timur				0	37,5	m	656.250.000	656.250.000
					Rehab Bendung Irigasi Aek Agong Kel. Sangkunur Lk. 1 Kec. Angkola Sangkunur				0	20	m	350.000.000	350.000.000
					Rehab Bendung Kel. Bintuju Kec. Angkola Muara Tais				0	43	m	752.500.000	752.500.000
					Rehab Bendung Sisoma Aek Barangan Panobasan Dolok Kec. Angkola Barat				0	34,64	m	606.266.670	606.266.670
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aek Mandudu Desa Parau Sorat Sitabo-Tabo Kec. Saipar Dolok Hole				0	115	m	199.755.000	199.755.000
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pargarutan Jae Kec. Angkola Timur				0	691	m	1.200.267.000	1.200.267.000
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Huta Arse Julu Kec. Arse				0	202	m	350.874.000	350.874.000
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Rimba Desa Nanggar Jati Kec. Arse				0	288	m	500.256.000	500.256.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rehabilitasi Pipa Saluran Irigasi DI. Sibakkua Kec. Angkola Barat				0	230	m	399.510.000	399.510.000
					Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Holbung Kec. Angkola Muara Tais				0	115	m	199.755.000	199.755.000
					Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Sialagundi Kec. Sipirok				0	115	m	199.755.000	199.755.000
					Rehabilitasi Saluran Irigasi Saba Rimba Sipange Julu Kec. Sayur Matinggi				0	115	m	199.755.000	199.755.000
					Rehabilitasi Saluran Irigasi Saba Tonga Desa Aek Badak Jae Kec. Sayur Matinggi				0	115	m	199.755.000	199.755.000
					Rehabilitasi Saluran Irigasi Simataniari Kec. Angkola Sangkunur				0	230	m	399.510.000	399.510.000
					Rehabilitsai Saluran Irigasi Saba Siunjam Kec. Sayur Matinggi				0	115	m	199.755.000	199.755.000
					Pembangunan Bendung Irigasi Saba Lobu Tanjung Dolok Kec. Marancar				0	11,4	m	199.500.000	199.500.000
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Hutabaru Kec. Batang Toru				0	115	m	199.755.000	199.755.000
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saba Lobu Padang Lancat Sisoma Kec. Batang Toru				0	115	m	199.755.000	199.755.000
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	27,14		864.000.000			819.000.000	(45.000.000)
1	3	2	2.02	32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	151 DI		358.515.500			47.515.500	(311.000.000)
1	3	2	2.02	34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi	1 Lembaga		43.576.000			20.383.000	(23.193.000)
1	3	2	2.02	35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	151 Dokumen		253.265.500			145.441.400	(107.824.100)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**	94,95%		**9.650.612.400**			**6.282.785.200**	**(3.367.827.200)**
1	3	3	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Teenuhinya Akses Air Minum Masyrakat**	**94,95%**		**9.650.612.400**			**6.282.785.200**	(3.367.827.200)
1	3	3	2.01	25	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM**	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	28 Dokumen		**141.316.000**	19 Dokumen		**84.156.800**	(57.159.200)
1	3	3	2.01	28	**Pembangunan SPAM Jaringan Peipaan di Kawasan Perdesaan**	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Peipaan yang dibangun	250 Liter/Detik		**9.415.218.000**	20 Liter/Detik		**6.149.550.000**	(3.265.668.000)
					[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum				**100.000.000**				
					Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Minum/Bersih dan Sarana Lainnya di Kabupaten Tapanuli Selatan		1	Tahun	100.000.000	1	Tahun	200.000.000	100.000.000
					[#] Musrenbang				**200.000.000**				
					Pembangunan Sumur Bor Desa Sorimadingin PP Kec. Batang Angkola				100.000.000			0	(100.000.000)
					Pembangunan Sumur Bor Lingkungan V Pargarutan Batu Kec. Angkola Timur				100.000.000			0	(100.000.000)
					[#] Musrenbang				**450.000.000**				
					Pembangunan SPAM Jaringan Peipaan di desa sipogu Kec. Arse				150.000.000			0	(150.000.000)
					Pembangunan SPAM Jaringan Peipaan di Kampung beringin lokasih kampung lalang Kec. Angkola Selatan				150.000.000			0	(150.000.000)
					Pembangunan SPAM Jaringan Peipaan di Lingkungan III Aek Toras Kelurahan Pasar Sempurna Kec. Mara				150.000.000	1,33	Km	150.000.000	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lanjutan Pembangunan SAB Desa Silangkitang Tambiski Dusun Sayur Matua - Silaiya Julu Kec. SD. hole				200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan SAB Dusun Aek Sabaon Jae/Sukarame Desa Aek Sabaon Kec. Marancar				200.000.000	1,33	Km	200.000.000	-
	Pembangunan SAB Kampung IV / Situmba Baru Desa Simataniari Kec. Angkola Sangkunur				200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan SAB kampung Tanjung Baru Desa Huta Baru Kec. Aek Bilah	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Huta Baru Kec. Aek Bilah			200.000.000	1	Km	150.000.000	(50.000.000)
	Pembangunan SAB Lingkungan I Garonggang Lorong Hutabaru Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan				200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan SAB Lingkungan V Lorong 3 Janji Matogu Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan				200.000.000	1,33	Km	199.950.000	(50.000)
	Pembangunan SAB Menuju RSUD Pratama Type D Pintu Padang Kec.Batang Angkola				200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Sarana Air Bersih Aek Siburnung Desa Sialang Kec. Sayurmatinggi	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sialang Kec. Sayur Matinggi			200.000.000	1,33	Km	199.950.000	(50.000)
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Pinagar Kec. Arse				600.000.000			0	(600.000.000)
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sipange Godang Kec. Sayurmatinggi				200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tandihat Kec. Angkola Selatan				600.000.000	6,67	Km	1.000.050.000	400.050.000
	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Beringin Kec. Angkola Selatan				200.000.000			0	(200.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Sarana Air Bersih Kel. Pasar Sempurna LK. III Aek Toras Kec. Marancar				200.000.000	1,33	Km	200.000.000	-
	Pembangunan Sarana Air Bersih Kel. Sitinjak LK. III Parbalan Kec. Angkola Barat				200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Sarana Air Bersih LK. I Simatorkis Kel. Simatorkis Kec. Angkola Barat				200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Sarana Air Bersih Menuju Mesjid Al Muhajirin Desa Panobasan Kec. Angkola Barat				200.000.000			0	(200.000.000)
	Penambahan Debit dan Jaringan SAB Lingkungan III Siondop Somel Kelurahan Pardomuan Kec. Angkola Selatan				200.000.000			0	(200.000.000)
	Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih Lk. Batu Rosak Kec. Angkola Sangkunur				150.000.000	1	Km	150.000.000	-
	Pembangunan SAB Lk. V Aek Sabatang Menek Kelurahan Rianiate Kec. Angkola Sangkunur				150.000.000	1	Km	150.000.000	-
	Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun I Huta Koje Desa Parsalakan Kec. Angkola Barat				150.000.000			0	(150.000.000)
	Lanjutan pembangunan SAB Desa Lumban Ratus Kec. Tanotombangan Angkola				200.000.000			0	(200.000.000)
	Pengembangan SAB Lorong Siburangir lingk. 2 Kelurahan Simainggan Kec. Angkola Selatan				200.000.000			0	(200.000.000)
	Peningkatan SAB Dusun Hasobe Desa Marisi Kec. Angkola Timur				200.000.000	1,33	Km	199.950.000	(50.000)
	Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Pangoripan Desa Aek Urat Kec. Aek Bilah				199.950.000				(199.950.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Purba Tua Desa Aek Urat Kec. Aek Bilah				199.950.000				(199.950.000)
	Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Simatorkis Desa Aek Urat Kec. Aek Bilah				199.950.000				(199.950.000)
	Rehab SAB Lingkungan Pagaran Kel. Sitinjak Kec. Angkola Barat				200.000.000				(200.000.000)
	Rehab Sarana Air Bersih Desa Sipogu Kec. Arse				300.000.000				(300.000.000)
	Pembangunan SAB Desa Sialaman Kec. Sipirok				812.570.000				(812.570.000)
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Pargarutan Dolok Kec. Angkola Timur				547.800.000	1,33	Km	199.950.000	(347.850.000)
	Pembangunan SPAM Desa Sipangko Kec. Angkola Muara Tais				456.500.000			0	(456.500.000)
	Lanjutan Pembangunan SAB Kampung Koje Desa Batu Godang Kec. Angkola Sangkunur				498.498.000			0	(498.498.000)
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Batu Horing Kec. Batang Toru				0	1,33	Km	199.950.000	199.950.000
	Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Suka Maju Desa Benteng Kec. Batang Toru				0	1,33	Km	199.950.000	199.950.000
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Air Bersih Lainnya Kec. Batang Toru				0	1,33	Km	199.950.000	199.950.000
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Aek Libung Kec. Sayur Matinggi				0	1,33	Km	199.950.000	199.950.000
	Pembangunan Sarana Air Bersih Lk. IV Pargarutan Baru Kel. Psr Pargarutan Kec. Angkola Timur				0	1,33	Km	199.950.000	199.950.000
	Pembangunan Sarana Air Bersih Mako Polres Tapanuli Selatan Kec. Sipirok				0	10	Km	1.500.000.000	1.500.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Sarana Air Bersih Menuju Masjid Lingk. I Kel. Bintuju Ke. Angkola Muara Tais				0	3	Km	450.000.000	450.000.000
					Peningkatan SPAM Desa Sibongbong Kec. Angkola Selatan				0	1,33	Km	199.950.000	199.950.000
1	3	3	2.01	30	**Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sistem Penyediaan	29 Unit		**94.078.400**			**49.078.400**	(45.000.000)
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)			**3.850.000.000**			**200.000.000**	**(3.650.000.000)**
1	3	6	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Teenuhinya sistem drainase jalan dan lingkungan yang terhubung langsung dengan sungai (%)**	**0,32**		**3.850.000.000**			200.000.000	(3.650.000.000)
1	3	6	2.01	12	**Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan**	**Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun**	**2850**		**3.850.000.000**	**200**	**m**	**200.000.000**	(3.650.000.000)
					# BINA MARGA 1				**500.000.000**				(500.000.000)
					Pembangunan Dek dan Drainase Ruas Jalan Tiang Aras - Galanggang Kec. Angkola Timur		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Dek dan Paret Beton Kec. Aek Bilah		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Dek dan Paret Beton Kec. Angkola Timur		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Dek dan Paret Beton Kec. Arse		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Dek dan Paret Beton Kec. Saipar Dolok Hole		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Dek dan Paret Beton Kec. Sipirok		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Drainase Jalan Garoga Kec. Sipirok		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Jl. Merdeka Tipa-Tipa Kec. Sipirok		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Lingkungan IV Pangkal Dolok Kelurahan Parau Sorat Kec. Sipirok		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Ruas Jalan Desa Paran Padang Kec. Sipirok		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	# BINA MARGA 2				**2.950.000.000**				
	Dek Penahan Jalan Aek Parupuk Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Dek Dan Drainase Jl. Keliling Tanjung Dolok Kec.Marancar		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Dek & Drainase Bts. Kota Gua Asom - Bts. A. Sangkunur Kec.Angkola Selatan		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Dek & Drainase Pardomuan - Mosa (Bts. B. Angkola) Kec.Angkola Selatan		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Dek Penahan Jalan Desa Hutaraja Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Dek Penahan Jalan Kampung batu pulut dan dusun tapus sonang Angkola Sangkunur		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Bondar Losung, Sipange Julu Kec. Sayur Matinggi		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Bondar Losung, Sipange Julu Sayur Matinggi		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase dan Prasarana Desa Sisoma Kec.Tano Kec. Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Drainase dan Prasarana Lainnya Desa Hurase Batang Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	"Pembangunan Drainase dan Prasarana Lainnya Kampung Malako Desa Bandar Tarutung Angkola Sangkunur"		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase dan Prasarana Somanggal Parmonangan Sayur Matinggi		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Desa Hurase Kec. Batang Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Desa Kota Tua Kec. Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Desa Kota Tua Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Desa Purbatua Kec. Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Desa Purbatua Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Desa Sisoma Kec. Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Desa Sisoma Kec. Tano Tombangan Angkola.		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Dusun Adian Nauli Paten Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Dusun Aek Lubuk Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Dusun Aek Lubuk Kec. Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Dusun Sidadi Jae Kec. Batang Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan IV Kec. Sayurmatinggi		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Drainase Jalan SDN 100115 Desa Sitartoit Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Kampung Malako Desa Bandar Tarutung Kec. Angkola Sangkunur		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Kampung Padang Julu Desa Lembah Lubuk Raya Kec. Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Kampung Sorimadingin Baru Angkola Muara Tais		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Kampung Sorimadingin Baru Kec. Angkola Muara Tais		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Kelurahan Panabari Hutatonga Kec. Tano Tombangan Angkola.		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Lembah Lubuk Raya Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Lembah Lubuk Raya Kec. Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Lingkungan I di Mesjid Al-Abror Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Lingkungan I di Mesjid Al-Abror Kec. Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Lingkungan III Jalan ke Sisoma Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Lingkungan V Jalan Sisoma Julu Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Pemukiman desa aek uncim Kec.Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Pemukiman Desa Aek Uncim Kec. Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Drainase Pemukiman Kec. Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Pemukiman Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Pemukiman Tano Tombangan Angkola.		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Pemukiman Tano Tombangan Angkola'		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Saluran Mesjid Nurul Iman Dusun Aek Lubuk Desa Parsalakan Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Saluran Mesjid Nurul Iman Dusun Aek Lubuk Desa Parsalakan Kec. Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Sisoma jae Batang Toru		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Sisoma jae Kec. Batang Toru		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Somanggal Parmonangan Kec. Sayur Matinggi		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Tambiski, Lembah Lubuk Raya Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Drainase Tambiski, Lembah Lubuk Raya Kec. Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan paret jalan Bumus atau jalan menuju desa sitaratoit Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Paret Jalan Bumus atau jalan menuju desa sitaratoit Kec. Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan paret jalan Kelurahan Panabari Hutatonga Kec. Tano Tombangan Angkola		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan paret jalan LK.I Tanoponggol Jalan Lingkar Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Paret Jalan LK.I Tanoponggol Jalan Lingkar Kec. Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan paret jalan LK.V Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Paret Jalan LK.V Kec. Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Rehab. paret jalan Desa Sisundung Kampung Jalan Baru Angkola Barat		50	m	50.000.000			0	(50.000.000)
					Lanjutan Pembangunan Dek/Drainase Desa Sibulele Kec. Batang Angkola		100	m	100.000.000				(100.000.000)
					Lanjutan Pembangunan Drainase Aek Talakma Kec. Sayur Matinggi		200	m	200.000.000				(200.000.000)
					Pembangunan Dek/Drainase Desa Muaratais Kec. Angkola Muara Tais		100	m	100.000.000				(100.000.000)
					Pembangunan Drainase Jalan Inpres Kampung Napa Kec. Batang Toru				0	200	m	200000000	200.000.000
1	**3**	**8**	**2.01**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase keandalan bangunan gedung pemerintah**	**100%**		**28.673.108.200**			**7.944.686.200**	**(20.728.422.000)**
1	3	8	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Teenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Menjalankan Tugasnya	100%		**28.673.108.200**			**7.944.686.200**	(20.728.422.000)
1	3	8	2.01	18	**Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		1 Bangunan Gedung		**100.000.000**	1 Bangunan Gedung		**100.000.000**	-
					Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPR Kab. Tapanuli Selatan Kec. Sipirok		1	Tahun	100.000.000	1	Tahun	100.000.000	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	8	2.01	21	**Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen**	**65**	Dokumen	**28.573.108.200**	**20**	Dokumen	**7.844.686.200**	(20.728.422.000)
					Belanja Barang Pakai Habis				14.081.200			13.531.200	
					Penataan Lapangan Bola Aek Badak Jae Kec. Sayurmatinggi		1000		100.000.000			0	(100.000.000)
					Lanjutan Pelebaran Lapangan Bola Pargarutan Julu Kec. Angkola Timur		1000		100.000.000			0	(100.000.000)
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		700		105.000.000			22.500.000	(82.500.000)
					Pembangunan Dek penahan Tanah Komplek Perkantoran Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Kec. Sipirok		200		250.000.000			0	(250.000.000)
					Pembangunan Drainase Lingkungan Mako Polres Tapanuli Selatan Kec. Sipirok		600	m	600.000.000	450	m	450.000.000	(150.000.000)
					Pembangunan Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Kec. Sipirok		1		2.500.000.000			0	(2.500.000.000)
					Pembangunan Mako Pol Subsektor Marancar di Kec. Marancar		1		1.500.000.000			0	(1.500.000.000)
					Pembangunan Parkir dan Kanopi Komplek Kejaksaan Sipirok di Kec. Sipirok	Pembangunan Parkir Komplek Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Kec. Sipirok	250	m2	500.000.000	100	m2	200.000.000	(300.000.000)
					Pembangunan Paving Block Jalan dan Parkiran Mako Polres Tapanuli Selatan Kec. Sipirok		1000	m2	550.000.000	1000	m2	550.000.000	-
					Pembangunan Rumah Dinas Kabag Polres Tapanuli Selatan di Kec. Sipirok		1		650.000.000			0	(650.000.000)
					Pembangunan Rumah Dinas Kapolres Tapanuli Selatan di Kec. Sipirok		1		2.500.000.000			0	(2.500.000.000)
					Pembangunan Rumah Dinas Kasat Polres Tapanuli Selatan di Kec. Sipirok		1		770.000.000			0	(770.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Rumah Dinas Wakapolres Tapanuli Selatan di Kec. Sipirok		1		1.000.000.000			0	(1.000.000.000)
	Penataan Landscape Mako Polres Tapanuli Selatan Kec. Sipirok		1		750.000.000			0	(750.000.000)
	Pengadaan Meubelair Permanen Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Kec. Sipirok		1		2.500.000.000	1		1.350.000.000	(1.150.000.000)
	Pembangunan Gedung Kantor Camat Sipirok Kec. Sipirok		1		596.900.000			0	(596.900.000)
	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pasar Sipirok Dan Prasarana Lainnya Kec. Sipirok		1		596.900.000			0	(596.900.000)
	Pembangunan Musholla dan MCK Kantor Camat Batang Angkola Kec. Batang Angkola		1		202.946.000			0	(202.946.000)
	[#] Musrenbang								-
	Pembangunan Aula Kantor Lurah Lingkungan I Samping kantor Lurah Kab. Tapanuli Selatan		33		196.977.000			0	(196.977.000)
	[-] Pembangunan gedung serba guna Kantor Kepala Desa Aek Natas Kec. Angkola Selatan		25		149.225.000			0	(149.225.000)
	Rehab Gedung Kantor Kelurahan Rispa Kampung Sampean Kapar Kec. Angkola Timur		66		198.000.000			0	(198.000.000)
	Rehab Gedung Kantor Kepala Desa Aek Natas Kec. Angkola Selatan		66		198.000.000			0	(198.000.000)
	Pembangunan Aula Kantor Lurah Sigalangan Kec. Batang Angkola		25		149.225.000				(149.225.000)
	Pembangunan Aula Kantor Camat Aek Bilah Kec. Aek Bilah		1		596.900.000				(596.900.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehab Gedung dan Penataan Kantor Lurah Arse Nauli Kec. Arse		1		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Gedung Kantor Camat Muara Batang Toru Dan Prasarana Lainnya Kec. Muara Batang Toru		100		300.000.000				(300.000.000)
	Rehab Gedung Kantor Camat Tano Tombangan Angkola Dan Prasarana Lainnya Kec. Tano Tombangan Angkola		250		750.000.000				(750.000.000)
	Rehab Gedung Paviliun PRSU di Medan		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehabilitasi Kantor Camat Aek Bilah dan Sarana Lainnya Kec. Aek Bilah		166		498.000.000				(498.000.000)
	Rehab Kantor Camat Arse Dan Prasarana Lainnya Kec. Arse		167		501.000.000				(501.000.000)
	Rehab Kantor Camat, Aula Dan Rumah Dinas Kantor Camat Angkola Muaratais Kec. Angkola Muaratais		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Camat Marancar Dan Prasarana Lainnya Kec. Marancar		125		375.000.000				(375.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Aek Pining Dan Prasarana Lainnya Kec. Batang Toru		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Aek Simotung Dan Prasarana Lainnya Kec. Saipar Dolok Hole		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Bangun Purba Dan Prasarana Lainnya Kec. Batang Angkola		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Baringin Dan Prasarana Lainnya Kec. Sipirok		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Batangtura Sirumambe Dan Prasarana Lainnya Kec. Angkola Timur		66		393.954.000				(393.954.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehab Kantor Lurah Bunga Bondar Dan Prasarana Lainnya Kec. Sipirok		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Huta Suhut Dan Prasarana Lainnya Kec. Sipirok		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Lancat Dan Prasarana Lainnya Kec. Arse		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Panabari Hutatonga Dan Prasarana Lainnya Kec. Tano Tombangan Angkola		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Parau Sorat Dan Prasarana Lainnya Kec. Sipirok		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Pasar Pargarutan Dan Prasarana Lainnya Kec. Angkola Timur		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Pasar Sempurna Dan Prasarana Lainnya Kec. Marancar		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Perkebunan Batang Toru Dan Prasarana Lainnya Kec. Batang Toru		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Pintu Padang II Dan Prasarana Lainnya Kec. Batang Angkola		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Sangkunur Dan Prasarana Lainnya Kec. Angkola Sangkunur		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Sigalangan Dan Prasarana Lainnya Kec. Batang Angkola		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Simainggan dan Prasarana Lainnya Kec. Angkola Selatan		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Simatorkis Sisoma Dan Prasarana Lainnya Kec. Angkola Barat		33,33		100.000.000				(100.000.000)
	Rehab Kantor Lurah Sipagimbar Dan Prasarana Lainnya Kec. Saipar Dolok Hole		33,33		100.000.000				(100.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rehab Kantor Lurah Sitinjak Dan Prasarana Lainnya Kec. Angkola Barat		33,33		100.000.000				(100.000.000)
					Rehab Total Kantor Camat Angkola Barat Kec. Angkola Barat		500		1.500.000.000				(1.500.000.000)
					Rehab Total Kantor Camat AngkolaTimur Kec. Angkola Timur		583		1.749.000.000				(1.749.000.000)
					Rehab Total Rumah Dinas Camat Batang Angkola Dan Prasarana Lainnya kec. Batang Angkola		167		501.000.000				(501.000.000)
					Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Batangtoru Kec. Batang Toru		33,33		100.000.000				(100.000.000)
					Penataan Pelataran Kantor Camat Aek Bilah Kec. Aek Bilah		364		200.200.000				(200.200.000)
					Penataan Pelataran Kantor Camat Tano Tombangan Angkola Kec. Tantom Angkola		182		100.100.000				(100.100.000)
					Penataan Pelataran Rumah Kaca Kebun Raya Tapanuli Selatan Kec. Sipirok		1363,63		750.000.000				(750.000.000)
					Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola Desa Tolang Julu Kec. Sayur Matinggi		200		200.000.000			0	(200.000.000)
					Penataan Pelataran Tugu Hatabosi Kec. Marancar		143	m2	77.000.000	140	m2	77.000.000	-
					Pembangunan Pagar Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan		25,65		100.000.000				(100.000.000)
					Pembangunan Pagar Kantor Camat Tano Tombangan Angkola Kec. Tano Tombangan Angkola		25,65		100.000.000				(100.000.000)
					Pembangunan Dek Penahan Mesjid Desa Tanjung Dolok Kec. Marancar		120		156.000.000				(156.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Dek Penahan Tanah Mesjid Al Ikhsan Tanjung Dolok Kec. Marancar		116	m	150.800.000	116	m	150.800.000	-
					Pengecatan Trotoar Pejalan Kaki Zona Rumah Dinas Kec. Sipirok				0	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pembangunan Dek Penahan Kantor Camat Sipirok Kec. Sipirok				0	200	m	200.000.000	200.000.000
					Penataan Kawasan Masjid Agung Syahrun Nur Kec. Sipirok				0	1	Paket	150.000.000	150.000.000
					Pengadaan Sound Sistem Masjid Agung Syahrun Nur Kec. Sipirok				0	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Masjid Agung Syahrun Nur Kec. Sipirok				0	1	Unit	200.000.000	200.000.000
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Tribun MTQ Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Kec. Saipar Dolok Hole				0	1	Unit	200.000.000	200.000.000
					Rehab Tribun MTQ Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Kec. Saipar Dolok Hole				0	1	Unit	200.000.000	200.000.000
					Rehab Median Jalan Kec. Sipirok				0	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pembangunan Gapura MTQ Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Kec. Saipar Dolok Hole				0	1	Unit	200.000.000	200.000.000
					Pembangunan Loby Ruang Tunggu Kapolres Tapanuli Selatan Kec. Sipirok				0	1	Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
					Rehab Kantor Polsek Batang Angkola Kec. Batang Angkola				0	1	Unit	200.000.000	200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Kec. Sipirok				0	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Meubelair SPKT Mako Polres Tapanuli Selatan Kec. Sipirok				0	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000
					Rehab Mesjid Al Muslim dan Sarana Lainnya Patah Belok Desa Sianggunan Kec. Batang Toru				0	1	Unit	200.000.000	200.000.000
					Lanjutan Pembangunan Arsitektur Aula Desa Aek Nauli Kec. Batang Angkola (Luncuran TA. 2024)		1	Paket	680.855.000	1	Paket	680.855.000	-
1	**3**	**9**	**2.01**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Lingkungan yang Tertata**	**24.56 %**		**7.130.628.700**			**5.272.361.100**	(1.858.267.600)
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Teenuhinya Penataan Bangunan dan Lingkungan (LPJU) di Jalan Kabupaten	24.56 %		7.130.628.700				(7.130.628.700)
1	3	9	2.01	7	**Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan**		57	Kawasan	**388.633.300**	16	Kawasan	**280.201.300**	(108.432.000)
1	3	9	2.01	8	**Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya**				**6.725.000.000**			**4.955.000.000**	(1.770.000.000)
					Belanja Pemeliharaan Alat Besar dan - Alat Besar Darat - Alat Besar Darat Lainnya				**150.000.000**			**150000000**	-
					Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya		1	Tahun	150.000.000	1	Tahun	150.000.000	-
					Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya				500.000.000			**650.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya		1	Tahun	500.000.000	1	Tahun	650.000.000	150.000.000
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya				**6.075.000.000**			**4.155.000.000**	(1.920.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan dan Umum (LPJU) Desa Perkebunan Hapesong Kec. Batang Toru		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan dan Umum (LPJU) Desa Sigumuru Kec. Angkola Barat		10	Titik	50.000.000				(50.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Sihopur Kec. Angkola Selatan		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Sitaratoit Kec. Angkola Barat		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	-] Pembangunan Lampu Penerangan Jalan dan Umum (LPJU) DESA WEK III KAMPUNG I DESA WEK III KAMPUNG II Kec. Batang Toru		15	Titik	75.000.000	15	Titik	75.000.000	-
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan dan Umum (LPJU) Masjid Al- Wahidul Qahhar (masjid baru) Desa Panobasan Lombang Kec. Angkola Barat		10	Titik	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan dan Umum (LPJU) Parkayuan Kec. Saipar Dolok Hole		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Lumban Huayan Kec. Sayur Matinggi		10	Titik	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jalan SMP 4 Sipirok Kampung Parsorminan Desa Paran Dolok Mardomu Kec. Sipirok		10	Titik	50.000.000			0	(50.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Lapangan Sarasi Kelurahan Simainggan Kec. Angkola Selatan		10	Titik	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kel. Bangun Purba, Kec. Batang Angkola		10	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kelurahan Baringin Kec. Sipirok		10	Titik	50.000.000				(50.000.000)
					[#] Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum			Titik	**2.325.000.000**				(2.325.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Ds. Gunung Baringin, Kec. Angkola Selatan		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Ds. Sialaman		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jln. Nasional Ds. Perkebunan - Ds. Aek Pardomuan Kec. Angkola Sangkunur		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jln. Nasional Ds. Simata Niari - Kel. Rianiate, Kec. Angkola Sangkunur		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jln. Nasional Panompuan, Kec. Angkola Timur		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jln. ProtokolDs. Mondang - Ds. Sipange Siunjam Kec. Sayur Matinggi		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jln. Provinsi Ds. Pinagar Kel. Arse Nauli, Kec. Arse		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jln. Provinsi Ds. Roncitan - Kel. Latcat, Kec. Arse		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jln. Provinsi Simp. Tunggal Birong - Ds. Sidapdap, Kec. Saipar Dolok Hole		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Aek Bilah		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Angkola Barat		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Angkola Muara Tais		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Angkola Sangkunur		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Angkola Selatan		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Angkola Timur		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Arse		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Batang Angkola		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Batang Toru		15	Titik	75.000.000	40	Titik	200.000.000	125.000.000
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Marancar		15	Titik	75.000.000	40	Titik	200.000.000	125.000.000
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Muara Batang Toru		15	Titik	75.000.000	40	Titik	200.000.000	125.000.000
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Saipar Dolok Hole		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Sayur Matinggi		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Sipirok		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Tano Tombangan Angkola		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kel. Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru		15	Titik	75.000.000	30	Titik	150.000.000	75.000.000
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kel. Muara Manompas, Kec. Muara Batangtoru		15	Titik	75.000.000	25	Titik	125000000	50.000.000
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kel. Parau Sorat, Kec. Sipirok		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) LK. Janji Matagu, Kel. Pardomuan, Kec. Angkola Selatan		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) LK. Roncitan, Kel. Pardomuan, Kec. Angkola Selatan		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Menuju SMK Pertambangan, Desa Sipenggeng, Kec. Batangtoru		15	Titik	75.000.000			0	(75.000.000)
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Siondop Julu Kec. Angkola Selatan		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Lapangan Sarasi Kelurahan Simainggan Kec. Angkola Selatan		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
	Pengadaan Energi Listrik untuk Acara - Acara di Kab. Tapanuli Selatan		15	Titik	75.000.000	20	Titik	100.000.000	25.000.000
	Lanjutan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Danau Sias Kel. Rianiate Kec. Angkola Sangkunur		20	Titik	100.000.000				(100.000.000)
	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dusun Rambangan Desa Simatohir Kec. Angkola Sangkunu		20	Titik	100.000.000				(100.000.000)
	Perataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Tapanuli Selatan		15	Titik	75.000.000				(75.000.000)
	Prioritas Pembangunan Infrastruktur								-
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Lembah Lubuk Raya Kec. Angkola Barat		30		150.000.000				(150.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Sigordang Lobu Layan Kec. Angkola Barat		30		150.000.000			0	(150.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Sigumuru Kec. Angkola Barat		30		150.000.000			0	(150.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Simaninggir - RSU Sipirok Kec. Sipirok		120		600.000.000			0	(600.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Tolang Julu Kec. Sayur Matinggi		30		150.000.000			0	(150.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Hapesong Baru - Aek Pining Kec. Batang Toru	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kel. Aek Pining Kec. Batang Toru	40		200.000.000	20	Titik	100.000.000	(100.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Koridor Jl. Nasional Pasar Batang Toru - Jembatan Trikora Kec. Batang Toru		100		500.000.000				(500.000.000)
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Koridor Jl. Nasional Pasar Sigalangan - RSU Pintu Padang Kec. Batang Angkola		120		600.000.000				(600.000.000)
					Pemasangan Kwh Listrik dan Sarana Lainya Kantor Kejaksaan Tapanuli Selatan Kec. Sipirok				0	1	Paket	150.000.000	150.000.000
					Rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kabupaten Tapanuli Selatan				0	30	Titik	150.000.000	150.000.000
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Mabang Pasir - Bongal Desa Muara Hutaraja Kec. Muara Batang Toru				0	40	Titik	200.000.000	200.000.000
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Solarcell Kec. Batang Toru				0	40	Titik	200.000.000	200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Sialagundi Kec. Sipirok				0	40	Titik	200.000.000	200.000.000
					Pembangunan Lampu Sorot Lapangan MTQ Sipagimbar Kec. Saipar Dolok Hole				0	1	Paket	1.385.000.000	1.385.000.000
					Rehab Sarana Lampu Penerangan Jalan Komplek Perkantoran Kabupaten Tapanuli Selatan Kec. Sipirok				0	40	Titik	200.000.000	200.000.000
					Rehab Sarana Lampu Penerangan Jalan Lingkar Luar Perkantoran Kabupaten Tapanuli Selatan Kec. Sipirok				0	40	Titik	200.000.000	200.000.000
					Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Somanggol Parmonangan Ke, Sayur Matinggi				0	24	Titik	120.000.000	120.000.000
					Penataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Batang Toru				0	40	Titik	200.000.000	200.000.000
1	3	9	2.01	10	**Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		57	Dokumen	**16.995.400**	16	Dokumen	**37.159.800**	20.164.400
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik** **Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap**	**78.00 %** **72,31%**		**103.140.499.692**	**78.00 %** **72,31%**		**122.050.951.075**	**18.910.451.383**
1	3	10	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase jembatan dengan kondisi baik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	78.00 % 72,31%		**103.140.499.692**			122.050.951.075	18.910.451.383
1	3	10	2.01	28	**Pengelolaan Leger Jalan**	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	1	Dokumen	**200.000.000**	1	Dokumen	**200.000.000**	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	10	2.01	29	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1029	Dokumen	**612.771.800**	115	Dokumen	**617.987.800**	5.216.000
1	3	10	2.01	30	**Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa**	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	49	Km	**892.410.500**	166,8	Km	**576.660.500**	(315.750.000)
1	3	10	2.01	32	**Pembangunan Jalan**	Panjang Jalan yang Dibangun	6	Km	**1.098.667.500**	1,9	Km	**198.806.500**	(899.861.000)
					Pembangunan Jalan Dari Lingkungan II - Bukit Gabungan Kec. Angkola Sangkunur		1,8	Km	188.343.000			0	(188.343.000)
					Pembangunan Jalan Jurusan Desa Aek Pardomuan Kec. Angkola Sangkunur		1,8	Km	188.343.000			0	(188.343.000)
					Pembangunan Jalan Jurusan Lobu - Sigiring-giring Kec. Saipar Dolok Hole		5	Km	523.175.000			0	(523.175.000)
					Pembangunan Jalan Simandalu Desa Palsabolas Kec. Angkola Timur		1,9	Km	198.806.500	1,9	Km	198.806.500	-
1	3	10	2.01	33	**Rekonstruksi Jalan**	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	49	Km	**82.019.429.892**	67,83	Km	**104.222.456.275**	22.203.026.383
					Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Anturmangan Desa Marsada Kec. Sipirok		0,1		297.500.000			0	(297.500.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Sigiring-giring - Ramba Sihasur Kec. Sipirok		0,1		297.500.000			0	(297.500.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Simp. Jl. Prov. Sidapdap - Simaninggir Kec. Saipar Dolok Hole		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Simp. Biru - Aek Jahengna Kec. Aek Bilah	Peningkatan Jalan Simp Biru - Aek Jahengna Kec. Aek Bilah	0,15		279.000.000	3,12	Km	3.500.407.110	3.221.407.110

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelebaran Dengan Cor Beton Bahu Jalan Baringin - Hasang Marsada Kec. Sipirok		0,18		239.364.000			0	(239.364.000)
					Pelebaran Dengan Cor Beton Bahu Jalan Huta Raja - Parau Sorat - Baringin Kec. Sipirok		0,3		392.400.000			0	(392.400.000)
					Pelebaran dengan Cor Beton Bahu Jalan Keliling Kelurahan Arse Nauli Kec. Arse		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)
					Pelebaran dengan Cor Beton Bahu Jalan Keliling Kelurahan Lancat Kec. Arse		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)
					Pelebaran Dengan Cor Beton Bahu Jalan Simp. Jl. Propinsi - Simpang Tiga Sampean (Tanjung Medan) Kec. Sipirok		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)
					Pelebaran dengan Cor Beton Bahu Jalan Simp. Jl. Prov. Aek Haminjon - BBI Arse Kec. Arse		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)
					Pelebaran dengan Cor Beton Bahu Jalan Simp. Jl. Prov. - Batu Hoak Kec. Arse		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)
					Pelebaran dengan Cor Beton Bahu Jalan Simp. Jl. Prov. Gunung Manaon - Napompar Kec. Arse		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)
					Pelebaran Dengan Cor Beton Bahu Jalan Situmba - Siala Gundi Kec. Sipirok		0,15		196.200.000			0	(196.200.000)
					Pelebaran Jalan Simp. Jalan Nasional – SMA Plus Kec. Sipirok		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)
					Peningkatan Jalan Aek Horsik - Purba Sinomba Kec. Aek Bilah		0,1		191.580.000	0,12	Km	200.760.000	9.180.000
					Peningkatan Jalan Ampolu - Pangaribuan Kec. Sipirok	Peningkatan Jalan Pangaribuan - Ampolu - Dolok Sordang Kec. Sipirok	0,11		199.020.000	0,72	Km	1.204.560.000	1.005.540.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Barnang Koling - Tapus Kec. Sipirok		0,05		98.580.000			0	(98.580.000)
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Botung - Sihulambu Kec. Aek Bilah		0,17		222.360.000			0	(222.360.000)
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Gonting Pege - Tapus Nabolak Kec. Aek Bilah	Peningkatan Jalan Gonting Pege - Tapus Nabolak Kec. Aek Bilah	0,15		196.200.000	0,12	Km	200.760.000	4.560.000
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Huta Pohan - Batu Hombang Kec. Saipar Dolok Hole		0,15		198.816.000			0	(198.816.000)
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Huta Pohan - Tambiski Kec. Saipar Dolok Hole		0,15		198.816.000			0	(198.816.000)
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Lobu - Sigiring-giring Kec. Saipar Dolok Hole		0,15		198.816.000			0	(198.816.000)
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Lobu - Sunge Pining Kec. Saipar Dolok Hole		0,15		198.816.000			0	(198.816.000)
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Mandala Sena - Tano Hudon Kec. Saipar Dolok Hole	Peningkatan Jalan Mandalasena - Tano Hudon Kec. Saipar Dolok Hole	0,15		198.816.000	0,12	Km	200.760.000	1.944.000
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Padang Panjang - Aek Horsik Kec. Aek Bilah	Peningkatan Jalan Padang Panjang - Aek Horsik Kec. Aek Bilah	0,15		196.200.000	0,12	Km	200.760.000	4.560.000
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Parkayuan - Mandalasena Kec. Saipar Dolok Hole		0,15		198.816.000			0	(198.816.000)
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Parkayuan - Sitabo-tabo Kec. Saipar Dolok Hole		0,15		198.816.000			0	(198.816.000)
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Sigiring-giring - Turunan Kec. Saipar Dolok Hole		0,15		198.816.000			0	(198.816.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Sihulambu - Batas Taput Kec. Aek Bilah		0,08		98.100.000			0	(98.100.000)
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Sihulambu - Pagaran Kec. Aek Bilah		0,08		98.100.000			0	(98.100.000)
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Silangkitang - Gonting Pege Kec. Aek Bilah		0,15		196.200.000			0	(196.200.000)
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Silangkitang - Lobu Tayas Kec. Aek Bilah		0,15		196.200.000			0	(196.200.000)
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Silangkitang - Silayang layang Kec. Aek Bilah		0,08		98.100.000			0	(98.100.000)
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Simp. Jl. Prov. Huta Baru - Tanjung Baru Kec. Aek Bilah		0,15		196.200.000			0	(196.200.000)
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Tanjung Baru - Padang Panjang Kec. Aek Bilah		0,15		196.200.000			0	(196.200.000)
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Tapus - Dolok Sordang Kec. Sipirok		0,15		196.200.000			0	(196.200.000)
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Tapus Nabolak - Botung Kec. Aek Bilah	Peningkatan Jalan Tapus Nabolak Botung/ Sihulambu Kec. Aek Bilah	0,15		196.200.000	0,12	Km	200.760.000	4.560.000
					Peningkatan Jalan Gadu - Panaungan Kec. Sipirok		0,11		199.020.000			0	(199.020.000)
					Peningkatan Jalan Gunung Manungkap Kec. Angkola Timur		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
					Peningkatan Jalan Hasahatan - Pangaribuan Kec. Sipirok		0,12		223.200.000	3,43	Km	3.850.672.350	3.627.472.350

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Huta Baru Desa Paran Dolok Mardomu Kec. Sipirok		0,17		316.200.000			0	(316.200.000)
	Peningkatan Jalan Janji Lobi - Liang Kec. Sipirok		0,11		199.020.000			0	(199.020.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Bulu Mario - Dusun Sitandiang Kec. Sipirok	Peningkatan Jalan Bulumario - Sitandiang Kec. Sipirok	0,4	Km	340.559.200	0,12	Km	200.760.000	(139.799.200)
	Peningkatan Jalan Jurusan Sibadoar - Parkayuan Kec. Saipar Dolok Hole	Rehab Jalan Sibadoar - Simp. Parkayuan Kec. Saipar Dolok Hole	0,16		279.000.000	4,35	Km	2.350.083.875	2.071.083.875
	Peningkatan Jalan Jurusan Simanosor Gereja - Banua Rakyat Kec. Saipar Dolok Hole		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Simp. Mandalasena - Sibadoar Kec. Saipar Dolok Hole		0,108		200.880.000			0	(200.880.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Situnggaling - Lobu Kec. Saipar Dolok Hole		0,1		186.000.000			0	(186.000.000)
	Peningkatan Jalan Kampung Setia - Sidangar-dangar Desa Sarogodung Kec. Sipirok		0,09		171.120.000			0	(171.120.000)
	Peningkatan Jalan Keliling Pasar Sipagimbar Kec. Saipar Dolok Hole		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)
	Peningkatan Jalan Keliling Situnggaling Desa Ulumamis Situnggaling Kec. Saipar Dolok Hole		0,05		98.580.000			0	(98.580.000)
	Peningkatan Jalan Menuju Kantor BPP Kamp. Aek Latong Desa Marsada Kec. Sipirok		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Padang Mandailing - Huta Julu Kec. Saipar Dolok Hole		0,05		98.580.000			0	(98.580.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Jalan Silinggom-linggom Kec. Angkola Timur		0,05		93.000.000			0	(93.000.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nasional - Padang Bujur Kec. Sipirok		0,19		358.980.000			0	(358.980.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. Marisi - SMA Negeri 1 Kec. Angkola Timur		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Prov. Batu Satahil - Batu Satahil Kec. Sipirok		0,13		232.500.000			0	(232.500.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Prov. Pagaran Pisang - Aek Siguti Kelurahan Arse Nauli Kec. Arse		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Nagasaribu - Nagasaribu Kec. Sipirok		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Pagaran Ri - Pagaran Ri Desa Pargarutan Dolok Kec. Angkola Timur		0,07		130.200.000			0	(130.200.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Pengkolan - Desa Aek Batang Paya Kec. Sipirok	Peningkatan Jalan Pengkolan - Dano Paske/ Gunung Hasahatan Desa Aek Batang Paya Kec. Sipirok	0,12		223.200.000	0,48	Km	803.040.000	579.840.000
					Peningkatan Jalan Sosopan - Barnang Koling (Bts. Sipirok) Kec. Angkola Timur	Peningkatan Jalan Simp. Sosopan - Barnang Koling Kec. Angkola Timur	0,12		223.200.000	0,12	Km	200.760.000	(22.440.000)
					Perkerasan Jalan Natambang Roncitan TMMD 2024 Kec. Arse		0,184		99.383.000			0	(99.383.000)
					Preservasi Jalan Jurusan Muara Gordong - Tabusira Kec. Angkola Timur	Preservasi Jalan Simp. Jln Nasional Muara Gordong - Batang Tura Sirumambe Kec. Angkola Timur	0,2		372.000.000	0,22	Km	399.900.000	27.900.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Preservasi Jalan Keliling Kelurahan Bagas Nagodang Kec. Sipirok		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
					Lanjutan Pelebaran Bahu Jalan Desa Bandar Hapinis-Kel.Huta Raja Kec. Muara Batang Toru		0,172		199.176.000			0	(199.176.000)
					Lanjutan Pelebaran Bahu Jalan Kel.Huta Raja-Terapung Raya Kec. Muara Batang Toru		0.35		196.860.000			0	(196.860.000)
					Lanjutan Pembangunan Jalan Menuju Pesanteren Ihtihadul Mukhlisin Kec. Angkola Muaratais		0,161		299.460.000			0	(299.460.000)
					Lanjutan Pembangunan Jalan Pangaribuan-Muara Pardomuan Kec. Angkola Barat		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
					Lanjutan peningkatan Jalan Alahan Pahu - Pasir Bidang Kec.Angkola Sangkunur		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Bukkas - Bts. Kec. Angkola Selatan Kec. Angkola Angkola Sangkunur		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Kel. Muara Ampolu - Aek Sibirong Kec. Muara Batang Toru		0,15		196.200.000			0	(196.200.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Bukkas - Aek Sabatang menek Kec. Angkola Sangkunur		0,156		290.160.000			0	(290.160.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar Timur Kec. Angkola Barat.		0,1		186.000.000			0	(186.000.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Pagaran - Sirame ramean Kec. Angkola Barat		0,161		299.460.000			0	(299.460.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Pasir Bidang kec. Angkola Angkola Sangkunur		0,161		299.460.000			0	(299.460.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Lanjutan Peningkatan Jalan Sihopur - Tandihat Lama Kec.Angkola Selatan	Peningkatan Jalan Sihopur - Tandihat Kec. Angkola Selatan	0,15		279.000.000	1,43	Km	1.599.769.125	1.320.769.125
					Lanjutan Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. Sitampa - Sijukkit Kec. Angkola Muaratais		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Siuhom-Adian Nauli Kec. Angkola Barat.	Peningkatan Jalan Siuhom - Adian Nauli Kec. Angkola Barat	0,15		279.000.000	0,54	Km	1.009.980.000	730.980.000
					Lanjutan Peningkatan jalan Tapian Nauli - Suka Rame Kec.Angkola Selatan		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)
					Lanjutan Perkerasan Jalan Air Terjun Sidua-dua Kec. Angkola Barat.		0,56		300.309.500			0	(300.309.500)
					Lanjutan Perkerasan Jalan Lembah Lubuk Raya - Kel. Sitinjak . Kec. Angkola Barat		0,56		300.309.500			0	(300.309.500)
					Pelebaran Bahu Jalan Bts. Kota Gua Asom - Bts. A. Sangkunur Kec.Angkola Selatan		0,26		299.922.000			0	(299.922.000)
					Pelebaran Bahu Jalan Bts. Kota - Hurase (Bts. Sayur Matinggi) Kec. Batang Angkola		0,26		299.922.000			0	(299.922.000)
					Pelebaran Bahu Jalan Desa Purba Tua Kec.Tantom Angkola		0,26		299.922.000			0	(299.922.000)
					Pelebaran Bahu Jalan Huta Raja Kec. Muara Batang Toru		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)
					Pelebaran Bahu Jalan Kel.Ampolu Kec. Muara Batang Toru		0,17		196.860.000			0	(196.860.000)
					Pelebaran Bahu Jalan Keliling Huta Raja Kec.Muara Batang Toru		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelebaran Bahu Jalan Lk IV Kel. Sitinjak Kec. Angkola Barat		0,09		100.746.000			0	(100.746.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Mabang - Kantor Desa Muara Huta Raja Kec. Muara Batang Toru		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Muara Tais - Huta Tengger Kec. Angkola Muaratais		0,15		173.700.000			0	(173.700.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Pardomuan - Paya Sumanggol Kec. Sayurmatinggi		0,26		299.922.000			0	(299.922.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Sayur Matinggi (Aek Uncim) - Sipotang Niari Kec. Tantom Angkola		0,26		299.922.000			0	(299.922.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Sihepeng (Bts. Madina) - Panabari (Tantom) Kec. Sayurmatinggi		0,26		299.922.000			0	(299.922.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Simpang Mabang - Mabang Kec. Muara Batang Toru		0,17		199.176.000			0	(199.176.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Simp. Jl. Nas. - Aek Uncim (Bts. T. Angkola) Kec. Sayurmatinggi		0,26		299.922.000			0	(299.922.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Simp. Jl. Nas. - Bulu Gading Kec. Sayurmatinggi		0,26		299.922.000			0	(299.922.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Simp. Jl. Nas. - Hurase (Bts. B. Angkola) Kec. Sayurmatinggi		0,26		299.922.000			0	(299.922.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Simp. Jl. Nas. - Pintu Padang - Hurase Kec. Batang Angkola		0,26		299.922.000			0	(299.922.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Simp. Jl. Nas. Sitampa - Sijukkit Kec. Angkola Muaratais		0,15		173.700.000			0	(173.700.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelebaran Bahu Jalan Tanjung Dolok (Sp. 3 Tugu) - Siranap Kec.Marancar	Pelebaran Bahu Jalan Tanjung Dolok - Siranap Kec. Marancar	0,15		173.700.000	1,68	Km	1.950.072.000	1.776.372.000
	Pelebaran Bahu Jl. Keliling Kelurahan Sitinjak Kec.Angkola Barat		0,09		100.746.000			0	(100.746.000)
	Pelebaran Bahu Jl. Keliling Puskesmas Kec.Angkola Barat		0,09		100.746.000			0	(100.746.000)
	Pelebaran Jalan dengan Rabat Beton Desa Ingul Jae Kec.Tantom Angkola		0,09		100.746.000			0	(100.746.000)
	Pemabngunan Rabat Beton Lk IV Aek Salak Kelurahan Pardomuan Kec. Angkola Selatan		0,08		100.716.000			0	(100.716.000)
	Pembangunan Bronjong Jalan di Kelurahan Pintu Padang Kec. Batang Angkola		11		94.776.000			0	(94.776.000)
	Pembangunan Bronjong Pengaman Jembatan Sungai Batang Angkola Kec.Sayurmatinggi		20		172.320.000			0	(172.320.000)
	Pembangunan Cor Rabat Beton Tanjakan Kapundung Parluasan Desa Siuhom Kec.Angkola Barat		0,06		100.380.000			0	(100.380.000)
	Pembangunan Cor Rabat Kongsi Lima Desa Siuhom Kec. Angkola Barat		0,05		90.342.000			0	(90.342.000)
	Pembangunan Dek & Drainase Bts. Kota - Hurase (Bts. Sayur Matinggi) Kec. Batang Angkola		78		100.464.000			0	(100.464.000)
	Pembangunan Dek & Drainase Jalan Sayur Matinggi (Aek Uncim) - Sipotang Niari Kec. Tantom Angkola		78		100.464.000			0	(100.464.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Dek & Drainase Lumban Ratus - Sungai Btg Angkola Kec. Tantom Angkola		155,7		200.541.600			0	(200.541.600)
					Pembangunan Dek & Drainase Muara Tais - Huta Tengger Kec. Angkola Muaratais		78		100.464.000			0	(100.464.000)
					Pembangunan Dek & Drainase Panabari - Paya Sumanggol (Bts. Madina) Kec. Tantom Angkola		77,7		100.077.600			0	(100.077.600)
					Pembangunan Dek & Drainase Pardomuan - Paya Sumanggol Kec. Sayurmatinggi		78		100.464.000			0	(100.464.000)
					Pembangunan Dek & Drainase Sihepeng (Bts. Madina) - Panabari (Tantom) Kec. Sayurmatinggi		78		100.464.000			0	(100.464.000)
					Pembangunan Dek & Drainase Simp. Jl. Nas. - Aek Uncim (Bts. T. Angkola) Kec. Sayurmatinggi		78		100.464.000			0	(100.464.000)
					Pembangunan Dek & Drainase Simp. Jl. Nas. - Bulu Gading Kec. Sayurmatinggi		78		100.464.000			0	(100.464.000)
					Pembangunan Dek & Drainase Simp. Jl. Nas. - Hurase (Bts. B. Angkola) Kec. Sayurmatinggi		77,8		100.206.400			0	(100.206.400)
					Pembangunan Dek & Drainase Simp. Jl. Nas. - Pintu Padang - Hurase Kec. Batang Angkola		78		100.464.000			0	(100.464.000)
					Pembangunan Dek & Drainase Simp. Jl. Nas. Sitampa - Sijukkit Kec. Angkola Muaratais		78		100.464.000			0	(100.464.000)
					Pembangunan Dek Jalan Penghubung Sigulang Losung - Desa Hurase Kec. Batang Angkola		17,2		100.344.800			0	(100.344.800)
					Pembangunan Dek Penahan Jalan Aek Sabaon Julu Kec. Marancar		17		99.178.000			0	(99.178.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Dek Penahan Jalan Menuju Pemakaman Umum Baru Kel. Sitinjak Kec.Angkola Barat		78		100.464.000			0	(100.464.000)
					Pembangunan Dek Penahan Jalan Sibara-bara Kec. Angkola Sangkunur		46,584		60.000.192			0	(60.000.192)
					Pembangunan Dek Penahan Jalan SMA N 1 Kel. Sitinjak Kec.Angkola Barat		78		100.464.000			0	(100.464.000)
					Pembangunan Dek Penahan Jalan SMP N 1 Kel. Sitinjak Kec.Angkola Barat		78		100.464.000			0	(100.464.000)
					Peningkatan Jalan Adian Nauli- Sirame-Ramean Kec.Angkola Barat		0,1		186.000.000			0	(186.000.000)
					Peningkatan Jalan Aek Natas - Dolok Godang (Bts. Kota) Kec.Angkola Selatan		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)
					Peningkatan Jalan Aek Sirabun menuju Air Terjun Silima - Lima Kec. Angkola Barat		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
					Peningkatan Jalan Aek Sirabun menuju Air Terjun Silima - Lima Kec. Marancar		0,09		101.038.050			0	(101.038.050)
					Peningkatan Jalan Ampolu - Muara Opu Kec.Muara Batang Toru		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)
					Peningkatan Jalan Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan		0,1		297.500.000			0	(297.500.000)
					Peningkatan Jalan Bandar Hapinis - Rambin Pulo Goya Kec.Muara Batang Toru		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)
					Peningkatan Jalan Bandar Tarutung - Benteng Kec. Angkola Sangkunur		0,16		290.160.000			0	(290.160.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Benteng - Pulo Godang Kec.Batang Toru		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Hutaraja - Mabang - Bongal Kec.Muara Batang Toru		0,12		357.000.000			0	(357.000.000)
	Peningkatan Jalan Huta Tonga - Pasir Matogu - Sori Manaon Kec. Batang Angkola		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Janji Matogu - Bina Sari Kec. Angkola Selatan	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Simp. Janji Matogu - Bina Sari Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan	0,15		279.000.000	0,12	Km	200.760.000	(78.240.000)
	Peningkatan Jalan Jl. Bts. Kota - Tambiski - Sijantung Kec.Angkola Barat		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)
	Peningkatan Jalan Jl. Keliling Desa Siuhom Kec.Angkola Barat		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)
	Peningkatan Jalan Jl. Keliling Gapuk Julu - Gapuk Jae Kec.Marancar		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Jl. Keliling Lingkungan I Simatorkis Kec.Angkola Barat		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)
	Peningkatan Jalan Jl. Keliling Pintu Padang Kec. Batang Angkola		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)
	Peningkatan Jalan Jl. Keliling Situmba - Panabari Kec. Panabari - Paya Sumanggol (Bts. Madina)		0.268		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Jl. Keliling Smk Tambang Kec.Batang Toru		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Jl. Lorong Garonggang - Aek Gambir - Simaronop Kec.Angkola Selatan		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Jl. Suka Mulia - Marancar Godang Kec.Marancar		0,18		334.800.000			0	(334.800.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Bandar Hapinis (Bts. Batang Toru) - Ampolu - Bts. Perkebunan PT. MIR Kec. Muara Batang Toru		0.1		297.500.000			0	(297.500.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Huta Lambung - Sihopur Kec. Angkola Barat		0,161		299.460.000			0	(299.460.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Siamporik Dolok - Tandihat Lama Kec. Angkola Selatan		0,054		100.440.000			0	(100.440.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Simarlelan - Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Simp. Baringin Menuju Dusun Muara Pardomuan Desa Simataniari Kec. Angkola Sangkunur		0,161		299.460.000			0	(299.460.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Simp. Jl. Nasional - Sibara-bara Kec. Angkola Sangkunur		0,13		241.800.000			0	(241.800.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Sisundung - Kampung Koje Kec. Angkola Barat		0,0337		100.257.500			0	(100.257.500)
	Peningkatan Jalan Keliling Kantor Camat - Jalan Keliling Situmba - Panabari		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Keliling Kota Tua Kec Tantom Angkola		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Ktr. Camat - Pasar - Sma Kec.Muara Batang Toru		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Lobu – Aek Tarutung Kec. Angkola Sangkunur		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Lorong Mosa Jae - Palang Kec. Angkola Selatan		0,12		213.900.000			0	(213.900.000)
	Peningkatan Jalan Lumban Ratus - Sungai Btg Angkola Kec. Tantom Angkola		0,16		299.460.000			0	(299.460.000)
	Peningkatan Jalan Menuju Lapangan Bola Kec.Sayurmatinggi		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Menuju Pesantren Al Barokah Kec.Sayurmatinggi		0,054		100.440.000			0	(100.440.000)
	Peningkatan Jalan Menuju Rambin Purba Tua Kec.Tantom Angkola		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Menuju SD Aek Uncim Kec.Tantom Angkola		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Napa - Tandihat Lama - Pangaribuan Kec.Angkola Selatan		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Padang Lancat - Sisoma Jae (Bts. Marancar) Kec.Batang Toru		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Panabari - Paya Sumanggol (Bts. Madina) Kec. Tantom Angkola	Peningkatan Jalan Panabari - Paya Somanggal Kec. Tano Tombangan Angkola	0,2		372.000.000	1,13	Km	2.099.940.000	1.727.940.000
	Peningkatan Jalan Panobasan Lombang - Lobu Uhom - Bts. B. Toru Kec.Angkola Barat		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Pardomuan - Paya Sumanggol Kec. Sayurmatinggi		0,21		390.600.000	0,968	Km	1.800.480.000	1.409.880.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Pasar - Pardamean Kec.Muara Batang Toru		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)
	Peningkatan Jalan Pasir Matogu - Pargumbangan Kec. Batang Angkola		0,16		299.460.000			0	(299.460.000)
	Peningkatan Jalan Penghubung Jalan Antar Desa Desa Sidadi I		0,16		299.460.000			0	(299.460.000)
	Peningkatan Jalan Siamporik Dolok - Siamporik Lombang - Sihopur - Tandihat Kec. Angkola Selatan		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Siamporik Dolok - Tandihat Lama Kec.Angkola Selatan		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Siamporik - Huta Lambung Bts.Angkola Barat Kec.Angkola Selatan		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Sibangkua - Huta Lambung Kec. Angkola Barat		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Sigordang - Gunung Manaon - Smk Pertanian Kec.Marancar		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Sihepeng (Bts. Madina) - Panabari (Tantom) Kec. Sayurmatinggi		0,18		334.800.000			0	(334.800.000)
	Peningkatan Jalan Sihopur - Huta Lambung Kec. Angkola Selatan		0,15		279.000.000			0	(279.000.000)
	Peningkatan Jalan Simainggan - Suka Rame Kec.Angkola Selatan		0,161		299.460.000			0	(299.460.000)
	Peningkatan Jalan Simatorkis - Sisoma Julu - Bts. Marancar Kec.Angkola Barat		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Jalan Simp. Bulu Soma - Bulu Soma Kec.Angkola Selatan		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. (Aek Sabatang) - Aek Sabatang Julu Kec.Angkola Sangkunur	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nasional Aek Sabatang - Aek Sabatang Kec. Angkola Sangkunur	0,2		372.000.000	0,59	Km	1.099.260.000	727.260.000
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. (Baringin) - Sibara-Bara Kec.Angkola Sangkunur	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nasional - Baringin - Sibara Bara Kec. Angkola Sangkunur	0,2		372.000.000	0,54	Km	1.000.680.000	628.680.000
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. Batu Godang - Batu Godang - Tangsi Kec.Angkola Sangkunur		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
					Peningkatan Jalan Simp.Jl.Nas. - Batu Horing Kec.Batang Toru	Lanjutan Peningkatan Jalan Batu Horing Kec. Batang Toru	0,2		372.000.000	0,35	Km	649.140.000,00	277.140.000
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. - Benteng Banjar Masin Kec.Batang Toru		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. - Bulu Gading Kec. Sayurmatinggi		0,19		353.400.000			0	(353.400.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. (Huta Godang) - Rambin Mombang Boru Kec.Batang Toru		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. (Huta Godang) - Silaiya (Bts. Taput) Kec.Batang Toru	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nasional Huta Godang Kec. Batang Toru	0,2		372.000.000	0,806	Km	1.499.160.000	1.127.160.000
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. - Huta Tunggal - Lobu Jelok - Sialogo Kec.Angkola Barat	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nasional Huta Tunggal - Lobu Jelok Kec. Angkola Barat	0,12		223.200.000	0,962	Km	1.789.320.000	1.566.120.000
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. Janji Manaon - Mosa (Bts. A Selatan) Kec. Batang Angkola		0,161		299.460.000			0	(299.460.000)
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. - Pagaran Sikkut - Sisoma Julu Kec.Angkola Barat		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. - Panobasan Lombang - Sibadoar Kec.Angkola Barat		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. - Pasir Bidang Kec.Angkola Sangkunur		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. - Pintu Padang - Hurase Kec. Batang Angkola		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. (Pustu) - Simp. Jl. Nas. (Polsek) Kec. Batang Angkola		0,1		186.000.000			0	(186.000.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. - Rambin Aek Badak Julu Kec. Sayurmatinggi		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. - Sidadi Tianggu Kec. Batang Angkola		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. (Sigalangan) - Siture Kec. Batang Angkola		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. (Sirongit) - Bandar Tarutung - Banjar Masin Kec. Angkola Sangkunur		0,054		100.440.000			0	(100.440.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. (Sumuran) - Aek Sirara Kec.Batang Toru		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nas. Tano Ponggol - Simp. Pagaran Kec.Angkola Barat		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Prop. (Aek Pasir) - Simaninggir Kec.Marancar		0,161		299.460.000			0	(299.460.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Prop. - Aek Sikkut (Maheam) Kec.Marancar		0,16		297.600.000			0	(297.600.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Simp. Jl Prop. (Huraba) - Lubuk Naoto Kec.Marancar		0,19		353.400.000			0	(353.400.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Prop. (Psr. Sempurna) - Sisoma Julu (Bts. A. Barat) Kec.Marancar		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Simarlelan - Portal Pt. Mir Kec.Muara Batang Toru		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Simp. Simatohir - Simatohir Kec.Angkola Sangkunur		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Siopat-Opat - Pangaribuan (Bts. A. Barat) Kec.Angkola Selatan		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Sirame-Ramean - Aek Martolu Kec.Angkola Barat		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Sitinjak - Tangga Batu Kec.Angkola Barat		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Sp. Jl. Nas. Aek Sabatang Kec. Angkola Angkola Sangkunur.		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Peningkatan Jalan Sp. Jl. Nas. Huta Lambung - Bts. Angkola Selatan Kec.Angkola Barat		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Sp. Jl. Nas. Sibakkua - Huta Lambung Kec.Angkola Barat		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Sp. Jl. Nas. Sigumuru - Sirame-Ramean - Bts. A. Selatan Kec.Angkola Barat		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Sp. Koje - Wisata Air Terjun Kec.Angkola Barat		0,35		189.043.750			0	(189.043.750)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Sp. Pagaran - Sirame-Ramean Kec.Angkola Barat	Peningkatan Jalan Pagaran - Simp. Sirame Ramean Kec. Angkola Barat	0,2		372.000.000	0,535	Km	995.100.000	623.100.000
	Peningkatan Jalan Tahalak Ujung Gading Kec. Batang Angkola	Peningkatan Jalan Lingk. Tahalak Ujung Gading Menuju Pesantren Al Azhar Kec. Batang Angkola	0,186		100.463.250	0,12	Km	200.760.000	100.296.750
	Peningkatan Jalan Tambiski-Sijantung - Bts.Kota Kec.Angkola Barat		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Tandihat Lama - Sisundung (Bts. A. Barat) Kec.Angkola Selatan		0,161		299.460.000			0	(299.460.000)
	Perkerasan Jalan Keliling Pagaran - Siuhom . Kec. Angkola Barat		0,4		216.050.000			0	(216.050.000)
	Preservasi Simp.Jalan Nasional Muara Tais - Huta Tengger Kec.Angkola Muara Tais	Preservasi Jalan Simp. Jalan Nasional Muara Tais - Pargumbangan Kec. Angkola Muara Tais	0,2		372.000.000	0,39	Km	725.400.000	353.400.000
	Rekonstruksi Jalan Bts. Kota - Hurase (Bts. Sayur Matinggi) Kec. Batang Angkola		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Rekonstruksi Jalan Bts. Kota (Sirampak) - Napa Kec.Angkola Selatan		0,12		223.200.000			0	(223.200.000)
	Rekonstruksi Jalan Jl. Keliling Batang Toru Kec.Batang Toru		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Rekonstruksi Jalan Jl. Keliling Pasar Sayur Matinggi Kec. Sayurmatinggi		0,269		500.340.000			0	(500.340.000)
	Rekonstruksi Jalan Jl. Keliling Pasar Sempurna Kec.Marancar		0,19		353.400.000			0	(353.400.000)
	Rekonstruksi Jalan Jl. Poken Arba - Aek Sabaon (Bts. A. Timur) Kec.Marancar		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rekonstruksi Jalan Muara Tais - Huta Tengger Kec. Angkola Muaratais		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Rekonstruksi Jalan Sayur Matinggi (Aek Uncim) - Sipotang Niari Kec. Tantom Angkola		0,21		390.600.000			0	(390.600.000)
	Rekonstruksi Jalan Simp. Jl. Nas. - Aek Uncim (Bts. T. Angkola) Kec. Sayurmatinggi		0,19		353.400.000			0	(353.400.000)
	Rekonstruksi Jalan Simp. Jl. Nas. (Batang Toru) - Bandar Hapinis Kec.Batang Toru		0,1		297.500.000			0	(297.500.000)
	Rekonstruksi Jalan Simp. Jl. Prop. - Suka Mulia Kec.Marancar		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Rekonstruksi Jalan Sori Madingin - Bts. Kota Kec. Batang Angkola		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Rekonstruksi Simp. Jl. Nas. (Amborlang) - Aek Sabatang (Bts. A. Selatan) Kec.Angkola Sangkunur		0,2	Km	372.000.000	0,92	Km	2.746.755.200	2.374.755.200
	[#] Musrenbang				**1.792.400.000**				(1.792.400.000)
	Pelebaran Bahu Jalan Desa Janji Mauli		0,1		115.800.000			0	(115.800.000)
	Pemabngunan Rabat Beton Lk IV Aek Salak Kelurahan Pardomuan Kec. Angkola Selatan		0,1		141.500.000			0	(141.500.000)
	Pembangunan Jalan Kelilng di Dusun Sihaborgoan Desa Lumban Huayan Kec. Sayur Matinggi		0,1		141.500.000			0	(141.500.000)
	Peningkatan Jalan Anturmangan Desa Marsada Kec. Sipirok		0,1		141.500.000			0	(141.500.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Bulu Mario Menuju Dusun Sitandiang Kec. Marancar		0,1		141.500.000			0	(141.500.000)
	Peningkatan Jalan Desa Dolok Godang Kec. Angkola Selatan		0,1		141.500.000			0	(141.500.000)
	Peningkatan Jalan Desa Pangaribuan Kec. Sipirok		0,1		130.800.000			0	(130.800.000)
	Peningkatan Jalan Desa Perkampungan Hapesong Menuju Peustakaan Kec. Batang Toru		0,1		130.800.000			0	(130.800.000)
	Peningkatan Jalan Desa Sarogodung Kampung Sidangar - dangar Kec. Sipirok		0,1		141.500.000			0	(141.500.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Sibayo - Bayo Desa Paran Padang Kec. Sipirok		0,1		141.500.000			0	(141.500.000)
	Rehabilitasi Jalan di Dusun Sampean Desa Sampean Kec. Sipirok		0,1		141.500.000			0	(141.500.000)
	Rehabilitasi Jalan Lingkar Pasar Sayur Matinggi Menuju Lingkungan III Kec. Sayur Matinggi		0,2		283.000.000			0	(283.000.000)
	[#] Pengembangan Infrastruktur Daerah				**6.901.017.850**				(6.901.017.850)
	Lanjutan Pelebaran Jalan Batas Kota - Hurase Kec. Batang Angkola		0,2		224.529.000			0	(224.529.000)
	Lanjutan Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing Lingkungan II Aek Sabatang Godang Kelurahan Rianiate Kec. Angkola Sangkunur		17		146.472.000			0	(146.472.000)
	Lanjutan Pembangunan Dek Penahan di Kampung Jurang Kel Wek I Kec. Batang Toru		34		198.356.000			0	(198.356.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Lanjutan Peningkatan Jalan Aek Sabatang Godang - Aek Sabatang Menek Kelurahan Rianiate Kec. Angkola Sangkunur		0,08		148.800.000			0	(148.800.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Bunga bondar - Kel. Arse Nauli Kec. Arse		0,1		186.000.000			0	(186.000.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Lk. VI Gunung Aek Tndihat - Dolok Perjuangan Kec. Angkola Sangkunur		0,1		141.500.000			0	(141.500.000)
					Lanjutan Rabat Beton Jalan Pemda Menuju Aek Sibirong - Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru	Peningkatan Jalan Muara Ampolu - Jalan Pemda Kec. Muara Batang Toru	0,11		184.030.000	0,54	Km	998.820.000,00	814.790.000
					Pelebaran Bahu Jalan Dengan Rabat Beton di Lingkungan III Batu Rosak Kec. Angkola Sangkunur		0,17		196.860.000			0	(196.860.000)
					Pelebaran Bahu Jalan Jurusan Muaratais I - Muaratais II Kec. Angkola Muara Tais		0,17		196.860.000			0	(196.860.000)
					Pelebaran Bahu Jalan Simatorkis - Sisoma Lk. III - Lk. IV Kec. Angkola Barat		0,17		196.860.000			0	(196.860.000)
					Pelebaran dengan cor rabat bahu Jalan Desa Panindoan Kec. Tantom Angkola		0,17		196.860.000			0	(196.860.000)
					Pelebaran Dengan Cor Rabat Bahu Jalan Desa Situmba Kec. Tantom Angkola		0,17		196.860.000			0	(196.860.000)
					Pelebaran Denga Rabat Beton Bahu Jalan Jurusan Batu Hoak Kec. Batang Angkola		0,17		196.860.000			0	(196.860.000)
					Pembangunan Dek Penahan Mesjid Al-Rasyid Desa Huta Ginjang Kec. Angkola Timur		34		198.356.000			0	(198.356.000)
					Pembangunan Dek Penahan Tanah Jalan menuju Pesantren Silaiya Kec. Sayur Matinggi		34		198.356.000			0	(198.356.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Dek Penahan Tanah Mesjid Al-Ikhlas Desa Sugi Julu Kec. Marancar		24		140.016.000			0	(140.016.000)
	Pembangunan Dek Penahan Tebing Desa Huta Baru Pargarutan Dolok Kec. Angkola Timur		20,4		119.013.600			0	(119.013.600)
	Pembangunan Rabat Beton Jalan Tindoan Laut Kec. Angkola Sangkunur		0,11		143.880.000			0	(143.880.000)
	Peningkata Jalan Jurusan Desa Simatohir - Dusun Rambangan Kec. Angkola Sangkunur		0,1		141.500.000			0	(141.500.000)
	Peningkatan Jalan Aek Hopong - Aek Parlapuan Kelurahan Rianiate Kec. Angkola Sangkunur		0,11		143.880.000			0	(143.880.000)
	Peningkatan Jalan Bumi Latihan Tahfiz Quran Wakaf SUA Islami Aek Latong Desa Marsada Kec. Sipirok		0,1		130.800.000			0	(130.800.000)
	Peningkatan Jalan dikelurahan Batu Rosak Kec. Angkola Sangkunur		0,06		78.480.000			0	(78.480.000)
	Peningkatan Jalan Dusun Adian Goti Desa Tolang Jae Kec. Sayur Matinggi		0,14		198.100.000			0	(198.100.000)
	Peningkatan Jalan Janji Matogu Kec. Angkola Sangkunur		0,11		155.650.000			0	(155.650.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Aek sabatang Godang - Dolok Sabatang Kel. Rianaite Kec. Angkola Sangkunur		0,1		186.000.000			0	(186.000.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Batas Kelurahan Muara Ampolu - Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru		0,2		372.000.000			0	(372.000.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Batu Horing - Huta Godang Kec. Batang Toru		0,16		297.600.000			0	(297.600.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Jurusan Batu Rosak - Batu Godang Kec. Angkola Sangkunur		0,11		199.020.000			0	(199.020.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Desa Sumuran Kec. Batang Toru		0,14		198.100.000			0	(198.100.000)
	Peningkatan JalanJurusan Dusun sampean - Desa Sampean Kec. Sipirok		0,07		99.050.000			0	(99.050.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Kampung Lalang - Tandihat Kec. Angkola Selatan		0,17		190.849.650			0	(190.849.650)
	Peningkatan Jalan Jurusan Lobu Aek Tarutung - Maranata Kec. Angkola Sangkunur		0,11		199.020.000			0	(199.020.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Sigala-gala - Benteng Kec. Batang Toru		0,1		186.000.000			0	(186.000.000)
	Peningkatan Jalan Keliling Desa Sorik Kec. Batang Angkola		0,1		186.000.000			0	(186.000.000)
	Peningkatan Jalan Kelurahan Pasar Pargarutan Lk III Gunung Manaon Kec. Angkola Timur		0,1		130.800.000			0	(130.800.000)
	Peningkatan Jalan Lk. I Dusun Tiga Dolok Kec. Angkola Sangkunur		0,06		111.600.000			0	(111.600.000)
	Peningkatan Jalan Lk. IV Gunung Aek Tandihat - Aek Sabatang Godang Rianiate Kec. Angkola Sangkunur		0,2		170.279.600			0	(170.279.600)
	Peningkatan Jalan Menuju SD Impres Pangurabaan Kec. Sipirok		0,14		198.100.000			0	(198.100.000)
	Peningkatan Jalan Sigiring-giring - Huta Tonga Kec. Saipar Dolok Hole		0,09		117.720.000			0	(117.720.000)
	Lanjutan Pembangunan Bronjong Desa Aek Natas Kec. Angkola Selatan		17		146.472.000			0	(146.472.000)
	Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Aek Korsik - Aek Pisang Desa Aek Latong Kec. Aek Bilah	Peningkatan Jalan Aek Horsik - Aek Pisang Kec. Aek Bilah	0,612	Km	800.496.000	0,12	Km	200.760.000	(599.736.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Aek Korsik - Simatorkis Desa Aek Latong Kec. Aek Bilah		0,152		198.816.000			0	(198.816.000)
					Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Padang Panjang - Aek Urat Kec. Aek Bilah	Peningkatan Jalan Padang Panjang - Simpang Purba Sinomba (Desa Aek Urat) Kec. Aek Bilah	0,459		600.372.000	0,3	Km	501.900.000	(98.472.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Bukkas Sabatang Menek - Desa Malombu Kec. Angkola Sangkunur		0,115		150.420.000			0	(150.420.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Simp. Jl. Prov. Tolang - Tolang Gunung Kec. Aek Bilah		0,459		600.372.000			0	(600.372.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Muara Huta Raja Kec. Muara Batang Toru	Peningkatan Jalan Desa Muara Hutaraja Kec. Muara Batang Toru	0,4		566.000.000	1,34	Km	2.499.840.000	1.933.840.000
					Lanjutan Peningkatan Jalan Pagaran Sikkut Kec. Angkola Barat		0,283		400.445.000			0	(400.445.000)
					Lanjutan Peningkatan Jalan Simp. Jln. Nas - Sibakkua Huta Lambung Kec. Angkola Barat	Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nasional - Desa Sibakkua Kec. Angkola Barat	0,23		427.800.000	0,414	Km	770.040.000,00	342.240.000
					Lanjutan Peningkatan Jalan Siuhom - Tangga Batu Kec. Angkola Barat		0,4		566.000.000			0	(566.000.000)
					Lanjutan Perkerasan Jalan Simp. Jl. Nas. Perkebunan Hapesong - Rambangan Simatohir Kec. Angkola Sangkunur		0,484		199.855.700			0	(199.855.700)
					Pelebaran Bahu Jalan Desa Lobu Layan Kec. Angkola Barat		0,345		399.510.000			0	(399.510.000)
					Pembangunan Dek Penahan Tanah Gapuk Tua (Akibat Tanah Longsor) Kec. Marancar		200		200.000.000			0	(200.000.000)
					Pembangunan Rabat Beton Aek Pisang - Bts. Paluta Kec. Aek Bilah		0,152		198.816.000			0	(198.816.000)
					Pembangunan Rabat Beton Aek Urat - Bts. Paluta Kec. Aek Bilah		0,152		198.816.000			0	(198.816.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Rabat Beton Janji Nauli - Purba Tua Desa Aek Urat Kec. Aek Bilah		0,152		198.816.000			0	(198.816.000)
	Pembangunan Rabat Beton Menuju GPI Aek Sabatang Menek Kel. Rianiate Kec. Angkola Sangkunur		0,115		150.420.000			0	(150.420.000)
	Pembangunan Rabat Beton Pangoripan - Aek Urat Kec. Aek Bilah		0,152		198.816.000			0	(198.816.000)
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Menuju Kantor Kepala Desa Panobasan Dolok Kec. Angkola Barat		0,152		198.816.000			0	(198.816.000)
	Peningkatan Jalan Dusun Koje Desa Sisundung Kec. Angkola Barat		0,424		599.960.000			0	(599.960.000)
	Peningkatan Jalan Dusun Siijuk Kec.Angkola Barat		0,283		400.445.000			0	(400.445.000)
	Peningkatan Jalan Huta Lambung - Sihopur Kec. Angkola Barat.		0,353		499.495.000			0	(499.495.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Suka Mulia - Sugi Kec. Marancar		0,4		566.000.000			0	(566.000.000)
	Peningkatan Jalan Jurusan Tandihat Lama - Sisundung Kec. Angkola Barat	Peningkatan Jalan Tandihat - Sisundung Kec. Angkola Selatan	0,3		424.500.000	1,67	Km	3.100.620.000	2.676.120.000
	Peningkatan Jalan Keliling Lingkungan Kel. Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru		0,152		198.816.000			0	(198.816.000)
	Peningkatan Jalan Lingk. III Kel. Aek Pining Kec. Batang Toru		0,4		566.000.000			0	(566.000.000)
	Peningkatan Jalan Lingk. III Kel. Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru		0,353		499.495.000			0	(499.495.000)
	Peningkatan Jalan Lingk. I Kel. Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru		0,152		198.816.000			0	(198.816.000)
	Peningkatan Jalan Lingk. VI Gunung Aek Tandihat - Sabatang Godang Kec. Angkola Sangkunu		0,152		198.816.000			0	(198.816.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Jalan Menuju Bumi Latihan Tahfidz Qur'an Mandiri Dusun Aek Latong Desa Marsada Kec. Sipirok		0,152		198.816.000			0	(198.816.000)
					Peningkatan Jalan Menuju Sijabe-jabe Desa Tolang Julu Kec. Sayur Matinggi		0,459		600.372.000			0	(600.372.000)
					Peningkatan Jalan Menuju SMK Pertambangan Kec. Batang Tor		0,23		325.450.000			0	(325.450.000)
					Peningkatan Jalan Paten - Siuhom Kec. Angkola Barat		0,42		599.960.000			0	(599.960.000)
					Peningkatan Jalan Pemda - Muara Opu Kec. Muara Batang Toru		0,4		566.000.000			0	(566.000.000)
					Peningkatan Jalan Simaninggir - Pancur Batu Kec. Marancar		0,3		424.500.000			0	(424.500.000)
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Sekitar Pesantren Darul Mursyid (PDM) Kec. Saipar Dolok Hole				0	0,239	Km	399.847.000	399.847.000
					Pembangunan Bronjong Penahan Drainase Desa Garonggang Kec. Angkola Selatan				0	46	m	396.336.000	396.336.000
					Pembangunan Bronjong Desa Sianggunan Kec. Batang Toru				0	17	m	146.472.000	146.472.000
					Pembangunan Bronjong Dusun Setia Negara Hapesong Baru Kec. Batang Toru				0	18	m	155.088.000,00	155.088.000
					Pembangunan Dek Penahan Tanah Sipenggeng Kec. Batang Toru				0	100	m	100.000.000	100.000.000
					Peningkatan jalan dengan Rabat Beton Dusun Benteng Desa Hapesong Baru Kec. Batang Toru				0	0,06	Km	100.380.000	100.380.000
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru				0	0,119	Km	199.087.000	199.087.000
					Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Padang Lancat Sisoma - Sisipa Kec. Batang Toru				0	0,119	Km	199.087.000	199.087.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Hapesong Baru Kec. Batang Toru				0	0,119	Km	199.087.000	199.087.000
	Lanjutan Peningkatan Jalan Panompuan Jae - Sanggapati Kec. Angkola Timur				0	0,98	Km	1.100.192.100	1.100.192.100
	Lanjutan Peningkatan Jalan Mosa Julu - Kampug Sedikit - Simpang Palang Kec. Angkola Selatan				0	0,672	Km	1.249.920.000	1.249.920.000
	Lanjutan Peningkatan Jalan Tanjung Baru - Hutabaru Kec. Aek Bilah				0	0,359	Km	600.607.000	600.607.000
	Lanjutan Peningkatan Jalan Tanjung Baru - Padang Panjang Kec. Aek Bilah				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
	Pelebaran Cor Bahu Jalan Pargumbangan - Pasir Matogu Kec. Angkola Muara Tais				0	0,173	Km	200.334.000	200.334.000
	Pembangunan Dek Dan Drainase Jalan Tiang Aras - Galanggang Kec. Angkola Timur				0	200	m	200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Dek Penahan Jalan Gunung Manaon - Napoppar Kec. Arse				0	200	m	200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Drainase Masjid Agung Syahrun Nur Kec. Sipirok				0	200	m	200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Drainase Sialang - Sipange Julu Kec. Sayur Matinggi				0	400	m	400.000.000	400.000.000
	Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju SD Pargarutan Luat Harangan Kec. Sipirok				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
	Peningkatan Jalan Adian Nauli - Paten Kec. Angkola Barat				0	0,108	Km	200.880.000	200.880.000
	Peningkatan Jalan Batu Rosak - Pasir Bidang Kec. Angkola Sangkunur				0	0,891	Km	1.000.276.695	1.000.276.695
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Desa Marsada Dusun Aek Latong Kec. Sipirok				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Desa Simatohir Kec. Angkola Sangkunur				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Ke Pustu Hasahatan (Dolok Sordang Julu) Kec. Sipirok				0	0,06	Km	100.380.000	100.380.000
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Lk. IV Kel Bintuju Kec. Angkola Muara Tais				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Menuju Pustu/SD Negeri 101241 Inpres Pengkolan Kec. Sipirok				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
	Peningkatan Jalan dengan Rabat Beton Menuju SD Huta Tonga Kec. Angkola Muara Tais				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
	Peningkatan Jalan Desa Holbung Sekitar Pesantren Tuan Nalomok Kec. Angkola Muara Tais				0	0,215	Km	399.900.000	399.900.000
	Peningkatan Jalan Dolok Sordang - Barnang Koling Kec. Sipirok				0	0,58	Km	970.340.000	970.340.000
	Peningkatan Jalan Hauapan - Sibadoar Kec. Saipar Dolok Hole				0	1,425	Km	2.650.500.000	2.650.500.000
	Peningkatan Jalan Huta Pohan - Simp. Bangunan Kec. Saipar Dolok Hole				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
	Peningkatan Jalan Janji Lobi - Hasahatan (Dolok Sordang Julu) Kec. Sipirok				0	2,15	Km	3.999.000.000	3.999.000.000
	Peningkatan Jalan Kampung Tambiski - Dusun Bangunan Kec. Saipar Dolok Hole				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
	Peningkatan Jalan Keliling Desa Batu Satail Kec. Sipirok				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
	Peningkatan Jalan Keliling Desa Holbung Kec. Angkola Muara Tais				0	0,363	Km	675.180.000	675.180.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Jalan Lk. IV Aek Sabatang Julu Kel. Rianiate Kec. Angkola Sangkunur				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Peningkatan Jalan Lobu - Batu Rosak Kec. Angkola Sangkunur				0	2,458	Km	2.759.461.410	2.759.461.410
					Peningkatan Jalan Menuju Kantor Dinas Perikanan Tapanuli Selatan Kec. Sipirok				0	0,11	Km	200.880.000	200.880.000
					Peningkatan Jalan Menuju Puskesmas Pintu Padang Kec. Batang Angkola				0	0,215	Km	399.900.000	399.900.000
					Peningkatan Jalan Nanggar Jati Kec. Arse				0	0,403	Km	749.580.000	749.580.000
					Peningkatan Jalan Pahae Aek Sagala - Ramba Sihasur Kec. Sipirok				0	0,3	Km	501.900.000	501.900.000
					Peningkatan Jalan Panaungan - Pargarutan Luat Harangan Kec. Sipirok				0	2,6	Km	1.404.325.000	1.404.325.000
					Peningkatan Jalan Pangaribuan - Panaungan Kec. Sipirok				0	0,6	Km	1.003.800.000	1.003.800.000
					Peningkatan Jalan Pangaribuan - Sirame Ramean Kec. Angkola Barat				0	1,56	Km	2.899.740.000	2.899.740.000
					Peningkatan Jalan Pargarutan - Simandumayan (Perbatasan Paluta) Kec. Sipirok				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Peningkatan Jalan Paten - Tangga Batu Kec. Angkola Barat				0	0,38	Km	699.360.000	699.360.000
					Peningkatan Jalan Paya Somanggal - Panabari Kec. Sayur Matinggi				0	1,51	Km	2.799.300.000	2.799.300.000
					Peningkatan Jalan Pintu Padang Mandalasena - Sungai Pining Kec. Saipar Dolok Hole				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Peningkatan Jalan Sampean - Poldung Kec. Sipirok				0	0,215	Km	399.900.000	399.900.000
					Peningkatan Jalan Sialaman Julu - Simpang Tiga Maduma Kec. Sipirok				0	0,43	Km	799.800.000	799.800.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Jalan Sigalangan (Soropan) - Sitappa Simatoras Kec. Batang Angkola				0	0,97	Km	1.800.480.000	1.800.480.000
					Peningkatan Jalan Silaiya Jae - Silangkitang (Bts. Paluta) Kec. Saipar Dolok Hole				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Peningkatan Jalan Silangkitang - Gorahut Kec. Aek Bilah				0	0,36	Km	600.607.000	600.607.000
					Peningkatan Jalan Simaninggir Menuju Sungai Kec. Tano Tombangan Angkola				0	0,54	Km	1.000.680.000	1.000.680.000
					Peningkatan Jalan Simpang Tiga Sialaman Jae - Sialaman Jae Kec. Sipirok				0	0,22	Km	399.900.000	399.900.000
					Peningkatan Jalan Simp. Bangunan - Silaiya Jae Kec. Saipar Dolok Hole				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Peningkatan Jalan Simp. Empat Tiang Aras - Saba Tarutung (Bts Sipirok) Kec. Angkola Timur				0	0,833	Km	1.549.380.000	1.549.380.000
					Peningkatan Jalan Simp. Aek Sabatang Julu - Aek Sabatang Julu Kel. Rianiate Kec. Angkola Ssangkunur				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Nasional (Situmba) - Saba Tarutung (Bts. A. Timur) Kec. Sipirok				0	3,58	Km	6.649.500.000	6.649.500.000
					Peningkatan Jalan Simp. Jl. Provinsi - Batu Satail Kec. Sipirok				0	0,36	Km	399.661.620	399.661.620
					Peningkatan Jalan Simp. Purba Sinomba (Aek Urat) - Simp. Segitiga Emas (Batas Paluta)				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Peningkatan Jalan Simp. Sihoda-Hoda - Dusun Sihoda-Hoda Kec. Saipar Dolok Hole				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Peningkatan Jalan Siopat-Opat Kelurahan Tapian Nauli Kec. Angkola Selatan				0	0,591	Km	1.099.260.000	1.099.260.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Jalan Situmba - Sialaman Kec. Sipirok				0	0,591	Km	1.099.260.000	1.099.260.000
					Peningkatan Jalan Sisundung - Tandihat Kec. Angkola Barat				0	1,43	Km	2.650.500.000	2.650.500.000
					Peningkatan Jalan Tolang Godang - Tolang Gunung Kec. Aek Bilah				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Preservasi Jalan Batas Kota - Gua Asom Kec. Angkola Selatan				0	0,35	Km	649.140.000	649.140.000
					Preservasi Jalan Pargarutan Julu - Sitorbis (Bts. Sipirok) Kec. Angkola Timur				0	0,108	Km	200.880.000	200.880.000
					Preservasi Jalan Sayurmatinggi (Aek Uncim) - Sipotangniari Kec. Tano Tombangan Angkola				0	0,22	Km	399.900.000	399.900.000
					Preservasi Jalan Simp. Jln. Provinsi Bunga Bondar - Janji Lobi Kec. Sipirok				0	0,108	Km	200.880.000	200.880.000
					Preservasi Jalan Simp. Jl. Provinsi - Standiang Kec. Saipar Dolok Hole				0	0,108	Km	200.880.000	200.880.000
					Rehab Jalan Baringin - Sitabo-Tabo Kec. Saipar Dolok Hole				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Rehab Jalan Lingkar Kantor Bupati Kec. Sipirok				0	0,46	Km	850.020.000	850.020.000
					Rehab Jalan Parkayuan - Huta Pohan Kec. Saipar Dolok Hole				0	2,5	Km	1.350.312.500	1.350.312.500
					Rehab Jalan Simp. Parkayuan - Baringin Kec. Saipar Dolok Hole				0	0,12	Km	200.760.000	200.760.000
					Lanjutan Peningkatan Jalan Maheam Kec. Marancar				0	0,24	Km	450.120.000	450.120.000
					Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Ampolu Kec. Muara Batang Toru				0	0,752	Km	1.398.720.000	1.398.720.000
					Pembangunan Drainase Simp. Poken Arba Kec. Marancar				0	200	m	200.000.000	200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Jalan Pangarongan Lama - Gapuk Tua Kec. Marancar				0	0,397	Km	2.598.420.000	2.598.420.000
					Peningkatan Jalan Simanjuram - Hapesong Baru Kec. Batang Toru				0	0,75	Km	1.398.720.000	1.398.720.000
					Peningkatan Jalan Simatorkis Sisoma jae - Simatorkis Sisoma Julu Kec. Batang Toru				0	0,802	Km	900.361.290	900.361.290
					Peningkatan Jalan SMP Sibulele Muara Kec. Batang Angkola (Luncuran TA. 2024)		1	Paket	345.534.000	1	Paket	345.534.000	-
1	3	10	2.01	40	**Pembangunan Jembatan**	Panjang Jembatan yang Dibangun	37	Jembatan	**8.545.000.000**	9	Jembatan	**9.191.040.000**	646.040.000
					Pembangunan Jembatan Aek Silangkitang Desa Silangkitang Tambiski Kec. Saipar Dolok Hole	Pembangunan Jembatan Aek Sipilit Desa Silangkitang Tambiski Kec. Ssaipar Dolok Hole	2	m	200.000.000	4	m	400.000.000	200.000.000
					Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Situmbaga Kec. Angkola Selatan		10	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Lingkungan Roncitan Kec. Angkola Selatan		10	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Lanjutan Pembangunan Jembatan Janji Matogu Kec. Angkola Selatan		10	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Lanjutan Pembangunan Rambin Garonggang Kel. Simainggan Nauli Kec. Angkola Selatan		10	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Lanjutan Pembangunan Rambin Kelurahan Pardomuan Kec. Angkola Selatan		10	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Lanjutan Pembangunan Rambin Lingk.I Kel.Angkola Sangkunur Kec.Angkola Angkola Sangkunur		10	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Pelebaran Jembatan Aek Horsik Kec. Marancar	Pembangunan Jembatan Aek Horsik Kec. Marancar	2	m	200.000.000	8	m	800.000.000	600.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelebaran Jembatan Aek Marancar Kec. Marancar		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pelebaran Jembatan Aek Simayupayup Kec. Marancar		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pelebaran Jembatan Aek Sugi Kec. Marancar		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Angkola Sangkunur Huta Tonga Kec. Angkola Angkola Sangkunur		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Angkola Sangkunur Pasir Bidang Kec. Angkola Angkola Sangkunur		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Batu Rosak Kec. Angkola Angkola Sangkunur		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Batu Tunggul Desa Gunung Baringin Kec. Angkola Selatan.		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Gambulo Dusun Suka Mulia Kec.Marancar		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Pancur Lk III Sukarame Kec. Angkola Selatan		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Sabatang Godang - Aek Sabatang Menek Kec. Angkola Angkola Sangkunur		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Siparahu Garonggang Kel. Simaingan Kec. Angkola Selatan		3	m	300.000.000			0	(300.000.000)
	Pembangunan Jembatan Mosa Jae - Palang Kec. Angkola Selatan	Pembangunan Jembatan Mosa - Gunung Baringin Kec. Angkola Selatan	2	m	200.000.000	24,5	m	2.450.000.000	2.250.000.000
	Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Bawah Desa Pulo Godang Kec. Batang Toru		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Jembatan Perkuburan Sisoma Kec. Batang Toru		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Plat Beton Pasar Sigalangan Kec. Batang Angkola		1	Tpt	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pembangunan Rambin Desa Tahalak Ujung Gading Kec. Batang Angkola		10	m	150.000.000			0	(150.000.000)
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Basilam Kec. Angkola Muaratais		5	m	500.000.000			0	(500.000.000)
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Pesanteren Al- Baqi Kec. Angkola Muaratais		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembanguan Jembatan Bondar Tonga Kel.Panabari Pada Ruas Jalan Panabari - Paya Somanggol Kec.Tantom Angkola		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Lakka Kec.Angkola Muara Tais		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Langge Kec. Saipar Dolok Hole		2	m	200.000.000			0	(200.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Pahu Kampung Turunan Kec. Saipar Dolok Hole		5	m	500.000.000			0	(500.000.000)
	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Padang Mandailing Garugur Dusun Padang Mandailing Julu Kec. Saipar Dolok Hole		13	m	195.000.000			0	(195.000.000)
	Pembangunan Plat Beton di Desa Mondang Kec. Sayur Matinggi		2	Tpt	100.000.000			0	(100.000.000)
	Pembangunan Plat Beton Lk. Marantha Adian Konas Kec. Angkola Sangkunur		2	Tpt	100.000.000			0	(100.000.000)
	Pembangunan Jembatan Aek Silango Dusun Koje Menuju Air Terjun Sidua-dua Desa Sisundung Kec. Angkola Barat		5	m	500.000.000			0	(500.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Jembatan Menuju Perkuburan Sipaya Desa Sisundung Kec. Angkola Barat		8	m	800.000.000			0	(800.000.000)
					Pembangunan Jembatan Simanompeng Desa Simaninggir Kec. Marancar		5	m	500.000.000			0	(500.000.000)
					Pembangunan Plat Beton Lk. Marantha Adian Konas Kec. Angkola Sangkunur		3	Tpt	150.000.000			0	(150.000.000)
					Pembangunan Jembatan Aek Baringin Kec. Sayur Matinggi					15	m	1.500.000.000	1.500.000.000
					Pembangunan Jembatan Aek Siloung Simatorkis Sisoma jae - Simatorkis Sisoma Julu Kec. Batang Toru					10,5	m	1.050.000.000	1.050.000.000
					Pembangunan Jembatan Desa Buluparapat Kec. Angkola Selatan					12	m	1.200.000.000	1.200.000.000
					Pembangunan Jembatan Desa Sialaman - Nagargar Kec. Sipirok					7	m	700.000.000	700.000.000
					Pembangunan Plat Beton Siamporik Kec. Angkola Selatan					4	Tpt	200.000.000	200.000.000
					Pembangunan Plat Beton Simpang Sampean Desa Pinang Nabaris Kec. Sipirok					3	Tpt	150.000.000	150.000.000
					Pembangunan Plat Beton Simp. Tugu Siranap Kec. Marancar					8	Tpt	400.000.000	400.000.000
					Pembangunan Rambin Desa Purba Nauli Kec. Angkola Muara Tais (Luncuran TA. 2024		1	Paket	341.040.000		Paket	341.040.000	-
1	3	10	2.01	39	**Rehabilitasi Jembatan**	Jumlah Jembatan yang Direhab	7	Jembatan	**3.551.560.000**	11	Jembatan	**4.964.000.000**	1.412.440.000
					Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Muara Tais I Kec. Angkola Muara Tais		1	Unit	150.000.000			0	(150.000.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rehabilitasi Jembatan Menuju TPU Sisoma Desa Telo Kec. Batang Toru		1	Unit	150.000.000	1	Unit	150.000.000	-
					Pembangunan Bronjong Pengaman Abudmen Jembatan Aek Bulu Nipis Rodang Siuhom Kec. Angkola		35	m	301.560.000			0	(301.560.000)
					Rehabilitasi Jembatan Aek Siparau Garonggang Kel. Simainggan Kec. Angkola Selatan		1	Unit	150.000.000			0	(150.000.000)
					Rehabilitasi Jembatan Desa Harean Kec. Tano Tombangan Angkola	Rehabilitasi Jembatan Harean Kec. Tano Tombangan Angkola	1	Unit	150.000.000	3	m	150.000.000	-
					Rehabilitasi Jembatan Huta Raja - Ampolu Kec. Muara Batang Toru		50	m	2.500.000.000	50	m	2.500.000.000	-
					Rehabilitasi Jembatan Aek Tarutung Akibat Bencana Kec. Angkola Sangkunur					4	m	200.000.000	200.000.000
					Rehab Rambin Desa Aek Nadenggan Kec. Angkola Selatan					10	m	150.000.000	150.000.000
					Rehab Rambin Lubuk Kerek Kel. Batang Tura Sirumambe Kec. Angkola Timur					10	m	150.000.000	150.000.000
					Rehab Rambin Sitampa Kec. Batang Angkola					20	m	300.000.000	300.000.000
					Pembangunan Bronjong Penahan Jembatan Aek Tarutung Kec. Angkola Sangkunur					24	m	204.000.000	204.000.000
					Rehab Rambin Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan					10	m	150.000.000	150.000.000
					Rehabilitasi Jembatan Aek Sugi Kec. Marancar					16	m	800.000.000	800.000.000
					Rehab Rambin Padang Lancat Kec. Batang Toru					14	m	210.000.000	210.000.000
1	3	10	2.01	44	**Rehabilitasi Jalan**	Panjang Jalan yang Direhab	1,28	km	**4.020.660.000**			**0**	(4.020.660.000)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rehabilitasi Jalan Simatorkis Sisoma Lingkungan IV Kec. Angkola Barat		0,1	km	141.500.000			0	(141.500.000)
					Rehabilitasi Jalan Bts. Huta Raja - Bandar Hapinis Kec. Muara Batang Toru		0,81	km	1.499.160.000			0	(1.499.160.000)
					Rehabilitasi Jalan Keliling Kantor Camat Tantom Kec. Tano Tombangan Angkola		0,8	km	2.380.000.000			0	(2.380.000.000)
1	3	10	2.01	46	**Pemeliharaan Rutin Jalan**	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	121,5		**2.200.000.000**			**2.080.000.000**	(120.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan di Kec. Aek Bilah		8	Km	50.000.000	6,4	Km	40.000.000	(10.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan di Kec. Angkola Timur		8	Km	50.000.000	8	Km	50.000.000	-
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan di Kec. Arse		8	Km	50.000.000	8	Km	50.000.000	-
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan di Kec. Saipar Dolok Hole		8	Km	50.000.000	6,4	Km	40.000.000	(10.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan di Kec. Sipirok		8	Km	50.000.000	8	Km	50.000.000	-
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec.Angkola Selatan		8	Km	50.000.000	6,4	Km	40.000.000	(10.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec.Angkola Muara Tais		8	Km	50.000.000	8	Km	50.000.000	-
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec.Angkola Barat		100		100.000.000	7,2	Km	45.000.000	(55.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec. Angkola Sangkunur		8	Km	50.000.000			0	(50.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec. Batang Angkola		8	Km	50.000.000	8	Km	50.000.000	-
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec. Batang Toru		8	Km	50.000.000	8	Km	50.000.000	-
					Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec. Marancar		8	Km	50.000.000	8	Km	50.000.000	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
			Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec. Muara Batangtoru		8	Km	50.000.000			0	(50.000.000)
	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec. Sayurmatinggi		8	Km	50.000.000	8	Km	50.000.000	-
	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec. Tantom Angkola		8	Km	50.000.000	6,4	Km	40.000.000	(10.000.000)
	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Aek Bilah		100	m	100.000.000	60	m	60.000.000	(40.000.000)
	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Saipar Dolok Hole		100	m	100.000.000	60	m	60.000.000	(40.000.000)
	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Sipirok		100	m	100.000.000	150	m	150.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Angkola Timur		100	m	100.000.000	150	m	150.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Arse		100	m	100.000.000	150	m	150.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec.Angkola Selatan		100	m	100.000.000	60	m	60.000.000	(40.000.000)
	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec.Angkola Muara Tais		100	m	100.000.000	150	m	150.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Angkola Sangkunur		100	m	100.000.000			0	(100.000.000)
	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Batang Angkola		100	m	100.000.000	150	m	150.000.000	50.000.000
	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec. Batang Toru		100	m	100.000.000			0	(100.000.000)
	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec. Marancar		100	m	100.000.000			0	(100.000.000)
	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan Kec. Muara Batangtoru		100	m	100.000.000			0	(100.000.000)
	Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Sayurmatinggi		100	m	100.000.000	150	m	150.000.000	50.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Tantom Angkola		100	m	100.000.000	60	m	60.000.000	(40.000.000)
					Pembangunan Bronjong Jalan di Kelurahan Pintu Padang Kec. Batang Angkola		150	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Pembangunan Dek Penahan Jalan Aek Sabaon Julu Kec. Marancar		150	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Angkola Barat		150	m	150.000.000	135	m	135.000.000	(15.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec.Angkola Muara Tais		150	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Angkola Sangkunur		150	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec.Angkola Selatan		150	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Batang Angkola		150	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Batang Toru		150	m	150.000.000	100	m	100.000.000	(50.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Marancar		150	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Muara Batangtoru		150	m	150.000.000	100	m	100.000.000	(50.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Sayurmatinggi		150	m	150.000.000			0	(150.000.000)
					Pemeliharaan Rutin Badan Jalan Kec. Tantom Angkola		150	m	150.000.000			0	(150.000.000)
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**100**	**%**	**50.000.000**			**50.000.000**	-
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								-

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubahan	Rencana Perubahan Tahun 2025						
							Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Semula (Rp)	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Menjadi	Bertambah/Berkurang
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	9	Orang	50.000.000	10	Orang	50000000	-
1	3	12		16	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pemanfaatan dan kesesuaian tata ruang**	**100%**		**2.079.464.100**			**958.085.100,00**	(1.121.379.000)
1	3	12	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Teenuhinya Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Tata Ruang	**100%**		**1.994.062.000**			**900.666.000**	(1.093.396.000)
1	3	12	2.01		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1.994.062.000	1 Dokumen		900.666.000	(1.093.396.000)
1	3	12	2.03	3	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Teenuhinya Koordinasi dan Rapat Rencana Pemanfaatan Tata Ruang	**1**		**85.402.100**			57.419.100	(27.983.000)
1	3	12	2.03	5	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	30 Dokumen		85.402.100	30 Dokumen		**57.419.100**	(27.983.000)

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain. Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari Perangkat daerah sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. sejalan dengan Misi Ketiga Kabupaten Tapanuli Selatan “Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat”. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh ASN Dinas serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Sipirok, 8 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

FAHRIANNATA HARAHAP, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197603192002121002

RENJA APBD TAHUN 2025



DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 serta Renstra-Dinkes Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Renja Dinas Kesehatan tahun 2025 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa *(bottom-up)* maupun dari tingkat kabupaten *(top-down)* yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat *(stakeholders),* instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepadakebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2022 yang digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Kegiatan prioritas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2025, diantaranya adalah penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, menekan kasus gizi buruk serta standarisasi Puskesmas untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

Harapan kami semoga Perubahan Renja Dinas Kesehatan ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Sipirok, 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dr. RUDI ISKANDAR, M. Kes
PEMBINA TK.I
NIP. 197906262010011004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan hukum 4
1.3. Maksud dan tujuan 6
1.3.1. Maksud 6
1.3.2. Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD 8
2.2. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah 50
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah 53
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 54
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 71
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 74
3.2. Tujuan dan sasaran renja OPD 75
3.3. Program dan kegiatan 77
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 82
BAB V PENUTUP 97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 s/d Tahun 2026	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kab. Tapanuli Selatan	51
Tabel 2.3	Skore Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	53
Tabel 2.4	Nilai Skal Kriteria	54
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025	56
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	71
Tabel 3.1	Target Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025	76
Tabel 3.2	Jumlah Pagu Indikatif berdasarkan Sumber Dana	78
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025	79
Tabel 4.1	Rencana Kerja Tahun 2025	82
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

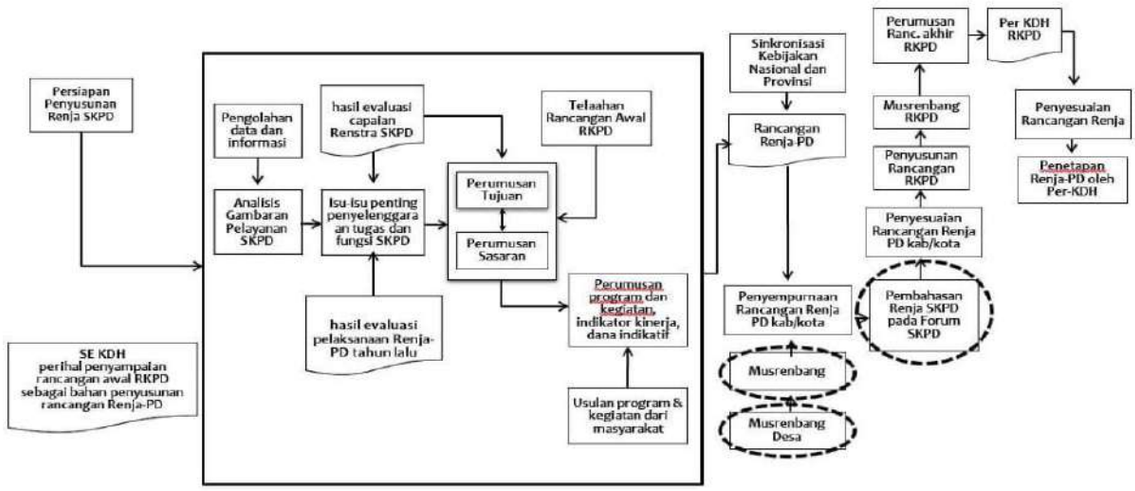
Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan terpadu dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja OPD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Renja OPD harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. OPD dalam menyusun Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dalam penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Fungsi Renja OPD yang disusun setiap tahun yaitu sebagai berikut:

a. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD sehingga terdapat keharmonisan pelaksanaan program dalam pencapaian sasaran strategis OPD;
b. Renja OPD merupakan acuan bagi OPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan; dan
c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yangtercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerjanya.

Mengingat Dokumen Renja OPD memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bagan alur tahapan penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut : (lihat gambar 1.1)

Renja Dinas Kesehatan dilakukan perubahan dalam rangka percepatan pencapaian target berdasarkan prioritas sehingga perubahan renja Dinas Kesehatan ini akan mengakomodir Program/Kegiatan Dinas Kesehatan untuk percepatan target pecapaian.

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Kab/Kota



Dinas Kesehatan Daerah merupakan salah satu OPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14); Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tipe A, melaksanakan urusan Bidang Kesehatan. Ketugasan Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara urusan Bidang Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659). Dinas Kesehatan yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesehatan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tahun 2025 dalam bentuk dokumen Renja yang disesuaikan dengan urusan yang ditangani. Oleh karena itu melalui penyusunan Renja ini, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis sebagaimana yang akan dalam dokumen perencanaan tahun 2021-2026 dapat tercapai.

Disamping itu sebagai upaya Dinas Kesehatan mendukung Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mewujudkan prioritas daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025. Berdasarkan urusan yang ditangani, peranan Dinas Kesehatan mewujudkan indikator kinerja dari sasaran daerah yaitu pada misi pertama yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ)

Pendekatan yang dipergunakan sebagai landasan dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan kinerja bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan

   Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang diperkirakan dalam prakiraan maju; dan

   Pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang teritegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungan berdasarka standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sehingga perlu dilakukan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, termasuk Renja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republuik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan PandemiCovid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 259);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan Tahun 2025.
2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehtan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Daerah Kbupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian dengan ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun 2024) dan capaian tahun 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra/Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap pencapaian target SPM.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bab ini diuraikan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terhadap isi Renja OPD ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2024. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara umum Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahanya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Selatan :

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021 S/D TAHUN 2026 KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog. & Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Catatan
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. & Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
01.02.01	DINAS KESEHATAN										
I	KANTOR DINAS KESEHATAN										
1.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100		100	100	100	100	100	100	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	20		4	4	100,00	4	4	100	
1.02.01.2.01.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Lakip Dinas Kesehatan	5		1	1	100,00	1	1	100	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60		12	12	100,00	12	12	100	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terperingatinya HKN	5		0	0	0,00	1	1	100	
		Terperingatinya HUT Tapsel	5		0	0	0,00	1	1	100	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan	5		1	1	100,00	1	1	100	

	SKPD										
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	3.230		0	0	0,00	646	646	100	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pengetahuan Tenaga ASN Dinas Kesehatan	200		200	200	100,00	40	40	100	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik/Penerangan	25		5	5	100,00	5	5	100	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60		12	12	100,00	12	12	100	
		Tersedinaya Makan Minum Rapat	2.500		500	500	100,00	500	500	100	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60		12	12	100,00	12	12	100	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Terbayarnya Iuran Langganan Surat Kabar	60		12	12	100,00	12	12	100	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya RapatRapat Koordinasi ke dalam Daerah	3.000		600	600	100,00	600	600	100	
		Terselenggaranya Rapat Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	250		50	50	100,00	50	50	100	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Rp. 10.000 Tersedianya Materai Rp. 6.000	5.000		1000	1000	100,00	1.000	1.000	100	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Iuran Listrik/Internet	60		12	12	100,00	12	12	100	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Non ASN Terbayarnya Tunjangan Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Barang	60		12	12	100,00	12	12	100	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah										

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Operasional Kenderaan Dinas	50		10	10	100,00	10	10	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan-Bangunan Kesehatan	4		0	0	0,00	0	0	0	
1.02.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,00		94,50	95,77	101,34	94,10	94,10	100	
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	97,00		95,75	95,95	100,20	96,10	96,10	100	
		Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,00		94,35	94,76	100,47	94,65	94,65	100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	95,00		93,65	94,32	100,72	94,10	94,10	100	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,59		60,91	88,00	144,48	78,22	78,22	100	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,19		92,28	92,70	100,46	93,39	93,39	100	
		Prevalensi Balita Stunting	0,33		0,04	1,04	10,20	0,04	0,04	100	
		Persentase pelayanan pada Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75,00		73	75,30	103,15	73,50	73,50	100	
		Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00		100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
		Persentase Penderita DM	100,00		98	100	102,04	99,50	99,50	100	

		yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	100,00		100	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	65,00		57,48	74	128,74	62,10	62,10	100	
		Persentase orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00		100	79	79	100,00	100,00	100	
		Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk	0,06		0,06	0,04	66,66	0,06	0,06	100	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota										
1.02.02.2.01.1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Bertambahnya Rumah Sakit di wilayah Tapanuli Selatan	1		1	1	100,00	0	0	0	
1.02.02.2.01.2	Pembangunan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas di Kecamatan	4		1	1	100,00	0	0	0	
1.02.02.2.01.3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya IPAL di Puskesmas	5		0	0	0,00	1	1	100	
1.02.02.2.01.4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Rumah Dinas Medis/Paramedis	8		0	0	0,00	3	3	100	
1.02.02.2.01.6	Pengembangan Puskesmas		5		0	0	0,00	1	1	100	
1.02.02.2.01.7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		7		0	0	0,00				
1.02.02.2.01.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terpeliharanya bangunan Puskesmas	5		2	2	100,00	1	1	100	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpeliharanya Puskesmas Pembantu dan Poskesdes/Polindes	25		8	8	100,00	5	5	100	
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Terpeliharanya Rumah	5		2	2	100,00	1	1	100	

	Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Tenaga Kesehatan									
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0		0	0					
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0		0	0					
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersedian Peralatan Kesehatan Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2019	85		85	75	88,24	85	85	100	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Cakupan Peralatan Kesehatan yang terkalibrasi	2.050		0	0	0,00	410	410	100	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	87		85	83	97,65	87	87	100	
		Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	90		75	72	96,00	90	90	100	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan BMHP	87		85	80	94,12	87	87	100	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	87		50	50	100,00	87	87	100	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota										
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	96,00		94,50	95,77	101,34	94,75	94,75	100	
		Persentase Desa Memiliki Kelas Ibu Hamil	80,67		50	45	90,00	72,48	72,48	100	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	97,00		95,75	95,95	100,20	96,10	96,10	100	
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Survey Fasilitatif	85,54		83,5	50	59,88	50,54	50,54	100	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Persentase bayi baru lahir	95,00		94,35	94,76	100,47	94,65	94,65	100	

	Bayi Baru Lahir	mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar									
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	95,00		93,65	94,32	100,72	94,10	94,10	100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan anak usia dini holistik integrasi (PAUD HI)	55,00		50	39	78,00	21,00	21,00	100	
		Persentase Desa yang mempunyai Kelas Ibu Balita	65,03		60	53	88,33	44,35	44,35	100	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,59		60,91	88	144,48	78,22	78,22	100	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Puskesmas yang melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun	24,00		10	10	100,00	4,00	4,00	100	
		Jumlah Puskesmas yang melakukan Deteksi Dini Gangguan Indra pada ≥ 40 % Populasi	17,00		8	7	87,50	4,00	4,00	100	
		Jumlah Puskesmas yang melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker pada ≥ 80 % Populasi usia 30-50 Tahun	10,00		6	5	83,33	2,00	2,00	100	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,19		92,28	92,70	100,46	93,39	93,39	100	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi	Persentase Penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar sesuai standar	100		100	100	100,00	100	100	100	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100,00		98	100	102,04	99,50	99,50	100	

		Sesuai Standar									
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		100	100	100,00	100	100	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Penemuan Penderita Baru TB Paru	95		95	83	87,37	75	75	100	
		Angka Keberhasilan Pengobatan semua kasus TB Paru	85		85	85	100,00	85	85	100	
		Angka Notifikasi semua Kasus TB (case Nitification Rate /CNR yang di Obati	244,67/100.000 pddk		244,67/100.000 pddk	244,67/100.000 pddk	100,00	231/100.000 pddk	231/100.000 pddk	100	
		Persentase Pasien TB yang mengetahui Kasus HIV	100		100	100	100,00	100	100	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinveksi HIV	Persentase orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100		100	100	100,00	100	100	100	
		Angka Prevalensi HIV/AIDS	< 0,5		< 0,5	< 0,5	100,00	< 0,5	< 0,5	100	
		Persentase Remaja 15-24 Tahun yang mendapatkan Pengetahuan Konprehensif tentang HIV/AIDS	75		75	75	100,00	60	60	100	
		Persentase ODHA yang mendapatkan akses pengobatan ART	100		100	100	100,00	100	100	100	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Kondisi KLB	100		100	100	100,00	100	100	100	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang terdapak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	100		100	100	100,00	100	100	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita stunting	0,33		0,04	1,04	100,00	0,04	0,04	100	

		Perevalensi balita gizi kurang	0,30		0,04	1,04	100,00	0,04	0,04	100	
		Persentase Bumil KEK	0,17		0,17	0,17	100,00	0,23	0,23	100	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan ASN dilakukan pengukuran kebugaran jasmani	450		450	450	100,00	450	450	100	
		Cakupan sekolah melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	50		50	50	100,00	50	50	100	
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	16		16	16	100,00	16	16	100	
		Persentase calon jemaah haji yang mendapatkan pembinaan kebugaran kesehatan jasmani	100		100	100	100,00	100	100	100	
		Cakupan puskesmas yang menyelenggarakan K3	3		3	3	100,00	5	5	100	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	100		100	100	100,00	60	60	100	
		Persentase Desa/Kel Deklarasi Stop BABS	40,00		40,00	40,00	100,00	18,82	18,82	100	
		Persentase rumah sehat	70		70	70	100,00	50	50	100	
		Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	65		65	65	100,00	50	50	100	
		Persentase Fasyankes yang melaksanakan pengolahan limbah medis sesuai standar	100		100	100	100,00	100	100	100	
		Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas	65		65	65	100,00	65	65	100	

		air minumnya sesuai standar									
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan PHBS di tatanan institusi/sekolah	95		95	95	100,00	40	40	100	
		Cakupan PHBS di tatanan rumah tangga	60		60	60	100,00	35	35	100	
		Cakupan PHBS di tatanan Tempat Kerja	95		95	95	100,00	40	40	100	
		Cakupan PHBS di tatanan Tempat-Tempat Umum (TTU)	95		95	95	100,00	40	40	100	
		Cakupan PHBS di tatanan Fasilitas tempat kesehatan	95		95	95	100,00	40	40	100	
		Jumlah Desa Binaan yang dibina	16		16	16	100,00	16	16	100	
		Persentase Pusyandu Mandiri	75,00		75,00	75,00	100,00	30,00	30,00	100	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Program Kesehatan Tradisional	16		16	16	100,00	16	16	100	
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupressure	16		16	16	100,00	16	16	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Puskesmas yang melakukan Pengumpulan, Pengolahan dan Diseminasi Informasi Surveilans Kesehatan	18		18	18	100,00	17	17	100	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Penderita Gangguan Mental Emosional ≥ 15 Tahun yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5		5	5	100,00	5	5	100	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Sekolah yang melakukan upaya pencegahan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Napza di SMA	11		11	11	100,00	0	0	0	

1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Tersedianya Hibah Pendanaan untuk PMI Tapsel	12		12	12	100,00	12	12	100	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat pasca Krisis Kesehatan	100		100	100	100,00	100	100	100	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Proporsi Kecacingan	< 10		< 10	< 10	100,00	< 10	< 10	100	
		Angka RFT Rate / Cure Rate	85		85	85	100,00	85	85	100	
		Prevalensi Rate Kusta per 10.000 Penduduk	< 1/10.000 Pddk		< 1/10.000 Pddk	< 1/10.000 Pddk	100,00	< 1/10.000 Pddk	< 1/10.000 Pddk	100	
		CDR per 100.000 Penduduk	< 5/100.000 Pddk		< 5/100.000 Pddk	< 5/100.000 Pddk	100,00	< 5/100.000 Pddk	< 5/100.000 Pddk	100	
		Proporsi Cacat Tingkat II diantara Penderita Baru Kusta	< 5		< 5	< 5	100,00	< 5	< 5	100	
		Proporsi anak < 14 Tahun diantara Penderita Baru Kusta	< 5		< 5	< 5	100,00	< 5	< 5	100	
		Proporsi MB diantara Penderita Baru Kusta	< 50		< 50	< 50	100,00	< 50	< 50	100	
		Jumlah Fokus Pemberantasan penyakit yang diakibatkan sarang nyamuk	30		30	30	100,00	20	20	100	
		Persentase Angka Mikrofilariaret	< 1		< 1	< 1	100,00	< 1	< 1	100	
		Persentase penyelidikan epidemiologi Tular Vektor & Zoonotik	100		100	100	100,00	100	100	100	
		Angka Kasus baru HIV, Sifilis dan/atau Hepatitis B pada anak	50/100.000 KH		50/100.000 KH	50/100.000 KH	100,00	50/100.000 KH	50/100.000 KH	100	
		Cakupan Lima Imunisasi Dasar Lengkap	100,00		100,00	100,00	100,00	95,00	95,00	100	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil dari Keluarga Miskin yang tidak memiliki Jaminan yang mendapatkan Pelayanan	100,00		100,00	100,00	100,00	98,50	98,50	100	

		Persalinan									
		Tersedianya Jaminan Kesehatan Masyarakat Kab. Tapsel	60		60	60	100,00	12	12	100	
		Tersedianya Jaminan Kesehatan Non Kavitasi	60		60	60	100,00	12	12	100	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Sampel Spesimen Penyakit Potensial KLB yang dikirim ke Lab Rujukan/Nasional	40		40	40	100,00	0	0	0	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan puskesmas yang melaksanakan Intervensi Lanjut Program PIS-PK	16		16	16	100,00	16	16	100	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan Keluarga	16		16	16	100,00	16	16	100	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Belanja Operasional Kesehatan dari DAK Non Fisik	60		60	60	100,00	12	12	100	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Puskesmas yang terreakreditasi	16		16	16	100,00	6	6	100	
		Cakupan Klinik yang terakreditasi	9		9	9	100,00	0	0	0	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Penduduk yang medapatkan pelayanan Pasca Imunisasi dan Pengobatan Massal	100		100	100	100,00	100	100	100	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistim Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi										
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Desa Menggunakan Garam Beryodium	248		248	248	100,00	40	40	100	
		Tersedianya Data Status Gizi Masyarakat di Posyandu	406		406	406	100,00	100	100	100	
		Tersedianya Data Informasi Sarana Prasarana dan Alat	16		16	16	100,00	16	16	100	

		Kesehatan Puskesmas									
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan	Tersedianya Profil Kesehatan	85		85	85	100,00	17	17	100	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota										
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0		0	0	0,00			0	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0		0	0	0,00			0	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan Penerapan Manajemen Puskesmas Sesuai Standar	16		16	16	100,00	16	16	100	
		Cakupan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan Penerapan PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) sesuai standar	16		16	16	100,00	16	16	100	
		Cakupan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan (QUICKWINS)	16		16	16	100,00	16	16	100	
		Tersedianya posko kesehatan P3K di hari-hari tertentu wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan	55		55	55	100,00	11	11	100	

		Cakupan Puskesmas BLUD	3		3	3	100,00	0	0	0	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya Dokumen Persiapan Pembangunan Rumah Sakit Type D	1		1	1	100,00	0	0	0	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi	100		100	84,21	84,21	100,00	100,00	100	
		Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	45,00		55,00	55,00	100,00	60,00	60,00	100	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota										
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Praktek Tenaga Kesehatan yang mempunyai izin Praktek	210		210	210	100,00	200	200	100	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktek	345		430	450	104,65	500	500	100	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas kesehatan yang sudah tersertifikasi	270		270	270	100,00	30	30	100	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0		0	0	0,00	0	0	0	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		0		0	0	0,00	0	0	0	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0		0	0	0,00	0	0	0	

1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasyankes dengan penggunaan obat sesuai FORNAS	75,00		75,00	75,00	100,00	55,00	55,00	100	
		Prevalensi Balita Stunting	0,33		0,33	0,33	100,00	0,44	0,44	100	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mempunyai izin	85,00		85,00	85,00	100,00	65,00	65,00	100	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat dan UMOT yang memenuhi standar dan persyaratan	65,00		65,00	65,00	100,00	65,00	65,00	100	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat dan UMOT yang mempunyai izin	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0	
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi izin sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Toko Obat, UMOT)	120		120	120	100,00	30,00	30,00	100	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga										
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga		0		0	0	0,00	0	0	0	
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		0		0	0	0,00	0	0	0	

1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		0		0	0	0,00	0	0	0	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	300		300	300	100,00	100	100	100	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase DAMIU yang mendapatkan Sertifikat Laik Hygine Sanitasi	52		52	52	100,00	52	52	100	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan										
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Pedagang Makanan Jajanan dan sentra jajanan makanan yang memiliki stiker makanan jajanan sehat	200		200	200	100,00	0	0	0	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri	Jumlah Sarana IRTP yang memenuhi persyaratan	100		100	100	100,00	20	20	100	

	Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan	Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)									
		Jumlah Produk IRTP yang memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	290		290	290	100,00	50	50	100	
		Jumlah Pangan Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan uji Laboratorium	124		124	124	100,00	24	24	100	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana IRTP yang memiliki Perizinan	250		250	250	100,00	50	50	100	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas	100,00		100,00	100,00	100,00	60,00	60,00	100	
		Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan	75,00		75,00	75,00	100,00	63,80	63,80	100	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Upaya Promosi Kesehatan, KIE Keamanan Pangan dan KIE Gerakan Cerdas Gunakan Obat	1.500		1.500	1.500	100,00	300	300	100	
		Jumlah Kader Keamanan Pangan	300		300	300	100,00	60	60	100	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kecamatan yang menerapkan Germas	80,00		80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100	
		Persentase Kecamatan yang Memiliki Forum Komunikasi Germas	50,00		70,00	89,65	128,07	25,00	25,00	100	

1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Koordinasi Peningkatan UKBM di Kecamatan	15		15	15	100,00	15	15	100	
II	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH										
1.02.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Umur Harapan Hidup	66,56		66,56	66,56	100,00	65,26	65,26	100	
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,00		96,00	96,00	100,00	94,10	94,10	100	
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	97,00		97,00	97,00	100,00	95,50	95,50	100	
		Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,00		95,00	95,00	100,00	94,10	94,10	100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	95,00		95,00	95,00	100,00	92,35	92,35	100	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,59		86,59	86,59	100,00	55,85	55,85	100	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,19		95,19	95,19	100,00	91,15	91,15	100	
		Prevalensi Balita Stunting	0,33		0,33	0,33	100,00	0,44	0,44	100	
		Persentase pelayanan pada Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75,00		75,00	75,00	100,00	72,50	72,50	100	

		Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
		Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100,00		100,00	100,00	100,00	97,50	97,50	100	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	65,00		65,00	65,00	100,00	56,30	56,30	100	
		Persentase orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
		Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk	0,06		0,06	0,06	100,00	0,06	0,06	100	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota										
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	60		60	60	100,00	12	12	100	
III	PUSKESMAS										
1.02.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Umur Harapan Hidup	66,56		66,56	66,56	100,00	65,26	65,26	100	
		Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,00		96,00	96,00	100,00	94,10	94,10	100	
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan Pelayanan	97,00		97,00	97,00	100,00	95,50	95,50	100	

		Kesehatan Ibu bersalin									
		Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,00		95,00	95,00	100,00	94,10	94,10	100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	95,00		95,00	95,00	100,00	92,35	92,35	100	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,59		86,59	86,59	100,00	55,85	55,85	100	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,19		95,19	95,19	100,00	91,15	91,15	100	
		Prevalensi Balita Stunting	0,33		0,33	0,33	100,00	0,44	0,44	100	
		Persentase pelayanan pada Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	75,00		75,00	75,00	100,00	72,50	72,50	100	
		Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
		Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100,00		100,00	100,00	100,00	97,50	97,50	100	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	65,00		65,00	65,00	100,00	56,30	56,30	100	
		Persentase orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	

		deteksi dini HIV sesuai standar									
		Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk	0,06		0,06	0,06	100,00	0,06	0,06	100	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota										
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Pintu Padang	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Pintu Padang dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Simarpinggan	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Simarpinggan Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Sayur Matinggi	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Sayur Matinggi dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Batu Horpak	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Batu Horpak dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Sitinjak	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Sitinjak dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Marancar Udik	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Marancar Udik dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Batang Toru	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Batang Toru dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Hutaraja	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Hutaraja dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Sangkunur	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Sangkunur dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Huraba	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Huraba dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	

	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Pargarutan	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Pargarutan Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Danau Marsabut	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Danau Marsabut dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Hanopan	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Hanopan dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Simangambat	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Simangambat Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Sipagimbar	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Sipagimbar Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pusk. Biru	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Biru dari Sumber JKN	60		60	60	100,00	12	12	100	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas										
	Operasional Pelayanan Puskesmas Pintu Padang	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Pintu Padang dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Simarpinggan	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Simarpinggan Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sayur Matinggi	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Sayur Matinggi dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Horpak	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Batu Horpak dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sitinjak	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Sitinjak dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Marancar Udik	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Marancar Udik dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Batang Toru	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Batang	60		60	60	100,00	12	12	100	

		Toru dari Sumber BOK									
	Operasional Pelayanan Puskesmas Hutaraja	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Hutaraja dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Pusk. Sangkunur	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Sangkunur dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Huraba	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Huraba dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Pargarutan	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Pargarutan Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Danau Marsabut	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Danau Marsabut dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Hanopan	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Hanopan dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Simangambat	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Simangambat Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Sipagimbar	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Sipagimbar Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	
	Operasional Pelayanan Puskesmas Biru	Tersedianya Operasional Kesehatan Pusk. Biru dari Sumber BOK	60		60	60	100,00	12	12	100	

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
   - Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
   - Peningkatan Kesehatan Masyarakat
   - Penyehatan Kesehatan Lingkungan
   - Penyediaan Biaya Operasional
   - Penguatan Upaya Promotif dan Preventif " Gerakan Masyarakat hidup Sehat"
2. Program Pengawasan Obat dan Makanan
   - Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan
   - Pembinaan dan Pengawasan Batra
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
   - Peningkatan Pendidikan tenaga Penyuluh Kesehatan
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
   - Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit. A & Kekurangan Zat Gizi Mikro Lain
   - Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
   - Pelatihan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
   - Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
   - Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
   - Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
   - Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
   - Penyusunan Standar Kesehatan
   - Penyusunan Profil Kesehatan Puskesmas
7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
   - Pembangunan Puskesmas
   - Pembangunan Puskesmas Pembantu
   - Pengadaan Puskesmas Keliling
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Saranan dan Prasarana Puskesmas Keliling
   - Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu
   - Pembangunan Pos Kesehatan Desa

8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Poliklinik Rumah Sakit
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

9. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
   - Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
   - Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
   - Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
   - Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
   - Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
   - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
   - Evaluasi Tahunan Pembangunan Kesehatan
   - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan Reproduksi
   - Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)
   - Belanja Operasional Kesehatan (BOK)
   - Penyediaan Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
   - Penyediaan Operasional Pelayanan Program BPJS Kesehatan
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
   - Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
   - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
   - Peningkatan pemanfaatan sarana Kesehatan
4. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
   - Penyemprotan Fogging/Sarang Nyamuk
   - Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging
   - Pengadaan Vaksin Penyakit Menular
   - Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
   - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
   - Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
   - Peningkatan Imunisasi
   - Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
   - Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
   - Pembinaan Pelayanan Penyakit TB Paru
   - Program TB Paru dan Rabies
   - Penanggulangan HIV / AIDS
   - Eliminasi Rabies
   - Pelaksanaan Fogging Fokus

5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
   - Pengadaan Sarana dan Instalasi Farmasi
6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
   - Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
   - Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit
   - Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
   - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
   - Pengadaan Meubelair Rumah Sakit
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
   - Pelayanan pemeliharaan Kesehatan
8. Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyempurnaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan
10. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan
    - Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
   - Perbaikan Gizi Masyarakat
   - Pertemuan Audit Maternal Prinatal (AMP)
   - Peningkatan Manajemen Aspeksia
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
   - Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
   - Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
   - Imunisasi Bagi Anak Balita
4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
   - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah masih kurangnya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja tidak dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan apabila target telah tercapai dan peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung berdampak pada peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perludiambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, pemegang programsampai dengan staf
2. Kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor
3. Pembinaan secara kontinyu kepada pemegang program yang ada diPuskesmas
4. Pembinaan terhadap kader-kader kesehatan yang ada di wilayah
5. Pertemuan monitoring evaluasi program rutin terhadap kemajuan,hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program dilapangan.
6. Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan programmisalnya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Berbasis Masyarakat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Tabel 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Tahun	TARGET RENSTRA SKPD	REALISASI
			2023	2023
1	Umur Harapan Hidup	65,11	65,56	67,43
2	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,75	94,50	95,77
3	Persentase Ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	95,30	95,75	95,95
4	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93,76	94,35	94,76
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	92,05	93,65	94,32
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50,65	60,91	88,00
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,89	92,98	92,70
8	Prevalensi Balita Stunting	0,46	0,44	1,04
9	Persentase pelayanan pada Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72,00	73,00	75,30
10	Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100
11	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95,00	98,00	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	100,00	100,00	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	54,75	57,48	74,00
14	Persentase orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00	100,00	79,00
15	Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk	0,03	0,06	0,04

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal Tahun	TARGET RENSTRA SKPD	REALISASI
			2023	2023
16	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi	100	100	84,21
17	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	50	55	55,00
18	Persentase Fasyankes dengan penggunaan Obat sesuai FORNAS	55	60	60
19	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas	60	70	89,65
20	Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan	63,8	66,75	79,49

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan selama tahun 2023 sebagian besar sudah mencapai target.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan sampai pada tahun 2021 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan.

Namun berbagai capaian yang sudah diperoleh, tentunya bukan suatu hal yang membuat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan harus berpuas diri tetapi harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang ada.

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara
4. Implikasi Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara pembobotan dan penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Skore Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Prov/Kab	20
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Berdasarkan penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor di atas maka nilai skala dari masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	20	10	20	10	10	25	95
2	Belum optimalnya penanggulangan masalah Gizi	20	8	20	10	10	25	93
3	Belum optimalnya pengendalian penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana	15	10	20	10	11	22	88
4	Belum optimalnya pembiayaan Kesehatan	10	8	15	10	11	25	79
5	Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	15	10	20	10	12	25	92
6	Masih rendahnya akses terhadap lingkungan yang sehat dan berkualitas	10	7	20	10	9	25	81
7	Masih belum optimalnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	15	12	20	10	10	23	90

Berdasarkan skala kriteria di atas, maka Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan isu strategis Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

1) Menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
2) Belum optimalnya penanggulangan masalah Gizi
3) Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
4) Masih belum optimalnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
5) Belum optimalnya pengendalian penyakit menular, tidak menulardan akibat bencana
6) Masih rendahnya akses terhadap lingkungan yang sehat dan berkualitas
7) Belum optimalnya pembiayaan kesehatan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan keuangan negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan bahwa pilihan program sebagai instrumen kebijakan benar-benar merupakan alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang mencerminkan alternatif pendekatan paling efisien untuk menghasilkan keluaran dan efektif dalam mendukung pencapaian rencana program.

Dengan demikian antara kebijakan, program/kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN DAERAH						**208.920.901.267,00**							**157.610.934.140,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**208.920.901.267,00**							**157.610.934.140,00**	
	-	**-**						**208.920.901.267,00**							**157.610.934.140,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**90.219.331.520,00**						**-**	**53.480.734.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	33.285.803.200,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksessibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	12.365.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				17 Unit	4.114.694.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksessibilitas Pelayanan Kesehatan	-		4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	3.850.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksessibilitas Pelayanan Kesehatan	-		1.705.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				16 Unit	20.800.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				16 Unit	2.300.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	360.100.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				11 Paket	1.800.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		2.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	61.009.200,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	55.865.848.020,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	40.314.518.680,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5373 Orang	454.585.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		412.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27321 Orang	342.008.700,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		566.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55102 Orang	227.615.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		269.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48490 Orang	75.039.840,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		385.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24027 Orang	216.573.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		150.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	87.423.900,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		96.800.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	89.894.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		121.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	65.303.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		99.800.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	229.886.700,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		537.625.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	120.596.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		187.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	435.958.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		770.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	200.004.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	240.654.900,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	644.132.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		181.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				0 Dokumen	164.571.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		105.234.910,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	99.072.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		63.800.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	50.604.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		132.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	32.489.700,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		49.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	750.230.380,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		1.125.812.050,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	50.700.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		33.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	152.758.700,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		324.383.500,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	208.195.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		703.173.570,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	122.519.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	155.730.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		168.389.650,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	412.445.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	476.831.960,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	412.445.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		476.831.960,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	655.234.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	324.383.500,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				17 Unit	366.581.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		324.383.500,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	288.653.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**272.754.600,00**						**-**	**1.002.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.025.200,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	187.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0 Dokumen	80.025.200,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		77.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	192.729.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	192.729.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**543.522.100,00**						**-**	**835.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	83.714.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	83.714.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	164.016.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	230.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	164.016.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		230.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	113.514.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0 Dokumen	113.514.900,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	76.774.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	76.774.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	105.502.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	210.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				100 Unit	105.502.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**771.129.900,00**						**-**	**1.080.400.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	271.534.100,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	271.534.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	499.595.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	730.400.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	499.595.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		730.400.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
5.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**117.114.163.147,00**						**-**	**101.212.800.000,00**	
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	129.928.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	143.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	108.238.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		121.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.113.565.691,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	5.894.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.847.664.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		5.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	253.181.391,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		385.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.720.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		9.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	461.665.585,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	988.100.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	268.462.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		420.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	72.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	74.770.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		143.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	39.190.335,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		363.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.243.250,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		12.100.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	108.169.176.371,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	93.775.700.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	31.474.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		40.700.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	133.816.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		235.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				781 Orang/bulan	108.003.885.471,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		93.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	129.928.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	143.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	21.690.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	239.826.600,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	412.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	239.826.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		412.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	J U M L A H							**208.920.901.267,00**							**157.610.934.140,00**	

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2025, merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil pemangku kepentingan tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Renstra serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum di Bappeda yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ALAMAT/LOKASI	USULAN
1	Pengadaan Mobil Ambulance	Kecamatan Batang Toru	Masyarakat Kec. Batang Toru
2.	Vitamin untuk Penderita Paru	Desa Sipenggeng	Kader Paru Desa Sipenggeng Kec. Batang Toru
3	Pembangunan Polindes	Dusun Simaole-Ole	Masyarakat Dusun Simaole-Ole Kecamatan Saipar Dolok Hole
4	Pembangunan Lanjutan Rabat Beton	RSUD Kab. Tapanuli Selatan	Masyarakat Kecamatan Sipirok

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan pada periode 2020 – 2024 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sasaran pokok RPJMN 2020 – 2024 adalah

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak.
2. Meningkatnya pengendalian penyakit.
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan.
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu

1. Paradigma Sehat yang dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care intervensi berbasis kesehatan
3. Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan dengan streategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Komitmen global bidang kesehatan menjadi perhatian penting yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu tujuan 4 (Menurunkan Angka Kematian Anak), tujuan 5 (Meningkatkan Kesehatan Ibu) dan tujuan 6 (Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya), yaitu serta 2 tujuan lainnya yang tidak terkait langsung yaitu tujuan 1 (Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan) dan tujuan 7 (Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup). Diharapkan semua pihak yang bergerak di bidang kesehatan wajib dalam mendukung pencapaian program-program tersebut terutama dalam kurun waktu 2020 2024.

Secara nasional, selain pencapaian indikator MDG's juga didasarkan pada pencapaian SPM. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai PERMENKES RI No. 43 TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021-2026 yaitu : **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**. Dengan indikator sebagai berikut :

a. Angka Harapan Hidup (AHH)
b. AKI (Angka Kematian Ibu)
c. AKB (Angka Kematian Bayi)
d. Indeks Kepuasa Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaanpembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2021-2026. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok atau organisasi. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli di tahun 2017 memiliki target pencapaian indikator kinerja utama sesuai dengan indikator pada Hasil Indikator Tujuan dan Sasaran pada RPJMD dan Renstra 2021-2026. Target tersebut antara lain :

Tabel. 3.1.

Target Indikator Kinerja

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

Tujuan	sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan Indikator
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata lama Hidup Bayi yang baru dilahirkan
		Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	Jumlah seluruh kematian ibu terhadap seluruh kelahiran hidup per 100.000
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	Jumlah seluruh kematian bayi terhadap seluruh kelahiran hidup per 1.000

		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	Persen (%)	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Angka Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata lama Hidup Bayi yang baru dilahirkan
		Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	Jumlah seluruh kematian ibu terhadap seluruh kelahiran hidup per 100.000
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	Jumlah seluruh kematian bayi terhadap seluruh kelahiran hidup per 1.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	Persen (%)	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam konteks Rencana Strategis, tahapan penentuan program pada hakekatnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi yang sekaligus penjabaran dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan program-program tahun 2025 sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
   1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten.
   2. Pencapaian SDGs pada 4 tujuan dari 17 Tujuan yang ditetapkan dalam SDGs
      - Tujuan ke 2 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan.
      - Tujuan ke 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Ada dua target yang dicanangkan dalam tujuan tersebut yaitu :
      - Tujuan ke 5 Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan
      - Tujuan ke 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang
   3. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Tapanuli Selatan
b. Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025

   Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan ada yang terpusat di Dinas Kesehatan dan ada yang tersebar di seluruh UPT Dinas Kesehatan, Desa, atau kelompok masyarakat tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 adalah seperti tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel. 3.2.
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	1 **Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		2 **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		3 **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	
			9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		4 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		5 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6 **Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota**	14 Pembangunan Puskesmas	
			15 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			16 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			18 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			19 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			20 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	

		7 **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota**	22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			23 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
			25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
			26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
			27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi	
			28 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus	
			29 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	
			30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			31 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinveksi HIV	
			32 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			33 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			34 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			35 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			36 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
			37 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			38 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			39 Pengelolaan Upaya Kesehatan Jiwa & NAPZA	
			40 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			41 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			42 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
			43 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			44 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			45 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		8 **Penyelenggaraan Sistim Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	46 Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan	
		9 **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Darah Kab/Kota**	47 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	

				48	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	10	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	49	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				50	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
		11	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	51	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		12	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	52	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	13	**Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	53	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
		14	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	54	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
		15	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	55	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
		16	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	56	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada MakananJajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
		17	**Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	57	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	18	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	58	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		19	**Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	59	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	

Dari tabel 3.2. diatas dapat digambarkan bahwa Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 5 Program, 19 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Berdasarkan Indikator Kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah maka ditetapkan IKU Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Kerja Tahun 2025

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
1		Angka Harapan Hidup	66,21
		Angka KematianIbu/100.000 KH	50,01
		Angka Kematian Bayi/1.000 KH	0,97
		Angka Harapan Hidup	66,21
		Angka KematianIbu/100.000 KH	50,01
		Angka Kematian Bayi/1.000 KH	0,97
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95,10
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	96,55
		Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,90
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuaistandar	94,65
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82,38
		Persentase warga negarausia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	94,26
		Prevalensi Balita Stunting	0,04
		Persentase pelayanan pada Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,00
		Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00
		Persentase Penderita DMyang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100,00
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	100,00
		Persentase orang terdugaTBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	63,80

		Persentase orang denganResiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00
		Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk	0,06
		Prevalensi balita gizi Buruk	0,025
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmasdan Rumah Sakit yang terakreditasi	100
		Persentase TenagaKesehatan sesuai Kompetensi	75
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasyankes dengan penggunaan obatsesuai FORNAS	70
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatanyang menerapkan kebijakan Germas	90
		Persentase PendudukMiskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan	73,25

Tercapainya target dari indikator kinerja tersebut Dinas Kesehatan Daerah melaksanakan sepuluh (5) program wajib yang terdiri satu (1) program pendukung dan empat (4) program utama yang terkait secara langsung dengan terselenggaranya pelayanan sesuai dengan urusan penunjang kesehatan.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran strategi OPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang kesehatan sesuai fungsi yang ditangani Dinas Kesehatan dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan tahun 2025 dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi, serta tata kerja dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang kesehatan yang secara langsung atau tidak langsung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis tersebut juga sebagai bentuk partisipasi Dinas Kesehatan mewujudkan target indikator kinerja dari sasaran daerah.

Tahun 2025 direncanakan Dinas Kesehatan melaksanakan 5 (lima) program terdiri 1 (satu) program yang memiliki fungsi sebagai program pendukung dan 4 (empat) program utama/inti yang mendukung pencapaian indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis. Program pendukung yaitu sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota memiliki pagu indikatif sebesar Rp. 119.505.147.622 dengan indikator hasil (outcome) berupa Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%) dengan capaian target sebesar 100 %

Selain program diatas Dinas Kesehatan juga merencanakan melaksanakan program utama untuk pencapaian indikator kinerja utama. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat direncanakan tahun 2025 membutuhkan dana Rp. 56.888.140.660 Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan target sebesar 95,10%, Persentase Ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibubersalin dengan target sebesar 96,55%, Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan target sebesar 94,90%, Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar dengan target sebesar 94,65%, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target sebesar 82,38%, Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan target sebesar 94,26%, Prevalensi Balita Stunting dengan target sebesar 0,04%, Persentase pelayanan pada Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan target sebesar 74,00%, Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target sebesar 100%, Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan target sebesar 97,50%, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar dengan target sebesar 100%, Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar dengan target sebesar 63,80%, Persentase orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dengan target sebesar 100%, Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk dengan target sebesar 0,06 dan Prevalensi balita gizi Buruk dengan targetsebesar 0,036
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan direncanakan tahun 2025 membutuhkan dana sebesar Rp. 855.648.300 sebagai indikator kinerja adalah Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi dengan target 100% dan Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi dengan target 75%.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman direncanakan tahun 2025 membutuhkan dana sebesar Rp. 595.221.500 sebagai indikator kinerja adalah Persentase Fasyankes dengan penggunaan obat sesuai FORNAS dengan target sebesar 70% dan Prevalensi Balita Stunting dengan target sebesar 0,04%

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan direncanakan pada tahun 2025 membutuhkan dana sebesar Rp. 707.237.400 dengan indikator hasil (outcome) berupa Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas dengan target sebesar 90%,

  Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan dengan capaian target sebesar 73,25%

Adapun pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan beserta indikator hasil (outcone) dan keluaran (output) adalah sebagai berikut :

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN DAERAH						**178.551.395.482,00**							**166.820.934.140,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**178.551.395.482,00**							**166.820.934.140,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**178.551.395.482,00**							**166.820.934.140,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan***	**100 %**			**100 %**	**119.505.147.622,00**						**100 %**	**100.772.800.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Lakip Dinas Kesehatan* *Tersedianya Dokumen Perencanaan*	1 Dokumen 4 Dokumen			1 Dokumen 4 Dokumen	101.315.470,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	1 Dokumen 4 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	82.469.150,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	18.846.320,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	1 Laporan	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5 Kali 60 Bulan 5 Kali 1 Dokumen			-	108.140.407.771,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	1 Kali 12 Bulan 1 Kali 1 Dokumen	93.775.700.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				781 Orang/bulan	108.003.885.471,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		93.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen			2 Dokumen	112.466.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	1 Dokumen	235.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan			1 Laporan	24.055.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	1 Laporan	40.700.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	25 Jenis			-	404.324.300,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	5 Jenis	669.100.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.660.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		12.100.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	40.540.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		44.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	67.040.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		143.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	27.540.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	260.544.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		420.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.631.925.381,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	5.894.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.600.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		9.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	253.328.821,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		385.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.368.996.560,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		5.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	227.174.700,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	412.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	227.174.700,00	Kab. Tapanuli Selatan, Sipirok, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		412.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**56.888.140.660,00**						**-**	**53.480.734.140,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -			-	12.622.810.680,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	0 -	12.365.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				17 Unit	5.336.729.210,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	700.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		1.705.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				16 Unit	3.254.486.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				16 Unit	577.731.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	34.550.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				11 Paket	2.666.877.770,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		2.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	52.436.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	43.503.788.680,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	40.314.518.680,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5373 Orang	55.973.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		412.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27321 Orang	121.091.700,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		566.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55102 Orang	209.999.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		269.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48490 Orang	50.393.900,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		385.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24027 Orang	150.499.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		150.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	54.274.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		96.800.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	87.610.100,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		121.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	55.806.200,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		99.800.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	249.777.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		537.625.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	133.094.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		187.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	242.478.400,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		770.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	200.004.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	240.654.900,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	249.065.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		181.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				0 Dokumen	131.078.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		105.234.910,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	125.100.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		63.800.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	50.604.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		132.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	32.050.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		49.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	1.032.023.180,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		1.125.812.050,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	39.500.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		33.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket	12.500.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		324.383.500,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	176.695.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		703.173.570,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	76.500.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	127.349.500,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	139.165.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		168.389.650,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	394.076.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	476.831.960,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	394.076.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		476.831.960,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	367.465.300,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	324.383.500,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				17 Unit	312.465.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		324.383.500,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**855.648.300,00**						**-**	**10.652.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	157.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	187.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	210 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	210 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.500 Dokumen			0 Dokumen	157.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	600 Dokumen	77.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	9.815.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang			30 Orang	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	9.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen			0 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	0 Dokumen	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	683.648.300,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	270 Orang			50 Orang	683.648.300,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	60 Orang	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**595.221.500,00**						**-**	**835.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	59.502.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	59.502.900,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	162.537.200,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	230.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	162.537.200,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		230.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	113.514.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0 Dokumen	113.514.900,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	75.033.700,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	75.033.700,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	184.632.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	210.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				100 Unit	184.632.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**707.237.400,00**						**-**	**1.080.400.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1500 Orang 300 Orang			-	291.204.600,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	300 Orang 60 Orang	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1500 Dokumen			1 Dokumen	291.204.600,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	300 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	50 % 80 %			-	416.032.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	50 % 80 %	730.400.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	80 Dokumen			0 Dokumen	416.032.800,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	80 Dokumen	730.400.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	15 Kec			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	15 Kec	0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	-	15 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	J U M L A H							**178.551.395.482,00**							**166.820.934.140,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga upaya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok, 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



dr. RUDI ISKANDAR, M. Kes
PEMBINA TK.I
NIP. 197906262010011004

DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

R E N J A
Perubahan
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) adalah bagian dari perencanaan yang harus disusun setiap OPD, sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan pembangunan, yang merupakan perpaduan dari perencanaan yang berlangsung dari bawah (bottom up) dan perencanaan dari atas (top down). Oleh masing-masing OPD Renja tersebut harus disesuaikan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan capaian kinerja yang telah berhasil direalisasikan. Karena itu, program kegiatan yang dimasukkan ke dalam Renja OPD tidak terlepas dari indikator kinerja program kegiatan dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang bersangkutan.

Rencana Kerja atau Renja Tahun 2025 Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini, merupakan hasil dari perencanaan pembangunan bidang pendidikan, sebagai kelanjutan dari Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Renja Tahun 2025 ini disusun dengan tetap mengacu pada tiga pilar kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan akses masyarakat mendapatkan pendidikan, peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan, dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik terhadap pendidikan.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan melibatkan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasi/Kasubbag, dan Kepala Sekolah. Program Kegiatan yang dijadikan sebagai Program Kerja Tahun 2025 merupakan hasil masukkan dari bidang-bidang terkait, yang disesuaikan dengan Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tim penyusun Renja Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini, telah berupaya menyusun Renja ini sebaik mungkin, sesuai dengan tahapan dan prosedur penyusunan Renja yang telah dipersyaratkan. Karena itu, pada kesempatan ini kami memohon masukan dan saran dari semua pihak terkait, demi sempurnanya Renja ini pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan meridhoi setiap niat baik yang kita lakukan.

Sipirok, 11 September 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ARMAN PASARIBU, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199308 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penyusunan 7
BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Daerah 31
2.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan 35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 55
BAB III Tujuan dan Dinas Pendidikan 59
3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional 59
3.2 Tujuan dan sasaran Renja perangkat Daerah 59
3.3 Program dan Kegiatan 61
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan 62
4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rencana Kerja, Rumusan Program dan Kegiatan 62
4.2 Uraian Garis Besar Mengenai Program dan Kegiatan 63
4.3 Pendanaan 64
BAB V Penutup
Lampiran Tabel
Tabel 3.1 60
Tabel T-C.29 9
Tabel T-C.30 32
Tabel T-C.31 39
Tabel T-C.32 56
Tabel T-C.33 62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Renja memuat arah kebijakan, program, kegiatan, lokasi, indikator kinerja, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk mekanisme perubahan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun tahapan penyusunannya meliputi:

(1) persiapan penyusunan;

(2) penyusunan rancangan awal;

(3) penyusunan rancangan;

(4) pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah;

(5) perumusan rancangan akhir; dan

(6) penetapan Renja Perubahan.

Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu:

1. Penyesuaian terhadap perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, untuk memastikan konsistensi arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
2. Efisiensi dan penataan ulang alokasi anggaran, agar pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan lebih tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada hasil; serta
3. Penyesuaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang baru, yaitu “Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.”

Dengan demikian, Renja Perubahan Tahun 2025 disusun tidak hanya sebagai penyesuaian teknis terhadap perubahan RKPD dan anggaran, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program pendidikan selaras dengan arah pembangunan daerah di bawah kepemimpinan kepala daerah baru.

Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan Tahun Anggaran 2025, serta menjadi dasar penyusunan RKA Perubahan dan penetapan DPA Perubahan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah:

1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lcmberan Ncgara Repubtik lndonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan l.embaran Negara Republik lndonceia Nomor 6987);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76)

18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

19 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
20 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);
21 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312);
22 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 51);
23 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 332, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 52)
24 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1075);
25 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 101 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1076);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah Sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang telah disesuaikan dengan perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, agar pelaksanaan kegiatan tetap mendukung prioritas pembangunan daerah;

2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan pendidikan yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi, efisiensi, serta rasionalisasi anggaran Tahun 2025, sehingga capaian kinerja lebih efektif dan terukur;
3. Menjadi panduan dalam melaksanakan dan mengevaluasi program serta kegiatan yang mengalami perubahan pagu, sasaran, atau keluaran (output) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-P) Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025;
4. Menjadi instrumen penyelarasan arah pembangunan pendidikan daerah dengan visi dan misi Kepala Daerah yang baru, yaitu "Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045."

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perangkat Daerah);
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2025;
3. Memasukkan program,kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2025;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

1.4 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 ini dibagi dalam Lima Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab ini berisi ringkasan mengenai tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah beserta isu-isu kritisnya, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dampaknya terhadap pencapaian visi–misi kepala daerah dan target nasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs. Selain itu, bab ini memaparkan tantangan dan peluang peningkatan pelayanan, serta merumuskan isu-isu strategis yang menjadi rekomendasi dan dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pada tahun perencanaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota

Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi tentang rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini merinci perubahan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Renja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan Renja perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan tahun sebelumnya telah mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja mengacu pada capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2024 serta realisasi pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan periode berjalan, berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun perubahan anggaran (DPPA). Evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan, tingkat serapan anggaran, pencapaian target indikator kinerja, serta kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan.

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 pada umumnya telah dapat dilaksanakan, namun terdapat beberapa capaian, hambatan, dan penyesuaian yang perlu diperhatikan sebagai dasar perubahan Renja Tahun 2025. Berdasarkan hasil realisasi program dan kegiatan, serta evaluasi internal terhadap pelaksanaan Renja Murni 2025, dilakukan identifikasi aspek-aspek yang memerlukan penajaman, pergeseran pagu, perubahan target keluaran, maupun penyesuaian prioritas.

Atas dasar evaluasi tersebut, Renja Perubahan Tahun 2025 disusun untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan selaras dengan arah kebijakan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta visi dan misi Kepala Daerah yang baru.

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUSI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2026

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	100,00	98,77	100,00	98,47	98,47%	98,71	98,47	99,76%
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	100,00	98,77	100,00	98,47	98,47%	98,71	98,47	99,76%
					Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	100,00	65,02	100,00	67,00	67,00%	70,20	67,00	95,44%
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Skor Kemampuan Literasi SD	52,36	52,49	54,86	56,12	102,30%	58,62	56,12	95,74%
					Skor Kemampuan Numerasi SD	40,93	45,78	47,79	53,03	110,96%	55,93	53,03	94,81%
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	100,00	98,77	100,00	98,47	98,47%	98,71	98,47	99,76%

					Iklim Inklusivitas SD	59,11	54,93	61,26	60,28	98,40%	62,78	60,28	96,02%
					Iklim Keamanan SD	74,41	73,06	77,95	76,56	98,22%	77,46	76,56	98,84%
					Iklim Kebinekaan SD	70,61	71,71	73,10	71,67	98,04%	72,67	71,67	98,62%
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Skor Kemampuan Literasi SMP	61,24	60,09	64,15	65,18	101,61%	66,28	65,18	98,34%
					Skor Kemampuan Numerasi SMP	60,65	58,44	62,99	60,96	96,78%	62,46	60,96	97,60%
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	100,00	98,77	100,00	98,47	98,47%	98,71	98,47	99,76%
					Iklim Inklusivitas SMP	57,97	57,30	61,07	59,69	97,74%	62,09	59,69	96,13%
					Iklim Keamanan SMP	68,92	71,05	72,26	70,82	98,01%	72,32	70,82	97,93%
					Iklim Kebinekaan SMP	67,43	73,30	75,32	72,08	95,70%	73,08	72,08	98,63%
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	100,00	65,02	100,00	67,00	67,00%	70,20	67,00	95,44%
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	28,39	18,49	28,39	20,69	72,88%	22,74	20,69	90,99%
					Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	49,30	41,53	42,83	41,53	96,96%	48,46	41,53	85,70%
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	100,00	40,90	100,00	43,80	43,80%	53,53	43,80	81,82%
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

					Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia.	-	-	-	-	-	88,21%	-	-
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
2	22			2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	22	02		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Grup Kesenian	10,00	10,00	11,00	11,00	100,00%	25,00	11,00	44,00%
					Terlestarikannya Cagar Budaya	10,00%	10,00%	11,00%	11,00%	100,00%	70,00%	11,00%	15,71%
					Budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya Tarik wisatawan	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	4,00	3,00	75,00%
2	22	02	2.01	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Grup Kesenian	10,00	10,00	11,00	11,00	100,00%	25,00	11,00	44,00%

2	22	02	2.03	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlestarikannya Cagar Budaya	10,00%	10,00%	11,00%	11,00%	100,00%	70,00%	11,00%	15,71%
					Budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya Tarik wisatawan	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	4,00	3,00	75,00%

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian kinerja perangkat daerah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2024 serta capaian tahun berjalan menunjukkan hasil yang cukup baik pada sebagian besar indikator, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian untuk dilakukan penyesuaian pada Renja Perubahan Tahun 2025.

Secara umum, indikator hasil program pengelolaan pendidikan dasar dan menengah seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun menunjukkan capaian tinggi dan relatif stabil, dengan realisasi APS sebesar 98,47% yang mendekati target 100%. Demikian pula indikator iklim belajar (inklusivitas, keamanan, dan kebinekaan) di SD dan SMP rata-rata menunjukkan tingkat capaian di atas 95%, sehingga tidak menjadi fokus perubahan dalam Renja-P 2025.

Pada sisi kualitas pembelajaran, skor literasi dan numerasi SD dan SMP menunjukkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun demikian, nilai realisasi tahun berjalan (TW II 2025) pada indikator literasi–numerasi masih sama dengan nilai realisasi tahun 2024. Hal ini bukan disebabkan oleh stagnasi capaian, tetapi karena Evaluasi Asesmen Nasional (AN) dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada akhir Triwulan III, dan hasil resminya belum dirilis pada saat penyusunan Renja Perubahan. Dengan demikian, data capaian TW II menggunakan data terakhir yang tersedia, yaitu hasil AN tahun 2024.

Di sisi lain, beberapa indikator masih menunjukkan capaian yang rendah dan menjadi dasar utama perubahan Renja, terutama pada layanan PAUD dan pendidikan kesetaraan. APS PAUD usia 5–6 tahun baru mencapai 67,00%, jauh dari target Renstra 100%. Begitu juga capaian akreditasi satuan PAUD (20,69%) dan proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/D4 (41,53%) menunjukkan perlunya penguatan program pembinaan, peningkatan kompetensi, serta alokasi anggaran yang lebih fokus.

Untuk program pendidikan kesetaraan, APS usia 7–18 tahun hanya mencapai 43,80%, yang menegaskan bahwa perlu dilakukan perluasan layanan, peningkatan peran PKBM/SKB, serta strategi penjangkauan peserta didik yang lebih efektif.

Sementara itu, fungsi-fungsi program penunjang seperti administrasi keuangan, administrasi aset, perencanaan, dan pelayanan umum menunjukkan capaian 100%, sehingga secara substansi tidak memerlukan perubahan kecuali efisiensi pagu anggaran.

Pada program kebudayaan, capaian tahun berjalan masih sangat rendah, seperti pelestarian cagar budaya (11% dari target 70%), serta jumlah grup kesenian dan indikator lain yang menunjukkan ketidakselarasan prioritas dengan arah kebijakan sektor pendidikan. Kondisi ini sejalan dengan kebijakan bahwa urusan kebudayaan tidak lagi menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan, sehingga perlu dilakukan

penyesuaian dan efisiensi anggaran sesuai RKPD Perubahan dan visi–misi Kepala Daerah yang baru.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perubahan Renja Tahun 2025 diperlukan untuk:

1. Menyesuaikan prioritas pembangunan pendidikan dengan visi–misi Kepala Daerah yang baru;
2. Alokasi yang sesuai untuk kegiatan yang belum mencapai target;
3. Penyesuaian target kinerja keluaran atau hasil;
4. Merumuskan kembali rincian – rincian sub kegiatan.

Evaluasi ini menjadi landasan dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang mengalami perubahan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Analisis kinerja pelayanan dilakukan untuk menilai sejauh mana Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pada Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan dasar, layanan PAUD, pendidikan kesetaraan, serta peningkatan mutu pembelajaran melalui kebijakan yang efisien, tepat sasaran, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Upaya peningkatan kinerja pelayanan tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah, tetapi juga melalui peran aktif seluruh satuan pendidikan—PAUD, SD, SMP, dan lembaga pendidikan nonformal—yang menjadi garda terdepan penyelenggara layanan pendidikan. Implementasi program dan kegiatan pada tahun berjalan menjadi instrumen penting untuk memenuhi target-target SPM, meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki kualitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan kondusif.

Analisis ini juga penting untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang memerlukan penyesuaian dalam Renja Perubahan Tahun 2025, terutama sebagai tindak lanjut dari perubahan RKPD, realisasi kinerja tahun 2024, capaian triwulan tahun berjalan, serta kondisi fiskal daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa indikator kinerja—seperti kualitas literasi dan numerasi, akreditasi PAUD, kualifikasi guru PAUD, dan partisipasi pendidikan kesetaraan—memerlukan penguatan program dan efisiensi alokasi anggaran agar capaian pelayanan dapat meningkat dan mendekati target Renstra.

Pada subbab ini disajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang dituangkan dalam Tabel T-C.30, yang menggambarkan hubungan antara program/kegiatan dengan standar pelayanan, tingkat capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi penajaman kebijakan untuk mendukung perumusan Renja Perubahan Tahun 2025.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 TW II	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Cakupan Ketersediaan PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Satuan PAUD di Setiap Desa/Kelurahan	-	57,66	62,90	72,17	57,66	-	62,90	72,17	
2			Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	100,00	100,00	70,20	73,24	67,00	-	70,20	73,24	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
3			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	28,39	28,39	22,74	25,44	20,69	-	22,74	25,44	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
4			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	42,83	42,83	48,46	49,46	41,53	-	48,46	49,46	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
5	Skor Literasi/ Numerasi	Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Literasi SD	52,49	52,49	58,62	61,12	56,12	-	58,62	61,12	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
6			Skor Kemampuan Numerasi SD	45,78	45,78	55,93	58,83	53,03	-	55,93	58,83	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
7			Skor Kemampuan Literasi SMP	60,09	60,09	66,28	67,38	65,18	-	66,28	67,38	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
8			Skor Kemampuan Numerasi SMP	58,44	58,44	62,46	63,96	60,96	-	62,46	63,96	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
9			Iklim Inklusivitas SD	54,93	54,93	62,78	65,28	60,28	-	62,78	65,28	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
10			Iklim Keamanan SD	73,06	73,06	77,46	78,36	76,56	-	77,46	78,36	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
11			Iklim Kebinekaan SD	71,71	71,71	72,67	73,67	71,67	-	72,67	73,67	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis

12			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	98,77	98,77	98,71	98,96	98,47	-	98,71	98,96	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
13			Iklim Inklusivitas SMP	57,30	57,30	62,09	64,49	59,69	-	62,09	64,49	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
14			Iklim Keamanan SMP	71,05	71,05	72,32	73,82	70,82	-	72,32	73,82	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
15			Iklim Kebinekaan SMP	73,30	73,30	73,08	74,08	72,08	-	73,08	74,08	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
16		Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	100,00	100,00	53,53	60,02	43,80	-	53,53	60,02	Hasil Asesmen 2025 oleh BSKAP belum rilis
17	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			13,36	13,44	13,80	13,97	13,72	-	13,80	13,97	
18	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)			9,40	9,45	9,60	9,71	9,56	-	9,60	9,71	

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan;

Ketiga jenis pelayanan dasar tersebut harus dipenuhi melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjamin akses layanan, mutu pembelajaran, serta lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas pada setiap satuan pendidikan.

TARGET PENCAPAIAN SPM

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan harus 100 (seratus persen).

Program/Kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Program	Indikator Pencapaian	Target
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	70,2
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	22,74
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	48,46
		Skor Kemampuan Literasi SD	58,62
		Skor Kemampuan Numerasi SD	55,93
		Skor Kemampuan Literasi SMP	66,28
		Skor Kemampuan Numerasi SMP	62,46

		Iklim Inklusivitas SD	62,78
		Iklim Keamanan SD	77,46
		Iklim Kebinekaan SD	72,67
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	98,71
		Iklim Inklusivitas SMP	62,09
		Iklim Keamanan SMP	72,32
		Iklim Kebinekaan SMP	73,08
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	53,53

2.3 Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan pelaksana fungsi Urusan Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai pelaksana fungsi Urusan Pemerintahan, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai lingkup pelayanan yang luas.

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2025 sudah cukup baik. Hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Menyelaraskan antara program kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan pemerintah pusat, sehubungan dengan belum sinkronnya periode RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten/Kota;

2. Tingkat kreatifitas dan inovasi sumberdaya aparatur Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditunjukkan oleh jumlah sumber daya aparatur yang berkualitas dan berdaya saing, tingkat kemampuan dan kesesuaian sember daya aparatur dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah layanan pendidikan dan kesejahteraan sumber daya aparatur Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Tingkat pelayanan kerja yang memadai yang ditunjukan oleh jumlah layanan pengadaaan sarana dan prasarana kerja, tingkat kesuaian

kebutuhan sarana prasarana kerja, tingkat layanan operasional perkantoran, jumlah dokumen penganggaran dan pelaporan kinerja serta pengelolaan.

4. Peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pendidikan pelibatan publik dibidang pendidikan yang mendapat perhatian khusus antara lain terdiri atas: Layanan Peserta Didik, Layanan Satuan Pendidikan, Layanan Substansi Pendidikan, Layanan Guru dan Tendik, Layanan Pendidikan Orang Tua atau Keluarga;

Walaupun capaian kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 diukur dengan indikator output dan outcame sudah cukup baik tetapi masih ada permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

   a. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Pendidikan;
   b. Belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti;
   c. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan.

2. Anggaran

   Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan.

3. Perencanaan dan Data Perencanaan

   a. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
   b. Monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan;
   c. Belum dilakukannya penelitian yang berkaitan langsung dengan kebijakan perencanaan daerah;
   d. Kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan perencanaan.

4. Sarana dan Prasarana

   Sarana dan prasarana sudah cukup memadai sebagai pendukung aparatur dalam menjalankan tugasnya tetapi masih

perlu peningkatan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut.

5. Koordinasi

a. Kurang optimalnya koordinasi masing-masing bidang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat;
b. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Dinas Pendidikan dengan Perangkat Daerah lain.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Program kegiatan yang indikator kinerja keluaran hasilnya tidak mencapai atau memenuhi target yang direncanakan akan berpengaruh terhadap capaian indikator strategis sasaran Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya akan berdampak terhadap capaian indikator sasaran RPJMD kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019-2024 pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak juga terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selain itu permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung juga berdampak terhadap capaian program nasional, SPM dan SDGs.

Melihat permasalahan yang ada dan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa datang maka tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun mendatang adalah:

1. Tuntutan untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
2. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap penyelesaian dokumen perencanaan;
3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai kepentingan;
4. Tingginya tekanan dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
5. Kontrol masyarakat, media dan LSM yang tinggi dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Berkembang pesatnya teknologi informasi perencanaan yang berbasis website;
2. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di masa yang akan datang maka isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Renja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang tercantum di dalam Rancangan Awal RKPD 2025;

2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan análisis;

4. Memastikan bahwa program, kegiatan di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025;

5. Mengidentifikasi jenis program, kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan;

6. Membuat rumusan kebutuhan program, kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tapanuli Selatan Tahun 2025 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau

tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program, kegiatan;

7. Mengidentifikasi program, kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

   Lampiran tabel T-C.31 sebagai Berikut :

Tabel T-C.31.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tapanuli Selatan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	98,71	103.830.780.896	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tapanuli Selatan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	98,71	106.153.400.087	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	98,71				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	98,71		
			Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	70,20				Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	70,20		
2	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tapanuli Selatan	Skor Kemampuan Literasi SD	58,62	65.420.058.500	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tapanuli Selatan	Skor Kemampuan Literasi SD	58,62	66.077.190.400	
			Skor Kemampuan Numerasi SD	55,93				Skor Kemampuan Numerasi SD	55,93		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	98,71				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	98,71		
			Iklim Inklusivitas SD	62,78				Iklim Inklusivitas SD	62,78		
			Iklim Keamanan SD	77,46				Iklim Keamanan SD	77,46		
			Iklim Kebinekaan SD	72,67				Iklim Kebinekaan SD	72,67		
3	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tapanuli Selatan	Skor Kemampuan Literasi SMP	66,28	25.440.874.496	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tapanuli Selatan	Skor Kemampuan Literasi SMP	66,28	27.095.711.787	
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	62,46				Skor Kemampuan Numerasi SMP	62,46		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	98,71				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	98,71		

			Iklim Inklusivitas SMP	62,09				Iklim Inklusivitas SMP	62,09		
			Iklim Keamanan SMP	72,32				Iklim Keamanan SMP	72,32		
			Iklim Kebinekaan SMP	73,08				Iklim Kebinekaan SMP	73,08		
4	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tapanuli Selatan	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	70,20	10.719.437.900	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tapanuli Selatan	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	70,20	10.730.087.900	
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	22,74				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	22,74		
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	48,46				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	48,46		
5	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tapanuli Selatan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	53,53	2.250.410.000	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tapanuli Selatan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	53,53	2.250.410.000	
6	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tapanuli Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.	100,00%	342.430.619.662	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tapanuli Selatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.	100,00%	338.551.672.426	
			Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia.	88,21%				Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia.	88,21%		
7	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Selatan	Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100,00	424.468.700	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Selatan	Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100,00	350.885.700	
8	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Selatan	Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100,00	338.765.502.702	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Selatan	Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100,00	335.139.666.966	
9	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tapanuli Selatan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00	31.995.600	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tapanuli Selatan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00	31.995.600	
10	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Selatan	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100,00	952.599.920	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Selatan	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100,00	841.881.420	
11	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Selatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.913.742.740	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Selatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.879.932.740	

12	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	342.310.000	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	307.310.000	
13	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tapanuli Selatan	Jumlah Grup Kesenian	25,00	808.798.900	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tapanuli Selatan	Jumlah Grup Kesenian	25,00	753.209.200	
			Terlestarikannya Cagar Budaya	70,00%				Terlestarikannya Cagar Budaya	70,00%		
			Budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya Tarik wisatawan	4,00				Budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya Tarik wisatawan	4,00		
14	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Selatan	Jumlah Grup Kesenian	25,00	685.335.300	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Selatan	Jumlah Grup Kesenian	25,00	629.745.600	
15	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Selatan	Terlestarikannya Cagar Budaya	70,00%	123.463.600	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Selatan	Terlestarikannya Cagar Budaya	70,00%	123.463.600	
			Budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya Tarik wisatawan	4,00				Budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya Tarik wisatawan	4,00		

Proses penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan nasional, serta kebutuhan sektor pendidikan pada tahun berjalan. Dalam proses ini, dilakukan analisis kesesuaian antara target kinerja, indikator, serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dengan kebutuhan riil yang muncul berdasarkan evaluasi Renja dan capaian indikator pelayanan dasar tahun sebelumnya.

Hasil analisis kebutuhan yang dituangkan dalam Tabel T-C.31 merupakan penajaman ulang program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif yang diberikan pada Forum Perangkat Daerah untuk Renja Perubahan Tahun 2025. Perbedaan rincian antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian prioritas pembangunan, efisiensi anggaran, serta kebutuhan untuk memperkuat layanan pendidikan pada bidang-bidang yang capaian indikatornya masih rendah, seperti PAUD dan pendidikan kesetaraan.

Penelaahan dan reviu terhadap program, kegiatan, dan indikator kinerja dilakukan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur melalui SE Mendagri 050/2024. Dengan demikian, seluruh hasil analisis kebutuhan pagu anggaran dan penyesuaian program/kegiatan telah disesuaikan dengan nomenklatur resmi yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa perumusan Renja Perubahan Tahun 2025 tetap konsisten dengan regulasi perencanaan, dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, dan mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui prioritas pendidikan yang efektif dan berorientasi pada hasil.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD. Pada forum Perangkat Daerah terdapat dua usulan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hal ini berarti, Renja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 berisi program, kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra Dinas Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan penyesuaian rincian sub kegiatan

beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.

Berikut Daftar Tabel T-C32, Sebagai Berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun 2025
Perubahan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan Kamar Mandi	SDN.101012 Simole-Mole Kec. Saipar Dolok Hole	Terlaksananya Pembangunan Kamar Mandi Ruang Jamban (toilet) dengan tingkat kerusakan sedang berat beserta sanitasinya	1 Paket	**DAK**
2.	Pembangunan MCK	SDN. Silangkitang Kec. Aek Bilah	Terlaksananya Pembangunan MCK beserta perabotnya	1 Paket	**DAK**
3.	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan, Lab Komputer dan Pagar Sepanjang 30 Meter	SDN. Bintuju Kec.Angkola Muara Tais	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan, Lab Komputer dan Pagar Sepanjang 30 Meter	3 Paket	**DAK**
4.	Rehabilitasi Ruang Bangunan dan Penambahan Ruang Kelas Baru	SMP Negeri .Sibulele Kec.Angkola Muaratais	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Bangunan dan Penambahan Ruang Kelas Baru	2 Paket	**DAK**
5.	Pembuatan Paving Blok Seluas 60 Meter x 60 Meter	SDN.Bintuju Kec.Angkola Muaratais	Terlaksananya Pembuatan Paving Blok Seluas 60 Meter x 60 Meter	1 Paket	**DAK**
6.	Pembangunan Paving Blok dan Pembangunan MCK	SD.IT Faza Azkia kec.Muara Batang Toru	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok dan Pembangunan MCK beserta perabotnya	1 Paket	**DAK**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Pembangunan MCK	SDN.Tarapung Raya Kec. Muara Batang toru	Terlaksananya Pembangunan MCK	1 Paket	**DAK**
8.	Pembuatan Paving Blok	SDN.Bandar Hapinis Kec.Muara Batangtoru	Terlaksananya Pembuatan Paving Blok	1 Paket	**DAK**
9.	Pemabngunan Ruang Kelas Baru	Yayasan Pendidikan Al Rasyid Kec.Angkola Timur	Terlaksananya Pemabngunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	**DAK**
10.	Lanjutan Pembangunan Gedung/Meubilier	MDT.Islahul Ummah Kec.Muara Batangtoru	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung/Meubilier	1 Paket	**DAK**
11.	Pembangunan Pagar	SD.IT Faza Azkia kec.Muara Batang Toru	Terlaksananya Pembangunan Pagar	1 Paket	**DAK**
12.	Pengadaan Meubilier	SDN.101310 Aek Sabatang Menek Kec. Angkola Sangkunur	Terlaksananya Pengadaan Meubilier	1 Paket	**DAK**
13.	Pengadaan Meubilier	Pesantren Hisbul Bahri AL-Musri Kec.Sangkunur	Terlaksananya Pengadaan Meubilier	1 Paket	**DAK**
14.	Pengadaan Mebilier	Pesantern Ibnu Arrizah Kec.Angkola Timur	Terlaksananya Pengadaan Mebilier	1 Paket	**DAK**
15.	Pengadaan Meubilier	Pesantren Jannatul Qur-an Simporik Kec.Angkola Selatan	Terlaksananya Pengadaan Meubilier	1 Paket	**DAK**
16.	Pengadaan Meubilier	Pesantren Rasid Ibrahim Madida Al-Munawarroh Kec.Angkola Selatan	Terlaksananya Pengadaan Meubilier	1 Paket	**DAK**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Pengadaan Meubilier	Bumi Latihan Qur'an Tahfish Mandiri Kec.Sipirok	Terlaksananya Pengadaan Meubilier	1 Paket	**DAK**
18.	Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar (RKB)	Pesantren Albakarah Madrasah Tingkat Sanawiyah dan Madrasyah Kec. Sayur Matinggi	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar (RKB)	1 Paket	**DAK**
19.	Rehap Bangunan	Pondok pesantren Muhammadiyah KH,A Dahlan Kec. Sipirok	Terlaksananya Rehap Bangunan	1 Paket	**DAK**
20.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pesantren Mardhatillah Kec. Angkola Barat	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	**DAK**
21.	Pembangunan MCK	SDN 101104 Silaiya Kec.Sayurmatinggi	Terlaksananya Pembangunan MCK	1 Paket	**Dak**
22.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN 100907 Muara Ampolu I Kec. Muara Batangtoru	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	**Dak**
23.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN 100907 Muara Ampolu II Kec. Muara Batangtoru	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	**Dak**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020-2024 adalah MERDEKA BELAJAR mempunyai strategi utama:

1. Menerapkan Kalaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK-SD-SMP-, Informal);
2. Meningkatkan Kualitas Guru dan Kepala Sekolah;
3. Membangun platform Pendidikan nasional berbasi Teknologi;
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian;
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah memastikan distribusi yang merata;
6. Membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan;
7. Memberikan Insentif atas konstribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang Pendidikan;
8. Mendorong kepemilikan industry dan otonomi Pendidikan vokasi;
9. Membentuk Pendidikan Tinggi kelas dunia;
10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 - 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan.
2. Meningkatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan, efektivitas birokrasi dan pelayanan publik.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi			Target 2024	Target 2025
			2021	2022	2023		
Mewujudkan peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Angka Partisipasi Paud	67,50	67,50	68,00	68,50	69,00
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	13,28	13,28	9,40	9,45	9,50
		Angka Harapan Lama Sekolah	67,00	67,00	13,36	13,41	13,46
		Indek Pendidikan Non Formal	67,00	67,00	68,00	68,05	68,10
		Cagar Budaya yang dilestarikan	7,00	7,00	9,00	9,00	9,00
		Budaya Lokal Yang dilestarikan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dari uraian tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Tapanu;I Selatan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati Sesuai Tugas dan Fungsinya demgan Mengacu kepada program RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dirumuskan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan sumber daya, kewenangan dengan program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - Sub Kegiatan
     1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
     3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
   - Sub Kegiatan
     1. Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar
     2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
     3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
     4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
   - Sub Kegiatan
     1. Pengelolaan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
     2. Pembinaan Lembaga Adat yang Menganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis program dan kegiatan tersebut berikut Tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas pendidikan Daerah Tahun 2025 Perubahan dan perkiraan maju Tahun 2026, Sebagai berikut : (Tabel T-C.33)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN

4.1. Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rencana Kerja, rumusan Program dan Kegiatan

Perumusan rencana kerja, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 mengacu pada berbagai faktor strategis yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah, kebutuhan sektor pendidikan, serta kemampuan keuangan daerah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi faktor internal maupun eksternal yang menentukan prioritas intervensi dan tahapan pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah.

a. Visi Kepala Daerah

Penyusunan rencana kerja bidang pendidikan berpedoman pada visi Kepala Daerah:

"Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045."

Visi tersebut mengandung arah pembangunan jangka menengah yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter unggul, sehat, dan sejahtera. Dalam konteks sektor pendidikan, visi ini menuntut adanya penguatan layanan pendidikan dari PAUD hingga SMP, peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Arah pembangunan pendidikan yang diturunkan dari visi ini mencakup:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui penguatan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter.
2. Pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.
3. Penguatan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
4. Peningkatan peran pendidikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk kontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan produktivitas.

b. Arah Kebijakan Nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Perumusan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 juga mempertimbangkan Program Prioritas Kemendikdasmen yang didukung oleh Pemerintah Daerah untuk periode 2024–2029. Program-program ini merupakan arah strategis yang harus didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan agar selaras dengan agenda pembangunan jangka menengah daerah. Sembilan program prioritas tersebut meliputi:

1. Penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
2. Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis;
3. Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan;
4. Digitalisasi Sekolah;
5. Pembelajaran Mendalam (Deep Learning);
6. Sekolah Model Transformatif;
7. Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah;
8. Wajib Belajar 13 Tahun; dan
9. Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

c. Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Penyesuaian Pagu Anggaran

Renja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut dari Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, sehingga seluruh program dan kegiatan harus disesuaikan dengan arah kebijakan terbaru pemerintah daerah. Perubahan RKPD ini mencakup:

- Penajaman prioritas pembangunan daerah tahun 2025,
- Penyesuaian pagu indikatif sesuai kemampuan keuangan daerah,
- Efisiensi dan realokasi anggaran menuju program yang lebih prioritas,
- Sinkronisasi dengan capaian kinerja dan evaluasi Renja tahun sebelumnya, serta
- Penyelarasan dengan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan berdasarkan SPM dan Rapor Pendidikan.

Penyesuaian tersebut menyebabkan beberapa program dan kegiatan mengalami peningkatan, penurunan, atau pergeseran pagu, yang kemudian dituangkan dalam hasil analisis kebutuhan pada Renja-P. Dengan demikian, Renja Perubahan Tahun 2025 disusun untuk memastikan bahwa intervensi sektor pendidikan tetap efektif,

relevan, dan selaras dengan kondisi fiskal serta prioritas pembangunan daerah.

4.2. Uraian Garis Besar Mengenai Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran arah kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai hasil (outcome) yang terukur sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan adalah rangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) sebagai penunjang pencapaian hasil program.

Dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu:

1. Kesesuaian dengan Nomenklatur Resmi

   Perumusan program dan kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhiran melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2024. Seluruh program, kegiatan, subkegiatan, kode rekening, dan indikator kinerja disesuaikan dengan nomenklatur terbaru yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

2. Penyesuaian dengan Prioritas RKPD dan Renja Perubahan Tahun 2025

   Jumlah, jenis, dan substansi program serta kegiatan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, termasuk:

   - penajaman target sasaran pembangunan bidang pendidikan,
   - pemetaan kebutuhan pendanaan berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya,
   - penyesuaian pagu indikatif, kemampuan fiskal, dan kebijakan realokasi anggaran, serta
   - sinkronisasi dengan Program Prioritas Kepala Daerah dan prioritas nasional sektor pendidikan.

   Prioritas tersebut mengarahkan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan harus berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian SPM, mutu layanan pendidikan, dan indikator kinerja Renstra 2025–2029.

3. Sebaran Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
   Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan pendidikan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan secara luas pada hampir seluruh kecamatan dan satuan pendidikan dalam wilayah kabupaten. Penyebaran lokasi kegiatan mencerminkan karakteristik sektor pendidikan yang bersifat lintas wilayah dan membutuhkan pemerataan layanan, termasuk peningkatan akses PAUD, pelaksanaan pembelajaran dasar SD–SMP, layanan pendidikan kesetaraan, dan penyediaan sarana prasarana pendidikan di seluruh kecamatan.

4.3. Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 serta kemampuan keuangan daerah. Total kebutuhan dana untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan pendidikan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp 447.070.199.458**, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain itu, untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program yang bersifat multiyears, pengembangan mutu layanan pendidikan, serta pemenuhan target Renstra 2025–2029, telah disusun pula prakiraan maju Tahun Anggaran 2026 dengan total kebutuhan pendanaan sebesar **Rp 399.179.120.630**. Prakiraan maju ini menjadi dasar dalam mengantisipasi pembiayaan pada tahun berikutnya agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap terencana, konsisten, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan.

Pendanaan tersebut selanjutnya akan disesuaikan pada tahap penyusunan RKA Perubahan dan penetapan DPA Perubahan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, efisiensi anggaran, serta kebutuhan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan RKPD Tahun 2025, hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta penyesuaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang baru. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pendidikan, kemampuan keuangan daerah, serta dinamika capaian kinerja triwulan berjalan.

A. Catatan Penting yang Perlu Menjadi Perhatian
   Beberapa hal strategis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja-P Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

   1. Ketersediaan anggaran berpotensi tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan sektor pendidikan, sehingga diperlukan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan program, khususnya pada layanan dasar pendidikan seperti PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

   2. Sebagian indikator kinerja tahun berjalan masih menggunakan capaian Tahun 2024. Hal ini terjadi karena pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2025 dilakukan serentak secara nasional pada akhir Triwulan III, sedangkan hasil resmi belum dirilis oleh BSKAP pada saat penyusunan Renja-P. Dengan demikian, beberapa indikator literasi, numerasi, dan iklim belajar belum mengalami pembaruan data.

   3. Masih terdapat sejumlah capaian indikator yang memerlukan intervensi lebih kuat, terutama APS PAUD, proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B, kualifikasi guru PAUD, serta APS pendidikan kesetaraan. Hal ini menuntut penajaman program dan penataan ulang pagu kegiatan agar lebih fokus pada peningkatan mutu dan perluasan layanan.

   4. Penyesuaian terhadap perubahan RKPD Tahun 2025 mengharuskan beberapa program dan kegiatan mengalami pergeseran, baik terkait target, lokasi, keluaran (output), maupun kebutuhan anggaran, sehingga pengelolaan dan monitoring harus dilakukan secara lebih ketat.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Agar Renja-P Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara efektif dan akuntabel, maka pelaksanaan program dan kegiatan harus berpedoman pada kaidah-kaidah berikut:

1. Mematuhi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk tata cara pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

2. Mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhiran nomenklatur, dalam penyusunan program dan kegiatan beserta indikatornya.

3. Melaksanakan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama pada kegiatan yang mengalami perubahan pagu dan keluaran.

4. Mengutamakan layanan pendidikan dasar dan pemenuhan SPM sebagai prioritas pembangunan daerah yang wajib.

5. Mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, Bappeda, BPKPAD, serta satuan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD, DAK, dan bantuan pemerintah pusat.

6. Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan data Rapor Pendidikan untuk pengambilan keputusan berbasis data.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Renja-P Tahun 2025, rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

1. Melakukan penjabaran Renja-P ke dalam RKA Perubahan dan DPA Perubahan 2025, sesuai pagu indikatif dan target kinerja yang telah disesuaikan.

2. Menyiapkan langkah-langkah pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, melalui monitoring dan evaluasi berkala baik di tingkat bidang maupun satuan pendidikan.

3. Mengoptimalkan realisasi kegiatan pada sektor dengan capaian indikator rendah, seperti PAUD dan pendidikan kesetaraan, melalui peningkatan pembinaan, fasilitasi akreditasi, pemenuhan kualifikasi pendidik, serta perluasan akses layanan.

4. Mempersiapkan data pendukung capaian SPM dan indikator prioritas untuk kebutuhan pelaporan kinerja, evaluasi SAKIP, dan proses perencanaan tahun berikutnya.

5. Melakukan sinkronisasi berkelanjutan dengan kebijakan nasional dan provinsi, khususnya sembilan program prioritas Kemendikdasmen 2024–2029 dan kebutuhan penyelarasan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sipirok,11 September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,



ARMAN PASARIBU, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199308 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon. - Faks. –
E-mail : satpolpptapsel@gmail.com Website : -

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800/15/2025

TENTANG
RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode Tahun 2025 dianggap perlu penyesuaian target kinerja dan anggaran indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Rencana Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telaha diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6944);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkata Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 332 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
23. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penentapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
24. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
25. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Daerah di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1047);

27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 Nomor 1214);
28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 1244);
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 1261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
pada tanggal : 04 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



JHONNI GUMANSI NASUTION, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 800/ 15 /2025
TANGGAL : 04 September 2025
TENTANG :

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

I.	Ketua Tim	: Kepala Satpol PP Kab. Tapsel
II.	Sekretaris Tim	: Sekretaris Satpol PP Kab. Tapsel
III.	Kelompok Kerja	
	POKJA I (EVALUASI KERJA)	:1. Kabid Kebakaran dan Penyelamatan 2. Kabid Penegakan Peraturan Daerah 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	POKJA II (Penetapan Program Kegiatan dan Pendanaan Renja Kegiatan)	:1. Kabid SDA dan Linmas 2. Kabid Ketemtraman Umum dan Ketentraman Masyarakat 3. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

Sipirok, 04 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

JHONNI GUMANSI NASUTION, SE

RENJA (RENJA)



2025

SATPOL PP TAPANULI SELATAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Sipirok, 12 Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

JHONNI GUMANSI NASUTION, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720603 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 43
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 66
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 68
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 70
3.3 Program dan Kegiatan 73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 81
BAB V PENUTUP 91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2023, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Proses Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terdiri dari:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penentapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Daerah di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

(Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1047);

22. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 Nomor 1214);
23. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 1244);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat

Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kineija tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Bab V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Capaian Renstra

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi anggaran Belanja untuk Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 8.784.800.580,- yang terdiri dari Belanja Operasi

sebesar Rp. 8.373.249.580,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 411.551.000,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, realisasi Belanja adalah sebesar Rp.8.135.529.523,- atau sebesar 92,61% dengan rincian sebagai berikut: Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 7.726.615.523,- atau 87,95% Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 411.551.000 atau 99,35%.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Berikut indikator kinerja utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Trantibumlinmas	65,00

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Misi OPD	Indikator Kinerja Utama	Program	Target IKU	Realisasi Tri I 2024	Capaian (%)
				2024		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan keamanan, ketertiban serta pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Daerah	Penegakan Perda (%)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	56,00	40,00	71,43
2	Memberdayakan Polisi Pamong Praja yang profesional, transparan dan akuntabel menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85,00	79,17	93,14
3	Meningkatkan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4,87	0,69	14,17
4	Meningkatkan keamanan, ketertiban serta pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Daerah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50,00	40,00	80,00

Keterangan :

1. Penegakan peraturan daerah

   Indikator kinerja Penegakan Perda yang memiliki target 56,00% dengan realisasi 40,00%. Dari 3 jumlah peraturan daerah yang ditangani oleh Satpol PP hanya 1 (satu) peraturan daerah yang tertangani selama tahun 2024 triwulan I yaitu peraturan daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang operasi penyakit masyarakat. Dengan 10 kali jumlah penegakan hanya 4 penegakan peraturan daerah yang terselesaikan.

   Peningkatan kinerja ini akan terus dilakukan sehingga jumlah pelanggar Perda akan terus berkurang dan masyarakat benar-benar paham akan peraturan daerah. Peningkatan sosialisasi di setiap Kecamatan juga harus dilakukan. Dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait dalam melakukan peningkatan penegakan peraturan daerah dan sosialisasi kedepannya sehingga meminimalisir pelanggar peraturan daerah.

   Berikut rumus indikator penegakan perda dan data penegakan perda :

$$\frac{\text{jumlah penyelesaian penegakan perda}}{\text{jumlah pelanggaran perda}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{4}{10} \text{ X } 100 = 40{,}00$$

   Berikut ini realisasi Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2024 triwulan I disajikan dalam bentuk tabel dan berikut dokumentasi penegakan peraturan daerah:

JUMLAH PENEGAKAN PERDA TAHUN 2024 TRI I

NO	PERIHAL	TANGGAL	PERDA	KETERANGAN
1	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Sipirok	08 Februari 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	SELESAI
2	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Batangtoru	28 Februari 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI
3	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Batangtoru	29 Februari 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI
4	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Sayurmatinggi	07 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	SELESAI
5	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Batang Angkola	08 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	SELESAI
6	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Angkola Barat	09 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI
7	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Angkola Muaratais	10 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI
8	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Angkola Timur	12 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI
9	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Angkola Timur	13 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	SELESAI
10	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Batang Angkola	17 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI

2. Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) ada 24 (dua puluh empat) terkait ketertiban, ketentraman, keindahan hanya 19 (Sembilan belas) yang terselesaikan.

Indikator kinerja ini merupakan jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan ditindaklanjuti oleh petugas Satpol PP dengan target 85,00% dengan realisasi 79,17% pada triwulan I dengan capaian kinerja 93,14%.

Berikut rumus indikator :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah laporan K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi SATPOL PP}} \times 100\%$$

$$\frac{19}{24} \text{ X } 100 = 79{,}17$$

Berikut realisasi indikator kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam bentuk tabel :

DEMONSTRASI

NO	TANGGAL KEGIATAN	PERIHAL	KETERANGAN	
			SELESAI	TIDAK SELESAI
1	12 Januari 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Kab. Tapanuli Selatan dari Aliansi PB PMPK Tabagsel		√
2	23 Januari 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Tapsel, depan Kantor Kejaksaan Negeri Tapsel, Depan Kantor DPRD Tapsel dari Aliansi PMR SUMUT	√	
3	30 Januari 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim Kab. Tapanuli	√	

		Selatan dari Aliansi Gemas		
4	05 Februari 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Dinas KB DAN Kantor DPRD Tapsel dari Aliansi PH Paham Tabagsel	√	
4	22 Februari 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Kecamatan Sayurmatinggi Aliansi PSI	√	
5	27 Februari 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Tapsel dari Aliansi DPP-PERMADA PH	√	
6	01 Maret 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Tapsel, di Depan Kantor DPRD Tapsel Dari Aliansi Permai Demokrasi		√
7	04 Maret 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Dinas Perkim dari Aliansi Ampera		√
8	05 Maret 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Tapsel dan Di Kantor DPRD Tapsel dari Aliansi Permai Demokrasi		√
9	06 Maret 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Tapsel dan Di Depan Kantor DPRD Tapsel Dari Aliansi Permai Demokrasi		√
10	07 Maret 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Dinas Perhubungan Kab. Tapsel dan Kejaksaan Tapsel, Dari Aliansi Ampera	√	
10	07 Maret 2024	Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Tapsel dan Kantor DPRD Dari Aliansi Bersatu Sumatera Utara	√	
11	07 Maret 2024		√	

		Pengamanan Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD Dari Aliansi Mahasiswa Keadilan Tapanuli Bagian		

PENGAMANAN

NO	TANGGAL KEGIATAN	PERIHAL	KETERANGAN	
			SELESAI	TIDAK SELESAI
1	09 Januari 2024	Pengamanan dan Pengawalan Pengajian Bulanan Pemerintah bersama BKMT di Desa Saragodung Kecamatan Sipirok.	√	
2	09 Januari 2024	Pengamanan dan Pengawalan Pengajian Bulanan Pemerintah bersama BKMT di Kecamatan Angkola Muaratais	√	
3	16 Januari 2024	Pengamanan dan Pengawalan Pengajian Bulanan Pemerintah bersama BKMT di Desa Kampung Lalang Kecamatan Angkola Selatan	√	
4	30 Januari 2024	Pengamanan Kunjungan Pj Gubernur Sumatera Utara ke Mes Pemprov dan Penanam Pohan di Kecamatan Angkola Timur.	√	
5	01 Februari 2024	PAM Pengajian Dzikir Akbar Bulan Rajab Tahun 2024 Secara Serentak di Kampung Sibiobio Desa Huraba Kecamatan Angkola Timur.	√	
6	01 Februari 2024	PAM Pengajian Dzikir Akbar Bulan Rajab Tahun 2024 Secara Serentak di Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat.	√	
7	01 Februari 2024	PAM Pengajian Dzikir Akbar Bulan Rajab Tahun 2024 Secara Serentak di Desa Situmba Poken Kecamatan Sipirok.		
8	01 Februari 2024	PAM Pengajian Dzikir Akbar Bulan Rajab Tahun 2024	√	

		Secara Serentak di Sidadi I Kecamatan Batang Angkola.		
9	06 Maret 2024	PAM dan Pengamanan Pawai Ta'aruf MTQN Ke-20 Kec. Sayurmatinggi di Kantor Camat Sayurmatinggi.	√	
10	14 Maret 2024	Pam Kunjungan Bapak Bupati Tapanuli Selatan ke Sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Angkola Timur.	√	
11	21 Maret 2024	Patroli Malam Petasan di Wilayah Kecamatan Angkola Timur.	√	

OPERASI KASIH SAYANG

NO	TANGGAL SURAT MASUK	PERIHAL	KETERANGAN	
			SELESAI	TIDAK SELESAI
1	24 Januari 2024	Kerjasama Antar Lembaga Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di SMK Negeri 1 Kecamatan Angkola Timur.	√	
2	24 Januari 2024	Kerjasama Antar Lembaga Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di SMA Negeri 1 Kecamatan Angkola Timur.	√	

3. Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten

Indikator kinerja ini mempunyai target 4,87 dengan realisasi hanya 0,69 dengan jumlah mobil sebanyak 3 unit sehingga capaian hanya 14,17%. Mobil pemadam kebakaran dibagi atas 3 sektor yaitu sektor Sipirok, Batang Toru, Sayurmatinggi. Tentunya armada mobil pemadam kebakaran masih minim. Kondisi saat ini mobil damkar hanya ada 3 unit pada 3 kecamatan sementara ada 15 kecamatan jangkauan petugas damkar, kedepan diperlukan penambahan unit mobil sehingga proses penanggulangan penanganan kebakaran

akan lebih mudah, penambahan fasilitas Emergency Call untuk pertugas pemadam kebakaran juga sangat diperlukan agar penanganan kejadian kebakaran lebih cepat tanggap, perlunya sosialisasi tentang penanganan kebakaran dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran. perlunya penambahan sarana dan prasarana sehingga proses penanggulangan kebakaran akan maksimal. Berikut data kejadian kebakaran yang ditangani oleh petugas pemadam kebakaran beserta penjelasan rumus indikator cakupan pelayanan kebakaran :

$$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

= 0,69

NO	KECAMATAN	NAMA PEMILIK	TANGGAL KEJADIAN	JUMLAH		TAKSIRAN KERUGIAN
				KELURAHAN	DESA	
1	2	3	4	5	6	7
1	ANGKOLA BARAT	ROSALINA SIREGAR 68 TAHUN	25 JANUARI 2024	-	HUTA LAMBUNG	± Rp 50 JUTA
2	MUARA BATANG TORU	HOTMATUA LUBIS 33 TAHUN	04 FEBRUARI 2024	BANDAR HAPINIS	BATANG TORU	± Rp 75 JUTA
3	ANGKOLA BARAT	BUNYAMIN ARITONANG	12 FEBRUARI 2024	SIMATORKIS	SISOMA	± Rp 50 JUTA
4	BATANG TORU	BANK BNI	12 FEBRUARI 2024	-	BATANG TORU	± Rp 100 JUTA
5	ANGKOLA TIMUR	RIZAL HARAHAP	14 FEBRUARI 2024	GUNUNG MANAON	PARGARUTAN	± Rp 120 JUTA
6	BATANG TORU	PERTAMINA	17 FEBRUARI 2024		BATANG TORU	-
7	ANGKOLA BARAT	MASTURO RAMBE DAN MARA NUDDIN SIMBOLON	19 FEBRUARI 2024	SITINJAK	SIMATORKIS	± Rp 120 JUTA
8	SAYUR MATINGGI	ARIF 48 THN	10 MARET 2024	SAYUR MATINGGI	SAYUR MATINGGI	± Rp 1 JUTA
9	BATANG TORU	ANWAR RAMBE 60 TAHUN	11 APRIL 2024	-	HAPESONG BARU	± Rp 75 JUTA
10	ANGKOLA TIMUR	1. H. UTA MSDIN HRP 60 THN 2. SABASDIN HRP 55 THUN 3. KHOIRUDDIN HRP 59 THN	11 APRIL 2024	PASAR PARGARUTAN	PARGARUTAN	± Rp 190 JUTA

NO	KECAMATAN	NAMA PEMILIK	TANGGAL KEJADIAN	JUMLAH		TAKSIRAN KERUGIAN
				KELURAHAN	DESA	
11	ANGKOLA BARAT	MAIL 40 THN WIRA SWASTA	16-Apr-24	-	PANOBASAN LOMBANG	± Rp 65 JUTA
12	BATANG TORU	SAPRI SIMAMORA 43 THN	18-Apr-24	-	AEK PINING	± Rp 30 JUTA

4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perka

   Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan target kinerja 50,00% dimana dengan realisasi 40,00% sehingga capaian indikator kinerja 80,00%. indikator kinerja ini dihitung dari jumlah warga negara terkena dampak akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada yang memperoleh layanan dibagi jumlah warga negara yang terkena dampak dari penegakan hukum Perda. Dari 10 orang yang memperoleh layanan hanya 4 orang.

Berikut tabel nama pelanggar perda

NO	PERIHAL	TANGGAL	PERDA	KETERANGAN	NAMA PELANGAR
1	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Sipirok	08 Februari 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	SELESAI	Ganjal Siregar
2	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Batangtoru	28 Februari 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI	Marolop Ritonga
3	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Batangtoru	29 Februari 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI	Agus Ritonga
4	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Sayurmatinggi	07 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	SELESAI	Indra Nasution
5	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Batang Angkola	08 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	SELESAI	Paruntungan Sitompul

6	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Angkola Barat	09 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI	Oloan Huta Ginjang
7	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Angkola Muaratais	10 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI	Anju Pasaribu
8	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Angkola Timur	12 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI	Kuteng
9	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Angkola Timur	13 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	SELESAI	Maya
10	Dalam rangka Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Batang Angkola	17 Maret 2024	Perda Nomor 4 Tahun 2004	TIDAK SELESAI	Agus Dalimunthe

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**100**	**90,07**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,									
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Tersusunnya laporan capaian	37	6	6	6	100,00	6	18	54,05

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja SKPD Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKA.P, Renstra (dokumen)								
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah									
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	12	12	322	12	3,73	322	12	100,00

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya hari ulang tahun Republik Indonesia, terlaksananya pameran pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel (Kali)	12	2	2	1	50,00	1	4	33,33
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (stel)	834	142	142	142	100,00	0	284	34,05
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen alat-alat Listrik (bulan)	12	12	12	12	100,00	1	12	100,00

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor (bulan)	12	12	12	12	100,00	1	12	100,00
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (bulan)	12	12	12	12	100,00	1	12	100,00
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan kantor (bulan)	12	12	12	12	100,00	1	12	100,00

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar (bulan)	12	12	12	12	100,00	1	12	100,00
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi	11450	2361	1618	1390	85,91	1618	5369	46,89
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	0	1	0	1	0,00	0	2	0,00
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	42	13	126	126	100,00	0	139	330,95
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.08	Kegiatan Penyediaan									
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat-	12	12	12	12	100,00	1	12	100,00

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			menyurat SKPD (bulan)								
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (bulan)	12	12	12	12	100,00	3	12	100,00
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor dalam kondisi baik (bulan)	12	12	12	12	100,00	1	12	100,00
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	678	110	1535	1480	96,42	1535	3125	460,91

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			instansi/rumah dinas pemerintahan kabupaten tapanuli selatan (orang)								
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Roda 6 : 4 unit, Roda 4 : 5 unit, Roda 2 : 8 unit (bulan)	12	12	12	12	100,00	18	12	100,00
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (bulan)	12	12	12	12	100,00	10	12	100,00

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Satpol PP (Unit)	5	1	0	0	0,00	0	1	20,00
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda (%)	75,00	46,59	52,00	76,19	146,52	54,00	176,78	235,71
			Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	7,84	2,95	5,47	5,44	99,45	5,47	13,86	176,79
			Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	23,64	21,41	24,45	38,75	158,49	24,45	84,61	357,91
			Cakupan Patroli	36,67	53,33	30,00	56,67	61,67	30,00	140	381,78

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Petugas Satpol PP (%)								
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pelaksanaan patroli dan Pam Lebaran, hari-hari besar (kali)	1275	218	190	167	87,89	190	575	45,10

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan kejaksaan (kali)	144	5	1	1	100,00	1	7	4,86
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta penyuluhan dan pembinaan anggota linmas di	958	436	1	1	100,00	1	438	45,72

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kecamatan (orang)								
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansah Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (orang)	432	40	75	75	100,00	75	190	43,98

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.0.05.00.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik pencegahan (orang)	260	173	1	1	100,00	1	175	67,31
	1.05.1.05.5.02.0.00.0.05.00.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota									

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat), dan Pelanggaran Perda (Kali)	288	13	1	1	100,00	1	15	5,21

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.04	**Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	0,005	0,001	0,005	0,001	20,00	0,005	0,001	20
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan									

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.04.2.01.02	Pemadam dan Pengendslian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian, Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan (Orang)	293	712	40	40	100,00	40	792	270,31

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas terlatih dalam pemadam kebakaran (orang)	205	39	40	39	97,50	40	118	57,56

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati:

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penyelanggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya
6. Pengawasan terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah mempunyai Tujuan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Masyarakat

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja
Pelayanan Satpol PP Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan s/d 2022

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penegakan Perda (%)			50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	37,50	40,00	37,50	40,00	
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)			75,00	80,00	81,00	85,00	87,00	73,68	79,17	73,68	79,17	
3	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten			4,69	4,87	4,87	4,87	5,49	0,23	0,69	0,23	0,69	
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	SPM		80,00	70,00	60,00	50,00	40,00	37,50	40,00	37,50	40,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah. Sebagai unsur penyelenggaraan Trantibum pemerintahan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dengan Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menyangkut kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan terkait permasalahan-permasalahan seperti penyalahgunaan izin, pelanggaran peraturan, kejadian politik praktis/ aksi unjuk rasa dan lain sebagainya.

Untuk itu, sebagai salah satu OPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diamanatkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana potensi konflik dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi. Karena pada hakikatnya, "Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat" sebagaimana diamanatkan dalam pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang utuh, dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness) :

a. Kompetensi personil
b. Jumlah sarana pendukung operasional
c. Inovasi dalam sistema dan mekanisme kerja
d. Kewenangan penindakan dalam pelanggaran peraturan daerah

Kelemahan (Weakness) :

a. Beban pemakaian sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penertiban
b. Jumlah personil
c. Legalitas SOP penegakan Peraturan Daerah

Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity)

a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja Kecamatan
b. Dukungan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Perda
c. Dukungan perangkat daerah terkait dan trantib di kecamatan

d. Dinamika peraturan perundang-undangan dalam peningkatan kompetensi SDM

Tantangan (Threat)

a. Efektifitas regulasi dalam memberikan efek jera kepada pelanggar Perda
b. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perda
c. Intervensi terjadinya pelanggaran Perda
d. Regulasi yang mengatur tindak lanjut hasil penertiban PKL, bangunan liar

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan ada beberapa

target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	11.354.069.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	11.354.069.500	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	6	45.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	6	45.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordina dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	45.500.000	Koordina dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	45.500.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Satpol PP	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (kegiatan)	1	2.336.152.113	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Satpol PP	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (kegiatan)	1	2.336.152.113	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	322	2.286.152.113	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	322	2.286.152.113	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1	50.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1	50.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (kegiatan)	1	416.157.827	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (kegiatan)	1	416.157.827	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1	382.945.827	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1	382.945.827	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan PPNS (orang)	2	33.212.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan PPNS (orang)	2	33.212.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	6	548.747.300	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	6	548.747.300	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	4.412.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	4.412.800	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	7.022.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	7.022.200	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dsisediakan (Paket)					Dsisediakan (Paket)			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik (Paket)	1	32.907.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik (Paket)	1	32.907.300	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	1	21.020.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	1	21.020.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan (Dokumen)	1	11.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan (Dokumen)	1	11.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3149	472.385.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3149	472.385.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (kegiatan)	2	2.620.650.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (kegiatan)	2	2.620.650.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	1.900.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	1.900.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (paket)	1	175.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (paket)	1	175.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	29	545.650.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	29	545.650.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)	4	5.039.582.260	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)	4	5.039.582.260	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	772.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	772.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	40.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	11.505.600	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	11.505.600	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	2015	4.987.304.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	2015	4.987.304.160	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)	2	347.280.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)	2	347.280.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	26.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	26.000.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	10	321.280.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	10	321.280.000	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Penegakan Perda (%)	75	594.930.500	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Penegakan Perda (%)	75	594.930.500	
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)	100				Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)	100		

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	5,47				Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	5,47		
		Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	24,45				Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	24,45		
		Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	30,00				Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	30,00		
		Jumlah Demonstasi (Kali)	25,00				Jumlah Demonstasi (Kali)	25,00		
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)	1	393.930.500	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)	1	393.950.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Kasus)	190	173.154.500	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Kasus)	190	173.154.500	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	51.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	51.000.000	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	51.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	51.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansah Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	75	67.776.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansah Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	75	67.776.000	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1	51.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	1	51.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kejahatan (Dokumen)			
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)	1	201.000.000	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)	1	201.000.000	
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1	150.000.000	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati/Wali Kota (Laporan)	1	51.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati/Wali Kota (Laporan)	1	51.000.000	
Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	0,005	51.000.000	Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	0,005	51.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)	1	51.000.000	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)	1	51.000.000	
Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsigaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	51.000.000	Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsigaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	51.000.000	
JUMLAH				12.000.000.000					12.000.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pelaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Berdasarkan Peraturan tentang Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dimana dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tugas Satpol PP yaitu Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui

pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu : "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 3 (tiga) arah kebijakan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

1. Transformasi sosial
2. Transformasi ekonomi
3. Transformasi tata kelola
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi

Sesuai tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus pada untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan dengan Sasaran: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

3.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat:

1) Indeks Trantibumlinmas

Tabel. 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi		Target	
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Penegakan Perda (%)	21,05	76,19	54,00	56,00
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	50,00	62,34	81,00	85,00
			Indeks Trantibumlinmas	-	-	64,00	65,00
		Meningkatnya pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	50,00	62,34	81,00	85,00
	Meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	21,05	76,19	60,00	50,00

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi Ke IV Kabupaten Tapanuli Selatan yakni Reformasi birokrasi dan pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran.

b. Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			BELUM TUNTAS	
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota**				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	451	451	**0**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada		32	32	**0**
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*		4	4	**0**
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***		0	0	**0**
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal		0	0	**0**
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil		0	0	**0**
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan		0	0	**0**
2 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**				

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	**0**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana		0	0	**0**
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`		0	0	**0**
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana		0	0	**0**
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana		0	0	**0**
3 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	**0**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana		0	0	**0**
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)		0	0	**0**
4 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	**0**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		0	0	**0**
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana		0	0	**0**
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana		0	0	**0**
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas		0	0	**0**
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana		0	0	**0**
5 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	38	38	**0**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	6	2	**4**
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		1	1	**0**
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran		184	184	**0**
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia		39	39	**0**
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran		0	0	**0**
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran		0	0	**0**

3.1.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 3 (Tiga) program 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1
Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Satpol PP	8.531.160.280	DAU
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	45.756.000	DAU
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	45.756.000	DAU
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Satpol PP	2.820.406.500	DAU
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	2.763.406.500	DAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satpol PP	57.000.000	DAU
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	-	DAU
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	-	DAU
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	-	DAU
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	286.387.900	DAU
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	4.603.400	DAU
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	7.225.200	DAU
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	32.905.200	DAU
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	21.207.100	DAU
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	11.000.000	DAU
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	209.447.000	DAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	-	DAU
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	-	DAU
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	-	DAU
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	-	DAU
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	4.983.329.880	DAU
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	900.000	DAU
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	40.000.120	DAU
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	11.505.600	DAU
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	4.930.924.160	DAU
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	395.280.000	DAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	26.000.000	DAU
1.7.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	369.280.000	DAU
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	329.937.900	DAU
2.1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	304.437.900	DAU
2.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	25.500.000	DAU
2.1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	25.500.000	DAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
2.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansah Hak Asasi Manusia	Satpol PP	67.776.000	DAU
2.1.4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	25.500.000	DAU
2.1.5	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	160.161.900	DAU
2.2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	25.500.000	DAU
2.2.1	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	-	DAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	25.500.000	DAU
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	25.500.000	DAU
3.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	25.500.000	DAU
	Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	-	DAU
		TOTAL	**8.886.598.180**	

3.1.3. Penjelasan Rumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD

Tidak terdapat perbedaan renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Dengan rancangan awal renja.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**100**	**8.531.160.280**	**APBD**	**100**	**11.805.055.220**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**6**	**45.756.000**	**APBD**	**6**	**46.109.700**
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	6	45.756.000	APBD	6	46.109.700
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**1**	**2.820.406.500**	**APBD**	**1**	**2.367.456.551**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	322	2.763.406.500	APBD	322	2.316.786.551

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	57.000.000	APBD	1	50.670.000
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (kegiatan)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**1**	**0**	**APBD**	**1**	**421.734.342**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	0	APBD	1	388.077.301
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan PPNS (orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	2	0	APBD		33.657.041
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegitan)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**6**	**286.387.900**	**APBD**	**6**	**556.151.702**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	4.603.400	APBD	1	4.523.120
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	7.225.200	APBD	1	7.116.297

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	32.905.200	APBD	1	33.348.258
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	21.207.100	APBD	1	21.301.668
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	11.000.000	APBD	1	11.147.400
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	3149	209.447.000	APBD	3153	478.714.959
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (kegiatan)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**2**	**0**	**APBD**		**2.954.556.710**
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	0	APBD	3	2.224.250.000

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	0	APBD	1	177.345.000
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	29	0	APBD	29	552.961.710
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**4**	**5.039.582.260**	**APBD**	**4**	**5.107.112.663**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	900.000	APBD	1	782.852
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	3	40.000.120	APBD	3	40.536.000
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	11.505.600	APBD	1	11.659.775

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	2015	4.930.924.160	APBD	2015	5.054.134.036
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**2**	**395.280.000**	**APBD**	**2**	**351.933.552**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	18	26.000.000	APBD	18	26.348.400
1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	10	369.280.000	APBD	10	325.585.152
1	**05**	**02**			**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Penegakan Perda (%)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**75,00**	**329.937.900**	**APBD**	**75,00**	**602.902.568**
						Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)		**100,00**			**100,00**	
						Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		**5,47**			**6,36**	
						Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk		**24,45**			**24,37**	
						Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)		**30,00**			**32,22**	

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)		**25,00**			**22,00**	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**1**	**304.437.900**		**1**	**399.209.168**
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.500.000	APBD	1	51.683.400
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.500.000	APBD	1	51.683.400

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	75	67.776.000	APBD	75	68.684.198
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.500.000	APBD	1	51.683.400
1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan Pengawalan (kasus)	Kabupaten Tapanuli Selatan	190	160.161.900	APBD	190	175.474.770
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**1**	**25.500.000**	**APBD**	**1**	**203.693.400**
1	05	02	2.02	05	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	0		1	152.010.000

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	05	02	2.02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.500.000	APBD	1	51.683.400
1	**05**	**04**			**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**0,005**	**51.000.000**	**APBD**	**0,005**	**51.683.400**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)**	**Kabupaten Tapanuli Selatan**	**1**	**25.500.000**	**APBD**	**1**	**51.683.400**
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.500.000	APBD	1	51.683.400

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan PenanggulanganKebakaran (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	40		APBD	40	
JUMLAH								**APBD**	**8.886.598.180**		**APBD**	**12.459.641.188**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Sipirok, 12 Juli 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



JHONNI GUMANSI NASUTION, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19720603 200312 1 004

RENJA
2025

KANTOR CAMAT SIPIROK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disingkat Renja adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sipirok untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Sipirok disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Sipirok Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja Tahun 2024, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sipirok.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Sipirok terdiri dari :

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35):
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);

18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 1075);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 ;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 1178);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Sipirok ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Sipirok ini adalah:

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. memelihara konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan dalam mencapai target tujuan strategis khususnya untuk tahun berkenaan;
3. mengukur kineija penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
4. menyediakan informasi bagi pemenuhan evaluasi dan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun dengan pokok bahasan serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun beijalan (tahun n-1 = Tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kineija tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kineija pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/intemasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Bab V Penutup Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SIPIROK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sipirok Tahun Lalu

Bab ini menyajikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

Renja Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sekaligus sebagai pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada Laporan Kinerja tahunan dan realisasi APBD untuk tahun yang bersangkutan.

Review yang dilakukan adalah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 = Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, alokasi anggaran Belanja untuk Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar Rp. 8.141.042.105,-,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 7.509.287.705,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 631.754.400,- Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024, realisasi Belanja adalah sebesar Rp.7.842.641.576,- atau sebesar 96,33 % dengan rincian sebagai berikut: · Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 7.681.005.276,- atau 102,29 % Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 161.636.300.,- atau 25,59 %.

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Progr Kegiatan Tahun 2024		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Ti Reali
1	2					3	4	5	6	7	8	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
	2	13				**URUSAN PEMERINATAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
	2	13	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Desa berstatus Berkembang (%)	100		100		=
ff							Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdaya an Masyarakat/LPM (Lembaga)	8		8		
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)	8		8		
	2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (dokumen)	40	40	40	40	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	7	**01**				**KECAMATAN**									
	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)**	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokemen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	2	100%	2	2	100%
	7	01	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4	4	100%	4	4	100%
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	33	33	33	33	100%	33	33	100%
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	8	8	8	8	100%	8	8	100%
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	12	12	12	12	100%	12	12	100%

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	1	1	1	100%	1	1	100%
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5	5	5	100	5	5	100%
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	3	3	100%	3	3	100%
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	100%	1	1	100%

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	100	2	2	100
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2	2	100	2	2	100
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	6	6	6	100	6	6	100
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240	240	240	240	100	240	240	100
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	12	100	12	12	100
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	2	2	2	2	100	2	2	100

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**75**	**75**	**75**	**82,25**	**83**	**75**	**75**	**75**
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (%)**	**75**	**75**	**75**	**82,25**	**83**	**75**	**75**	**75**
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	12	100	12	12	100
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	12	12	100	12	12	100
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	12	100	12	12	100

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	6	6	100	6	6	100
	7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100
	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sipirok merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai kerja tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati:

Kecamatan Sipirok dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Kecamatan Sipirok mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan s/d Tahun 2024

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			75	75	75	75	75	75	81,50	82,25	83,25	84	85
3	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan Pemerintahan dan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sipirok memiliki lingkup pelayanan wilayah. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Sipirok memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sipirok tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness) :

a. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai.
b. Adanya Peraturan Daerah No. 113 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.
d. Kondisi gedung perkantoran Kecamatan.
e. Loket PATEN yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan SOP

Kelemahan (Weakness) :

a. Sumber Daya dan Kompetensi Aparatur Kecamatan yang kurang
b. Koordinasi dengan OPD belum Optimal
c. Profesionalisme SDM Aparatur belum optimal
d. Jarak Antar Desa yang jauh dan Jaringan Internet di beberapa Desa masih belum memadai

Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity)

a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja Kecamatan
b. Tersedianya pejabat struktural tentang perencanaan pada setiap OPD
c. Lembaga penyelenggara diklat teknis dan fungsional perencanaan cukup memadai
d. Koordinasi Forkopincam yang Sinergi

Tantangan (Threat)

a. Tuntutan masyarakat tentang pembangunan dan Pemberdayaan semakin besar dan kritis
b. Penempatan pegawai Kecamatan kurang mempertimbangkan kemampuan dan keahlian

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Sipirok dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sipirok, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan perubahan nama kegiatan guna efisiensi dan mempertimbangkan asas kepatutan, serta ada beberapa target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKD Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3				9	13			14	16
		KECAMATAN SIPIROK				**7.242.220.854**					**7.407.883.428**
1,	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Sipirok**			**20.000.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Sipirok**			**20.500.000**
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Sipirok			20.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Sipirok		-	20.500.000
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	20.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	20.500.000
2,	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kecamatan Sipirok**			**155.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kecamatan Sipirok**			**159.387.500**

	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sipirok			155.500.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sipirok			159.387.500
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Laporan	125.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Laporan	128.125.000
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	30.500.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	31.262.500
3,	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Kecamatan Sipirok**			**86.100.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Kecamatan Sipirok**			**88.252.500**
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sipirok			86.100.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sipirok			88.252.500
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kecamatan Sipirok	Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	86.100.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kecamatan Sipirok	Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	88.252.500

4,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Sipirok**			**4.139.459.804**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Sipirok**			**4.288.220.589**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok			19.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok			7.021.250
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	19.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.021.250
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok			7.499.658.854	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok			3.556.052.080
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara	33 Orang / Bulan	7.242.220.854	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara	33 Orang / Bulan	3.291.665.630
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara	8 Dokumen	257.438.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara	8 Dokumen	264.386.450
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok			288.361.480	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok			267.977.517

	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	255.801.480	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	238.211.517
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	32.560.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	29.766.000
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok			172.330.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok			175.838.750
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	52.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	53.300.000
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 Paket	56.890.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 Paket	58.312.250
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6 Dokumen	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6 Dokumen	7.400.000
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	55.440.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	56.826.000

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sipirok			62.031.274	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sipirok			63.582.042
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.250.000
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	26.015.554	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	26.665.929
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	26.015.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	26.666.113
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sipirok			216.938.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sipirok			217.748.950
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	116.938.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sipirok	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	119.861.450
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	97.887.500

5,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Sipirok**			**99.364.700**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Sipirok**			**46.242.568**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sipirok			99.364.700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sipirok			46.242.568
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sipirok	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	99.364.700	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sipirok	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	46.242.568
6,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Sipirok**			**2.696.296.350**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Sipirok**			**2.758.642.771**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sipirok			22.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sipirok			22.550.000
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sipirok	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sipirok	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	22.550.000
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sipirok			2.674.296.350	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sipirok			2.736.092.771

	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sipirok	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	324.706.850	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Sipirok	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	332.948.700
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Sipirok	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	889.700.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Sipirok	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	906.736.833
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36 Ormas	1.459.889.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36 Ormas	1.496.407.238
7,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Sipirok**			**45.500.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Sipirok**			**46.637.500**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kecamatan Sipirok**			45.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sipirok			46.637.500
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	**Kecamatan Sipirok**	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	45.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Sipirok	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	46.637.500
	J U M L A H					**7.242.220.854**					**7.407.883.428**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri dalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Kecamatan Sipirok tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sipirok

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan Sipirok adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Pelaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya visi dan misi Bupati Tapanuli Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah satu kesatuan tata cara penyelengaaran Pemerintahan di Kecamatan yang meliputi Desa dan Kelurahan dan peningkatan pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Thema RKP Tahun 2025 yaitu : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 7 (tujuh) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transmisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Nilai Tukar Nelayan
5. Ratio Gini
6. Indeks pembangunan manusia
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pada Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dengan Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah khususnya pada Indikator Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B ke Atas SAKIP.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dengan indikator:
    1. Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan
    1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

Tabel. 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi		Target	
				2021	2022	2025	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	81,50	82,25	83,25	84

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

i. Faktor-Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan di dasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran Misi ke-4 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran pada Kecamatan Sipirok masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke-4 Kabupaten Tapanuli Selatan;
b. PencapaianTarget Indikator Kinerja Program yakni

ii. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 melaksanakan 7 (tujuh) program 12 (dua belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1

Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4	5
I	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Sipirok**	**27.400.000**	**DAU**
1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administarsi Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Sipirok**	**27.400.000**	**DAU**
a	Evaluasi dan Pengawasan Peratuaran Desa	Kecamatan Sipirok	27.400.000	DAU
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kecamatan Sipirok**	**132.500.000**	**DAU**
1	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan Sipirok**	**132.500.000**	**DAU**
a	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Kecamatan Sipirok)	Kecamatan Sipirok	75.500.000	DAU
b	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kecamatan Sipirok	57.000.000	DAU
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Kecamatan Sipirok**	**30.000.000**	**DAU**
1	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan Sipirok**	**30.000.000**	**DAU**
a	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kecamatan Sipirok	30.000.000	DAU
IV	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Sipirok**	**4.540.721.195**	**DAU**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Sipirok**	**6.850.000**	**DAU**
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sipirok	6.850.000	DAU
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Sipirok**	**3.882.960.455**	**DAU**
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sipirok	3.626.872.455	DAU
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Sipirok	256.088.000	DAU
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Sipirok**	**274.001.480**	**DAU**
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Sipirok	244.961.480	DAU

b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sipirok	29.040.000	DAU
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Sipirok**	**182.930.000**	**DAU**
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sipirok	52.000.000	DAU
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sipirok	68.270.000	DAU
c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Sipirok	7.220.000	DAU
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sipirok	55.440.000	DAU
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Sipirok**	**53.059.260**	**DAU**
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sipirok	10.000.000	DAU
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sipirok	19.643.540	DAU
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sipirok	23.415.720	DAU
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Sipirok**	**140.920.000**	**DAU**
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sipirok	45.420.000	DAU
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sipirok	95.500.000	DAU
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Sipirok**	**59.614.700**	**DAU**
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kecamatan Sipirok**	**59.614.700**	**DAU**
a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sipirok	59.614.700	DAU
VI	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Sipirok**	**3.445.308.800**	**DAU**
1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Sipirok**	**3.445.308.800**	**DAU**
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Bunga Bondar)	Kecamatan Sipirok	29.138.000	DAU
b	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Sipirok Godang)	Kecamatan Sipirok	29.138.000	DAU
c	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Parau Sorat)	Kecamatan Sipirok	29.138.000	DAU
d	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Pasar Sipirok)	Kecamatan Sipirok	29.138.000	DAU
e	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Baringin)	Kecamatan Sipirok		
f	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Hutasuhut)	Kecamatan Sipirok	29.138.000	DAU
g	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bunga Bondar)	Kecamatan Sipirok	356.000.000	DAU

h	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Baringin)	Kecamatan Sipirok	58.200.000	DAU
i	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Parau Sorat)	Kecamatan Sipirok	288.600.000	DAU
j	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Hutasuhut)	Kecamatan Sipirok	137.200.000	DAU
k	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sipirok Godang)	Kecamatan Sipirok	258.500.000	DAU
l	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pasar Sipirok)	Kecamatan Sipirok	193.700.000	DAU
m	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bunga Bondar)	Kecamatan Sipirok	146.059.200	DAU
n	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Hutasuhut)	Kecamatan Sipirok	344.918.400	DAU
o	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Baringin)	Kecamatan Sipirok	554.118.400	DAU
p	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pasar Sipirok)	Kecamatan Sipirok	353.588.800	DAU
q	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Parau Sorat)	Kecamatan Sipirok	325.748.000	DAU
r	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sipirok Godang)	Kecamatan Sipirok	253.848.000	DAU
VII	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Sipirok**	**78.000.000**	**DAU**
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Sipirok**	**78.000.000**	**DAU**
a	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Sipirok	78.000.000	DAU

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana KerjaKecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025 DAN PERAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja		PAGU INDIKATIF (Rp)
				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		KECAMATAN SIPIROK	**8.313.544.695,00**			**8.313.544.695,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**261.600.000,00**			**261.600.000,00**
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**175.500.000,00**			**175.500.000,00**
1,	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**27.400.000,00**			**27.400.000,00**
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27.400.000,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	27.400.000,00
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				
			27.400.000,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	27.400.000,00

2,	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**132.500.000,00**			**132.500.000,00**
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	132.500.000,00	Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	132.500.000,00
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				
			75.500.000,00	Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	75.500.000,00
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
			57.000.000,00	Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	57.000.000,00
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**30.000.000,00**			**30.000.000,00**
3,	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**30.000.000,00**			**30.000.000,00**
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	30.000.000,00

	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				
			30.000.000,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	30.000.000,00
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
	7.01	**KECAMATAN**	**8.021.944.695,00**			**8.021.944.695,00**
4,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.488.721.195,00**			**4.488.721.195,00**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.850.000,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	6.850.000,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			6.850.000,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	6.850.000,00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.626.872.455,00	Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	3.626.872.455,00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			3.626.872.455,00	Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	3.626.872.455,00

	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			256.088.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	256.088.000,00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	274.001.480,00	Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	274.001.480,00
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
			244.961.480,00	Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	244.961.480,00
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			29.040.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	29.040.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.930.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	182.930.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

			52.000.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	52.000.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			68.270.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	68.270.000,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
			7.220.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	7.220.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			55.440.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	55.440.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.059.260,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	53.059.260,00
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

			10.000.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	10.000.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			19.643.540,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	19.643.540,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			23.415.720,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	23.415.720,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.920.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	140.920.000,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
			45.420.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	45.420.000,00

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			95.500.000,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	95.500.000,00
5,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**59.614.700,00**			**59.614.700,00**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	59.614.700,00	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governanc e), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	59.614.700,00
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
			59.614.700,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	59.614.700,00
6,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.395.608.800,00**			**3.395.608.800,00**
	7.01.03.2.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	0,00
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				

			0,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	0,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.674.296.350,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	2.674.296.350,00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 6 Kelurahan se Kecamatan Sipirok				
			174.828.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	174.828.000,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di 6 Kelurahan se Kecamatan Sipirok				
			1.292.200.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	1.292.200.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di 6 Kelurahan seKecamatan Sipirok				

			1.978.280.800,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Peningkata n Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	1.978.280.800,00
7,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**78.000.000,00**			**78.000.000,00**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.000.000,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	78.000.000,00
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				
			78.000.000,00	Peningkatan Pelaksan aan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik (Good Governance), Inovasi Pelayanan Publik dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pem bangunan	-	78.000.000,00
	J U M L A H		**8.313.544.695,00**			**8.313.544.695,00**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun ke-lima dari Rencana Strategis Kecamatan Sipirok Tahun 2021-2026.

Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana Kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana Kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapakannya Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Sipirok, 27 Januari 2025
CAMAT SIPIROK



SAHRUDDIN PERWIRA, S.Sos., MM
Pembina Tingkat I
NIP.19721209 199803 1 002

RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
TAHUN 2026



DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026.

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah tahun 2026.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Sipirok, 22 September 2025
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN

Drs. ACHMAD RAJA NASUTION,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730619 199203 1 002

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 34
2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat..... 49

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 50
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 52
3.3 Program dan Kegiatan 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 60
4.1 Rencana Kerja 60

BAB V PENUTUP 80

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (R APBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Perencanaan Kinerja Tahun 2026 Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2025-2029. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah ini diharapkan dapat dipantau dan dievaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 - 2029, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi ketidaksesuaian ataupun penambahan program sesuai perubahan aturan dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b) yang bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi daerah Kabupaten.

1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap langkah/kegiatan operasi organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Selain dari pada itu perencanaan juga menjadi pedoman untuk keberhasilan dari kegiatan yang

dilaksanakan. Oleh karena itu perencanaan harus disusun secara cermat dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini dan perkiraan kondisi yang akan datang sehingga perencanaan tidak saja mampu menjawab permasalahan saat ini akan tetapi juga mampu menjawab permasalahan kedepan.

Dalam kehidupan organisasi bernegara, perencanaan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/ pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan.

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya diperbuat Rencana kinerja setiap tahun sebagai arah untuk melaksanakan kegiatan dengan target yang akan dicapai dengan memperhatikan kondisi Sumber daya yang dimiliki untuk dapat dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dengan kewenangan otonomi Daerah yang mengacu kepada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang – kadang tidak terduga. Dalam upaya menanggulangi masalah Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terutama masalah ketenagakerjaan yang semakin kompleks serta lahan transmigrasi yang sering dipermasalahkan warga, dalam menghadapi tantangan dimaksud, juga telah ditata kembali organisasi dan sistem kerjanya.

Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk dengan mengingat Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan uraian, tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di daerah sangat berbeda, ini ditentukan oleh hal-hal yang menjadi karakteristik daerah tersebut. Perbedaan selalu ada pada setiap daerah baik perbedaan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam (dalam hal ini potensi daerah). Perbedaan ini menuntut Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menyusun rencana pembangunan daerah bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 dilakukan berlandaskan pada :

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);

13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);

16) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1144);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1781);

20) Surat Edaran Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

21) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumtera Utara Tahun 2025 – 2045 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);

22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor .... Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumtera Utara Tahun 2025 – 2049 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor .....);

23) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun 2006 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan seri E);

24) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 290, tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

25) Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

26) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 105 Tahun 2021 tentang Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

27) Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 51);

28) Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 332, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 52);

29) Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

a. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
b. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh bidang-bidang di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN LALU
- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketenagakerjaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan
- 2.4 Riview terhadap Ranwal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Daerah Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketenagakerjaan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Program dan kegiatan pembangunan oleh Dinas Ketenagakerjaan Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2024 telah mencapai target yang ditetapkan tetapi belum maksimal, hal ini disebabkan sangat minimnya anggaran.

Tahun Anggaran 2024 Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.589.026.989,00.

Dengan realisasi sebesar Rp. 9.895.899.100,00 atau 93,45%. Berarti hampir keseluruhan fisik dan keuangan kegiatan hampir terealisasi, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala dan hambatan.

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN	Jumlah Dana DPA (Rp.)	Realisasi s/d Bulan ini			Ket
			Fisik	Keuangan		
			%	(Rp.)	%	
1	2	5	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4,452,178,519.00**	**95.70**	**4,260,810,003.00**	**95.70**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**44,256,500.00**	**76.35**	**33,791,500.00**	**76.35**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,256,500.00	76.35	33,791,500.00	76.35	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2,562,619,087.00**	**100.00**	**2,472,428,486.00**	**96.48**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,521,812,787.00	100.00	2,452,578,486.00	97.25	
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	40,806,300.00	48.64	19,850,000.00	48.64	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**51,250,000.00**	**70.00**	**35,000,000.00**	**68.29**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51,250,000.00	70.00	35,000,000.00	68.29	
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**546,447,300.00**	**93.79**	**512,497,266.00**	**93.79**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20,441,000.00	94.15	19,244,900.00	94.15	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,529,400.00	96.92	19,896,300.00	96.92	

NO	PROGRAM KEGIATAN	Jumlah Dana DPA (Rp.)	Realisasi s/d Bulan ini			Ket
			Fisik	Keuangan		
			%	(Rp.)	%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58,675,800.00	88.71	49,117,100.00	83.71	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,807,100.00	68.63	21,144,000.00	68.63	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	100.00	19,560,000.00	97.80	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395,994,000.00	96.85	383,534,966.00	96.85	
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**494,378,000.00**	**100.00**	**492,178,000.00**	**99.55**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya	494,378,000.00	100.00	492,178,000.00	99.55	
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**564,820,832.00**	**100.00**	**545,111,171.00**	**96.51**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79,250,096.00	100.00	62,945,693.00	79.43	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	485,570,736.00	100.00	482,165,478.00	99.30	
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**188,406,800.00**	**100.00**	**169,803,580.00**	**90.13**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188,406,800.00	100.00	169,803,580.00	90.13	
3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**2,049,758,120.00**	**85.70**	**1,756,676,735.00**	**85.70**	
3.1	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi**	**2,049,758,120.00**	**85.70**	**1,756,676,735.00**	**85.70**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	870,358,900.00	68.09	592,666,800.00	68.09	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	1,179,399,220.00	100.00	1,164,009,935.00	98.70	
4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**294,616,900.00**	**91.61**	**269,904,006.00**	**91.61**	

NO	PROGRAM KEGIATAN	Jumlah Dana DPA (Rp.)	Realisasi s/d Bulan ini			Ket
			Fisik	Keuangan		
			%	(Rp.)	%	
4.1	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**67,445,700.00**	66.85	**45,085,200.00**	**66.85**	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	67,445,700.00	66.85	45,085,200.00	66.85	
4.2	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/ Kota**	**227,171,200.00**	100.00	**224,818,806.00**	**98.96**	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	227,171,200.00	100.00	224,818,806.00	98.96	
5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**3,698,679,550.00**	**95.74**	**3,540,989,956.00**	**95.74**	
5.1	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**3,477,477,900.00**	97.49	**3,390,283,239.00**	**97.49**	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	3,477,477,900.00	100.00	3,390,283,239.00	97.49	
		-		-		
5.2	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota**	**221,201,650.00**	**68.13**	**150,706,717.00**	**68.13**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	20,002,350.00	62.40	12,480,500.00	62.40	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	65,160,300.00	80.60	52,516,200.00	80.60	

NO	PROGRAM KEGIATAN	Jumlah Dana DPA (Rp.)	Realisasi s/d Bulan ini			Ket
			Fisik	Keuangan		
			%	(Rp.)	%	
	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Sererikat Buruh serta Non Afiliasi	62,490,100.00	67.57	42,225,617.00	67.57	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	73,548,900.00	59.12	43,484,400.00	59.12	
6	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**93,793,900.00**	**71.99**	**67,518,400.00**	**71.99**	
6.1	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**93,793,900.00**	**71.99**	**67,518,400.00**	**71.99**	
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	93,793,900.00	71.99	67,518,400.00	71.99	
		10,589,026,989	**93.45**	**9,895,899,100**	**93.45**	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 105 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai bagian yang Integral dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan akan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatansesuai Renstra 2025-2029 yaitu **”Tapanuli Selatan Yang Maju Berkarakter**

Unggul Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2025"

Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan bidang yang kompleksitas karena berkaitan langsung dengan tenaga kerja dan transmigrasi yang nota benenya adalah manusia mandiri yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai individu dan makhluk sosial. Ketidakseimbangan lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari tenaga kerja akan menimbulkan permasalahan lain yang sifatnya dapat meluas dan keluar dari kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Oleh karena itu koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Secara umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan, hubungan industrial dan ketransmigrasian di daerah. Indikator umum untuk keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adanya tingkat kepuasan pada dasarnya sehingga tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran.

Tabel 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Orang)	%
1	Bekerja	165.043	96,59
2	Pengangguran terbuka usia angkatan kerja	5.835	3,41
3	Angkatan Kerja	170.878	

Tabel 2.3
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pencari kerja yang ditempatkan	166
2	Pencari kerja terdaftar	191
3	Persentase	86,91

Sumber Daya Dinas Ketenagakerjaan

Keberhasilan program Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlepas dari sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber daya Dinas ketenagakerjaan harus memenuhi jumlah, mutu dan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan kesejahteraaan ketenagakerjaan di Kabupaten

Tapanuli Selatan. Kegiatan dalam sumber daya di Dinas Ketenagakerjaan dapat berupa perencanaan, kebutuhan tenaga (petugas) peningkatan kemamapuan profesionalime melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan tenaga Dinas Ketenagakerjaan.

Jumlah sumber daya di Dinas Ketenagakerjaan belum memadai terutama SDM nya masih minim dan jumlah pegawai masih kurang. Adapun jumlah pegawai Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4

DAFTAR NAMA PEGAWAI

DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	JK		PANGKAT		MASA KERJA		JABATAN		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR		
		BARU	L	P	GOL	TMT	THN	BLN	NAMA	TMT	NAMA	BLN DAN TAHUN	JAM	NAMA	BULAN DAN TAHUN	TK IZAJAH
1	Drs. ACHMAD RAJA NASUTION,M.Si	197306191992031002	1	-	IV/c	01-04-2020	23	03	Kepala Dinas	19-09-2022	DIKLAT PIM TK.III	10-07-2010	360	Magister Sains	09-12-2004	S2
2	MUSMULIADI, S.Sos	197608061996021001	1	-	VI/b	01-04-2024	23	02	Sekretaris Dinas	24-08-2023	-	-	-	Sarjana Sosial	-	S1
3	RUDY PRIBADY,SH	197904222005021002	1	-	IV/a	01-04-2020	11	02	Kepala Bidang Hubungan Industrial	09-01-2017	DIKLAT PIM TK. IV,III	April 2011, 2018	-	Sarjana Ilmu Hukum	17-05-2003	S1
4	ALI ARMAWI,S.Sos	196908271995031001	1	-	IV/a				Fungsional Umum Ketenagakerjaan	11-11-2019	-	-	-	Sarjana Sosial	-	S1
5	BAKTIAR,S.Sos	197105021992031006	1	-	IV.a	01-04-2024	27	01	Kepala Bidang Bina Ketenagakerjaan	24-01-2022				Sarjana Sosial	03-07-1998	S1
6	DAHLIANA HARAHAP,SH	197105061991032001	-	1	III/d	01-04-2015	19	01	JF Pengantar Kerja	03-01-2020	-	-	-	Sarjana Hukum	19-12-2003	S1
7	SURIANI,SE	196902071995032001	-	1	III/d	01-10-2017	20	07	JF Pengantar Kerja	30-12-2021	-	-	-	Sarjana Ekonomi Manajemen	25-04-2005	S1
8	MAIMUNAH N POHAN,SP	198007122006042016	-	1	III/d	01-10-2017	13	00	JF Perencana	30-12-2021	-	-	-	Sarjana Pertanian	02-10-2003	S1
9	JUKHRI DIAPARI, SP	198103282011011006	1	-	III/d	01-04-2022	07	03	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	10-01-2017	-	-	-	Sarjana Pertanian	24-02-2006	S1
10	BATARA MULYA HARAHAP, ST	198111022010011006	1	-	III/d	01-04-2022	08	03	JF Penggerak Swadaya Masyarakat	30-12-2021	-	-	-	Sarjana Teknik	31-03-2009	S1

NO	NAMA	NIP	JK		PANGKAT		MASA KERJA		JABATAN		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR		
		BARU	L	P	GOL	TMT	THN	BLN	NAMA	TMT	NAMA	BLN DAN TAHUN	JAM	NAMA	BULAN DAN TAHUN	TK IZAJAH
11	AMIRUDDIN SIREGAR,SE	197407151998011001	1	-	III/d	01-04-2024	21	03	JF Penggerak Swadaya Masyarakat	30-12-2021	-	-	-	Sarjana Ekonomi	25-06-2007	S1
12	M. HASAN P. H DALIMUNTHE	197307122003121006	1	-	III/c	01-10-2020	15	10	Fungsional Umum	27-12-2022	-	-	-	Politeknik UI	13-10-1995	D3
13	MINA SONITA HUTASOIT,STP,M.Si	198604192011012012	-	1	III/d	01-08-2024	13	07	Ka. UPTD BLK	22-12-2022	-	-	-	Magister Sains	17-10-2017	S2
14	KASNEN	197402122007011004	1	-	III/c	01-10-2020	19	03	KTU UPTD BLK	22-12-2022	-	-	-	Sarjana Ekonomi	29-11-2015	S1
15	PATIMA ROSDELILA, SE	197408022007012003	-	1	III/b	01-10-2021	19	04	JF Mediator Hubungan Industrial	23-05-2022		-	-	Sarjana Ekonomi	04-04-2017	S1
16	LISNI	197308042003122003	-	1	III/b	01-04-2024	15	04	Fungsional Umum Ketenagakerjaan	30-12-2016	-	-	-	SLTA	29-05-1993	SLTA
17	NIRWANA JULIAN ROMAITO RITONGA, SE	198607282012122002	-	1	III/b	01-10-2024	07	09	Bendahara Pengeluaran	22-12-2020	-	-	-	Sarjana Ekonomi	06/-05-2017	S1
18	SUGITO	198412082007011002	1	-	III/a	01-10-2021	11	04	Fungsional Umum Ketenagakerjaan	30-12-2016	-	-	-	Sarjana Ekonomi	22-07-2021	S1
19	ELMI SARI HARAHAP	197205152008012004	-	1	III/a	01-04-2024	15	02	Fungsional Umum Ketenagakerjaan	30-12-2016	-	-	-	SLTA	17-05-1991	SLTA
20	ABDULLAH AL AMIN HASIBUAN	197903282006041008	1	-	II/d	01-10-2019	17	06	Fungsional Umum Ketenagakerjaan	06-03-2018	-	-	-	SMEA	03-06-1997	SLTA
21	IRMA WANTIRI RAMBE	198403312009042003	-	1	II/d	01-042021	17	03	Fungsional Umum Ketenagakerjaan	12-01-2018	-	-	-	MA	05-06-2003	MA
22	RAJALI MARNANDA NADEAK,S.Sos	199512112025041004	1	-	III/a	01-04-2025	0	0	Mediator Hubungan Industrial	02-06-2025	-	-	-	Sarjana Sosial		S1
23	NABILA,SE	200008132025042002	-	1	III/a	01-04-2025	0	0	Mediator Hubungan Industrial	02-06-2025	-	-	-	Sarjana Ekonomi		S1
24	RICCA ADELINA SIAGIAN,A.Md	198703092025212025	-	1	VII	01-04-2025	0	0	Pengelola Layanan Operasional	03-07-2025	-	-	-	Administrasi		D3
25	NIKMAH ANNUR LUBIS	198912282025212027	-	1	V	01-04-2025	0	0	Operator Layanan Operasional	03-07-2025	-	-	-	SMK		SMK
26	RUDI RAHMAT SIREGAR	198806082025211038	1	-	V	01-04-2025	0	0	Operator Layanan Operasional	03-07-2025	-	-	-	SMK		SMK

NO	NAMA	NIP	JK		PANGKAT		MASA KERJA		JABATAN		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR		
		BARU	L	P	GOL	TMT	THN	BLN	NAMA	TMT	NAMA	BLN DAN TAHUN	JAM	NAMA	BULAN DAN TAHUN	TK IZAJAH
27	YANATOR SINAGA	199210112025211033	1	-	V	01-04-2025	0	0	Pengadministrasian Perkantoran	03-07-2025	-	-	-	SLTA		SLTA
28	MUHAMMAD IHSAN	199002022025211020	1	-	V	01-04-2025	0	0	Pengadministrasian Perkantoran	03-07-2025	-	-	-	SLTA		SLTA
29	EDO MARTUA SIREGAR,SE	199703312025211023	1	-	IX	01-09-2025	0	0	Pengelola Layanan Operasional	01-10-2025	-	-	-	Sarjana Ekonomi		S1
30	LUSMI OKTARIA,SE	198710052025212016	-	1	IX	01-09-2025	0	0	Pengelola Layanan Operasional	01-10-2025	-	-	-	Sarjana Ekonomi		S1
31	AMELIA SIREGAR,SE	199412122025212072	-	1	IX	01-09-2025	0	0	Pengelola Layanan Operasional	01-10-2025	-	-	-	Sarjana Ekonomi		S1
32	MUHAMMAD RIVAI SIREGAR,SE	200001162025211017	1	-	IX	01-09-2025	0	0	Pengelola Layanan Operasional	01-10-2025	-	-	-	Sarjana Ekonomi		S1
33	JUWITA AMELIA DAULAY,SM	199707162025211017	-	1	IX	01-09-2025	0	0	Pengelola Layanan Operasional	01-10-2025	-	-	-	Sarjana Manajemen		S1
34	ARDIANSYAH PUTRA HALOMOAN HARAHAP,S.Sos	199711172025211025	1	-	IX	01-09-2025	0	0	Pengelola Layanan Operasional	01-10-2025	-	-	-	Sarjana Sosial		S1
35	QORI HUMAIDI RITONGA	199708152025211018	1	-	V	01-09-2025	0	0	Operator Layanan Operasional	01-10-2025	-	-	-	MA		MA
36	PERI SUSANTO	198606082025211047	1	-	V	01-09-2025	0	0	Operator Layanan Operasional	01-10-2025	-	-	-	SMK		SMK
37	ROSMINTA SARI SIREGAR	199512252025212056	-	1	V	01-09-2025	0	0	Pengadministrasian Perkantoran	01-10-2025	-	-	-	MA		MA
38	FEBRINA SARI S	198802142025212052	-	1	V	01-09-2025	0	0	Pengadministrasian Perkantoran	01-10-2025	-	-	-	SLTA		SLTA
39	ISMAIL SIREGAR	198604152025211051	1	-	V	01-09-2025	0	0	Pengadministrasian Perkantoran	01-10-2025	-	-	-	SLTA		SLTA
40	NOVA LISTINA HASIBUAN	199311122025212052	-	1	V	01-09-2025	0	0	Pengadministrasian Perkantoran	01-10-2025	-	-	-	SLTA		SLTA
TOTAL			**#**	**#**						**40 Orang**						

Sumber data : Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Jumlah pegawai di Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 40 orang, terdiri dari 21 orang PNS, 2 orang CPNS dan 17 orang P3K, dari jumlah tersebut belum memenuhi dalam analisis jabatan, dimana masih ada beberapa seksi yang kosong disebabkan karena pensiun, hal ini menyebabkan tugas dan fungsi Dinas tidak berjalan dengan baik. Jenjang pendidikan merupakan tolak ukur kinerja yang dihasilkan. Minimnya SDM di Dinas Ketenagakerjaan menyebabkan kinerja tidak maksimal. Dalam hal ini perlunya pelatihan di bidang Ketenagakerjaan sehingga pegawai memahami tugas dan fungsi masing – masing. Diharapkan adanya penerimaan CPNS tahun 2024 sehingga kebutuhan pegawai terpernuhi sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah instruktur hanya 1 orang, minimnya pegawai instruktur di Balai Latihan Kerja yang memiliki sertifikat sehingga saat mengadakan pelatihan mencari instruktur dari luar. Dalam hal ini perlunya PNS di Dinas Ketenagakerjaan mengikuti Diklat Instruktur.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting untuk kelancaran seluruh aktifitas pelaksana kegiatan baik administratif maupun operasional. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Aset Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2024

NO	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG	KET.
1	01		TANAH	3	1,206,910,000.00	
		01.01	Tanah	3	1,206,910,000.00	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	267	7,339,235,673.00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	5	14,022.490.159.00	
		03.11	Bangunan Gedung	5	14,002,490,159.00	
		03.12	Bangunan Monumen	0	-	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0	-	
		04.13	Jalan dan Jembatan	0	-	
		04.14	Bangunan Air/ Irigasi	0	-	
		04.15	Instalasi	0	-	
		04.16	Jaringan	0	-	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	0	-	
		05.17	Buku Perpustakaan	0	-	
		05.18	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	-	
		05.19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	-	
6	06		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	-	
		06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	-	
				275	22,602,635,832.00	

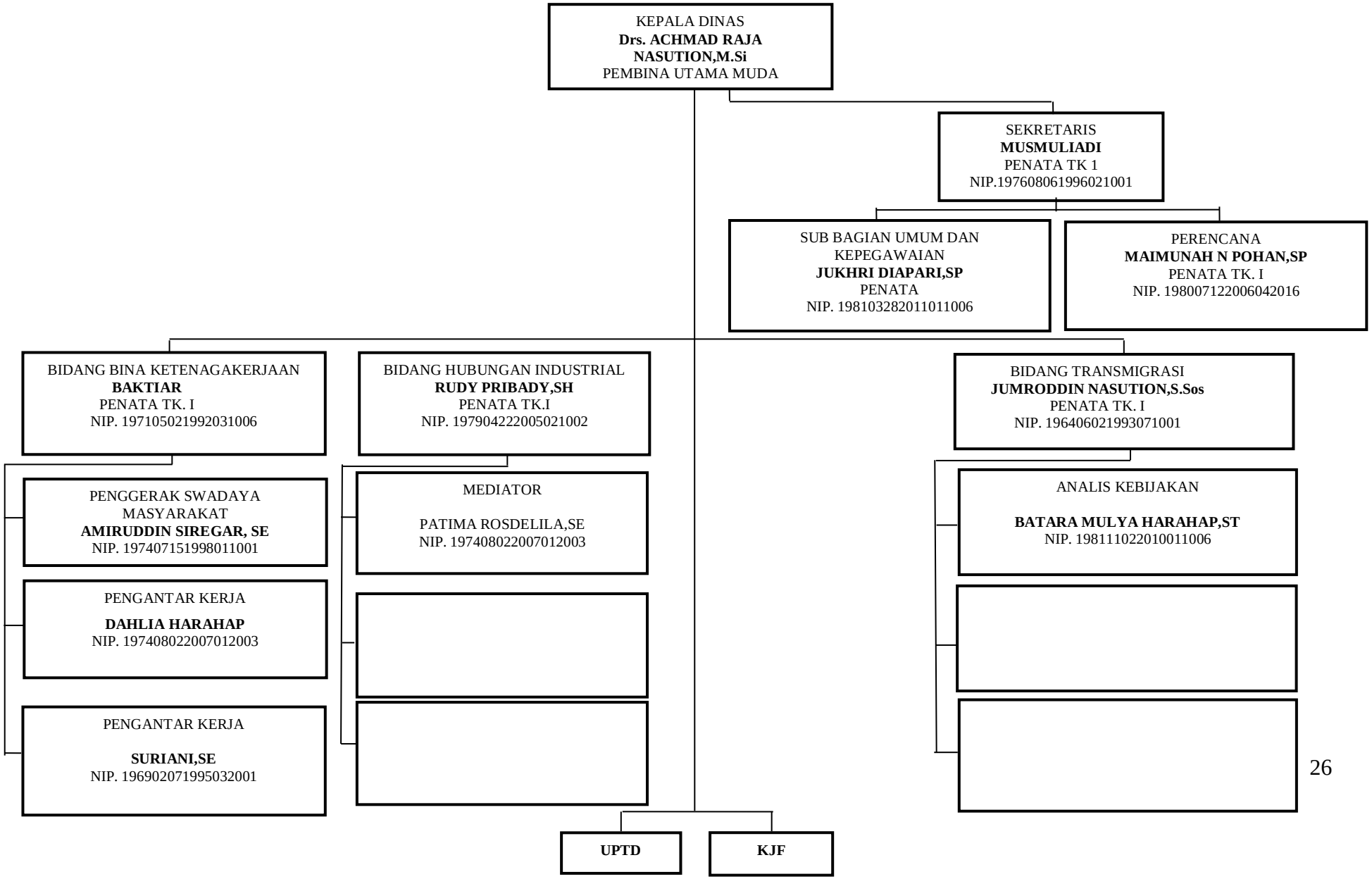
Dinas Ketenagakerjaan memiliki mobil sebanyak 10 unit, yang terdiri dari kondisi baik 6 unit, kondisi rusak berat 4 unit. Bila dibandingkan dengan jumlah personil (pejabat) Eselon III dengan ketersediaan kendaraan dinas roda empat dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan roda empat sudah mencukupi untuk menunjang kelancaran tugas-tugas di bidang ketenagakerjaan.

Ditinjau dari aset yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan, pada bidang Ketenagakerjaan kendaraan dinas roda dua, terdiri dari 13 unit, 2 unit kondisi baik dan 11 unit kondisi berat, hal ini sangat tidak menunjang kelancaran tugas-tugas rutin di Dinas Ketenagakerjaan.

Dinas Ketanagakerjaan memiliki dua gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yaitu BLK Siharang – karang dan BLK Aek Latong. BLK Siharang-karang memiliki peralatan perbengkelan, listrik, menjahit, bangunan dan otomotif, namun fungsinya belum efektif karena kondisi rusak. BLK Aek Latong peralatan belum tersedia.

Prasarana dan sarana yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) Siharang-harang masih banyak yang belum diperbaiki berhubung aset BLK dihibahkan ke Kabupaten sejak tahun 2017. Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah muali merenovasi yang ada di BLK sejak tahun 2017 yaitu gedung workshop sepeda motor, aula, ruang belajar, kantor Kepala UPT, pos jaga, pagar, gapura dan plank merek. Untuk tahun 2020 Dinas sudah mulai membenahi peralatan perbengkelan dan pengadaan mobiler.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



Secara umum Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah. Indikator umum untuk keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adanya tingkat kepuasan pada dasarnya sehingga tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran.

Jika dilihat Tabel 2.13 **(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)** di bawah, hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaaan Dareh Kabupaten Tapnuli Selatan menunjukkan keberhasilan pencapaian dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang ada sangat mendukung dalam pencapain kinerja yang ditetapkan di Dinas Ketenagakerjaan.

Tabel 2.6

(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	Indikator	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah (%)	32.78	30.77	33.86	33.33	34.27	29.63	35.57	32.14	36.89	37.18	
2	Jumlah pencari Kerja yang Dilatih dan Bekerja (Orang)	240	160	256	286	272	144	288	100	304	320	
3	Persentase Tenaga Kerja yang Bersetifikat Kompetensi (%)	18.25	17.81	18.83	16.93	19.15	18.02	19.76	22.07	21.36	22.35	
4	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (%)	67.66	69.20	68.45	70.24	69.23	68.02	70.48	64.69	71.38	72.64	
5	Persentase Pencari Kerja yang diTempatkan (%)	42.89	51.01	48.45	59.36	54.01	70.20	59.57	86.91	62.28	64.37	
6	Persentase Pengangguran	4.28	4.00	4.33	3.65	4.27	3.49	4.19	3.41	4.10	4.00	

NO	Indikator	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)
	Terbuka (%)											
7	Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja (%)	12.19	16.87	10.81	6.17	9.42	7.53	8.03	9.78	6.65	5.26	
8	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)	13.67	12.5	14.24	7.41	14.86	10.75	15.37	8.69	15.69	16.48	
9	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

1. Pencari Kerja Yang Ditempatkan

   Target kinerja pencari kerja yang ditempatkan sebesar 59,57% realisasi sebesar 86,91% dengan rumusan jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dengan jumlah Pencari Kerja yang mendaftar dikali 100%. Capaian yang diperoleh adalah sebesar 145,89%. Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan upaya untuk meningkatkan pencapaian pencari kerja melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja. Kegiatan ini ditujukan kepada pencari kerja dari kelompok penganggur lulusan SLTA dan Perguruan Tinggi agar siap pakai dalam memasuki dunia kerja melalui pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja.

2. Persentase Pengangguran Terbuka

   Realisasi kinerja Persentase Pengangguran Terbuka tahun 2024 sebesar 3,41 % dengan rumusan Jumlah pengangur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100% dengan taget sebesar 4,19%. Dari data tersebut Dinas Ketenagakerjaan memiliki tugas yang besar untuk menurunkan pengganguran dalam hal ini Dinas telah menurunkan pengangguran sebesar 3,41 persen.

3. Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi

   Target tahun 2024 19,76 persen, realisasi 22,07 persen dengan rumusan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi dengan jumlah Tenaga kerja dikali 100% sehingga diperoleh capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 111,69%.

4. Persentase sengketa pengusaha-pekerja.

   Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan upaya untuk mengurangi sengketa pengusaha-pekerja adapun program/kegiatan yang dilaksanakan adalah : Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kegiatan Penetapan UMK/UMKS Dewan Pengupahan Kabupaten Pembinaan dan Pemberdayaan Hubungan Industrial. Persentase sengketa pengusaha Tahun 2024 target sebesar 8,03 % dan realisasi sebesar 19,76%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Setiap aktivitas atau kegiatan organisasi selalu ditemukan permasalahan baik permasalahan yang bersumber dari internal maupun yang bersumber dari eksternal organisasi. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran dari faktor internal organiasasi Dinas Ketenagakerjaan adalah :

1. Sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja belum memadai.
2. Pengetahuan dan Keterampilan Tenaga Instruktur belum sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat.
3. Minimnya jumlah pegawai sehingga tidak sebanding dengan beban kerja.
4. Minimnya sumber dana dalam hal pelaksanaan kegiatan mengakibatkan tidak banyak output yang dihasilkan.
5. Kualitas Sumber daya manusia (aparatur) untuk tingkat pelaksana masih kurang.
6. Tenaga fungsional seperti pengantar kerja, mediator dan instruktur yang kurang memadai bahkan belum tersedia.

7. Belum Optimalnya kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG)
8. Sebagian penempatan pejabat/staf kurang tepat pada tempat yang di duduki.

Dari Faktor Ekternal organisasi Dinas Ketenagakerjaan adalah :

a. Jumlah pencari kerja lebih banyak dibanding kesempatan kerja yang tersedia
b. Terbatasnya lapangan kerja formal (sebagian besar pekerja masih berada di sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil atau jasa non formal)
c. Keterampilan/ Kompetensi angkatan kerja laki – laki dan perempuan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
d. Konflik antara pekerja dan pengusaha terkait upah, PHK dan hak – hak normative masih sering terjadi
e. Kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan, Balai Latihan Kerja, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), Perguruan Tinggi, Lembaga Sertifikasi belum berjalan efektif
f. Perlunya dukungan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan program kegiatan transmigrasi di daerah

Langkah-langkah yang diambil dalam menangani permasalahan di atas.

Dalam upaya penanganan hambatan yang terjadi, langkah yang diambil oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi angkatan kerja melalui pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan kebutuhan industry lokal
2. Revitalisasi Balai Latihan Kerja dengan instruktur bersertifikat dan peralatan modern

3. Peningkatan kemitraan Balai latihan Kerja – Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) agar lulusan pelatihan terserap langsung ke dunia kerja
4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial bagi pengusaha dan pekerja di perusahaan.
5. Pemberdayaan wirausaha muda dan perempuan melalui pelatihan dan akses permodalan
6. Meningkatkan kerjasama melalui dana sharing dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
7. Membuka akses informasi pasar kerja.
8. Mengoptimalkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di OPD

Isu Strategis

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029, hasil analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi dari ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut :

1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Belum terjalinnya kerjasama antara dinas ketenagakerjaan dengan dunia usaha untuk penerimaan tenaga kerja;
3. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
4. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
5. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.

1.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Ketenagakerjaan Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Ketenagakerjaan Daerah berdasarkan RKPD.

RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah pada urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Pada Tabel 2.15 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) ini, diperlukan:

1. Perbaikan indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;
2. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tapsel	Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (%)	100.00	5,598,046,923	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tapsel	Cakupan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (%)	100.00	5,598,046,923	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapsel	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	6	35,407,800	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tapsel	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	12	35,407,800	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordiinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	35,407,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordiinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	35,407,800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Tapsel**	**Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN (Orang)**	**40**	**4,889,097,023**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tapsel**	**Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN (Orang)**	**40**	**4,889,097,023**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapsel	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	264	4,889,097,023	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapsel	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	1	4,889,097,023	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapsel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapsel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Tapsel**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)**	**2**	**38,250,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Tapsel**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)**	**12**	**38,250,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	28,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	28,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	10,250,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapsel	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	10,250,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Tapsel**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (Bulan)**	**12**	**358,719,600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tapsel**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (Bulan)**	**12**	**358,719,600**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listruk/ Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20,596,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listruk/ Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20,596,800	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	17,742,800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	17,742,800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	54,286,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	54,286,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	17,634,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapsel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	17,634,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Tapsel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	20,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Tapsel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	20,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	228,460,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	228,460,000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tapsel	**Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)**	**40**	**22,666,500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Tapsel	**Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)**	**40**	**22,666,500**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapsel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	22,666,500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapsel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	40	22,666,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Tapsel**	**Tersedianya jasa penunjang OPD (Bulan)**	**12**	**127,726,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tapsel**	**Tersedianya jasa penunjang OPD (Bulan)**	**12**	**127,726,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Paket)	1	81,856,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Paket)	1	81,856,000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	45,870,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapsel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	45,870,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Tapsel**	**Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (Unit)**	**3**	**126,180,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tapsel**	**Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (Unit)**	**3**	**126,180,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapsel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	126,180,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapsel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	126,180,000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Kab. Tapsel**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifkat Kompetensi	**22,51**	**388,075,800**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kab. Tapsel**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifkat Kompetensi	**22,51**	**388,075,800**	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
			Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bekerja	120.00				Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bekerja	120.00		
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	71,81				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	71,81		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Kab. Tapsel**	**Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi (Orang)**	**144**	**346,662,100**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kab. Tapsel**	**Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi (Orang)**	**144**	**346,662,100**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tapsel	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	176	179,892,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Tapsel	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	144	179,892,000	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	36	166,770,100	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	35	166,770,100	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Tapsel**			**41,413,700**					**41,413,700**	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Tapsel	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di kabupaten	1	41,413,700	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Tapsel	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di kabupaten	1	41,413,700	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Tapsel	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**3,34**	**26,696,800**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Kab. Tapsel	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**3,34**	**26,696,800**	
			Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	**88,65**				Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	**88,65**		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Tapsel	**Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja (Orang)**	**60**	**26,696,800**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Kab. Tapsel	**Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja (Orang)**	**60**	**26,696,800**	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kwerja Online	Kab. Tapsel	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja online melalui sistem online (karir hub)	150	26,696,800	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kwerja Online	Kab. Tapsel	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja online melalui sistem online (karir hub)	50	26,696,800	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	**Terlaksananya pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota (Orang)**	**0**	**0**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Tapsel	**Terlaksananya pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota (Orang)**	**0**	**0**	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Tapsel	Junlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkankan kompetensinya	0	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Tapsel	Junlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkankan kompetensinya	0	0	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Tapsel	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktut skala upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	**8,86**	**3,279,249,900**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Kab. Tapsel	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktut skala upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	**8,86**	**3,279,249,900**	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
			Angka sengketa pengusaha-pekerja	9,59				Angka sengketa pengusaha-pekerja	9,59		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	Laporan hasil survey kebutuhan hidup layak dan usulan penetapan UMK/ UMKS (Laporan)	**2**	**3,146,346,500**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Tapsel	Laporan hasil survey kebutuhan hidup layak dan usulan penetapan UMK/ UMKS (Laporan)	**2**	**3,146,346,500**	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Tapsel	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1	3,146,346,500	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Tapsel	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	2	3,146,346,500	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	**Jumlah Perselisihan hubungan Industrial, mogok kerjadan penutupan perusahaan yang di Proses (Kasus)**	**10**	**132,903,400**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Tapsel	**Jumlah Perselisihan hubungan Industrial, mogok kerjadan penutupan perusahaan yang di Proses (Kasus)**	**10**	**132,903,400**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	Jumlah pwrselisihan yang dicegah (perkara)	20	24,248,100					24,248,100	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan (perkara)	10	35,988,600	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	Jumlah Perselisihan hubungan Industrial, mogok kerjadan penutupan perusahaan yang di Proses (Kasus)	10	35,988,600	
	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi	Kab. Tapsel	Laporan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi (Laporan)	1	33,981,000	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi	Kab. Tapsel	Laporan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi (Laporan)	1	33,981,000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	Laporan pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit (Laporan)	1	38,685,700	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapsel	Laporan pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit (Laporan)	1	38,685,700	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2026					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana**	**Catatan Penting**
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Tapsel			**41,216,100**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Kab. Tapsel			**41,216,100**	
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Tapsel	**Laporan Identifikasi kepemilikan lahan untuk calon lokasi transmigrasi (laporan)**	**1**	**41,216,100**	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	Kab. Tapsel	**Laporan Identifikasi kepemilikan lahan untuk calon lokasi transmigrasi (laporan)**	**1**	**41,216,100**	
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Tapsel	Terlaksananya survey calon lahan permukiman transmigrasi baru (kawasan)	1	41,216,100	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Tapsel	Terlaksananya survey calon lahan permukiman transmigrasi baru (kawasan)	1	41,216,100	
					9,333,285,523					**9,333,285,523**	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Anggaran 2025, terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat sesuai dari hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan yang telah diakomodir lewat eplanning Kabupaten Tapanuli Selatan yang berbasis online dan sudah di bahas pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten. Program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Daerah (usulan dari kecamatan data terlampir). Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
2. Pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi
3. usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
4. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan
5. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan merupakan arah dan pedoman pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengembangkan tenaga kerja agar produktif, kompeten, dan sejahtera. Kebijakan ini mengacu pada berbagai regulasi dan dokumen perencanaan nasional, seperti RPJPN, RPJMN, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**,** serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah menetapkan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional dengan tujuan:

1. Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing global;
2. Meningkatkan kesempatan kerja yang layak dan berkeadilan;
3. Memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan;
4. Menjamin perlindungan tenaga kerja, termasuk pekerja migran Indonesia;
5. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik ketenagakerjaan berbasis digital.

Kebijakan ketenagakerjaan nasional diarahkan pada penciptaan tenaga kerja kompeten dan penciptaan lapangan kerja produktif melalui strategi berikut:

a. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Penguatan link and match antara pelatihan dan kebutuhan industri.

- Peningkatan sertifikasi kompetensi kerja melalui BNSP dan LSP.
- Penguatan BLK (Balai Latihan Kerja) modern dan BLK komunitas.

b. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengurangan Pengangguran

- Penciptaan lapangan kerja baru di sektor padat karya, industri kreatif, dan ekonomi digital.
- Pengembangan kewirausahaan dan UMKM berbasis inovasi dan teknologi.
- Fasilitasi penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri (PMI).
- Pemberdayaan angkatan kerja muda dan perempuan.

c. Penguatan Hubungan Industrial dan Perlindungan Pekerja

- Penguatan sistem hubungan industrial tripartit (pemerintah–pengusaha–pekerja).
- Penegakan peraturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- Perlindungan upah layak dan jaminan sosial tenaga kerja.
- Pencegahan dan penanganan perselisihan hubungan industrial.

d. Modernisasi Layanan Ketenagakerjaan

- Digitalisasi layanan ketenagakerjaan melalui sistem KarirHub, Sisnaker, dan aplikasi layanan PMI.
- Integrasi data tenaga kerja nasional (profil kompetensi dan penempatan).
- Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan berbasis teknologi.

e. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

- Peningkatan pelatihan dan sertifikasi pra-penempatan.
- Penguatan sistem penempatan yang aman, legal, dan bermartabat.
- Jaminan perlindungan hukum dan sosial bagi PMI dan keluarganya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan yang ditetapkan adalah untuk memberi batasan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari Misi yang telah digariskan. Tujuan ini merupakan suatu target yang ingin dicapai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 antara lain :

- Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2026 adalah :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah.
2. Memperluas kesempatan kerja.
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

NO	Uraian		Indikator	Satuan	Indikator Kinerja
					2026
1	Tujuan	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	%	73,24
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	67,75

2	Sasaran	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Daerah	Persentase tenaga kerja yang Bersertifikat Kompetensi	%	22,96
		Memperluas Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	90,42
		Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja	%	9,40

Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target Kinerja IKU
				2025
1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	PDRB (Harga Konstan) / Jumlah Tenaga kerja Bekerja	73,24
		Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)	$\frac{Jumlah\ tenaga\ kerja\ peserta\ jaminan\ sosial}{Total\ tenaga\ kerja}$ X 100	67,75

Indkator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2026 memiliki target sebesar 73,24%.
b. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial tenaga kerja memiliki target sebesar 67,75%.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan kondisi serta permasalahan yang dihadapi saat ini maka Dinas Ketenagakerjaan menyusun rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun prioritas sub kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan keluaran kegiatan yaitu tersusunnya Rencana Kerja (Renja), perubahan renja, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Perubahan RKA, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP), dan Laporan keuangan Dinas.
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan keluaran kegiatan terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan keluaran kegiatan Terselenggaranya pameran pembangunan dalam rangka HUT Tapanuli Selatan.
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, keluaran yang diharapkan adalah jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 5 orang dengan hasil meningkatnya kemampuan/pendidikan aparatur Dinas.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik selama 12 bulan.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, tersedianya pembelian alat-alat rumah tangga dan kebersihan OPD dengan target kinerja selama 12 bulan.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan keluaran yaitu tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya makanan dan minuman rapat bulanan selama 12 bulan.
- Penyediaan barang cetakan dan penggadaan, tersediaanya barang cetakan dan penggandaan Dinas Ketenagakerjaan 12 bulan.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, tersedianya pembayaran Koran, dan majalah selama 12 bulan.
- Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD, terlaksananya rapat – rapat konsultasi dan kordinasi dalam daerah dan luar daerah sebanyak 170 OH.
- Pengadaan kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 unit.
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan indikator kinerja yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yaitu tersedianya jasa tagihan listrik dan internet target 12 bulan.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, tersedianya biaya pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional selama 12 bulan.
- Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, terpeliharanya gedung kantor.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan melatih angkatan kerja untuk dididik menjadi tenaga yang terampil dan siap membuka usaha atau bekerja dalam usaha itu sendiri. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut:

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, pencari kerja yang mengikuti pelatihan menjahit, las listrik, computer, otomotif mobil dan barista sebanyak 176 orang. Pelatihan ini dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja sebanyak 35 unit.
- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indicator Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah 1 dokumen

3. **Program Penempatan Tenaga Kerja**

Adapun kegiatan yang terdapat pada program ini adalah

- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dengan indikator kinerja jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam Pasar kerja Melalui system online (karir hub) sebanyak 150 orang.

4. Program Hubungan Industrial

Program ini bertujuan agar tercipatanya ketenangan bekerja dan berusaha. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan. Dengan indikator kinerja Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan.
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan indicator Jumlah perselisihan yang dicegah sebanyak 6 kasus
- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota, jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan target 10 kasus.
- Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi.
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota, Laporan pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit 1 laporan.

5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan kawasan transmigrasi. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi dengan indikator kegiatan Terlaksananya survey calon lahan permukiman transmigrasi baru.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi, maka Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan membuat Usulan Program sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Daerah tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan kondisi serta permasalahan yang dihadapi saat ini maka Dinas Ketenagakerjaan menyusun rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun prioritas sub kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan keluaran kegiatan yaitu tersusunnya Rencana Kerja (Renja), perubahan renja, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Perubahan RKA, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP), dan Laporan keuangan Dinas dengan biaya sebesar Rp. 35.407.800,-.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan keluaran kegiatan terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan biaya sebesar Rp. 4.889.097.023,-
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 2 orang dengan hasil meningkatnya kemampuan/pendidikan aparatur Dinas Ketenagkerjaan dengan biaya sebesar Rp.10.250.000 ,-
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik selama 12 bulan dengan biaya sebesar Rp. 20.596.800,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, tersedianya pembelian alat-alat rumah tangga dan kebersihan OPD dengan target kinerja selama 12 bulan dengan biaya sebesar Rp. 17.742.800,-
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan keluaran yaitu tersedianya alat tulis kantor dan tersedianya makanan dan minuman rapat bulanan selama 12 bulan dengan biaya sebesar Rp. 54.286.000,-.
- Penyediaan barang cetakan dan penggadaan, tersediaanya barang cetakan dan penggandaan Dinas Ketenagakerjaan 12 bulan dengan biaya sebesar Rp. 23.124.500,-.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, tersedianya pembayaran Koran, dan majalah selama 12 bulan dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD, terlaksananya rapat – rapat konsultasi dan kordinasi dalam daerah dan luar daerah dengan biaya sebesar 228.460.000,-
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan indikator kinerja yaitu tersedianya

peralatan dan perlengkapan kantor dengan biaya sebesar Rp. 22.666.500,-

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yaitu tersedianya jasa tagihan listrik dan internet target 12 bulan dengan biaya sebesar Rp. 81.856.000,-.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, sebesar Rp. 45.870.000,-
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, tersedianya biaya pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional selama 12 bulan dengan biaya sebesar Rp. 126.180.000,-

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan melatih angkatan kerja untuk dididik menjadi tenaga yang terampil dan siap membuka usaha atau bekerja dalam usaha itu sendiri. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut:

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, pencari kerja yang mengikuti pelatihan menjahit, las listrik, computer, otomotif mobil dan barista sebanyak 80 orang dengan biaya sebesar Rp. 179.892.000,-. Pelatihan ini dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 166.770.100,-

3. **Program Penempatan Tenaga Kerja**

Adapun kegiatan yang terdapat pada program ini adalah

- Pelayanan dan informasi pasar kerja online dengan indicator kinerja jumlah jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir hub) sebanyak 80 orang dengan biaya Rp. 26.696.800,-

4. Program Hubungan Industrail

Program ini bertujuan agar tercipatanya ketenangan bekerja dan berusaha. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan. Dengan indicator kinerja laporan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan dengan biaya sebesar Rp. 3.146.346.500,-
- Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota, jumlah perselisihan yang dicegah target 6 perkaradengan biaya sebesar Rp. 24.248.100,-
- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota, jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan target 10 perkara dengan biaya sebesar Rp. 35.986.600,-
- Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi dengan biaya sebesar 33.981.000,-

- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota, Laporan pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit 1 laporan dengan biaya sebesar Rp. 38.685.700,-

5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan kawasan transmigrasi. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi dengan indikator kegiatan Terlaksananya survey calon lahan permukiman transmigrasi baru dengan biaya sebesar Rp. 46.216.100,-

Tabel 4.1

(Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tapanuli Selatan

Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH						**9,333,285,523.00**							**11,993,860,000.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8,636,161,323.00**							**10,613,700,000.00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**8,636,161,323.00**							**10,613,700,000.00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4,942,138,823.00**						**-**	**4,268,400,000.00**	
		[Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan]	**Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakata**	**100**	**95.70**	**100**	**100**	**4,942,138,823.00**	-	-	-	-	-	-	**4,268,400,000.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			n													
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	35,407,800.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	54,700,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	35,407,800.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		54,700,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4,889,097,023.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	4,178,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				264 Orang/ bulan	4,889,097,023.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		4,178,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	17,634,000.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	35,700,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17,634,000.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		35,700,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**388,075,800.00**						**-**	**1,561,000,000.00**	
		[Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja]	**Persentase Tenaga Kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya**	**29.61**	**21.17**	**22.65**	**23.26**	**388,075,800.00**	-	-	-	-	-	-	**1,561,000,000.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	346,662,100.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	1,436,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				176 Orang	179,892,000.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		876,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				36 Unit	166,770,100.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		560,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	41,413,700.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	125,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				0 Dokumen	41,413,700.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		125,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**26,696,800.00**						**-**	**410,000,000.00**	
		[Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri]	**Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan Persentase Pengangguran Terbuka Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri**	**3.03 67.74 97.87**	**3.41 61.26 86.91**	**3.34 61.26 88.65**	**3.28 63.14 90.42**	**26,696,800.00**	-	-	-	-	-	-	**410,000,000.00**	-
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	26,696,800.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem				150 Orang	26,696,800.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknolo	-		0.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Online (Karir Hub)									gi				
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	410,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				30 Orang	0.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		410,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**	**-**			**-**	**3,279,249,900.00**						**-**	**4,374,300,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		[Meningkatnya pekerja Kabupaten yang terlindungi]	**Angka sengketa pengusaha-pekerja Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**12750 8.68 9.79**	**11552 8.69 9.78**	**11552 8.86 9.59**	**11522 9.04 9.40**	**3,279,249,900.00**	-	-	-	-	-	-	**4,374,300,000.00**	-
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3,146,346,500.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	3,850,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	3,146,346,500.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		3,850,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	132,903,400.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	524,300,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				20 Perkara	24,248,100.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		98,700,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	35,988,600.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		97,500,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				35 Asosiasi dan Serikat Pekerja	33,981,000.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		134,700,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	38,685,700.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		193,400,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**41,216,100.00**							**95,300,000.00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**41,216,100.00**							**95,300,000.00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**			**-**	**41,216,100.00**						**-**	**95,300,000.00**	
		[Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,216,100.00**	-	-	-	-	-	-	**95,300,000.00**	-
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-			-	41,216,100.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	95,300,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	3.32.02.2.	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	01.0001															
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	41,216,100.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		95,300,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**655,908,100.00**							**1,284,860,000.00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**655,908,100.00**							**1,284,860,000.00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**655,908,100.00**						**-**	**1,284,860,000.00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**655,908,100.00**	-	-	-	-	-	-	**1,284,860,000.00**	-
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	92,400,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknolo	-		92,400,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												gi				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	38,250,000.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	53,200,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	28,000,000.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		53,200,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			0				10 0	10,250,000.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	341,085,600.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknolo	-	-	545,160,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												gi				
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,596,800.00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		24,300,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	17,742,800.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		29,260,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	54,286,000.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		67,400,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		27,500,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	228,460,000.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		396,700,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	22,666,500.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	312,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	22,666,500.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		312,000,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	127,726,000.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	94,500,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	81,856,000.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		94,500,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	45,870,000.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	126,180,000.00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	187,600,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	126,180,000.00	Kab. Tapanuli Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		187,600,000.00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
	J U M L A H							**9,333,285,523.00**							**11,993,860,000.00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Daerah Periode 2025-2029, dalam Rencana Kerja Tahun 2026 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026, dengan harapan digunakan sebagai berikut :

1. Panduan dan petunjuk kegiatan operasional di Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,
2. Sebagai instrument pengendali atau kontrol dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,

3. Sebagai instrument mengukur atau menilai kinerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentunya masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan penyusunan tahun-tahun yang mendatang.

Sipirok, 22 September 2025
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAERAH KAB. TAPANULI SELATAN

Drs. ACHMAD RAJA NASUTION,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730619 199203 1 002